COMMITTED TO PURSUE SUSTAINABLE GROWTH

Berkomitmen untuk Mengejar Pertumbuhan yang Berkelanjutan

ANNUAL REPORT 2012 PT BANK SULSELBAR

Melayani Sepenuh Hati

www.banksulselbar.co.id

MAKNA LOGO 51 TAHUN BANK SULSELBAR ADALAH EMPAT ETNIS

Logo 51 tahun Bank Sulselbar menggunakan motif tenun dari 4 suku besar di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Empat motif tenun tersebut telah sangat dikenal oleh masyarakat dunia tentang keindahannya. Selain itu falsafah hidup dari keempat suku tersebut sangat patut dicontoh oleh setiap individu yang ada di Bank Sulselbar. Seperti falsafah *sipakatau* dan *siri* yang sangat dipegang teguh suku Makassar dan Bugis, keramahtamahan yang sangat dijunjung tinggi oleh suku Mandar serta falsafah suku Toraja yaitu SUGI (Kaya), BARANI (Berani), MANARANG (Pintar), KINAWA(Nilai-nilai Luhur, Agamis dan Bijaksana). Ketenaran dan keindahan dari 4 motif tenun tersbut yang ingin diikut oleh Bank Sulselbar. Bank Sulsebar ingin lebih dikenal oleh masyarakat khususnya yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

COMMITTED TO PURSUE SUSTAINABLE GROWTH

Berkomitmen untuk Mengejar Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2012, Bank Sulselbar telah melaksanakan berbagai aksi korporasi untuk meningkatkan kinerja keuangan Bank dengan tetap mengedepankan produk dan layanan yang berorientasi pada nasabah *(customer oriented)*. Jaringan operasional yang luas dan mudah dijangkau, produk yang beragam dan kompetitif, pelayanan prima untuk menciptakan *service experience* yang berkualitas serta implementasi *prudential banking* dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik merupakan komitmen kami untuk mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan ke depannya dapat menjadi **Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia** sesuai dengan visi kami.

DAFTAR ISI

PROFIL PERUSAHAAN | 10
NILAI - NILAI | 12
LOGO | 14
IDENTITAS PERUSAHAAN | 18
SEJARAH SINGKAT | 20
LAPORAN DEWAN KOMISARIS | 22
LAPORAN DEWAN DIREKSI | 28
RANGKAIAN KEGIATAN PENTING TAHUN 2012 | 40
HAL-HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI PADA BANK SULSELBAR TAHUN 2013 | 42
PENGHARGAAN TAHUN 2012 | 43
REKAPITULASI GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN | 44
IKHTISAR DATA KEUANGAN | 48
INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN | 52
PROFIL ANAK PERUSAHAAN, PENYERTAAN SAHAM, YAYASAN, DANA PENSIUN, SERIKAT PEGAWAI DAN AFILIASI BANK SULSELBAR | 66
PEMERINGKATAN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT | 68
NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL | 69

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL | 70
TINJAUAN BISNIS KONSUMER | 72
TINJAUAN BISNIS MIKRO | 88
TINJAUAN BISNIS KOMERSIAL & KORPORASI | 90
UNIT USAHA SYARIAH | 92
PRODUK BERBASIS TEKNOLOGI | 104

TINJAUAN FUNGSIONAL | 110
TEKNOLOGI INFORMASI | 134
MANAJEMEN RISIKO | 136
JARINGAN | 226

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN | 230
TINJAUAN KEUANGAN | 232
PERBANDINGAN PROYEKSI DENGAN HASIL YANG DICAPAI | 260
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN | 262

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN RENCANA STRATEGIS | 264

(PROSPEK USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN STRATEGI | 276

LAPORAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* | 282
KERTAS KERJA 2012 | 338

DATA PERUSAHAAN | 386
STRUKTUR ORGANISASI | 388
BIOGRAFI DEWAN KOMISARIS | 390
BIOGRAFI DEWAN DIREKSI | 392
BIOGRAFI PEMIMPIN GRUP | 394
BIOGRAFI DEWAN PENGAWAS SYARIAH | 400
BIOGRAFI KOMITE AUDIT | 402
KOMITE PEMANTAU RISIKO | 403
KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI | 404
SEKRETARIS PERUSAHAAN | 405
PRODUK DAN LAYANAN | 408
JARINGAN OPERASIONAL | 416
PEMASARAN DAN PROMOSI | 428
REFERENSI BAPEPAM-LK | 432
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN | 445

BAB 1

PROFIL PERUSAHAAN

VISI

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Indonesia

MISI

- Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
- Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
- Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*

SEMBOYAN

"Melayani Sepenuh Hati"

NILAI – NILAI

Nilai – nilai Budaya merupakan pedoman yang telah disepakati dan tertanam pada seluruh karyawan Bank Sulselbar yang menjadi acuan atau panduan perilaku untuk mencapai visi dan misi Bank Sulselbar. Bank Sulselbar menguraikan nilai – nilai budaya perusahan ke dalam 5 (lima) panduan perilaku yang disingkat dengan PRIORITAS PRIMA.

PRofesional

Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli dibidangnya agar dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat tepat dan akurat.

- Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan sasaran yang lebih besar
- Bertindak cermat dengan melakukan *check & re-check* pada setiap kesempatan
- Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan
- Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan
- Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisien
- Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai bidang pekerjaan

InOvasi

Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan dan dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan siap untuk mengantisipasi perubahan

- Berpikir di luar kerangka kelaziman untuk menemukan solusi terbaik
- Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengembangan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan
- Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi
- Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun
- Proaktif dalam mengantisipasi perubahan
- Belajar dari keberhasilan dan kegagalan untuk kemajuan perusahaan

keRjasama

Kami meningkatkan sinergi antar individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik antar individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan

- Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan
- Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unit-unit kerja terkait
- Selalu siap membantu satu sama lain untuk mencapai kepentingan bersama
- Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan
- Menerima dan memberikan kritik dengan baik
- Saling menghormati dan mengapresiasi

PRIORITAS PRIMA

Nilai – nilai budaya Bank Sulselbar ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/159/DIR/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Penetapan Nilai – Nilai Budaya Kerja PT Bank Sulsel.

integrITAS

Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, satunya kata dengan perbuatan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi

- Jujur
- Satunya kata dengan perbuatan
- Berani menindak atau melaporkan segala bentuk penyimpangan
- Menjaga rahasia perusahaan
- Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar
- Mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan unit kerja

layanan PRIMA

Kami memberikan layanan dengan sepenuh hati, menggunakan kemampuan maksimal, layanan yang cepat dan tepat serta memberikan nilai tambah sesuai standar layanan untuk mencapai kepuasan dan loyalitas nasabah

- Memberikan layanan dengan sepenuh hati
- Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun) setiap saat
- Memberikan nilai tambah kepada nasabah
- Memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat
- Menjalankan standard layanan dengan konsisten
- Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah

LOGO

PERUBAHAN NAMA DAN LOGO

Perubahan Nama

Pada tahun 2005 telah dilakukan perubahan nama dari Bank BPD Sulsel menjadi Bank Sulsel sejalan dengan perubahan status hukum bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan nama dan status hukum bank dilakukan dalam rangka meningkatkan layanan, baik produk maupun jasa, kepada masyarakat menjadi lebih baik dan meningkatkan daya saing bank sehingga mampu berkembang dan menjadi *bank of choice* masyarakat di daerah sendiri.

Perubahan status dan nama bank diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.

Akta Pendirian Perseroan Terbatas telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541. HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005. Perubahan status hukum juga diikuti dengan peningkatan Modal Dasar bank dari Rp 25 Miliar menjadi Rp650 Miliar. Penetapan perubahan nama dan status badan hukum bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/041/DIR tanggal 31 Mei 2005 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel. Perubahan status hukum bank juga berimplikasi pada perubahan sebutan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Dewan Komisaris PT Bank Sulsel dan perubahan sebutan Ketua Dewan Pengawas menjadi Komisaris Utama dan Anggota Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi Komisaris PT Bank Sulsel.

Pada tahun 2011, PT Bank Sulsel mengalami perubahan nama menjadi PT Bank Sulselbar. Perubahan nama tersebut seiring dengan penambahan setoran modal saham oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se- Sulawesi Barat. Perubahan nama tersebut telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765. AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP.GBI/2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar. Dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/043A/DIR/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Perubahan Nama dan Logo PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Perubahan logo bank dari imaginatif BPD menjadi imaginatif layar/perahu/*sompe'* sebagaimana logo yang saat ini digunakan dilakukan melalui sayembara desain logo pada tahun 2005.

Kemakmuran, kesuburan, kesejahteraan, penyegaran, alam, simbol dari kehidupan.

Corporate, *mature*, elegan, stabil, konstan, kokoh,handal, pengalaman, dapat diandalkan, wakil dari air dan langit (harapan).

BankSulselbar

Perubahan Logo

Perubahan nama dan status hukum bank dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diikuti pula dengan perubahan identitas visual atau logo bank. Perubahan logo bank dari imaginatif BPD menjadi imaginatif layar/perahu/*sompe*' sebagaimana logo yang saat ini digunakan dilakukan melalui sayembara desain logo pada tahun 2005. Sayembara logo PT Bank Sulselbar diikuti ratusan peserta yang proses penjuriannya dilakukan secara transparan dan independen dengan melibatkan budayawan dan konsultan grafis. Penetapan pemenang sayembara logo berdasarkan Hasil Keputusan Dewan Juri dalam Berita Acara Sayembara Logo PT Bank Sulsel tanggal 08 Juli 2005 yang memilih 2 (dua) nominator karya logo unggulan.

Logo yang ditetapkan sebagai pemenang sayembara logo PT Bank Sulsel yaitu nominator pertama atas nama Rusmin dengan desain logo imaginatif layar/perahu/*sompe*' yang mencerminkan unsur budaya Sulawesi Selatan bermakna bepergian mencari rezeki dan telah menjadi identitas visual bank sampai saat ini. Pemenang sayembara logo PT Bank Sulsel ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/081/DIR tanggal 29 Oktober 2005 tentang Penetapan Pemenang Sayembara Logo PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Logo baru PT Bank Sulsel telah pula didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Departemen Hukum dan HAM sebagai milik bank. Logo baru bank yang telah didaftarkan pada Dirjen HAKI ditetapkan penggunaannya mulai Desember 2005 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/094/DIR tanggal 22 Desember 2005 tentang Penetapan Penggunaan Logo Baru PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Perubahan nama bank dari PT Bank Sulsel menjadi PT Bank Sulselbar juga diiringi perubahan logo bank. Namun perubahan logo bank tidak mengubah logo secara keseluruhan melainkan hanya penambahan karakter visual pada logo serta pergeseran posisi imaginatif layar/perahu/*sompe*' agar sejajar dengan karakter visual nama bank, yaitu Bank Sulselbar. Identitas visual PT Bank Sulselbar telah didaftarkan pada Dirjen HAKI u.b. Direktur Hak Cipta Desain Industri, Desain Tata letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang dengan surat pendaftaran ciptaan nomor : 050509 tanggal 15 April 2011.

Bank Sulselbar

IDENTITAS PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan & Sulawesi Barat
NAMA PANGGILAN	PT Bank Sulselbar
KANTOR PUSAT	Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar Makassar, 90125
ALAMAT SITUS	www.banksulselbar.co.id
TELEPON	(+62 411) 859 171 - *Hunting*
FAKSIMILI	(+62 411) 859 178
TANGGAL DIDIRIKAN	13 Januari 1961
TANGGAL BEROPERASI	13 Januari 1961
MODAL DASAR	Rp 1.600.000.000.000,-

MODAL DISETOR	Rp 528.739 juta
NPWP	01.134.213.6.812.000
TDP	503/0006/TDPPT-P/04/KPAP
SIUP	503/0005/SIUPB-P/04/KPAP
PEMILIK	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 216.000 juta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan sebesar Rp 280.953 juta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp2.000 juta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Barat sebesar Rp 29.786 juta
JUMLAH ASET	Rp 8.014.158 juta
JUMLAH KANTOR	1 (satu) Kantor Pusat 3 (tiga) Kantor Cabang Utama 27 (dua puluh tujuh) Kantor Cabang 3 (tiga) Kantor Cabang Syariah 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu 38 (tiga puluh delapan) Kantor Kas 72 (enam puluh enam) ATM yang tergabung dengan 44.360 terminal ATM jaringan ATM Bersama 6 (enam) *Payment Point* 3 (tiga) Mobil Kas Keliling 25 (dua puluh lima) Kantor Layanan Syariah Syariah
JUMLAH KARYAWAN	1.074 (2012) 1.037 (2011)

INFORMASI UNIT USAHA SYARIAH

NAMA	Bank Sulselbar Syariah
KATEGORI	Unit Usaha Syariah
ALAMAT SITUS	www.banksulselbar.co.id
TANGGAL DIDIRIKAN	28 April 2007
TANGGAL BEROPERASI	28 April 2007
TOTAL ASET	Rp454.864 juta
JUMLAH KANTOR	3 (tiga) kantor cabang yaitu Cabang Syariah Sengkang, Cabang Syariah Maros dan Cabang Syariah Makassar
KANTOR CABANG	25 (dua puluh lima) Kantor Layanan Syariah Bank Sulselbar

Gedung Pertama BPD Sulsel

SEJARAH SINGKAT

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Perseroan) didirikan dengan nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dan penetapan modal dasar menjadi Rp25 miliar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13 tahun 2003 tentang Perubahan Status Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dari PD menjadi PT dengan Modal Dasar Rp650.000.000.000,-.

1961 1964 1993

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dilebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp250.000.000,-. Dengan pemisahan antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 1976 tentang Perubahan Pertama Kalinya Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pendirian Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.

...para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Kantor Pusat Bank Sulselbar

BankSulsel

Akta Pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan No. C-31541. HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

BankSulselbar

Berdasarkan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulsel, Nomor 16 Tanggal 10 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar, para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan nama Bank telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02 tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 13/32/KEP.GBI/2011 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

2004 2009 2011

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar, jo Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-46963.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 30 September 2009, dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063272.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90 tanggal 10 November 2009, Tambahan No. 26944 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sulsel yaitu dengan meningkatkan besarnya Modal Dasar menjadi sebesar Rp1.600.000.000.000,-, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No: AHU–46963.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009.

Kantor Pusat Bank Sulselbar sebelum direnovasi

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Bank Sulselbar dapat melalui tahun 2012 dengan pencapaian yang cukup baik dibandingkan tahun 2011.

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar merayakan hari ulang tahun yang ke-52. Bank Sulselbar telah melakukan transformasi organisasi dan layanan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya menuju BPD *Regional Champion* (BRC) Tahun 2014. Bank Sulselbar akan senantiasa berorientasi kepada nasabah untuk meningkatkan kemampuan dalam menyediakan layanan yang komprehensif.

I. KINERJA BANK SULSELBAR TAHUN 2012

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris menilai bahwa dalam tahun 2012 jajaran manajemen dan seluruh karyawan Bank Sulselbar telah bekerja secara maksimal. Dengan kemampuan karyawan yang semakin baik telah mampu memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan dan pengembangan Bank ini ke arah yang makin baik, terutama dalam mewujudkan visi dan misinya untuk pembangunan daerah, tahapan dan target menuju BRC (BPD *Regional Champion*).

Secara umum kinerja Bank Sulselbar sampai dengan akhir Desember 2012 telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik dibandingkan pada bulan Desember 2011. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut :

Rp Juta

NO	Uraian	Realisasi		Naik/Turun (%)
		2011	2012	
1.	Total Aset	7.290.471	8.014.158	9,93%
2.	Total Kredit & Pembiayaan	5.393.094	6.115.053	13,39%
3.	Total Dana Pihak Ketiga	5.291.085	5.401.642	2,09%
4.	Ekuitas	487.477	528.739	8,46%
5.	Laba Bersih	253.489	276.466	9,06%
6.	Aktiva Produktif	6.324.796	6.911.260	9,27%
7.	CAR	23,62%	21,91%	-
8.	NPL (*Gross*)	2,02%	1,39%	-
9.	NPL (*Net*)	1,82%	0,48%	-
10.	ROA	3,34%	3,99%	-
11.	ROE	32,24%	26,37%	-
12.	NIM	10,18%	9,53%	-
13.	BOPO	72,13%	71,66%	-
14.	LDR	101,93%	113,21%	-

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum, dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & *Anti Fraud* dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Selain itu, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja Bank Sulselbar, Dewan Komisaris beserta Komite telah melakukan rapat – rapat pembahasan atas surat – surat dan Laporan Direksi dan memberikan petunjuk dan arahan untuk ditindaklanjuti oleh Direksi untuk perkembangan Bank.

Dalam rangka pengawasan aktif, Dewan Komisaris dibantu oleh anggota Komiten Dewan Komisaris dan pembentukannya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi sebagai sebagai berikut :

1. Komite Audit, sesuai dengan tugas Komite Audit yang ditetapkan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 dan Surat Keputusan Direksi masing – masing SK/059/DIR/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sementara ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar dan SK/057/DIR/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sementara Ketua Komite Audit PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2012 telah melakukan tugas – tugas antara lain sebagai berikut :

   a. Rapat – rapat meliputi rapat intern Komite Audit dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

   b. Evaluasi LHP Umum terhadap LHP Umum GAI meliputi evaluasi atas temuan tahun lalu yang belum ditindaklanjuti dan temuan saat ini beserta rekomendasi serta *Risk Based Audit*.

   c. Evaluasi LHP Khusus atas temuan kasus/permasalahan pada kantor – kantor cabang.

   d. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Umum dan Khusus GAI dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan *Audit Charter.*

   e. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan tahunan Tahun Buku 2012.

2. Komite Pemantau Risiko, sesuai dengan tugas Komite Audit yang ditetapkan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/086/DIR/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2012 telah melakukan tugas – tugas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris antara lain sebagai berikut :

   a. Rapat – rapat yang meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Pemantau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko.

   b. Selain rapat intern, Komite Pemantau Risiko juga melakukan rapat dengan Satuan Kerja terkait, yaitu Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan, Grup *Treasury*, Grup Teknologi Informasi dan Grup SDM.

   c. Semua hasil/kesimpulan rapat, baik intern maupun rapat dengan Grup yang strategis telah dibuat rekomendasi dalam bentuk surat kepada dewan Komisaris dan diteruskan ke Direksi untuk ditindaklanjuti.

> Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris menilai bahwa dalam tahun 2012 jajaran manajemen dan seluruh karyawan Bank Sulselbar telah bekerja secara maksimal.

Untuk itu, komunikasi interaktif, iklim kerja yang positif dan *team work* yang solid senantiasa dibangun oleh segenap manajemen dan karyawan Bank Sulselbar untuk mencapai kinerja yang maksimal.

3. Komite Remunerasi dan Nominasi, sesuai dengan tugas Komite Audit yang ditetapkan dalam PBI No. 8/4/PBI/2006 dan Surat Keputusan Direksi masing – masing No. SK/058/DIR/IV/2012 tanggal 30 April 2012 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Sementara Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar dan No. SK/05/DIR/VII/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar, maka selama tahun 2012 melakukan tugas – tugasnya antara lain sebagai berikut :

   a. Rapat – rapat yang meliputi rapat intern Komite Remunerasi dan Nominasi dan Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.

   b. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
      1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
      2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
         a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
         b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

   c. Terkait dengan kebijakan nominasi
      1) Menyusun mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
      2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
      3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c, kepada Dewan Komisaris

   d. Wajib memastikan bahwa kebijakan paling kurang sesuai dengan :
      1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
      2) Prestasi kerja individual
      3) Kewajaran dengan *peer group*
      4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka pendek dan jangka panjang bank

II. PROSPEK USAHA BANK

Menyikapi beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia termasuk diantaranya *blue print*/cetak biru BPD *Regional Champion* pada tahun 2014, dimana setiap BPD harus dapat menjadi juara di daerahnya masing –masing dengan cara menjadi lembaga keuangan yang kuat dan berperan lebih aktif dalam membangun daerah serta meningkatkan layanan dan akses masyarakat kepada Bank Pembangunan Daerah (*Agent of Development)* serta kondisi finansial dan sistem moneter penuh dengan tantangan persaingan yang mana tentunya perlu diantisipasi dengan baik oleh Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Oleh karenanya Dewan Komisaris menyambut baik pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi yang menghendaki adanya transformasi Bank Sulselbar menjadi *Great Company* dan *Center Of Excellence* yang meliputi *Good Corporate Governance*, *Human Resources, Perfomance, Service dan Corporate Social Responsibilty* yang dieksekusi secara baik guna mewujudkan pernyataan visi Bank Sulselbar adalah menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan sumber daya manusia yang professional serta memberikan nilai tambah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat. Sedangkan misi Bank Sulselbar adalah :

1. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
2. Mitra Strategis PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
3. Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholder*

Untuk itu, komunikasi interaktif, iklim kerja yang positif dan *team work* yang solid senantiasa dibangun oleh segenap manajemen dan karyawan Bank Sulselbar untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selain itu dukungan baik moril maupun berupa modal terutama dari para Pemegang Saham, kemitraan yang saling menguntungkan dengan nasabah, dan seluruh pemangku kepentingan.

III. ADAPUN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS SEBAGAI BERIKUT ;

- **H. A. Muallim SH, M.Si**
  Komisaris Utama

- **H. A. Tjoneng Mallombasang**
  Komisaris Independen

- **N. Ikawidjaja**
  Komisaris Independen

Pada tahun 2012, susuan Dewan Komisaris Bank Sulselbar yaitu komposisi Dewan Komisaris berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) dan 2 (dua) komisaris independen, dimana pada RUPS Luar Biasa Desember 2012 Komisaris atas nama Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang telah diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Independen.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- Secara umum kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2012 telah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari terlampauinya beberapa target yang telah ditetapkan.

- Kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2011 secara umum baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat pada Desember 2011. Kinerja ini diharapkan semakin ditingkatkan di masa yang akan datang.

- Berdasarkan penilaian kinerja dari 4 (empat) faktor, yaitu Faktor Profil Risiko, Faktor *Good Corporate Governance*, Faktor Entabilitas dan Faktor Permodalan, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum secara keseluruhan berdasarkan faktor penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko, maka kinerja Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan Desember 2012 dengan peringkat 3 (Cukup baik).

Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Tak lupa pula kami mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun yang Ke – 52, semoga di usia ini Bank Sulselbar semakin bertumbuh dan berjaya dalam melayani kebutuhan perbankan masyarakat dan pemerintah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan bahkan di wilayah Indonesia Bagian Timur.

Segenap jajaran Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para pemegang saham, nasabah, mitra bisnis dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang telah memberikan dukungan, kepercayaan dan kerjasamanya kepada Bank Sulselbar.

Kinerja Bank Sulselbar yang membaik selama tahun 2012 tentunya tidak lepas dari upaya, dedikasi dan kerja keras jajaran Direksi dan manajemen serta seluruh karyawan(i) Bank Sulselbar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank Sulselbar Tahun 2012.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

H. A. Muallim, SH, MSi
Komisaris Utama

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Yang Kami Hormati,
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, berkah dan hidayah yang diberikan kepada Bank Sulselbar untuk dapat menyampaikan laporan atas kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2012 dengan hasil yang menggembirakan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

KINERJA KEUANGAN

Tahun 2012 telah berhasil kami lewati dengan hasil yang patut dibanggakan seiring kondusifnya perekonomian domestik yang mendorong pertumbuhan kinerja Bank Sulselbar dalam mewujudkan pencapaian rencana dan strategi Bank sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014. Di samping itu, persaingan yang semakin ketat, khususnya di industri perbankan, terus memacu Bank Sulselbar untuk senantiasa mempersiapkan diri secara konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dalam rangka menjaga dan memperbaiki momentum pertumbuhan yang telah dicapai dan akan kami raih di masa mendatang. Pencapaian – pencapaian yang telah kami raih sepanjang 2012 adalah sebagai berikut :

Pencapaian laba bersih Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar Rp276.466 juta dan melampaui target RBB Tahun 2012 – 2014 senilai Rp273.042 juta serta mengalami kenaikan 9,06% dari tahun 2011 sebesar Rp253.489 juta. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan bunga tahun 2012 sebesar 13,94% menjadi Rp1.096.743 juta dan pendapatan bunga bersih yang juga bertumbuh 15,51% atau sebesar Rp738.272 juta. Peningkatan pendapatan bunga disebabkan adanya kenaikan portofolio kredit sebesar 13,39% yakni senilai Rp6.115.053 juta dengan pertumbuhan tertinggi pada Kredit Umum Lainnya sebesar Rp26,88%.

Net Interest Margin Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar 9,53% atau lebih rendah dari NIM tahun 2011 sebesar 10,18%. Penurunan rasio NIM tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang masih lebih kecil dibandingkan persentase pertumbuhan beban operasional. Akan tetapi, sekalipun marjin pendapatan bunga lebih rendah pada tahun 2012, Bank Sulselbar masih dapat mempertahankan marjin pendapatan bunga bersih di atas 5%.

Tahun 2012 telah berhasil kami lewati dengan hasil yang patut dibanggakan seiring kondusifnya perekonomian domestik yang mendorong pertumbuhan kinerja Bank Sulselbar dalam mewujudkan pencapaian rencana dan strategi Bank sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012 – 2014.

Beban bunga pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp358.471 juta dan meningkat 10,83% dibandingkan tahun 2011. Meningkatnya simpanan dana pihak ketiga, baik konvensional maupun syariah, sebesar 2,09% dan sumber pembiayaan lainnya merupakan faktor pendorong pertumbuhan beban bunga Bank di tahun 2012.

Total aset Bank Sulselbar pada tahun 2012 senilai Rp8.014.158 juta atau meningkat 9,93% dibandingkan tahun 2011. Pertumbuhan total aset ini dipengaruhi oleh kenaikan kredit dan pembiayaan syariah sebesar 13,39% menjadi Rp6.115.053 juta pada tahun 2012, dari Rp5.393.094 juta di 2011.

Rasio-rasio keuangan Bank Sulselbar selama tahun 2012, antara lain Rasio Kecukupan Modal *(Capital Adequacy Ratio/CAR)* menurun dari 23,62% di 2011 menjadi 21,91%. Penurunan ini disebabkan peningkatan atas aktiva produktif, khususnya peningkatan portofolio kredit umum lainnya. Namun demikian, struktur permodalan kami masih tetap memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko kredit dan risiko operasional karena rasio kecukupan modal Bank Sulselbar masih lebih tinggi dari kewajiban pemenuhan modal minimum yang ditetapkan Bank Indonesia yakni minimal 8%.

> Bank Sulselbar tidak hanya harus bersaing dengan bank – bank nasional milik pemerintah maupun swasta dan bank – bank asing dengan produk dan layanan serta sistem teknologi informasi yang lebih mapan dan terkini.

Pada tahun 2012 juga telah dilakukan perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*/NPL) dari 2,02% pada tahun 2011 menjadi 1,39% di 2012. Hal ini berarti bahwa risiko kredit selama tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Di samping itu juga wujud upaya nyata Bank Sulselbar untuk memaksimalkan penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah yang meliputi penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit, hapusbuku kredit dan atau cara – cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang perundang – undangan yang berlaku. Di samping itu, telah dibentuk Tim Khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui Surat Keputusan (SK) Direksi.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit agar rasio NPL tidak melampaui ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 5% sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2011 tanggal 26 Desember 2001.

Rasio Kredit terhadap Simpanan Dana Pihak Ketiga *(Loan to Deposit Ratio/ LDR)* meningkat menjadi 113,21% di tahun 2012 dibandingkan LDR tahun 2011 sebesar 101,93%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan kredit dan pembiayaan sebagai aset Bank yang lebih tinggi dari peningkatan simpanan dana pihak katiga yang merupakan sumber pembiayaan pada tahun 2012.

Rasio Imbal Hasil Rata-Rata Ekuitas (*Return on Equity*/*ROE*) mengalami penurunan dari 32,24% menjadi 26,37% yang dipengaruhi oleh peningkatan total ekuitas yang masih lebih tinggi dibandingkan perolehan laba bersih tahun 2012. Rasio Imbal Hasil Rata-Rata Aktiva *(Return on Asset/ROA)* meningkat menjadi 3,99% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar

3,34%. Peningkatan rasio ROA tahun 2012 menunjukkan bahwa aset yang dikelola Bank Sulselbar dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja finansial Bank Sulselbar selama tahun 2012 didukung pula program efisiensi yang tepat guna dan tepat sasaran yang dapat memaksimalkan efisiensi rasio BOPO pada akhir tahun 2012 menjadi 71,66% dibandingkan tahun 2011 sebesar 72,13%.

Bidang Pembiayaan

Total kredit dan pembiayaan yang disalurkan selama tahun 2012 senilai Rp6.115.053 juta atau meningkat 13,39% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp5.393.094 juta. Kenaikan penyaluran kredit dan pembiayaan dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit lainnya (kredit konsumtif) sebesar 26,88% menjadi Rp4.610.123 juta di tahun 2012, dari Rp3.633.426 juta tahun 2011.

Kredit lainnya mendominasi total kredit dan pembiayaan tahun 2012 sebesar 75,39%, yang diikuti kredit investasi dengan porsi 13,39%, kredit modal kerja 10,98% dan KPR 0,24%.

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar telah menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp87.872 juta sehingga total kredit dan pembiayaan yang diberikan setelah dikurangi CKPN yaitu sebesar Rp6.027.181 juta. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2012 lebih rendah dari perhitungan CKPN tahun 2011 sejalan dengan penurunan rasio NPL dari 2,02% pada tahun 2011 menjadi 1,39% pada tahun 2012. Hal ini juga berarti bahwa risiko kredit selama tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2011.

Bank Sulselbar juga ikut serta dalam pembiayaan sindikasi untuk membiayai proyek – proyek pembangunan yang belum mampu dilakukan oleh Bank Sulselbar dengan menggunakan dana maupun *resource* sendiri akibat keterbatasan yang dimiliki, serta sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Peran Bank Sulselbar dalam proyek sindikasi di tahun 2012 ini sebagai *participant* untuk membiayai proyek *Fast Track Program* 10.000 MegaWatt pada PT. PLTU Kalimantan Selatan, Papua, Sulawesi Selatan dan Bangka Belitung sebesar Rp Rp17.968 juta serta proyek pembangunan pabrik PT. Semen Tonasa V senilai Rp10.297 juta.

Bidang Pendanaan

Simpanan nasabah atau dana pihak ketiga merupakan sumber pendanaan Bank Sulselbar yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Simpanan nasabah merupakan kontribusi pendanaan terbesar yakni sekitar 79,53% dari total liabilitas tahun 2012. Total simpanan nasabah Bank Sulselbar tahun 2012 mencapai Rp5.401.642 juta, meningkat sebesar 2,09% dari tahun 2011.

Persaingan dalam dunia usaha perbankan semakin tinggi intensitasnya, yang antara lain meliputi persaingan tingkat suku bunga, layanan yang diberikan, luasnya jaringan, dan fitur-fitur yang diberikan. Berbagai strategi diterapkan Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan dan target bisnis, diantaranya dengan menawarkan produk, layanan dan fasilitas baru yang dimiliki ataupun menambah fitur-fitur dari produk, layanan atau fasilitas yang sudah tersedia dengan tetap berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Bank Sulselbar juga berupaya untuk meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga dengan produk yang beragam untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Saat ini produk pendanaan Bank Sulselbar terdiri dari giro, tabungan, dan deposito. Beberapa inovasi yang dilaksanakan pada 2012 untuk menarik nasabah melakukan simpanan di Bank Sulselbar antara lain pemberlakuan tingkat suku bunga tabungan secara *tiering* atau bertingkat berdasarkan nominal saldo minimum dan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dan petani/nelayan tidak dikenakan biaya administrasi yang pada akhirnya memacu nasabah untuk terus meningkatkan jumlah saldo simpanannya pada Bank Sulselbar. Pendanaan yang diperoleh Bank Sulselbar dari tabungan pada akhir tahun 2012 sebesar 21,21% dari total kewajiban atau 26,67% terhadap total dana pihak ketiga.

Adapun sumber pendanaan lainnya bagi Bank Sulselbar selain simpanan masyarakat dalam bentuk simpanan dana pihak ketiga, antara lain Simpanan dari Bank Lain, Surat Berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan liabilitas lainnya yang mencapai 20,47% dari total liabilitas tahun 2012 yang dicatat sebagai kewajiban Bank dalam laporan keuangan.

Ke depan, Bank Sulselbar akan berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan portofolio pendanaan komersial dengan menjaring nasabah baru serta memelihara dan mengoptimalkan jangkauan layananan bagi *existing* nasabah.

Unit Usaha Syariah

Kinerja keuangan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar selama tahun 2012 sangat membanggakan dengan perolehan laba rugi yang meningkat signifikan mencapai 60,30% menjadi Rp17.991 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp11.223 juta. Pembiayaan syariah mencatatkan kenaikan sebesar 42,54% pada tahun 2012 yakni dari Rp259.959 juta pada tahun 2011 menjadi Rp370.557 juta. Peningkatan penyaluran pembiayaan syariah Bank Sulselbar tahun 2012 juga dipengaruhi dengan diluncurkannya produk baru pembiayaan syariah yang menggunakan akad *Qardh* yaitu Gadai Emas Berkah iB.

Produk pembiayaan Gadai Emas Berkah iB bertujuan untuk menyediakan alternatif pembiayaan kepada nasabah yang disalurkan berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai aset yang digadai/dijaminkan kepada Bank dan Bank mengenakan imbal jasa atas penyimpanan aset yang digadai/dijaminkan tersebut. Gadai Emas Berkah iB diharapkan dapat menjadi solusi kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan konsumtif atau untuk keperluan usaha (produktif). Total penyaluran dana untuk pembiayaan Gadai Emas Berkah iB sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.214 juta atau sebesar 1,41% dari total pembiayaan UUS Bank Sulselbar.

Pendanaan UUS Bank Sulselbar pada tahun 2012 peningkatannya mencapai 73,96% menjadi Rp239.173 juta dari Rp137.484 juta di tahun 2011. Pendanaan UUS Bank Sulselbar bersumber dari 18.369 rekening dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Jumlah rekening dana pihak ketiga UUS Bank Sulselbar meningkat 51% dibandingkan tahun 2011 sebesar 12.132 rekening. Porsi total DPK UUS terhadap total DPK konsolidasi tahun 2012 sebesar 4,43%.

Di samping itu, untuk meningkatkan sumber pendanaan, khususnya dana murah dalam bentuk tabungan, UUS Bank Sulselbar telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan melalui produk tabungan syariah *co-branding* antara lain dengan Universitas Muslim Indonesia dalam hal pengelolaan SPP mahasiswa secara *online*, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Prov. Sulsel dan kerjasama pengelolaan dana pada instalasi farmasi Rumah Sakit Islam (RSI) Ibnu Sina.

Untuk mendorong pertumbuhan aset UUS Bank Sulselbar, maka deposito berjangka *Mudharabah* yang merupakan pendukung pendanaan, pada tahun 2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yakni sebesar 93,79%. Oleh karena itu, total aset UUS Bank Sulselbar pada tahun 2012 bertumbuh 30% menjadi Rp454.864 juta dari Rp349.864 juta di tahun 2011.

Memperhatikan kinerja keuangan UUS Bank Sulselbar sepanjang tahun 2012 yang bertumbuh signifikan dibandingkan tahun – tahun sebelumnya, maka Bank Sulselbar memiliki keyakinan bahwa UUS Bank Sulselbar telah dapat memenuhi kebutuhan dan menjadi pilihan nasabah dan masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Bidang Layanan

Sampai dengan Desember 2012, jumlah jaringan jaringan kantor Bank Sulselbar mencapai 79 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jaringan kantor Bank Sulselbar terdiri dari 3 Kantor Cabang Utama, 27 Kantor Cabang Konvensional, 3 Kantor Cabang Syariah, 2 Kantor Cabang Pembantu, 38 Kantor Kas, 6 *Payment Point*, 72 ATM, 3 Mobil Kas Keliling dan 25 *Office Channeling Syariah* (Konter Layanan Syariah).

Jaringan kantor yang luas dan mencakup hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat akan semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkau dan menggunakan jasa perbankan Bank Sulselbar. Nasabah Bank Sulselbar dapat pula menikmati kemudahan bertransaksi dengan menggunakan fasilitas ATM Bank Sulselbar yang telah tergabung dalam jaringan ATM Bersama.

Dalam rangka meningkatkan utilitas Kartu ATM Bank Sulselbar, maka pada tahun 2013 yang akan datang telah direncanakan untuk bergabung dengan Jaringan Prima Debit dan ATM Prima, yang prosesnya telah berlangsung sejak tahun 2012. Dengan demikian, diharapkan paling lambat pertengahan tahun 2013, nasabah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar sudah dapat mempergunakan Kartu ATM sebagai Kartu Debit dan dapat pula bertransaksi tidak hanya pada Jaringan ATM Bersama, tetapi juga pada Jaringan ATM Prima.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menambah fungsi Kartu ATM dalam rangka memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan aktivitas transaksi harian dimana pun dan kapan pun. Nasabah dapat menggunakan Kartu ATM Bank Sulselbar untuk melakukan membayar tagihan listik, telepon selular (pra dan pasca bayar) dan transfer rekening sesama nasabah Bank Sulselbar maupun dengan bank lain. Semua layanan tersebut tersedia karena Bank Sulselbar telah menandatangani perjanjian dengan penyedia jasa atau pihak ketiga yang terkait layanan tersebut.

Langkah progresif lainnya yang juga telah berlangsung dan berproses selama tahun 2012 yakni rencana Bank Sulselbar untuk menerbitkan Kartu Kredit Bank Sulselbar yang diperkirakan sudah mulai dapat diluncurkan ke publik pada Semester II tahun 2013. Penerbitan Kartu Kredit Bank Sulselbar selain untuk menyediakan produk yang lebih beragam kepada nasabah, juga merupakan bagian dari strategi untuk memberikan *value creation* dan meningkatkan layanan kepada nasabah. Peluncuran Kartu Kredit Bank Sulselbar akan dilakukan secara *co-brand* melalui kerjasama dengan Bank Mandiri sebagai pengelola dan penerbit kartu kredit dan Bank Sulselbar akan berperan sebagai *marketing agent* kartu kredit kepada nasabah Bank Sulselbar.

TANTANGAN

Pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang merupakan wilayah basis operasional Bank Sulselbar, dan bahkan berada di atas rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi faktor penting bagi berkembangnya aktivitas perekonomian terutama perbankan di kedua wilayah tersebut. Sulawesi Selatan merupakan jalur penghubung antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur yang memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas bisnis dan ekonomi serta menjadi tolok ukur perekonomian di kawasan Indonesia Timur. Adapun Sulawesi Barat yang merupakan pemekaran dari Sulawesi Selatan adalah provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada tahun 2012. Hal tersebut disebabkan oleh karena tingginya arus investasi yang masuk ke wilayah tersebut dan didukung pula dengan potensi alam sebagai penghasil minyak kelapa sawit terbesar.

Oleh karena itu, tingkat persaingan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi sangat kompetitif, khususnya industri perbankan. Bank Sulselbar tidak hanya harus bersaing dengan bank – bank nasional milik pemerintah maupun swasta dan bank – bank asing dengan produk dan layanan serta sistem teknologi informasi yang lebih mapan dan terkini. Bank Sulselbar juga harus berkompetisi dengan Bank Pembangunan Daerah lainnya yang sudah memasuki pangsa pasar di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Bank Sulselbar memandang persaingan yang sangat ketat ini sebagai sebuah tantangan untuk pertumbuhan bisnis yang progresif dan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan sehingga dapat menguasai *market share* di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang merupakan basis wilayah operasional Bank Sulselbar, serta meraih *market share* secara lebih luas lagi bukan hanya di wilayah sendiri namun pada jangkauan wilayah yang lebih luas lagi.

PROSPEK DAN STRATEGI

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 diproyeksikan akan lebih baik dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan perkiraan peningkatan gradual kinerja ekonomi dunia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,3% -6,8% dengan proyeksi inflasi sebesar 4,5+1%. Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, baik konsumsi maupun investasi. Industri perbankan Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan bertumbuh sekitar 20% yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kelas menengah *(middle income group)* yang menjadi potensi pasar *consumer* banking yang sangat kuat dan berdampak pada peningkatan kredit konsumsi. Di samping itu, sektor infrastruktur terkait Program MP3EI (*Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sementara berlangsung dan turunannya memberikan peluang bagi pembiayaan korporasi dan komersial yang sangat besar. Segmen *micro banking* juga memiliki prospek yang potensial untuk dikelola. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang moderat stabil dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri perbankan beserta efek multiplier-nya, sehingga kinerja perbankan tahun 2013 akan lebih baik dan bertumbuh positif.

Prospek dan tantangan di masa mendatang menjadi pendorong bagi Bank Sulselbar untuk terus melanjutkan usaha demi mewujudkan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dalam rangka menyediakan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap layanan Bank Sulselbar akan dilakukan melalui ekspansi jaringan operasional untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan layanan Bank Sulselbar.

> Pada tahun 2012 telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank untuk mengantisipasi perkembangan Bank Sulselbar di masa–masa mendatang.

Dengan sumber daya manusia handal dan permodalan yang kuat, bersinergi dengan strategi manajerial yang handal, diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan profitabilitas guna menunjang pertumbuhan berkesinambungan Bank Sulselbar.

Untuk mendukung bisnis, Bank Sulselbar berkomitmen untuk berinvestasi melalui pengembangan teknologi informasi melalui peningkatan dan penyempurnaan infrastruktur jaringan yang termutakhir. Selain itu, untuk mendukung target bisnis dan perluasan jaringan kantor, kami berkomitmen untuk melakukan investasi dengan menghadirkan teknologi baru dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan infrastruktur jaringan. Kami juga terus melanjutkan program pelatihan dan pendidikan, karena teknologi jaringan yang canggih tidak akan optimal tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih.

Kami menyadari pula bahwa lingkungan yang terus berubah akan menuntut produk dan layanan baru yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan memiliki keunggulan kompetitif.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Dalam pengelolaan Bank secara menyeluruh, pada tahun 2012 Bank Sulselbar melanjutkan upayanya untuk senantiasa meningkatkan kualitas *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten bagi pencapaian kinerja perusahaan yang lebih baik. Hal tersebut tersebut diwujudkan dengan menjalankan seluruh aktivitas perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Bank Sulselbar dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan.

Implementasi GCG di Bank Sulselbar tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun Bank Sulselbar menjadi organisasi yang kompetitif didukung oleh sumber daya manusia yang unggul, profesional, memiliki integritas, dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah pada perbaikan perusahaan yang lebih baik.

Kami menyadari bahwa komitmen yang kuat dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang sama pentingnya. Kami meyakini bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik harus senantiasa mengedepankan transparansi, tanggung jawab dan penerapan mekanisme kontrol yang benar dan seimbang. Hal-hal di atas merupakan fokus utama praktik tata kelola perusahaan di karena kami senantiasa mengacu kepada standar tertinggi di bidang kepatuhan, transparansi, tanggung jawab, dan etika profesional.

MANAJEMEN RISIKO

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank Sulselbar berpedoman kepada pilar penerapan yang meliputi : 1).Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 2).Kecukupan Kebijakan, Prosedure dan Penetapan Limit, 3).Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan 4). Sistem Pengendalian Intern.

Penjabaran berbagai pilar tersebut, selanjutnya ditetapkan dalam suatu Kerangka Manajemen Risiko Bank Sulselbar yang terdiri dari Organisasi & SDM; Kebijakan, Proses & Metodologi; dan Infrastruktur. Kerangka ini menjadi dasar penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko di seluruh aktivitas maupun produk bank.

Esensi penerapan manajemen risiko Bank Sulselbar adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (manageable) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Sebagai pelengkap Pilar 1 dan Pilar 2 ,penerapan Pilar 3 Basel II pada Bank Sulselbar ditujukan untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam rangka memperkuat perbankan. Pengungkapan informasi merupakan sarana efektif untuk menginformasikan kepada pasar mengenai eksposur risiko yang ada pada bank. Pengungkapan Pilar 3 akan menjadi sarana untuk menunjukkan keunggulan dalam mengelola risiko, hal ini akan berdampak positif terhadap hasil kinerja bank, sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi Bank Sulselbar.

Cakupan pengungkapan dalam Pilar 3 dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan *Good Corporate Governance*, Transparansi Informasi Keuangan, transparansi produk, dan transparansi proses manajemen risiko bank.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaksanakan Bank Sulselbar pada tahun 2012 meliputi kegiatan kesehatan, sosial & pendidikan, pelestarian alam & lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana umum dan program kemitraan. Fokus program CSR Bank Sulselbar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan melahirkan kemapanan masyarakat serta meningkatkan kemampuan adaptasi Bank terhadap lingkungan sekitar. Bank Sulselbar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian Bank Sulselbar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya.

Penyaluran dana untuk kegiatan CSR dilakukan secara proporsional, menyeimbangkan antara program yang direncanakan dengan permohonan diterima, sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar lingkungan operasional Bank Sulselbar.

SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Sulselbar memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan dan untuk meningkatkan daya saing. Bank Sulselbar secara berkesinambungan terus berupaya membentuk dan mengembangkan *human capital* yang dimiliki karena SDM yang berkualitas merupakan aset penting bagi kelangsungan dan keberhasilan Bank Sulselbar. Untuk itu, Bank Sulselbar berkomitmen untuk senantiasa fokus pada pengelolaan dan pengembangan SDM yang mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha bank.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik dan terintegrasi, maka Grup SDM Bank Sulselbar saat ini dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen SDM berbasis kompetensi yakni *Human Resources Information System* (HARIS) yang telah berjalan sejak tahun 2012.

Pada tahun 2012 telah dilakukan penyempurnaan struktur organisasi Bank untuk mengantisipasi perkembangan Bank Sulselbar di masa–masa mendatang. Penyempurnaan struktur organisasi meliputi penambahan beberapa unit kerja di Kantor Pusat, baik setingkat Grup maupun Departemen. Unit kerja Kantor Pusat setingkat Grup, yaitu Grup *Corporate Secretary*. Unit kerja *Corporate Secretary* telah terbentuk sejak tahun 2010 namun posisinya masih setingkat departemen. Pembentukan *Corporate Secretary* pada tahun 2010 dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan BAPEPAM dan LK pada saat Bank Sulselbar akan melakukan emisi perdana Obligasi dan Sukuk Mudhrabah pada tahun 2011. Pembentukan Grup *Corporate Secretary* bertujuan untuk menjalankan fungsi pengelolaan citra perusahaan (*corporate image*) melalui pengelolaan informasi yang berimbang dan integratif serta untuk mendukung efektifnya fungsi pengelolaan *customer care* secara menyeluruh, berkelanjutan dan tepat. Di samping itu pula, untuk mendukung terciptanya disiplin pasar melalui pengungkapan informasi materil ke publik (disclosure) sebagai bentuk akuntabilitas bank dan dalam rangka terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika pasar modal. Grup *Corporate Secretary* berfungsi juga untuk mengelola dan memitigasi risiko hukum dan reputasi bank melalui penyelesaian perkara hukum yang dilakukan dengan proses litigasi (represif).

Penambahan 3 (tiga) unit kerja di Kantor Pusat setingkat Departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas yang berada di bawah supervisi Grup *Corporate Secretary*, Grup *Service Quality* yang merupakan sub-*ordinate* Grup Perencanaan dan Pengembangan, dan Unit *Anti Fraud* yang berada di bawah supervisi langsung Direktur Utama.

Penyempurnaan struktur organisasi Kantor Pusat Bank Sulselbar diikuti pula dengan penyesuaian nama dan pengalihan unit kerja. Dengan pembentukan Grup *Corporate Secretary*, maka Departemen Kesektariatan dan Humas yang sebelumnya berada di bawah supervisi Grup Sekretariat & Umum dialihkan ke Grup *Corporate Secretary* dan disesuaikan namanya menjadi Departemen Legal dan Kesektariatan. Oleh karena fungsi kesektariatan dan hubungan publik Bank diselenggrakan pada Grup *Corporate Secretary*, maka Grup Sekretariat & Umum disesuaikan penamaannya menjadi Grup Umum yang akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pendayagunaan aset Bank dalam rangka optimalisasi untuk mendukung kegiatan operasional.

Untuk mengukur ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia pada setiap unit kerja di Bank Sulselbar, maka sepanjang tahun 2012 telah dilaksanakan *staffing model* sebagai parameter dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis untuk memberi daya guna dan kontribusi maksimal bagi bank.

Bank Sulselbar juga melakukan revisi penetapan Kantor Cabang Pilot Project Implementasi Program *Service Quality* Bank Sulselbar dari 5 (lima) kantor cabang menjadi 4 (empat) kantor cabang yang masing – masing mewakili 4 (empat) kelas kantor cabang Bank Sulselbar. Program *Service Quality* Bank Sulselbar sudah berlangsung sejak tahun 2010 untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan *(service quality)* Bank Sulselbar agar lebih mendekatkan diri kepada masyarakat luas dan memberikan kepuasan kepada pelanggannya sehingga terjadi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Revisi penetapan kantor cabang pilot project Program *Service Quality* bertujuan untuk efektivitas proses *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja kantor cabang pilot project, khususnya yang berkaitan langsung dengan kualitas layanan. Pengukuran efektivitas Program *Service Quality* dilakukan secara berkala untuk dilakukan penyempurnaan untuk selanjutnya diimplementasikan di seluruh kantor cabang Bank Sulselbar.

Dan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pegawai, kinerja bank dan kesejahteraan pegawai, baik bagi pegawai aktif maupun pensiunan, telah dilakukan pula penyempurnaan kebijakan prosedur dan pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar.

PENGHARGAAN

Kinerja finansial Bank Sulselbar yang memuaskan selama tahun 2012 menjadi dasar penilaian bagi berbagai lembaga independen dan kredibel di Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada Bank Sulselbar. Penghargaan ini sebagai wujud kerja keras dan konsistensi Bank Sulselbar untuk senantiasa fokus pada rencana dan strategi bisnis Bank dalam rangka mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan.

Peningkatan kinerja finansial yang baik selama 10 (sepuluh) tahun berturut – turut dan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang juga terjaga baik dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian nasional, oleh Majalah InfoBank memberikan penghargaan kepada Bank Sulselbar yakni penghargaan *InfoBank Awards Golden Platinum Trophy* sebagai Bank dengan Kinerja Sangat Bagus selama 10 tahun berturut – turut.

Atas kinerja baik Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar yang telah beroperasi sejak tahun 2007 dengan, maka pada tahun 2012 UUS Bank Sulselbar mendapatkan *Best Syariah* 2012 untuk Unit Usaha Syariah Terbaik 2012 Kategori Aset di bawah Rp500 miliar dari Majalah Investor dan meraih penghargaan *InfoBank Sharia Award* untuk Bank dengan Predikat sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 dari Majalah InfoBank.

Bank Sulselbar terpilih sebagai satu – satunya Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang mendapatkan penghargaan *Banking Efficiency Award* 2012 dari Harian Bisnis Indonesia. Penghargaan tersebut merupakan hasil nyata atas implementasi strategi efesiensi yang dijalankan Bank Sulselbar selama tahun 2012. Strategi efisiensi Bank antara lain dengan meningkatkan keunggulan operasional dan infrastruktur IT dalam rangka mendorong biaya transaksi yang rendah dengan bergabung pada jaringan ATM Bersama serta rencana keikutsertaan pada jaringan Debit Prima dan ATM Prima di tahun 2013. Kesadaran akan operasi perusahaan dengan beban biaya rendah juga ditumbuhkan melalui harga terbaik dengan tetap memperhatikan kualitas setiap penawaran dan kontrak, melakukan evaluasi kebijakan pengadaan aktiva, dalam rangka peningkatan efisiensi operasional dan pengadaan aktiva tetap dan inventaris, yang sebagian dilakukan dengan sistem sewa dan telah mendorong efisiensi operasional yang lebih tinggi.

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar juga mendapatkan 2 (dua) penghargaan dari Anugerah Perbankan Indonesia untuk kategori *Financial Aspect* dan *Risk Management.* Anugerah Perbankan Indonesia merupakan bentuk apresiasi penghargaan tertinggi kepada Perbankan di Indonesia yang berhasil meningkatkan kinerja atau menciptakan pertumbuhan (*Delta Growth*) kinerja Bank, juga meningkatkan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan bisnis, pasar modal, investasi dan perekonomian di Indonesia. Untuk itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Majalah Business Review dan Majalah Women Review serta Perbanas Institute atas kepercayaan yang diberikan kepada Bank Sulselbar sebagai Peringkat I *Financial Aspect* untuk kategori Bank BPD Aset <Rp 10 triliun dan Peringkat I *Risk Management* untuk kategori Bank BPD Aset <Rp 10 triliun.

Bank Sulselbar meraih pula penghargaan Indonesia Banking Loyalty Award (IBLA) 2012 untuk Kategori *Loyalty Program for Saving Account Regional Development Bank* (BPD) dari Majalah InfoBank dan MarkPlus Insight. Penghargaan ini menunjukkan kemampuan Bank Sulselbar untuk menjaga pertumbuhan Bank dengan terus meningkatkan kualitas relationship dan partnership antara Bank dan nasabah yang akan memberikan mutual benefit baik bagi nasabah selaku pengguna layanan, maupun bagi Bank dalam rangka meningkatkan kontribusi profit dari setiap nasabah.

PERUBAHAN SUSUNAN DIREKSI

Di tahun 2012, tidak terjadi perubahan susunan Direksi Bank Sulselbar.

APRESIASI

Kami segenap jajaran Direksi ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang telah ditunjukan oleh para pegawai, karena berkat kerja keras mereka, Bank Sulselbar berhasil meraih hasil kinerja dan berbagai penghargaan yang membanggakan sepanjang tahun 2012. Kami juga berterima kasih kepada Dewan Komisaris, para pemegang saham, mitra usaha, serta para nasabah atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini bagi keberhasilan Bank Sulselbar.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan membimbing kita dalam upaya untuk melanjutkan pertumbuhan dan ekspansi bisnis yang berkesinambungan di masa depan.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 31 Desember 2012

Ellong Tjandra
Direktur Utama

RANGKAIAN KEGIATAN PENTING TAHUN 2012

13 Januari 2012	Hari Ulang Tahun Bank Sulselbar Ke-51
13 Januari 2012	Donor Darah Bank Sulselbar
21 Februari 2012	*Customer Gathering* Bank Sulselbar
01 Maret 2012	*Launching* KPE Prov. Sulsel
04 April 2012	Peningkatan Status Kantor Kas Rantepao menjadi Kantor Cabang Rantepao
13 April 2012	Donor Darah
14 Mei 2012	Relokasi Kantor Kas Terminal Pinrang
22 Mei 2012	RUPS Tahun Buku 2011 dan RUPS Luar Biasa
07 Juni 2012	Pembukaan *Payment Point* Kantor Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulsel
26 Juni 2012	*Launching* KPE Sulbar
26 Juni 2012	Peresmian Kantor Cabang Utama Mamuju
26 Juni 2012	Peresmian Kantor Kas Titipan BI di Prov. Sulbar
08 Juli 2012	Peresmian Kantor Cabang Parepare
13 Juli 2012	Donor Darah
06 Agustus 2012	Peresmian Kantor Cabang Polman
10 Oktober 2012	Peresmian Kantor Cabang Takalar
13 Oktober 2012	Donor Darah
03 Desember 2012	Relokasi Kantor Kas Rappang
15 Desember 2012	RUPS Luar Biasa

HAL – HAL PENTING YANG DIPERKIRAKAN TERJADI PADA BANK SULSELBAR TAHUN 2013

Aktivitas penting yang diperkirakan terjadi di tahun 2013 dan akan berpengaruh signifikan terhadap perkembangan usaha Bank Sulselbar :

1. Pembukaan kantor cabang konvensional dan cabang syariah di Sulawesi Barat
2. Pembukaan kantor kas dan terminal ATM baru
3. Relokasi beberapa kantor kas pada tempat yang lebih strategis
4. Melakukan penyempurnaan pengelolaan organisasi antara lain dengan pembentukan beberapa departemen untuk menghadapi perkembangan bisnis yang sangat dinamis
5. Melakukan diversifikasi produk konvensional dan syariah untuk meningkatkan fungsi dan fitur produk Bank Sulselbar
6. Meluncurkan beberapa produk dan aktivitas baru antara lain Kartu Debit kerjasama dengan PRIMA dan Kartu Kredit *Co Brand* dengan Bank Mandiri.
7. Menambah saluran distribusi melalui penggunaan EDC/*Mobile* EDC

PENGHARGAAN TAHUN 2012

- *InfoBank Awards Gloden Platinum Trophy* sebagai Bank dengan Kinerja Sangat Bagus selama 10 tahun berturut-turut dari Majalah InfoBank
- *InfoBank Sharia Award* untuk Bank dengan Predikat sangat Bagus atas Kinerja Keuangan Tahun 2012 dari Majalah InfoBank
- *Banking Efficiency Award* 2012 dari Bisnis Indonesia
- Peringkat I *Risk Management* untuk kategori Bank BPD Aset <Rp 10 triliun Anugerah Perbankan Indonesia
- Peringkat I *Financial Aspect* untuk kategori Bank BPD Aset <Rp 10 triliun Anugerah Perbankan Indonesia
- Best Syariah 2012 untuk Unit Usaha Syariah Terbaik 2012 Kategori Aset di bawah Rp500 miliar dari Majalah Investor
- *Indonesia Banking Loyalty Award* (IBLA) 2012 untuk Kategory *Loyalty Program for Saving Account Regional Development Bank* (BPD) dari Majalah InfoBank dan MarkPlus Insight

REKAPITULASI GRAFIK IKHTISAR DATA KEUANGAN

Kredit Yang Diberikan & Pembiayaan (Rp juta)
2012 6,115,053
2011 5,393,094
2010 4,515,203
2009 3,465,585
2008 3,390,768
2007 2,522,147
CAGR = 19.38%

Dana Pihak Ketiga (Rp juta)
2012 5,401,642
2011 5,291,085
2010 4,060,563
2009 2,899,047
2008 2,759,950
2007 3,044,693
CAGR = 12.15%

Pendapatan Bunga (Rp juta)
2012 1,096,743
2011 962,591
2010 862,644
2009 627,324
2008 647,868
2007 573,925
CAGR = 13.83%

Biaya Bunga (Rp juta)
2012 358,471
2011 323,454
2010 230,025
2009 158,844
2008 138,177
2007 156,422
CAGR = 18,04%

Pendapatan Bunga Bersih (Rp juta)
2012 738,272
2011 639,137
2010 632,619
2009 468,480
2008 509,691
2007 417,503
CAGR =12.08%

Pendapatan Operasional Lainnya (Rp juta)
2012 72,088
2011 88,368
2010 65,076
2009 35,458
2008 54,164
2007 40,961
CAGR = 11,97%

Beban Operasional Lainnya
(Rp juta)
2012 425,853
2011 364,967
2010 506,275
2009 263,563
2008 290,461
2007 257,627
CAGR = 10.57%

Laba (Rugi) Operasional (Rp juta)
2012 384,507
2011 374,089
2010 344,817
2009 240,375
2008 273,394
2007 200,837
CAGR = 13.87%

Laba (Rugi) Sebelum Pajak
(Rp juta)
2012 376.631
2011 363.148
2010 337.902
2009 238.044
2008 268.839
2007 209.272
CAGR = 12.47%

Laba (Rugi) Setelah Pajak
(Rp juta)
2012 276,466
2011 253,489
2010 243,097
2009 153,467
2008 166,064
2007 127,873
CAGR = 16.67%

NPL – Gross (persen)
2012 1,39%
2011 2.02%
2010 2.06%
2009 2.40%
2008 2.68%
2007 3.13%

Imbal Hasil Rata – Rata Aktiva (ROA) (Persen)
2012 3,99%
2011 3.34%
2010 5.58%
2009 5.56%
2008 7.11%
2007 6.44%

Imbal Hasil rata – Rata Ekuitas (ROE) (Persen)

Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM) (Persen)

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (Persen)

Rasio Kredit Yang Diberikan/Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)(Persen)

IKHTISAR DATA KEUANGAN

Rp Juta

Nama	2007	2008	2009	2010	2011	2012
NERACA						
Total Aset	4,123,991	4,519,775	4,723,634	6,227,182	7,290,471	8,014,158
Aktiva Produktif	3,451,328	4,200,161	4,349,887	5,324,594	6,324,796	6,911,260
Kredit Yang Diberikan & Pembiayaan	2,522,147	3,390,768	3,465,585	4,515,203	5,393,094	6,115,053
Kredit Yang Diberikan	2,512,885	3,330,111	3,385,767	4,371,300	5,133,135	5,744,496
Pembiayaan Syariah	9,262	60,657	79,818	143,903	259,959	370,557

Nama	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Dana Pihak Ketiga	3,044,693	2,759,950	2,899,047	4,060,563	5,291,085	5,401,642
Dana Pihak Ketiga Konvensional	3,040,943	2,741,048	2,857,637	3,973,265	5,153,603	5,162,469
Dana Pihak Ketiga Syariah	3,750	18,902	41,410	87,298	137,482	239,173
Surat Berharga Yang Diterbitkan	0	0	0	0	500,000	500,000
Jumlah Kewajiban	3,402,522	3,707,722	3,939,768	5,286,985	6,213,170	6,780,049
EKUITAS						
Modal Sendiri	393.301	434.521	447,167	468,061	487,477	528.739
Modal Disetor						
- Pemprov. Sulsel	190,000	190,000	190,000	205,000	205,000	216,000
- Pemprov. Sulbar	0	0	0	0	0	2,000
- Pemkab. & Pemkot. Se-Sulsel & Sulbar	203,301	244,521	257,167	263,061	278,477	310,739
- Setoran Modal Yg belum Ditempatkan	4,849	11,500	1,144	1	14,151	2
Modal Inti	597,479	677,762	722,850	818,648	946,823	1,025,870
Modal Pelengkap	36,916	48,257	52,069	51,535	43,134	62,056
Penyertaan	66	66	67	70	74	82
ATMR Kredit	2,953,251	3,860,526	4,165,517	3,486,836	3,450,709	3,760,748
ATMR Operasional	n.a	n.a	n.a	635,940	740,657	1,203,705
KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF						
1. Lancar	2,406,120	3,262,426	3,337,385	4,368,463	5,232,800	5,996,172
2. Dalam Perhatian Khusus	37,151	37,620	45,182	53,697	51,606	33,932
3. Kurang Lancar	15,125	5,122	4,964	8,051	8,393	7,390
4. Diragukan	18,738	6,889	2,871	6,600	8,606	10,901
5. Macet	45,013	78.711	75.183	78,392	91,689	66,658
Total	2,522,147	3.390.768	3.465.585	4,515,203	5,393,094	6,115,053

Nama	2007	2008	2009	2010	2011	2012
LABA RUGI						
Pendapatan Bunga	573,925	647,868	627,324	862,644	962,591	1,096,743
Biaya Bunga	156,422	138,177	158,844	230,025	323,454	358,471
Pendapatan Bunga Bersih	417,503	509,691	468,480	632,619	639,137	738,272
Pendapatan Operasional Lainnya	40,961	54,164	35,458	65,076	88,368	72,088
Beban Operasional Lainnya	257,627	290,461	263,563	506,275	353,416	425,853
Laba (Rugi) Operasional	200,837	273,394	240,375	344,817	374,089	384,507
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	209,272	268,839	238,044	337,902	363,148	376,631
Pajak Kini	83,252	104,257	86,961	99,424	103,112	106,090
Pajak Tangguhan	(1,853)	(1,482)	(2,384)	(4,619)	6,547	(5,925)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	127,873	166,064	153,467	243,097	253,489	276,466
Laba Operasional Bersih per Saham (angka penuh)	587,588	630,966	535,598	742,921	744,954	717,952
Laba Bersih per Saham (angka penuh)	359,039	389,753	345,301	534,480	520,001	527,012
Biaya Dana (*Cost of Fund*) Konvensional	5.16%	4.32%	4.44%	4.80%	5.76%	5.76%
Biaya Dana (*Cost of Fund*) Syariah	1.53%	4.95%	5.14%	5.62%	5.82%	6.60%
Cost of Money Konvensional	13.80%	14.16%	12.12%	13.92%	15.00%	17.52%
Cost of Money Syariah	6.03%	14.08%	14.68%	11.93%	8.00%	8.27%
Permodalan						
- KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) Risiko Kredit	21.48%	18.80%	18.60%	24.96%	28.69%	28.93%
- KPMM Risiko Operasional	n.a	n.a	n.a	21.11%	23.62%	21.91%
Aktiva Produktif						
- Aktiva Produktif Bermasalah	2.27%	2.19%	1.90%	1.68%	1.69%	1.25%
- NPL – *Gross*	3.13%	2.68%	2.40%	2.06%	2.02%	1.39%
- NPL – *Net*	0.91%	0.24%	0.17%	0.23%	1.82%	0.48%
- PPAP terhadap Aktiva Produktif	2.55%	3.00%	2.78%	3.08%	1.92%	1.28%

Nama	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rentabilitas						
Imbal Hasil Rata – Rata Aktiva (ROA)	6.44%	7.11%	5.56%	5.58%	3.34%	3.99%
Imbal Hasil rata – Rata Ekuitas (ROE)	23.37%	19.89%	28.71%	31.85%	32.24%	26.37%
Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	12.10%	12.21%	10.73%	10.31%	10.18%	9.53%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	57.79%	53.87%	57.09%	65.81%	72.13%	71.66%
Likuiditas						
Rasio Kredit Yang Diberikan/Pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (LDR)	82.82%	99.19%	114.79%	109.98%	101.93%	113.21%
Kepatuhan						
Prosentase Pelanggaran BMPK	-	-	-	-	-	-
- Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-	-	-
Prosentase Pelampauan BMPK	-	-	-	-	-	-
- Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
- Pihak Tidak Terkait	-	-	-	-	-	-
GWM Rupiah	14.47%	5.36%	5.25%	9.68%	8.31%	8.58%
PDN	-	-	-	-	-	-
KINERJA NON KEUANGAN						
Jumlah Karyawan	904	886	997	1,013	1,037	1,074
Jumlah ATM	30	32	33	45	64	72
Jumlah Kantor	63	65	67	73	77	79
Kualifikasi Opini Auditor	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian

INFORMASI SAHAM DAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Selama tahun 2012, Bank Sulselbar menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yaitu pada tanggal 22 Mei 2011 dan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada tanggal 15 Desember 2012. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Persetujuan/Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2011
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2011
3. Persetujuan/Penetapan Auditor Independen untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2012.

KEPEMILIKAN SAHAM PER 31 DESEMBER 2012

Pemegang Saham Bank Sulselbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi. Selanjutnya pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara. Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor 13 Tahun 1964 yang memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan yang terdiri dari 27 kabupaten/kota. Dan terakhir berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004, Sulawesi Selatan dimekarkan menjadi 2 provinsi, yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan pemisahan tersebut, wilayah administratif Sulawesi Selatan menjadi 24 kabupaten/kota.

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden No.18/P/2008 menetapkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2008 – 2013, sebagai berikut :

Gubernur : Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, Msi, MH
Wakil Gubernur : Ir. H. Agus Arifin Nu'mang, MS

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia tanggal 16 Oktober 2004 dan terdiri dari 5 (lima) kabupaten. Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk masa jabatan 2011– 2016, sebagai berikut :

Gubernur : H. Anwar Adnan Saleh
Wakil Gubernur : H. Aladin S. Mengga

Kepemilikan Saham Masyarakat Umum

Saham Bank Sulselbar seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan belum dilepas untuk dijual ke publik.

Pemegang Saham Bank Sulselbar

Sampai dengan 31 Desember 2012, Bank Sulselbar dimiliki oleh 31 pemegang saham yang terdiri dari Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Pemerintah Prov. Sulawesi Barat serta 29 Pemerintah Kabupaten/ Kota se – Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

> Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan diversifikasi produk, Bank Sulselbar terus berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat struktur pendanaan.

Pertumbuhan Modal Disetor Tahun 2012

No.	Pemerintah Provinsi, Kab./ Kota	2012		
		Jumlah Modal Disetor (Rupiah)	Jumlah Saham	Kepemilikan %
1	Sulawesi Selatan	216.000.000.000	216.000	40,85%
2	Pangkep	23.524.000.000	23.524	4,45%
3	Selayar	21.830.000.000	21.830	4,13%
4	Pinrang	19.500.000.000	19.500	3,69%
5	Wajo	18.265.000.000	18.265	3,45%
6	Makassar	17.000.000.000	17.000	3,22%
7	Takalar	17.440.000.000	17.440	3,30%
8	Barru	15.110.000.000	15.110	2,86%
9	Jeneponto	12.501.000.000	12.501	2,36%
10	Bantaeng	13.017.000.000	13.017	2,46%
11	Sidrap	11.571.000.000	11.571	2,19%
12	Luwu Timur	21.000.000.000	21.000	3,78%
13	Parepare	8.647.000.000	8.647	1,64%
14	Enrekang	8.510.000.000	8.510	1,61%
15	Luwu	9.172.000.000	9.172	1,92%
16	Soppeng	13.280.000.000	13.280	2,51%
17	Sinjai	8.745.000.000	8.745	1,65%
18	Watampone	6.106.000.000	6.106	1,15%
19	Maros	8.000.000.000	8.000	1,51%
20	Palopo	8.000.000.000	8.000	1,51%
21	Luwu Utara	3.354.000.000	3.354	0,63%
22	Tana Toraja	5.586.000.000	5.586	1,06%
23	Gowa	3.081.000.000	3.081	0,58%
24	Bulukumba	3.214.000.000	3.214	0,61%
25	Toraja Utara	4.500.000.000	4.500	0,85%
26	Sulawesi Barat	2.000.000.000	2.000	0,38%
27	Mamuju	8.540.000.000	8.540	1,62%
28	Polman	7.399.000.000	7.399	1,40%
29	Majene	6.300.000.000	6.300	1,19%
30	Mamasa	5.000.000.000	5.000	0,95%
31	Mamuju Utara	2.547.000.000	2.547	0,48%
	Total	**528.739.000.000**	**528.739**	**100,00%**

2011			Kenaikan	
Jumlah Modal Disetor (Rupiah)	Jumlah Saham	Kepemilikan %	(Rupiah)	%
205.000.000.000	205.000	42,05%	0	0,00%
23.523.000.000	23.523	4,83%	0	0,00%
20.330.000.000	20.330	4,17%	0	0,00%
19.500.000.000	19.500	4,00%	0	0,00%
18.265.000.000	18.265	3,75%	0	0,00%
17.000.000.000	17.000	3,49%	0	0,00%
15.440.000.000	15.440	3,17%	0	0,00%
14.110.000.000	14.110	2,89%	0	0,00%
12.501.000.000	12.501	2,56%	0	0,00%
12.017.000.000	12.017	2,47%	0	0,00%
11.571.000.000	11.571	2,37%	0	0,00%
20.000.000.000	20.000	4,10%	10.000.000.000	100,00%
8.647.000.000	8.647	1,77%	0	0,00%
8.510.000.000	8.510	1,75%	0	0,00%
9.172.000.000	9.172	1,88%	1.000.000.000	12,24%
8.960.000.000	8.960	1,84%	1.820.000.000	25,49%
7.595.000.000	7.595	1,56%	350.000.000	4,83%
5.606.000.000	5.606	1,15%	0	0,00%
6.000.000.000	6.000	1,23%	745.000.000	14,18%
6.500.000.000	6.500	1,33%	1.500.000.000	30,00%
3.354.000.000	3.354	0,69%	0	0,00%
3.586.000.000	3.586	0,74%	500.000.000	16,20%
3.081.000.000	3.081	0,63%	1.000.000	0,03%
1.970.000.000	1.970	0,40%	0	0,00%
2.000.000.000	2.000	0,41%	1.000.000.000	100,00%
0	0	0,00%	0	0,00%
6.790.000.000	6.790	1,39%	0	0,00%
5.899.000.000	5.899	1,21%	1.500.000.000	34,10%
4.850.000.000	4.850	0,99%	500.000.000	11,49%
3.700.000.000	3.700	0,76%	0	0,00%
2.000.000.000	2.000	0,41%	500.000.000	33,33%
487.477.000.000	**487.477**	**100,00%**	**19.416.000.000**	**4,15%**

Modal Dasar Bank Sulselbar

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 24 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar, jo Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-46963.AH.01.02.Tahun.2009 tanggal 30 September 2009, dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0063272.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 30 September 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara RI No. 90 tanggal 10 November 2009, Tambahan No. 26944 telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT Bank Sulsel yaitu dengan meningkatkan besarnya Modal Dasar menjadi sebesar Rp1.600.000.000.000,-, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No: AHU–46963.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009.

Komposisi Kepemilikan Saham

Komposisi kepemilikan saham Bank Sulselbar per 31 Desember 2012 sebagai berikut :

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 40,85%
- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Selatan 53,14%
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 0,38%
- Pemerintah Kab./Kota se – Sulawesi Barat 5,63%

Komposisi Modal Disetor Bank Sulselbar Tahun 2012

Perkembangan Modal Disetor Bank Sulselbar 2008 - 2012 (Rp Juta)

Bank Sulselbar merupakan BUMD Prov. Sulsel dan Prov. Sulbar dengan nilai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM

Ikhtisar Harga Saham

Informasi terkait harga saham tidak tersedia karena saham Bank Sulselbar tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang Saham Yang Tercatat Memiliki Lebih Dari 5% Saham
Per 31 Desember 2012

Nama	Jumlah Saham (Rupiah)	% Saham
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	216.000.000.000	40,85%

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris Dan Direksi

Nama	Bank Sulselbar	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Keterangan
Dewan Komisaris					
1. H. Andi Muallim	-	-	-	-	Tidak Ada
2. H. A. Tjoneng Mallombasang	-	-	-	-	
3. N. Ikawidjaja	-	-	-	-	
Dewan Direksi	-	-	-	-	
1. Ellong Tjandra	-	-	-	-	Tidak Ada
2. H. YanuarFachrudin	-	-	-	-	
3. H. A. Muhammad Rahmat	-	-	-	-	
4. H. Harris Saleng	-	-	-	-	

PEMBAGIAN DEVIDEN

Bank Sulselbar akan melakukan kebijakan pembagian deviden yaitu membayarkan deviden sebesar 60% dari laba bersih setiap tahunnya. Deviden kepada pemegang saham akan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai pemegang saham menurut perbandingan besarnya modal yang telah disetor sampai dengan akhir tahun buku yang bersangkutan.

Selama tahun 2012, Bank Sulselbar telah membagikan deviden tunai sebesar Rp152.093.201.298,67,- sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 22 Mei 2012. Deviden tunai tersebut dihitung berdasarkan pencapaian kinerja keuangan Bank Sulselbar per 31 Desember 2011.

Ikhtisar Deviden

Kebijakan deviden Bank Sulselbar berpedoman pada Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan jumlah deviden yang dibagikan yaitu sebesar 60% dari laba bersih. Keputusan untuk membayarkan dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Suslelbar setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2011 yang diselenggarakan pada tanggal 22 Mei 2012 lalu, jumlah dividen tunai yang dibagikan tahun 2012 adalah sebesar Rp152.093.201.298,67,- yang dihitung berdasarkan pencapaian kinerja selama tahun 2011.

Bank Sulselbar merupakan BUMD Prov. Sulsel dan Prov. Sulbar dengan nilai kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Dividen yang disalurkan Bank Sulselbar kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat selama 6 (enam) tahun terakhir sebagai berikut:

Pembagian Deviden Bank Sulselbar

Deviden Tahun	Pemprov. Sulsel	Pemprov. Sulbar	Total Deviden	Keterangan
	Rp Juta			
2006	84.795	3.168	87.963	Dibagikan pada tahun 2007
2007	107.151	4.628	111.779	Dibagikan pada tahun 2008
2008	124.148	5.660	129.808	Dibagikan pada tahun 2009
2009	113.406	5.195	118.601	Dibagikan pada tahun 2010
2010	139.222	6.636	145.858	Dibagikan pada tahun 2011
2011	145.082	7.011	152.093	Dibagikan pada tahun 2012

IKHTISAR EFEK LAINNYA (OBLIGASI DAN SUKUK *MUDHARABAH*)

OBLIGASI & SUKUK *MUDHARABAH*

Seiring dengan pertumbuhan bisnis dan diversifikasi produk, Bank Sulselbar terus berupaya untuk meningkatkan dan memperkuat struktur pendanaan. Untuk memperluas basis pendanaan lebih jauh lagi, Bank Sulsebar mencari pendanaan berjangka panjang melalui penerbitan obligasi korporasi dan sukuk *mudharabah*. Selain bertujuan untuk memperbaiki struktur pendanaan dan penyesuaian likuiditas, dana dari emisi obligasi dan sukuk *mudharabah* diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor konsumtif dan produktif, terutama investasi yang memiliki tenor panjang.

Penerbitan obligasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan *corporate image* Bank Sulselbar dalam lingkup yang lebih luas, yaitu *scope* nasional.

a. **Nama Obligasi**
   OBLIGASI BANK SULSELBAR I TAHUN 2011

b. **Nama Sukuk**
   SUKUK *MUDHARABAH* BANK SULSELBAR I TAHUN 2011

c. **Surat Pernyataan Efektif BAPEPAM & LK**
   Surat pernyataan efektif dari BAPEPAM – LK No. S-4750/BL/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Pemberitahuan Pernyataan Efektifnya Pendaftaran.

d. Surat Izin Bank Indonesia

Surat izin penerbitan produk baru dari Bank Indonesia No. 13/14/DPIP/Prz/Mks tanggal 11 April 2011 perihal Penegasan atas Prodouk atau Aktivitas Baru.

e. Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi diterbitkan dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan terdaftar atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

f. Jenis Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *Mudharabah* ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti investasi Pemegang Sukuk *Mudharabah*. Sukuk *Mudharabah* ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk. Sukuk *Mudharabah* ditawarkan pada nilai nominal, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan ketentuan mengenai pembelian awal seluruh Sukuk *Mudharabah* yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan.

Sertifikat Jumbo Sukuk *Mudharabah* yang diterbitkan terdaftar atas nama PT PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") dan akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

g. Jumlah Pokok Obligasi dan Jangka Waktu

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 diterbitkan dalam 2 seri yaitu Seri A dan Seri B

Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah).

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,4% (sepuluh koma empat persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).

h. Jumlah Dana Sukuk *Mudharabah* dan Jangka Waktu

Sukuk *Mudharabah* diterbitkan dengan Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* sebesar 72,5% (tujuh puluh dua koma lima persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Sukuk *Mudharabah* yang ditawarkan adalah sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).

i. Pembayaran Bunga dan Jatuh Tempo Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi ini. Pembayaran Bunga Obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2011, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi yaitu tanggal 12 Mei 2014 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 12 Mei 2016 untuk Obligasi Seri B.

j. Pembayaran Bagi Hasil dan Jatuh Tempo Sukuk *Mudharabah*

Bagi hasil Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bagi hasil Sukuk *Mudharabah* pertama telah dilakukan pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir kalinya pada tanggal 12 Mei 2016.

k. Ketentuan Umum Pembayaran Bunga/Bagi Hasil

Bunga/bagi hasil Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* dibayarkan setiap setiap triwulan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia. Pembayaran bunga/bagi hasil pertama telah dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2011. Untuk layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta administrasi rekening efek dilakukan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Bunga/bagi hasil Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak tanggal distribusi obligasi secara elektronik (yang juga merupakan tanggal emisi), dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari. Bunga/bagi hasil dibayarkan oleh Bank Sulselbar kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada tanggal pembayaran bunga/bagi hasil yang bersangkutan.

l. Pemeringkatan Obligasi

Pemeringkatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA *(Single A Flat; Stable Outlook).*

m. Pemeringkatan Sukuk *Mudharabah*

Pemeringkatan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yakni idA(sy) *(Single A Flat Syariah; Stable Outlook)*.

n. Jaminan Obligasi

Obligasi dijamin dengan jaminan berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia. Jaminan yang diberikan adalah sesuai dengan nilai jaminan pada tanggal emisi sekurang – kurangnya sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi (obyek fidusia). Apabila nilai obyek jaminan fidusia kurang dari 100% dari nilai pokok Obligasi, maka Perseroan wajib menambah jaminan dengan piutang, dalam hal piutang tidak mencukupi maka penambahan jaminan dilakukan dengan uang tunai dalam bentuk deposito berjangka atas nama perseroan.

o. Jaminan Sukuk *Mudharabah*

Sukuk *Mudharabah* dijamin dengan jaminan berupa piutang yang dibebankan dengan fidusia. Jaminan yang diberikan adalah sesuai dengan nilai jaminan pada tanggal emisi sekurang – kurangnya sebesar 100% dari jumlah pokok Sukuk *Mudharabah* (obyek fidusia). Apabila nilai obyek jaminan fidusia kurang dari 100% dari nilai Dana Sukuk, maka Perseroan wajib menambah jaminan dengan piutang, dalam hal piutang tidak mencukupi maka penambahan jaminan dilakukan dengan uang tunai dalam bentuk deposito berjangka atas nama perseroan.

p. Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk *Mudharabah*

Bank Sulselbar pada tanggal 15 April 2011 telah melakukan *Due Diligence* dan *Public Expose* (Pemaparan Publik) Obligasi dan Sukuk dan *Mudharabah* Bank Sulsebar I Tahun 2011 dengan nilai emisi Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp500 miliar sebagai berikut :

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2011

Tanggal	Uraian	Jumlah Rp	Penggunaan Dana
12 Mei 2011	• Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 • Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	400.000.000.000 100.000.000.000	
31 Desember 2011	• Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah • Penerimaan Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah Bersih • Amortisasi Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah • Obligasi dan Sukuk Mudharabah 2011 • Realisasi Penggunaan Dana Periode 12 Mei – 31 Desember 2011 - Obligasi - Sukuk Mudharabah	6.836.190.602 493.163.809.398 1.396.831.131 494.560.640.529 395.669.624.483 98.891.016.046	Ekspansi Kredit & Pembiayaan
31 Desember 2011	Sisa Dana	0	-

Realisasi Penggunaan Dana Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2012

Tanggal	*Uraian*	Jumlah Rp	Penggunaan Dana
12 Mei 2011	• Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 • Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	400.000.000.000 100.000.000.000	
31 Desember 2012	• Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah • Penerimaan Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah Bersih • Amortisasi Biaya Emisi Obligasi & Sukuk Mudharabah • Obligasi dan Sukuk Mudharabah 2011 • Realisasi Penggunaan Dana Periode 12 Mei – 31 Desember 2011 - Obligasi - Sukuk Mudharabah	6.836.190.602 493.163.809.398 3.342.406.765 496.506.216.163 397.245.193.245 99.261.022.918	Ekspansi Kredit & Pembiayaan
31 Desember 2012	Sisa Dana	0	-

q. Wali Amanat Obligasi

Sehubungan dengan emisi Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 33 tanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 12 tanggal 8 April 2011 serta Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 73 tanggal 26 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tertanggal 23 Februari 2011, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas *(due diligence)* terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalimanatan Efek Bersifat Utang.

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
FICS Group
Plaza Mandiri Lt. 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190

r. Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*

Sehubungan dengan emisi Sukuk *Mudharabah* Bank Sulsel I Tahun 2011 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 36 tanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 14 tanggal 8 April 2011 serta Perubahan II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 No. 76 tanggal 26 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk *Mudharabah*.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat Sukuk *Mudharabah* atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Sukuk *Mudharabah* dalam rangka Penawaran Umum "Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011" adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 17/STTD-WA/PM/1999 tanggal 27 Oktober 1999 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan Surat Pernyataan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tertanggal 23 Februari 2011, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas *(due diligence)* terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud dengan Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalimanatan Efek Bersifat Utang. Wali Amanat Sukuk mempunyai pejabat penanggungjawab dan/atau tenaga ahli di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal sesuai Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.13 angka 3.a.2.c.

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
FICS Group
Plaza Mandiri Lt. 22 Jl. Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta 12190.

s. Agen Pembayaran Obligasi

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Akta No. 38 tertanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Agen Pembayaran No. 78 tertanggal 27 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran :
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lantai 5
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1001
Faksimili: (021) 5299 1199

t. Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah*

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Akta No. 39 tertanggal 25 Februari 2011 dan Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk *Mudharabah* No. 79 tertanggal 27 April 2011 yang semuanya dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi S.H., yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Dana Sukuk dan pembayaran Nisbah Pemegang Sukuk *Mudharabah* akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk *Mudharabah* melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan.

Bilamana tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran :
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower 1, Lt. 5
Jl. Jendral Sudirman kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 52991001
Faksimili: (021) 52991199

u. Tindakan Korporasi *(Corporate Action)* yang menyebabkan Perubahan Jumlah Efek

Tidak terdapat adanya tindakan korporasi *(corporate action)* yang menyebabkan Perubahan Jumlah Efek (Obligasi dan Sukuk *Mudharabah*) yang diterbitkan Bank Sulselbar.

v. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku

Tidak terdapat perubahan jumlah efek (Obligasi dan Sukuk *Mudharabah*) Bank Sulselbar, dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.

Ikhtisar Obligasi & Sukuk *Mudharabah*

Obligasi	Jumlah (Rp)	Waktu	Tingkat Bunga/ Nisbah	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat*
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri A	50.000.000.000,-	3 tahun	9,5%	12 Mei 2011	12 Mei 2014	idA
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 Seri B	350.000.000.000,-	5 tahun	10,4%	12 Mei 2011	12 Mei 2016	idA
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000.000.000,-	5 tahun	72,5%	12 Mei 2011	12 Mei 2016	idA

* *Rating* oleh Pefindo (Periode 31 Januari 2012 – 1 Februari 2013)

Obligasi Korporasi

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jumlah Obligasi
Penawaran Umum Obligasi I Bank Sulselbar Tahun 2011	12 Mei 2011	400.000.000.000,-

Sukuk *Mudharabah*

Keterangan	Tanggal Penerbitan	Jumlah Obligasi
Penawaran Umum Sukuk Mudharabah I Bank Sulselbar Tahun 2011	12 Mei 2011	100.000.000.000,-

Kronologis Pembayaran Bunga Obligasi

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rupiah)
Pembayaran Bunga Ke – 1 (12 Mei 2011 – 11 Agustus 2011)	11 Agustus 2011	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 2 (12 Agustus 2011 – 11 November 2011)	11 November 2011	10.287.500.000,00
Pembayaran Bunga Ke – 3 (12 November 2011 – 11 Februari 2012)	10 Februari 2012	12.872.561.107,07
Pembayaran Bunga Ke – 4 (12 Februari – 11 Mei 2012)	11 Mei 2012	12.851.492.098,61
Pembayaran Bunga Ke – 5 (12 Mei – 11 Agustus 2012)	10 Agustus 2012	12.857.522.233,19
Pembayaran Bunga Ke – 6 (12 Agustus – 11 November 2012)	09 November 2012	12.869.076.713,30

Kronologis Pembayaran Bagi Hasil Sukuk *Mudharabah*

Keterangan	Tanggal Pembayaran	Jumlah Pembayaran (Rupiah)
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 1 (12 Mei 2011 – 11 Agustus 2011)	12 Agustus 2011	2.600.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 2 (12 Agustus 2011 – 11 November 2011)	11 November 2011	2.600.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 3 (12 November 2011 – 11 Februari 2012)	11 Februari 2013	2.585.061.107,06
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 4 (12 Februari – 11 Mei 2012)	2 Mei 2012	2.563.992.098,62
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 5 (12 Mei – 11 Agustus 2012)	1 Agustus 2012	2.570.022.233,20
Pembayaran Bagi Hasil Ke – 6 (12 Agustus – 11 November 2012)	24 Oktober 2012	2.581.576.713,33

AKSES INFORMASI

Sebagai wujud penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dalam hal transparansi, Bank Sulselbar menyediakan akses informasi kepada pemegang saham dan *stakeholder* melalui Sekretaris Perusahaan yang menjalankan fungsi *corporate communication* dan *corporate relation.* Saat ini Sekretaris Perusahaan Bank Sulselbar adalah Irmayanti Sulthan. Kemudahan akses informasi mengenai Bank Sulselbar kepada publik juga merupakan bagian dari penerapan azas keterbukaan dan kepatuhan terhadap peraturan Bapepam-LK. Informasi yang disediakan yaitu dalam bentuk *press release* secara berkala pada beberapa media setempat, baik cetak maupun elektronik, serta dapat pula diakses melalui situs www.banksulselbar.co.id Bank Sulselbar juga menyediakan *contact center* pada nomor 0411-859171.

Nama Perusahaan
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16
Makassar 90125, Indonesia
Tel. 0411 859171 (*Hunting*)
Fax. 0411 859174

Pendirian Perusahaan
13 Januari 1961

Pencatatan Obligasi
Bursa Efek Indonesia

Jenis Usaha
Bank Umum

Kode Obligasi
BSSB

Sekretaris Perusahaan
A. Irmayanti Sulthan
Kantor Pusat
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16
Makassar 90125
Telp. 0411 – 859171
Fax. 0411 – 857174

Situs Perusahaan
www.banksulselbar.co.id

Contact Center
0411-859171

Pemegang Saham Bank Sulselbar
Sampai dengan 31 Desember 2012, Bank Sulselbar dimiliki oleh 31 pemegang saham, yang terdiri 2 pemerintah provinsi yaitu Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta 29 pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat .

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2013
RUPS Tahunan Tahun Buku 2012 akan diselenggarakan paling lambat akhir Mei 2013 di Makassar.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PROFIL ANAK PERUSAHAAN, PENYERTAAN SAHAM, YAYASAN, DANA PENSIUN, SERIKAT PEGAWAI DAN AFILIASI BANK SULSELBAR

HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM DAN AFILIASI BANK SULSELBAR

Anak Perusahaan

Bank Sulselbar tidak memiliki anak perusahaan dan atau tidak memiliki saham lebih dari 50% pada perusahaan lain.

Penyertaan Modal

- **PT. Sarana Sulsel Ventura (SSV)**

  PT. Sarana Sulsel Ventura merupakan perusahaan modal ventura yang membantu menyediakan permodalan untuk pembiayaan khususnya untuk sektor mikro dan kecil. Bank Sulselbar memiliki afiliasi dengan PT. Sarana Sulsel Ventura melalui penyertaan modal sebesar Rp81.584.000,- per 31 Desember 2012.

  Alamat Kantor PT. Sarana Sulsel Ventura
  Graha Ventura
  Jl. Letjen. Hertasning Raya Timur No. 18D
  Makassar 90222
  Telp. 0411 – 458415, 458416
  Fax. 0411 – 458413

- **Badan Kesejahteraan Warga (BKW) PT Bank Sulselbar**

  Bank Sulselbar memiliki afiliasi dengan Badan Kesejahteraan Warga (BKW) PT Bank Sulselbar. Untuk kelancaran pengelolaan Badan Kesejahteraan Warga (BKW) PT Bank Sulselbar, telah ditetapkan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/023/DIR/II/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang Susunan Pengurus Badan Kesejahteraan Warga PT Bank Sulselbar, sebagai berikut :

  Ketua : H. Silahuddin
  Sekretaris : H. Abdul Munir M
  Bendahara : H. Yarmin Naafi

  Alamat Badan Kesejahteraan Warga PT Bank Sulselbar
  Jl. Sam Ratulangi No. 7 Blok A12 – A13
  Makassar 90125
  Telp 0411 - 8111281
  Faks 0411 - 8111282

- **Dana Pensiun BPD Sulsel**

  Untuk memelihara kesinambungan penghasilan setelah masa purna bhakti serta dalam rangka meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja para pegawai, maka manajemen mendirikan Dana Pensiun BPD Sulsel. Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2012 sebagai berikut :

  Ketua : Hj. Srie Caturwatie
  Sekretaris : H.M. Chatib Saleh
  Bendahara : Diah Mardiana

  Alamat Dana Pensiun BPD Sulsel
  Jl. Sam Ratulangi No. 7 Blok C 10
  Makassar 90125
  Telp 0411 - 8111358
  Faks 0411 - 8111359

- **Serikat Pekerja Bank Sulselbar**

  Serikat Pekerja Bank Sulselbar dibentuk dalam rangka menjamin dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kondusif antara Bank dan Pegawai sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank, kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai yang selaras dengan pelaksanaan visi, misi dan nilai-nilai budaya bank serta dapat menciptakan peningkatan produktifitas dan usaha bank yang berkesinambungan. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989), maka Bank Sulselbar memiliki Serikat Pekerja yang telah terdaftar pada Kantor Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja adalah 560.568/1162/T.Kerja Tanggal 22 September 2005 dengan No. Register : 474/OP/SP-MANDIRI/IX/2005.

  Pengurus Serikat Pekerja Bank Sulselbar untuk Periode 2011 – 2013 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Serikat Pekerja Bank Sulselbar Nomor: Kep/03/MUBES/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Nomor : KEP/06/MUBES/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang menetapkan Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Sulselbar adalah H. Farouk Bamatraf.

Afiliasi

- **Afiliasi dengan BUMD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat**

  Bank Sulselbar merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dengan demikian Bank Sulselbar memiliki afiliasi dengan seluruh BUMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

- **Afiliasi dengan BPD Seluruh Indonesia**

  Bank Sulselbar adalah anggota Asosiasi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (ASBANDA) dan untuk itu Bank Sulselbar memiliki afiliasi dengan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia. Keanggotaan Bank Sulselbar di ASBANDA diharapkan akan meningkatkan potensi Bank Sulselbar dalam mewujudkan BPD *Regional Champion* dengan dukungan dan peran ASBANDA di kancah perbankan nasional.

PEMERINGKATAN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT

Guna memenuhi ketentuan sebagaimana Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) No. KEP-135/BL/2006 tanggal 14 Desember 2006 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, berikut adalah hasil pemeringkatan dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Persero).

Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2012

Keterangan	Peringkat	Periode
Bank Sulselbar	idA (*Single A, Stable Outlook*)	31 Januari 2012 – 1 Februari 2013
Obligasi I Tahun 2011 (Rp400 miliar)	idA (*Single A, Stable Outlook*)	31 Januari 2012 – 1 Februari 2013
Sukuk *Mudharabah* I Tahun 2011 (Rp100 miliar)	idAsy (*Single A, Stable Outlook*)	31 Januari 2012 – 1 Februari 2013

Pemeringkatan Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Tahun 2011

Keterangan	Peringkat	Periode
Bank Sulselbar	idA (*Single A, Stable Outlook*)	24 Maret 2011 – 1 Februari 2012
Obligasi I Tahun 2011 (Rp400 miliar)	idA (*Single A, Stable Outlook*)	24 Maret 2011 – 1 Februari 2012
Sukuk *Mudharabah* I Tahun 2011 (Rp100 miliar)	idAsy (*Single A, Stable Outlook*)	24 Maret 2011 – 1 Februari 2012

NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 (Underwriter)

Lead Underwriter
PT. Danareksa Sekuritas
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14,
Jakarta Pusat 10110 – Indonesia
Telp. (6221) 3509777, Fax.(6221) 3500989
www.danareksa.com

Joint Underwriter
PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas
Equity Tower Building 22nd Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53 SCBD,
Jakarta Selatan 12190 – Indonesia
Telp. (6221) 29916600, Fax. (6221) 5152454
www.aaasecurities.com

Wali Amanat
PT. Bank Mandiri (Persero)
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav 36-38,
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp. (6221) 52997777, Fax. (6221) 52997735
www.bankmandiri.co.id

Agen Pembayaran
PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Indonesia Stock Exchange Building,
1st Tower 5th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53,
Jakarta 12190 – Indonesia
Telp. (6221) 52991099, Fax. (6221) 52991199
www.ksei.co.id

Kantor Akuntan Publik (Laporan Keuangan Tahun 2010 – 2012)
Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang (dbS&d)
Jl. Raya Kalimalang Blok E No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 – Indonesia
Telp. (6221) 8611845, 8611847, 86610331, 86610334
Fax. (6221) 86611708, 86610401
basco@dnet.net.id
auditor_shs@yahoo.com

Konsultan Hukum
Wecolaw Office
Jl. Blora No. 31, Menteng, Jakarta 10310
Telp. (6221) 3917228, Fax. (6221) 3917440
www.wecolaw.com

Pemeringkat Efek
PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Panin Tower – Senayan City 17th Floor
Jalan Asia Afrika Lot 19,
Jakarta 10270 – Indonesia
Telp. (6221) 72782380, Fax. (6221) 72782370
www.pefindo.co.id

BAB 2

TINJAUAN BISNIS DAN OPERASIONAL

Untuk meningkatkan potensi kredit konsumer yang menjadi bisnis utama Bank Sulselbar dengan mempertahankan tingkat kolektibilitas agar tetap terjaga pada ambang batas yang aman...

TINJAUAN BISNIS KONSUMER

Bank Sulselbar membagi produk dan layanan dalam empat kategori yakni Perbankan Konsumer, Perbankan Komersial dan Korporasi, Perbankan Mikro dan Perbankan Syariah. Setiap kategori tersebut terdiri dari produk dan layanan pendanaan, kredit dan jasa lainnya yang terkait.

Perbankan Konsumer

Perbankan konsumer Bank Sulselbar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabah perorangan untuk produk simpanan dan kredit.

Pengimpunan Dana

Bank Sulselbar menyediakan beragam produk simpanan konsumer untuk memenuhi kebutuhan perbankan nasabahnya. Selain itu, produk simpanan yang ditawarkan kepada nasabah dilengkapi dengan fitur produk yang menarik sehingga meningkatkan daya saing produk simpanan konsumer Bank Sulselbar dan menjadi produk pilihan nasabah.

Produk simpanan konsumer Bank Sulselbar menjadi salah satu bagian dari strategi untuk menjaga dan meningkatkan komposisi pendanaan yang terjangkau dan kompetitif serta untuk menjaga tingkat likuiditas.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya meningkatkan nilai tambah dari setiap produknya melalui inovasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Kualitas pelayanan juga menjadi perhatian untuk menyajikan *service experience* yang lebih baik kepada nasabah sebagai bentuk implementasi pelayanan prima, baik layanan yang bersifat *tangible* yakni gedung kantor dan *service hall* yang nyaman, maupun *intangible service* berupa layanan transaksi yang ramah, cepat, akurat dan aman.

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan	
	Rp Juta						Rp Juta	%
Giro	1.924.873	1.515.390	1.249.139	1.704.842	2.051.397	1.949.732	(101.665)	(4,96%)
Tabungan	680.038	783.927	734.667	974.441	1.159.404	1.440.422	281.018	24,24%
Deposito	439.782	460.633	915.241	1.381.280	2.080.284	2.011.488	(68.796)	(3,31%)
Total Dana Pihak Ketiga	**3.044.693**	**2.759.950**	**2.899.047**	**4.060.563**	**5.291.085**	**5.401.642**	**110.557**	**2,09%**

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2008 – 2012

	2008	2009	2010	2011	2012
Giro	21.212	21.877	20.625	7.220	20.554
Tabungan	172.891	183.048	228.538	288.344	364.886
Deposito	1.656	2.263	3.011	1.394	4.090
Jumlah Rekening	**195.759**	**207.188**	**252.174**	**296.958**	**389.530**

Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2012

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012
Konvensional

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	%
Giro	1.924.873	1.513.609	1.247.225	1.699.255	2.040.547	1.940.305	(100.242)	(4,91%)	37,58%
Tabungan	676.920	777.369	723.027	954.452	1.128.372	1.395.944	267.570	23,71%	27,04%
Deposito	439.150	450.070	887.385	1.319.558	1.984.682	1.826.220	(158.462)	(7,98%)	35,37%
Total Dana Pihak Ketiga	**3.040.943**	**2.741.048**	**2.857.637**	**3.973.265**	**5.153.601**	**5.162.469**	**8.866**	**0,17%**	**100,00%**

Unit Usaha Syariah

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	%
Giro	0	1.781	1.914	5.587	10.850	9.427	(1.423)	(13,12%)	3,94%
Tabungan	3.118	6.558	11.640	19.989	31.030	44.478	13.448	43,34%	18,60%
Deposito	632	10.563	27.856	61.722	95.602	185.268	89.666	93,79%	77,46%
Total Dana Pihak Ketiga	**3.750**	**18.902**	**41.410**	**87.298**	**137.482**	**239.173**	**101.691**	**73,97%**	**100,00%**

Komposisi Dana Pihak Ketiga Berdasarkan Unit Usaha Tahun 2012

Total dana pihak ketiga (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) tahun 2012 mencapai Rp5.162.469 juta atau bertumbuh 0,17% dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp5.153.603 juta. Pendanaan Bank Sulselbar bersumber dari 371.161 rekening dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Pertumbuhan ini disebabkan oleh perkembangan positif simpanan konsumer Bank Sulselbar.

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012
(tidak termasuk Unit Usaha Syariah)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Giro	1.924.873	1.513.609	1.247.225	1.699.255	2.040.547	1.940.305	(100.242)	(4,91%)	37,58%
Tabungan	676.920	777.369	723.027	954.452	1.128.372	1.395.944	267.572	23,71%	27,04%
Deposito	439.150	450.070	887.385	1.319.558	1.984.682	1.826.220	(158.462)	(7,98%)	35,37%
Total Dana Pihak Ketiga	**3.040.943**	**2.741.048**	**2.857.637**	**3.973.265**	**5.153.603**	**5.162.469**	**8.868**	**0,17%**	**100,00%**

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar (Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah) Tahun 2009 – 2012

	2009	2010	2011	2012
Giro	21.783	20.500	7.069	20.380
Tabungan	180.745	223.366	277.233	347.937
Deposito	1.983	2.452	524	2.844
Jumlah Rekening	**204.511**	**246.318**	**284.826**	**371.161**

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) Tahun 2007 - 2012 (Rp Juta)

Komposisi Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2012 (tidak termasuk Unit Usaha Syariah)

Kenaikan DPK yang tertinggi pada tahun 2012 adalah tabungan yang persentase pertumbuhannya mencapai 23,71%. Peningkatan tabungan dipengaruhi oleh kenaikan signifikan pada Tapemda Pensiunan sebesar 10024,88%, Tampan (Tabungan Masa Depan) 213,17% dan Tabungan-Ku 100,62%. Tapemda Pensiunan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari seluruh produk tabungan Bank Sulselbar pada tahun 2012 disebabkan oleh karena adanya migrasi rekening yakni rekening Simpeda nasabah pensiunan dialihkan ke tabungan Tapemda Pensiunan sesuai dengan segmen produk Tapemda Pensiunan yaitu pensiunan PNS. Jumlah rekening Tapemda Pensiunan pada tahun 2011 sebanyak 97 rekening dan dampak dari migrasi rekening tersebut, Tapemda Pensiunan per 31 Desember 2012 meningkat menjadi 8.038 rekening.

Tabungan Masa Depan (Tampan) yang diluncurkan pada tahun 2010 telah menjadi produk unggulan Bank Sulselbar karena memiliki manfaat investasi yang menguntungkan bagi nasabah. Tampan merupakan simpanan berbasis asuransi dengan manfaat investasi sehingga memiliki daya tarik signifikan bagi nasabah untuk mempercayakan rencana masa depan dan investasi dengan setoran ringan setiap bulannya sebesar minimal Rp100.000,- untuk jangka waktu paling kurang 12 (dua belas) bulan.

Deposito pada tahun 2012 pencapaiannya lebih rendah dibandingkan deposito tahun 2011 yakni dari Rp1.984.682 juta menjadi Rp1.826.220 juta pada tahun 2012. Hal ini dipengaruhi oleh karena sebagian besar dana Pemda yang biasanya ditempatkan di giro, kini ditempatkan di deposito dengan *rate* yang lebih kompetitif dibandingkan giro. Dan pada akhir tahun terjadi penarikan sebagian besar dana simpanan deposito Pemda untuk melakukan pembayaran proyek – proyek Pemda. Demikian pula halnya dengan giro, penurunan pada tahun 2012 disebabkan adanya penarikan Giro Pemda dalam jumlah besar yang akan digunakan untuk membiayai proyek – proyek Pemda.

Meskipun giro dan deposito pada tahun 2012 pencapaiannya lebih rendah dari tahun sebelumnya, namun komposisinya terhadap total dana pihak ketiga tahun 2012 (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) masih didominasi oleh giro dan deposito dengan komposisi masing – masing sebesar 37,58% dan 35,37%, sedangkan tabungan porsinya sebesar 27,04%.

GIRO

Giro adalah simpanan dalam rupiah pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (misalnya bilyet giro, warkat, dll).

Giro (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp1.940.305 juta dan lebih rendah dibandingkan perolehan giro tahun 2011 sebesar Rp2.040.547 juta. Rendahnya pencapaian giro tahun 2012 dipengaruhi oleh karena adanya penarikan simpanan, khususnya giro Pemda untuk melakukan pembayaran proyek – proyek Pemda yang jatuh tempo pada akhir tahun.

Posisi giro merupakan sumber dana penyumbang terbesar terhadap total DPK, baik unit konvensional maupun total DPK Bank Sulselbar secara keseluruhan, dan untuk tahun 2012 porsinya sebesar 37,58% dari total DPK unit konvensional dan 99,52% terhadap total total giro konsolidasi.

Giro Bank Sulselbar berdasarkan hubungan atau relasinya dengan Bank, terdiri dari giro dengan pihak berelasi dan giro dengan pihak ketiga. Giro dengan pihak berelasi yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan bank yaitu pemegang saham dan pengurus bank (Dewan Komisaris dan Direksi) serta pejabat eksekutif bank. Sedangkan giro pihak ketiga merupakan simpanan giro yang pendanaannya bersumber nasabah masyarakat umum. Komposisi giro dengan pihak berelasi pada tahun 2012 sebesar 19,53%, sedangkan giro pihak ketiga sebesar 80,47% terhadap total giro.

Tingkat suku bunga Giro Bank Sulselbar Tahun 2012, sebagai berikut :

- Jasa Giro Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar 4% p.a dari saldo harian.
- Jasa Giro Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar 2,5% p.a dari saldo harian.
- Jasa Giro Jawatan/Dinas dan Swasta sebesar 2,5% p.a dari saldo harian
- Jasa Giro Antar Bank sebesar 2,5% p.a dari saldo harian
- Jasa Giro Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk Porsi Haji sebesar 1% p.a dari saldo terendah
- Jasa Giro Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah sebesar 0% p.a dari saldo terendah
- Saldo minimum Giro Swasta sebesar Rp1.000.000,- dan apabila di bawah saldo minimum tidak diberikan jasa giro.

Giro Bank Sulselbar (tidak termasuk Unit Usaha Syariah)
Berdasarkan Hubungan dengan Bank Tahun 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Giro Pihak Berelasi	423.059	397.953	373.717	499.824	351.299	378.904	27.605	7,86%	19,53%
Giro Pihak Ketiga	1.501.814	1.115.656	873.508	1.199.431	1.689.248	1.561.401	(127.847)	(7,57%)	80,47%
Total Giro	**1.924.873**	**1.513.609**	**1.247.225**	**1.699.255**	**2.040.547**	**1.940.305**	**(100.242)**	**(4,91%)**	**100,00%**

Rencana Pengembangan dan Strategi Pemasaran

Simpanan giro Bank Sulselbar sebagian besar bersumber dari dana – dana pemerintah daerah, meskipun beberapa pemerintah daerah juga mulai menempatkan dananya dalam bentuk simpanan deposito. Untuk itu, akan diupayakan pula untuk dimaksimalkan penghimpunannya dari non pemerintah daerah yaitu dari korporasi dan swasta. Hal ini dimaksudkan agar komposisi giro pemerintah daerah dan giro non pemerintah daerah diharapkan akan seimbang sehingga simpanan giro Bank Sulselbar tidak hanya didominasi dana pemerintah daerah saja.

TABUNGAN

Tabungan (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp1.395.944 juta atau meningkat 23,71% dari tahun 2011 sebesar Rp1.128.374 juta. Proporsi tabungan terhadap total DPK unit konvensional sebesar 27,04% dan 96,91% terhadap total tabungan konsolidasi.

Peningkatan tabungan konvensional dipengaruhi oleh diberlakukannya tingkat suku bunga secara *tiering* atau bertingkat sehingga mendorong nasabah untuk terus meningkatkan saldo tabungannya. Di samping itu, implementasi pelayanan prima Bank Sulselbar yang secara bertahap mulai berjalan dengan konsisten pada seluruh kantor cabang juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan tabungan Bank Sulselbar.

Tabungan Bank Sulselbar berdasarkan hubungan atau relasinya dengan Bank, terdiri dari tabungan dengan pihak berelasi dan tabungan dengan pihak ketiga. Tabungan dengan pihak berelasi yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan bank yaitu pemegang saham dan pengurus bank (Dewan Komisaris dan Direksi) serta pejabat eksekutif bank. Sedangkan tabungan pihak ketiga merupakan simpanan tabungan yang pendanaannya bersumber dari nasabah masyarakat umum.

Penghimpunan tabungan Bank Sulselbar diperoleh melalui produk Tabungan Simpeda, Tabungan Tapemda Sayang Petani, Tapemda Pelajar dan Mahasiswa, Tapemda Pensiunan, Tabungan Haji, Tabungan Masa Depan (Tampan), dan Tabungan-Ku.

Tabungan Bank Sulselbar (Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah) Berdasarkan Jenis Produk Tahun 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Simpeda	637.405	636.225	584.422	715.366	843.433	996.144	152.711	18,11%	71,36%
Tampan	0	0	0	0	22.085	69.164	47.079	213,17%	4,95%
Tapemda	27.609	126.005	122.717	174.171	182.209	202.522	20.313	11,15%	14,51%
Tapemda Pelajar & Mahasiswa	0	0	0	0	87	78	(9)	(10,34%)	0,01%
Tapemda Sayang Petani	0	0	0	34.443	46.567	36.305	(10.261)	(22,04%)	2,60%
Tapemda Pensiunan	0	0	0	0	422	42.727	42.305	10024,88%	3,06%
Tabungan-KU	0	0	0	11.689	12.649	25.374	12.726	100,62%	1,82%
Tabungan Haji	11.906	15.139	15.888	18.783	20.922	23.630	2.708	12,94%	1,69%
Total Tabungan	**676.920**	**777.369**	**723.027**	**954.452**	**1.128.374**	**1.395.944**	**267.570**	**23,71%**	**100,00%**

Tabungan Bank Sulselbar (Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah) Berdasarkan Hubungan dengan Bank Tahun 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Tabungan Pihak Berelasi	3.216	2.246	2.990	4.111	4.604	5.146	542	11,77%	0,37%
Tabungan Pihak Ketiga	673.704	775.123	720.037	950.341	1.123.770	1.390.798	267.028	23,76%	99,63%
Total Tabungan	**676.920**	**777.369**	**723.027**	**954.452**	**1.128.374**	**1.395.944**	**267.570**	**23,71%**	**100,00%**

RENCANA PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Upaya dan strategi pemasaran yang ditempuh untuk mendorong peningkatan portofolio tabungan demi memperkuat pertumbuhan dana konsumer antara lain mengembangkan fitur produk, aktivitas pemasaran yang aktif, peningkatan kualitas layanan dan perluasan jaringan kantor serta *delivery channel* untuk memudahkan nasabah menjangkau layanan Bank Sulselbar dimanapun mereka berada.

Tabungan Simpeda

Simpeda adalah tabungan produk simpanan BPD seluruh Indonesia yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi nasabah. Manfaat Simpeda antara lain *Real Time On-Line System* sehingga dapat dibuka dan bertransaksi di seluruh kantor operasional Bank Sulselbar. Nasabah Simpeda berkesempatan memperoleh undian berhadiah untuk memotivasi masyarakat menabung pada Bank Sulselbar.

Tabungan Simpeda diperuntukkan bagi perseorangan, yayasan, badan hukum, dan lembaga lainnya.

Suku bunga Tabungan Simpeda Bank Sulselbar tahun 2012 diberlakukan secara *tiering* sebagai berikut :

Tier	Saldo	*Rate*
I	Sampai dengan Rp2.000.000,-	0%
II	> Rp2.000.000 – Rp5.000.000,-	0,25% p.a
III	> Rp5.000.000 – Rp10.000.000,-	0,50% p.a
IV	> Rp10.000.000 – Rp500.000.000,-	2% p.a
V	> Rp500.000.000,-	3% p.a

Tabungan Simpeda Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp996.114 juta atau mengalami kenaikan 18,11% dari Rp843.433 juta pada tahun 2011. Porsi Simpeda terhadap total tabungan konvensional sebesar 71,36% dan 69,16% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

Nasabah tabungan Simpeda Bank Sulselbar berkesempatan untuk mendapatkan Undian Berhadiah Uang Tunai melalui program Panen Rejeki BPD yang merupakan Program Undian Berhadiah untuk Tabungan Simpeda yang diselenggarakan oleh ASBANDA (Asosiasi Bank Daerah) dengan mengikutsertakan seluruh nasabah Simpeda BPD Seluruh Indonesia (BPDSI). Total hadiah undian Panen Rejeki BPD sebesar Rp6 miliar yang pengundiannya diselenggarakan dua kali (dua periode) dalam satu tahun yang masing – masing periode nominal hadiahnya sebesar Rp 3 miliar.

Tabungan Tapemda

Dalam rangka meningkatkan potensi Tabungan Tapemda Bank Sulselbar untuk mendorong pertumbuhan *outstanding* Tabungan Tapemda, maka telah dilakukan *repackaging* produk dengan membagi segmen nasabah berdasarkan pekerjaan dengan tingkat suku bunga yang juga diberlakukan *tiering* dan kompetitif untuk masing – masing segmen.

1. **Tapemda**

   Tabungan Tapemda Bank Sulselbar diperuntukkan bagi nasabah kredit atau debitur kredit produktif Bank Sulselbar dengan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau. Tabungan Tapemda pada tahun 2012 meningkat 11,15% menjadi Rp202.522 juta dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp182.209 juta.

Komposisi Tapemda terhadap total tabungan konvensional sebesar 14,51% dan 14,06% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

Tingkat suku bunga Tabungan Tapemda Bank Sulselbar tahun 2012 ditetapkan sebesar 2,5% p.a.

2. Tabungan Tapemda Sayang Petani

Simpanan yang diperuntukkan bagi para petani dan nelayan untuk menanamkan kebiasaan positif menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan pada bank dibandingkan dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif. Tabungan Tapemda Sayang Petani tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

Suku bunga Tabungan Tapemda Sayang Petani Bank Sulselbar tahun 2012 diberlakukan bertingkat berdasarkan jumlah saldo simpanan, sebagai berikut :

Saldo	*Rate*
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.000 – Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.000 – Rp250.000.000,-	1,5% p.a
> Rp250.000.000,-	2% p.a

Tabungan Tapemda Sayang Petani pada tahun 2012 sebesar Rp36.305 juta atau lebih rendah dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp46.567 juta.

Porsi Tapemda Sayang Petani terhadap total tabungan konvensional sebesar 2,60% dan 2,52% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

3. Tabungan Tapemda Pelajar & Mahasiswa

Simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar (SD, SMP, dan SMA) dan mahasiswa yang bertujuan menanamkan kebiasaan menabung untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Tapemda Pelajar & Mahasiswa tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

Rate Tabungan Tapemda Pelajar & Mahasiswa Bank Sulselbar tahun 2012 diberlakukan bertingkat berdasarkan jumlah saldo simpanan, sebagai berikut :

Saldo	*Rate*
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.000 – Rp10.000.000,-	1% p.a
> Rp10.000.000 – Rp250.000.000,-	1,5% p.a
> Rp250.000.000,-	2% p.a

Tabungan Tapemda Pelajar & Mahasiswa pada tahun 2012 sebesar Rp78 juta atau lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp87 juta.

4. Tapemda Pensiunan

Simpanan yang diperuntukkan bagi pensiunan PNS yang penerimaan gaji pensiunannya melalui Bank Sulselbar. Tapemda Pensiunan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

Suku bunga Tapemda Pensiunan Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 2,5% p.a.

Tabungan Tapemda Pensiunan pada tahun 2012 meningkat 10024,88% dari Rp422 juta pada tahun 2011 menjadi Rp42.727 juta pada tahun 2012. Tapemda Pensiunan mencatatkan pertumbuhan tertinggi dari seluruh produk tabungan Bank Sulselbar pada tahun

2012 disebabkan oleh karena adanya migrasi rekening yakni rekening Simpeda nasabah pensiunan dialihkan ke tabungan Tapemda Pensiunan sesuai dengan segmen produk Tapemda Pensiunan yaitu pensiunan PNS. Jumlah rekening Tapemda Pensiunan pada tahun 2011 sebanyak 97 rekening dan dampak dari migrasi rekening tersebut, Tapemda Pensiunan per 31 Desember 2012 meningkat menjadi 8.038 rekening.

Porsi Tapemda Pensiunan terhadap total tabungan konvensional sebesar 3,06% dan 2,97% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

Tabungan Haji

Tabungan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji.

Suku bunga Tabungan Haji Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 3% p.a dari saldo harian. Pemberian bunga Tabungan Haji Bank Sulselbar (balas jasa), nasabah diberikan pilihan bunga tabungan (balas jasa) sebagai berikut :

a. Bersedia menerima bunga tabungan (balas jasa)

b. Bunga tabungan (balas jasa) disalurkan ke Badan atau Yayasan yang dipilih nasabah

c. Tidak menginginkan bunga tabungan (balas jasa)

Tabungan Haji pada tahun 2012 sebesar Rp23.630 juta atau mengalami kenaikan 12,94% dari Rp20.922 juta pada tahun 2011. Porsi Tabungan Haji terhadap total tabungan konvensional sebesar 1,69% dan 1,64% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

Tabungan Masa Depan (Tampan)

Tabungan berjangka dalam rupiah untuk mewujudkan rencana masa depan nasabah penabung dengan sistem setoran rutin bulanan tetap setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penabung. Tabungan Tampan dicairkan pada saat jatuh tempo dan pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan *pinalty break* sesuai ketentuan bank.

Tingkat suku bunga Tabungan Masa Depan Bank Sulselbar Tahun 2012 untuk seluruh jangka waktu penempatan dana sebesar 4,5%.

Tabungan Tampan pada tahun 2012 sebesar Rp69.164 juta atau mengalami kenaikan 213,17% dari Rp22.085 juta pada tahun 2011. Porsi Tabungan Tampan terhadap total tabungan konvensional sebesar 4,95% dan 4,80% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).
Sebagai produk simpanan yang mewajibkan nasabah untuk melakukan penyetoran secara rutin setiap bulannya selama jangka waktu tertentu, maka periode jangka waktu simpanan Tampan yaitu minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

Tabungan Masa Depan (Tampan) Berdasarkan Jangka Waktu

Jangka Waktu	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	Rp Juta					
1 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	266	2.069
2 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	13.559	41.936
3 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	3.203	9.637
4 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	674	2.263
5 tahun	n.a	n.a	n.a	n.a	4.383	13.259
Total Tampan	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**22.085**	**69.164**

Keterangan : Tabungan Tampan mulai diluncurkan pada tahun 2011

TabunganKU

Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Suku bunga TabunganKU Bank Sulselbar tahun 2012 diberlakukan secara bertingkat sebagai berikut :

Saldo	*Rate*
Kurang dari Rp500.000,-	0%
> Rp500.000 – Rp1.000.000,-	0,25% per tahun
> Rp1.000.000,-	1% per tahun

TabunganKU pada tahun 2012 meningkat 100,62% dari Rp12.648 juta pada tahun 2011 menjadi Rp25.374 juta pada tahun 2012.

Porsi TabunganKU terhadap total tabungan konvensional sebesar 1,82% dan 1,76% terhadap total tabungan secara keseluruhan (termasuk tabungan syariah).

DEPOSITO

Simpanan dalam rupiah pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan atas simpanan itu Bank memberi bunga sesuai suku bunga yang ditetapkan pada waktu perjanjian atau persetujuan dibuat. Deposito Bank Sulselbar berdasarkan hubungan atau relasinya dengan Bank, terdiri dari deposito dengan pihak berelasi dan deposito dengan pihak ketiga. Deposito dengan pihak berelasi yakni simpanan yang memiliki hubungan dengan bank yaitu pemegang saham dan pengurus bank (Dewan Komisaris dan Direksi) serta pejabat eksekutif bank. Sedangkan deposito pihak ketiga merupakan simpanan deposito yang pendanaannya bersumber nasabah masyarakat umum.

***Counter rate* Deposito Bank Sulselbar tahun 2012 sebagai berikut :**

Jangka Waktu	*Counter Rate*
1 Bulan	5,25% p.a
3 Bulan	5,25% p.a
6 Bulan	5,50% p.a
12 Bulan	5,50% p.a

Bank Sulselbar juga memberikan *special rate* Deposito untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan, sebagai berikut :

Jangka Waktu	*Special Rate*
3 Bulan	1 (satu) bps dari *counter rate* yakni 6,25% p.a dengan nominal penempatan > Rp1 miliar
6 Bulan	0,5 (nol koma lima) bps dari *counter rate* yakni 6% p.a dengan nominal penempatan > Rp1 miliar

Deposito Bank Sulselbar (tidak termasuk Unit Usaha Syariah) pada tahun 2012 sebesar Rp1.826.220 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp1.984.682 juta. Penurunan *outstanding* deposito pada tahun 2012 dipengaruhi oleh karena sebagian besar dana Pemda yang biasanya ditempatkan di giro, kini ditempatkan di deposito dengan *rate* yang lebih kompetitif dibandingkan giro. Dan pada akhir tahun terjadi penarikan sebagian besar dana simpanan deposito Pemda untuk melakukan pembayaran proyek – proyek Pemda yang jatuh tempo.

Persentase porsi deposito terhadap total deposito konvensional pada tahun 2012 sebesar 35,37% dan terhadap total deposito (termasuk deposito UUS) sebesar 90,79%.

Deposito Bank Sulselbar (Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah)
Berdasarkan Hubungan dengan Bank Tahun 2007 – 2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Deposito Pihak Berelasi	31.924	28.242	18.905	17.933	12.080	165	(11.915)	(98,63%)	0,01%
Deposito Pihak Ketiga	407.226	421.828	868.480	1.301.625	1.972.602	1.826.055	(146.547)	(7,43%)	99,99%
Total Deposito	**439.150**	**450.070**	**887.385**	**1.319.558**	**1.984.682**	**1.826.220**	**(158.462)**	**(7,98%)**	**100,00%**

PENYALURAN KREDIT

Pembiayaan konsumer Bank Sulselbar melalui penyaluran kredit tetap menjadi *core bussiness* Bank Sulselbar. Kredit konsumer porsi dan kontribusinya cukup besar terhadap total penyaluran kredit secara keseluruhan maupun kontribusinya terhadap total pendapatan. Pertumbuhan penyaluran kredit konsumer tahun 2012 (tidak termasuk syariah) mencapai 24,73% sebesar Rp4.341.548 juta dari posisi tahun 2011 sebesar Rp3.480.826 juta. Total penyaluran kredit konsumer Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar sekitar 75,58% dari total penyaluran kredit secara keseluruhan (tidak termasuk unit usaha syariah). Pertumbuhan penyaluran kredit konsumer pada tahun 2012 sejalan pula dengan peningkatan kemampuan pengelolaan kualitas aset bank.

Kredit Konsumer Bank Sulselbar (Tidak Termasuk Unit Usaha Syariah) Tahun 2007 – 2012
(Rp Juta)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	
KPR	100.257	74.372	58.880	40.202	26.145	14.910	(11.235)	(42,97%)	0,34%
Kredit Umum Lainnya	2.171.501	2.713.971	2.358.407	2.707.432	3.454.681	4.326.638	871.957	25,24%	99,66%
Total Kredit Konsumer	**2.271.758**	**2.788.343**	**2.417.287**	**2.747.634**	**3.480.826**	**4.341.548**	**860.722**	**24,73%**	**100,00%**

RENCANA PENGEMBANGAN DAN STRATEGI PEMASARAN

Untuk meningkatkan potensi kredit konsumer yang menjadi bisnis utama Bank Sulselbar dengan mempertahankan tingkat kolektibilitas agar tetap terjaga pada ambang batas yang aman, maka rencana strategis yang ditempuh antara lain mengembangkan fitur produk kredit konsumer, melakukan penyempurnaan proses bisnis dengan tetap memperhatikan kecepatan proses dan kualitas kredit yang baik serta memperluas jaringan kantor Bank Sulselbar sehingga mudah diakses oleh nasabah dan masyarakat.

Produk pembiayaan/kredit konsumer Bank Sulselbar, sebagai berikut :

Kredit Pegawai (KUL)

Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tujuan penggunaannya bersifat konsumtif. Suku bunga KUL tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit Multiguna

Kredit Multiguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan untuk memenuhi kebutuhan pegawai/ pensiunan yang sifatnya mendesak seperti pembayaran biaya anak sekolah.

Penerima fasilitas Kredit Multiguna adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sulselbar.

Suku bunga kredit multiguna tahun 2012 sebesar 9% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit DPRD

Skim Kredit DPRD bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penerima fasilitas kredit adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang penghasilannya dibayar melalui Bank Sulselbar.

Suku bunga kredit DPRD tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit Pensiunan

Kredit Pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada pensiun pegawai /janda/duda dan yatim piatu yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar. Kredit Pensiunan sebagai upaya membantu pensiunan pegawai negeri/janda/duda dan yatim piatu yang berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

Suku bunga kredit pensiunan tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit Pemilikan Motor

Kredit Pemilikan Motor bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan jenis kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Kredit Pemilikan Motor diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Karyawan atau Pegawai BUMD (termasuk Pegawai Bank Sulselbar) / BUMN / Perusahaan Swasta Nasional / lainnya, Profesional, Wiraswasta (Pengusaha) yang memenuhi persyaratan.

Suku bunga kredit pemilikan motor tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit Pemilikan Rumah

Kredit Pemilikan Rumah KPR bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan unit hunian baru maupun hunian lama/bekas berupa rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), toko, kios, kantor. Kredit Pemilikan Rumah dipertuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Karyawan atau Pegawai BUMD (termasuk Pegawai PT. Bank Sulselbar) / BUMN / Perusahaan Swasta Nasional / lainnya yang direkomendasi dan disetujui oleh Kantor Pusat, Profesional, Wiraswasta (Pengusaha).

Suku bunga kredit pemilikan rumah PNS tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Layanan Perbankan Konsumer

Selain penghimpunan dana dan menyalurkan kredit, Bank Sulselbar juga menyediakan layanan berbasis biaya sebagai sumber pendapatan *fee based income*, sebagai berikut :

ATM Bank Sulselbar

Kartu ATM Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama yang dapat diakses pada puluh ribu terminal ATM berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia. Fitur – fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (top up) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

Kartu PNS Elektronik (KPE)

Kartu PNS Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan yang telah mendapatkan legitimasi berdasarkan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Dalam rangka memfasilitasi fungsi perbankan pada kartu KPE, Bank Sulselbar bekerjasama dengan BKN untuk mengoptimalkan KPE agar dapat digunakan melakukan aktivitas perbankan yaitu berfungsi pula sebagai Kartu ATM dengan layanan yang sama dengan layanan Kartu ATM nasabah Bank Sulselbar seperti informasi saldo; penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa *(top up)* telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

Kiriman Uang

Perintah nasabah kepada bank yang untuk mengirim/membayar dengan menyetorkan uang tunai atau atas beban rekening nasabah non tunai kepada seseorang/perusahaan/nasabah di tempat lain. Pelayanan jasa kiriman uang Bank Sulselbar terdiri dari kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

Inkasso

Jasa penagihan atas warkat dari bank lain yang telah diterbitkan oleh nasabahnya yang berada pada lokasi yang berbeda. Dalam jasa Inkasso, bank melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk pemberi amanat.

Transfer BI-RTGS.

Layanan jasa sistem transfer dana elektronik antar bank peserta BI RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

Bank Garansi (Jaminan Bank)

Semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak ketiga yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wanprestasi atau cidera janji. Garansi bank yang diberikan kepada nasabah dimaksudkan untuk memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya.

Surat Keterangan Bank (Referensi Bank)

Surat yang dikeluarkan bank yang dapat digunakan oleh nasabah sebagai sumber acuan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memenuhi persyaratan.

Penerimaan Pembayaran Tagihan Billing Provider

Bank Sulselbar memberikan layanan penerimaan pembayaran tagihan billing provider yang selain dapat dilakukan melalui ATM, juga dapat dilakukan melalui counter pembayaran yang disiapkan bank. Pembayaran tagihan yang dilayani pada *counter* bank antara lain *fix phone*/telepon rumah (Telkom); pembayaran listrik (PLN); telepon seluler, pra dan pasca bayar; dan pajak.

SMS *Banking*

Bank Sulselbar menyediakan layanan transaksi perbankan *mobile* dengan menggunakan telepon seluler. SMS *Banking* Bank Sulselbar menyediakan fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk melakukan informasi saldo dan isi ulang pulsa. SMS *Banking* Bank Sulselbar dapat diakses dengan menggunakan perintah SMS biasa.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

TINJAUAN BISNIS MIKRO

PERBANKAN MIKRO

Bank Sulselbar senantiasa berupaya menjaga komitmen untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran kredit dan pembiayaan untuk sektor mikro, kecil dan menengah (UKM). Sektor UKM memiliki peranan penting dalam perekonomian secara komprehensif karena dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun dalam penyerapan tenaga kerja.

Bank Sulselbar mengkategorikan nasabah UKM dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Nasabah usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Nasabah usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- dan (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

Nasabah usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Produk perbankan mikro Bank Sulselbar sumber pembiayaannya selain berasal dari internal Bank Sulselbar, ada juga yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi atau bantuan dana dari pihak eksternal, terutama pemerintah

Kredit UKM yang sumber dana pembiayaannya berasal dari internal Bank Sulselbar sebagai berikut :

Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR)
Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat serta menggali potensi usaha berbasis kerakyatan yang untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar melalui pendekatan pendanaan Bank. Fasilitas kredit diperuntukkan bagi pengusaha mikro baik perorangan maupun kelompok usaha produktif yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan dalam memperkuat dalam berproduksi, akses permodalan dan pemasaran bersama, jenis usaha yang dapat dibiayai adalah perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa.

Tingkat suku bunga kredit PUR tahun 2012 sebesar 16% p.a yang dihitung secara efektif.

Linkage* Program Pola *Executing
Linkage program merupakan bentuk optimalisasi peranan Bank Sulselbar dalam penguatan lembaga keuangan untuk mendorong dan memberdayakan potensi sektor usaha mikro kecil dan untuk mengoptimalkan fungsi intermediasi perbankan (Bank Perkreditan Rakyat maupun Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam - Koperasi) khususnya peningkatan jangkauan layanan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil.

Penyaluran pembiayaan melalui *linkage* program ini diperuntukkan bagi pelaku usaha UMKM yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dimana belum ada jaringan kantor Bank Sulselbar, antara lain dengan BPR Batara Wajo di Makassar, Kopsyah BMT As'adiyah di Sengkang, KPRI Marannu dan KPN Kopemda di Maros.

Kredit UKM yang merupakan Kredit Program yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi atau bantuan dana dari pihak eksternal, terutama pemerintah, sebagai berikut :

Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bertujuan untuk memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bergerak di bidang perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa dengan bunga yang kompetitif. KUR diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan produksi, permodalan dan pemasaran.

Tingkat suku bunga KUR tahun 2012 sebesar 13% p.a yang dihitung secara efektif.

Kredit Program PUNDI (Pusaka Mandiri)
Kredit PUNDI bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan keluarga prasejahtera, sejahtera I dan miskin yang telah mempunyai usaha kecil, serta membantu pengembangan manajemen produksi, pemasaran dan permodalan usaha keluarga-keluarga yang mulai mandiri tersebut menjadi pengusaha kecil atau pengusaha menengah yang profesional.

Kredit PUNDI adalah kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan Bank Sulselbar sejak tahun 2001 dalam penyaluran kredit produktif dengan pola *executing* untuk sektor usaha kecil (Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Industri).

Tingkat suku bunga Kredit Program PUNDI Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 12% p.a.

Kredit Program SUP 005
Kredit SUP 005 bertujuan untuk memberikan nilai tambah/ meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha mikro kecil dan membantu pengembangan sektor usaha mikro kecil dan koperasi yang layak dan belum mendapat bantuan pembiayaan.

Kredit SUP 005 merupakan Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) termasuk Koperasi yang disalurkan Bank Sulselbar sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dalam hal Pendanaan terhadap usaha Mikro dan Kecil.Tingkat suku bunga Kredit SUP 005 untuk usaha mikro sebesar 15% - 17% dan usaha kecil sebesar 12% - 14%.

TINJAUAN BISNIS KOMERSIAL & KORPORASI

PERBANKAN KOMERSIAL DAN KORPORASI

Perbankan konsumer Bank Sulselbar ditujukan untuk segmen komersial dan korporat yang difokuskan pada pembiayaan sektor produktif. Penyaluran kredit di sektor ini sumber dana pembiayaannya dapat berasal dari internal Bank Sulselbar dan melalui sindikasi kredit bersama bank lain untuk kebutuhan pembiayaan di atas Rp500 juta.

Produk perbankan komersial dan korporasi Bank Sulselbar sebagai berikut :

Kredit Usaha Mandiri (KUM)

Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif khususnya yang dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik oleh suami maupun istri yang memiliki usaha dan atau mengelola usaha produktif. Target pasar KUM yaitu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki usaha ataupun akan melakukan usaha. Jenis kredit yang disalurkan untuk skim KUM terdiri dari Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi/modernisasi yang dapat menunjang kegiatan usaha dan Kredit Modal kerja yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Tingkat suku bunga KUM diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.

Suku bunga kredit usaha mandiri tahun 2012 sebesar 17% p.a dihitung secara efektif bulanan dengan angsuran tetap.

Kredit PEMDA

Untuk mengoptimalisasikan peranan Bank Sulselbar dalam memberikan kontribusi yang bersifat pembiayaan terhadap program – program Pemerintah Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran. Penyaluran Kredit PEMDA sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah baik

pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Suku bunga kredit PEMDA tahun 2012 sebagai berikut :

- Kredit PEMDA Investasi sebesar 15% p.a dihitung dari saldo pokok.
- Kredit PEMDA Modal Kerja sebesar 15% p.a dihitung dari saldo pokok.

Kredit Konstruksi

Kredit Konstruksi bertujuan untuk mengoptimalisasikan peranan Bank Sulselbar dalam memberikan konstribusi yang sifatnya pembiayaan terhadap program-program Pemerintah Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran dan untuk menggerakkan sektor riil dan sebagai *Agent of Development*. Kredit Konstruksi akan menjalin hubungan antara perusahaan penyedia jasa konstruksi yang membutuhkan modal kerja untuk pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBD kabupaten/kota dan provinsi serta APBN yang dananya ditatausahakan pada Bank Sulselbar maupun di luar Bank Sulselbar.

Suku bunga kredit konstruksi tahun 2012 sebagai berikut :

Kredit Konstruksi Investasi

Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar 13% p.a - 15% p.a yang dihitung berdasarkan saldo pokok dan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sebesar 19% p.a - 22% p.a. dihitung berdasarkan saldo pokok.

Kredit Konstruksi Modal Kerja

Untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar 13% p.a - 15% p.a yang dihitung berdasarkan saldo pokok dan jangka waktu di atas 1 (satu) tahun sebesar 18% p.a - 21% p.a. dihitung berdasarkan saldo pokok.

Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi bertujuan untuk membiayai proyek – proyek pembangunan yang belum mampu dilakukan oleh Bank Sulselbar dengan menggunakan dana maupun resource sendiri akibat keterbatasan yang dimiliki, serta sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Suku bunga kredit sindikasi Bank Sulselbar mengikuti *rate* dari *leading* proyek sindikasi karena Bank Sulselbar hanya berperan sebagai *participant.*

Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar Rp17.968 juta dan Rp18.978 juta untuk PT. Perusahaan Listrik Negara dan Rp10.297 juta dan Rp7.020 juta untuk PT. Semen Tonasa. Partisipasi Bank Sulselbar dalam pinjaman sindikasi tersebut masing-masing sebesar 1,83% dan 0,42%.

	2012	2011	2010
	Rp Juta		
PT. PLN	17.968	18.978	10.715
PT. Semen Tonasa	10.297	7.020	2.305
Total	**28.265**	**25.998**	**13.020**

UNIT USAHA SYARIAH

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar beroperasi sejak tahun 2007 berdasarkan izin prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPBS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan pembukaan kantor cabang Bank Sulselbar Syariah yang pertama yakni Bank Sulselbar Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007 (11 Rabiul Akhir 1428 H) disusul pembukaan Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 November 2007 (18 Dzulqaidah 1428 H). Modal usaha Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp16 miliar.

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar didirikan untuk memberikan alternatif layanan perbankan yang berbasis syariah kepada masyarakat, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, UUS Bank Sulselbar fokus pada pembiayaan, terutama pembiayaan produktif, dan transaksi ritel lainnya. Dengan diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah memberikan dukungan bagi perkembangan perbankan syariah. UUS Bank Sulselbar akan terus bertumbuh secara optimal di masa-masa mendatang dengan adanya landasan hukum yang kuat.

Perkembangan UUS Bank Sulselbar yang mengesankan dari tahun ke tahun tercermin dari perolehan laba tahun 2012 yang meningkat 16% sebesar Rp. 17.441 juta dibandingkan laba tahun 2011 sebesar Rp. 11.223 juta. Peningkatan tersebut didukung pula dengan semakin beragamnya produk UUS Bank Sulselbar, baik pendanaan maupun pembiayaan, dan inovasi produk terus dilakukan untuk menyediakan produk berbasis syariah yang memiliki nilai lebih dan kompetitif untuk memenuhi kebutuhan nasabah UUS Bank Sulselbar akan produk perbankan syariah yang berkualitas.

Perluasan jaringan kantor juga merupakan faktor pendukung perkembangan UUS Bank Sulselbar. Jaringan operasional yang luas akan mempermudah nasabah untuk mengakses layanan UUS Bank Sulselbar. UUS Bank Sulselbar pada tahun 2012 terdiri dari 3 (tiga) kantor cabang syariah (KCS) dan 25 (dua puluh lima) Kantor Layanan Syariah (KLS) yang ditempatkan pada 25 kantor cabang konvensional.

Ikhtisar Keuangan UUS Bank Sulselbar

Ikhtisar Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar

Rp Juta

Kinerja Keuangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Total Aset	454.864	349.929	275.412	113.152	71.386	20.937
Dana Pihak Ketiga	239.173	137.482	87.298	41.410	18.902	3.750
- Giro	9.427	10.850	5.587	1.914	1.781	0
- Tabungan	44.478	31.032	19.989	11.640	6.558	3.118
- Deposito	185.268	95.602	61.722	27.856	10.563	632
Pembiayaan	370.557	259.959	143.903	79.818	60.657	9.262
Pendapatan Bagi Hasil	48.136	32.357	17.859	10.123	4.824	833
Beban Bagi Hasil	12.204	7.207	4.904	2.131	932	72
Laba (Rugi)	17.991	11.223	4.443	2.234	1.389	235

Pembiayaan

Pembiayaan UUS Bank Sulselbar disalurkan dengan menggunakan akad *murabahah* dan *mudharabah*. Jenis pembiayaan UUS Bank Sulselbar meliputi Piutang *Murabahah* Investasi, Piutang *Murabahah* Modal Kerja, Piutang *Murabahah* Lainnya dan Pembiayaan *Mudharabah* serta Piutang *Qardh* dalam bentuk Gadai Emas Berkah iB yang merupakan produk baru UUS Bank Sulselbar yang diluncurkan pada tahun 2012.

Total pembiayaan meningkat 42,54% menjadi Rp370.557 juta pada tahun 2012, dari Rp259.959 juta tahun 2011. Pembiayaan Bank Sulselbar tahun 2012 didominasi oleh pembiayaan dalam bentuk Piutang *Murabahah* sebesar 93,87% dari total pembiayaan syariah dan Pembiayaan *Mudharabah* porsinya sebesar 4,72% dan Piutang *Qardh* sebesar 1,41%.

Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2007 - 2012

Rp Juta

Pembiayaan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	%
Piutang *Murabahah* Investasi	0	2.119	6.294	24.568	48.932	61.192	12.260	25,06%	16,51%
Piutang *Murabahah* Modal Kerja	2.138	5.085	3.459	4.561	8.033	8.372	339	4,22%	2,26%
Piutang *Murabahah* Lainnya	7.124	51.945	62.270	86.259	178.745	278.271	99.526	55,68%	75,10%
Pembiayaan *Mudharabah*	0	1.508	7.795	28.515	24.249	17.508	(6.741)	(27,80%)	4,72%
Rahn	0	0	0	0	0	5.214	5.214	100,00%	1,41%
Total Pembiayaan	**9.262**	**60.657**	**79.818**	**143.903**	**259.959**	**370.557**	**110.598**	**42,54%**	**100,00%**

Komposisi Piutang dan Pembiayaan UUS Bank Sulselbar Tahun 2012

Komposisi Piutang *Murabahah* UUS Bank Sulselbar Tahun 2012

Komposisi Piutang dan Pembiayaan UUS Bank Sulselbar Tahun 2011

Komposisi Piutang *Murabahah* UUS Bank Sulselbar Tahun 2011

Piutang *Murabahah* Investasi

Piutang *Murabahah* Investasi pada tahun 2012 sebesar Rp61.192 juta atau meningkat 25,06% dari tahun 2011 yang tercatat Rp48.932 juta. Piutang *Murabahah* Investasi porsinya sebesar 16,51% dari total piutang dan pembiayaan tahun 2012 dan 7,48% terhadap total kredit investasi konsolidasi.

Piutang *Murabahah* Modal Kerja

Pada tahun 2012 Piutang *Murabahah* Modal Kerja mengalami kenaikan 4,22% atau sebesar Rp8.372 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp8.033. Piutang *Murabahah* Modal Kerja memiliki porsi terhadap total piutang dan pembiayaan tahun 2012 yaitu sebesar 2,26% dan 1,25% terhadap total kredit modal kerja konsolidasi.

Piutang *Murabahah* Lainnya

Piutang *Murabahah* Lainnya merupakan pembiayaan konsumtif UUS yang tercatat sebesar Rp278.270 juta atau kenaikannya mencapai 55,68% dari tahun 2011 sebesar Rp178.745 juta. Piutang *Murabahah* Lainnya pada tahun 2011 memiliki porsi terbesar dari total piutang dan pembiayaan sebesar 75,10%. Pembiayaan konsumtif UUS porsinya 6,02% dari total kredit konsumtif konsolidasi.

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan yang disalurkan dalam bentuk pinjaman modal kerja. Pembiayaan *Mudharabah* pada tahun 2012 menurun 27,80% lebih rendah dari Rp24.249 juta di tahun 2011 menjadi Rp17.508 juta pada tahun 2012. Pembiayaan *Mudharabah* terhadap total piutang dan pembiayaan tahun 2012 porsinya sebesar 4,72% dan 2,61% dari total kredit modal kerja konsolidasi.

Piutang *Qardh*

Piutang *Qardh* merupakan pembiayaan yang sejenis dengan pegadaian, yakni pembiayaan yang disalurkan berdasarkan harta nasabah berupa emas sebagai aset yang digadai/dijaminkan. Dan untuk bank mengenakan imbal jasa atas penyimpanan aset yang digadai/dijaminkan tersebut. Gadai Emas Berkah iB UUS Bank Sulselbar merupakan varian produk pembiayaan yang baru diluncurkan pada tahun 2012 dengan total penyaluran dana sebagai pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp5.214 juta atau sebesar 1,41% dari total piutang dan pembiayaan UUS Bank Sulselbar. Gadai Emas Berkah iB dapat menjadi solusi kebutuhan nasabah, baik untuk keperluan konsumtif atau untuk keperluan usaha (produktif).

Tabungan Syariah tumbuh tinggi tahun 2012 dipengaruhi oleh pemasaran yang aktif untuk memperkenalkan produk tabungan syariah kepada calon nasabah dan karakteristik produk yang menarik, khususnya *pricing* yang kompetitif.

Pembiayaan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012
Berdasarkan Sektor Ekonomi

Dana Pihak Ketiga	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi %
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Konsumtif	8.777	45.963	52.278	89.216	137.879	107.225	(30.654)	(22,23%)	28,94%
Pertanian	0	187	523	72	6.360	4.599	(1.761)	(27,69%)	1,24%
Industri	0	297	469	184	1.221	1.446	225	18,43%	0,39%
Listrik/Air	0	94	96	0	48	0	(48)	(100,00%)	0,00%
Pertambangan	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
Konstruksi	0	108	251	955	749	1.987	1.238	165,29%	0,54%
Perumahan	0	11.115	14.559	6.103	86.916	229.201	142.285	163,70%	61,85%
Perdagangan	485	748	1.118	20.808	7.313	9.482	2.169	29,66%	2,56%
Pengangkutan & Distribusi	0	0	2.404	0	527	478	(49)	(9,30%)	0,13%
Jasa - Jasa Dunia Usaha	0	244	5.401	24.638	18.946	16.139	(2.807)	(14,82%)	4,36%
Jasa - Jasa Sosial Masyarakat	0	1.901	2.719	1.927	0	0	0	0,00%	0,00%
Total Pembiayaan	**9.262**	**60.657**	**79.818**	**143.903**	**259.959**	**370.557**	**110.598**	**42,54%**	**100,00%**

Dana Pihak Ketiga

Pendanaan UUS Bank Sulselbar pada tahun 2012 peningkatannya mencapai 73,97% menjadi Rp239.173 juta dari Rp137.482 juta di tahun 2011. Pendanaan UUS Bank Sulselbar bersumber dari 18.369 rekening dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Jumlah rekening dana pihak ketiga UUS Bank Sulselbar meningkat 51% dibandingkan tahun 2011 sebesar 12.132 rekening. Porsi total DPK UUS terhadap total DPK konsolidasi tahun 2012 sebesar 4,43%.

Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah Tahun 2007 – 2012

Dana Pihak Ketiga	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi %
	Rp Juta						Rp Juta	%	
Giro	0	1.781	1.914	5.587	10.850	9.427	(1.423)	(13,12%)	3,94%
Tabungan	3.118	6.558	11.640	19.989	31.032	44.478	13.446	43,33%	18,60%
Deposito	632	10.563	27.856	61.722	95.602	185.268	89.666	93,79%	77,46%
Total Dana Pihak Ketiga	**3.750**	**18.902**	**41.410**	**87.298**	**137.484**	**239.173**	**101.689**	**73,97%**	**100,00%**

Komposisi Dana Pihak Ketiga UUS Bank Sulselbar Tahun 2012

Jumlah Rekening Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2009 – 2012

	2009	2010	2011	2012
Giro	94	125	151	174
Tabungan	2303	5.172	11.111	16.949
Deposito	280	559	870	1.246
Jumlah Rekening	**2.677**	**5.856**	**12.132**	**18.369**

Giro

Giro Wadiah merupakan produk giro UUS Bank Sulselbar pada tahun 2012 mengalami penurunan 13,12% menjadi Rp9.427 juta dari Rp10.850 juta pada tahun 2011. Berbeda dengan giro konvensional yang memiliki proporsi terbesar dari total DPK konvensional maupun konsolidasi, Giro Wadiah memiliki proporsi terkecil dari total DPK Syariah yaitu 3,94% atau hanya 0,48% dari total giro konsolidasi dan 0,17% dari total DPK konsolidasi.

Tabungan Syariah

Tabungan Syariah Bank Sulselbar pada akhir tahun 2012 sebesar Rp44.478 juta atau 43,33% lebih tinggi dari tahun 2011 sebesar Rp31.032 juta. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa produk tabungan syariah telah menjadi salah satu andalan produk simpanan bagi nasabah. Di samping itu juga

menjadi alternatif sumber dana murah bagi Bank Sulselbar. Komposisi tabungan syariah terhadap total DPK konsolidasi sebesar 0,82% atau mencapai 18,60% terhadap total DPK syariah dan 3,09% dari total tabungan konsolidasi.

Tabungan pada UUS Bank Sulselbar terdiri dari Tabungan Syariah, Tabungan Hatam iB (Tabungan Haji dan Umrah), dan Tabungan Kemitraan. Tabungan Kemitraan merupakan pengembangan produk tabungan syariah yang dilakukan secara *co-branding* dengan lembaga/instansi pemerintah atau swasta, seperti Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Prov. Sulsel.

Tabungan Syariah pada tahun 2012 peningkatannya 46,79% menjadi Rp42.544 juta dari Rp28.983 juta di tahun 2011. Tabungan Syariah tahun 2012 memiliki porsi terbesar mencapai 95,65% dari total DPK UUS dan 2,96% dari total tabungan konsolidasi. Tabungan Syariah tumbuh tinggi tahun 2012 dipengaruhi oleh pemasaran yang aktif untuk memperkenalkan produk tabungan syariah kepada calon nasabah dan karakteristik produk yang menarik, khususnya *pricing* yang kompetitif.

Tabungan Hatam iB atau Tabungan Haji dan Umrah adalah produk yang didesain untuk keperluan biaya perjalanan ibadah. Pada tahun 2012, Tabungan Hatam tercatat sebesar Rp1.581 juta atau 14,59% lebih rendah dari Tabungan Hatam iB 2011 sebesar Rp1.851 juta. Komposisi Tabungan Hatam iB terhadap total DPK UUS tahun 2012 sebesar 3,55% dan 0,11% dari total tabungan konsolidasi. Penurunan Tabungan Hatam iB tahun 2012 disebabkan beberapa nasabah yang telah mendapatkan nomor porsi haji beberapa tahun sebelumnya telah berangkat menunaikan ibadah haji pada tahun 2012.

Tabungan BKMT Syariah pada tahun 2012 peningkatannya 12,50% menjadi Rp9 juta dari Rp8 juta di tahun 2011. Tabungan BKMT Syariah tahun 2012 memiliki porsi 0,02% dari total DPK UUS.

Tabungan Kemitraan pada tahun 2012 peningkatannya 81,05% menjadi Rp344 juta dari Rp190 juta di tahun 2011. Tabungan Kemitraan tahun 2012 komposisinya sebesar 0,77% dari total DPK UUS. Peningkatan signifikan Tabungan Kemitraan UUS Bank Sulselbar dipengaruhi hubungan kerjasama yang sangat baik dengan lembaga/instansi yang menjadi mitra kerjasama *co-branding*.

Tabungan Unit Usaha Syariah Tahun 2007 – 2012

Dana Pihak Ketiga	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta						Rp Juta	%	%
Tabungan Syariah	3.118	6.558	11.313	18.528	28.983	42.544	13.561	46,79%	95,65%
Tabungan Hatam iB	0	0	306	1.404	1.851	1.581	(270)	(14,59%)	3,55%
Tabungan BKMT Syariah	0	0	21	57	8	9	1	12,50%	0,02%
Tabungan Kemitraan Syariah	0	0	0	0	190	344	154	81,05%	0,77%
Total Tabungan Syariah	**3.118**	**6.558**	**11.640**	**19.989**	**31.032**	**44.478**	**13.446**	**43,33%**	**100,00%**

Deposito

Pada tahun 2012, deposito UUS yang disebut juga Deposito *Mudharabah* tercatat sebesar Rp185.268 juta, meningkat 93,79% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp95.602 juta. Pertumbuhan deposito UUS Bank Sulselbar menunjukkan bahwa produk ini merupakan investasi yang menguntungkan serta mampu memberikan tingkat pengembalian dengan *equivalent rate* yang kompetitif dengan skema bagi hasil. Deposito *Mudharabah* mendominasi penghimpunan DPK UUS Bank Sulselbar sebesar 77,46% dari total DPK syariah di tahun 2012, sedangkan posisinya atas total deposito konsolidasi sebesar 9,21%.

Produk Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar

- Produk Penghimpunan Dana
  - Giro Wadiah iB

    Simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah-bukuan lainnya. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah Yad ad Dhamanah* dimana titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

    Giro *Wadi'ah* Bank Sulselbar Syariah tidak memberikan nisbah atau bagi hasil kepada nasabah.

  - Tabungan Syariah

    Simpanan pada Bank Sulselbar Syariah bagi perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Tabungan ini merupakan simpanan yang berprinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (mudharib) dengan imbalan berupa bagi hasil kepada nasabah *(Shahibul Maal).*

    Bagi hasil atau nisbah Tabungan Syariah tahun 2012 sebesar 22,50% : 77,50% (nasabah : bank) atau dengan *equivalent rate* 2,99% p.a.

  - Haji dan Umroh Tabungan Masa Depan (HATAM iB)

    HATAM iB merupakan simpanan pada Bank Sulselbar Syariah dengan prinsip *Mudharabah* bagi perorangan yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

    Nisbah atau bagi hasil HATAM iB tahun 2012 sebesar 10% : 90% (nasabah : bank) atau dengan *equivalent rate* 1,33% p.a.

  - Tabungan Kemitraan

    Simpanan dengan pola *co branding* dengan akad *Mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah yang didisain khusus bagi seluruh anggota instansi / kelompok dengan syarat – syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara instansi tersebut dengan Bank Sulselbar Syariah.

    Nisbah atau bagi hasil pada tahun 2012 sebesar 20% : 80% (nasabah : bank) atau dengan *equivalent rate* per Desember 2012 sebesar 2,66% p.a.

- Deposito *Mudharabah*

  Simpanan pada Bank Sulselbar Syariah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal)* menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana *(mudharib)* bertanggung jawab atas pengelolaan dana.

  Bagi hasil Deposito *Mudharabah* tahun 2012 sebagai berikut :

Jangka Waktu	Nisbah (Nasabah : Bank)	*Equivalent Rate*
1 Bulan	57% : 43%	7,59% p.a
3 Bulan	58% : 42%	7,72% p.a
6 Bulan	59% : 41%	7,85% p.a
12 Bulan	59% : 41%	7,85% p.a

- Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan
  - Piutang *Murabahah* Investasi

    Fasilitas pembiayaan investasi berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan *(margin)* yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Piutang *Murabahah* Modal Kerja

    Fasilitas pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Piutang *Murabahah* Lainnya

    Fasilitas pembiayaan lainnya berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Pembiayaan *Mudharabah*

    Fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

- Skim Produk Pembiayaan Syariah
  - Pembiayaan Oto Berkah iB

    Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing–masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

  - Pembiayaan Graha Berkah iB

    Fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing – masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

  - Modal Kerja Mitra iB

    Fasilitas pembiayaan dengan akad al *mudharabah* (bagi hasil) yang diberikan kepada nasabah/mitra Bank Sulselbar Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yang disesuikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan nasabah/mitra untuk mengelola pembiayaan.

  - Gadai Emas Berkah iB

    Fasilitas pinjaman (*qardh*) yang harus dikembalikan tetap senilai pinjaman dengan jaminan berupa emas dan disimpan pada bank. Atas penyimpanan tersebut nasabah harus membayar biaya pemeliharaan yang ditetapkan oleh bank.

    Biaya pemeliharaan (sewa) produk Gadai Emas Berkah iB Bank Sulselbar Syariah tahun 2012 sebesar Rp5.100 per gram/bulan.

- Jasa – Jasa UUS Bank Sulselbar
  - Kiriman Uang *(Wakalah)*

    Kiriman Uang yang diberikan dengan akad *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak *(muwakkil)* kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- Jaminan Bank *(Kafalah)*

  Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

  Jaminan bank diberikan dengan akad *kafalah* yaitu Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung *(kafil)* kepada pihak ketiga atau yang tertanggung *(makful lahu)* untuk memenuhi kewajiban pihak kedua *(Makful 'anhu/ashil).*

Layanan Unit Usaha Syariah

Jaringan operasional dan pemasaran Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar sampai dengan 31 Desember 2012, sebagai berikut :

No.	Layanan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar
Cabang Syariah	
1.	Cabang Syariah Sengkang
2.	Cabang Syariah Maros
3.	Cabang Syariah Makassar
***Office Channeling*/Kantor Layanan Syariah**	
1.	Cabang Utama Bone
2.	Cabang Palopo
3.	Cabang Bulukumba
4.	Cabang Utama Mamuju
5.	Cabang Pangkep
6.	Cabang Barru
7.	Cabang Pinrang
8.	Cabang Sidrap
9.	Cabang Soppeng
10.	Cabang Sinjai
11.	Cabang Enrekang
12.	Cabang Belopa
13.	Cabang Gowa
14.	Cabang Takalar
15.	Cabang Polman
16.	Cabang Jeneponto
17.	Cabang Parepare
18.	Cabang Bantaeng
19.	Cabang Masamba
20.	Cabang Majene
21.	Cabang Makale
22.	Cabang Selayar
23.	Cabang Malili
24.	Cabang Pasangkayu
25.	Cabang Mamasa

Tinjauan Fungsional UUS Bank Sulselbar

Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar memandang bahwa Sumber Daya Insani (SDI) yang berkualitas merupakan penopang bagi perkembangan bisnis UUS Bank Sulselbar untuk melayani kebutuhan nasabah dan masyarakat akan perbankan berlandaskan prinsip syariah. Untuk itu, UUS Bank Sulselbar dikelola oleh SDI yang memiliki profesionalisme dan memahami dengan baik operasional perbankan syariah, terutama sebagai Unit Usaha Syariah yang beroperasi atas dasar prinsip syariah Islam.

Pengembangan SDI Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar melalui pendidikan dan pelatihan serta memberikan kesempatan pengembangan berkarir bagi seluruh karyawan.

Untuk melahirkan SDI yang unggul, UUS Bank Sulselbar menumbuhkembangkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan di segala bidang, terutama di bidang analisa dan proses pembiayaan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Pelaksanaan program pendidikan pelatihan bekerjasama antara lain dengan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Karim *Bussiness Consulting*, dan lain sebagainya.

Jumlah karyawan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dengan komposisi berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia	2012	2011	2010
Pasca Sarjana (S2)	7	6	3
Sarjana/Diploma (S1/D3)	31	33	32
SMA	2	2	2
Jumlah	**40**	**41**	**37**

Strategi Unit Usaha Syariah

Rencana pengembangan jaringan operasional dan penerbitan maupun diversifikasi produk dan jasa UUS Bank Sulselbar sebelumnya melalui tahapan konsultasi dengan Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dimaksudkan agar dalam setiap pengembangan bisnis UUS Bank Sulselbar senantiasa berpegang pada prinsip – prinsip syariah.

Strategi pengembangan produk dan jasa UUS Bank Sulselbar yakni dengan integrasi dan harmonisasi produk dengan karakteristik berbeda dengan produk konvensional dan beberapa produk UUS Bank Sulselbar dapat menjadi produk pelengkap *(supplementary product)* yang menambah varian produk Bank Sulselbar.

PRODUK BERBASIS TEKNOLOGI

Bank Sulselbar memandang bahwa layanan perbankan berbasis teknologi merupakan bagian dari strategi bisnis utama untuk mengoptimalkan kualitas layanan kepada nasabah yakni kemudahan transaksi bagi nasabah yang cepat, akurat dan nyaman. Di samping itu, beragam inovasi layanan pun dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang terkini di bidang perbankan, sehingga akan mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun jangkauan geografis yang akan memberikan nilai tambah terhadap layanan bank berbasis teknologi informasi.

Layanan perbankan berbasis teknologi informasi juga memberikan kontribusi besar terhadap perolehan pendapatan *fee based income* Bank Sulselbar.

Transaksi pada terminal ATM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis transaksi yaitu *withdrawal* (penarikan), *balance inquiry* (cek saldo) dan transfer.

Produk – Produk Bank Sulselbar yang berbasis teknologi informasi :

ATM BANK SULSELBAR

Automated Teller Machine (ATM) adalah terminal elektronik yang disediakan Bank Sulselbar yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya, cek saldo, *transfer* dana dan *payment* (pembayaran telepon seluler pasca bayar, *top up* pulsa dan tagihan listrik).

ATM Bank Sulselbar merupakan kartu ATM yang diperuntukkan bagi nasabah penabung Tabungan Simpeda Bank Sulselbar. Saat ini Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama sehingga seluruh nasabah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar dapat melakukan transaksi ATM pada kurang lebih 44.360 terminal ATM pada jaringan ATM Bersama di seluruh Indonesia.

Jumlah Pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar

Jumlah pemegang Kartu ATM Bank Sulselbar terhadap total nasabah tabungan Simpeda pada tahun 2012 sebesar 60,68%. Angka tersebut menunjukkan bahwa nasabah tabungan Simpeda Bank Sulselbar semakin membutuhkan layanan perbankan berbasis teknologi informasi dengan menggunakan layanan Kartu ATM yang memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi perbankan setiap saat pada puluhan ribu terminal ATM yang berada dalam jaringan ATM Bersama.

> transaksi yang paling banyak dilakukan nasabah yakni transaksi *withdrawal* dengan porsi 49,41% dari total transaksi ATM berdasarkan kategori transaksi yang diikuti transfer dan *balance inquiry* masing – masing 31,65% dan 18,94%.

Jumlah Transaksi Nasabah Bank Sulselbar di seluruh ATM Bersama Tahun 2012

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Berhasil	10.611.556	9.895.845	10.925.608	10.423.978	11.346.957	11.791.226	12.514.650	13.519.624	12.075.747	12.979.324	12.733.737	14.339.430
Gagal	1.568.490	1.501.454	1.601.658	1.447.795	1.732.440	1.607.681	1.665.991	1.786.287	1.552.090	1.657.830	1.681.176	1.914.449
Reversal	64.923	50.956	66.285	61.080	70.924	80.808	77.689	100.987	67.654	75.580	90.705	104.118
Total	**12.244.969**	**11.448.255**	**12.593.551**	**11.932.853**	**13.150.321**	**13.479.715**	**14.258.330**	**15.406.898**	**13.695.491**	**14.712.734**	**14.505.618**	**16.357.997**

Persentasi Porsi Jumlah Transaksi Nasabah Bank Sulselbar di seluruh ATM Bersama Tahun 2012

	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Berhasil	86,66%	86,44%	86,76%	87,36%	86,29%	87,47%	87,77%	87,75%	88,17%	88,22%	87,78%	87,66%
Gagal	12,81%	13,12%	12,72%	12,13%	13,17%	11,93%	11,68%	11,59%	11,33%	11,27%	11,59%	11,70%
Reversal	0,53%	0,45%	0,53%	0,51%	0,54%	0,60%	0,54%	0,66%	0,49%	0,51%	0,63%	0,64%

Jumlah transaksi nasabah Bank Sulselbar di seluruh ATM Bersama per 31 Desember 2012 sebanyak 16.357.997 transaksi dengan jumlah transaksi yang berhasil sebesar 87,66%, sedangkan transaksi *reversal* dan transaksi gagal masing – masing 10,70% dan 0,64%. Transaksi ATM nasabah yang gagal terjadi karena kesalahan nasabah dan kesalahan sistem. Kesalahan nasabah pada setiap transaksi ATM yang gagal antara lain PIN yang salah, frekuensi PIN salah lebih dari batas toleransi yaitu minimal 3 kali, saldo pada rekening nasabah yang tidak cukup untuk melakukan penarikan ataupun *transfer*, dan melebihi batas maksimum transaksi. Sedangkan kesalahan sistem terjadi karena sistem yang *error,* tidak bisa melakukan *routing* transaksi, *link* ke *host* yang *down* dan *database problem*. Adapun untuk transaksi *reversal* yaitu pembatalan transaksi atas transaksi yang gagal diproses dan atau diselesaikan oleh sistem pada ATM.

Transaksi pada terminal ATM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis transaksi yaitu *withdrawal* (penarikan), *balance inquiry* (cek saldo) dan *transfer*. Dari 3 (tiga) jenis transaksi tersebut, transaksi yang paling banyak dilakukan nasabah yakni transaksi *withdrawal* dengan porsi 49,41% dari total transaksi ATM berdasarkan kategori transaksi yang diikuti *transfer* dan *balance inquiry* masing – masing 31,65% dan 18,94%.

Jumlah Transaksi ATM Nasabah Bank Sulselbar berdasarkan Kelompok Transaksi di seluruh ATM Bersama Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	5.453.326	4.998.843	5.525.481	5.187.846	5.625.362	5.779.650	6.243.255	6.797.590	5.951.071	6.299.866	6.203.307	7.085.435
Inquiry	1.903.959	1.789.011	1.984.004	1.924.367	2.105.739	2.178.034	2.292.340	2.597.595	2.184.121	2.352.552	2.316.462	2.716.080
Transfer	3.254.271	3.107.991	3.416.123	3.311.765	3.615.856	3.833.542	3.979.055	4.124.439	3.940.555	4.326.906	4.213.968	4.537.915
Total	**10.611.556**	**9.895.845**	**10.925.608**	**10.423.978**	**11.346.957**	**11.791.226**	**12.514.650**	**13.519.624**	**12.075.747**	**12.979.324**	**12.733.737**	**14.339.430**

Persentasi Porsi Kelompok Transaksi Nasabah Bank Sulselbar di seluruh ATM Bersama Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	51,39%	50,51%	50,57%	49,77%	49,58%	49,02%	49,89%	50,28%	49,28%	48,54%	48,72%	49,41%
Inquiry	17,94%	18,08%	18,16%	18,46%	18,56%	18,47%	18,32%	19,21%	18,09%	18,13%	18,19%	18,94%
Transfer	30,67%	31,41%	31,27%	31,77%	31,87%	32,51%	31,80%	30,51%	32,63%	33,34%	33,09%	31,65%

Transaksi ATM Bank Sulselbar sebagai *issuer*, yakni Bank Sulselbar sebagai penerbit Kartu ATM, terdiri dari 2 (dua) kelompok transaksi yaitu *withdrawal* (penarikan) dan *inquiry* (cek saldo). Jumlah transaksi *withdrawal* Bank Sulselbar sebagai *issuer* per 31 Desember 2012 sebanyak 72.712 transaksi dan *inquiry* sebanyak 40.890 transaksi.

Jumlah Transaksi ATM Bank Sulselbar sebagai *Issuer* Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	60.197	57.755	59.679	64.227	67.654	77.706	90.888	81.640	76.443	77.534	74.987	72.712
Inquiry	38.698	30.817	33.610	38.142	37.643	44.411	48.329	41.898	42.089	40.120	36.220	40.890
Total	**98.895**	**88.572**	**93.289**	**102.369**	**105.297**	**122.117**	**139.217**	**123.538**	**118.532**	**117.654**	**111.207**	**113.602**

Persentasi Porsi Transaksi ATM Bank Sulselbar sebagai *Issuer* Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	60,87%	65,21%	63,97%	62,74%	64,25%	63,63%	65,29%	66,08%	64,49%	65,90%	67,43%	64,01%
Inquiry	39,13%	34,79%	36,03%	37,26%	35,75%	36,37%	34,71%	33,92%	35,51%	34,10%	32,57%	35,99%

Selain sebagai *issuer*, Bank Sulselbar juga bertindak sebagai *acquirer* (terminal/mesin ATM Bank Sulselbar digunakan oleh nasabah bank lain) yang sampai dengan 31 Desember 2012 sebanyak 61,33% merupakan transaksi penarikan tunai dan 38,67% menggunakan ATM Bank Sulselbar untuk melakukan transaksi *balance inquiry.*

Jumlah Transaksi ATM Bank Sulselbar sebagai *Acquirer* Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	30.098	26.703	29.991	26.384	26.837	29.257	29.589	31.607	26.436	29.133	28.818	30.966
Inquiry	18.609	16.787	18.171	16.586	17.338	18.291	19.982	19.973	16.962	18.522	17.655	19.528
Total	**48.707**	**43.490**	**48.162**	**42.970**	**44.175**	**47.548**	**49.571**	**51.580**	**43.398**	**47.655**	**46.473**	**50.494**

Persentasi Porsi Transaksi ATM Bank Sulselbar sebagai Issuer Tahun 2012

Kelompok Transaksi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Withdrawal	61,79%	61,40%	62,27%	61,40%	60,75%	61,53%	59,69%	61,28%	60,92%	61,13%	62,01%	61,33%
Inquiry	38,21%	38,60%	37,73%	38,60%	39,25%	38,47%	40,31%	38,72%	39,08%	38,87%	37,99%	38,67%

Selain menyediakan layanan *withdrawal, balance inquiry* dan *transfer,* ATM Bank Sulselbar juga dilengkapi dengan fitur atau layanan sebagai berikut :

- Layanan 24 Jam
- Pembayaran Tagihan Rutin antara lain pembayaran telepon pasca bayar dan isi ulang pulsa, serta pembayaran tagihan listrik
- Registrasi *eBanking* yakni SMS *Banking* Bank Sulselbar

KPE (KARTU PNS ELEKTRONIK)

Kartu PNS Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan yang telah mendapatkan legitimasi berdasarkan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Dalam rangka memfasilitasi fungsi perbankan pada kartu KPE, Bank Sulselbar bekerjasama dengan BKN untuk mengoptimalkan KPE agar dapat digunakan melakukan aktivitas perbankan yaitu berfungsi pula sebagai Kartu ATM dengan layanan yang sama dengan layanan Kartu ATM nasabah Bank Sulselbar seperti informasi saldo, penarikan tunai, *transfer* antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa *(top up)* telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

Kartu PNS Elektronik (KPE) kerjasama dengan Bank Sulselbar telah di-*launching* pada bulan Maret 2012. Pendataan biometrik KPE bagi para PNS yang berada di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat diselenggarakan oleh PT. Sucofindo yang merupakan mitra BKN (Badan Kepegawaian Negara). Pendataan biometrik KPE dilakukan dalam 2 (dua) tahapan berdasarkan sumber pembiayaan pelaksanaan pendataan biometrik yakni pendataan dan pembuatan KPE atas beban Bank Sulselbar dan beban anggaran pemerintah pusat, dalam hal ini BKN melalui APBN.

Bank Sulselbar turut membiayai proses pendataan dan pembuatan KPE yang bertujuan untuk mempercepat proses pembuatan dan kepemilikan KPE untuk seluruh PNS di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Selain itu juga sebagai wujud komitmen Bank Sulselbar untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan *smart card* bagi PNS, yang tidak hanya berfungsi sebagai kartu identitas PNS namun juga dapat digunakan untuk melakukan kegiatan perbankan melalui ATM.

Jumlah KPE yang telah didistribusikan ke seluruh PNS di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebanyak 48.177 kartu yang terdiri dari 3.200 kartu yang dibiayai Bank Sulselbar dan 44.977 kartu atas beban APBN.

LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Jasa layanan perbankan lainnya yang disediakan Bank Sulselbar untuk memenuhi kebutuhan akan layanan perbankan yang beragam bagi nasabah dan masyarakat sebagai berikut :

- Kiriman Uang
- Inkasso
- *Transfer* BI-RTGS
- Bank Garansi (Jaminan Bank)
- Surat Keterangan Bank (Referensi Bank)
- Penerimaan Pembayaran Tagihan *Billing Provider*
- SMS *Banking*

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 3

TINJAUAN FUNGSIONAL

"Sumber daya manusia yang merupakan aset penting bank, maka pengembangan SDM bagi Bank Sulselbar pada hakekatnya adalah investasi.

SUMBER DAYA MANUSIA

Bank Sulselbar memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. Untuk itu, Bank Sulselbar berkomitmen untuk senantiasa fokus pada pengelolaan dan pengembangan SDM yang mendukung peran dan kontribusi SDM secara optimal untuk mewujudkan strategi dan target usaha bank.

Bank Sulselbar secara konsisten dan berkesinambungan terus berupaya membentuk dan mengembangkan human capital yang dimiliki karena Bank Sulselbar memandang bahwa SDM yang berkualitas merupakan aset penting bagi kelangsungan dan keberhasilan Bank Sulselbar.

Sumber daya manusia yang merupakan aset penting bank, maka pengembangan SDM bagi Bank Sulselbar pada hakekatnya adalah investasi. Investasi dalam pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas, karir, dan kesejahteraan setiap pegawai. Sumber daya manusia yang handal, terampil dan profesional akan melahirkan pegawai yang produktif dan kesejahteraan pegawai akan menumbuhkan rasa nyaman untuk berkarya lebih maksimal, sehingga akan berimplikasi pada peningkatan produktifitas dan *returns* bagi bank. Peningkatan potensi SDM menjadi perhatian utama manajemen untuk dikelola secara berkelanjutan agar SDM Bank Sulselbar dapat memberdayakan potensinya dengan optimal dalam mencapai tujuan, visi dan misi sehingga Bank Sulselbar dapat berada pada posisi yang lebih baik dan kompetitif di masa mendatang.

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan sumber daya manusia oleh Bank Sulselbar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM dalam upaya mencapai tujuan strategis bank. Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi, baik kualitatif maupun kuantitatif, merupakan dasar yang kuat untuk menjaga keberlangsungan bisnis untuk terus bertumbuh optimal. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan SDM yang kompeten prosesnya telah dilakukan sejak awal yaitu melalui program rekrutmen yang terencana. Selain rekrutmen, perencanan SDM Bank Sulselbar juga mencakup kompensasi, pendidikan dan pelatihan, struktur kerja dan promosi.

Kesamaan Hak dan Kesempatan Kerja Yang Sama

Bank Sulselbar memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender, golongan, suku, agama, ras, dan kondisi fisik. Setiap pegawai yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi setelah melalui tahapan seleksi yang keputusannya menjadi kewenangan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen SDM

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik dan terintegrasi, maka Grup SDM Bank Sulselbar saat ini dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen SDM berbasis kompetensi yakni *Human Resources Information System* (HARIS).

Rekrutmen

Bank Sulselbar melaksanakan rekrutmen sebagai sebuah proses pencarian sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitas, untuk memenuhi kebutuhan SDM yang akan mendukung operasional dan bisnis Bank Sulselbar yang terus bertumbuh.

Pemenuhan kebutuhan SDM Bank Sulselbar untuk mengisi berbagai posisi dalam struktur organisasi dengan melakukan rekrutmen dari eksternal bank dengan tetap memperhitungkan efesiensi dan efektivitas serta merupakan proses alih pengetahuan dan keterampilan bagi pegawai Bank Suslelbar. Mekanisme rekrutmen Bank Sulselbar antara lain dilakukan dengan:

- Rekrutmen Terbuka melalui pemasangan iklan/informasi rekrutmen pada media cetak maupun media elektronik dengan status Calon Pegawai
- Rekrutmen Tenaga Berpengalaman dengan status *pro hire*
- Rekrutmen Tenaga Kontrak Ahli
- Rekrutmen melalui penyedia jasa *outsorcing* dengan status pegawai magang dan atau kontrak

a. Rekrutmen yang diselenggarakan Bank Sulselbar dalam 6 tahun terakhir sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Baru Yang Direkrut Bank Sulselbar

2007	2008	2009	2010	2011	2012
145	1	142	33	43	63

Rekrutmen yang diselenggarakan Bank Sulselbar dalam tahun 2012 sebagai berikut :

- Rekrutmen Terbuka dengan status Calon Pegawai tidak dilaksanakan pada tahun 2012, namun terdapat 34 orang pegawai yang beralih status dari calon pegawai menjadi pegawai.

- Rekrutmen Tenaga Berpengalaman dengan status pro hire tidak ada.
- Rekrutmen Tenaga Kontrak Ahli tidak ada.
- Rekrutmen melalui penyedia jasa *outsorcing* sebanyak 323 orang .

b. Kebijakan Rekrutmen

Penyelenggaran rekrutmen Bank Sulselbar dilakukan secara independen dan transparan melalui kerjasama dengan pihak eksternal yaitu lembaga atau assessor rekrutmen seperti Universitas Hasanuddin, LPPM,LPPI, Kimia Farma, RS. Labuang Baji, Universitas Negeri Makassar, Prospek *Human Capital* dan sebagainya.

Grup Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Bank Sulselbar dikelola melalui Grup Sumber Daya Manusia yang fungsinya mengembangkan potensi dan kualitas SDM agar menjadi profesional dan unggul di bidangnya. Grup SDM senantiasa berupaya menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan, baik dalam jumlah maupun kualitas SDM yang diharapkan dapat berperan dalam melaksanakan fungsi – fungsi organisasi secara maksimal. Dan secara keseluruhan, Grup SDM Bank Sulselbar bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM secara komprehensif meliputi rekruitmen, pengembangan kompetensi, manajemen karir, dan peningkatan kesejahteraan.

> Bank Sulselbar memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender, golongan, suku, agama, ras, dan kondisi fisik.

Komposisi dan Jumlah Pegawai

Seiring dengan pertumbuhan aset Bank Sulselbar, bank mengalami pertumbuhan jumlah pegawai total rata-rata dalam 6 tahun terakhir sebesar 4% dan pada tahun 2012 jumlah pegawai Bank Sulselbar mencapai 1.074 orang dibandingkan tahun 2011 sebanyak 1.037 pegawai. Sampai dengan 31 Desember 2012, jumlah pegawai tetap Bank Sulselbar mencapai 978 orang. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2011 yang berjumlah 929 orang.

Pegawai kontrak atau tidak tetap mengalami penurunan yaitu 96 orang pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebanyak 108 orang. Penurunan jumlah pegawai kontrak pada tahun 2012 oleh karena beberapa di antaranya telah beralih status menjadi pegawai tetap dan ada pula yang telah berakhir masa kontraknya dan tidak diperpanjang lagi.

Sementara pertumbuhan tenaga *outsourcing*, seperti satuan pengamanan, sopir dan pesuruh pada tahun 2012 sebanyak 308 orang atau meningkat dari tahun 2011 yang tercatat sebanyak 235 orang. Peningkatan jumlah tenaga *outsourcing* terjadi karena pesatnya pertumbuhan volume bisnis bank yang cukup signifikan dan pengembangan jaringan kantor.

Komposisi pegawai Bank Sulselbar berdasarkan pendidikan, status kepegawaian, jenis kelamin dan usia sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan:

Pendidikan	31 Desember					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Sarjana/Sarjana Muda	641	589	552	529	404	408
SLTP/SLTA	372	381	389	400	414	429
SD	24	26	28	29	30	27
Jumlah	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**	**904**

Komposisi Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian:

Status Kepegawaian	31 Desember					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Tetap	978	929	899	851	733	705
Tidak Tetap	96	108	114	146	153	199
Jumlah	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**	**904**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

Jenis Kelamin	31 Desember					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Laki-laki	699	675	681	687	622	638
Perempuan	375	362	332	310	264	266
Jumlah	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**	**904**

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia :

Usia	31 Desember					
	2012	2011	2010	2009	2008	2007
18 – 30 Tahun	318	303	303	297	220	248
31 – 40 Tahun	394	382	364	366	361	365
41 – 50 Tahun	259	254	253	251	228	223
Lebih dari 50 Tahun	103	98	93	83	77	68
Jumlah	**1.074**	**1.037**	**1.013**	**997**	**886**	**904**

Komposisi Pegawai Bank Sulselbar berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2012

Komposisi Pegawai Bank Sulselbar berdasarkan Pendidikan Tahun 2012

Komposisi Pegawai Bank Sulselbar berdasarkan Usia Tahun 2012

Tingkat *Turn Over*

Selama tahun 2012, terdapat 1 pegawai yang mengajukan permohonan pengunduran diri, terdiri dari 1 orang *level* staf dan tidak ada pada *level* manajer. Alasan pengunduran disebabkan karena melangsungkan pernikahan dengan sesama pegawai Bank Sulselbar.

Dengan demikian, pada tahun 2012, dari 1.074 pegawai tetap Bank Sulselbar, terdapat 1 orang pegawai yang mengundurkan diri. Berdasarkan angka ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *turnover* Bank Sulsebar hanya sebesar 0,1%. Lingkungan kerja yang kondusif dengan suasana kerja yang sehat dan nyaman menjadi alasan rendahnya tingkat *turnover* Bank Sulselbar selama tahun 2012. Dan ke depannya, Bank Sulselbar terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang dapat mendukung seluruh pegawai untuk bekerja dan berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan.

***Turn Over* Pegawai Bank Sulselbar**

Tahun	Jumlah Pegawai Yang Mengundurkan Diri	Jumlah Pegawai Bank Sulselbar	Proporsi
2007	0	904	0%
2008	6	886	0,7%
2009	4	997	0,4%
2010	2	1.013	0,2%
2011	3	1.037	0,3%
2012	1	1.074	0,1%

Jumlah Pegawai Pensiun dan Masa Persiapan Pensiun

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pensiun	7	7	16	9	13	16
Masa Persiapan Pensiun	0	0	0	7	11	21
Jumlah	**7**	**7**	**16**	**16**	**24**	**37**

Pengembangan SDM

Kompetensi dan produktivitas pegawai senantiasa menjadi fokus Bank Sulselbar untuk terus ditingkatkan demi mendukung kelangsungan bisnis dan pencapaian target perusahaan yang optimal. Selain itu, lingkungan kerja yang sehat juga memiliki peran penting guna memotivasi pegawai untuk terus memberikan sumbangsih yang terbaik yang dimilikinya bagi perusahaan.

Bank Sulselbar memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan wawasan dan keahlian. Program – program terkait dengan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan tahun 2012, antara lain :

- Program pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan *training need analysis* dengan memperhatikan kompetensi yang dibutuhkan, *job description* dan perkembangan bisnis dan organisasi. Pendidikan dan pelatihan kepada pegawai dilakukan secara inhouse maupun *exhouse training*. Program pendidikan dan pelatihan Bank Sulselbar tahun 2012 sebagai berikut :
  1. Pendidikan karir yang dilaksanakan secara reguler dan bertujuan untuk mengantisipasi rencana pengembangan organisasi dan jaringan kantor cabang, serta pengembangan karir. Bank Sulselbar telah melaksanakan program ini dengan baik, di antaranya adalah Pelatihan Manajer Lini Pertama, Manajer Madya, Sertifikasi Pemimpin Cabang Konvensional dan Syariah, Pelatihan ALMA, Sekolah Staf dan Pimpinan Bank (Sespibank),dll. Pegawai yang diikutsertakan dalam pendidikan karir pada tahun 2012 sebanyak 10 (sepuluh) orang.

  2. Pendidikan dan pelatihan di bidang teknis perbankan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian pegawai, antara lain Pendidikan Akuntansi Bank, Analis Kredit, *Account Officer,* dll. Terdapat 399 pegawai yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis perbankan pada tahun 2012.

  3. Pelatihan maupun sosialisasi terkait dengan tranformasi organisasi dan pengembangan jaringan dilakukan melalui pelatihan Budaya Kerja, Nilai – Nilai Perusahaan dan Layanan Prima yang diikuti oleh 57 orang.

  4. Pendidikan akademis, dengan memberikan kesempatan pegawai untuk mengikuti pendidikan S-2. Sepanjang tahun 2012 tidak terdapat pegawai Bank Sulselbar yang diikutkan pendidikan akademis S-2.

  5. Program peningkatan integritas pegawai dan efektifitas penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* dengan melaksanakan pendidikan di bidang GCG dll yang telah diikuti sebanyak 5 orang.

  6. Dalam hal pengelolaan risiko bank, sebagai bagian kepatuhan (*compliance*) bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Bank Sulselbar secara konsisten mengikutsertakan pejabat dan staf untuk mengikuti program Sertifikat Manajemen Risiko dan pendidikan di bidang *risk management* secara berkelanjutan. Sebanyak 368 orang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko pada tahun 2012, sehingga total pegawai Bank Sulselbar yang telah memegang Sertifikasi Manajemen Risiko sampai dengan tahun 2012 sebagai berikut :

Jumlah Pegawai Bank Sulselbar dengan Sertifikasi Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko	2012	2011
Level I	149	149
Level II	95	95
Level III	91	93
Level IV	3	3
Level V	1	1

  7. Program pengembangan kapasitas pegawai lainnya, dilakukan dengan mengikuti seminar, *workshop, outbound (team building),* pelatihan persiapan pensiun, dan lain sebagainya yang diikuti oleh 477 orang pegawai.

- Melakukan penyempurnaan struktur organisasi untuk mengantisipasi perkembangan Bank Sulselbar di masa – masa mendatang, sebagai berikut :

  1. Penambahan 1 (satu) unit kerja di Kantor Pusat setingkat Grup, yaitu Grup *Corporate Secretary.* Unit kerja *Corporate Secretary* telah terbentuk sejak tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/099/DIR/VIII/2010 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Bank Sulselbar namun posisinya setingkat departemen dan personil yang ditunjuk sebagai *Corporate Secretary* masih rangkap jabatan sebagai Pemimpin Departemen Pengembangan Bisnis dan Jaringan. Pembentukan *Corporate Secretary* pada tahun 2010 dilakukan dalam rangka pemenuhan persyaratan BAPEPAM dan LK pada saat Bank Sulselbar akan melakukan emisi perdana Obligasi dan Sukuk Mudhrabah pada tahun 2011.

Grup *Corporate Secretary* bertujuan untuk menjalankan fungsi pengelolaan citra perusahaan (*corporate image*) melalui pengelolaan informasi yang berimbang dan integratif serta untuk mendukung efektifnya fungsi pengelolaan *customer care* secara menyeluruh, berkelanjutan dan tepat. Di samping itu pula, untuk mendukung terciptanya disiplin pasar melalui pengungkapan informasi materil ke publik *(disclosure)* sebagai bentuk akuntabilitas bank dan dalam rangka terpeliharanya mekanisme umpan balik yang sistematis kepada manajemen agar mampu merespon dinamika pasar modal. Grup *Corporate Secretary* berfungsi juga untuk mengelola dan memitigasi risiko hukum dan reputasi bank melalui penyelesaian perkara hukum yang dilakukan dengan proses litigasi (represif).

Grup *Corporate Secretary* ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Grup *Corporate Secretary* akan mensupervisi 2 (dua) departemen yang sebelumnya berada di bawah supervisi Grup Sekretariat & Umum, yaitu :

- Departemen Komunikasi dan Humas
- Departemen Legal dan Kesekretariatan

2. Penyempurnaan struktur organisasi dan fungsi departemen yang berada di bawah koordinasi Grup *Corporate Secretary* yaitu pengembangan dan pengalihan 1 (satu) departemen, Departemen Kesekretariatan, yang sebelumnya berada disupervisi oleh Grup Sekretariat dan Umum menjadi 2 (dua) departemen masing – masing Departemen Komunikasi & Humas dan Departemen Legal & Kesekretariatan.

   Fungsi Departemen Komunikasi & Humas dan Departemen Legal & Kesekretariatan secara garis besar, sebagai berikut :

   - Departemen Komunikasi & Humas
     Mensinergikan komunikasi internal dan eksternal Perseroan secara komprehensif melalui penerbitan media komunikasi pegawai/buletin dan penyelenggaraan promosi melalui media cetak dan elektronik dalam rangka mempromosikan produk Perseroan dan meningkatkan *brand awareness* serta responsif terhadap dinamika Pasar Modal, Bapepam dan Lembaga Penunjang Profesi lainnya.

   - Departemen Legal & Kesekretarian
     Mengelola dan memitigasi risiko hukum dan risiko reputasi Perseroan melalui penyelesaian perkara hukum yang dilakukan dengan proses litigasi dan pengelolaan fungsi pengarsipan/dokumentasi serta kesekretariatan.

3. Perubahan nama Grup Sekretariat dan Umum menjadi Grup Umum. Perubahan nama tersebut sehubungan dengan pengalihan 1 (satu) departemen ke Grup *Corporate Secretary*. Departemen yang menjadi supervisi Grup Umum setelah pengalihan dimaksud, yaitu :

   - Departemen Logistik
     Dengan fungsi : mengelola pengadaan perabot/peralatan kantor, pengadaan dan pemeliharaan kendaraan kantor, penjualuan dan pelelangan harta tetap serta menyempurnakan pedoman sistem pengadaan dan pengelolaan aktiva tetap dan inventaris perseroan.
   - Departemen Rumah Tangga
     Dengan fungsi : mengelola pemeliharaan gedung kantor, inventaris, rumah dinas dan harta tetap lainnya, keamanan fisik dan asuransi.

   Perubahan nama Grup Sekretariat dan Umum menjadi Grup Umum juga ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Grup Umum akan menjalankan fungsi pengelolaan dan pendayagunaan aset bank dalam rangka optimalisasi untuk mendukung kegiatan operasional.

4. Penambahan 1 (satu) unit kerja di Kantor Pusat setingkat departemen yang berada di bawah supervisi Grup Perencanaan & Pengembangan, yaitu Departemen *Service Quality*. Dengan demikian, maka Grup Perencanaan & Pengembangan yang sebelumnya hanya mensupervisi 3 (tiga) departemen menjadi 4 (empat) departemen sebagai berikut :

   - Departemen Perencanaan & Anggaran
   - Departemen Pengembangan Bisnis & Jaringan
   - Departemen Pengelolaan Organisasi
   - Departemen *Service Quality*

Pembentukan Departemen *Service Quality* ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/144/DIR/XI/2012 tanggal 22 November 2012 tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Departemen *Service Quality* akan menjalankan fungsi antara lain :

- Melakukan *monitoring* dan perbaikan secara terus menerus atas standar layanan untuk *frontliners* sehingga tercipta standar layanan yang sesuai dengan ekspektasi nasabah.
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap standar layanan yang ada termasuk bekerjasama dengan Grup terkait untuk penetapan SLA (*service level agreement*) untuk setiap jenis transaksi berdasarkan *availibility* jaringan komunikasi dan kondisi geografis kantor cabang/*response time* transaksi.
- Menyusun manual dan melakukan kaji ulang SOP layanan yang menjadi *marketing tools* bagi *frontliner.*
- Menyusun kriteria dan sistem *training* yang efektif bagi pegawai yang akan ditempatkan sebagai *frontlilners.*
- Menyusun strategi untuk memotivasi *frontliners* agar senantiasa meningkatkan layanan melalui penetapan KPI *(key performance indicator)* yang disertai metode penilaian dan *Reward & Punishment System* yang tepat .
- Menyusun kriteria *Service Quality Officer* (SQO) yang akan melakukan pemantauan terhadap implementasi *Service Quality* di setiap kantor cabang.

5. Penambahan 1 (satu) unit kerja di Kantor Pusat setingkat Departemen, yaitu Unit *Anti Fraud*. Pembentukan Unit *Anti Fraud* dilakukan dalam rangka implementasi strategi *anti fraud* secara efektif, berkelanjutan dan komprehensif pada seluruh lini organisasi.

   Misi yang akan dicapai Unit *Anti Fraud* adalah mendesain dan mengelola strategi pengendalian *anti fraud* dan memastikan terimplementasinya budaya *anti fraud* secara *bankwide* pada seluruh jenjang organisasi melalui 4 (empat) pilar kebijakan yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi Pelaporan dan Sanksi serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

   Pembentukan Unit *Anti Fraud* ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/134/DIR/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Tata Kerja Organisasi Unit *Anti Fraud* Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

   Unit *Anti Fraud* dipimpin oleh Pemimpin Unit yang meng-*subordinate* sekurang – kurangnya :
   - 1 (satu) orang analis
   - 1 (satu) orang asisten operasional

Unit *Anti Fraud* bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Untuk mendorong strategi *anti fraud* berlaku efektif pada seluruh tingkatan organisasi Bank Sulselbar dan sebagai wujud komitmen bank dalam mengendalikan *fraud* melalui meningkatkan kualitas pengendalian intern, maka implementasinya telah dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi No. Sk/076/DIR/ VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* PT Bank Sulselbar.

- Melakukan *staffing model* untuk mengukur ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia pada setiap unit kerja yang ada dalam memenuhi kebutuhan operasional dan bisnis sehingga memberi daya guna dan kontribusi maksimal bagi bank. Kegiatan *staffing model* dilaksanakan untuk menghadapi perkembangan Bank Sulselbar yang terus bertumbuh setiap tahun. Untuk mendukung lancarnya kegiatan *staffing model*, telah dibentuk Tim *Staffing Model* berdasarkan Surat Direksi No. SR/168A/B/GPP/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Penyempurnaan Susunan Tim Penetapan Formasi Pegawai (*Staffing Model*) dan Sistem Penilaian Pegawai.

- Melakukan revisi penetapan Kantor Cabang *Pilot Project* Implementasi Program *Service Quality* Bank Sulselbar dalam rangka efektivitas monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Kantor Cabang *Pilot Project* khususnya kinerja yang berhubungan langsung dengan kualitas layanan. Revisi Kantor Cabang *Pilot Project* Implementasi Program *Service Quality* Bank Sulselbar yaitu dari 5 (lima) kantor cabang yang masing – masing terdiri dari 1 (satu) cabang utama, 1 (satu) cabang kelas I, 2 (dua) cabang kelas II yang salah satunya mewakili wilayah Sulawesi Barat, dan 1 (satu) cabang pembantu, sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/105/DIR/IX/2010 tanggal 17 September 2010 tentang Penetapan Kantor Cabang *Pilot Project* Implementasi Program *Service Quality* Bank Sulselbar. Dari 5 (lima) kantor cabang *pilot project* direvisi menjadi menjadi 4 (empat) kantor cabang yaitu 1 (satu) cabang utama, 1 (satu) cabang kelas I, I (satu) cabang kelas II, dan

1 (satu) cabang pembantu yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK/110/DIR/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 tentang Revisi Penetapan Kantor Cabang *Pilot Project* Implementasi Program *Service Quality*.

- Perbaikan kualitas perencanaan SDM dengan pola penempatan sesuai kebutuhan dan kompetensi dengan melakukan mutasi dan rotasi sebanyak 168 orang.

- Melakukan penyempurnaan kebijakan prosedur dan pengelolaan serta pengembangan sumber daya manusia untuk mendorong peningkatan kinerja pegawai, kinerja bank dan kesejahteraan pegawai, baik bagi pegawai aktif maupun pensiunan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar, sebagai berikut :
  a. No. SK/062/DIR/V/2012 tanggal 02 Mei 2012 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja secara Proporsional kepada Pegawai PT Bank Sulselbar
  b. No. SK/067/DIR/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pemberian Pakaian Kerja Pegawai PT Bank Sulselbar
  c. No. SK/069/DIR/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Pemberian Jasa Produksi kepada Pegawai PT Bank Sulselbar
  d. No. SK/077/DIR/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Pegawai PT Bank Sulselbar
  e. No. SK/115/DIR/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Penegakan Disiplin dan Pemanfaatan Waktu Kerja

Anggaran Pelatihan 2012

Biaya untuk program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp9.043 juta dan terealisasikan sebesar Rp7.192 juta atau sekitar 80% dari anggaran yang direncanakan.

Biaya Pendidikan terhadap Biaya Tenaga Kerja Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

Tahun	Biaya Pendidikan	Biaya Tenaga Kerja	Proporsi (%)
	Rp Juta		
2012	7.192	275.279	2,61%
2011	8.552	207.785	4,12%
2010	7.100	224.390	3,16%
2009	5.395	177.022	3,05%
2008	5.746	170.933	3,36%
2007	2.257	133.526	1,69%

Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2012

Program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar bertujuan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pegawai secara berkesinambungan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting yang tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja.

Program pendidikan dan pelatihan Bank Sulselbar senantiasa berupaya memperhatikan prinsip – prinsip :

- Pengembangan kualitas pegawai mengikuti kebutuhan Bank akan kompetensi dan keahlian tertentu untuk mendukung peningkatan kapasitas dan volume bisnis.
- Pendidikan dan pelatihan diprioritaskan untuk memenuhi persyaratan atas kompetensi dan pengetahuan untuk setiap posisi jabatan.
- Meningkatkan keahlian profesi segenap pegawai.
- Merupakan program yang dinamis, secara terus menerus beradaptasi pada kebutuhan organisasi dan pekerjaan.

  Bank Sulselbar juga telah menetapkan pola pelatihan sebagai acuan untuk setiap program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan, sebagai berikut :

  » Program Pelatihan Umum

  Program pelatihan ini diperuntukkan bagi calon pegawai atau pegawai baru sebagai tahap pengenalan terhadap Bank Sulselbar antara lain organisasi, budaya kerja dan garis besar lingkup usaha Bank Sulselbar. Program pelatihan umum terdiri atas program pelatihan umum untuk pegawai administrasi dan non administrasi.

  » Program Pelatihan Kompetensi

  Program pelatihan kompetensi diperuntukkan bagi calon pegawai maupun pegawai tetap. Pelatihan kompetensi dimaksudkan agar setiap pegawai memiliki *knowledge* dan *skills* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga diperoleh mutu dan hasil kerja yang optimal.

  » Program Pelatihan Lainnya

  Program ini merupakan program pelatihan yang tidak termasuk dalam program pelatihan umum maupun pelatihan kompetensi, yang antara lain terdiri dari pengembangan wawasan, ceramah kerohanian, dll.

Sepanjang tahun 2012, Bank Sulselbar telah menginvestasikan dana untuk program pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan program pengembangan pegawai lainnya, sebesar Rp7.192 juta, terjadi penurunan sebesar 16% dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp8.552 juta.

Anggaran dan Biaya Pendidikan dan Pelatihan Bank Sulselbar Tahun 2008 – 2012

Tahun	Biaya Pendidikan	Biaya Tenaga Kerja	Proporsi (%)
	Rp Juta		
2012	7.192	8.068	89,14%
2011	8.552	10.255	83,39%
2010	7.100	8.120	87,44%
2009	5.395	5.256	102,64%
2008	5.746	6.199	92,69%

Program pendidikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan pegawai Bank Sulselbar baik melalui program *regular* maupun *non regular*. Program pelatihan diselenggarakan secara *inhouse* maupun *exhouse* yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan ternama dan profesional, khususnya di bidang perbankan.

Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan secara internal maupun oleh pihak eksternal. Pada tahun 2012, program pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh pegawai Bank Sulselbar yaitu sekitar 232 pelatihan dengan jumlah pegawai yang ikut serta sebanyak 1.316 orang.

Program Pendidikan dan Jumlah Peserta Tahun 2011 – 2012

Jenis Pendidikan	Jumlah Peserta Tahun 2012	Jumlah Peserta Tahun 2011
Pendidikan Karir	230	394
Pendidikan Teknis	186	641
Seminar, Sosialisasi & Workshop	267	1.015
Pendidikan Lainnya	633	79
	1.316	**2.129**

Serikat Pekerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989), maka Bank Sulselbar memiliki Serikat Pekerja yang telah terdaftar pada Kantor Departemen tenaga Kerja Republik Indonesia dengan Nomor Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja adalah 560.568/1162/T.Kerja Tanggal 22 September 2005 dengan No. Register : 474/OP/SP-MANDIRI/IX/2005. Serikat Pekerja dibentuk dalam rangka menjamin dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan kondusif antara Bank dan Pegawai sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja bank, kinerja pegawai dan kesejahteraan pegawai yang selaras dengan pelaksanaan visi, misi dan nilai-nilai budaya bank serta dapat menciptakan peningkatan produktifitas dan usaha bank yang berkesinambungan.

Pengurus Serikat Pekerja Bank Sulselbar untuk Periode 2011 – 2013 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Besar Serikat Pekerja Bank Sulselbar Nomor : Kep/03/MUBES/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan Nomor : KEP/06/MUBES/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang menetapkan Ketua Umum Serikat Pekerja Bank Sulselbar adalah H. Farouk Bamatraf.

Dana Pensiun

Untuk memelihara kesinambungan penghasilan setelah masa purna bhakti serta dalam rangka meningkatkan motivasi dan ketenangan kerja para pegawai, maka manajemen mendirikan Dana Pensiun BPD Sulsel sebelumnya merupakan Yayasan Dana Pensiun Bank Sulsel, didirikan dengan Akte Pendirian dari Notaris Abdullah Sahal, SH, No. 139 tanggal 26 Juli 1985 yang berkedudukan di Makassar.

Selanjutnya atas Akte Pendirian tersebut telah diadakan perubahan dengan Akte Perubahan No. 20 tanggal 09 November 1988 dari Notaris yang sama, dan terakhir Akte Perubahan No. 66 tanggal 02 Februari 1996 dari Notaris Mestariany Habie, SH, tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan berubah menjadi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/028/DIR tanggal 29 Maret 1993. Dana Pensiun BPD Sulsel telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-211/KM.17/1996 tanggal 14 Juni 1996 yang selanjutnya telah diadakan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun Bank BPD Sulsel berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank BPD Sulsel No. 001/PD-BPDSS/2010 tanggal 30 April 2010 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-665/KM.10/2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Pengelolaan Dana Pensiun BPD Sulsel dilaksanakan oleh Susunan Pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang dalam menjalankan tugasnya Pengurus diawasi oleh Dewan Pengawas dan bertanggung jawab pada Pendiri.

a. Susunan Pengurus

   Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/036/DIR/IV/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penunjukan Sdri. Hj. Srie Caturwatie sebagai Ketua Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, No. SK/096/DIR/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tentang Penunjukan Sdri. Diah Mardiana sebagai Bendahara Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan No. SK/154/DIR/XI/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Penunjukan Pengurus Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, maka susunan pengurus Dana Pensiun Bank Sulselbar tahun 2012 sebagai berikut :

Susunan Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel Tahun 2012

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Hj. Srie Caturwatie	Ketua/Anggota	Mei 2010 – Desember 2013
2.	H.M. Chatib Saleh	Sekretaris/Anggota	Januari 2009 – Desember 2013
3.	Diah Mardiana	Bendahara/Anggota	Agustus 2010 – Desember 2013
4.	H. M. Syarif Supu	Anggota	Januari 2009 – Desember 2013

Dari 4 (empat) orang pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel sebagaimana tersebut di atas, semuanya telah memiliki Sertifikasi Pengetahuan Dasar Dana Pensiun atau telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Sebagaimana ketentuan dalam SK Dirjen Lembaga Keuangan No. KEP.4263/LK/2004 dalam rangka memenuhi kewajiban tentang pendidikan yang berkelanjutan, setiap Pengurus Dana Pensiun diwajibkan untuk memperoleh 20 poin per tahun. Untuk tahun 2012, seluruh Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel telah memperoleh poin sesuai ketentuan tersebut.

b. Pendiri dan Dewan Pengawas

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar No. SK/137/DIR/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Penunjukan Susunan Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka susunan Pendiri dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Sulsel tahun 2012 sebagai berikut :

Pendiri Dana Pensiun BPD Sulsel Tahun 2012

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	Ellong Tjandra	Pendiri/Direktur Utama	Pendiri September 2012–September 2017
2.	H.YanuarFachrudin	Pendiri/Direktur Umum	Pendiri September 2012–September 2017

Dewan Pengawas Dana BPD Sulsel Tahun 2012

No.	Nama	Jabatan	Periode
1.	H.A. Muhammad Rahmat	Ketua/Direktur Pemasaran	Pemberi Kerja September 2012–September 2017
2.	H.Harris Saleng	Anggota/Direktur Kepatuhan	Pemberi Kerja September 2012–September 2017
3.	H. M. Zainal Abdi	Anggota/Pegawai Aktif	Peserta Agustus 2008 – September 2012
4.	H. Laharang Tunru	Anggota/Pensiunan	Januari 2009 – Desember 2013

Sehubungan dengan berakhirnya masa tugas Dewan Pengawas yang mewakili peserta aktif yaitu H. Zainal Abdi, yang sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan belum ada penggantinya, namun telah dilaporkan ke Pendiri sejak Juli 2012.

c. Jenis Program Pensiun

Jenis Program Pensiun Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan adalah Program Pensiun Manfaat (PPMP).

d. Jumlah Peserta Aktif dan Pensiunan

Jumlah peserta aktif dan pensiunan Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebanyak 1.032 sebagai berikut :

Peserta Aktif dan Pensiunan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

No.	Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
1	Peserta Aktif	873	856	831	713	679	529
2	Peserta Pensiunan :						
	- Pensiunan Direksi	5	5	5	0	3	3
	- Pensiunan Pegawai	113	98	80	86	68	61
	-Pensiunan Janda/Duda/Yatim/ Piatu (PJ/PD/YP)	30	31	35	28	30	27
	- Pensiunan Ditunda	11	12	16	13	11	9
	Jumlah	**1.032**	**1.002**	**967**	**840**	**792**	**629**

Dari jumlah tersebut di atas apabila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2011, terdapat penambahan sebanyak 30 orang karena adanya penerimaan pegawai baru dan bertambahnya pensiunan baru.

Pencatatan peserta baru Dana Pensiun BPD Sulsel berdasarkan PDP No. 001/PD/BPDSS/2010 tanggal 30 April 2010, Pasal 20 tentang kepesertaan yang dimulai pada saat yang bersangkutan menjadi pegawai organik dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan mengikuti ketentuan pada Dana Pensiun BPD Sulsel.

Pada tahun 2012, terdapat 16 pegawai yang pensiun dari Bank Sulselbar, dibandingkan tahun 2011 yang tercatat sebanyak 13 orang yang pensiun. Pegawai yang memasuki Masa Persiapan Pensiun pada tahun 2012 sebanyak 21 orang atau lebih tinggi dari tahun 2011 sebanyak 11 orang.

Jumlah Pegawai Pensiun dan Masa Persiapan Pensiun

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pensiun	7	7	16	9	13	16
Masa Persiapan Pensiun	0	0	0	7	11	21
Jumlah	**7**	**7**	**16**	**16**	**24**	**37**

e. Kebijaksanaan Pendanaan

Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, dan hasil investasi. Kekayaan Dana Pensiun tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Dana Pensiun. Sehubungan dengan hal tersebut Dana Pensiun harus secara berkala mengukur tingkat kecukupan dana (minimal tiga tahun sekali) melalui valuasi aktuaria. Adapun tujuan dari valuasi aktuaria tersebut adalah antara lain :

- Menilai kewajiban aktuaria dan kewajiban solvabilitas;
- Menentukan iuran normal;
- Menentukan iuran tambahan dalam hal terdapat defisit.

Dalam melakukan valuasi aktuaria pada Dana Pensiun BPD Sulsel, aktuaris menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan menghitung unit *cost* setiap tahun sesuai dengan kondisi gaji dan tingkat bunga saat itu serta mengasumsikan adanya kenaikan gaji.

Dana Pensiun Bank Sulselbar menganut metode pendanaan *Full Funding*, yaitu melaksanakan pemupukan dana sejak peserta masih aktif bekerja. Adapun sumber pendanaan adalah dalam bentuk iuran normal tahunan yang dibayar oleh Peserta dan Pemberi Kerja. Besar Iuran adalah :

- Iuran Beban Peserta : 4% x Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP).
- Iuran Beban Pemberi Kerja : Berdasarkan perhitungan aktuaris terakhir.

Pendanaan Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

Rp Juta

No.	Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
1.	Iuran Normal	67.746	48.624	40.189	33.916	28.309	23.489
2.	Iuran Tambahan	93.357	86.310	66.786	58.802	51.331	41.395
3.	Perhitungan Manfaat Pensiun	40.080	32.799	26.359	22.473	18.261	14.801

f. Perhitungan Manfaat Pensiun

Usia pensiun normal adalah 55 tahun sedangkan usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang – kurangnya 45 tahun. Penentuan pensiun serta sebagai dasar penetapan hak memperoleh manfaat pensiun adalah tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama peserta sebagai pegawai. Perhitungan manfaat pensiun yaitu sebesar 2,5% x MK x PhDP (terakhir).

Manfaat pensiun tahun 2012 sebesar Rp5.537 juta atau meningkat 14,71% dari tahun 2011 sebesar Rp4.827 juta. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh pertambahan jumlah pensiunan yaitu dari 146 orang menjadi 159 orang.

g. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan Dana Pensiun Bank Sulselbar sebagai berikut :

Neraca Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

Rp Juta

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
AKTIVA						
Investasi	175.539	154.144	122.582	103.774	85.975	70.742
Selisih Penilaian Investasi	7.340	5.128	1.387	0	0	0
Aktiva Lancar di Luar Investasi	2.268	1.684	1.729	1.544	1.613	2.172
Aktiva Operasional	734	764	792	822	891	121
Jumlah Aktiva	**185.881**	**161.721**	**126.490**	**106.140**	**88.479**	**73.035**
Jumlah Aktiva Bersih	**185.881**	**161.721**	**126.490**	**106.140**	**88.479**	**73.035**
KEWAJIBAN						
Kewajiban Aktuaria	97.750	88.345	83.688	80.895	79.547	78.679
Selisih Kewajiban Aktuaria	88.131	73.375	42.802	25.245	8.932	(5.644)
Kewajiban di luar Kewajiban Aktuaria	0	0	0	0	0	0
Jumlah Kewajiban	**185.881**	**161.721**	**126.490**	**106.140**	**88.479**	**73.035**

Total aset Dana Pensiun Bank Sulselbar pada tahun 2012 meningkat 15% menjadi Rp185.881 juta dibandingkatn tahun 2011 sebesar Rp161.721 juta. Kenaikan total aset Dana Pensiun Bank Sulselbar disebabkan terjadinya peningkatan investasi pada deposito, obligasi, dan penempatan.

h. Investasi dan Hasil Usaha Dana Pensiun

Investasi Dana Pensiun Bank Sulselbar sebagai berikut:

Investasi Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

Rp Juta

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Deposito	128.280	106.750	88.000	69.400	50.600	61.039
Obligasi	36.118	36.144	25.222	24.419	28.515	8.281
Penempatan	3.000	3.000	1.000	1.422	1.422	1.422
Tanah dan Bangunan	8.141	8.250	8.360	8.533	5.438	0
Jumlah	**175.539**	**154.144**	**122.582**	**103.774**	**85.975**	**70.742**

Hasil usaha Dana Pensiun Bank Sulselbar sebagai berikut :

Hasil usaha Dana Pensiun Bank Sulselbar Tahun 2007 – 2012

Rp Juta

Keterangan	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Pendapatan Investasi	13.404	12.179	10.135	9.104	7.277	5.590
Beban Investasi	161	(159)	(149)	125	76	7
Hasil Usaha Investasi	13.243	12.020	9.986	8.979	7.201	5.583
Beban Operasional	1.989	2.076	1.957	1.332	1.122	1.000
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	14	26	26	8	20	20
Hasil Usaha Sebelum Pajak	11.268	9.970	8.055	7.655	6.099	4.603
Pajak Penghasilan	0	0	0	0	0	0
Hasil Usaha Setelah Pajak	11.268	9.970	8.055	7.655	6.099	4.603

Total hasil usaha setelah pajak meningkat 13% dari Rp9.970 juta pada tahun 2011 menjadi Rp11.268 juta di tahun 2012. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan investasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/087/DIR/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Arahan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan dalam rangka menyesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/KMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun, maka penempatan investasi Dana Pensiun Bank Sulselbar diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/114/DIR/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Arahan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan. Investasi dana kekayaan Dana Pensiun BPD Sulsel ditempatkan pada jenis investasi sebagai berikut :

1. Surat Berharga Negara
2. Tabungan pada Bank
3. Deposito Berjangka pada Bank
4. Deposito *on Call* pada Bank
5. Sertifikat Deposito pada Bank
6. Sertifikat Bank Indonesia
7. Saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
8. Obligasi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
9. Sukuk yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
10. Unit Penyertaan Reksa Dana dari :
    a. Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Campuran dan Reksa Dana Saham
    b. Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan dan Reksa Dana Indeks
    c. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas
    d. Reksa Dana yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek

11. Efek Beragun Aset dari Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
12. Unit Penyertaan Dana Investasi *Real Estate* berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
13. Kontrak Opsi Saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
14. Penempatan Langsung pada Saham
15. Tanah di Indonesia dan atau
16. Bangunan di Indonesia.

Sehubungan dengan jenis investasi tersebut di atas, maka investasi Dana Pensiun BPD Sulsel telah dilaksanakan sesuai dengan Arahan Investasi Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 199/KMK.010/2008 tanggal 05 Desember 2008 tentang Investasi Dana Pensiun dan telah dituangkan pula dalam Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan No. SK/114/DIR/IX/2012 tanggal 11 September 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pengurus Dana Pensiun BPD Sulsel senantiasa fokus pada pengambilan keputusan investasi yang objektif, aman dan menguntungkan bagi kepentingan Peserta Dana Pensiun dan Bank Sulselbar sebagai Pemberi Kerja. Dan untuk itu, investasi kekayaan Dana Pensiun BPD Sulsel telah dan akan terus dikelola secara benar dan sehat sesuai ketentuan dan peraturan Dana Pensiun yang berlaku untuk meraih hasil investasi yang optimal sehingga kewajiban pembayaran manfaat pensiun dapat dipenuhi secara berkesinambungan.

Laporan Portofolio Investasi dan Laporan Keuangan Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2012 dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik Usman dan Rekan, sedangkan PT. Dian Artha Tama Jakarta telah ditunjuk untuk melakukan valuasi aktuaria Dana Pensiun BPD Sulsel tahun 2012.

Rencana dan Strategi SDM Tahun 2013

Rencana dan strategi pengelolaan dan pengembangan SDM Bank Sulselbar pada tahun 2013 sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
   Dalam rangka pengelolaan SDM yang lebih baik di tahun 2013, maka akan dilakukan penyempurnaan beberapa peraturan SDM sebagai berikut :
   a. Pedoman Peraturan Tata Tertib
   b. Peraturan Disiplin
   c. Sistem Pemeliharaan Kesehatan
   d. Peraturan pendukung lainnya untuk menciptakan budaya unggul bagi pegawai yang pada akhirnya akan mengangkat citra Bank Sulselbar menjadi perusahaan unggul.

   Pada tahun 2013 akan dilakukan langkah – langkah perbaikan manajemen SDM antara lain dengan pembentukan Komite Etik dan Dewan Pertimbangan Pegawai.

   Pada tahun 2013 direncanakan untuk melakukan penataan pegawai melalui evaluasi kinerja dan pemetaan pegawai berdasarkan kemampuan dan potensi.

2. Rekrutmen Pegawai
   Rencana rekrutmen tahun 2013 untuk memenuhi ketersediaan SDM seiring dengan rencana pengambangan jaringan kantor dan penambahan unit kerja baru.

   Untuk memenuhi kebutuhan terhadap pegawai dasar antara lain tenaga pramubakti, *security, driver* akan dilakukan dengan mekanisme *outsorcing* melalui kerjasama dengan pihak eksternal penyedia jasa tenaga *outsorcing.*

Rencana Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2013

Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas merupakan komponen terpenting bagi Bank Sulelbar dalam mendukung pencapaian visi dan misi bank serta dalam rangka pencapaian strategi dan target menuju *regional champion*. Oleh karena itu, strategi pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas Bank Sulselbar untuk dikelola secara terintegrasi. Program pendidikan dan pelatihan yang terprogram dan berkesinambungan akan dilaksanakan sebagai wujud untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidangnya masing – masing sehingga akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan bisnis bank.

Program pendidikan dan pelatihan diselenggarakan baik untuk program jangka pendek untuk meningkatkan keterampilan operasional pegawai dan memperbaiki proses bisnis, maupun program jangka panjang yaitu memberikan pelatihan berjenjang, baik teknis maupun manajerial, untuk meningkatkan wawasan penunjang jenjang karir.

Rencana pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan potensi dan wawasan pegawai Bank Sulselbar pada tahun 2013 telah direncanakan dalam Rencana Bisnis Bank Sulselbar dengan anggaran sebesar Rp. 13 miliar atau sebesar 5,01% dari anggaran biaya tenaga kerja tahun 2012. Program pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan tahun 2013 sebagai berikut :

1. Program Pelatihan Dasar Perbankan
2. Program Pelatihan Perbankan Syariah
3. Program Pelatihan Manajerial
4. Program Pelatihan Peningkatan Kompetensi dan Penunjang Keahlian
5. Seminar dan *Workshop*
6. Program Beasiswa Pendidikan
7. Program Kegiatan Ceramah/Penyegaran Rohani

Penghasilan Berdasarkan Jabatan

Program kesejahteraan bagi pegawai sangat penting dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental pegawai beserta keluarganya. Upaya yang dilakukan dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental pegawai untuk meningkatkan produktivitas, motivasi, semangat kerja, dan loyalitas pegawai, serta mempertahankan pegawai agar tidak pindah ke perusahaan lain yakni melalui program kesejahteraan pegawai yang disusun berdasarkan peraturan legal, berasaskan keadilan dan kelayakan serta berpedoman kepada kemampuan perusahaan.

Pada tahun 2013, biaya tenaga dianggarkan sebesar Rp257 miliar atau naik sekitar 19% dibandingkan anggara biaya tenaga kerja tahun 2012 sebesar Rp216 miliar. Rencana kenaikan tersebut berasal dari rencana kenaikan gaji, rencana rekrutmen pegawai baru berstatus calon pegawai dan penghargaan uang jasa pengabdian kepada Direksi yang akan berakhir masa tugasnya pada tahun 2013.

Adapun kisaran penghasilan pegawai Bank Sulselbar mulai dari Komisaris Utama sampai dengan tenaga *outsourcing* (per 31 Desember 2012) sebagai berikut :

No.	Jabatan	Penghasilan (Rp)	
		Terendah	Tertinggi
I. Pengurus dan Pegawai			
1.	Dewan Komisaris	50.101.535	52.642.668
2.	Direksi	67.683.431	75.203.812
3.	Pemimpin Grup	20.120.124	28.521.093
4.	Pemimpin Cabang Utama/Khusus	23.168.872	25.780.897
5.	Pemimpin Cabang Kelas I	15.426.141	22.832.852
6.	Pemimpin Cabang Kelas II	15.737.610	21.290.258
7.	Pemimpin Cabang Syariah/Pembantu	16.663.064	17.529.969
8.	Manajer & Setara	14.566.075	21.767.283
9.	Analis & Setara	8.082.153	19.301.778
10.	Staf & Setara	2.634.985	13.101.061
II. Pegawai Kontrak dan Outsourcing			
1.	Kontrak Tenaga Ahli	4.500.000	4.500.000
2.	Kontrak Magang	950.000	1.450.000
3.	Tenaga Outsorcing	2.385.019	2.898.299

Penghargaan dan Sanksi

Bank Sulselbar memberikan penghargaan kepada pegawai atas dedikasi dan pengabdian kepada bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan untuk memotivasi pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan pengabdian terbaiknya bagi bank. Penghargaan kepada pegawai sebagai berikut :

1. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan Peraturan Direksi Bank Sulsel No. 002/ PD-PT Bank Sulsel/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Bank Sulsel, sebagai berikut :

   a. Penghargaan Karena Prestasi
   Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa bagi pengembangan bank sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya. Penghargaan yang diberikan berupa kenaikan pangkat istimewa berdasarkan Paraturan Direksi yang berlaku dan hadiah lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

   b. Penghargaan Karena Masa Kerja
   Manajemen memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :
   - Pegawai yang memiliki masa kerja 15 tahun dan hasil penilain karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna hitam.
   - Pegawai yang memiliki masa kerja 25 tahun dan hasil penilain karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna perak dan cinderamata berupa logo emas seberat 10 gram.
   - Pegawai yang memiliki masa kerja 30 tahun dan hasil penilaian karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan minimal rata – rata baik , diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan kotor terakhir ditambah piagam dengan tulisan warna emas dan cinderamata berupa cincin emas seberat 10 gram.

   c. Penghargaan Karena Masa Kerja Proporsional
   Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang berhenti dengan hormat dan berhak atas pensiun

> Sumber daya manusia yang handal dan berkualitas merupakan komponen terpenting bagi Bank Sulelbar dalam mendukung pencapaian visi dan misi bank serta dalam rangka pencapaian strategi dan target menuju *regional champion.*

yang dipercepat serta hasil penilaian karya selama 2 tahun terakhir menunjukkan nilai rata – rata minimal baik, sedangkan masa kerjanya diatas 15 tahun.

- Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 15 tahun namun kurang dari 20 tahun, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan.
- Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 25 tahun namun kurang dari 30 tahun, diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan.
- Pegawai yang memiliki masa kerja di atas 30 tahun, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan.

d. Penghargaan Karena Memasuki Masa Pensiun

Pegawai yang memasuki masa pensiun diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan kotor terakhir sebagai imbalan jasa, yang dibayarkan pada saat yang bersangkutan memasuki pensiun dan cinderamata berupa cincin emas seberat 10 gram.

2. Jasa produksi diberikan atas kinerja selama 1 (satu) tahun penuh

3. Pencapaian dan pelampauan target Rencana Bisnis akan diberikan bonus kepada pegawai dan dibebankan setiap akhir semester.

Penerapan sanksi kepada pegawai bertujuan untuk membina dan meningkatkan kejujuran pegawai dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang yang diberikan bank kepadanya. Sanksi diberikan kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dan fraud dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Bank dan Pemerintah/Negara, baik langsung maupun tidak langsung.
2. Melakukan tindakan tercela di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
3. Menggunakan kedudukan dalam bank untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain yang dapat merugikan bank, baik langsung maupun tidak langsung.
4. Melakukan tindakan yang dapat merugikan bank, baik langsung maupun tidak langsung.
5. Melakukan hal yang bertentangan dengan aturan kepegawaian dan sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan Peraturan Direksi Bank Sulsel No. 002/PD-PT Bank Sulsel/XI/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada PT Bank Sulsel, jenis – jenis sanksi atas penyimpangan sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif, yang terdiri dari :
   - Peringatan
   - Demosi
   - Pemberhentian
2. Tuntutan Ganti Rugi
3. Tindakan Sementara Non Aktif dan Skorsing

BANK SULSELBAR CLUB

Bank Sulselbar Club merupakan wadah perkumpulan yang dibentuk untuk mengakomodir seluruh pegawai Bank Sulselbar untuk mengembangkan bakat, membangun sportifitas dan menjalin silaturrahmi antar pegawai dan keluarganya. Bank Sulselbar Club diharapkan dapat menjadi wadah yang efektif untuk menjaga keseimbangan kerja dan aktivitas pegawai Bank Sulselbar di luar pekerjaan sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Bank Sulselbar Club dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/120/DIR/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Pembentukan Bank Sulsel Club. Bank Sulselbar Club terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang Olahraga, Bidang Kesenian, Bidang Kerohanian dan Bidang Dharma Wanita. Bidang Olahraga mengkoordinir cabang–cabang olahraga : sepakbola, futsal, menembak, golf, tennis lapangan, bulutangkis, bola voli, tenis meja, sepeda, beladiri/karate, sepak takraw, bola basket, bilyard dan keterampilan. Bidang Kesenian mengkoordinir cabang seni : poco – poco, *vocal group*, dan *pop singer.*

Kegiatan Bank Sulselbar Club selama tahun 2012 yaitu melakukan kegiatan latihan rutin masing – masing cabang olahraga dan seni, menyelenggarakan kegiatan keagamaan pada perayaan hari – hari besar keagamaan, dan kegiatan sosial seperti donor darah, bantuan ke panti asuhan dan panti jompo. Selain itu, dalam rangka mengikuti PORSENI BPD SI X di Palembang, Sumatera Selatan, beberapa bidang olah raga dan seni yang akan diikuti Bank Sulselbar telah melakukan persiapan antara lain menyeleksi beberapa pegawai yang akan mewakili Bank Sulselbar sebagai atlit dan atau kontestan, melakukan latihan rutin dan pertandingan persahabatan untuk menguji kesiapan kontingen olahraga dan seni Bank Sulselbar menghadapi pertandingan pada PORSENI BPD SI X.

Struktur Organisasi Bank Sulselbar Club

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

TEKNOLOGI INFORMASI

Bank Sulselbar memandang bahwa teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan keunggulan kompetitif bank di industri perbankan untuk memberikan layanan yang lebih baik, proses bisnis yang lebih efisien, dan penyampaian produk dan jasa yang lebih nyaman dan efektif.

Komitmen Bank Sulselbar dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis Bank. Langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan Bank Sulselbar untuk mempertahankan *market share* dan memperluas pangsa pasar. Hal ini tergambar dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara *real time on line* untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan.

Ketersediaan Layanan Prima yang menjadi salah satu pilar *regional champion* hanya dapat dicapai melalui dukungan infrastruktur teknologi dan operasional yang sesuai dengan ekspektasi nasabah.

Teknologi informasi yang handal juga mendukung upaya Bank untuk melakukan efisiensi di berbagai bidang, akselerasi penerapan manajemen risiko dan implementasi tata kelola perusahaan yang efektif.

Peran teknologi informasi yang sangat penting bagi kelangsungan bisnis Bank, maka sejak tahun 2009 Bank Sulselbar telah menyusun *Blue Print IT Strategic Plan.*

Program penerapan dan aktivitas pengembangan teknologi informasi Bank Sulselbar selama tahun 2012 sebagai berikut :

1. PPOB yang memungkinkan pembayaran listrik via Teller yang akan disusul via ATM pada tahun 2012
2. Pengembangan Helpdesk
3. Pengembangan Modul e-Dapem, sistem pembayaran dana pensiun secara elektronik.
4. Pengembangan Modul Kredit *Channeling*
5. Pengembangan transaksi perbankan KPE
6. Pengembangan Modul Perhitungan Stastistik CKPN

Investasi di Bidang Teknologi Informasi Tahun 2012

Sistem teknologi informasi yang unggul tentunya didukung pula oleh infrastruktur teknologi informasi yang handal. Pada tahun 2012, total belanja modal Bank Sulselbar untuk pengadaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sebesar sebesar Rp14.689.490.200 (empat belas milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) untuk pengadaan sewa beli *hardware* dan *software Data Centre.*

Pengembangan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi

Selain faktor penerapan sistem dan infrastruktur TI, sumber daya manusia yang mengelola sistem tersebut juga memegang peran penting. Proses transfer pengetahuan dan *skill* di bidang TI juga terus diupayakan Bank Sulselbar sebagai berikut :

- *Workshop*
  Workshop ini berlaku untuk seluruh karyawan Grup TI terkait proyek-proyek yang sedang berjalan maupun rencana proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Grup TI juga melakukan *workshop* untuk masing-masing proyek pada saat proses implementasi sedang dilakukan. Kegiatan ini dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing proyek.
- Peningkatan Pengetahuan Teknologi Informasi
  Grup Teknologi Informasi juga mengirimkan karyawannya untuk mengikuti kursus dan pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan pengetahuan TI. Kursus, seminar dan pelatihan yang diikuti dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Rencana Teknologi Informasi Tahun 2013

Sebagai kelanjutan dari strategi bisnis tahun – tahun sebelumnya, pada tahun 2013 Grup Teknologi Informasi akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur sebagai dasar dan landasan untuk menciptakan sistem teknologi informasi yang terpadu, sinergi dan komprehensif dengan keselarasan strategi bisnis Bank Sulselbar. Pemenuhan terhadap regulasi teknologi sistem informasi sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 akan tetap menjadi fokus untuk menciptakan sistem informasi yang aman, baik terhadap ancaman maupun terhadap kepatuhan akan regulasi yang berlaku.

Untuk ke depan direncanakan akan dilakukan beberapa pengembangan dan upgrade teknologi diantaranya :

- Implementasi *New Data Centre* dan *Disaster Recovery Center* (DRC)
- Penyempurnaan fungsi manajemen risiko
- Pengembangan Aplikasi APU/PPT
- Dimulainya penyusunan *Bussiness Continuity Plan* (BCP) secara general
- Pengembangan interface aplikasi
- *Updating IT Strategic Plan*
- Implementasi *Data Warehouse*

MANAJEMEN RISIKO

PENGUNGKAPAN PERMODALAN & PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Permodalan

Sesuai Pilar 1 Basel 2, PT. Bank Sulselbar melakukan perhitungan kecukupan permodalan berdasarkan metode yang selaras dengan roadmap penerapan Basel 2 di perbankan Indonesia, dengan uraian sebagai berikut :

a. Risiko Kredit dihitung dengan menggunakan *Standardized Approach (SA)*
b. Risiko Operasional dihitung dengan menggunakan *Basic Indicator Approach (BIA)*
c. Risiko Pasar tidak diperhitungkan (tidak termasuk bank yang wajib memperhitungkan risiko pasar dalam permodalan).

Perhitungan kecukupan modal minimum yang dilakukan bank, tidak hanya ditujukan untuk menyerap potensi kerugian akibat risiko kredit, risiko pasar & risiko operasional sebagaimana Pilar 1, namun dilakukan dengan tetap memperhitungkan risiko lain yang material antara lain risiko likuiditas dan risiko 'lain'. Olehnya penyediaan modal minimum dilakukan dengan

memperhitungkan penilaian profil risiko yang diatur dalam Pilar 2 Basel 2 atau ICAAP - *Internal Capital Adequacy Assessment Process*). Selain hal tersebut, bank juga mengalokasikan modal untuk mengantisipasi kerugian dalam kondisi yang tidak normal *(Economic Capital)*.

Dengan metode ini, memastikan bank memiliki permodalan yang cukup untuk menyerap risiko baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal.

Selain untuk memenuhi kecukupan modal minimum sesuai regulasi, kebijakan permodalan bank diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan efisiensi permodalan dengan mengalokasikan pada eksposure yang memiliki *risk – return* yang optimal dan selaras dengan rencana strategis bank.

Persiapan Implementasi Basel III

Basel III lahir dari kebutuhan untuk menyempurnakan kerangka permodalan saat ini (Basel II) yang antara lain bertujuan untuk i).meningkatkan kemampuan sektor perbankan untuk menyerap potensi risiko kerugian akibat krisiskeuangan dan ekonomi, dan ii).meningkatkan kualitas manajemen risiko, *governance*, transparansi dan keterbukaan.

Ruang lingkup Dokumen "Basel III: *Global Regulatory Framewor for More Resilient Banks and Banking Systems*" yang diterbitkan pada akhir tahun 2010 adalah meliputi penguatan Kerangka Permodalan Global dan pengenalan Standar Likuiditas Global yang secara bertahap akan mulai diterapkan tahun 2013 hingga implementasi penuh pada tahun 2019.

Sebagai persiapan atas kerangka Basel III, melalui *Quantitative Impact Study* (QIS) yang diinisiasi oleh BI, bank melakukan kajian untuk memastikan kesesuaian implementasi dengan kondisi internal bank diantaranya penilaian dampak implementasi Basel III terhadap permodalan dan likuiditas bank. Hasil analisa menunjukkan kemampuan permodalan dan likuiditas PT. Bank Sulselbar dalam menerapkan Basel III.

Tabel 1.a Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

(dalam jutaan rupiah)

KOMPONEN MODAL			Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
			Bank	Konsolidasi	Bank	Konsolidasi
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
I	KOMPONEN MODAL					
	A	Modal Inti	1,038,216	-	937,848	-
		1 Modal di setor	528,739	-	501,627	-
		2 Cadangan Tambahan Modal	509,477	-	436,221	-
		3 Modal Inovatif	-	-	-	-
		4 Faktor Pengurang Modal Inti	-	-	-	-
		5 Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-
	B	Modal Pelengkap	62,969	-	53,276	-
		1 Level Atas (*Upper Tier* 2)	62,969	-	53,276	-
		2 Level Bawah (*Lower Tier* 2) maksimum 50% Modal Inti	-	-	-	-
		3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	-	-
	C	Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap	-	-	-	-
		Eksposur Sekuritisasi	-	-	-	-
	D	Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (*Tier* 3)	-	-	-	-
	E	MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR	-	-	-	-
II	TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C)		1,101,185	-	991,124	-
III	TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)		1,101,185	-	991,124	-
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT		3,831,794	-	3,831,794	-
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL		1,205,723	-	1,205,723	-
VI	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR		-	-	-	
	A	Metode Standar	-	-	-	
	B	Model Internal	-	-	-	
VII	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]		21.86%	0.00%	19.67%	0.00%

Tabel 1.b Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Asing

(dalam jutaan rupiah)

KOMPONEN MODAL			Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
(1)		(2)	(3)	(4)
I	KOMPONEN MODAL			
	A	Dana Usaha	-	-
		1 Dana Usaha	-	-
		2 Modal di setor	-	-
	B	Cadangan	-	-
		1 Cadangan umum	-	-
		2 Cadangan tujuan	-	-
	C	Laba (rugi) tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)	-	-
	D	Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%)	-	-
	E	Dana setoran modal	-	-
	F	Pendapatan komprehensif lainnya: kerugian berasal dari penurunan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (100%)	-	-
	G	Pendapatan komprehensif lainnya: keuntungan berasal dari peningkatan penyertaan dalam kelompok tersedia untuk dijual (45%)	-	-
	H	Revaluasi aset tetap (45%)	-	-
	I	Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif	-	-
	J	Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib di hitung	-	-
	K	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	-
	L	Cadangan umum aset produkti f (maks. 1,25% dari ATMR)	-	-
	M	Faktor pengurang modal	-	-
		Eksposur sekuri tisasi	-	-
II	MODAL BANK ASING (Jumlah A s.d L - M)		-	-
III	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT		-	-
IV	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL		-	-
V	ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR		-	-
	A	Metode Standar	-	-
	B	Model Internal	-	-
VI	RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [II : (III + IV + V)]		-	-

Penerapan Manajemen Risiko Bank Secara Umum

Dalam penerapan manajemen risiko, bank berpedoman kepada pilar penerapan yang meliputi : 1).Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, 2).Kecukupan Kebijakan, Prosedure dan Penetapan Limit, 3).Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko, dan 4). Sistem Pengendalian Intern.

Penjabaran berbagai pilar tersebut, selanjutnya ditetapkan dalam suatu **Kerangka Manajemen Risiko PT. Bank Sulselbar** yang terdiri dari : Organisasi & SDM, Kebijakan, Proses & Metodologi, dan Infrastruktur. Kerangka ini menjadi dasar penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko di seluruh aktivitas maupun produk bank. Uraian singkat dari kerangka adalah sebagai berikut :

Kebijakan
- Penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi dan misi, *risk appetite*, kemampuan permodalan, Sumber Daya Manusia dan kapasitas pendanaan.

Organisasi& SDM
- Design struktur organisasi dengan berfokus kepada efektitas pelaksanaan prinsip *four eyes principles* dan *reporting,* penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas setiap di unit kerja dalam setiap aktivitas.

Proses
- proses identifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk & aktivitas baru,
- proses pengukuran dimaksudkan agar bank mampu mengkalkulasi eksposure risiko yang melekat dan memperkirakan dampak permodalan yang seharusnya dipelihara. Metodologi pengukuran permodalan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia.
- proses pemantauan risiko difokuskan kepada upaya evaluasi terhadap eksposur risiko yang bersifat material dan atau berdampak kepada permodalan.
- proses pengendalian risiko dilakukan dengan cara antara lain penambahan modal, lindung nilai dan teknis mitigasi risiko lainnya.

Infrastruktur
- Penggunaan Teknologi Informasi yang mendukung proses dan metodologi.

Esensi penerapan manajemen risiko PT. Bank Sulselbar adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha Bank tetap dapat terkendali (*manageable*) pada batas/limit yang dapat diterima serta menguntungkan Bank.

Sebagai pelengkap Pilar 1 dan Pilar 2,penerapan Pilar 3 Basel II pada Bank Sulselbar ditujukan untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan sebagai salah satu aspek penting dalam rangka memperkuat perbankan. Pengungkapan informasi merupakan sarana efektif untuk menginformasikan kepada pasar mengenai eksposur risiko yang ada pada bank. Pengungkapan Pilar 3 akan menjadi sarana untuk menunjukkan keunggulan dalam mengelola risiko, hal ini akan berdampak positif terhadap hasil kinerja bank, sehingga dapat meningkatkan daya kompetisi PT. Bank Sulselbar.

Cakupan pengungkapan dalam Pilar 3 dilakukan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan *Good Corporate Governance*, Transparansi Informasi Keuangan, transparansi produk, dan transparansi proses manajemen risiko bank.

Organisasi Manajemen Risiko Secara Umum

Selain prinsip pemisahan fungsi, organisasi manajemen risiko disusun berdasarkan pertimbangan antara lain i).keselarasan dengan visi / misi bank, ii).kemampuan SDM, iii). Kemampuan permodalan, dan iv.*risk appetite / risk tolerance*. Secara umum organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar untuk seluruh jenis risiko tergambar sebagai berikut :

Kebijakan & strategi manajemen risiko dirumuskan oleh Komite (ALCO & Komite Manajemen Risiko) untuk kemudian ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris. ALCO merumuskan dan menetapkan kebijakan & strategi untuk optimalisasi *asset & liability*, dan Komite Manajemen Risiko merumuskan kebijakan, strategi & metodologi manajemen risiko secara keseluruhan. Organisasi Komite Manajemen Risiko terdiri 3 tiga bagian yaitu Komite Manjaemen Risiko Kredit, Komite Manajemen Risiko Likuiditas & Pasar dan Komite Manajemen Risiko Operasional & Risiko 'Lain'.

Seluruh unit kerja (*Risk Taking Unit* dan *Supporting Unit*) selaku *risk owner* bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko di masing-masing unitnya melalui penerapan *internal control,* pelaksanaan fungsi kepatuhan dan strategi *anti fraud*. Pengelolaan risiko oleh *risk owner* merupakan pilar pertama dalam organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar (*1st line of defense*). Dalam konteks risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, pengambilan keputusan yang merupakan kewenangan Direksi dilakukan melalui Komite yang keanggotaannya terdiri dari Direksi dan pejabat eksekutif terkait.

Monitoring eksposur risiko dilaksanakan oleh unit independen dari *risk taking unit* yaitu Grup Manajemen Risiko,Unit Khusus *Anti Fraud* & Grup Kepatuhanmerupakan lini kedua (*2nd line of defense*) dalam organisasi manajemen risiko PT. Bank Sulselbar.

Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko.

Hasil *monitoring* (*2nd line of defense*) dan pengujian (*3rd line of defense*) selanjutnya menjadi dasar perumusan untuk pengembangan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan metodologi manajemen risiko.

RISIKO KREDIT

Penerapan Manajemen Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, antara lain pemberian kredit, transaksi antar bank, serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Tujuan penerapan manajemen risiko kredit adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana bank tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian bank.

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

Gambaran organisasi *1st line of defense* yang merupakan penjabaran dari organisasi manajemen risiko secara umum diuraikan sebagai berikut :

Organisasi Manajemen Risiko Kredit

1st line of defense

Limit Direksi	Komite Kredit	UNIT SUPERVISI & PENYELAMATAN KREDIT
	Direksi	
	Pemimpin Grup Terkait	
	Narasumber	
Limit Pimgrup	Komite Kredit	
	Pemimpin Grup Pemasaran	
	Pemimpin Grup Terkait	
	Pemimpin Departemen Terkait	
Limit Cabang	Komite Kantor Cabang	
	Pemimpin Cabang	
	Seluruh Pemimpin Seksi	
	Pejabat Pengusul Kredit	

Seluruh unit bisnis selaku *risk owner* bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko kredit di masing-masing unit kerjanya (*1st line of defense*). *Monitoring* eksposur risiko kredit dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko, Unit Khusus *Anti Fraud* dan Grup Kepatuhan (*2nd line of defense*), dan pelaksanaan Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko kredit.

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, bank menetapkan organisasi yang berwenang dalam pemutusan kredit sebagai berikut :

***Limit* Kantor Cabang.** Keputusan kredit yang merupakan limit Cabang dilakukan melalui Komite Kantor Cabang beranggotakan Pemimpin Cabang, seluruh Pemimpin Seksi dan pejabat pengusul.

***Limit* Pemimpin Grup.** Keputusan kredit yang merupakan limit Pemimpin Grup, dilakukan melalui Komite Kredit di Kantor Pusat beranggotakan pejabat eksekutif dan Pemimpin Departemen terkait, serta perwakilan Komite Kantor Cabang selaku pengusul.

***Limit* Direksi.** Keputusan kredit yang merupakan limit Direksi, dilakukan melalui Komite Kredit beranggotakan Direksi, pejabat eksekutif terkait dan perwakilan Komite cabang & Kantor Pusat selaku pengusul.

***Limit* Dewan Komisaris.** Keputusan kredit di atas limit Direksi dengan jumlah signifikan dan atau berpotensi mengandung benturan kepentingan (conflict of interest), wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam kerangka *2nd line of defense*, Grup Manajemen Risiko, Grup Kepatuhan serta Unit *Anti Fraud* yang merupakan unit independen dari *core risk taking unit* melakukan pemantauan eksposure risiko kredit.

Pelaksanaan *Risk Based Audit* oleh Audit Internal untuk pengujian efektifitas manajemen risiko kredit merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*).

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pengendalian Intern, Unit *Anti Fraud* menyusun, mengembangkan, memantau dan melaporkan implementasi strategi *anti fraud* terkait aktivitas perkreditan.

Manajemen Risiko Kredit Untuk Kredit Yang Memiliki Eksposur Signifikan

Dalam manajemen risiko untuk kredit yang memiliki eksposur yang signifikant bank menerapkan strategi yang konservatif antara lain :

- Penetapan kebijakan pemberian kredit kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar
- kebijakan *pricing,* agunan & pemantauan yang lebih intensif.
- Penetapan *limit* yang dikaitkan dengan kemampuan modal menyerap kerugian dalam *worst case scenario.*
- Prosedur pemutusan kredit hingga ke *level* Dewan Komisaris yang dilengkapi dengan kajian dari Direktur Kepatuhan.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Konsentrasi

Risiko konsentrasi dikelola berdasarkan penetapan limit portfolio pada sektor ekonomi ataupun skim kredit tertentu yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Proses penetapan *limit* dilakukan secara konservatif dengan mempertimbangkan bobot risiko suatu sektor / skim, kemampuan permodalan, kapasitas pendanaan, kemampuan SDM dan kinerja portfolio.

MEKANISME PENGUKURAN DAN PENGENDALIAN RISIKO KREDIT

Mekanisme Pengukuran

Dalam perhitungan kecukupan modal risiko kredit, bank menggunakan pendekatan *standardized model* berdasarkan Basel II. Untuk tujuan pembentukan cadangan kerugian, risiko kredit diukur menggunakan probabilitas dari data historis (minimal 3 tahun).

Saat ini bank telah mengembangkan *Internal Rating Model* dan *Consumer Scoring Card* yang implementasinya disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi. Ke depan, *Internal rating Model* dan *consumer scoring card* diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kredit dan perhitungan kecukupan modal. Selain itu, hasil pengukuran risiko kredit berbasis *rating* dapat menjadi dasar penetapan *'pricing'* yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (*risk based pricing*) dan untuk pengembangan portofolio perkreditan.

Pengendalian Risiko Kredit

Mengacu kepada *Risk Management Framework*, Manajemen Risiko Kredit PT. Bank Sulselbar secara singkat diuraikan sebagai berikut :

- Penyusunan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dan tersosialisasi kepada seluruh unit kerja.
- Penetapan *Credit risk tolerance* berdasarkan *risk appetite* yang dituangkan dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara periodik, antara lain penetapan : target *Non Performing Loan* (NPL) yang konservatif, target kredit per segmen kredit dan target *credit recovery*
- Penetapan struktur organisasi mengacu kepada *four eyes principles* yang secara jelas memisahkan antara fungsi pemutus dan *monitoring* risiko kredit.
- Penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan *monitoring* kredit.
- Penggunaan Teknologi Informasi yang memudahkan proses reporting guna *monitoring* risiko kredit dan *early warning system.*
- Penerapan *risk based audit* oleh Audit Intern yang secara continue dievaluasi oleh Komite Audit.
- Rekomendasi penyempurnaan model Manajemen Risiko kredit oleh Komite Manajemen Risiko yang dipantau oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris.

Definisi tagihan yang telah jatuh tempo & mengalami penurunan nilai

Definisi tagihan jatuh tempo adalah tagihan yang memiliki tunggakan lebih 90(Sembilan puluh) hari, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap akhir bulan.

Penurunan nilai / *impairment* untuk kredit yang jumlahnya di atas Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) akan dievaluasi secara individual, berdasarkan bukti obyektif terjadinya suatu peristiwa meliputi :

a) Kesulitan keuangan signifikan pihak debitur.
b) Pelanggaran kontrak, terjadinya wanprestasi / tunggakan pembayaran pokok atau bunga ;
c) Pemberian keringanan (konsesi) kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan.
d) Debitur akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
e) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan;
f) Khusus untuk kredit yang diberikan, bank menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan bukti obyektif penurunan nilai jika dikategorikan *non performing loan* sesuai ketentuan Bank Indonesia mencakup penilaian Prospek Usaha, *Performance* Debitur, dan Kemampuan Membayar

Bukti Objektif Penurunan Nilai yang dievaluasi secara kolektif, meliputi :

a) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut .
b) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok.

1.3. Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan untuk pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individual dan kolektif, serta metode statistic yang digunakan dalam CKPN

Perhitungan CKPN individual dilakukan dengan menggunakan metode *discounted cash flows,* sedangkan untuk perhitungan CKPN secara kolektif bank menggunakan Model Kewajaran Penilaian Sendiri (*self assessment Model*) untuk mengestimasi penurunan nilai secara kolektif berdasarkan kerugian historis selama 3 (tiga) tahun terakhir dan LGD 5 tahun terakhir yang dievaluasi setiap tiga bulan dengan *roll rates analysis method.* Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibentuk dengan menggunakan formula :

CKPN = Baki Debet Nilai Wajar x EAD

Dimana :

- *Exposure At Default* (EAD) adalah tarif Cadangan Kerugian Penurunan nilai (CKPN) yang dihitung dengan formula EAD = PD X LGD.
- Penentuan LGD dengan rumus : LGD = (1 - Rata-rata recovery rate)
- *Probability Of Default (PD)* : dihitung dengan menggunakan *Roll Rate Analisys*

Tabel 2.1.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2012				
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	158,760,697	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	10,265,256,082	-	-	17,911,974,014
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13,131,174	1,043,301,270	850,234,237	391,932,786	1,859,587,064
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	1,109,461,717,848	1,204,367,282,515	767,676,241,558	461,872,986,033	769,417,854,701
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	226,176,731,528	309,452,159,571	244,124,779,476	256,920,344,151	279,406,745,775
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,163,107,294	113,708,291	422,310,501	-	487,823,357
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-
	Total	**1,336,814,687,844**	**1,525,241,707,729**	**1,013,232,326,469**	**719,185,262,970**	**1,069,083,984,911**

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal 31 Desember 2011						
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
158,760,697	-	-	-	-	-	-
28,177,230,096	25,737,622,540	-	-	-	-	25,737,622,540
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,158,186,531	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,312,796,082,655	876,700,849,876	745,435,169,553	585,366,655,673	519,748,914,915	667,088,265,022	3,394,339,855,039
1,316,080,760,501	124,252,336,680	692,509,211,303	282,297,215,017	208,834,529,292	257,498,820,141	1,565,392,112,433
-	-	-	-	-	-	-
2,186,949,443	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,663,557,969,923	**1,026,690,809,096**	**1,437,944,380,856**	**867,663,870,690**	**728,583,444,207**	**924,587,085,163**	**4,985,469,590,012**

Tabel 2.1.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
	Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah						
Total	Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.2.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal 31 Desember 2012					
		Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah					
		< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	60,332,752	-	98,427,945	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	28,177,230,096	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	139,596,209	2,930,856,990	381,052,765	706,680,567	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-				-	
7	Kredit PegawailPensiunan	44,775,246,859	517,095,037,907	412,592,334,562	3,338,333,463,327	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	37,767,807,038	148,379,617,595	63,114,984,434	1,066,818,351,434	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1,169,851,587	304,364,785	46,615,825	666,117,246	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
	Total	**83,852,501,693**	**668,770,210,029**	**476,134,987,586**	**4,434,800,270,615**	**-**	

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
Total	< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
158,760,697	-	-	-	-	-	-
28,177,230,096	-	-	-	25,737,622,540	-	25,737,622,540
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,158,186,531	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4,312,796,082,655	127,561,316,416	736,170,145,628	455,224,679,257	2,075,383,713,738	-	3,394,339,855,039
1,316,080,760,501	78,710,024,854	215,623,945,048	62,157,710,635	1,208,900,431,896	-	1,565,392,112,433
-	-	-	-	-	-	-
2,186,949,443	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
5,663,557,969,923	**206,271,341,270**	**951,794,090,676**	**517,382,389,892**	**3,310,021,768,174**	**-**	**4,985,469,590,012**

Tabel 2.2.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak						
Total	< 1 tahun	>1 thn s.d. 3 thn	>3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non-Kontraktual	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi Tanggal Laporan						
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	10,265,256,082	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	17,911,974,014	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	-	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	158,760,697	-	-	-	4,158,186,531
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**158,760,697**	**28,177,230,096**	**-**	**-**	**4,158,186,531**

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	160,893,886	104,047,815,538	-	68,119,746	-	-
-	-	33,465,343,357	-	2,348,903	-	-
-	-	2,576,827,736	-	-	-	-
-	-	60,293,167,934	-	54,992,026	-	-
-	-	832,635,320	-	-	-	-
-	-	5,598,316,577	-	20,680,587	-	-
-	-	873,289,352,135	-	1,129,262,919	-	-
-	-	13,414,288,965	-	112,928,291	-	-
-	-	16,877,299,913	-	-	-	-
-	-	525,941,092	-	-	-	-
-	-	10,068,698,797	-	99,823,861	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,498,004,077	-	-	-	-
-	-	28,138,775,394	-	75,252,050	-	-
-	-	123,627,441,762	-	21,458,077	-	-
-	-	41,826,851,904	-	182,795,073	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4,312,635,188,769	-	-	419,287,907	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**4,312,796,082,655**	**1,316,080,760,501**	**-**	**2,186,949,440**	**-**	**-**

Tabel 2.3.a Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	6,949,816,747	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	18,787,805,793	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	-	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**25,737,622,540**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	16,146,445	117,525,526,805	-	-	-	-
-	-	35,304,207,275	-	-	-	-
-	-	2,722,027,629	-	-	-	-
-	8,258,336	59,162,247,435	-	-	-	-
-	-	1,432,863,720	-	-	-	-
-	-	14,354,863,019	-	-	-	-
-	-	930,225,560,657	-	-	-	-
-	-	10,179,153,755	-	-	-	-
-	-	14,304,415,750	-	-	-	-
-	-	793,167,031	-	-	-	-
-	-	8,022,659,235	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	1,354,852,453	-	-	-	-
-	-	18,186,172,038	-	-	-	-
-	14,471,065	137,391,337,541	-	-	-	-
-	73,297,342	214,433,058,090	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	3,394,227,681,851	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	**3,394,339,855,039**	**1,565,392,112,433**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi Tanggal Laporan						
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	-	-
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.3.b Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Sektor Ekonomi	"Tagihan Kepada Pemerintah"	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	"Tagihan Kepada Bank"	"Kredit Beragun Rumah Tinggal"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya						
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	-	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
4	Industri pengolahan	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-
6	Konstruksi	-	-	-	-	-
7	Perdagangan besar dan eceran	-	-	-	-	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	-	-	-	-	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	-	-	-	-	-
10	Perantara keuangan	-	-	-	-	-
11	*Real estate,* usaha persewaan dan jasa perusahaan	-	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	-	-	-	-	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	-	-	-	-	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	-	-	-	-	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	-	-	-	-	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	"Tagihan kepada Korporasi"	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Tabel 2.4.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

No.	Sektor Ekonomi	Posisi Tanggal 31 Desember 2012					
		Wilayah					
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)
1	Tagihan	1,354,570	1,552,437	1,020,729	731,733	1,085,033	5,744,502
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	-	-	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	-	-	-	-	-	-
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	-	-	-	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	17,756	27,195	7,496	12,547	15,949	80,943
5	Tagihan yang dihapus huku	13,837	43,488	8,172	15,621	52,994	134,112

Tabel 2.4.b Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dgn Perusahaan Anak

No.	Keterangan	Posisi Tanggal Laporan				
		Wilayah				
		Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	dst.	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Tagihan	-	-	-	-	-
2	Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)	-	-	-	-	-
	a. Belum jatuh tempo	-	-	-	-	-
	b. Telah jatuh tempo	-	-	-	-	-
3	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	-	-	-	-	-
4	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	-	-	-	-	-
5	Tagihan yang dihapus huku	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal 31 Desember 2011					
Wilayah					
Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	Wilayah 4	Wilayah 5	Total
(8)	(9)	(10)		(11)	(12)
1,051,550	1,475,020	882,560	742,727	981,278	5,133,135
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
24,860	37,076	14,896	14,144	56,691	147,667
14,791	43,140	6,891	14,649	16,325	95,796

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya				
Wilayah				
Wilayah 1	Wilayah 2	Wilayah 3	dst.	Total
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Tabel 2.5.a Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami penurunan nilai *(impaired)*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Posisi Tanggal Laporan							
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	104,277	-	-	-	3,074	-
2	Perikanan	33,468	-	-	-	2,010	-
3	Pertambangan dan Penggalian	2,577	-	-	-	28	-
4	Industri pengolahan	70,613	-	-	-	2,647	-
5	Listrik, Gas dan Air	18,745	-	-	-	526	-
6	Konstruksi	5,619	-	-	-	1,660	-
7	Perdagangan besar dan eceran	874,419	-	-	-	31,101	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	13,527	-	-	-	1,576	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	16,877	-	-	-	293	-
10	Perantara keuangan	526	-	-	-	95	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	10,169	-	-	-	351	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	1,498	-	-	-	15	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	28,214	-	-	-	2,420	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	123,649	-	-	-	5,413	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	42,010	-	-	-	5,278	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	4,317,371	-	-	-	24,456	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total	**5,663,558**	**-**	**-**	**-**	**80,944**	**-**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang mengalami penurunan nilai *(impaired)*		Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual	Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah jatuh tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya							
1	Pertanian, perburuan dan Kehutanan	117,542	-	-	-	3,719	-
2	Perikanan	35,304	-	-	-	1,294	-
3	Pertambangan dan Penggalian	2,722	-	-	-	33	-
4	Industri pengolahan	66,120	-	-	-	3,516	-
5	Listrik, Gas dan Air	20,221	-	-	-	204	-
6	Konstruksi	14,355	-	-	-	40,058	-
7	Perdagangan besar dan eceran	930,226	-	-	-	29,908	-
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	10,179	-	-	-	640	-
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	14,304	-	-	-	147	-
10	Perantara keuangan	793	-	-	-	8	-
11	*Real estate*, usaha persewaan dan jasa perusahaan	8,023	-	-	-	568	-
12	Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa pendidikan	1,355	-	-	-	14	-
14	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	18,186	-	-	-	611	-
15	Jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya	137,406	-	-	-	5,781	-
16	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga	214,506	-	-	-	15,576	-
17	Badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	3,394,228	-	-	-	45,587	-
20	Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Total	**4,985,470**	**-**	**-**	**-**	**147,666**	**-**

Tabel 2.6.a Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Posisi Tanggal Laporan		"Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya"	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	-	118,411	-	118,411
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	85,067	-	85,067
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	(95,416)	-	(95,416)
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	-	8,610	-	8,610
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	(35,728)	-	(35,728)
	Saldo akhir CKPN	**-**	**80,944**	**-**	**147,666**

Tabel 2.6.b Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Konsolidasi dgn Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Posisi Tanggal Laporan		"Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya"	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif	CKPN Individual	CKPN Kolektif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Saldo awal CKPN	-	-	-	-
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	-	-	-	-
	2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-
	2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada peride berjalan	-	-	-	-
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-	-	-
	Saldo akhir CKPN	**-**	**-**	**-**	**-**

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar

Dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar, penetapan bobot ATMR belum didasarkan kepada penetapan peringkat debitur / penjamin sehingga bobot risiko ATMR untuk seluruh kategori portfolio masih dikategorikan *unrating* / tanpa peringkat.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Posisi Tanggal Laporan							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aal s.d Aa3	Al s.d A3	Baal s.d Baa3	Bal s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	"Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
I0	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
II	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
I2	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Kurang dari A-3		
Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3	Kurang dari F3		
Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3	Kurang dari P-3		
Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
Kurang dari [Idr]B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-		159	159
-	-	-	-	-		28,177	28,177
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		4,158	4,158
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		4,312,796	4,312,796
-	-	-	-	-		1,316,081	1,316,081
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		2,187	2,187
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		0	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**		**5,663,558**	**5,663,558**

Tabel 3.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Individual

Posisi Tanggal Laporan							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aal s.d Aa3	Al s.d A3	Baal s.d Baa3	Bal s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawail Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
I0	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
II	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
I2	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3	Kurang dari A-3		
Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3	Kurang dari F3		
Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3	Kurang dari P-3		
Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
Kurang dari [Idr]B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3	Kurang dari [Idr]A3		
Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-		25,738	25,738
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		3,394,340	3,394,340
-	-	-	-	-		1,565,392	1,565,392
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-		0	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**		**4,985,470**	**4,985,470**

Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Posisi Tanggal Laporan							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aal s.d Aa3	Al s.d A3	Baal s.d Baa3	Bal s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	"Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
I0	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
II	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
I2	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ s.d B-	Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3		
BI s.d B3	Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Posisi Tanggal Laporan							
No.	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka panjang				
		Standard and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Fitch Rating	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	BB+ s.d BB-
		Moody's	Aaa	Aal s.d Aa3	Al s.d A3	Baal s.d Baa3	Bal s.d Ba3
		PT. Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+(idn) s.d AA-(idn)	A+(idn) s.d. A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	BB+(idn) s.d BB-(idn)
		PT ICRA Indonesia	[Idr]AAA	[Idr]AA+ s.d [Idr]AA-	[Idr]A+ s.d [Idr]A-	[Idr]BBB+ s.d [Idr]BBB-	[Idr]BB+ s.d [Idr]BB-
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d id A-	id BBB+ s.d id BBB-	id BB+ s.d id BB-
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	"Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit Pegawail Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
I0	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
II	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
I2	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan							
Tagihan Be rsih							
Peringkat Jangka panjang		Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Total
B+ s.d B-	Kurang dari B-	A-I	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
B+ s.d B-	Kurang dari B-	FI+ s.d FI	F2	F3	Kurang dari F3		
BI s.d B3	Kurang dari B3	P-I	P-2	P-3	Kurang dari P-3		
B+(idn) s.d B-(idn)	Kurang dari B-(idn)	FI+(idn) s.d FI(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
[Idr]B+ s.d [Idr]B-	Kurang dari [Idr]B-	[Idr]AI+ s.d [Idr]AI	[Idr]A2+ s.d [Idr]A2	[Idr]A3+ s.d [Idr] A3	Kurang dari [Idr]A3		
id B+ s.d id B-	Kurang dari idB-	idAI	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.2.a. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Derivatif

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan							
		Notional Amount			"Tagihan Derivatif"	"Kewajiban Derivatif"	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	"Tagihan Bersih setelah MRK"
		≤ 1 Tahun	> 1 Tahun ≤ 5 tahun	> 5 tahun					
	BANK SECARA INDIVIDUAL								
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	BANK SECARA KONSOLIDASI								
1	Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Saham	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Logam senilai Emas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya							
Notional Amount			"Tagihan Derivatif"	"Kewajiban Derivatif"	Tagihan Bersih sebelum MRK	MRK	Tagihan Bersih setelah MRK
≤ 1 Tahun	> 1 Tahun ≤ 5 tahun	> 5 tahun					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2.b.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2.b.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Repo - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
Nilai Wajar SSB Repo	Kewajiban Repo	Tagihan Bersih	ATMR
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2.c.1. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	"ATM R setelah MRK"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 3.2.c.2. Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan : Transaksi Reverse Repo - Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			
		Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	"ATM R setelah MRK"
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	"Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel"	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	"ATMR setelah MRK"
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
Tagihan Bersih	Nilai MRK	Tagihan Bersih setelah MRK	"ATMR setelah MRK"
(7)	(8)	(9)	(10)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan									
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**Eksposur Neraca**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	727,348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	28,336	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	616,051	-	-	-	12,000	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	4,158	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	4,312,796	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	1,316,080	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	25	2,162	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**727,348**	**616,051**	**4,158**	**-**	**-**	**4,324,796**	**1,316,080**	**28,361**	**2,162**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

ATMR	Beban Modal	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya										ATMR ATMR ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	-	646,427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28,336	-	-	-	-	-	-	-	-	25,738	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129,210	-	-	866,087	-	-	-	19,672	-	-	-	-	-	-
1,455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,156,398	-	-	-	-	-	-	3,597,670	-	-	-	-	-	-
987,060	-	-	-	-	-	-	-	1,609,804	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,305,728	**-**	**646,427**	**866,087**	**-**	**-**	**-**	**3,617,342**	**1,609,804**	**25,738**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 4.1.a. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan									
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	**Eksposur Kewajiban KomitmenlKontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	9,056	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**9,056**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

ATMR	Beban Modal	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya										ATMR ATMR ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,528	-	-	-	-	-	-	7,015	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	8,963	-	3,572	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4,528	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15,978**	**-**	**3,572**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan									
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	**Eksposur Neraca**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

ATMR	Beban Modal	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya										ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.1.b. Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan									
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit									
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	**Eksposur Kewajiban KomitmenlKontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur TRA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
C	**Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*)**										
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Counterparty Credit Risk	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

ATMR	Beban Modal	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya										ATMR	Beban Modal
		Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit											
		0%	20%	35%	40%	45%	50%	75%	100%	150%	Lainnya		
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.a. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
C	**Eksposur *Counterparty Credit Risk***						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure *Counterparty Credit Risk*	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total (A+B+C)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
A	**Eksposur Neraca**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
12	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposur Neraca	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
B	**Eksposur Rekening Adminsitratif**						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
Total Eksposur Rekening Administratif		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 4.2.b. Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan					
		Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (3)-[(4)+(5)+(6)+(7)]
C	**Eksposur *Counterparty Credit Risk***						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
7	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-	-	-
	Total Eksposure Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-
Total (A+B+C)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Tagihan Bersih	Bagian Yang Dijamin Dengan				Bagian Yang Tidak Dijamin
	Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14) = (9)-[(10)+(11)+(12)+(13)]
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 5.1.a. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Individual

No.	Eksposur Sekuritisasi	Posisi Tanggal Laporan					
		Nilai aset yg disekuritisasi Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Junior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
	Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 5.1.b. Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No..	Eksposur Sekuritisasi	Posisi Tanggal Laporan					
		Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/ Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung a. Fasilitas penanggung risiko pertama - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal a. Senior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-
	b. Junior tranche - Jenis eksposur (contoh: tagihan beragun rumah tinggal)	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Nilai aset yg disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
	Telah jatuh tempo	Belum Jatuh Tempo			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekurutisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	*Underiying Asset*	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 5.2.a. Pengungkapan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekurutisasi Bank Bertindak sebagai Kreditur Asal - Bank Secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	*Underiying Asset*	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan	Nilai Aset Yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	"Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional"	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
10	Aset Lainnya	-	-	-	-
11	Eksposur di Unit Usaha Syariah (apabila ada)	-	-	-	-
	Total	**-**	**-**	**-**	**-**

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Individual

Tabel 6.1.1. Pengungkapan Eksposure Aset di Neraca

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	727,348	-	-	646,427	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	28,336	28,336	-	25,738	12,869	5,148
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	628,051	129,210	129,210	885,759	183,053	183,053
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	4,158	1,455	1,455	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	4,312,796	2,156,398	2,156,398	3,597,670	1,798,835	719,534
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1,316,080	987,060	987,060	1,609,804	1,207,353	321,961
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	2,187	3,268	3,268	-	-	-
11	Aset Lainnya	630,954	-	310,746	585,865	0	585,865
TOTAL		**7,649,910**	**3,305,728**	**3,588,138**	**7,351,263**	**3,202,110**	**1,815,561**

Tabel 6.1.2. Pengungkapan Eksposure Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	4,528	4,528	4,528	7,015	3,507	3,507
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13,257	9,943	9,943	8,054	8,054	8,054
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**17,785**	**14,471**	**14,471**	**15,068**	**11,561**	**11,561**

Tabel 6.1.3. Pengungkapan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak lawan *(Counterparty Credit Risk)*

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Puhlik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pemhangunan Multilateral dan Lemhaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.1.4. Pengungkapan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan setelmen (Settlement Risk) iko Kredit akibat Kegagalan setelmen *(Settlement Risk)*

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK	Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
	a. Behan Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Behan Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Behan Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Behan Modal 100% (lehih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposure Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip- prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.1.6. Pengungkapan Eksposure di Unit Usaha Syariah (apabila ada)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1	**Total Eksposur**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.1.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	**-**	**-**
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	**-**	**-**

Tabel 6.2.1. Pengungkapan Eksposure Aset di Neraca

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**17,785**	**14,471**	**14,471**	**15,068**	**11,561**	**11,561**

Tabel 6.2.2. Pengungkapan Eksposure Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administratif

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	-
7	Kredit PegawailPensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
9	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**17,785**	**14,471**	**14,471**	**15,068**	**11,561**	**11,561**

Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.2.3. Pengungkapan Eksposure yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK	Tagihan Bersih	ATMR Sebelum MRK	ATMR Setelah MRK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	*Delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-	-	-	-
2	*Non-delivery versus payment*	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.2.5. Pengungkapan Eksposure Sekuritisasi

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Fasilitas Kredit Pendukung yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
2	Fasilitas Kredit Pendukung yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
3	Fasilitas Likuiditas yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
4	Fasilitas Likuiditas yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
5	Pembelian Efek Beragun Aset yang memenuhi persyaratan	-	-	-	-
6	Pembelian Efek Beragun Aset yang tidak memenuhi persyaratan	-	-	-	-
7	Eksposur Sekuritisasi yang tidak tercakup dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai prinsip- prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 6.2.6. Pengungkapan Eksposure di Unit Usaha Syariah dan/atau Perusahaan Anak yg Melakukan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah (bila ada)

(dalam jutaan rupiah)

No	Kategori Portofolio	Posisi Tanggal Laporan		Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR	Faktor Pengurang Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Total Eksposur	-	-	-	-

Tabel 6.2.7. Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

(dalam jutaan rupiah)

	Posisi Tanggal Laporan	Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya
TOTAL ATMR RISIKO KREDIT	-	-
TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	-	-

RISIKO PASAR

Penerapan Manajemen Risiko Pasar

Sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko, PT. Bank Sulselbar tidak diwajibkan untuk mengalokasikan modal *(capital charger)* untuk risiko pasar dalam perhitungan CAR antara lainkarena tidak memiliki eksposur *trading book*. Namun demikian berdasarkan Pilar II Basel II, bank tetap diwajibkan untuk mengelola risiko pasar khususnya eksposure yang termasuk definisi *banking book.*

Bank terekspos dengan risiko tingkat suku bunga ketika variabel pasar bergerak kearah yang berlawanan dengan instrumen *banking book* yang dimiliki bank. Penerapan manajemen risiko pasar untuk *instrument banking book* menggunakan metodologi *Asset & Liability Management* (ALMA)meliputi penilaian *Sensitivity to Market Risk* yang merupakan penilaian kemampuan modal bank untuk mengcover dampak yang timbul akibat perubahan variabel pasar (*adverse movement*).

Dalam mengelola risiko suku bunga (*Interest rate risk in banking book* – IRRBB), bank menghitung gap antara *asset & liability* (RSA-RSL) dan *maturitygap analysis* terhadap *asset & liability* yang *sensitive* terhadap suku bunga untuk kemudian menetapkan posisi untuk meminimalisir risiko suku bunga.

Organisasi Manajemen Risiko Pasar khususnya *interest rate risk in banking book* dikelola oleh *Asset & Liability Committee* (ALCO) dan dengan organisasi yang sama dengan organisasi Manajemen Risiko Likuiditas.

Tabel 7.1. Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Metode Standar

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		Bank		Konsolidasi		Bank		Konsolidasi	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
	a. Risiko Spesifik	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. Risiko Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko Ekuitas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas *)	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko *Option*	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*) Untuk *hank* yang memiliki perusahaan anak yang memiliki eksposur risiko dimaksud

Tabel 7.2.a Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Model Internal *(Value at Risk/VaR)* - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko *Option*	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel 7.2.b Pengungkapan Risiko Pasar dengan Menggunakan Model Internal *(Value at Risk/VaR)* - Bank secara Konsolidasi dgn Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Risiko	Posisi Tanggal Laporan				Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya			
		VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode	VaR Rata-Rata	VaR Maksimum	VaR Minimum	VaR Akhir Periode
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Risiko Suku Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Risiko Nilai Tukar	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Tabel : Perhitungan *Interest Rate Risk In Banking Book* (IRRBB)

(dalam jutaan rupiah)

Instrumen	Total	Jatuh Tempo *)				
		s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
RSA - Rate Sensitive Assset	7.437.456	1.594.562	76.838	53.757	63.513	5.648.786
RSL - Rate Sensitive Liability	6.207.461	6.207.461	6.207.461	6.207.461	6.207.461	6.207.461
GAP (RSA - RSL)	1.229.995	(4.612.899)	(6.130.623)	(6.153.704)	(6.143.948)	(558.675)

Berdasar *Gap analysis,* bank menskenariokan perubahan suku bunga dan menilai dampak *Potensial loss* terhadap pendapatan dan ekses modal.

Adverse Moment Scenario	*Potential Loss* dalam skala waktu					
	Total	s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
+/- 100 bp	-	-	-	-	-	-
+/- 200 bp	-	-	-	-	-	-
+/- 300 bp	-	-	-	-	-	-
+/- 400 bp	-	-	-	-	-	-
+/- 500 bp	-	-	-	-	-	-

Dengan menskenariokan terjadi penurunan / kenaikan suku bunga dalam *range* tertentu, bank menilai kemampuan permodalan meng-*cover potential loss* (*gap position* x Δsuku bunga). Ekses modal merupakan selisih perhitungan komponen modal (*tier* 1) yang diperuntukkan untuk meng*cover* fluktuasi suku bunga (tidak termasuk komponen Tier 1 yang diperuntukkan untuk meng*cover* risiko kredit dan risiko operasional).

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan menskenariokan kenaikan hingga 10%, *potential loss* yang bersumber fluktuasi suku bunga masih dapat di*cover* oleh permodalan bank.

RISIKO OPERASIONAL

Penerapan Manajemen Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Operasional

Dalam penerapan manajemen risiko operasional, organisasi bank disusun berpedoman kepada prinsip pemisahan fungsi dengan memperhatikan kemampuan SDM.Khusus untuk organisasi manajemen risiko operasional, bank membentuk sub Komite Manajemen Risiko yang khusus membidangi risiko operasional yang terdiri dari mayoritas Direksi, pejabat eksekutif dari grup terkait.

Berikut organisasi manajemen risiko operasional PT. Bank Sulselbar :

Seluruh unit kerja sebagai *risk owner* (baik *risk taking unit* maupun *supporting unit*) bertanggungjawab terhadap pengelolaan risiko operasional di masing-masing unit kerja (*1st line of defense*). *Monitoring* eksposur risiko operasional dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko, Unit Khusus *Anti Fraud* dan Grup Kepatuhan (*2nd line of defense*), dan pelaksanaan Audit Internal oleh Grup Audit Intern merupakan lini terakhir (*3rd line of defense*) yang ditujukan untuk pengujian efektifitas penerapan manajemen risiko operasional.

Strategi *Anti Fraud*

Untuk mendukung efektifitas manajemen risiko operasional khususnya Sistem Pengendalian Intern, bank menyusun Strategi *Anti Fraud* yang meliputi Pilar Pencegahan, Pilar Deteksi, Pilar Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut *Fraud*. Dalam rangka pemantauan dan pengembangan strategi *Anti Fraud* bank membentuk Unit *Anti Fraud* yang bertanggung jawab langsung ke Direktur Utama dan memiliki garis koordinasi & pelaporan ke Dewan Komisaris.

Proses Manajemen Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional adalah proses dimana risiko operasional diidentifikasi, dinilai, diukur, dipantau dan dikendalikan / mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi profil risiko ke tingkat yang dapat diterima oleh manajemen, *stakeholder* dan regulator.

Bank melalukan identifikasi risiko dengan menyusun suatu daftar kejadian yang komprehensif yang dipetakan dalam kategori penyebab *(causes)* dan kategori *event* yang ditimbulkan sesuai rekomendasi Basel II (*Loss event database*). Berdasarkan hasil identifikasi, bank melakukan penilaian risiko dengan menyusun pemetaan (*mapping*) untuk membantu proses pemantauan dan pengendalian risiko operasional. Pemetaan merupakan salah satu proses "*Qualitative Approach*" untuk melihat hubungan antara *probability* dengan *impact* dalam suatu kuadran risiko. Jenis risiko yang termasuk dalam kategori kuadran kritis, mendapatkan prioritas tinggi dalam proses penanganan dan antisipasi.

Konsorsium Data Kerugian Eksternal

Untuk meningkatkan kemampuan bank dalam memetakan data kerugian (*loss event*), bank ikut serta dalam Konsorsium Data Kerugian eksternal (KDKE) yang merupakan wadah untuk menghimpun seluruh data kerugian eksternal yang kemudian digunakan kembali oleh bank sebagai *resources* untuk melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko operasional. Melalui KDKE, para anggota konsorsium dapat berbagi informasi dan membahas, mengelola dan mitigasi risiko operasional dari data kerugian eksternal yang dialami oleh anggotanya.

Penerapan Manajemen Risiko Teknologi Informasi

Sebagai bagian dari manajemen risiko operasional, bank menerapkan manajemen risiko Sistem Informasi antara lain dengan melakukan langkah pengendalian yaitu penilaian berkala terhadap pengamanan sistem informasi, yang disertai dengan tindakan korektif apabila diperlukan, dan tersedianya prosedur *back-up* dan rencana darurat untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Bank dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan yang diuji secara berkala.

Bussiness Contiunity Management (BCM)

Bussiness Continity Management (BCM) merupakan proses pengelolaan secara menyeluruh dalam rangka identifikasi potensi kondisi darurat yang berdampak kepada kelangsungan operasional bank serta berisi langkah-langkah secara rinci mengenai organisasi, tanggung jawab dan prosedur dalam upaya pencegahan dan pemulihan pada saat terjadi gangguan yangdisebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Menyadari pentingnya BCM, sesuai Rencana Bisnis Bank tahun 2013 Bank Sulselbar merencanakan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, prosedur BCM untuk memastikan faktor internal maupun eksternal seperti kebakaran, kerususan, bencana alam dan serangan teroris dapat dikelola dengan baik.

Metode Perhitungan Risiko Operasional

Sesuai ketentuan Bank Indonesia SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009, Bank telah melakukan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk risiko operasional menggunakan *Basic Indicator Approach* (BIA).

Dalam *Basic Indicator Approach*, total pendapatan kotor *(Gross Income)* digunakan sebagai indikator eksposur *(inherent risk)* yang menggambarkan skala operasional bisnis bank. Modal yang dipersyaratkan untuk risiko operasional secara keseluruhan yang harus disediakan oleh bank menurut *Basic Indicator Approach* adalah rata-rata pendapatan kotor / *Gross Income* selama 3 tahun dikalikan 15% (nilai alpha).

Tabel 8.1.a Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	627,566	94,135	1,176,687	576,857	86,529	1,081,607
TOTAL		**627,566**	**94,135**	**1,176,687**	**576,857**	**86,529**	**1,081,607**

Tabel 8.1.b Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan Yang Digunakan	Posisi Tanggal Laporan			Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya		
		Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	
(1)	(2)	(3)					
1	Pendekatan Indikator Dasar	643,051	96,458	1,205,721	588,497	88,275	1,103,433
TOTAL		**643,051**	**96,458**	**1,205,721**	**588,497**	**88,275**	**1,103,433**

RISIKO LIKUIDITAS

1. Pengungkapan Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas

Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Pengelolaan risiko likuiditas bank menggunakan metodologi ALMA (*Asset & Liability Management*) yang dikelola secara langsung oleh Grup Treasury sebagai *risk taking unit.*

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas

Dalam manajemen risiko likuiditas, Grup Treasury bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas yang telah ditetapkan *Asset Liability Committee* (ALCO), dan melaporkan eksposur risiko likuiditas secara berkala kepada Grup Manajemen Risiko. Dalam konteks manajemen risiko likuiditas, Grup Pemasaran (berkoordinasi dengan Grup Treasury) melakukan ekspansi kredit yang selaras dengan struktur & kapasitas pendanaan serta melakukan upaya untuk mencegah penurunan kualitas kredit yang dapat mempengaruhi likuiditas bank. Penghimpunan dan penggunaan dana untuk operasional kantor cabang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Grup *Treasury* dan Grup Pemasaran di Kantor Pusat. (*1st line of defense*).

Grup Manajemen Risiko memiliki tanggungjawab antara lain i). memantau implementasi strategi dan eksposure risiko likuiditas, ii). penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko likuiditas.

Organisasi Manajemen Risiko Likuiditas
1st line of defense

Rumusan tingkat / toleransi risiko, kerangka Manajemen Risiko Likuiditas serta rencana kontinjensi menjadi tugas dan tanggung jawab sub Komite Manajemen Risiko Likuiditas yang beranggotakan mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait. (*2nd line of defense*).

Proses Manajemen Risiko Likuiditas

Bank melakukan identifikassi sumber risiko likuiditas untuk mengetahui jumlah dan *trend* kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaannya.

Kebutuhan likuiditas diukur menggunakan metodologi *liquidity gap* berdasarkan *maturity mismatch* antara *asset* dan *liability* (termasuk *off-balanced sheet*) yang disusun ke dalam periode waktu (time bucket) baik *contractual maturity* maupun *behavioral maturity.*

Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat.

Untuk tujuan pemantauan risiko likuiditas, bank menetapkan indikator (internal dan eksternal) peringatan dini (*early warning system*) yang meliputi :

Indikator Internal :

1. kualitas aset yang memburuk
2. peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan trtntu
3. peningkatan *mismatches,*
4. pengulangan terjadinya pelampauan limit, (limit internal / regulator)
5. peningkatan biaya dana, dan/atau
6. posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek.

Indikator Eksternal :

1. Informasi publik yang negatif terhadap Bank, antara lain penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat,
2. Penurunan fasilitas *credit line* yang diberikan oleh bank koresponden,
3. Peningkatan penarikan deposito sebelum jatuh tempo, dan/atau
4. Keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Tabel 9.1.a Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual

No.	Instrumen	Posisi Tanggal Laporan					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
I	**NERACA**						
	A. Aset						
	1 Kas	320,557	320,557	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	727,348	643,661	53,473	30,214	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	616,051	616,051	-	-	-	-
	4 Surat Berharga	12,000	-	-	-	-	12,000
	5 Kredit yang diberikan	5,744,502	4,944	17,416	21,843	63,513	5,636,786
	6 Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	2,846,434	2,846,434	-	-	-	-
	Total Aset	10,266,892	4,431,647	70,889	52,057	63,513	5,648,786
	B. Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	5,162,478	773,725	521,750	1,157,467	1,774,682	934,854
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	343	343	-	-	-	-
	3 Kewajiban pada bank lain	497,265	497,265	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan	397,245	-	-	-	-	397,245
	5 Pinjaman yang Diterima	150,130	222	666	666	666	147,910
	6 Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	4,059,431	4,059,431	-	-	-	-
	Total Kewajiban	10,266,892	5,330,986	522,416	1,158,133	1,775,348	1,480,009
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	-	(899,339)	(451,527)	(1,106,076)	(1,711,835)	4,168,777
II	**REKENING ADMINISTRATIF**						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	413,495	-	-	-	-	413,495
	Total Tagihan Rekening Administratif	413,495	-	-	-	-	413,495
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	16,118
	2 Kontijensi	-	-	-			404,648
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	420,766
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-	-	-	(420,766)
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	-	-	-	-	-	-
	Se lisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Saldo	Jatuh Tempo				
	< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	"> 6 bln s.d. 12 bln"	> 12 bulan
296,795	296,795	-	-	-	-
-	(69,451)	40,311	29,140	-	-
810,884	810,884	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,133,135	4,904	27,376	25,191	50,809	5,024,855
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6,240,814	1,043,132	67,687	54,331	50,809	5,024,855
3,967,933	552,125	325,212	1,034,581	1,458,975	597,040
1,006	1,006	-	-	-	-
55,613	55,613	-	-	-	-
395,667	-	-	-	-	395,667
150,958	222	666	666	666	148,738
-	-	-	-	-	-
4,812,433	4,812,433	-	-	-	-
9,383,610	5,421,399	325,878	1,035,247	1,459,641	1,141,445
(3,142,796)	(4,378,267)	(258,191)	(980,916)	(1,408,832)	3,883,410
-	-	-	-	-	-
1,010,789	-	-	-	-	1,010,789
1,010,789	-	-	-	-	1,010,789
22,992	-	-	-	-	22,992
3,572	-				3,572
26,564	-	-	-	-	26,564
(26,564)	-	-	-	-	(26,564)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 9.1.b Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Instrumen	Posisi Tanggal Laporan					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
I	**NERACA**						
	A. Aset						
	1 Kas	-	-	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
	5 Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
	6 Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6 Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	-	-	-	-	-	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	-	-	-	-	-	-
II	**REKENING ADMINISTRATIF**						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	-	-	-	-	-	-
	Se lisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Saldo	Jatuh Tempo				
	< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	"> 6 bln s.d. 12 bln"	> 12 bulan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 9.2.a Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Individual

No.	Instrumen	Posisi Tanggal Laporan					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
I	**NERACA**						
	A. Aset						
	1 Kas	-	-	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
	5 Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
	6 Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6 Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	-	-	-	-	-	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	-	-	-	-	-	-
II	**REKENING ADMINISTRATIF**						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	-	-	-	-	-	-
	Se lisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Saldo	Jatuh Tempo				
	< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	"> 6 bln s.d. 12 bln"	> 12 bulan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Tabel 9.2.b Pengungkapan Profil Maturitas Valas - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

No.	Instrumen	Posisi Tanggal Laporan					
		Saldo	Jatuh Tempo				
			s.d 1 bulan	>1-3 bulan	>3-6 bulan	>6-12 bulan	>12 bulan
I	**NERACA**						
	A. Aset						
	1 Kas	-	-	-	-	-	-
	2 Penempatan pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Penempatan pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
	5 Kredit yang diberikan	-	-	-	-	-	-
	6 Tagihan lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Aset	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban						
	1 Dana Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-
	2 Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
	3 Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-
	4 Surat Berharga yang Diterbitkan	-	-	-	-	-	-
	5 Pinjaman yang Diterima	-	-	-	-	-	-
	6 Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-
	7 Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban	-	-	-	-	-	-
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	-	-	-	-	-	-
II	**REKENING ADMINISTRATIF**						
	A. Tagihan Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Tagihan Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	B. Kewajiban Rekening Administratif						
	1 Komitmen	-	-	-	-	-	-
	2 Kontijensi	-	-	-	-	-	-
	Total Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	-	-	-	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	-	-	-	-	-	-
	Se lisih Kumulatif	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan rupiah)

Posisi Tanggal Laporan Tahun Sebelumnya					
Saldo	Jatuh Tempo				
	< 1 bulan	> 1 bln s.d. 3 bln	> 3 bln s.d. 6 bln	"> 6 bln s.d. 12 bln"	> 12 bulan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

MANAJEMEN RISIKO HUKUM

1. **Pengungkapan Kualitatif**

Penerapan Manajemen Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Manajemen Risiko Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi.

Organisasi Manajemen Risiko Hukum

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum Tugas, Direktur Kepatuhan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, system dan prosedur serta aktivitas bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk membantu pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhanterkait risiko hukum, bank membentuk Departemen Hukum & Kepatuhan di bawah Grup Kepatuhan yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain :

a. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan, ketentuan, system maupun prosedur yang dimiliki bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
b. Melakukan *review* dan atau merekomendasikan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan.

Risk taking unit maupun *supporting unit* selaku *risk owner* bertanggung jawab untuk mengelola risiko hukum berdasarkan kebijakan, ketentuan, sistem & prosedur yang telah ditetapkan. Untuk penanganan proses litigasi, bank membentuk Departemen Litigasi yang berada di bawah Grup *Corporate Secretary* (*1st line of defense*).

Grup Manajemen Risiko dan Departemen Hukum & Kepatuhan yang berada di bawah Grup Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko hukum dan secara bersama-sama menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum. (*2nd line of defense*).Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji efektifitas penerapan manajemen risiko hukum (*3rd line of defense*).

RISIKO REPUTASI

Penerapan Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank antara lain pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari Risiko Reputasi Bank.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi

Seluruh pegawai baik *core risk taking* maupun *supporting unit* menjadi bagian dari organisasi manajemen risiko reputasi sebagai *front liner* dan memiliki peran untuk membangun reputasi dan mencegah risiko reputasi.

Organisasi Manajemen Risiko Reputasi
1st line of defense

Untuk mencegah risiko reputasi yang bersumber dari keluhan nasabah, bank membentuk Unit Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP3N) di Kantor Pusat dan seluruh kantor cabang.

Untuk mengelola *corporate image*, Bank membentuk Grup *Corporate Secretary* yang bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama dan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain untuk i).pelaksanaan program edukasi masyarakat & *Corporate social Responsibility (CSR)*, ii). mengelola dan mengembangkan media komunikasi internal maupun eksternal, serta iii). mengkoordinir penanganan & penyelesaian pengaduan nasabah.

Peran seluruh pegawai *(risk taking unit & supporting unit)*, penanganan dan penyelesaian pengaduan oleh Unit Penanganan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah (UP3N) dan pengelolaan *corporate image* oleh Grup *Corporate Secretary* menjadi pilar pertama (*1st line of defense*) dalam penerapan manajemen risiko reputasi.

Grup Manajemen Risiko dan Grup *Corporate Secretary* melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko reputasi dan secara bersama-sama merumuskan tindakan pencegahan dan pemulihan Risiko Reputasi serta merekomendasikan perbaikan pada kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya Risiko Reputasi (*2nd line of defense*). Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji efektifitas penerapan manajemen risiko reputasi (*3rd line of defense*).

Pengendalian Risiko Reputasi.

Hal-hal yang dilakukan bank untuk melakukan pengendalian risiko reputasi antara lain :

a) Penyusunan *Corporate Culture*, *Service Culture*, *code of conduct* yang menjadi dasar seluruh pegawai dalam bertindak dan berperilaku.
b) Mengintegrasikan / menjabarkan *corporate culture*, *service culture* dan *code of conduct* kedalam standar operasional prosedur antara lain Standar Layanan, penetapan *Service Level Agreement* (SLA) layanan dan SLA penanganan penyelesaian pengaduan nasabah yang tertuang dalam Pedoman Penyelesaian dan Pengaduan Nasabah PT. Bank Sulselbar.
c) Pengelolaan *corporate image* secara tepat antara lain meliputi pelaksanaan program edukasi masyarakat &*Corporate social Responsibility (CSR)*, dan pengelolaan media komunikasi internal maupun eksternal.
d) Pelaksanaan System Pengendalian Risiko Reputasi antara lain i).melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan *risk awareness* dan budaya kepatuhan (*compliance culture*), ii).memastikan kecukupan kuantitas / kualitas SDM khususnya yang secara langsung mengelola risiko reputasi.
e) Pengujian efektifitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Risiko Reputasi untuk memastikan kesesuaian & kepatuhan terhadap kerangka, kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur maupun standar yang telah ditetapkan.

RISIKO STRATEGIK

Penerapan Manajemen Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi stategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Organisasi Manajemen Risiko Strategik

Core risk taking dan *supporting unit* bertanggungjawab untuk menyusun perencanaan strategik, dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Grup Perencanaan & Pengembangan bertanggungjawab untuk mengelola risiko strategik dan memfasilitasi perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, termasuk rencana strategik dan rencana bisnis. (*1st line of defense*).

Organisasi Manajemen Risiko Stratejik
1st line of defense

Terkait dengan manajemen risiko strategik, Grup Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggungjawab untuk i). memantau dan mengevaluasi perkembangan implementasi rencana strategik, ii). memberikan masukan untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan, iii). memastikan bahwa seluruh *issue* strategik dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategik telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, dan iv).melaporkan risiko material yang timbul akibat perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi. (*2nd line of defense*). Grup audit internal melakukan pengujian untuk menilai kesesuaian dan kepatuhan unit kerja terhadap praktek maupun kerangka majemen risiko strategik. (*3rd line of defense*)

Proses Manajemen Risiko Strategik

Bank melakukan identifikasi risiko strategik dengan menilai deviasi pelaksanaan strategi termasuk rencana bisnis bank. Deviasi pelaksanaan strategi merupakan salah satu indikator pengukuran, pemantauan dan pelaporan risiko strategik.

Untuk melakukan pengendalian risiko strategik, bank melakukan upaya antara lain :

a) Penyusunan dan penetapan sasaran strategis yang merupakan penjabaran dari visi / misi bank.
b) *Design* struktur organisasi untuk memastikan keselarasan visi/misi unit kerja selaras dengan visi / misi dan rencana strategik bank secara keseluruhan.
c) Penyusunan Rencana Bisnis yang selaras dengan visi / misi & sasaran strategis dengan mempertimbangkan lingkungan bisnis, kondisi keuangan, kemampuan permodalan, kapasitas pendanaan, kecukupan SDM dan kehandalan perangkat pengendalian.
d) Melakukan pemantauan secara periodik terhadap deviasi dengan cara membandingkan progress rencana strategis dengan hasil aktual, dan melakukan tindakan perbaikan jika terdapat issue strategis akibat perubahan eksternal maupun internal yang berdampak kepada pencapaian rencana strategis (*feedback mechanism*).
e) Penerapan sistem pengendalian intern yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan & kesesuaian kerangka Manajemen Risiko strategik dengan eksposure risiko strategik.

MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN

Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank menerapkan manajemen risiko kepatuhan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko kepatuhan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku umum, ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Risk taking unit maupun *supporting unit* selaku *risk owner* bertanggung jawab untuk mengelola risiko kepatuhan dengan menerapkan prinsip *internal control* dan fungsi kepatuhan. Penerapan *internal control* & fungsi kepatuhan di setiap unit merupakan tanggung jawab dari setiap Direktur sesuai bidang tugasnya. (*1st line of defense*).

Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan
1st line of defense

Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan melakukan pemantauan terhadap eksposure risiko kepatuhan dan secara bersama-sama melakukan *review* dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh bank agar sesuai dengan ketentuan & perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan (*2nd line of defense*).

Grup Audit bertanggungjawab melakukan audit internal untuk menguji kerangka manajemen risiko kepatuhan antara lain penerapan *internal control* dan fungsi kepatuhan. Grup Audit Internal bertanggungjawab langsung ke Direktur Utama, dan tindak lanjut hasil audit merupakan obyek pemantauan dari Dewan Komisaris yang dibantu oleh Komite Audit. Hasil pelaksanaan audit menjadi salah satu dasar melakukan penyempurnaan sistem pengendalian internal risiko kepatuhan dan penerapan fungsi kepatuhan (*3rd line of defense*).

Proses Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank melakukan identifikasi dan analisis terhadap faktor yang dapat meningkatkan eksposure risiko kepatuhan antara lain peningkatan kompleksitas usaha termasuk produk dan aktivitas baru. Berdasarkan hasil identifikasi, bank melakukan pengukuran dengan menggunakan parameter signifikansi dan frekwensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan perilaku yang mendasarinya. Hasil identifikasi dan pengukuran selanjutnya menjadi dasar pemantauan dan pelaporan eksposure risiko kepatuhan.

Dalam hal pengendalian risiko kepatuhan, hal yang dilakukan antara lain adalah :

a. Setiap rancangan kebijakan, sistem dan prosedur termasuk penerbitan produk & aktivitas baru terlebih dahulu wajib di*review* oleh Grup Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko serta mendapatkan persetujuan dari Direktur Kepatuhan (*compliance review*).

b. Penerapan *internal control* dan fungsi kepatuhan agar seluruh aktivitas unit kerja berpedoman kepada kebijakan, sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

c. Melakukan upaya untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan, antara lain dengan :
   i. sosialisasi untuk meningkatkan *risk awareness & risk culture.*
   ii. mengintegrasikan penerapan budaya kepatuhan dalam system promosi maupun remunerasi.
   iii. Penyusunan *code of conduct & corporate culture* sebagai pedoman perilaku yang disertai penandatanganan Pakta Integritas setiap pegawai.

d. Memastikan kecukupan (kuantitas / kualitas) SDM yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

e. Memastikan upaya agar tindakan penyimpangan telah ditindaklanjuti dengan ceppta dan tepat (termasuk pengenaan sanksi).

f. Melakukan penyempurnaan terhadap efektifitas penerapan sistem pengendalian intern dan penerapan fungsi kepatuhan.

Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris

Sebagai bagian dari manajemen risiko kepatuhan khususnya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, bank membentuk Unit Pengenalan Nasabah di setiap Kantor Cabang yang dalam pelaksanaan tugasnya dipantau oleh Grup Kepatuhan khususnya Departemen Pengenalan Nasabah di Kantor Pusat.

Dalam program APU/PPT, bank melakukan *Customer Due Diligent (CDD)* identifikasi, verifikasi dan pemantauan kesesuaian transaksi dengan profil nasabah menggunakan pendekatan berbasis risiko *(risk based approach).* Terhadap nasabah yang berisiko tinggi termasuk PEP-*Politycal Exposed Person* terhadap kemungkinan pencucian uang dan pendanaan teroris, bank menerapkan tindakan *Enhanced Due Diligent* (EDD) atau tindakan CDD yang lebih mendalam.

Dalam hal terdapat ketidaksesuaian transaksi dengan profil nasabah, Unit Pengenalan Nasabah Kantor Cabang melaporkan ke Unit Pengenalan Nasabah Kantor Pusat untuk selanjutnya diteruskan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kepatuhan.

JARINGAN

Bank Sulselbar secara berkesinambungan terus berupaya untuk meningkatkan layanan transaksi perbankan dengan memperluas jangkauan jaringan operasionalnya, antara lain memperluas jumlah dan jangkauan jaringan serta pengembangan sistem teknologi informasi yang mendukung kualitas layanan. Semua langkah ini bertujuan untuk memberi nilai tambah dalam setiap layanan pada nasabah. Jaringan yang luas akan memberikan kemudahan akses bagi nasabah untuk menggunakan layanan Bank Sulselbar.

Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan jaringan distribusi Bank Sulselbar selama 5 (lima) tahun terakhir :

	31 Desember				
	2012	2011	2010	2009	2008
Kantor Pusat	1	1	1	1	1
Kantor Cabang Utama	3	3	3	3	1
Kantor Cabang Konvensional	27	26	25	24	26
Kantor Cabang Syariah	3	3	3	3	3
Kantor Cabang Pembantu	2	2	3	2	2
Kantor Kas	38	38	34	30	27
Payment Point	6	5	4	4	5
ATM	72	66	45	33	32
Kas Keliling (Mobil Kas)	3	0	0	0	0
Office Channeling	25	10	10	3	0

Dalam rangka memperkuat dan memperluas jaringan operasional, Bank Sulselbar telah merencanakan pengembangan saluran distribusi untuk tahun 2013 sebagai berikut :

a. Membuka kantor cabang di Sulawesi Barat dengan potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan karena layanan perbankan masih sangat terbatas di wilayah tersebut, sedangkan arus investasi mulai masuk sehubungan dengan rencana pemekaran wilayah pada daerah dimana Bank Sulselbar akan membuka kantor cabang baru.

b. Perbankan syariah yang menunjukkan prospek cerah di Sulawesi Barat menjadikan daerah tersebut sasaran pengembangan jaringan kantor cabang syariah Bank Sulselbar yang selama ini masih dilayani oleh *office channeling* dengan layanan perbankan yang sangat terbatas.

c. Melakukan pembukaan kantor kas yang dilengkapi ATM pada beberapa kecamatan di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang potensial untuk menambah titik – titik pelayanan Bank Sulselbar sehingga mudah dicapai dan diakses masyarakat maupun nasabah Bank Sulselbar.

KANTOR PUSAT

Kantor Pusat Bank Sulselbar terletak di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.16, Makassar 90125.

KANTOR CABANG DAN KANTOR CABANG PEMBANTU

Bank Sulselbar membagi dalam 4 (empat) tingkatan kantor cabang yang dimiliki yaitu cabang utama, cabang kelas satu, cabang kelas dua, dan cabang pembantu serta cabang syariah. Masing-masing kantor cabang beroperasi secara independen, memiliki tingkat otoritas kredit dan target yang berbeda sesuai klasifikasi masing-masing kantor cabang. Perbedaan klasifikasi masing-masing cabang seperti total aset yang dimiliki, jumlah nominal dan nasabah penyaluran kredit, jumlah nominal dan nasabah penghimpunan dana masyarakat atau DPK, serta potensi ekonomi daerah dimana kantor cabang tersebut berada. Klasifikasi kantor cabang Bank Sulselbar dievaluasi secara periodik setiap 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan penyesuaian jika dipandang perlu.

Sementara itu, operasional kantor cabang pembantu berada di bawah pengawasan kantor cabang induk. Produk-produk yang ditawarkan pada kantor cabang pembantu sama dengan produk yang ditawarkan kantor cabang namun dengan tingkat kewenangan persetujuan permohonan kredit yang berbeda.

Jumlah kantor cabang Bank Sulselbar berdasarkan kelas cabang sebagai berikut :

Kelas Cabang	2012
Kantor Pusat	3
Kantor Cabang Kelas I dan Setara	8
Kantor Cabang Kelas II	19
Kantor Cabang Pembantu	2
Kantor Cabang Syariah	3

KANTOR CABANG SYARIAH DAN KANTOR LAYANAN SYARIAH

Bank Sulselbar juga memiliki Kantor Cabang Syariah (KCS) yang menawarkan produk perbankan berbasis syariah. Selain itu, layanan perbankan syariah juga dapat diakses nasabah melalui *Office Chanelling* atau Kantor Layanan Syariah (KLS) di kantor cabang konvensional yang sampai dengan 31 Desember 2012 terdapat 25 (dua puluh lima) unit atau terdapat penambahan 15 (lima belas) kantor layanan syariah dibandingkan tahun 2011 yang hanya terdapat 10 (sepuluh) kantor layanan syariah. Dengan demikian, sekitar 70% kantor cabang konvensional Bank Sulselbar telah melayani perbankan syariah.

LAYANAN ELEKTRONIK

ATM DAN KARTU ATM

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, Bank Sulselbar telah memiliki 72 terminal Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan jumlah pemegang kartu ATM Bank Sulselbar sebanyak 114.511. Selain pada mesin ATM yang dimiliki Bank Sulselbar, nasabah juga dapat mengakses ATM di lebih dari 41.400 mesin ATM Bersama.

Bank Sulselbar berupaya memperluas jaringan ATM untuk meningkatkan penggunaan kartu ATM dan menyediakan kenyamanan layanan bagi para pemegang kartu ATM.

ATM Bank Sulselbar berlokasi di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu, pusat perbelanjaan, dan gedung kantor/ instansi pemerintah. Pemegang kartu ATM Bank Sulselbar dapat menggunakan ATM untuk menarik dana, memantau saldo dan mentransfer dana antar rekening Bank Sulselbar dan ke rekening bank lain yang terkoneksi dengan jaringan ATM Bersama.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya meningkatkan fungsi kartu ATM untuk memberikan kemudahan bagi nasabah pemegang kartu ATM Bank Sulselbar. Layanan lain yang dapat dinikmati pemegang kartu ATM Bank Sulselbar adalah fasilitas pembayaran tagihan telepon seluler pasca bayar dan pembelian pulsa prabayar serta *payment* tagihan listrik (PLN). Ketersediaan fitur layanan tersebut karena Bank Sulselbar telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan para penyedia jasa atau pihak ketiga yang terkait layanan tersebut.

SMS BANKING

Untuk meningkatkan jaringan distribusi, Bank Sulselbar juga memiliki fasilitas *SMS Banking* yakni transaksi perbankan secara *mobile* yang dapat diakses melalui telepon seluler. Layanan SMS *Banking* Bank Sulselbar dapat diakses melalui telepon seluler merek apapun dengan menggunakan pesan SMS yang sederhana. Layanan *SMS Banking* yang tersedia mencakup *inquiry* saldo dan *top up* atau isi ulang pulsa telepon seluler.

KARTU PNS ELEKTRONIK (KPE)

Kartu PNS Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan yang telah mendapatkan legitimasi berdasarkan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Dalam rangka memfasilitasi fungsi perbankan pada kartu KPE, Bank Sulselbar bekerjasama dengan BKN untuk mengoptimalkan KPE agar dapat digunakan melakukan aktivitas perbankan yaitu berfungsi pula sebagai Kartu ATM dengan layanan yang sama dengan layanan Kartu ATM nasabah Bank Sulselbar seperti informasi saldo; penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah. Jumlah PNS pemegang KPE kerjasama Bank Sulselbar tahun 2012 sebanyak 48.177 yang merupakan PNS Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Program KPE ini akan terus berlanjut secara bertahap sampai dengan seluruh PNS di Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki KPE yang juga berfungsi sebagai kartu ATM Bank Sulselbar.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya meningkatkan fungsi kartu ATM untuk memberikan kemudahan bagi nasabah pemegang kartu ATM Bank Sulselbar. Layanan lain yang dapat dinikmati pemegang kartu ATM Bank Sulselbar adalah fasilitas pembayaran tagihan telepon seluler pasca bayar dan pembelian pulsa prabayar serta *payment* tagihan listrik (PLN).

JARINGAN KERJA DI LUAR NEGERI

Selama tahun 2012, Bank Sulselbar tidak memiliki jaringan kerja di luar negeri.

MITRA USAHA DI DALAM NEGERI

Mitra usaha Bank Sulselbar di dalam negeri pada tahun 2012, sebagai berikut :

- Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 007/PKS-BSS/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama sewa milik UPS 10 KVA dengan CV. Bayu Adhi dengan syarat yang telah ditentukan dan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun.

- Berdasarkan perjanjian kerjasama No.038/MP-UP/FIX-T/V/12, Bank sepakat untuk menggunakan sebagian tanah dan bangunan untuk pengadaan ATM dengan Mall Panakkukang-Makassar. Perjanjian tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan syarat yang telah ditentukan.

- Berdasarkan perjanjian kerjasama No.012/PKS.BSSB/II/12, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 tentang program asuransi jiwa kredit kumpulan. Berlakunya asuransi bagi masing-masing Peserta dimulai sejak ditandatamganinya Perjanjian Kredit dan akan berakhir sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit masing-masing Peserta.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.003/PKS-BSSB/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dalam bentuk pemberian penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dengan penetapan jangka waktu yang sama dengan waktu KUR.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama PKS-KUR/ASK/01/III/2012 dan No.002/PKS-BSSB/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia dalam bentuk pemberian penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dengan penetapan jangka waktu yang sama dengan waktu KUR.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.008/PKS-BSS/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan CV. Cahaya Surya Komputer atas perpanjangan sewa menyewa notebook PC/Laptop sebanyak 17 (tujuh belas) unit selama 1 (satu) tahun.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.196/PKS-BSS/X/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Praweda Ciptakarsa Informatika atas pengadaan *hardware, software* dan aplikasi *Interface* BI-RTGS, Generasi II dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.162/PKS-BSS/XI/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Srikandi Multi Guna Sejahtera atas pengerjaan reinstalasi jaringan PLN Kantor Pusat.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.181/PKS-BSS/IX/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Veda Praxis atas pekerjaan Jasa TI Assessment berdasarkan PBI No.9/15/PBI/2007 dalam rangka audit TSI yang dilakukan per 3 (tiga) tahun untuk memastikan kecukupan pengendalian yang diterapkan TI, masih sesuai dan sejalan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam PBI tersebut.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 153/PKS-BSS/IV/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Mantra Global Konsultan sebagai konsultan pendamping dalam peroses evaluasi dan implementasi *disaster recovery* dan *business contunity plan.*

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No.09/PPJP/PRF-DIR/II/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Pemeringkat Efek Indonesia atas pekerjaan jasa pemeringkat perusahaan dan obligasi 1 tahun 2011 dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No, 112/PKS-BSS/V/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. NCR Indonesia atas jasa pemeliharaan *Automated Teller Machine* (ATM) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 086/PKS/VII/2010, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Titan Sarana Niaga atas sewa mesin ATM merk NCR untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi Bank. Jangka waktu sewa mesin ATM selama satu tahun dan akan diperpanjang setiap tahun selama lima tahun.

BAB 4

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Laba bersih Bank Sulselbar pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp276.466 juta atau 9,06% lebih tinggi dari capaian laba bersih tahun 2011 sebesar Rp253.489 juta.

TINJAUAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan tahunan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 termasuk dalam Laporan Tahunan ini. Laporan keuangan disusun sesuai dengan PSAK dan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan untuk Industri Perbankan Indonesia. Selain itu, kami juga akan memberikan analisis dan diskusi untuk kinerja Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar, yang didirikan sejak tahun 2007, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kinerja keuangan Bank Sulselbar yang penyusunannya sesuai dengan PSAK dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI).

> Penurunan suku bunga kredit merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menempatkan sasaran yang tepat dari penempatan harga pembiayaan berdasarkan target debitur dan tujuan pinjaman yang diberikan, yakni produktif atau konsumtif.

Kinerja Keuangan Bank Sulselbar Tahun 2012

Sepanjang tahun 2012 Bank Sulselbar telah mencatatkan kinerja keuangan yang relatif baik dengan pertumbuhan positif pada total aset, kredit yang diberikan, penghimpunan dana pihak ketiga, dan laba rugi.

Pada tahun 2012, kredit yang diberikan tercatat sebesar Rp6.115.053 juta atau mengalami kenaikan 13,39% dibandingkan posisi Desember 2011 sebesar Rp5.393.094 juta. Total kredit yang diberikan (setelah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai) porsinya sebesar 87,21% dari total aktiva produktif tahun 2012.

Pengelolaan sumber daya pendanaan dilakukan melalui penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dengan kontribusi terbesar mencapai 79,67% terhadap total kewajiban tahun 2012. Pada tahun 2012, sebesar 28,76% sumber dana berasal dari giro, tabungan sebesar 21,25% dan deposito 29,67%. Adapun penerbitan Obligasi dan Sukuk Mudharabah tercatat sebesar 7,37% yang merupakan kewajiban Bank dalam laporan keuangan.

Total aset Bank Sulselbar meningkat sebesar 9,93% lebih tinggi dari dari total aset tahun 2011 sebesar Rp7.290.471 juta menjadi Rp8.014.158 juta di tahun 2012. Pertumbuhan aset sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan kewajiban tahun 2012 mencapai 9,12% menjadi Rp6.780.049 juta dari Rp6.213.170 juta pada tahun 2011.

Pencapaian laba bersih meningkat 9,06% yakni sebesar Rp276.466 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp253.489 juta. Selama tahun 2012 dan 2011, Bank Sulselbar juga mampu mempertahankan marjin bunga bersih pada tingkat di atas 5%. Pertumbuhan laba bersih tahun 2012 mempengaruhi pertumbuhan ekuitas sebesar 13,47% lebih tinggi dibandingkan total ekuitas di tahun 2011.

LAPORAN LABA RUGI

Laba Bersih

Bank Sulselbar mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 9,06% menjadi Rp276.466 juta di tahun 2012 dibanding pencapaian sebesar Rp253.489 juta pada tahun 2011.

Kenaikan perolehan laba bersih antara lain disebabkan adanya kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 15,51% lebih tinggi pada tahun 2012 dari Rp639.137 juta pada tahun 2011 menjadi Rp738.272 juta. Kenaikan pendapatan bunga bersih antara lain karena kenaikan pendapatan bunga dan pendapatan bagi hasil syariah masing – masing sebesar 12,73% dan 13,94% meskipun terjadi kenaikan pada pos beban bunga dan bagi hasil syariah masing – masing sebesar 4,03% dan 69,35% serta beban bunga atas surat berharga yang diterbitkan sebesar 56,83%.

Kenaikan pendapatan bunga dipengaruhi oleh peningkatan portofolio kredit sebesar 13,39% pada tahun 2012. Demikian pula halnya dengan peningkatan beban bunga dan bagi hasil syariah disebabkan kenaikan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 2,09%.

Laporan Laba Rugi Bank Sulselbar Tahun 2011 - 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
PENDAPATAN BUNGA				
Pendapatan Bunga	1.048.608	930.235	118.373	12,73%
Pendapatan Bagi Hasil Syariah	48.135	32.356	15.779	48,77%
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Syariah	**1.096.743**	**962.591**	**134.152**	**13,94%**
Beban Bunga	294.936	283.518	11.418	4,03%
Bagi Hasil Syariah	12.205	7.207	4.998	69,35%
Surat Berharga Yang Diterbitkan	51.330	32.729	18.601	56,83%
Total Beban Bunga dan Bagi Hasil Syariah	**358.471**	**323.454**	**35.017**	**10,83%**
Pendapatan Bunga Bersih	**738.272**	**639.137**	**99.135**	**15,51%**
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA				
Pendapatan Operasional				
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	25.390	31.728	(6.338)	(19,98%)
Administrasi	36.766	32.429	4.337	13,37%
Pendapatan Operasional Lainnya	9.932	24.211	(14.279)	(58,98%)
Total Pendapatan Operasional Lainnya	**72.088**	**88.368**	**(16.280)**	**(18,42%)**
Beban personalia	275.279	207.785	67.494	32,48%
Beban umum dan administrasi	141.150	124.853	16.297	13,05%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - bersih	9.424	20.778	(11.354)	(54,64%)
Total Beban Operasional Lainnya	**425.853**	**353.416**	**72.437**	**20,50%**
Total Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya	**(353.765)**	**(265.048)**	**(88.717)**	**33,47%**
Laba (Rugi) Operasional	384.507	374.089	10.418	2,78%
Pendapatan Non Operasional	4.961	429	4.532	1056,41%
Beban Non Operasional	12.837	11.370	1.467	12,90%
Pendapatan (Beban) Non Operasional	(7.876)	(10.941)	3.065	(28,01%)
Laba Sebelum Taksiran Manfaat Pajak Penghasilan	376.631	363.148	13.483	3,71%
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan	100.165	109.659	(9.494)	(8,66%)
Laba Bersih	276.466	253.489	22.977	9,06%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**276.466**	**253.489**	**22.977**	**9,06%**

Pendapatan

Pendapatan Bunga

Bank Sulselbar memperoleh pendapatan bunga adalah hasil dari kredit dan pembiayaan yang diberikan, penempatan dana dan pembelian surat berharga obligasi. Pendapatan bunga bertumbuh sebesar 13,94% menjadi Rp1.096.743 juta pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp962.591 juta. Peningkatan pendapatan pendapatan bunga pada tahun 2012 didorong oleh kenaikan portofolio kredit yang diberikan sebesar 13,39% dari penyaluran kredit pada tahun 2011. Pendapatan bunga yang diperoleh dari penyaluran kredit memiliki kontribusi terbesar yaitu 87,98% dari total pendapatan bunga pada tahun 2012.

Pendapatan Bunga Kredit

Kredit yang diberikan pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp5.744.496 juta (tidak termasuk syariah) dan menghasilkan pendapatan bunga kredit sebesar Rp964.918 juta, meningkat sebesar 11,76% dibandingkan pendapatan bunga kredit tahun 2011. Pendapatan bunga dari kredit yang diberikan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan Bank, yakni sebesar 87,98% pada tahun 2012 dan 89,69% pada tahun 2011.

Bank memperoleh pendapatan bunga berdasarkan saldo porto folio kredit produktif dan konsumtif yang disalurkan kepada debitur.

Suku bunga rata – rata per tahun untuk kredit yang diberikan per 31 Desember 2012 adalah sebesar 15% atau menurun dibandingkan suku bunga rata – rata tahun 2011 sebesar 17%.

Penurunan suku bunga kredit merupakan bagian dari strategi manajemen untuk menempatkan sasaran yang tepat dari penempatan harga pembiayaan berdasarkan target debitur dan tujuan pinjaman yang diberikan, yakni produktif atau konsumtif.

Tinjauan suku bunga kredit dilakukan secara periodik untuk menjaga tingkat harga pembiayaan. Untuk itu, maka Bank Sulselbar dapat mempertahankan margin bunga bersih di atas 5% pada tahun 2012 dan mampu menarik lebih banyak debitur untuk meningkatkan aset. Strategi dan penetapan suku bunga yang baik pada akhirnya mempengaruhi peningkatan portofolio kredit (tidak termasuk syariah) sebesar 11,91% pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 serta pertumbuhan pendapatan bunga kredit juga mengalami kenaikan mencapai 11,76% pada tahun 2012.

Pendapatan Bunga Bank Sulselbar Tahun 2011 - 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Kredit Yang Diberikan	964.918	863.368	101.550	11,76%
Penempatan pada Bank Indonesia	6.386	7.931	(1.545)	(19,48%)
Penempatan pada Bank Lain	69.467	48.804	20.663	42,34%
Surat Berharga	7.836	10.132	(2.296)	(22,66%)
Jumlah Pendapatan Bunga	**1.048.607**	**930.235**	**118.372**	**12,72%**

Pendapatan Bunga Penempatan

Untuk mengoptimalkan kelebihan dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit serta dalam rangka pengelolaan likuiditas yang baik, maka dana – dana tersebut ditempatkan pada instrumen keuangan tertentu seperti penempatan pada Bank Indonesia dan penempatan pada Bank lainnya. Penempatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan return pendapatan bunga.

Pendapatan bunga yang bersumber dari penempatan pada Bank Indonesia tahun 2012 sebesar Rp6.386 juta atau mengalami penurunan 19,48% dari tahun 2011 sebesar Rp7.931juta. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI *Rate*) sebanyak 1 (satu) kali selama tahun 2012.

Penempatan pada Bank lain pada tahun 2012 bertumbuh 42,34% dari Rp48.804 juta pada tahun 2011 menjadi Rp69.467 juta.

Sebagai dampak dari pengelolaan likuiditas Bank, pendapatan dari bunga yang dihasilkan dari saldo penempatan dana pada Bank Indonesia dan penempatan pada bank lainnya memberikan kontribusi masing – masing sebesar 0,58% dan 6,33% terhadap total pendapatan bunga pada 2012.

Pendapatan Bunga Surat Berharga

Pendapatan bunga surat berharga per 31 Desember 2012 tercatat sebesar Rp7.836 juta atau menurun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp10.132 juta. Kontribusi pendapatan bunga surat berharga terhadap total pendapatan bunga tahun 2012 hanya sebesar 0,71%.

Pendapatan Syariah

Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah mulai beroperasi sejak tahun 2007 untuk memberikan alternatif layanan berdasarkan prinsip syariah. Unit Usaha Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil melalui penyediaan pembiayaan dengan konsep *murabahah* untuk piutang investasi, modal kerja dan konsumtif. Selain itu, UUS Bank Sulselbar juga menyediakan pembiayaan berkonsep *mudharabah* untuk pembiayaan modal kerja.

Pendapatan Bagi Hasil Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Margin *Murabahah* dan *Mudharabah*	45.673	28.678	16.995	59,26%
Bonus Giro *Wadiah*	1	9	(8)	(88,89%)
Bonus Hasil Deposito	2.304	3.669	(1.365)	(37,20%)
Qardh Gadai	158	0	158	100,00%
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil	**48.136**	**32.356**	**15.780**	**48,77%**

Selama tahun 2012, transaksi pembiayaan syariah bertumbuh signifikan dimana pendapatan bagi hasil meningkat 48,77% menjadi Rp48.136 juta dibandingkan bagi hasil tahun 2011 sebesar Rp32.356 juta. Pembiayaan syariah yang berbasis *murabahah* dan *mudharabah* berpengaruh sangat signifikan terhadap kenaikan total pendapatan bagi hasil syariah dimana pembiayaan syariah 42,54% lebih tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp370.557 juta dibandingkan Rp259.959 juta di tahun 2011. Sama halnya dengan pendapatan bunga kredit, pendapatan bagi hasil yang berasal dari margin *murabahah* dan *mudharabah* memiliki porsi terbesar terhadap total pendapatan bagi hasil syariah tahun 2012 sebesar 94,88%.

Beban Bunga

Beban

Beban bunga bertumbuh sebesar 10,83% lebih tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp358.470 juta apabila dibandingkan beban bunga pada tahun 2011 sebesar Rp323.454 juta. Peningkatan beban bunga disebabkan oleh adanya kenaikan dana pihak ketiga pada tahun 2012 sebesar 2,09%.

Beban Bunga Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Pinjaman yang diterima	8.915	10.312	(1.397)	(13,55%)
Giro	86.428	75.953	10.475	13,79%
Deposito	172.177	172.618	(441)	(0,26%)
Tabungan	27.417	24.635	2.782	11,29%
Bagi hasil syariah	12.204	7.207	4.997	69,34%
Surat berharga yang diterbitkan	51.330	32.729	18.601	56,83%
Jumlah Beban Bunga	**358.471**	**323.454**	**35.017**	**10,83%**

Beban Bunga Giro

Beban bunga giro pada tahun 2012 meningkat 13,79% menjadi Rp86.428 juta dari Rp75.953 juta pada tahun 2011. Porsi beban bunga giro per 31 Desember 2012 sebesar 24,11% terhadap total beban bunga. Tingkat suku bunga giro rata – rata pada tahun 2012 meningkat menjadi 3% dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 2,5%. Peningkatan beban bunga giro pada tahun 2012 dipengaruhi oleh meningkatnya penempatan dana dari Pemprov. Sulsel dan Sulbar sebesar 66,36% yaitu dari Rp351.299 juta pada tahun 2011 menjadi Rp584.404 juta di tahun 2012.

Beban Bunga Tabungan

Suku bunga rata – rata tabungan Bank Sulselbar pada tahun 2012 berada di kisaran 0,25% - 4,5% dibandingkan tahun 2011 yang tecatat sebesar 3%. Meskipun demikian, total penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan pada tahun 2012 meningkat sebesar 23,71% (tidak termasuk syariah). Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan signifikan beban bunga tabungan pada tahun 2012 sebesar 11,29% menjadi Rp27.417 juta dari Rp24.635 juta pada tahun 2011.

Beban bunga tabungan terhadap total beban bunga tahun 2012 kontribusinya mencapai 7,65%.

Beban Bunga Deposito

Beban bunga deposito per 31 Desember 2012 sebesar Rp172.177 juta atau menurun 0,26% dibandingkan beban bunga deposito tahun 2011 Rp172.618 juta. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk deposito pada tahun 2012 sebesar 3,31% menjadi Rp2.011.488 juta dari Rp2.080.284 juta di tahun 2011. Selain itu, juga karena tingkat suku bunga rata – rata deposito pada tahun 2012 berada di kisaran 5,25% - 5,5% atau relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2011 sebesar 6,25%.

Meskipun demikian, porsi beban bunga deposito terhadap total beban bunga di tahun 2012 tercatat paling tinggi yaitu mencapai 48,03%. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan bunga deposito tahun 2012 tidak mempengaruhi deposan dalam keputusan penempatan dananya dalam bentuk deposito di Bank Sulselbar. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya deposan, terhadap Bank Sulselbar berada pada level yang cukup tinggi untuk tetap loyal dalam memanfaatkan salah satu produk pendanaan Bank Sulselbar.

Beban Bunga Pinjaman Yang Diterima

Beban bunga dari pinjaman yang diterima sebesar 13,55% lebih rendah pada tahun 2012 dari Rp10.312 juta di tahun 2011 menjadi Rp8.915 juta pada tahun 2012. Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan saldo pinjaman yang diterima sebesar 0,88% lebih rendah selama tahun 2012. Beban bunga pinjaman yang diterima bersumber dari pinjaman pada Bank Indonesia, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BTN dan Kementerian Keuangan pada tahun 2012 sebesar Rp150.632 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp151.971 juta. Beban bunga ini memberikan kontribusi terhadap jumlah beban bunga pada tahun 2012 sebesar 2,49%.

Beban Bunga Surat Berharga Yang Diterbitkan

Pada tahun 2012, beban bunga surat berharga yang diterbitkan mempengaruhi total beban bunga sebesar 14,32%. Beban bunga surat berharga yang diterbitkan meningkat 56,83% lebih tinggi pada tahun 2012 sebesar Rp51.330 juta dari Rp32.729 juta pada tahun 2011. Kenaikan beban bunga surat berharga yang diterbitkan disebabkan karena emisi Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I Tahun 2011 pembayaran bunganya baru dilakukan pada bulan Mei 2011 sehingga pembayaran bunga selama tahun 2011 hanya berlangsung selama 8 (delapan) bulan. Sedangkan bunga surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2012 pembayarannya berlangsung penuh selama 12 (dua belas) bulan.

Beban Bagi Hasil Syariah

Beban bagi hasil syariah mengalami peningkatan sebesar 69,34% menjadi Rp12.204 juta pada tahun 2012 dibandingkan beban bagi hasil tahun 2011 sebesar Rp7.207 juta. Kenaikan beban bagi hasil syariah dipengaruhi oleh pertumbuhan dana pihak ketiga syariah pada tahun 2012 sebesar 73,97% dengan pertumbuhan tertinggi yaitu pada penghimpunan deposito *mudharabah* yang mencapai 93,79%.

Beban Bagi Hasil Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Bagi Hasil Syariah	12.204	7.207	4.997	69,34%
Jumlah Beban Bagi Hasil	**12.204**	**7.207**	**4.997**	**69,34%**

Pendapatan Operasional Lainnya

Pendapatan operasional lainnya sebesar 18,42% lebih rendah dari tahun 2011 yaitu Rp88.368 juta menjadi Rp72.088 juta di tahun 2012. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan provisi dan komisi selain kredit yang diberikan sebesar 19,98% dari Rp31.728 juta di tahun 2011 menjadi Rp25.390 juta pada tahun 2012. Selain itu, pendapatan lain – lain pada tahun 2012 lebih rendah 58,98% dibandingkan tahun 2011.

Pendapatan Operasional Lainnya Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	25.390	31.728	(6.338)	(19,98%)
Administrasi	36.766	32.429	4.337	13,37%
Lain-lain	9.932	24.211	(14.279)	(58,98%)
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	**72.088**	**88.368**	**(16.280)**	**(18,42%)**

Beban Operasional Lainnya

Pada tahun 2012, beban operasional lainnya bertumbuh 38,72% menjadi Rp425.853 juta dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp353.416 juta. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan beban personalia sebesar 32,48% dan peningkatan beban administrasi dan umum sebesar 13,05%.

Selama tahun 2012, kredit yang diberikan meningkat 13,39% lebih tinggi dari tahun 2011. Berdasarkan analisis kolektibilitas kredit, 98,91% dari pinjaman merupakan kredit *performing* dan 1,09% yang *non performing* (bermasalah). Hal ini berarti bahwa meskipun kredit meningkat secara signifikan, kredit bermasalah menurun pada tahun 2012 dimana penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non keuangan menjadi lebih rendah dari tahun 2011. Dengan demikian, beban yang tercatat pada laporan rugi laba yang merupakan penyisihan kerugian penurunan nilai aktiva produktif dan non produktif mengalami penurunan dari Rp20.778 juta pada tahun 2011 menjadi Rp9.424 juta pada tahun 2012.

Beban Operasional Lainnya Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Beban Personalia	275.279	207.785	67.494	32,48%
Beban Administrasi & Umum	141.150	124.853	16.297	13,05%
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan dan non keuangan - bersih	9.424	20.778	(11.354)	(54,64%)
Jumlah Beban Operasional Lainnya	**425.853**	**353.416**	**141.308**	**38,72%**

Peningkatan gaji dan kesejahteraan pegawai didorong oleh peningkatan karyawan tetap dari 1.037 karyawan di tahun 2011 menjadi 1.074 karyawan di tahun 2012. Selain itu, Bank juga telah meningkatkan gaji pokok pegawai dan tunjangan jabatan bagi para pejabat serta mendistribusikan jasa produksi pada tahun 2012 yang meningkatkan biaya gaji. Peningkatan beban personalia tertinggi pada tahun 2012 yaitu Imbalan Pasca Kerja yang mencapai 606,69% menjadi Rp15.553 juta dari Rp2.201 juta pada tahun 2011. Peningkatan beban Imbalan Pasca Kerja ini dipengaruh oleh kenaikan gaji pegawai pada tahun 2012.

Kenaikan beban umum dan administrasi disebabkan oleh kenaikan signifikan pada beban asuransi sebesar 90,44%, beban perlengkapan sebesar 84,68%, beban barang dan jasa sebesar 44,39% dan beban bank sebesar 41,86%.

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar mencatatkan laba sebelum pajak meningkat 3,71% menjadi Rp376.631 juta dari Rp363.148 juta di tahun 2011.

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Pendapatan Operasional	1.168.831	1.050.959	117.872	11,22%
Pendapatan Non Operasional	4.961	429	4.532	1056,41%
Total Pendapatan	**1.173.792**	**1.051.388**	**122.404**	**11,64%**
Beban Operasional	784.324	676.870	107.454	15,88%
Beban Non Operasional	12.837	11.370	1.467	12,90%
Total Beban	**797.161**	**688.240**	**108.921**	**15,83%**

Laba Operasional

Pertumbuhan laba operasional Bank Sulselbar meningkat 2,78% menjadi Rp384.507 juta di tahun 2012 dibandingkan laba operasional tahun 2011 sebesar Rp374.089 juta.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada kredit yang diberikan sebesar 13,39% di tahun 2012 serta kemampuan Bank Sulselbar dalam mengelola komposisi dana pihak ketiga untuk mengoptimalkan biaya dana (*cost of fund*).

Pajak Penghasilan

Bank Sulselbar menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar mencatatkan laba sebelum pajak meningkat 3,71% menjadi Rp376.631 juta dari Rp363.148 juta di tahun 2011. Beban pajak penghasilan sebesar 8,66% lebih rendah pada tahun 2012 yaitu dari Rp109.659 juta pada tahun 2011 menjadi Rp100.165 juta. Penurunan beban pajak tahun 2012 disebabkan karena adanya penyesuaian koreksi fiskal.

Laba Bersih

Laba bersih Bank Sulselbar pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp276.466 juta atau 9,06% lebih tinggi dari capaian laba bersih tahun 2011 sebesar Rp253.489 juta. Meskipun laba operasional meningkat relatif kecil, namun beban pajak penghasilan tahun 2012 yang lebih rendah dari tahun 2011 cukup berpengaruh terhadap peningkatan laba bersih tahun 2012. Bank Sulselbar tahun 2012 telah memenuhi target laba bersih tahun 2012 yang ditetapkan sebesar Rp273.042 juta (realisasi Rp276.466 juta) dan target laba sebelum pajak sebesar Rp364.056 juta dengan realisasi mencapai Rp376.631 juta.

NERACA

Total Aset

Total aset mengalami kenaikan 9,93% menjadi Rp8.014.158 juta di tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp7.290.471 juta. Pertumbuhan total aset dipengaruhi oleh kenaikan kredit dan pembiayaan syariah yang diberikan sebesar 13,39% menjadi Rp6.115.052 juta pada tahun 2012, dari Rp5.393.094 juta di 2011.

Total Aset Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Kas	323.019	300.870	22.149	7,36%
Giro pada Bank Indonesia	546.679	469.198	77.481	16,51%
Giro pada Bank Lain-Bersih	406	881	(475)	(53,92%)
Penempatan pada Bank Lain & Bank Indonesia - Bersih	681.498	884.448	(202.950)	(22,95%)
Surat Berharga	202.094	169.232	32.862	19,42%
Kredit Yang Diberikan - Bersih	5.663.552	5.014.724	648.828	12,94%
Pembiayaan Syariah - Bersih	363.629	255.437	108.192	42,36%
Penyertaan	81	74	7	9,46%
Aset Tetap - Bersih	112.345	117.255	(4.910)	(4,19%)
Aset Pajak Tangguhan	9.716	3.791	5.925	156,29%
Aset Lain - Lain	111.139	74.561	36.578	49,06%
Jumlah Aset	**8.014.158**	**7.290.471**	**723.687**	**9,93%**

Total aset tahun 2011 masih didominasi oleh aktiva produktif setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai yaitu sebesar 86,24%. Aktiva produktif tahun 2012 sebesar Rp6.911.260 juta atau meningkat 9,27% dari Rp6.324.796 juta di tahun 2011. Komposisi aktiva produktif antara lain kredit dan pembiayaan sebesar 87,21%, kemudian penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia sebesar 9,86%, surat berharga sebesar 2,92% dan aktiva produktif lainnya sebesar 0,01%.

Kredit dan Pembiayaan

Total kredit dan pembiayaan yang diberikan bertumbuh 13,39% sebesar Rp6.115.053 juta pada tahun 2012, dari Rp5.393.094 juta tahun 2011. Kenaikan penyaluran kredit dipengaruhi pertumbuhan kredit lainnya (kredit konsumtif) sebesar 26,88% menjadi Rp4.610.123 juta di tahun 2012, dari Rp3.633.426 juta tahun 2011. Kredit Investasi, Modal Kerja dan KPR mengalami penurunan pada tahun 2012 masing – masing sebesar 14,39%; 13,63% dan 42,97%. Penurunan tersebut disebabkan adanya pelunasan kredit menjelang akhir tahun 2012.

Kredit lainnya mendominasi total kredit yang diberikan sebesar 75,39%, yang diikuti kredit investasi dengan porsi 13,39%, kredit modal kerja 10,98% dan KPR 0,24%.

Kredit lainnya merupakan kredit yang diberikan untuk PNS di lingkungan Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Semua kredit lainnya tersebut dijamin oleh Perum Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasa Rahardja Putera, PT ASEI, PT Asuransi Bangu Askrida, PT Sarana Lindung Upaya, PT Asuransi Bumi Putera Muda 1976, PT Asuransi Jiwa Nusantara dan PT Asuransi Jiwa Recapital.

Suku bunga rata – rata per tahun Bank Sulselbar pada tahun 2012 yaitu sebesar 15% dan pada tahun 2011 sebesar 16%.

Kredit & Pembiayaan Berdasarkan Jenis Tahun 2011 – 2012

Jenis Pinjaman	2012	2011	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta		Rp Juta	%	%
Kredit Investasi	818.599	956.174	(137.575)	(14,39%)	13,39%
Kredit Modal Kerja	671.421	777.349	(105.928)	(13,63%)	10,98%
KPR	14.910	26.145	(11.235)	(42,97%)	0,24%
Kredit Umum Lainnya	4.610.123	3.633.426	976.696	26,88%	75,39%
Total Kredit & Pembiayaan	**6.115.053**	**5.393.094**	**721.958**	**13,39%**	**100,00%**

Pertumbuhan Kredit & Pembiayaan Berdasarkan Unit Usaha Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta		Rp Juta	%	%
Konvensional	5.744.496	5.133.135	611.361	11,91%	93,94%
Unit Usaha Syariah	370.557	259.959	110.597	42,54%	6,06%
Total Kredit & Pembiayaan	**6.115.053**	**5.393.094**	**721.958**	**13,39%**	**100,00%**

Kredit dan pembiayaan yang diberikan berdasarkan sektor usaha yang porsinya di atas 5% yaitu sektor konsumtif 72,76% dan sektor perdagangan 14,96%, sedangkan untuk sektor usaha lainnya porsinya kurang dari 5%.

Kredit dan Pembiayaan Yang Diberikan Bank Sulselbar Berdasarkan Sektor Usaha Tahun 2007 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta		Rp Juta	%	%
Konsumtif	4.449.046	3.577.726	871.320	24,35%	72,76%
Pertanian	147.428	164.219	(16.791)	(10,22%)	2,41%
Industri	74.706	70.857	3.849	5,43%	1,22%
Listrik/Air	19.271	20.473	(1.202)	(5,87%)	0,32%
Pertambangan	2.604	2.755	(151)	(5,48%)	0,04%
Konstruksi	9.266	55.161	(45.895)	(83,20%)	0,15%
Perumahan	239.721	95.507	144.214	151,00%	3,92%
Perdagangan	915.002	967.447	(52.445)	(5,42%)	14,96%
Pengangkutan & Distribusi	17.648	25.798	(8.150)	(31,59%)	0,29%
Jasa - Jasa Dunia Usaha	31.864	249.830	(217.966)	(87,25%)	0,52%
Jasa - Jasa Sosial Masyarakat	208.497	163.321	45.176	27,66%	3,41%
Total Kredit dan Pembiayaan	**6.115.053**	**5.393.094**	**721.959**	**13,39%**	**100,00%**

Pada tahun 2012, Bank Sulselbar telah menghitung Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sebesar Rp87.872 juta sehingga total kredit dan pembiayaan yang diberikan setelah dikurangi CKPN yaitu sebesar Rp6.027.181 juta. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2012 lebih rendah dari perhitungan CKPN tahun 2011 sejalan dengan penurunan rasio NPL dari 2,02% pada tahun 2011 menjadi 1,39% pada tahun 2012. Hal ini juga berarti bahwa risiko kredit selama tahun 2012 lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Bank Sulselbar juga telah membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui Surat Keputusan Direksi.

Kredit dan Pembiayaan Diperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Kredit & Pembiayaan	6.115.053	5.393.094	721.959	13,39%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	(87.872)	(122.932)	(35.060)	28,52%
Jumlah	**6.027.181**	**5.270.162**	**884.229**	**20,16%**

Kas dan Setara Kas

Dalam rangka pengelolaan likuiditas, Bank Sulselbar telah mengoptimalkan fungsi dan pengelolaan *treasury* dengan melakukan penempatan dana pada instrumen keuangan yang lebih likuid. Adapun pengelompokan aset Bank berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu kas dan setara kas yang meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu – waktu dapat dicairkan dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

Kas

Kas adalah dana kas yang disediakan oleh *teller* atau disimpan dalam ATM untuk kegiatan operasional Bank, antara lain untuk menyediakan dana kas sesuai permintaan penarikan simpanan nasabah Bank. Pada tahun 2012, posisi kas meningkat 7,36% menjadi Rp323.012 juta dibandingkan posisi kas tahun 2011 sebesar Rp300.870 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penambahan 8 terminal ATM baru.

Giro pada Bank Indonesia

Pada tanggal 23 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM ditetapkan sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder, dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari dana pihak ketiga valuta asing. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008 dan GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2009. Terakhir diubah dengan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, berdasarkan peraturan tersebut, GWM ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama.

Untuk GWM Utama, Bank Sulselbar senantiasa berupaya menjaga agar cadangan minimum Giro pada BI tidak kurang dari persentase yang telah ditetapkan, sementara pemenuhan GWM Sekunder dilakukan dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan/atau *excess reserve* (kelebihan giro Bank di Bank Indonesia di atas kewajiban GWM Utama). GWM Utama Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar 9,41% dan GWM Sekunder 2,95%.

Giro pada Bank Indonesia tahun 2012 meningkat 16,51% dari Rp469.197 juta pada tahun 2012 menjadi Rp546.679 juta di tahun 2011.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Sulselbar Tahun 2007 - 2012

	2012	2011	2010	2009	2008	2007
GWM Utama	9,41%	8,24%	9,68%	5,25%	5,36%	14,47%
GWM Sekunder	2,95%	2,76%	2,64%	2,83%	n.a	n.a

Giro pada Bank Lain

Giro pada bank lain bertujuan untuk menyediakan cara yang lebih mudah dalam melaksanakan transfer dana/pengiriman uang/penyelesaian transaksi antar bank. Fluktuasi giro bergantung pada frekuensi transaksi dana yang diberikan oleh nasabah. Giro pada bank lain di tahun 2012 sebesar Rp405 juta atau 54,13% lebih rendah dari saldo tahun 2011yang tercatat sebesar Rp883 juta.

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada BI dan bank lain terdiri dari FASBI (fasilitas yang diberikan kepada bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rupiah), *Deposito on Call*, dan Deposito Berjangka. Selama tahun 2012, penempatan pada BI dan bank lain tercatat sebesar Rp681.998 juta atau 22,94% lebih rendah dari tahun 2011 sebesar Rp884.998 juta. Hal ini disebabkan adanya pengalokasian kelebihan dana untuk penyaluran kredit di tahun 2012. Penempatan pada BI dan bank lain di tahun 2012 sebagian besar merupakan penempatan dalam bentuk *Deposito on Call* yakni 90,18%, Deposito berjangka porsinya sebesar 7,33% dan FASBI hanya tercatat sebesar 2,49%.

Efek-efek

Efek-efek terdiri dari penempatan pada surat berharga baik itu diperdagangkan, Dibeli untuk Dijual Kembali, dan dimiliki hingga jatuh tempo. Efek – efek berupa surat berharga yang dimiliki Bank Sulselbar meliputi Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

Pada tahun 2012, efek yang dimiliki Bank Sulselbar mengalami kenaikan 19,42% menjadi Rp202.094 juta dari Rp169.232 juta di tahun 2011. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya transaksi pembelian Sertifikat Bank Indonesia, SUN dan obligasi beberapa bank pembangunan daerah.

Aset Tetap

Aset tetap Bank Sulselbar tahun 2012 meningkat sebesar 3,59% dari aset tetap tahun 2011. Peningkatan ini terjadi karena adanya pembangunan 3 (tiga) gedung kantor baru. Setelah dikurangi akumulasi penyusutan, aset tetap yang tercatat di akhir tahun 2012 adalah Rp112.345 juta atau lebih rendah 4,19% dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp117.256 juta.

Aktiva Tetap & Inventaris Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Harga perolehan				
Tanah	25.089	25.089	0	0,00%
Bangunan kantor	90.482	70.619	19.863	28,13%
Bangunan rumah dinas	5.040	5.017	23	0,46%
Kendaraan	15.271	15.271	0	0,00%
Perabot kantor	101.525	95.908	5.617	5,86%
Perabot rumah dinas	1.934	1.789	145	8,11%
Aset dalam penyelesaian	631	17.953	(17.322)	(96,49%)
Jumlah	**239.972**	**231.646**	**8.326**	**3,59%**
Akumulasi penyusutan				
Bangunan kantor	23.703	19.846	3.857	19,43%
Bangunan rumah dinas	1.574	1.282	292	22,78%
Kendaraan	13.814	13.173	641	4,87%
Perabot kantor	87.045	78.844	8.201	10,40%
Perabot rumah dinas	1.491	1.245	246	19,76%
Jumlah	127.627	114.390	13.237	11,57%
Nilai Buku	**112.345**	**117.256**	**(4.911)**	**(4,19%)**

Aset Lain - Lain

Aset lain-lain terdiri dari bunga yang masih harus diterima, uang muka dan biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, persediaan barang cetakan dan beban ditangguhkan emisi obligasi. Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan di laporan laba rugi tahun berjalan. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat agunan tersebut dijual.

Pada tahun 2012, aset lain – lain Bank Sulselbar sebesar Rp111.139 juta atau meningkat 49,06% dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp74.561 juta. Kenaikan tersebut oleh karena terdapat saldo pada bunga yang masih harus diterima (bunga kredit dan bunga penempatan pada bank lain), persedian barang cetakan dan lain – lain.

LIABILITAS

Liabilitas pada tahun 2012 bertumbuh 9,31% dari tahun 2011, yang mana kenaikan tersebut didominasi oleh peningkatan simpanan dari Bank Lain dan Imbalan Pasca Kerja masing – masing sebesar 795,88% dan 223,33% serta pertumbuhan liabilitas lainnya sebesar 59,38%.

Simpanan nasabah memiliki porsi terbesar terhadap total liabilitas atau kewajiban pada tahun 2012 sebesar 79,53%, kemudian simpanan dari Bank Lain dan surat berharga yang diterbitkan masing – masing dengan komposisi 7,32% dan 7,31%, sedangkan sisa liabilitas lainnya hanya berkontribusi sekitar 1% kecuali pinjaman yang diterima dengan porsi 2,22%. Adapun total liabilitas atau kewajiban memiliki porsi 84,75% dari total aset tahun 2012.

Liabilitas Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Liabilitas Segera	103.583	121.743	(18.160)	(14,92%)
Simpanan Nasabah	5.401.642	5.291.084	110.557	2,09%
Simpanan dari Bank Lain	497.107	55.488	441.619	795,88%
Surat Berharga Yang Diterbitkan	496.506	494.561	1.945	0,39%
Pinjaman Yang Diterima	150.632	151.971	(1.339)	(0,88%)
Hutang Pajak	14.814	30.172	(15.358)	(50,90%)
Imbalan Pasca Kerja	37.089	11.471	25.618	223,33%
Liabilitas Lainnya	90.335	56.679	33.657	59,38%
Jumlah Liabilitas	**6.791.708**	**6.213.169**	**578.539**	**9,31%**

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah atau dana pihak ketiga merupakan dana yang ditempatkan di Bank Sulselbar yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Simpanan nasabah merupakan kontribusi pendanaan terbesar yakni sekitar 79,53% dari total liabilitas tahun 2012. Total simpanan nasabah Bank Sulselbar tahun 2012 mencapai Rp5.401.642 juta, meningkat sebesar 2,09% dari tahun 2011.

Persaingan dalam dunia usaha perbankan semakin tinggi intensitasnya, yang antara lain meliputi persaingan tingkat suku bunga, layanan yang diberikan, luasnya jaringan, dan fitur-fitur yang diberikan. Berbagai strategi diterapkan Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan dan target bisnis, diantaranya dengan menawarkan produk, layanan dan fasilitas baru yang dimiliki ataupun menambah fitur-fitur dari produk, layanan atau fasilitas yang sudah tersedia dengan tetap berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Giro

Saldo giro pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp1.949.732 juta atau lebih rendah 4,96% dibandingkan giro tahun 2011 sebesar Rp2.051.397 juta. Penurunan giro tahun 2012 disebabkan karena adanya penarikan dana giro Pemprov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk digunakan melakukan pembayaran proyek – proyek Pemda yang jatuh tempo pada akhir tahun. Giro Bank Sulselbar terdiri dari giro konvensional sebesar Rp1.940.305 juta, atau 99,52% dari total giro, dan giro berdasarkan prinsip syariah sebesar Rp9.427 juta atau sebesar 0,48% dari jumlah giro tahun 2012. Komposisi giro yang bersumber dari Pemprov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar 19,43% dari total giro tahun 2012 dan dana giro yang berasal dari masyarakat (giro non Pemprov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat) komposisinya terhadap total giro tahun 2012 sebesar 80,57%.

Tabungan

Tabungan Bank Sulselbar terdiri dari : Tabungan Simpeda, Tabungan Tapemda, Tabungan Tapemda Sayang Petani, Tabungan Tapemda Pelajar dan Mahasiswa, Tapemda Pensiunan, Tabungan Haji dan Tabungan Masa Depan (Tampan). Sedangkan produk tabungan syariah terdiri dari : Tabungan Syariah, Tabungan HATAM (Haji & Umrah), dan Tabungan Kemitraan dan Tabungan BKMT Syariah.

Tabungan Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp1.440.422 juta atau meningkat 24,24% dari total tabungan tahun 2011 sebesar Rp1.159.404 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan rekening nasabah pada tahun 2012 yang meningkatkan frekuensi transaksi dengan rekening tabungan dan meningkatkan saldo yang terdapat pada rekening tabungan per 31 Desember 2012. Di samping itu juga sebagai hasil dari Hal ini merupakan salah satu upaya manajemen dalam rangka menghimpun dana-dana ritel yang berbiaya murah

Deposito

Deposito Bank Sulselbar terdiri dari deposito konvensional dan deposito *mudharabah* syariah. Pada tahun 2012, deposito Bank Sulselbar sebesar Rp2.011.488 juta atau lebih rendah 3,31% dibandingkan posisi deposito tahun 2011. Penurunan tersebut disebabkan karena dana Pemda yang biasanya ditempatkan di giro, ada pula yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan *rate* yang kompetitif dibandingkan giro. Dan pada akhir tahun, terjadi penarikan deposito Pemda untuk melakukan pembayaran proyek – proyek Pemda yang jatuh tempo pada akhir tahun. Selain itu, penurunan ini dimaksudkan untuk memperbaiki struktur pendanaan secara bertahap dengan mengurangi porsi dana mahal yaitu deposito korporasi dengan dana yang lebih murah.

Deposito konvensional pada tahun 2012 sebesar Rp1.826.220 juta dan lebih rendah 7,98% dari tahun 2011 yang disebabkan oleh karena sebagian besar deposito Pemda ditempatkan pada deposito konvensional. Deposito *mudharabah* syariah meningkat 77,46% menjadi Rp185.268 juta pada tahun 2012 dari Rp95.602 juta pada tahun 2011. Porsi deposito konvensional dan deposito syariah pada tahun 2012 masing – masing sebesar 90,79% dan 9,21% terhadap total deposito. Deposito syariah memiliki porsi terbesar terhadap total dana pihak ketiga syariah sebesar 77,46%.

Dana Pihak Ketiga Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan		Porsi
	Rp Juta		Rp Juta	%	%
Dana Pihak Ketiga Konvensional					
Giro	1.940.305	2.040.547	(100.242)	(4,91%)	37,58%
Tabungan	1.395.944	1.128.374	267.570	23,71%	27,04%
Deposito	1.826.220	1.984.682	(158.462)	(7,98%)	35,37%
Total Dana Pihak Ketiga Konvensional	**5.162.469**	**5.153.603**	**8.866**	**0,17%**	**100,00%**
Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah					
Giro	9.427	10.850	(1.423)	(13,12%)	3,94%
Tabungan	44.478	31.030	13.448	43,34%	18,60%
Deposito	185.268	95.602	89.666	93,79%	77,46%
Total Dana Pihak Ketiga Unit Usaha Syariah	**239.173**	**137.482**	**101.691**	**73,97%**	**100,00%**
Dana Pihak Ketiga					
Giro	1.949.732	2.051.397	(101.665)	(4,96%)	36,10%
Tabungan	1.440.422	1.159.404	281.018	24,24%	26,67%
Deposito	2.011.488	2.080.284	(68.796)	(3,31%)	37,24%
Total Dana Pihak Ketiga	**5.401.642**	**5.291.085**	**110.557**	**2,09%**	**100,00%**

Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari Bank Lain yaitu penempatan dana dari bank lain pada Bank Sulselbar dan menjadi liabilitas atau kewajiban Bank dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito yang jumlahnya dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap bank lain.

Simpanan dari Bank Lain bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan transfer dana/ pengiriman uang antar bank, dengan menempatkan dana pada beberapa bank lain yang dicatat sebagai giro pada bank lain di bagian aset. Sebaliknya, bank lain akan menempatkan dana mereka di Bank yang akan dicatat sebagai Simpanan dari Bank Lain, sebagai bagian dari kewajiban. Fluktuasi rekening/saldo tersebut bergantung pada frekuensi transaksi dana yang diberikan oleh nasabah. Simpanan dari Bank lain pada tahun 2012 meningkat sebesar 796% yaitu dari Rp55.488 juta pada tahun 2012 menjadi Rp497.172 juta pada tahun 2012. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penempatan dalam bentuk deposito sebesar 819,63%, khususnya penempatan deposito on call yang pada tahun 2011 tidak terdapat penempatan pada pos tersebut, dan giro sebesar 156,94%.

Simpanan dari Bank Lain Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Giro	5.108	1.988	3.120	156,94%
Tabungan	64	0	0	100,00%
Deposito	492.000	53.500	438.500	819,63%
- Deposito berjangka	2.000	53.500	(51.500)	(96,26%)
-Deposito *on call*	490.000	0	490.000	100,00%
Total Simpanan dari Bank Lain	**497.102**	**55.488**	**441.614**	**795,87%**

Surat Berharga Yang Diterbitkan

Selain dana pihak ketiga atau simpanan nasabah yang merupakan sumber pendanaan terbesar, Bank Sulselbar juga telah menerbitkan surat berharga dalam bentuk Obligasi dan Sukuk *Mudharabah* Bank Sulselbar I pada tahun 2011 dengan nilai emisi Rp500 miliar yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Seri B masing – masing Rp50 miliar dan Rp350 miliar serta Sukuk *Mudharabah* sebesar Rp100 miliar. Surat berharga yang diterbitkan pada tahun 2012 setelah amortisasi dan dikurangi biaya emisi menjadi sebesar Rp496.506 juta atau meningkat 0,39% dari tahun 2011 yang tercatat sebesar Rp494.561 juta. Kontribusi dana dari surat berharga yang diterbitkan adalah sebesar 7,31% dari jumlah kewajiban tahun 2012.

Surat Berharga Yang Diterbitkan Bank Sulselbar

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	400.000	400.000	0	0,00%
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000	100.000	0	0,00%
Biaya emisi obligasi	(6.836)	(6.836)	0	0,00%
Penerimaan penerbitan obligasi bersih	493.164	493.164	0	0,00%
Amortisasi biaya obligasi	3.342	1.397	1.946	139,28%
	496.506	**494.561**	**1.946**	**0,39%**

Pinjaman Yang Diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia dan pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada pengusaha kecil dan mikro, kredit mikro investasi dan kredit rumah sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo tahun 2014 dengan suku bunga 3% - 6% per tahun.

Pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja yang diperoleh Bank kemudian akan disalurkan kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui Bank Umum. Total fasilitas pinjaman ini sebesar Rp8.000 juta, jangka waktu pinjaman dari tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 15 Maret 2013 dengan tingkat bunga 7% per tahun.

Pinjaman yang diterima pada tahun 2012 mengalami penurunan 0,88% dari Rp151.971 juta pada tahun 2011 menjadi Rp150.632 juta pada tahun 2012. Penurunan ini antara lain disebabkan karena terjadinya penurunan pinjaman yang berasal dari Bank Indonesia yang turun sebesar 66,14%, PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang turun sebesar 80,06%, dan Bank Tabungan Negara yang juga mengalami penurunan sebesar 48,53%.

Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) merupakan pinjaman yang sifatnya penerusan pinjaman Pemerintah melalui Bank Sulsel dalam rangka pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (KPR-RS/RSS). Dalam perjanjian penerusan ini pemerintah telah menunjuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Bank Koordinator. Berdasarkan perjanjian penerusan No. 35/PKS/DIR/1997 tanggal 29 April 1997 dan perubahan perjanjian yang terakhir No. 11/PKS/DIR/1999 tanggal 30 April 1999 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan dua puluh empat angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 12 September 2002 dan berakhir 12 maret 2014 dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% per tahun atas jumlah dana pinjaman yang telah ditarik dan masih terutang dari waktu ke waktu.

Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan) merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan bagi kredit usaha mikro dan kecil yang diterima oleh Bank dan dipinjamkan kepada nasabah-nasabah yang mempunyai persyaratan program fasilitas yang bersangkutan. Sifat pinjaman tersebut di atas adalah penerusan, dimana risiko kredit ditanggung oleh Bank. Berdasarkan perubahan perjanjian No. AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan lima kali angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 10 Desember 2017 dan berakhir 10 Desember 2019.

Pinjaman yang diterima memiliki porsi sebesar 2,22% dari total kewajiban tahun 2012

Hutang Pajak

Hutang Pajak Bank Sulselbar tahun 2012 terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 tahun 2011. Hutang pajak tahun 2012 sebesar 50,90% lebih rendah dari tahun 2011 menjadi Rp14.814 juta pada tahun 2012 dari Rp30.172 juta di tahun 2011. Penurunan hutang pajak pada tahun 2012 karena adanya penyesuaian dari koreksi fiskal.

Imbalan Pasca Kerja

Kewajiban Imbalan Pasca Kerja berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 dan telah dihitung sesuai PSAK 24 (Revisi 2004). Penilaian aktuaria atas kewajiban imbalan pasti dan imbalan pensiun dihitung oleh aktuaria independen PT. Dian Artha Tama. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja tahun 2012 meningkat 223,33% sebesar Rp37.089 juta dari Rp11.471 juta pada tahun 2011.

Liabilitas atau Kewajiban Lainnya

Kewajiban lainnya Bank Sulselbar tahun 2012 terdiri dari setoran jaminan, pendapatan yang ditangguhkan, tantiem & jasa produksi dan kewajiban lain – lain. Kewajiban lainnya meningkat sebesar 59,38% dari Rp56.679 juta pada tahun 2011 menjadi Rp90.335 juta pada tahun 2012.

EKUITAS

Total ekuitas Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp1.222.450 juta atau meningkat 13,47% lebih tinggi dari ekuitas tahun 2011 sebesar Rp1.077.302 juta. Peningkatan total ekuitas tahun 2012 dipengaruhi antara lain kenaikan jumlah Disetor tahun 2012 sebesar 8,46% menjadi Rp528.739 juta dari Rp487.477 juta di tahun 2011.

Ekuitas

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Modal Saham				
Modal Disetor	528.739	487.477	41.262	8,46%
Modal Disetor Lainnya	2	14.151	(14.149)	(99,99%)
Modal Sumbangan	244	244	0	0,00%
Saldo Laba	693.465	575.430	118.035	20,51%
Jumlah Ekuitas	**1.222.450**	**1.077.302**	**145.148**	**13,47%**

STRUKTUR MODAL

Pada tahun 2012, aktiva Bank Sulselbar dibiayai oleh 84,75% kewajiban dan 15,25% ekuitas. Hal ini berarti bahwa sebagian besar aset Bank Sulselbar dibiayai dalam bentuk kewajiban.

Rasio Keuangan Perbankan

	2012	2011
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Kredit	28,93%	28,69%
Rasio Kecukupan Modal untuk Risiko Operasional	21,91%	23,62%
NPL Gross	1,39%	2,02%
ROA	3,99%	3,34%
ROE	26,37%	32,24%
NIM	9,53%	10,18%
BOPO	71,66%	72,13%
LDR	113,21%	101,93%

SOLVABILITAS DAN KOLEKTIBILITAS

Rasio Kecukupan Modal

Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Bank Sulselbar tahun 2012 terdiri dari rasio kecukupan modal untuk risiko kredit sebesar 28,93% dan rasio kecukupan modal untuk risiko kredit dan operasional sebesar 21,91%.

Rasio Kecukupan Modal tahun 2012 menurun 0,24% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan signifikan atas aktiva produktif, khususnya peningkatan kredit yang diberikan sebesar 13,39% pada tahun 2012. Di samping itu, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no.11/3/DPNP tertanggal 27 Januari 2009, perhitungan risiko operasional untuk biaya modal ditentukan 15% dari rata – rata pendapatan bruto tahunan selama 3 tahun terakhir yang diimplementasikan secara efektif per tanggal 1 Januari 2011 yang berpengaruh terhadap kalkulasi rasio pada tahun 2012.

Sesuai dengan peraturan BI, Rasio Kecukupan Modal minimum yang ditetapkan BI adalah sebesar 8%. Dengan rasio kecukupan Bank berada pada tingkat 28,93%, yang meskipun lebih rendah dari tahun sebelumnya, struktur permodalan Bank tersebut tetap memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko pasar dan risiko kredit dimana rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI dan struktur modal Bank sudah memenuhi Peraturan BI.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2011 yang mewajibkan pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%, dan rasio kecukupan modal Bank Sulselbar yang berada di atas 20% menunjukkan bahwa struktur permodalan Bank Sulselbar tetap memiliki kapabilitas untuk mengimbangi risiko kredit dan risiko operasional karena kedua rasio tersebut lebih tinggi dari rasio kecukupan minimum BI.

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Modal Inti	1.025.930	946.823	79.107	8,35%
Modal Pelengkap	62.056	43.134	18.922	43,87%
Jumlah	**1.087.986**	**989.957**	**98.029**	**9,90%**
Aset Tertimbang Menurut Risiko Kredit	3.760.748	3.450.709	310.039	8,98%
Aset Tertimbang Menurut Risiko Operasional	1.203.705	740.657	463.048	62,52%

Rasio Kredit Bermasalah

Rasio kredit dan pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar 1,39% atau lebih rendah dari NPL tahun 2011 sebesar 2,02% dikarenakan pada Bank Sulselbar terus memaksimalkan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit bermasalah meliputi penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit, hapusbuku kredit dan atau cara – cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan yang perundang – undangan yang berlaku. Di samping itu, telah dibentuk Tim Khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui Surat Keputusan (SK) Direksi.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit agar rasio NPL tidak melampaui ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 5% sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2011 tanggal 26 Desember 2001.

Bank Sulselbar senantiasa berupaya untuk menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir risiko kredit agar rasio NPL tidak melampaui ketentuan minimum Bank Indonesia sebesar 5% sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2011 tanggal 26 Desember 2001.

Kredit Yang Diberikan Berdasarkan Kolektibilitas Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Lancar	5.996.172	5.232.801	763.371	14,59%
Dalam Perhatian Khusus	33.932	51.606	(17.674)	(34,25%)
Kurang Lancar	7.390	8.393	(1.003)	(11,95%)
Diragukan	10.901	8.605	2.296	26,68%
Macet	66.658	91.689	(25.031)	(27,30%)
Jumlah	**6.115.053**	**5.393.094**	**721.959**	**13,39%**

	2012	2011
NPL *Gross*		
Jumlah (Rp Juta)	84.949	108.688
Persentase	1,39%	2,02%
NPL *Net*		
Jumlah (Rp Juta)	29.051	96.060
Persentase	0,48%	1,82%

Likuiditas

***Loan to Deposit Ratio* (LDR) atau Rasio Kredit terhadap Dana Pihak Ketiga**

Rasio LDR Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar 113,21% dan lebih tinggi dari LDR tahun 2011 sebesar 101,93%. Peningkatan rasio LDR tahun 2012 menunjukkan bahwa Bank Sulselbar telah menjalankan fungsi intermediasinya dengan optimal melalui peningkatan kredit yang diberikan tahun 2012 mencapai 13,39%.

Rentabilitas

***Net Interest Margin* (NIM) atau Margin Pendapatan Bunga Bersih**

Net Interest Margin Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar 9,53% atau lebih rendah dari NIM tahun 2011 sebesar 10,18%. Penurunan rasio NIM tahun 2012 disebabkan oleh peningkatan pendapatan bunga yang masih lebih kecil dibandingkan persentase pertumbuhan beban operasional. Akan tetapi, sekalipun marjin pendapatan bunga lebih rendah pada tahun 2012, Bank Sulselbar masih dapat mempertahankan marjin pendapatan bunga bersih di atas 5%.

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 71,66% atau menurun secara tidak signifikan sebesar 0,47% dari 72,13% pada tahun 2011. Fluktuasi rasio BOPO disebabkan strategi manajemen untuk mempertahankan efesiensi dan efektivitas kegiatan operasional Bank melalui perbaikan struktur pendanaan serta menghilangkan biaya-biaya yang dianggap tidak perlu.

***Return on Asset* (ROA) atau Rasio Imbal Hasil terhadap Aktiva**

Rasio ROA Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 3,99% atau lebih tinggi dari ROA tahun 2011 sebesar 3,34%. Peningkatan rasio ROA tahun 2012 menunjukkan bahwa aset yang dikelola Bank Sulselbar dapat memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

***Return on Equity* (ROE) atau Rasio Imbal Hasil terhadap Ekuitas**

Rasio ROE Bank Sulselbar tahun 2012 sebesar 26,37% atau lebih rendah dari ROE tahun 2011 sebesar 32,24%. Penurunan rasio ROE ini menunjukkan bahwa peningkatan total ekuitas masih lebih tinggi dibandingkan perolehan laba bersih selama tahun 2012.

BELANJA BARANG MODAL

Selama tahun 2012, belanja barang modal Bank Sulselbar sebesar Rp239.972 juta atau 3,47% lebih tinggi dari belanja modal tahun 2011 sebesar Rp231.646 juta yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung kantor cabang. Investasi barang modal tersebut seluruhnya berasal dari dana internal. Seluruh transaksi belanja barang modal dilakukan dalam mata uang rupiah sehingga bank tidak memiliki risiko mata uang asing dalam transaksi belanja modal.

Aktiva Tetap & Inventaris Bank Sulselbar Tahun 2011 – 2012

	2012	2011	Pertumbuhan	
	Rp Juta		Rp Juta	%
Harga perolehan				
Tanah	25.089	25.089	0	0,00%
Bangunan kantor	90.482	70.619	19.863	21,95%
Bangunan rumah dinas	5.040	5.017	23	0,46%
Kendaraan	15.271	15.271	0	0,00%
Perabot kantor	101.525	95.908	5.617	5,53%
Perabot rumah dinas	1.934	1.789	145	7,50%
Aset dalam penyelesaian	631	17.953	(17.322)	(2745,17%)
Jumlah	**239.972**	**231.646**	**8.326**	**3,47%**

ARUS KAS

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Bank Sulselbar pada tahun 2012 sebesar Rp13.751 juta yang berasal dari penerimaan bunga, provisi dan komisi, penerimaan pendapatan operasional lainnya, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan kewajiban lainnya.

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp8.333 juta yang berasal dari pembelian aset tetap dan penyertaan. Sedangkan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp126.320 juta diperoleh dari penambahan setoran modal .

Pada tahun 2012 terdapat kekurangan dana kas Bank Sulselbar sebesar Rp148.403 juta yang bersumber dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas bersih tahun 2012 lebih rendah 226,69% dibandingkan tahun 2011. Kekurangan dana kas akan diatasi dengan upaya untuk meningkatkan tambahan setoran modal dari para pemegang saham Bank Suslelbar.

	2012	2011	Pertumbuhan
	Rp Juta		%
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(13.751)	(232.650)	(94,09%)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Investasi	(8.333)	(24.043)	(65,34%)
Arus Kas Bersih Yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(126.320)	373.835	(133,79%)
Arus Kas Bersih	(148.403)	117.142	(226,69%)

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Komitmen dan kontijensi merupakan rekening administrasif yang timbul dari transaksi kredit. Komitmen mengacu pada komitmen penyediaan, pembiayaan dari instrument keuangan yang mengakibatkan pengakuan aktiva dan/atau kewajiban selama periode tertentu. Kontijensi merupakan probabilitas aset dan/atau kewajiban yang dapat terjadi sebagai akibat dari beberapa kejadian sehubungan dengan kredit dan transaksi akseptasi di Bank Sulselbar. Bank Sulselbar pada tahun 2012 mencatatkan fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan *(undisbursement loans)* sebesar Rp9.056 juta menurun 59,57% lebih rendah dari tahun 2011 sebesar Rp22.398 juta. Sementara itu, kontijensi tidak memiliki fluktuasi yang signifikan dibandingan dengan saldo yang dilaporkan pada tahun 2011.

		2012	2011	Pertumbuhan	
		Rp Juta		Rp Juta	%
a.	Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi berasal dari:				
	• Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	9.056	22.398	(13.342)	(59,57%)
	• Garansi yang diterbitkan	413.357	3.572	409.785	11472,14%
b.	Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:				
	Saldo awal tahun	0	3.459	(3.459)	(100,00%)
	Penyesuaian	0	(3.459)	3459	(100,00%)
	Saldo akhir periode	0	0	0	0,00%

INFORMASI KEUANGAN DENGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Selama tahun 2012, tidak ada kejadian luar biasa yang terjadi.

INFORMASI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI AFILIASI

Pihak-pihak

Transaksi dengan pihak-pihak afiliasi dilakukan antara Bank bersama dengan pihak – pihak yang memiliki hubungan kepemilikan, kepengurusan/manajemen dan pemerintah.

Kewajaran Transaksi dan Kepatuhan terhadap Peraturan Bapepam

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi dengan pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa baik yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha utama Bank Sulselbar, yang didefinisikan sebagai transaksi benturan kepentingan berdasarkan peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1 "Benturan Kepentingan". Di samping itu, manajemen telah mengkalkulasi tingkat suku bunga sehubungan dengan transaksi berdasarkan suku bunga yang berlaku di pasar. Dengan demikian, Bank telah melakukan transaksi dengan pihak istimewa secara wajar.

Alasan dan Realisasi Transaksi

Berikut ini adalah transaksi yang terjadi antara Bank dengan pihak afiliasi dan alasannya:

- Selama tahun 2012, Bank Sulselbar telah mengadakan transaksi fasilitas kredit kepada pihak berelasi sebesar Rp2.837 juta. Pertimbangan dari transaksi ini adalah guna mencapai pertumbuhan aset pada tahun 2012.
  Kredit yang diberikan kepada pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti yang diberikan kepada pihak lain (yang tidak berelasi). Demikian pula halnya dengan simpanan pihak berelasi maupun karyawan kunci, Bank Sulselbar membayarkan beban bunga sesuai suku bunga yang berlaku. Oleh karena manajemen telah mengkalkulasi tingkat suku bunga berdasarkan suku bunga yang berlaku, Bank Sulselbar telah melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara wajar.

- Pada tahun 2012 Bank Sulselbar juga telah menerima simpanan dari pihak berelasi dan karyawan kunci sebesar Rp650.236 juta. Tujuan dari transaksi ini adalah untuk menyediakan sumber pembiayaan alternatif atas aset Bank.

- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Pemenuhan Regulasi
  Setiap transaksi dengan pihak berelasi harus dilakukan secara perlakuan yang wajar dengan standar operasional prosedur yang sama dengan perlakuan transaksi terhadap pihak ketiga. Bank melaksanakan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK No.7 (revisi tahun 2010) mengenai "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar pada suatu periode.

INFORMASI MATERIAL LAINNYA

Informasi material lainnya yang terjadi selama tahun 2012 yaitu Bank Sulselbar telah menarik fasilitas Dana Kelolaan dari Bank Indonesia untuk membiayai produk kredit mikro.

Tujuan transaksi tersebut untuk memperoleh sumber pendanaan yang tepat dalam membiayai aktivitas operasional. Bank menyediakan produk pembiayaan mikro kepada masyarakat dan pengusaha kecil untuk membantu pembiayaan aktivitas operasionalnya.

Informasi material di atas merupakan bagian dari aktivitas utama Bank dimana Bank telah mematuhi ketentuan transaksi material, seperti yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2.

KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN INFORMASI KEUANGAN KEJADIAN LUAR BIASA

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011 termasuk dalam laporan ini. Bank Sulselbar telah menerapkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur tentang akuntansi perbankan dalam penerbitan laporan keuangan tahunan. Selain itu, untuk Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berpedoman pada Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) 2003 dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 – 106. Selama 2012, Bank juga telah menerapkan revisi PSAK yang telah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2011

Selama tahun 2012, Bank tidak memiliki kejadian luar biasa yang terjadi dan mempengaruhi laporan keuangan secara signifikan. Bank telah menjelaskan kebijakan akuntansi yang penting dan diterapkan di dalam catatan laporan keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011 yang termasuk dalam laporan ini.

PERUBAHAN PERATURAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA BANK

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 14/20/DPNP Tanggal 27 Juni 2012, Perihal Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pihak Lain, dimana SEBI ini merupakan turunan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/25/PBI/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan kepada Pihak lain. Dalam SE BI ini melarang tenaga kerja alih daya (*Outsourcing*) pada pekerjaan yang merupakan inti dari kegiatan usaha Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (enam) dan 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Adapun contoh pekerjaan yang tidak dapat di-*outsourcing*-kan adalah Penghimpunan dana dari masyarakat (*Funding*), pemberian kredit/pembiayaan (*lending*), serta menjual, membeli atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas nama nasabah. Adapun jenis kegiatan yang dapat di-*outsourcing*-kan adalah pekerjaan pendukung usaha bank, yaitu kegiatan lain yang dilakukan bank di luar kegiatan usaha bank. Akibat dari peraturan ini, maka tenaga kerja *outsourcing* yang tadinya bekerja pada bagian kegiatan inti bank seperti teller, *customer service*, dan pembukuan dialihkan kepada bagian usaha pendukung bank dan penerimaan tenaga kerja *outsourcing* untuk kegiatan pokok usaha bank dihentikan.

Bank Sulselbar juga memiliki Unit Usaha Syariah yang kegiatan usahanya berdasarkan syariah. Terkait dengan perubahan peraturan dan dampaknya terhadap kinerja Unit Usaha Bank Sulselbar adalah akibat dari 2 (dua) Surat Edaran Bank Indonesia terkait dengan produk pembiayaan emas dan 1 (satu) SE BI terkait pembiayaan konsumtif untuk perumahan dan kendaraan.

Pertama, pada SE BI Nomor 14/16/DPbs Tanggal 22 Mei 2012 tentang Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana pada SE BI ini antara lain mengatur mengenai *Down Payment* (DP) bahwa untuk emas lantakan DP minimal 20 % (dua puluh persen) sementara untu emas berupa perhiasan adalah 30 % (tiga puluh persen), jumlah fasilitas pinjaman untuk Pembiayaan Kepemilikan Emas paling banyak sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun. Dampak dari SE BI kepada Bank adalah *Down Payment* yang semula 10 % (sepuluh) persen untuk segala jenis emas dinaikkan sesuai dengan aturan SE BI tersebut. Di samping itu, dimana sebelumnya Unit Usaha Syariah mengenakan biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas yang dijadikan jaminan maka akadnya berubah menjadi akad sewa.

Kedua, SE BI Nomor 14/7/DPbs Tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk *Qardh* beragun emas bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada SE BI diatur mengenai dimana produk ini hanya bisa diberikan untuk pendanaan jangka pendek untuk golongan nasabah usaha kecil dan mikro. Berdasarkan hal-hal tersebut maka produk *Qardh* yang tadinya banyak dipergunakan untuk spekulasi untuk saat ini dapat berkurang.

Ketiga, SE BI Nomor 14/33/DPbS tanggal 27 November 2012 Perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana inti dari SE BI ini adalah kenaikan uang muka terhadap pembiayaan kepemilikan rumah dan kendaraan dimana untuk rumah/ Pembiayaan KPR iB dengan akad *Murabahah* atau *Istishna* dikenakan ketentuan batasan *Financing to Value* (FTV) paling tinggi 70% artinya jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah paling banyak sebesar 70% dari nilai agunan yang diserahkan nasabah.

Agunan dalam hal ini adalah rumah/ bangunan yang dibiayai bank. Pembiayaan KPR iB dengan skim *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dipersyaratkan adanya batasan penyertaan (*sharing*) kepemilikan rumah/bangunan pada saat awal oleh bank syariah ditetapkan paling tinggi 80% dari nilai rumah/bangunan, atau dengan kata lain nasabah diharuskan melakukan penyertaan *(sharing)* kepemilikan awal paling rendah 20% nilai rumah/bangunan. Pembiayaan KPR iB dengan akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) dipersyaratkan adanya uang jaminan (deposit) yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah paling rendah 20% dari nilai rumah/bangunan. Uang jaminan tersebut nantinya akan diperhitungkan sebagai pembayaran atas pembelian rumah/bangunan pada saat akad IMBT jatuh tempo dalam hal nasabah mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang menjadi obyek IMBT. Untuk kepemilikan kendaraan guna keperluan non produktif FTV yang harus disediakan adalah 30 % (tiga puluh) persen, sementara kendaraan untuk digunakan produktif adalah minimal 20 % (dua puluh) persen. Namun dampak SE BI kepada mengurangi risiko macet karena semakin besar FTV semakin rendah *Non Performance Financing.*

Adapun Peraturan Bank Indonesia yang mempunyai dampak terhadap Bank adalah PBI Nomor 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT) Bagi Bank Umum, dimana pada PBI tersebut mengatur antara lain kewajiban untuk membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan APU dan PPT pada cabang dimana pada PBI sebelumnya hal tersebut belum diatur dan hal ini dilaksanakan oleh Bank disamping menunggu SE BI yang merupakan turunan dari PBI tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank. Dampak dari PBI ini terhadap Bank adalah Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki, dimana Bank Sulselbar masuk Bank Umum dengan Kegiatan Usaha (BUKU) 2 (dua) yaitu modal inti yang dimiliki adalah paling sedikit sebesar Rp. 1 Triliyun sampai dengan kurang dari Rp. 5 Triliyun. Dalam melakukan pengembangan jaringan bisnis yaitu kantor cabang, Bank Sulselbar wajib menyesesuaikan dengan modal inti yang dimiliki. Bank Indonesia telah membagi 5 (lima) wilayah zona dengan mempertimbangkan tingkat kejenuhan bank dan pemerataan pembangunan dimana semakin banyak bank pada suatu zona tertentu maka modal inti yang diperlukan untuk membukaan cabang semakin besar dan bank juga berwajiban untuk membuak cabang pada zona yang kecil kejenuhannya. Diselain itu, terkait dengan aturan ini bank akan memperoleh insentif terkait dengan pembukaan jaringan/cabang apabila bank lebih banyak menyalurkan kredit UMKM dibandingkan kredit konsumtif.

PERUBAHAN KEBIJAKAN STANDAR AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, yaitu :

- PSAK No. 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (revisi 2011) - Properti investasi.
- PSAK No. 16 (revisi 2011) - Aset Tetap
- PSAK No. 24 (revisi 2010) - Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (revisi 2011) - Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (revisi 2011) - Sewa
- PSAK No. 36 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 46 (revisi 2010) - Pajak Penghasilan
- PSAK No. 53 (revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 56 (revisi 2010) - Laba per Saham
- PSAK No. 60 (revisi 2010) - Instrumen keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 62 - Kontrak Asuransi
- ISAK No. 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 24 - Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa
- ISAK No. 25 - Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 Penilaian Uang Derivatif Melekat

Bank dalam proses melakukan evaluasi terhadap dampak yang akan timbul dari penerapan revisi standar ini terhadap Laporan Keuangan.

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Bank sehubungan dengan implementasi dari standar akuntansi baru dalam adalah sebagai berikut :

Perubahan atas implementasi PSAK No. 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 adalah laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, cacatan atas laporan keuangan dan penambahan laporan posisi keuangan yang menunjukkan saldo awal (dalam hal terjadi reklasifikasi dan penyajian kembali). Sedangkan sebelumnya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI HUTANG/MODAL

Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi hutang/modal.

DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

Bank tidak menghadapi risiko pasar atas perubahan tingkat suku bunga dan atau atas penggunaan instrument derivatif sehubungan dengan aktivitas manajemen risiko. Bank tidak menggunakan atau menerbitkan instrument derivatif untuk tujuan diperdagangkan.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak ada informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan.

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

Selama tahun 2012, Bank Indonesia telah menyatakan untuk menurunkan suku bunga Bank Indonesia sebesar 0,25% lebih rendah dari suku bunga sebelumnya. Suku bunga Bank Indonesia merupakan standar tarif untuk menghitung beban pokok pendapatan bunga. Oleh karena itu, dengan penurunan suku bunga Bank Indonesia, beberapa tingkat bunga untuk sumber pendanaan Bank, antara lain suku bunga untuk pinjaman yang diberikan sehingga berpengaruh terhadap beban pokok pendapatan bunga.

Selama tahun 2012, Bank Sulselbar telah mengelola dengan baik tingkat suku bunga untuk produk kredit dan telah menetapkan tingkat bunga yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai hasil, selama tahun 2012, marjin bunga bersih (NIM) lebih rendah dari margin yang diakui pada tahun 2011. Margin bunga bersih menurun dari 10,18% menjadi 9,53%. Namun, meskipun margin bunga lebih rendah, Bank masih mampu mempertahankan marjin bunga di atas 5% sesuai dengan target internal marjin bunga bersih. Selain itu, Bank telah berhasil meningkatkan jumlah pelanggan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset dari Rp7.290.471 juta menjadi Rp8.014.158 juta pada tahun 2012 dan pertumbuhan simpanan dari Rp5.291.083 juta menjadi Rp5.401.642 juta di tahun 2012.

DEVIDEN

Kebijakan pembagian deviden Bank Sulselbar yaitu membayarkan deviden tunai sebesar 60% dari laba bersih setiap tahunnya yang besarnya diputuskan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi DIreksi. Keputusan untuk membayar dividen tergantung pada laba, kondisi keuangan dan likuiditas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Bank Sulselbar setelah memperoleh persetujuan RUPS.

Deviden kepada pemegang saham akan dibagikan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai pemegang saham menurut perbandingan besarnya modal yang telah disetor sampai dengan akhir tahun buku yang bersangkutan.

Selama tahun 2012, Bank Sulselbar telah membagikan deviden tunai sebesar Rp152.093.201.298,67,- sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan tanggal 22 Mei 2012. Deviden tunai tersebut dihitung berdasarkan pencapaian kinerja keuangan Bank Sulselbar per 31 Desember 2011. Jumlah deviden per saham pada tahun 2012 sebesar Rp312.001.

Kebijakan Dividen

Tahun Buku	Jumlah Deviden	Deviden Per Lembar Saham	Rasio Deviden	Tanggal Pembayaran
	Rp			
2011	152.093.201.298,67	312.001	60% dari laba bersih tahun 2011	26 Juni 2012
2010	145.858.149.487,80	311.622	60% dari laba bersih tahun 2010	01 Juli 2011
2009	118.600.678.300,52	265.227	60% dari laba bersih tahun 2009	20 Mei 2010

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PERBANDINGAN PROYEKSI DENGAN HASIL YANG DICAPAI

Pada tahun 2012, Bank telah mengelola dengan baik tingkat bunga Bank atas produk kredit Bank, dengan tujuan menciptakan tingkat bunga yang terjangkau dan menarik lebih banyak nasabah. Oleh karena itu, pendapatan bunga Bank pada 31 Desember 2012 sebesar Rp1.096.743 juta atau pencapaiannya 90,63% dari proyeksi tahun 2012 secara tidak signifikan. Di samping itu, Bank juga berhasil mengelola marjin bunga bersih agar selalu di atas 5%, yang mengakibatkan pendapatan bunga bersih menjadi pencapaiannya sebesar 106,58% dari proyeksi keuangan tahun 2012. Sebagai hasil dari efisiensi biaya untuk operasional Bank, laba bersih setelah pajak diperoleh sebesar 101,25% dari target 2012 dengan realisasi sebesar Rp276.466 juta.

Sebagai hasil dari pengelolaan tingkat bunga yang baik, Bank telah berhasil meningkatkan nasabahnya dimana Bank mencapai total aset 85,66% dari target aset tahun 2012. Pertumbuhan aset didukung dengan pertumbuhan kewajiban yang merupakan sumber pendanaan sehingga pencapaian target kewajiban tahun 2012 sebesar 86,90%. Di samping itu, karena pencapaian laba bersih yang memuaskan, total pencapaian target ekuitas sebesar 79,42% pada tahun 2012.

Perbandingan Proyeksi dan Realisasi

	Tahun 2012		Pencapaian
	Realisasi	Proyeksi	
	Rp Juta		(%)
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Bunga	1.096.743	1.210.095	90,63%
Beban Bunga	358.471	517.378	69,29%
Pendapatan Bunga Bersih	738.272	692.717	106,58%
Laba Sebelum Pajak	376.631	364.056	103,45%
Laba Bersih Setelah Pajak	276.466	273.042	101,25%
Laporan Posisi Keuangan			
Jumlah Assets	8.014.158	9.355.710	86,66%
Jumlah Kewajiban	6.780.049	7.801.783	86,90%
Jumlah Ekuitas	1.234.109	1.553.927	79,42%
Giro Konvensional	1.940.305	2.651.210	73,19%
Tabungan Konvensional	1.395.944	1.178.316	118,47%
Deposito Konvensional	1.826.220	2.209.053	82,67%
	5.162.469	6.038.579	85,49%

	Tahun 2012		Pencapaian
	Realisasi	Proyeksi	
	Rp Juta		(%)
Giro UUS	9.427	7.900	119,33%
Tabungan UUS	44.478	54.024	82,33%
Deposito UUS	185.268	198.522	93,32%
	239.173	**260.446**	**91,83%**
Total Giro	1.949.732	2.659.110	73,32%
Total Tabungan	1.440.422	1.232.340	116,89%
Total Deposito	2.011.488	2.407.575	83,55%
	5.401.642	**6.299.025**	**85,75%**
Kredit Yg Diberikan	5.744.496	5.832.669	98,49%
Pembiayaan	370.557	411.456	90,06%
Total Kredit & Pembiayaan	**6.115.053**	**6.244.125**	**97,93%**

TARGET KEUANGAN TAHUN 2013

Dengan mengikuti kinerja keuangan tahun 2012 yang berhasil mencapai hasil yang memuaskan, manajemen Bank telah mempersiapkan target yang hendak dicapai pada tahun 2013, yang terdiri dari :

- Total aset tahun 2013 meningkat 34,51% lebih tinggi dari hasil tahun 2012. Sama seperti tahun 2012, peningkatan ini disebabkan sebagian besar oleh peningkatan kredit yang mencapai 22,53% dari total penyaluran kredit dan pembiayaan tahun 2012.
- Pendapatan bunga tahun 2013 ditargetkan agar meningkat 27,48% dari perolehan pada tahun 2012.
- Target Laba bersih tahun 2013 meningkat 5% lebih tinggi dari hasil laba bersih selama tahun 2012.

Manajemen dan Bank berkomitmen dengan target 2013 untuk meraih pertumbuhan aset yang berdampak pada pertumbuhan kapasitas bisnis Bank, sehingga Bank dapat meraih keberhasilan atas visi dan misi Bank dan menjadi *regional champion*.

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen Bank Sulselbar dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dengan membubuhkan tanda tangannya masing – masing di bawah ini.

Dewan Komisaris

H.A. MUALLIM
Komisaris Utama

H. A. TJONENG MALLOMBASANG
Komisaris Independen

N. IKAWIDJAYA
Komisaris Independen

Laporan Tahunan ini berikut laporan keuangan dan informasi lain yang terkait, merupakan tanggung jawab Manajemen Bank Sulselbar dan telah disetujui oleh seluruh Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing – masing di bawah ini.

Dewan Direksi

ELLONG TJANDRA
Direktur Utama

H. YANUARFACHRUDIN
Direktur Umum

H. A. MUHAMMAD RAHMAT
Direktur Pemasaran

H. HARRIS SALENG
Direktur Kepatuhan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 5

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility akan membawa konsekuensi logis bagi keberadaan Perseroan di lingkungan masyarakat yang akan mendorong Bank Sulselbar menjadi lebih proaktif mengambil inisiatif dalam melaksanakan kegiatan CSR.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Bank Sulselbar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya selain berorientasi pada profit atau keuntungan untuk kelangsungan bisnis, juga tetap memperhatikan pembangunan lingkungan sosial ekonomi sebagai bentuk kepedulian Bank Sulselbar dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan di sekitar wilayah operasionalnya.

Bank Sulselbar berkomitmen untuk secara berkesinambungan dan berkelanjutan bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi, kebersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan maupun komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. Upaya tersebut dilakukan Bank Sulselbar melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Corporate Social Responsibility (CSR) bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kepentingan manajemen dengan *stakeholder*s dan mendorong agar Perseroan lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga pada akhirnya akan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mengembalikan sebagian keuntungan kepada masyarakat melalui bantuan CSR, Perseroan meyakini bahwa masyarakat akan senantiasa memberikan dukungan bagi kelangsungan Bank Sulselbar. Program CSR yang dilakukan Bank Sulselbar mengacu pada strategi yang terorganisir dan berkesinambungan guna mewujudkan kualitas lingkungan sosial ekonomi di sekitarnya menjadi lebih baik. Fokus program CSR Bank Sulselbar adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang pada akhirnya akan melahirkan kemapanan masyarakat serta serta meningkatkan kemampuan adaptasi perseroan terhadap lingkungan sekitar.

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2009, manajemen dan para pemegang saham Bank Sulselbar telah menyepakati untuk mengalokasikan sebagian profit Bank untuk Dana *Corporate Social Responsibility*.

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM CSR BANK SULSELBAR

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 1 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Pasal 74

Ayat 1 : Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Ayat 2 : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negera dengan usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Pasal 1

No. 6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

No. 7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pasal 9

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program BL bersumber dari :

a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen);
b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

c. **Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peaturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum**

d. **Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**
Pasal 2
Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.

e. **Akta Hasil Rapat Umum Pemegang Saham No : 60 tanggal 30 April 2010**
"Persetujuan penyisihan Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* 2,5% dari laba bersih tahun sebelumnya"

f. **Akta Hasil Rapat Umum Pemegang Saham No : tanggal 02 Desember 2011**
"Alokasi Dana CSR berdasarkan plafon yang dicadangkan"

g. **Surat Dewan Komisaris Nomor SR/ 121/DK-BPDSS/9/2010 Tanggal 22 September 2010**
"Terkait penggunaan dana CSR yang mencakup penyusunan arah/sasaran, kriteria dan bentuk kegiatan lainnya agar dibahas bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris...."

Program CSR Bank Sulselbar dalam rangka pemberdayaan masyarakat pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 066/DIR/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 tentang Pengelolaan Dana *Corporate Social Responsibility* PT Bank Sulselbar.

MANFAAT

Corporate Social Responsibility akan membawa konsekuensi logis bagi keberadaan Perseroan di lingkungan masyarakat yang akan mendorong Bank Sulselbar menjadi lebih proaktif mengambil inisiatif dalam melaksanakan kegiatan CSR. Hal ini akan berdampak pada reputasi dan pencitraan positif terhadap perseroan dan terciptanya lingkungan yang harmonis antara Perseroan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Sulselbar.

- **Manfaat bagi Perseroan**
Program CSR akan menciptakan citra positif dari masyarakat terhadap keberadaan Bank Sulselbar. Aktivitas perseroan dalam jangka panjang senantiasa akan dianggap sebagai kontribusi yang positif bagi masyarakat di sekitarnya sekaligus membantu perekonomian masyarakat. Dengan demikian, Bank Sulselbar akan memperoleh respon dan penerimaan yang sangat baik setiap kali akan menawarkan sesuatu yang baru kepada masyarakat dan masyarakat pun akan menganggap Bank Sulselbar membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

- **Manfaat bagi Masyarakat**
Aktivitas CSR Bank Sulselbar akan membentuk hubungan kemitraan yang sangat baik antara Perseroan dengan Bank Sulselbar, yang tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial kemasyaratan, kesehatan, kerohanian, pendidikan, pembangunan dan lain – lain.

- **Manfaat bagi Pemerintah**
Pemerintah sebagai pihak yang mendapat legitimasi untuk mengubah tatanan masyarakat ke arah yang lebih baik akan mendapatkan mitra dalam mewujudkan tatanan masyarakat tersebut. Sebagian tugas pemerintah dapat dijalankan oleh anggota masyarakat, dalam hal ini oleh perseroan (Bank Sulselbar).

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Program CSR merupakan pendekatan yang mensinergikan CSR dengan strategi perseroan secara keseluruhan. Sinergi ini dicapai ketika perseroan memberi kontribusi pada lingkungan sosialnya sesuai dengan *core competency* dan memberikan keuntungan bagi perseroan. Atau dengan kata lain CSR adalah bagian dari strategi perseroan guna mencapai tujuan untuk meningkatkan profit.

Program CSR akan memperkuat keberlanjutan perseroan dengan membangun partnership antar *stakeholder* yang difasilitasi perseroan dengan menyusun program-program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan kemampuan perseroan untuk beradaptasi dengan lingkungannya, komunitas dan *stakeholder*, baik lokal maupun nasional. Karenanya pengembangan CSR Bank Sulselbar ke depannya akan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA CSR

Untuk mendukung pelaksanaan CSR sebagai program yang mendukung kelangsungan dan keberlanjutan bisnis Bank Sulselbar, maka telah ditunjuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kegiatan CSR Perseroan yaitu Departemen Komunikasi dan Humas yang berada di bawah koordinasi Grup *Corporate Secretary*.

Fungsi pokok dan aktivitas Departemen Komunikasi dan Humas yang berkaitan langsung dengan pengelolaan CSR sebagai berikut :

- Menyusun program/rencana kerja pelaksanaan CSR/ Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan memastikan bahwa pelaksanannya telah selaras dengan *corporate objective* yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur dan berkelanjutan serta mampu meningkatkan *corporate image* dan *corporate bussiness* secara maksimal.
- Mengkomunikasikan dan mensosialisasikan Program CSR kepada masyarakat dan *stakeholder* lainnya.
- Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep dan strategi CSR serta langkah perbaikannya.

Selain itu, pengelolaan CSR Bank Sulselbar yang dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Humas juga bekerjama dengan Tim Pengelolaan CSR yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi. Tugas Tim Pengelolaan CSR Bank Sulselbar antara lain membahas dan atau mengkaji serta me-*review* eligibilitas Program CSR yang telah disusun pada Grup *Corporate Secretary* (Departemen Komunikasi dan Humas) untuk pelaksanaannya oleh Departemen Komunikasi dan Humas. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan *control and balancing* dalam implementasi Program CSR agar tepat sasaran.

KRITERIA PENYALURAN CSR

Dana CSR dapat disalurkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat umum
2. Memberi nilai tambah bagi pihak yang diberi bantuan
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
4. Dapat meningkatkan *corporate image* Bank Sulselbar
5. Khusus bantuan kepada UKM, yang mempunyai potensi dan prospek usaha yang dapat dikembangkan
6. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik
7. Mendukung program pemerintah

PROGRAM KEGIATAN

Program Kegiatan CSR Bank Sulselbar terdiri dari 2 (dua) kategori sebagai berikut :

I. Bantuan Langsung

Yakni penyaluran dana CSR secara langsung kepada penerima, baik dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk barang, dimana bantuan tersebut tidak diharapkan pengembalian. Kegiatan CSR melalui bantuan langsung terdiri dari :

1. Bidang Sosial, meliputi :
   a. Bantuan korban bencana banjir
   b. Bantuan korban bencana kekeringan
   c. Bantuan korban kebakaran
   d. Bantuan korban angin topan
   e. Bantuan pengobatan untuk masyarakat kurang mampu

2. Bidang Kesehatan, meliputi antara lain :
   a. Pemberian Sarana Kesehatan (Alat Medis, Mobil Ambulance dll)
   b. Pengobatan Umum
   c. Khitanan massal
   d. Kegiatan Donor Darah

3. Bidang Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum, antara lain :
   a. Perbaikan/pembangunan sarana ibadah, sarana kesehatan
   b. Perbaikan/pembangunan sarana jalan dan jembatan
   c. Program Penghijauan, Pengelolaan air dan Penyehatan Lingkungan

4. Bidang Pendidikan
   a. Program beasiswa/anak asuh
   b. Bantuan sarana pendidikan : perbaikan/ pembangunan sekolah/pesantren
   c. Bantuan perpustakaan sekolah
   d. Bantuan pelatihan keterampilan dll

5. Bidang Program Bina Lingkungan
   Yakni penyaluran dana CSR kepada perorangan dalam bentuk bantuan modal maupun bantuan barang/ peralatan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup penerima tanpa kwajiban untuk pengembalian dana kepada bank, antara lain kegiatan kewirausahaan.

II. Program Kemitraan
Yakni penyaluran dana CSR kepada perorangan maupun kelompok, baik dalam bentuk bantuan modal maupun bantuan barang/peralatan yang akan dikelola oleh penerima dan akan dikembalikan ke bank menurut ketentuan yang disepakati. Kegiatan program kemitraan meliputi :
1. Pembinaan Usaha Mikro
2. Pembukaan Lapangan Kerja
3. Sarana dan Prasarana Ekonomi

PRINSIP PELAKSANAAN CSR

Prinsip – prinsip pelaksanaan Program CSR sebagai berikut :

1. *Sustainability* (Keberlanjutan)
   Pelaksanaan Program CSR dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk terus bertumbuh dan tetap berpihak kepada masyarakat sebagai sasaran program. CSR yang berkelanjutan selain memberi manfaat bagi masyarakat, juga bagi Perseroan yang melaksanakan program CSR melalui proses yang konsisten dan berjangka panjang sehingga akan menciptakan inovasi untuk menghasilkan bisnis yang berorientasi jangka panjang. Dengan demikian, eksistensi bisnis tetap terjaga dengan baik yang sekaligus berperan aktif di dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna bagi komunitas disekitarnya.

   Indikator prinsip *sustainability* sebagai berikut :
   a. Ketersediaan Sumber Daya
      Ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan Program CSR mencakup ketersediaan sumber daya manusia (SDM) berupa unit kerja atau tim yang menangani pelaksanaan Program CSR dan sumber daya modal berupa sumber dana yang akan disalurkan untuk pelaksanaan Program CSR.

   b. Komitmen dan Dukungan
      Komitmen dan dukungan memiliki peran penting untuk keberlanjutan implementasi Program CSR. Untuk menjaga keberlanjutan Program CSR, diperlukan dukungan dari seluruh lapisan manajemen baik di kantor pusat maupun kantor cabang.

      Komitmen, terutama dari pejabat pembuat kebijakan diperlukan untuk tetap menjaga keberlangsungan Program CSR, yakni sumber pendanaan yang disiapkan untuk masing-masing kantor cabang sebagai tempat pelaksana penyaluran Program CSR/dana kemitraan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham. Oleh karena itu komitmen dan dukungan dari setiap lapisan manajemen sangat penting untuk mendorong peningkatan Program CSR menjadi lebih baik.

   c. Keterlibatan Masyarakat
      Wujud keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan CSR khususnya hasil dari Program CSR juga merupakan faktor pendorong terwujudnya Program CSR yang berkelanjutan (*sustainable*). Wujud keterlibatan masyarakat yaitu masyarakat sebagai salah satu pelaksana program CSR dan masyarakat sebagai pengelola hasil Program CSR.

      Keterlibatan masyarakat sebagai pelaksana program CSR berupa kerja sama dengan pihak ketiga. Adapun keterlibatan masyarakat sebagai pengelola hasil program CSR melalui upaya pengembangan sarana dan prasarana yang diberikan Bank Sulselbar kepada masyarakat untuk dikelola demi kepentingan masyarakat itu sendiri.

      Implementasi prinsip *sustainability* pada pelaksanaan program CSR melalui penyediaan dana untuk disalurkan; Komitmen dan Dukungan dari setiap lapisan manajemen, baik kantor pusat maupun kantor cabang; dan turut sertanya masyarakat dalam mengelola hasil program CSR itu sendiri. Dengan demikian, tujuan Program CSR untuk pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)
   Accountability dalam Program CSR adalah upaya untuk tetap terbuka dan bertanggung jawab atas segala aktivitas CSR yang telah diselenggarakan. Indikator prinsip *Accountability* sebagai berikut :

a. Sarana Penilaian Masyarakat

Pelaksanaan Program CSR dengan sasaran program adalah masyarakat, maka diperlukan sarana yang dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menilai/ mengevaluasi manfaat Program CSR bagi mereka. Penilaian tersebut dapat menjadi sumber masukan yang baik guna peningkatan kualitas Program CSR yang lebih baik dan berkelanjutan.

b. Informasi Penyelenggaraan

Penyebaran informasi memiliki peran penting untuk mendukung pelaksanaan Program CSR dengan menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang Program CSR dan informasi laporan tentang pelaksanaan Program CSR di masyarakat.

Keterbukaan informasi pun tidak hanya ditujukan bagi masyarakat tetapi juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan misalnya kepada pemegang saham.

c. Audit Sosial

Audit sosial merupakan bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan Perseroan setelah melaksanakan Program CSR untuk mengukur tingkat keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui Program CSR.

3. *Transparency* (Transparansi/Keterbukaan)

Transparency memiliki keterkaitan langsung dengan informasi keuangan dan laporan pertanggungjawabannya kepada semua pihak baik itu internal maupun eksternal. Indikator prinsip *Transparency* sebagai berikut :

a. Pelaporan

Laporan kegiatan pelaksanaan suatu program kepada semua pihak yang berwenang merupakan bagian dari upaya perseroan yang menjunjung tinggi sikap transparansi. Pelaporan Program CSR memiliki peran strategis dalam menginisiasi opini *stakeholder* untuk meningkatkan reputasi secara nyata.

b. Audit Keuangan

Pelaksanaan Program CSR dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan atau audit keuangan untuk mengetahui sumber dana dan penggunaannya.

Penggunaan dana CSR setiap tahun diaudit oleh internal audit Bank Sulselbar dan akuntan publik untuk mengavaluasi pencapaian penggunaan dana CSR terhadap anggaran CSR yaitu sebesar 2,5% dari laba bersih tahun sebelumnya.

PROGRAM CSR

Pelaksanaan Program CSR Bank Sulselbar terbagi dalam 4 (empat) program utama, sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dilakukan sebagai upaya terpadu untuk memanfaatkan sumber daya secara bijaksana untuk diolah secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan melalui kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama, pelatihan dan pengembangan pegawai.

c. Tanggung jawab terhadap nasabah

Tanggung jawab terhadap pelanggan/konsumen dilakukan melalui beberapa program yaitu edukasi perbankan dan pengaduan nasabah.

d. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Pengembangan sosial kemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu program pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, sosial kemasyarakatan atau pembinaan hubungan dengan masyarakat.

PENGGUNAAN DANA CSR BANK SULSELBAR TAHUN 2012

Penggunaan dana CSR Bank Sulselbar per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.147.870.500,- meliputi kegiatan antara lain, yaitu kesehatan, sosial & pendidikan, pelestarian alam & lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana umum dan program kemitraan. Penyaluran dana untuk kegiatan CSR dilakukan secara proporsional, menyeimbangkan antara program yang direncanakan dengan permohonan diterima, sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar lingkungan operasional perseroan.

Dana Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Bank Sulselbar Tahun 2012

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah
1	Bantuan Kesehatan	1.474.322.000
3	Bantuan Sosial & Pendidikan	110.000.000
4	Bantuan Pelestarian Alam/ Lingkungan	377.895.000
5	Bantuan Pengembangan Sarana & Prasarana umum	1.135.653.500
6	Kemitraan	50.000.000
Total		**3.147.870.500**

Pelaksanaan Program CSR Bank Sulselbar Tahun 2012

Selama tahun 2012 Bank Sulselbar telah menyalurkan dana untuk Program CSR sebesar Rp3.148 juta. Dana CSR tersebut hanya sekitar 49% dari anggaran CSR yang disisihkan untuk Program CSR tahun 2012 yaitu sebesar 2,5% dari laba bersih tahun 2011 atau sejumlah Rp6.362 juta. Penyisihan laba bersih perseroan untuk alokasi penggunaan Dana CSR tahun 2012 telah disetujui pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

Program CSR Bank Sulselbar tahun 2012 rangkaian kegiatannya sebagai berikut :

a. Lingkungan Hidup

Kegiatan CSR pada bidang lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar adalah kampanye "Bank Sulselbar Peduli Lingkungan". Pada kegiatan Bank Sulselbar Peduli Lingkungan, Bank Sulselbar telah melakukan berbagai kegiatan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti penghijauan taman Kota Luwu, pemberian gerobak dan sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah, serta bantuan pengadaan tempat sampah.

Di samping itu, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dari sisi internal Bank Sulselbar yaitu dengan berupaya untuk menerapkan konsep *green office* yang bertujuan agar gedung dan seluruh ruangan kantor serta tamu yang berkunjung ke Bank Sulselbar senantiasa peduli terhadap penghematan energi melalui kegiatan yang ramah lingkungan. *Green office* mencerminkan kebijaksanaan Perseroan yang senantiasa berupaya menciptakan lingkungan kerja kantor yang bersih, indah, nyaman dan sehat serta tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. *Green office* Bank Sulselbar pengelolaannya masih dilakukan dengan cara yang sederhana tapi senantiasa diupayakan untuk dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan.

Konsep *green office* merupakan salah satu langkah nyata meningkatkan efesiensi untuk mengoptimalkan pencapaian profit. Dengan implementasi *green office,* banyak hal yang dapat dikelola dengan lebih efisien, baik dari aspek finansial maupun dalam bentuk penghematan pemakaian sumber daya alam dan pengurangan pencemaran.

Aktivitas *green office* yang telah dilaksanakan Bank Sulselbar tahun 2012 dan berdampak secara langsung terhadap efisiensi antara lain :

- Membeli dan menggunakan peralatan dan atau alat tulis kantor yang ramah lingkungan
- Mengaktifkan *setting energy saver* atau hemat energi dalam penggunaan komputer dan alat elektronik lainnya
- Menggunakan alat komunikasi elektronik selain menggunakan kertas (*e-mail*)
- Menggunakan pencetakan draft dengan kertas yang masih kosong di salah satu sisinya untuk setiap konsep surat atau laporan yang ditulis sebelum menjadi surat atau laporan final untuk menghemat penggunaan tinta, toner dan kertas serta mengurangi limbah kertas, tinta dan toner yang tidak terpakai
- Penggunaan pendingin udara (AC) sesuai dengan kebutuhan
- Efisiensi penggunaan air
- *Reduce, reuse* dan *recycle* barang – barang yang dipergunakan

Green office yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap efisiensi perseroan antara lain :

- Dengan menggunakan kertas, tinta dan toner yang ramah lingkungan akan mengurangi limbah yang menumpuk jadi sampah
- Penggunaan kertas daur ulang dapat mengurangi jumlah pohon yang ditebang sehingga dapat mengurangi pemanasan global
- *Green office* akan mempengaruhi seluruh pegawai, baik langsung maupun tidak langsung, untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari - hari, baik di kantor, di rumah dan dimana pun mereka berada.

b. Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Bank Sulselbar berpedoman pada Kebijakan Dasar Pengelolaan SDM yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 002/PD-PT. Bank Sulsel/XI/2008. Di samping itu, Nilai – Nilai Perusahaan yang dikenal dengan PRIORITAS PRIMA berfungsi sebagai *code of conduct* atau panduan perilaku bagi seluruh pegawai dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi perseroan.

Untuk kegiatan CSR di bidang kesehatan, Bank Sulselbar mengadakan kegiatan antara lain pembangunan Kamar Mandi dan Kakus Umum pada daerah kumuh dan desa – desa tertinggal, pemberian bantuan mobil ambulance kepada Rumah Sakit Daerah di Kabupaten/Kota dan Provinsi di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Khusus kegiatan CSR yang menyangkut ketenagakerjaan dan keselamatan kerja di lingkungan internal Bank Sulselbar yaitu seluruh Pegawai Bank Sulselbar baik tetap, kontrak dan *outsourcing* telah dilindungi oleh Asuransi Tenaga Kerja dari JAMSOSTEK.

Kesamaan Hak dan Kesempatan Kerja Yang Sama

Bank Sulselbar memberikan kesempatan yang sama dan setara kepada seluruh pegawai dalam mengembangkan karir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan gender, golongan, suku, agama, ras, dan kondisi fisik. Setiap pegawai yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk menduduki posisi atau jabatan yang lebih tinggi setelah melalui tahapan seleksi yang keputusannya menjadi kewenangan manajemen.

Sistem Informasi Manajemen SDM

Dalam rangka pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik dan terintegrasi, maka Grup SDM Bank Sulselbar saat ini dalam proses pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen SDM berbasis kompetensi yakni *Human Resources Information System* (HARIS).

Pengembangan SDM

Kompetensi dan produktivitas pegawai senantiasa menjadi fokus Bank Sulselbar untuk terus ditingkatkan demi mendukung kelangsungan bisnis dan pencapaian target perusahaan yang optimal. Selain itu, lingkungan kerja yang sehat juga memiliki peran penting guna memotivasi pegawai untuk terus memberikan sumbangsih yang terbaik yang dimilikinya bagi perusahaan.

Program Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Tahun 2012

Program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Bank Sulselbar bertujuan untuk membentuk, mempersiapkan, membina, dan meningkatkan kompetensi serta kualitas pegawai secara berkesinambungan. Untuk itu, pendidikan dan pelatihan memiliki peran penting yang tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, tetapi juga meningkatkan produktivitas kerja.

Tingkat *Turn Over*

Selama tahun 2012, dari 1.074 pegawai tetap Bank Sulselbar, terdapat 1 orang pegawai yang mengundurkan diri. Berdasarkan angka ini, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat *turnover* Bank Sulsebar hanya sebesar 0,1%. Lingkungan kerja yang kondusif dengan suasana kerja yang sehat dan nyaman menjadi alasan rendahnya tingkat turnover Bank Sulselbar selama tahun 2012. Dan ke depannya, Bank Sulselbar terus berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang dapat mendukung seluruh pegawai untuk bekerja dan berkontribusi lebih optimal bagi perusahaan.

c. Tanggung jawab terhadap nasabah

Komitmen Bank Sulselbar untuk melaksanakan tanggung jawab perlindungan terhadap nasabah melalui pengaduan nasabah dan edukasi perbankan.

Pengaduan Nasabah

Pengaduan nasabah merupakan wujud komitmen untuk meningkatkan perlindungan kepada nasabah dalam rangka menjamin hak – hak nasabah dalam berhubungan dengan bank dan pengelolaannya dijalankan secara konsisten untuk meminimalisir potensi risiko reputasi yang dapat berdampak pada kepercayaan dan loyalitas nasabah.

Mekanisme pengaduan nasabah berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Pengelolaan dan penanganan pengaduan nasabah dilakukan dengan membentuk unit dan atau fungsi khusus yang berfungsi untuk menerima setiap pengaduan yang diajukan nasabah terkait dengan transaksi yang dilakukan nasabah. Unit kerja pengaduan nasabah Bank Sulselbar yakni Departemen Pengenalan Nasabah pada Kantor Pusat dan Unit Khusus Pengaduan Nasabah (UKPN) pada Kantor Cabang. Pembentukan unit kerja tersebut juga untuk menjamin bahwa seluruh pengaduan nasabah dapat terselaikan secara efektif dan sesuai ketentuan.

Pengaduan nasabah yang diterima Bank Sulselbar selama tahun 2012 sebagai berikut :

Pengaduan Nasabah Bank Sulselbar Tahun 2012 berdasarkan Kategori Permasalahan

No.	Jenis Produk	Jumlah						Jumlah
		Bunga/Bagi Hasil/Margin Keuntungan	Denda/ Pinalti	Biaya Adm./ Provisi/ Transaksi	Kegagalan/ Keterlambatan Transaksi	Jumlah Tagihan/ Saldo Rekening	Lain-Lain	
1.	Penghimpunan Dana	-	-	-	-	-	82	82
2.	Penyaluran Dana	-	-	-	-	-	-	-
3.	Sistem Pembayaran	-	-	-	960	-	600	1.560
4.	Produk Kerjasama	-	-	-	-	-	-	-
5.	Produk Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
								1.642

Edukasi Perbankan

Program edukasi perbakan yang diselenggarakan Bank Sulselbar bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai layanan produk dan jasa Bank Sulselbar. Edukasi perbankan Bank Sulselbar tahun 2012 melibatkan nasabah dan masyarakat dengan kegiatan :

1. *Customer Gathering* dengan *prime customer* dan prospek nasabah potensial Bank Sulselbar
2. Melaksanakan Program Hari RABU (Hari RAjin MenaBUng) yang merupakan keberlanjutan dari Gerakan Indonesia Menabung yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sejak tahun 2010. Program Hari RABU bertujuan mengingatkan masyarakat untuk menabung paling kurang satu kali dalam satu bulan yaitu pada hari Rabu di awal bulan. Dan setiap Rabu, perbankan nasional akan melakukan aktivitas untuk mengingatkan masyarakat agar menabung. Program Hari RABU melibatkan seluruh kantor cabang Bank Sulselbar dengan kegiatan antara lain sosialisasi kegiatan Gemar Menabung pada lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah, dan intansi – instansi pemerintah yang dilaksanakan setiap hari rabu.

Sosialisasi *Know Your Customer* (KYC)

Sosialisasi *Know Your Customer* (KYC) dilakukan dengan memasang poster Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang bertema "Kalau Bersih Kenapa Harus Risih" di seluruh kantor cabang Bank Sulselbar. Sosialisasi *Know Your Customer (KYC)* ini untuk mendukung kampanye Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sebagai salah satu upaya untuk mencegah pemanfaatan produk/jasa bank oleh pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak kejahatan.

Simpanan Nasabah Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Untuk menciptakan rasa aman bagi nasabah khususnya terhadap simpanan mereka pada Bank Sulselbar, maka seluruh simpanan nasabah Bank Sulselbar dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan maksimal simpanan sebesar Rp2 Miliar.

d. Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

Kegiatan CSR pada pengembangan sosial dan kemasyaratan, CSR yang dilakukan oleh Bank Sulselbar antara lain dengan memberikan bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok untuk korban kebakaran pada beberapa wilayah di Kota Makassar dan korban bencana alam yaitu banjir di Kabupaten Maros, Pangkep, Jeneponto dan Kelurahan Antang di Makassar.

Di samping itu, kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan yang diselenggarakan Bank Sulselbar juga untuk mendukung peningkatan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat antara lain melalui kegiatan Program Bina Lingkungan dan Kemitraan.

Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan Bank Sulselbar ditujukan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional Bank Sulselbar. Cakupan kegiatan Program Bina Lingkungan meliputi pemberian bantuan untuk bencana alam, bantuan prasarana umum, bantuan kesehatan masyarakat, serta bantuan pelestarian alam.

Program Bina Lingkungan fokus pada pengembangan masyarakat dengan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

Program Bina Lingkungan Bank Suslelbar penyalurannya lebih diutamakan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan Bank Sulselbar dapat optimal dan berdampak panjang bahkan diharapkan dapat berkesinambungan, sehingga dapat menjadi stimulus untuk peningkatan perekonomian daerah.

Di samping itu, Bank Sulselbar juga sangat terbuka terhadap berbagai masukan yang antara lain bersumber dari berita media massa,informasi – informasi dari instansi pemerintah daerah, dan proposal – proposal kerja sama.

Bidang Kemitraan

Program kemitraan Bank Sulselbar yakni program kerjasama kelembagaan antara Bank Sulselbar melalui pinjaman yang disalurkan kepada Mitra Binaannya dan atau dana untuk program pendampingan serta pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi tangguh dan mandiri.

Program kemitraan Bank Sulselbar pada tahun 2012 yakni berupa bantuan permodalan untuk Industri Gula Merah Tradisional di Kab. Bulukumba dengan jumlah bantuan sebesar Rp50.000.000,-.

BAB 6

RENCANA STRATEGIS (PROSPEK USAHA, KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN STRATEGI

Industri perbankan Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan bertumbuh sekitar 20% yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kelas menengah (*middle income group*) yang menjadi potensi pasar *consumer banking* yang sangat kuat dan berdampak pada peningkatan kredit konsumsi.

PROSPEK USAHA

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 diproyeksikan lebih baik dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan perkiraan peningkatan gradual dari kinerja ekonomi dunia. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 6,3% -6,8% dengan proyeksi inflasi sebesar 4,5+1%. Sampai dengan Triwulan I tahun 2013, perekonomian Indonesia diperkirakan stabil pada level 6,2% (y.o.y) yang didorong oleh prospek pemulihan kinerja eksternal dan permintaan domestik yang tetap kuat.

Permintaan domestik diperkirakan akan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan, baik konsumsi maupun investasi. Peningkatan volume ekspor yang ditunjang dengan tingkat harga yang lebih baik akan menyebabkan kontribusi eksternal meningkat dibandingkan tahun 2012. Dari sisi lapangan usaha, sektor – sektor utama yakni sektor industri pengolahan dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 6,4% - 6,9%; sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang diproyeksikan tumbuh sekitar 7,7% - 8,2%; serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,2% - 10,7% diperkirakan masih akan mendominasi perkembangan perekonomian nasional. Secara umum, perkembangan sektor – sektor akan membaik seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian domestik dan global.

Pada tahun 2013, konsumsi rumah tangga diperkirakan bertumbuh kuat pada kisaran 5,8% - 6,3%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya pendapatan masyarakat dan inflasi yang relatif terkendali sehingga meningkatkan optimisme dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat antara lain dipengaruhi oleh kenaikan UMP (upah minimum propinsi) di November 2012 yang mulai berlaku pada beberada provinsi meskipun dengan besaran yang berbeda – beda sesuai dengan tingkat inflasi dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada masing – masing provinsi tersebut. Selain UMP, pendapatan pegawai baik swasta maupun aparat negara juga diperkirakan akan meningkat. Selain itu, pemerintah pada tahun 2013 juga akan menaikkan batas pendapatan Tidak Kena Pajak (TKP) menjadi Rp24 juta per tahun. Kebijakan tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengeluaran dalam bentuk konsumsi dan investasi.

Investasi pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh 10,2% - 10,7%. Peningkatan tersebut didasari pada tren pertumbuhan konsumsi rumah tangga domestik yang menguat serta prospek kinerja ekspor ke depan yang membaik. Selain itu, perkiraan peningkatan investasi juga didukung oleh adanya alokasi belanja modal pemerintah yang lebih tinggi, relatif rendahnya suku bunga dan membaiknya iklim usaha domestik.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 diprediksikan mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2012. Kisaran pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan tahun 2013 diperkirakan sebesar 7,8% - 8,4%. Indikator penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan untuk dapat meningkat secara gradual yaitu iklim investasi, stabilitas keamanan, sosial dan politik daerah yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Industri perbankan Indonesia pada tahun 2013 diperkirakan akan bertumbuh sekitar 20% yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kelas menengah (*middle income group*) yang menjadi potensi pasar *consumer banking* yang sangat kuat dan berdampak pada peningkatan kredit konsumsi. Di samping itu, sektor infrastruktur terkait Program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang sementara berlangsung dan turunannya memberikan peluang bagi pembiayaan korporasi dan komersial yang sangat besar. Segmen *micro banking* juga memiliki prospek yang potensial untuk dikelola. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang moderat stabil dalam beberapa tahun terakhir memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri perbankan beserta efek multiplier-nya, sehingga kinerja perbankan tahun 2013 akan lebih baik dan bertumbuh positif.

Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit perbankan nasional tahun 2013 meningkat 23,1% dan dana pihak ketiga (DPK) naik 18,3%. Nilai tersebut diperkirakan meningkat tipis dibandingkan proyeksi pencapaian tahun 2012 yang naik 23%. Sedangkan untuk kelompok bank, Bank Indonesia memprediksikan bahwa Bank BUMN pertumbuhan kreditnya sebesar 24,4%, bank swasta 21,3%, BPD 25,4%, bank campuran 26%, dan kantor cabang bank asing 15,7%.

Kinerja Bank Pembangunan Daerah (BPD) tahun 2013 diprediksi tumbuh stabil. Likuiditas BPD akan tetap berada pada titik aman karena masih ditopang dana pemerintah daerah (pemda). Asosiasi Bank-bank Pembangunan Daerah (Asbanda) memproyeksikan penyaluran kredit BPD tahun 2013 pada kisaran 25%-30% dan akan difokuskan pada

penyaluran kredit untuk sektor produktif. Pertumbuhan kredit tertinggi diharapkan bersumber dari penyaluran kredit ke sektor produktif minimal 40% agar sejalan dengan pencapaian tujuan BPD *Regional Champion.* Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) diperkirakan hampir sama dengan persentase pertumbuhan kredit, adapun total aset diprediksikan tumbuh sekitar 20%.

Prospek Bank Sulselbar di tahun 2013 masih sangat potensial untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah maupun nasional. Hal – hal yang mendasari cerahnya prospek kinerja Bank Sulselbar tahun 2013 antara lain :

- Dukungan dari pemerintah daerah se-Sulsel dan Sulbar yang merupakan pemegang saham Bank Sulselbar untuk meningkatkan setoran sahamnya.
- Perekonomian Sulsel yang stabil dan sehat sepanjang tahun 2012, serta proyeksi optimis untuk pertumbuhan ekonomi tahun 2013.
- Kondisi daerah yang kondusif untuk mendukung peningkatan bisnis dan arus investasi di Sulsel dan Sulbar.
- Kinerja perbankan Sulsel pada tahun 2013 diperkirakan akan tumbuh cukup baik sejalan dengan kondisi perekonomian Sulsel yang tumbuh cukup tinggi pada tahun 2012 dan optimisme prospek perekonomian Sulsel yang cukup baik di tahun 2013.
- Kerjasama strategis dengan berbagai lembaga/instansi/ perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, untuk mendukung akselerasi bisnis.
- Perkembangan pasar modal yang dapat memudahkan akses terhadap sumber pendanaan, baik melalui obligasi ataupun instrumen lainnya.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Pencapaian selama tahun 2012 menunjukkan kemampuan Bank Sulselbar untuk mengelola keunggulan dan peluang yang dimiliki untuk terus tumbuh dan berkembang positif dari tahun ke tahun. Keunggulan yang dimiliki merupakan potensi strategis untuk dimanfaatkan dalam rangka mendorong kemajuan Bank Sulselbar di tahun – tahun mendatang.

Keunggulan kompetitif Bank Sulselbar sebagai berikut :

Basis Nasabah dan Jaringan yang Luas di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Potensi yang menjadi keunggulan kompetitif Bank Sulselbar dalam menjalankan aktivitas bisnisnya yaitu jaringan kantor yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Jaringan yang luas merupakan bagian dari strategi penetrasi pasar Bank Sulselbar untuk memperluas coverage area operasional khususnya di daerah baru yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jaringan kantor yang luas juga akan mendukung peningkatan volume bisnis, menciptakan dan memelihara loyalitas nasabah serta memperluas *customer base* dan *market share* Bank Sulselbar. Bank Sulselbar memiliki 79 jaringan kantor dan 72 terminal ATM yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Jakarta yang terhubung secara *online.* Sampai dengan 31 Desember 2012, Bank Sulselbar memiliki 389.530 rekening simpanan dan 87.748 rekening kredit serta 114.511 pemegang kartu ATM. Basis nasabah yang besar merupakan dasar yang kuat untuk memasarkan produk dan jasa Bank Sulselbar.

Inovasi untuk Mendorong Pertumbuhan Bisnis

Untuk mencapai pertumbuhan dan target bisnis yang optimal, inovasi menjadi faktor pendorong penting untuk senantiasa memberikan layanan dan produk yang kompetitif bagi nasabah. Inovasi yang dilakukan sebagai respon atas dinamisnya kebutuhan pasar sehingga diharapkan dengan inovasi yang terus menerus dapat mempertahankan dan meningkatkan jumlah basis nasabah Bank Sulselbar yang antara lain dengan melakukan pembukaan jaringan kantor baru di lokasi yang strategis, baik di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat maupun di daerah lainnya yang dipandang potensial untuk mendukung pencapaian strategi pertumbuhan bisnis Bank Sulselbar. Dari aspek produk dan jasa, Bank Sulselbar merancang strategi diversifikasi produk dan layanan, menciptakan produk baru yang kompetitif, penambahan fitur – fitur pada *existing* layanan dan produk, dan menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan yang leading di bidangnya untuk melahirkan produk dan layanan baru seperti kerjasama *co-branding* dan *bank assurance.*

Bank Sulselbar telah mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2007 untuk menyediakan alternatif layanan berbasis syariah bagi nasabah Bank Sulselbar. UUS Bank Sulselbar mencatatkan pencapaian kinerja yang terus bertumbuh secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, Bank Sulselbar telah membuka 1 (satu) kantor cabang pertama yang berada di luar Pulau Sulawesi, yaitu Cabang Jakarta. Bank Sulselbar Cabang Jakarta memberikan kontribusi yang cukup signifikan khususnya dalam peningkatan komposisi penghimpunan dana masyarakat.

Diversifikasi produk dilakukan antara lain dengan menciptakan produk baru dan mendesain produk turunan dari *existing* produk yang sudah ada. Strategi diversifikasi ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mencapai target BPD *regional champion* yaitu keragaman produk. Pada tahun 2010, telah dilakukan pengembangan *existing* produk simpanan, yaitu tabungan Tapemda. Pengembangan yang dilakukan yakni dengan memperkaya segmen nasabah tabungan Tapemda yang sebelumnya diperuntukkan bagi pensiunan PNS, saat ini nasabah dari segmen petani dan nelayan juga telah memiliki produk tabungan yang diberi nama Tapemda Sayang Petani. Demikian pula halnya bagi para pelajar dan mahasiswa dengan tabungan Tapemda Pelajar.

Upaya inovasi untuk meningkatkan volume bisnis dan memperluas *market share* pendanaan Bank Sulselbar dibuktikan pula dengan diluncurkannya produk tabungan berbasis asuransi yang pertama dari Bank Sulselbar padatahun 2011 yaitu Tabungan Masa Depan (TAMPAN).

Memiliki Potensi Pasar yang Prospektif

Bank Sulselbar memiliki potensi *captive market* yang sangat besar yaitu pegawai negeri sipil (PNS) pada Pemprov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan akan terus bertambah seiring dengan penerimaan PNS baru yang berlangsung hampir setiap tahun. Selain menyediakan produk pendanaan dalam bentuk tabungan dan deposito untuk pengelolaan dana simpanan yang aman, Bank Sulselbar juga melayani kebutuhan pembiayaan melalui kredit konsumtif, KPR dan produktif. Kredit produktif bagi PNS merupakan produk pembiayaan unggulan Bank Sulselbar dengan memberikan pinjaman bagi PNS yang memiliki usaha dan atau mengelola usaha produktif.

Potensi pasar Bank Sulselbar lainnya yaitu masyarakat umum, korporasi dan UMKM dengan fokus pada sektor produktif, baik investasi maupun modal kerja. Bank Sulselbar senantiasa mendukung program pemerintah daerah dengan menyalurkan pembiayaan untuk proyek – proyek pembangunan pemerintah daerah, baik Pemprov. Sulawesi Selatan maupun Pemprov. Sulawesi Barat. Pembiayaan untuk proyek pemerintah daerah yaitu dengan menyalurkan kredit modal kerja kepada kontraktor yang mengerjakan proyek – proyek yang sumber dananya berasal dari APBD maupun dari APBN. Di samping itu, sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat, Bank Sulselbar juga turut berpartisipasi membiayai proyek – proyek secara sindikasi sebagai partisipan karena keterbatasan resource yang dimiliki.

Bentuk dukungan dan peran serta Bank Sulselbar dalam mengembangkan sektor UMKM yaitu dengan menyediakan pembiayaan produktif dan kredit program bagi para pelaku usaha sektor UMKM.

Arah Kebijakan Manajemen

Bank Sulselbar dalam menjalankan dan mencapai tujuan bisnisnya senantiasa berupaya untuk menciptakan pertumbuhan yang berkesinambungan melalui perumusan arah kebijakan dan rencana strategis perusahaan. Arah kebijakan dan strategi Bank Sulselbar untuk mencapai tujuan bisnis dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2013 sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai komposit tingkat kesehatan Bank dan GCG dari tahun sebelumnya.
2. Meningkatkan *market share* ekspansi kredit.
3. Melakukan upaya penambahan setoran modal.
4. Meningkatkan *market share* penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dengan suku bunga sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Mengupayakan rasio keuangan minimal sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan rasio BPD menuju *Regional Champion*.
6. Melakukan penyempurnaan pengelolaan organisasi.
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan SDM yang profesional dan berbasis kompetensi.
8. Diversifikasi produk dan pembukaan aktivitas baru serta pengembangan jaringan kantor.
9. Pengembangan dan penyempurnaan terhadap aktivitas pengelolaan teknologi informasi dan optimalisasi transaksi elektronis.
10. Melakukan penyesuaian peralatan operasional dengan perkembangan teknologi saat ini.
11. Meningkatkan pelaksanaan efesiensi Bank.

STRATEGI BISNIS BANK

Rencana Jangka Pendek

Rencana jangka pendek kegiatan usaha Bank Sulselbar meliputi strategi pengembangan produk dan aktivitas baru dan pengembangan jaringan kantor. Pada tahun 2013 telah direncanakan untuk melakukan pengembangan dan peluncuran beberapa produk dan fitur – fitur transaksi baru untuk pendanaan dan pembiayaan. Pengembangan dan peluncuran produk dan fitur baru dari sisi pendanaan bertujuan untuk mengelola komposisi dana pihak ketiga dengan pertumbuhan yang berimbang dan meningkatkan penghimpunan dana berbiaya rendah (low cost). Dalam hal penyaluran kredit dan pembiayaan untuk meningkatkan pertumbuhan kredit yang berkualitas dengan fokus pada kredit sektor produktif. Di samping itu, peningkatan *fee based income* melalui bisnis berbasis kartu seperti kartu kredit dan kartu debit.

Untuk mencapai target peningkatan pendanaan dan penyaluran pembiayaan, Bank Sulselbar akan mengembangkan jaringan kantor konvensional dan unit usaha syariah yang meliputi pembukaan kantor cabang (konvensional dan syariah) dan kantor kas, peningkatan status *payment point*, relokasi kantor kas dan penambahan jaringan. Pengembangan jaringan kantor Bank Sulselbar diprioritaskan pada daerah – daerah yang potensial, baik di kawasan perekonomian daerah, perkantoran maupun pemukiman penduduk dengan sebaran terbesar di Sulawesi Selatan.

Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah Bank Sulselbar ditujukan untuk mencapai sasaran – sasaran kinerja sebagai berikut :

- Menetapkan struktur organisasi kantor cabang yang disesuaikan dengan komplesitas bisnis serta visi dan misi strategis Bank Sulselbar.
- Implementasi dan sosialisasi *corporate culture* Bank Sulselbar.
- Implementasi perbaikan, pembenahan dan pelaksanaan sistem pengarsipan agar lebih modern dan aman.
- Pengembangan perbankan syariah dengan melaksanakan program transformasi yang difokuskan pada peningkatan modal dan pengembangan jaringan operasional.
- Impelementasi *Good Corporate Governance (GCG)* yang senantiasa berlandaskan pada prinsip – prinsip GCG.

UNIT USAHA SYARIAH

Arah Kebijakan

Arah pengembangan jangka pendek Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar yakni memacu pertumbuhan aset yang optimal serta modal yang terukur dengan mengubah model bisnisnya dari end to end menjadi lebih inklusif dengan memaksimalkan infrastruktur dan jaringan yang dimiliki. Rencana mandiri atau *spin off* Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar menjadi rencana jangka panjang pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar dengan target maksimal pada tahun 2023 sesuai dengan kebijakan regulator.

Sasaran Strategis

Sasaran strategis Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar sebagai berikut :

1. Mendukung upaya memperbesar porsi pembiayaan produktif dengan komposisi sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.
2. Pelayanan prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berperilaku 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.
3. Mendukung upaya penghimpunan dana pihak ketiga masyarakat (di luar dana pemerintah daerah) dengan dukungan produk simpanan syariah.

BAB 7

LAPORAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

"...inti dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG) adalah **TARIF** yaitu *Transparency* (Transparansi),

Accountabililty (Akuntanbilitas),

Responsibility (Tanggungjawab),

Independency (Independensi) dan

Fairness (Kewajaran)

CE

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (disingkat Bank Sulselbar)
TAHUN 2012

I. LAPORAN GCG BANK SULSELBAR KONVENSIONAL

1.1 PENDAHULUAN

Dari tahun ke tahun Bank Sulselbar berusaha untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan operasional pada setiap tingkatan organisasi perusahaan. Hal ini bertujuan agar tingkat kepercayaan dan kepuasaan nasabah kepada Bank Sulselbar semakin besar sehingga diharapkan nasabah yang telah ada tetap loyal kepada Bank Sulselbar dan juga dapat menjaring nasabah baru. Adapun inti dari tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance (GCG)* adalah TARIF yaitu *Transparency* (Transparansi), *Accountabililty* (Akuntanbilitas), *Responsibility* (Tanggungjawab), *Independency* (Independensi) dan *Fairness* (Kewajaran).

Pedoman tata kelola perusahaan pada Bank Sulselbar di dasari kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tersebut telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum. Adapun tujuan dari *Good Corporate Governance* adalah agar meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholder*s dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) dalam operasional suatu Bank.

1.2 RAPAT UMUM PEMEMANG SAHAM

Dalam tahun 2012, Bank Sulselbar telah 3 (tiga) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS tersebut terbagi atas dua yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 2 (dua) kali RUPS Luar Biasa.

1.2.1 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pada tanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas), telah diselenggarakan RUPS Tahunan bertempat di Hotel Clarion Makassar, yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu) pemegang saham seri A Perseroan atau hampir keseluruhan pemegang saham Bank Sulselbar dari Pemerintahan Provinsi, Kotamadya dan Kabupaten se Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Adapun keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah :

1) Laporan Pertanggungjawaban Direksi berisikan mengenai :
   a) Penerapan Kebijakan dan langkah-langkah strategis yang telah ditempuh yang meliputi perencanaan dan pengembangan bisnis, pemasaran, pengembangan infrastruktur (IT dan jaringan kantor), Pengembangan sumber daya manusia, aspek keuangan, compliance terhadap regulasi serta penerapan manajemen risiko.
   b) Kinerja operasional tahun 2011 yang meliputi neraca dan perhitungan laba rugi perseroaan per 31-12-2011 (Tiga puluh satu bulan Desember Tahun dua ribu sebelas), yang telah diaudit.
   c) Komposisi penggunaan Laba perseroan tahun buku 2011.

2) Gambaran tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) PT. Bank Sulselbar tahun 2012.

3) Hal-hal lain yang perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi Bank menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan

Rapat Umum Pemegang Saham kemudian menyetujui, yaitu :

a) Penerimaan dan Persetujuan Laporan Tahunan Keuangan Tahunan Tahun 2011;

b) Persetujuan/pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2011 yang memberikan pembebasan tanggungjawab (acquiet de charge) untuk operasional tahun buku 2011 Kepada Direksi dan Dewan Komisaris;

c) Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2011, dimana sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK) 24, laba bersih yang dibagikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah dividen dan cadangan;

d) Persetujuan penggunaan cadangan untuk menutupi kewajiban pada tahun sebelumnya sehingga tidak membebani laba rugi tahun 2012 yang besarnya sebagaimana yang termuat dalam laporan Kantor Akuntan Publik (KAP);

e) Persetujuan terhadap penetapan akuntansi atas alokasi modal dari konvensional ke unit usaha syariah sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menggunakan mekanisme rekening antar kantor (RAK) modal sehubungan dengan terdapatnya kendala dalam pelaporan ke Bank Indonesia, sehingga Modal Syariah yang dicatat pada cadangan tujuan dapat dialihkan pencatatnya ke Rekening Antar Kantor Modal dan Pencatatan selanjutnya atas alokasi Modal Syariah menggunakan rekening-rekening antar kantor modal sampai dilakukannya *spin off*/pemisahan entitas bisnis dari Kantor Induk;

f) Persetujuan Honorium dan Tunjangan Dewan Komisaris dinaikkan dari 50 % (Lima puluh persen) (sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Sulsel Nomor 56 tanggal 28-05-2008 (Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu delapan) menjadi 70% (Tujuh puluh persen) dan berlaku surut mulai bulan Januari 2010 sesuai dengan hasil temuan pemeriksa ekstern;

g) Persetujuan untuk mengkaji kembali anggaran dasar yang mengatur mengenai mekanisme dan persyaratan pengurus bank yang disesuaikan dengan kondisi dan hasil evaluasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi;

h) Persetujuan atas setoran modal saham tahun 2011 yang telah disahkan oleh Komisaris namun belum disahkan oleh Notaris dan Menteri Hak Asasi Manusia masing-masing :
   1) Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
   2) Pemerintah Daerah Selayar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   3) Pemerintah Daerah Bantaeng Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   4) Pemerintah Daerah Sinjai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
   5) Pemerintah Daerah Bone Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

i) Persetujuan setoran Modal Saham Pemerintah Januari-Mei 2012 masing-masing :
   1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
   2) Pemerintah Daerah Mamasa Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
   3) Pemerintah Daerah Majene Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
   4) Pemerintah Daerah Tana Toraja Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   5) Pemerintah Daerah Bulukumba Rp. 1.244.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
   6) Pemerintah Daerah Polewali Mandar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   7) Pemerintah Daerah Barru Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);

8) Pemerintah Daerah Maros Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
9) Pemerintah Daerah Takalar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
10) Pemerintah Daerah Toraja Utara Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

j) Persetujuan pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* Tahun 2012 sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari laba tahun sebelumnya;

k) Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Public Independen yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasal Modal – Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia dimana sebelumnya telah memperoleh rekomendasi dari Komite PT. Bank Sulselbar dengan memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi.

l) Menyetujui pemberian kuasa subsitusi kepada Direksi untuk semua keputusan-keputusan yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

m) Persetujuan untuk merealisasi Opsi pelepasan saham swasta Seri B sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Modal disetor pada tahun buku sebelumnya;

n) Pemberian kewenangan kepada Komisaris (sesuai Pasal 41 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2008) untuk menyetujui/mensahkan :
   a. Pemberian bantuan hukum kepada Pegawai dan pensiunan bilamana memiliki kasus hukum yang terkait dengan tugas kedinasan untuk dimasukkan dalam anggaran dasar perusahaan;
   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu memperoleh Persetujuan dari Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji anggota direksi dan honorium dewan komisaris untuk tahun 2012, menetapkan besarnya tantiem yang diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2011 serta menetapkan tunjangan dan benefit lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dan Komite Nominasi dan Remunerasi termasuk perbaikan penghasilan pegawai;
   c. Pelepasan Aktiva Produktif dalam rangka optimalisasi utilitas Aktiva

4) Persetujuan/Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Tahun Buku 2011.

5) Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2011.
   - RUPS mengesahkan penggunaan laba perseroan Tahun Buku 2011 sebesar Rp. 253.488.688.834, (Dua ratus lima puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah), yang akan diperuntukkan untuk :
     a) Deviden untuk pemegang saham sebesar 60 % (enam puluh persen);
     b) Dana *Corporate Social Responsibility* sebesar 2.5 % (dua koma lima persen);
     c) Cadangan umum sebesar 20 % (dua puluh persen);
     d) Cadangan tujuan sebesar 17.5 % (Tujuh belas koma lima persen).

6) Persetujuan/penetapan Auditor Independen Tahun Buku 2012
   - RUPS menyerahkan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan Kantor untuk Tahun buku 2012 yang terdaftar pada Bank Indonesia dan BAPEPAM berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

7) Persetujuan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Pemegang Saham PT. Bank Sulselbar.

8) Pemberian/pelimpahan Kewenangan RUPS kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui dan mengesahkan, antara lain :
   a. Persetujuan untuk merealisasikan Opsi pelepasan Saham Swasta seri B sebesar 20 % (dua puluh persen) kepada pengurus dan pegawai (aktif dan pensiunan) Bank Sulselbar berdasarkan Pasal 5 anggaran dasar perseroan.
   b. Penggunaan dana cadangan perseroan.
   c. Pelepasan asset perseroan.

1.2.2 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Tahun 2012, Bank Sulselbar telah melaksanakan 2 (dua) RUPS Luar Biasa yaitu masing-masing pertanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas dan tanggal 15-12-2012 (Lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua belas).

RUPS Luar Biasa pada tanggal 22-5-2012 (Dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua belas) beragendakan mengenai :

1. Persetujuan setoran tambahan modal disetor Perseroaan, yaitu :
   1) Pemerintah Provinsi Sulawesi selatan Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah);
   2) Pemerintah Daerah Selayar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   3) Pemerintah Daerah Bantaeng Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
   4) Pemerintah Daerah Sinjai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
   5) Pemerintah Daerah Bone Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
   6) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
   7) Pemerintah Daerah Mamasa Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah);
   8) Pemerintah Daerah Majene Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
   9) Pemerintah Daerah Tana Toraja Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   10) Pemerintah Daerah Bulukumba Rp. 1.244.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
   11) Pemerintah Daerah Polewali Mandar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
   12) Pemerintah Daerah Barru Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
   13) Pemerintah Daerah Maros Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah);
   14) Pemerintah Daerah Takalar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
   15) Pemerintah Daerah Toraja Utara Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

2. Pemilihan calon Komisaris Independen
   Berdasarkan kajian Bank Sulselbar telah layak untuk memiliki 5 (lima) orang Direktur dan Komisaris kemudian Rapat menyetujui kajian tersebut untuk kemudian, bilamana perlu, diadakan perubahan Anggaran Dasar mengenai hal itu melalui RUPS LB. selanjutnya RUPS LB menetapkan 2 (dua) calon Komisaris Independen, yaitu :
   - Professor Muhammad Amri, Phd
   - Drs. Saggaaf Katta

   Yang salah seorang dari kedua calon tersebut akan dipilih dan diangkat sebagai Komisaris Independen RUPS LB akan datang setelah terlebih dahulu keduanya akan menjalani *Fit and Proper Test* .

Pada RUPS LB Tanggal 15-12-2012 (Lima belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Belas), beranggendakan mengenai :

1. Penetapan Peralihan Jabatan Tuan Haji Andi Tjoneng Mallombasang dari Komisaris Utusan menjadi Komisaris Independen.
   - Pengalihan Jabatan H. Andi Tjoneng Mallombasang telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dengan masa jabatannya mengikuti/menyelesaikan masa periode Komisaris, yaitu sampai tanggal 28-05-2014 (Dua puluh delapan bulan Mei tahun dua ribu empat belas)
2. Pemberian/Pelimpahan Kewenangan RUPS LB kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui dan mengesahkan setoran modal saham Perseroan.
   - RUPS LB menyetujui setoran saham sebesar Rp. 10.618.248.418,- (Sepuluh milyar enam ratus delapan belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas :
     1) Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebesar Rp. 4.320.000.000,- (Empat milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
     2) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp. 1.750.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
     3) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
     4) Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
     5) Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
     6) Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep Rp. 713.418.08,- (Tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus delapan belas koma delapan rupiah);
     7) Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara Rp. 547.535.000,- (Lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
     8) Pemerintah Kabupaten Barru Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Batas waktu Pencalonan Komisaris Independen PT. Bank Sulselbar masing-masing atas nama
   - Professor Muhammad Amri
   - Drs. Saggaaf Katta.

RUPS LB menetapkan dengan suara bulat untuk menetapkan kembali 2 (dua) calon Komisaris Independen sampai bulan April atau bulan Mei tahun 2013.

Kesemua RUPS baik tahunan maupun luar biasa telah dibuatkan Aktenya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, SH dan telah didaftarkan baik untuk memperoleh persetujuan atau Pemberitahuan dari/kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

1.3 PELAKSANAAN 7 (TUJUH) ASPEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1.3.1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

A. Dewan Komisaris

Tugas utama dari Dewan Komisaris berdasarkan kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan berpedoman kepada maksud dan tujuan Perseroan.

1) Jumlah, Komposisi dan Kriteria

Jumlah Dewan Komisaris Bank Sulselbar berdasarkan anggaran dasarnya adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, dimana seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

Dewan Komisaris Bank Sulselbar saat ini berjumlah 4 (empat) orang namun 1 (satu) orang anggota Komisaris, yaitu H. Anzari Muin belum dapat menjalani jabatannya, dikarenakan belum menjalani *Fit and Proper Test* (F&P Test) dari Bank Indonesia. Namun, berdasarkan kepada Surat Bank Indonesia Nomor 14/2/DPIP/Prz/Mks/Rahasia Tanggal 6 Juni 2012 Perihal Hasil Penilaian Sementara Uji Kemampuan dan Kepatutan *(Fit and Proper Test) Existing* saudara, menilai bahwa H. Anzari Muin memperoleh predikat Tidak Lulus selaku Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar (Pemimpin Cabang Utama Bone).

Pasal 5 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum menyebutkan : " Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari Jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen". Berdasarkan hal tersebut, bank berusaha untuk memenuhi Peraturan Bank Indonesia yaitu agar komposisi anggota Komisaris Independen Bank Sulselbar berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dengan cara melakukan perubahan komposisi, yaitu 1 (satu) orang dari anggota Komisaris Utusan yaitu H. Andi Tjoneng Mallombasang diubah statusnya menjadi Komisaris Independen. Disamping itu, selain alasan yang telah disebutkan sebelumnya, perubahan ini disebabkan dikarenakan calon yang telah diajukan kepada Bank Indonesia untuk mengikuti *fit and Proper Test* hingga 2 (dua) tahun terakhir ini belum bisa mengikuti *Fit And Proper Test* tersebut.

Perubahan status H. Andi Tjoneng Mallombasang menjadi Komisaris Indepent telah melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, telah mengikuti *Fit And Proper Test* dan dinyatakan lulus dan disetujui oleh Bank Indonesia serta diangkat oleh Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada Tanggal 15 Desember 2012 sebagaimana disebutkan dalam Akta Nomor 16 Tanggal 15 Desember 2012 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Sulselbar" yang dibuat oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH, Notaris di Makassar.

Adapun Susunan dari Dewan Komisaris tersebut adalah :

Periode Januari – November 2012

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	
2	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris	
3	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independen	
4	H. Anzari Muin	Komisaris Independen	Belum memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

Periode Desember 2012

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	
2	H. Andi Tjoneng Mallombasang	Komisaris Independen	Per 15 Desember 2012
3	Natali Ikawidjaja	Komisaris Independen	
4	H. Anzari Muin	Komisaris Independen	Belum memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

Selain itu, Bank juga telah menunjuk 2 (dua) calon Komisaris Independen, yaitu Prof. Muhammad Amri Phd dan Drs. Saggaaf Katta untuk mengikuti *Fit And Proper Test* sebagai wakil dari Pemegang Saham dari Provinsi/Kotamadya/Kabupaten se Sulawesi Barat dan/atau pengganti dari H. Anzari Muin apabila yang bersangkutan tidak lulus *Fit and Proper Test*.

Untuk anggota Komisaris lainnya tidak terjadi perubahan dimana H. Andi Muallim tetap sebagai Komisaris Utama dan Natali Ikawidjaja sebagai Komisaris Independen. Kedua Komisaris ini pengangkatannya telah disetujui oleh Bank Indonesia dan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta telah mengikuti *Fit And Proper Test*.

2) Independensi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan Prinsip *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris Bank Umum tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Komisaris baik pada lembaga keuangan berupa Bank maupun bukan. Berdasarkan hal tersebut maka, semua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada yang merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris pada Bank maupun lembaga keuangan non Bank lainnya, kecuali diperkenankan dalam PBI tentang GCG tersebut.

Dalam anggaran perseroan disebutkan bahwa antar sesama anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus kesamping termasuk menantu, mertua, ipar dan besan dan apabila hal tersebut terjadi maka dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pengangkatannya wajib ditinjau kembali pengangkatannya guna proses penggantian selanjutnya.

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar yang menjabat saat ini, tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat dua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi sehingga sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan Peraturan Bank Indonesia serta diharapkan juga hal ini dapat mencegah timbulnya benturan kepentingan.

3) Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tugas dan tanggungjawab dari Dewan Komisaris adalah :

a. Dewan Komisaris memastikan terselenggarakanya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi;
b. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu serta memberikan nasihat kepada Direksi;
c. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank;
d. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali terhadap keputusan-keputusan yang mewajibkan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar perseroan atau perundang-undangan yang berlaku;
e. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi Perseroan telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Group Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia;
f. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara independen;
g. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota untuk 3 (tiga) Komite tersebut telah dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan yang terakhir bernomor yaitu :

a) Komite Audit, SK Direksi No. SK/084/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012;
b) Komite Pemantau Risiko, SK Direksi No. SK/086/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012;
c) Komite Remunerasi dan Nominasi, SK Direksi No. SK/085/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012.

Direksi membuat Surat Keputusan Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan rapat Dewan Komisaris yaitu :

- Surat Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Nomor 140/DK-BPDSS/07/2012 Tanggal 17 Juli 2012 Perihal Perpanjangan Masa Tugas Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.

h. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif;
i. Dewan Komisaris Perseroaan telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, waktu kerja dan rapat;
j. Dan Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal.

4) Kewenangan

Kewenangan Dewan Komisaris Bank Sulselbar diatur dalam anggaran dasar Bank Sulselbar yang merupakan pengjawantasan dari Undang-Undang Perseroan terakhir. Adapun kewenangan dari Dewan Komisaris Bank Sulselbar adalah :

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi;
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris berhak untuk memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU Perseroan Terbatas (UUPT)
5. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 Ayat 2 UUPT.
6. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.
7. Dalam menjalankan tugas pengawasan Dewan Komisaris dapat membentuk Komite yang anggotanya semua atau lebih adalah Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
8. Dewan Komisaris dapat menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu yang dipandang perlu atas biaya Perseroan.
9. Mengenai hal-hal yang belum diatur pada Pasal ini diatur pada Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 UU Perseroan Terbatas.

5) Rekomendasi

Adapun jumlah rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi Bank Sulselbar adalah sebanyak 60 (enam puluh) kali selama tahun 2012, adapun dalam laporan GCG ini hanya hal-hal penting saja yang akan disampaikan, yaitu:

NO	Nomor Memorandum	Tanggal	Perihal
1	001/DK-BPDSS/01/2012	2/1/2012	1. Hasil temuan GAI pada Tahun 2011 2. *Fraud* yang terjadi pada PT. Bank Sulselbar. 3. Hal-hal yang dianggap perlu
2	049/DK-BPDSS/02/2012	29/2/2012	Persetujuan prinsip dan pembahasan perubahan rencana bisnis Bank Tahun 2012.
3	085/DK-BPDSS/05/2012	7/5/2012	• Penjelasan atas Surat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wil I Sulawesi, Maluku, Papua.
4	086/DK-BPDSS/05/2012	7/5/2012	• Peningkatan pengawasan atas pelaksanaan Operasional Bank.
5	091/DK-BPDSS/05/2012	9/5/2012	• Persetujuan pengampunan bunga.
6	090/DK-BPDSS/05/2012	9/5/2012	• Persetujuan Pelaksanaan pelelangan Aset Perseroan.
7	095/DK-BPDSS/05/2012	11/5/2012	• Tanggapan Atas Revisi Draft SOP Pengelolaan CSR.
8	100/DK-BPDSS/04/2012	24/5/2012	• Pemeriksaan Khusus Pada Kantor Bank Sulselbar Cab. Siwa.
9	105/DK-BPDSS/05/2012	30/5/2012	• Hasil pembahasan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Sulselbar.
10	110/DK-BPDSS/06/2012	6/6/2012	• Pembahasan perubahan rencana bisnis Bank tahun 2012.
11	094/DK-BPDSS/05/2012	11/5/2012	• Penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (RBBR).
12	114/DK-BPDSS/06/2012	11/6/2012	• Sistem tata tertib dan sanksi dalam sisdur SDM.
13	113/DK-BPDSS/06/2012	11/6/2012	• Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.
14	118/DK-BPDSS/06/2012	14/6/2012	• Kajian atas Pelepasan Saham Sebesar 20 %.
15	125/DK-BPDSS/06/2012	22/6/2012	• Persetujuan SOP *Anti Fraud.*
16	135/DK-BPDSS/07/2012	16/7/2012	• Persetujuan Pejabat PT. Bank Sulselbar.
17	137/DK-BPDSS/07/2012	16/7/2012	• Teguran atas ketidaklancaran Aktivitas Operasional Bank.
18	SR/157/BPDSS-DK/07/2012	31/7/2012	• Hasil rapat Komite Pemantau Risiko.
19	162/DK-BPDSS/08/2012	8/8/2012	• Tindak lanjut temuan BPK RI Tahun 2005,2007, 2008,2010 dan September 2011.
20	264/DK-BPDSS/12/2012	26/12/2012	• Tindak lanjut/tanggapan/komitmen atas hasil pemeriksaan Bank Indonesia.

6) Rapat, Pelatihan dan Masa Jabatan Dewan Komisaris

Untuk tahun 2012, jumlah rapat yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebanyak 15 (lima belas) kali dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris adalah :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah	Perihal
1	H. Andi Tjoneng Mallombasang	15	100 %
2	H. Andi Muallim SH, Msi	12	80 %
3	Natalia Ikawidjaja	13	86 %
4	H. Anzari Muin (belum *Fit And Proper Test*)	0	0

Keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris dilakukan secara musyawarah dan mufakat dan apabila secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka dikeputusan rapat dilakukan berdasarkan suara terbanyak dimana hal ini tidak pernah terjadi dalam rapat-rapat Dewan Komisaris selama tahun 2012.

Semua keputusan rapat telah dibuatkan risalahnya oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang juga hadir dalam

rapat Dewan Komisaris sebagai juru tulis dan dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil-hasil rapat didokumentasikan secara baik oleh Sekretaris Dewan Komisaris termasuk *dissenting opinions* apabila ada.

Hasil rapat Dewan Komisaris Bank Sulselbar apabila dipandang signifikan oleh Dewan Komisaris akan dimintakan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk disahkan oleh Pemegang Saham.

Pelatihan Dewan Komisaris

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan	Pelatihan
1	H. Andi Muallim	Komisaris Utama	Strategi penguatan BPD ke depan untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global
2	H.A. Tjoneng Mallombassang	Komisaris Utusan	1. Strategi penguatan BPD ke depan untuk meningkatkan daya saing dalam ekonomi global 2. Penerapan Manajemen Risiko Operasional yang Efektif mengantisipasi kejahatan teknologi informasi di dunia perbankan
3	Natalia Ikawidjaja	Komisaris Independen	1. *Workshop Enterprise Risk Management* 2. Penerapan manajemen risiko operasional yang efektif mengantisipasi kejahatan teknologi informasi di dunia perbankan 3. *Workshop* dalam rangka alin (*Outsourcing)* pekerjaan bank solusi diantara kebutuhan dan peraturan *outsourcing* perbankan 4. *Workshop* menyusun laporan Dewan Komisaris yang informatif dan bersinergi positif.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan	Pelatihan
1	H. Andi Muallin SH Msi	Komisaris Utama	4 Tahun
2	H.A. Tjoneng Mallombasang	Komisaris indepent	4 tahun
3	Natalia Ikawidjaja	Komisaris Indepent	4 tahun
4	H. Anzari Muin	Belum mengikuti *Fit and Propert Test*	

Khusus untuk anggota Dewan Komisaris atas nama H.Andi Tjoneng Mallombasang, masa jabatan beliau adalah mengikuti sisa masa jabatannya. Hal ini disebabkan karena Keputusan RUPS Tanggal 15 Desember 2012 menyebutkan bahwa masa jabatannya tinggal menjalani sisa dari periode yang berjalan.

7) Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada memiliki saham yang mencapai 5 % (lima persen) pada Bank Sulselbar maupun Bank dan lembaga keuangan non Bank baik diluar negeri maupun di dalam negeri.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kesemua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan sesama Dewan Komisaris maupun dengan Direksi dan pemegang saham pengendali.

Anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar hanya menikmati remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan oleh RUPS dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Pengendali dan kesemua anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

8) Informasi *Fit and Proper Test*

Sebelum anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar menjalani tugasnya wajib terlebih dahulu menjalani/melaksanakan *Fit and Proper Test* di Bank Indonesia. *Fit and Proper Test* ini menentukan apakah seseorang layak menjadi Komisaris pada suatu Bank atau tidak.

Tiga dari empat anggota Komisaris Bank Sulselbar saat ini telah dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* dan memperoleh surat persetujuan Bank Indonesia untuk menjalani tugasnya sebagai Komisaris baik independen maupun bukan, namun terdapat 1 (satu) Anggota Dewan Komisaris yang belum bisa menjalani jabatannya yaitu Bapak H. Anzari Muin, dikarenakan yang bersangkutan belum mengikuti *Fit and Proper Test* yang disebabkan pada waktu itu masa *cooling off* (masa tunggu) belum mencukupi 1 (satu) tahun sebagaimana disyaratkan oleh Bank Indonesia bagi pejabat eksekutif bank yang akan menjabat sebagai Komisaris Independen.

Dengan lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia maka tiga anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tersebut telah memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta dapat bertindak independen.

B. Direksi

1) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi

Pada tahun 2012 jumlah anggota Direksi adalah 4 (empat) orang, yang terdiri atas :

- **Direktur Utama**
  Ellong Tjandra

- **Direktur Kepatuhan**
  H. Harris Saleng

- **Direktur Pemasaran**
  H. A. Muhammad Rahmat Alimuddin

- **Direktur Umum**
  H. YanuarFachrudin

Keseluruhan anggota Direksi berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Makassar dan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi tersebut telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah lulus *Fit and Proper Test* oleh Bank Indonesia serta masing-masing anggota Direksi tersebut memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun sebagai pejabat eksekutif.

Direksi Bank Sulselbar tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris. Disamping itu, seluruh Direksi Bank Sulselbar juga tidak sedang merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain serta tidak memiliki saham melebihi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

Direktur Utama Bank Sulselbar berasal dari pihak independen, dalam artian yaitu bahwa Direktur Utama Bank Sulselbar independen terhadap pemegang saham pengendali baik itu secara keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali Bank Sulselbar.

Adapun masa jabatan Direksi Bank Sulselbar tersebut adalah :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ellong Tjandra	Direktur Utama	2009-2013
2	H. YanuarFachrudin	Direktur Umum	2009-2013
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	2011-2015
4	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	2009-2013

2) Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Dalam menjalankan tugasnya Anggota Direksi Bank Sulselbar tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Adapun rincian tugas dan tanggungjawab Direksi yang telah dilakukan adalah :

a. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurus bank;

b. Direksi mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran dasar perseroaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Direksi melaksanakan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (CGC)* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau Jenjang organisasi;

d. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia walaupun tidak semua dijalankan;

e. Telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi;

f. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah dibentuk beberapa komite, yaitu Komite Kredit, Komite Manajemen Risiko, Asset and *Liability Committee* (ALCO), Komite Manajemen Kepegawaian;

g. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi telah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham dan pertanggungjawabannya telah diterima;

h. Setiap kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat oleh Direksi baik itu dalam Surat Keputusan dan atau Surat Edaran, Direksi telah disampaikan kepada para Karyawan/ti Perseroan melalui media yang mudah diketahui oleh Karyawan/ti Perseroan.

i. Penggunaan Konsultan baik secara perorangan atau berkelompok tidak pernah dilakukan kecuali untuk permasalahan-permasalahan tertentu seperti, Penggunaan Konsultan untuk Penanganan perubahan nama perseroan, Konsultan dalam pembangunan ruangan data centre, penggunaan penasehat hukum untuk menangani kasus penggelapan kredit pada cabang Pasangkayu di Pengadilan;

j. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;

k. Direksi Perseroan telah memiliki buku pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

3) Rapat Direksi

Dalam menetapkan suatu kebijakan dan keputusan strategis Direksi selalu melalui mekanisme rapat. Dimana pengambilan keputusan rapat Direksi tersebut dilakukan secara musyarawah mufakat atau berdasarkan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat dan apabila jumlah suara sama maka Direktur Utama yang menentukan sebagai pemimpin rapat. Kesemua hal ini telah diatur dalam buku pedoman yang mengatur mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi Bank Sulselbar.

Selama tahun 2012, Direksi Bank Sulselbar telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Kehadiran	Presentase Kehadiran
1	Ellong Tjandra Direktur Utama	24	96 %
2	H. YanuarFachrudin Direktur Umum	25	100 %
3	H. A.M. Rahmat Alimuddin Direktur Pemasaran	21	84 %
4	H. Harris Saleng Direktur Kepatuhan	24	96 %

Kesemua rapat tersebut telah dibuatkan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (apa bila ada) yang terjadi dalam rapat Direksi dan hasil risalah rapat tersebut disimpan oleh Group SDM Bank Sulselbar.

Tidak semua keputusan rapat yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar dapat diimplementasikan. Hal ini disebabkan antara lain tidak siapnya infrastruktur pada Bank Sulselbar, kurangnya pengetahuan dan keengganan dari pejabat 1 (satu) level dibawah Direksi untuk melaksanakan keputusan rapat tersebut dan terkadang juga tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris.

4) Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi

Direksi Bank Sulselbar secara keseluruhan tidak ada yang memiliki saham pada Bank Sulselbar maupun pada Bank baik di dalam maupun di luar negeri melebihi dari 5 % (lima persen). Untuk bidang usaha lainnya diluar Bank, Direksi Bank Sulselbar tidak memiliki saham melebihi 25 % (Dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu perusahaan lainnya baik perorangan atau bersama-sama.

Terkait dengan hubungan keluarga dan hubungan keuangan antara anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pemegang saham pengendali bank tidak terdapat. Hal ini disebabkan apabila ditemukan maka Direksi tersebut telah melanggar anggaran dasar Bank Sulselbar dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan wajib dilakukan penggantian dengan mekanisme RUPS Luar Biasa.

Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diperoleh oleh Direksi telah ditetapkan oleh RUPS, dimana RUPS menetapkan bahwa memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Remunerasi dan fasilitas lainnya dengan terlebih dahulu disetujui oleh Pemegang Saham Pengendali dan Direksi tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

Direksi Bank Sulselbar tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank. Hal ini disebabkan karena Direksi telah menandatangani Kode Etik dan diatur pula dalam pedoman Direksi Bank Sulselbar.

5) Informasi *Fit and Proper Test*

Bank Indonesia mensyaratkan bahwa setiap Direksi bank sebelum atau setelah dipilih oleh pemegang saham melalui RUPS Luar Biasa wajib mengikuti *Fit and Proper Test*. Berdasarkan kepada hal tersebut maka kesemua Direksi Bank Sulselbar telah mengikuti *Fit and Proper Test* sebelum menjalani jabatannya dan telah dinyatakan lulus serta memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Dengan dinyatakan lulus dari *Fit and Proper Test* dan disetujui oleh Bank Indonesia, membuktikan bahwa seluruh Direksi Bank Sulselbar memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai serta membuktikan bahwa seluruh Direksi Bank Sulselbar merupakan pihak independen dari Pemegang Saham pengendali dalam artian tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga tidak hanya Direktur Utama saja

6) Komite-Komite di Bawah Direksi

Komite *Asset & Liabilities Committee* (ALCO)

Anggota Direksi Bank secara berkala melakukan evaluasi terhadap kinerja bank dalam mengelola *Asset & Liabilities Committee* agar dapat berjalan secara efektif dan Optimal. ALCO ini dibentuk didasari kepada kebijakan ALMA yang ditetapkan oleh Bank sebelumnya.

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mengelola *asset* dan *liabilities* Bank, Komite yang dibentuk oleh Direksi Bank Sulselbar ini mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Risiko Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009, Surat Edaran BI No.11/6/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dan Surat Edaran BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor. 13/23/DPNP tanggal 25 Oktobr 2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Adapun susunan Komite ALCO sampai dengan akhir bulan Desember 2012 adalah :

1) Direksi (Dimana Direktur Utama sebagai Ketua)

2) Pemimpin Group *Treasury*.

3) Pemimpin Group Kredit.

4) Pemimpin Group Perencanaan.

5) Pemimpin Group Pengendalian Keuangan.

6) Pemimpin Group Unit Usaha Syariah.

7) Pemimpin Group Teknologi Informasi.

8) Dan Pemimpin Group Kepatuhan dan Pemimpin Group Manajemen Risiko. (Nara Sumber)

Tugas dan Tanggungjawab

Adapun tugas dan tanggungjawan dari Komite ALCO, antara lain, yaitu :

1. Mengubah, mengkaji dan mengembangkan strategi ALMA;

2. Mengevaluasi berbagai indikator makro ekonomi;

3. Mengkaji penetapan harga (Pricing) aktiva/Pasiva Bank

4. Mengkaji anggaran (rencana bisnis) dibandingkan dengan pencapaiannya.

Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Komite Manajemen Risiko Bank Sulselbar terakhir kalinya diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/1174/DIR/IX/2012 Tentang Penyempurnaan Organisasi Komite Manajemen Risiko PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Tugas dan tanggungjawab dari Komite Manajemen Risiko ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

Susunan Komite ini terdiri atas :

1. Ketua : Direktur Pemasaran
2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota
3. Ketua Pengganti II : Direktur Umum, merangkap anggota
4. Sekretaris I : Pemimpin Group Manajemen Risiko merangkap anggota
5. Sekretaris II : Pemimpin Departemen pengendalian Risiko, merangkap anggota
6. Anggota
   a. Risiko Pasar dan Likuiditas
      - Pemimpin Group *Treasury.*
      - Pemimpin Group Pengendalian Keuangan dan Akutansi.
      - Pemimpin Group Pemasaran.
      - Pemimpin Group Audit Intern.
      - Pemimpin Group Kepatuhan.

   b. Risiko Kredit
      - Pemimpin Group Pemasaran.
      - Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan.
      - Pemimpin Unit Usaha Syariah.
      - Pemimpin Group Audit Intern
      - Pemimpin Group Kepatuhan

   c. Risiko Operasional (termasuk risiko hukum, Reputasi, Strategik dan Kepatuhan)
      - Pemimpin Group Kepatuhan.
      - Pemimpin Group Audit Intern.
      - Pemimpin Group SDM.
      - Pemimpin Unit *Anti Fraud*
      - Pemimpin Group Sekretariat & Umum.

Tugas dan Tanggung Jawab

a. Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan tolenransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.

b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insindentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasi evaluasi.

c. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang ditetapkan.

KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/034/DIR/IV/2011 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Teknologi Informasi (*Information Technology Steering Committee*) PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pembentukan komite ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 Tentang Implementasi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi pada Bank Umum dan peraturan lainnya mengenai teknologi dan informasi yang berhubungan dengan produk dan layanan serta aktivitas bank.

Susunan dari Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank Sulselbar adalah :

1. Ketua : Direktur Umum
2. Ketua Pengganti I : Direktur Kepatuhan, merangkap anggota
3. Ketua Pengganti II : Direktur Pemasaran, merangkap anggota
4. Sekretaris 1 : Pemimpin Group Teknologi Informasi
5. Sekretaris II : Pemimpin Group Manajemen Risiko
6. Anggota :
   - Pemimpin Group Pengendalian Keuangan
   - Pemimpin Group Pemasaran
   - Pemimpin Group *Treasury*
   - Pemimpin Group SDM
   - Pemimpin Group Sekretariat dan Umum
   - Pemimpin Group Perencanaan & Pengembangan
   - Pemimpin Group Kepatuhan
   - Pemimpin Group Unit Usaha Syariah

Tugas dan Tanggungjawab

1. Membantu Direksi dalam mendukung proses pemantauan terhadap implementasi strategi Teknologi Informasi.
2. Melakukan pemantauan terhadap penggunaan teknologi informasi bank yang meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Teknologi Informasi.
3. Melakukan advis terhadap kelayakan suatu proyek Teknologi Informasi.
4. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pengelolaan teknologi informasi sesuai dengan rencana strategis TI (*Information Technology Strategic Plan*) dengan rencana strategis kegiatan usaha bank.

   Dalam memberikan rekomendasi, komite hendaknya memperhatikan faktor efesiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut :

   4.1 Rencana pelaksanaan (*road-map*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state;

   4.2 Sumber daya yang dibutuhkan;

   4.3 Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan

5. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI Bank;

6. Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dalam eksekusi proyek teknologi informasi dan memberikann rekomendasi kepada Direksi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan proyek teknologi informasi;
7. Memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait Peningkatan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi yang mengacu kepada kebutuhan layanan perbankan maupun regulasi termasuk *Data Center* (DC), *Disaster Recovery Center* (DRC) and *Business Continuity Plan* (BCP).
8. Menyesuaikan dan menetapkan status prioritas proyek-proyek teknologi informasi yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional bank) misalnya evaluasi dan pergantian *core banking application*, *server production* dan topologi jaringan;
9. Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan alokasi sumber daya terkait dengan penggunaan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan dan pengelolaan teknologi informasi, Komite Pengarah Teknologi informasi wajib memastikan bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK) & *SELF SUPPORTING GROUP* (SSG-KMK)

Komite ini dibentuk merupakan implentasi dari Peraturan Direksi Nomor 001/PD-BPDSS/2003 Tanggal 17 September 2003 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kepegawaian Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/005/DIR tanggal 25 Januari 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Sulsel.

Berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi Bank Sulselbar Nomor SK/001/DIR Tanggal 8 Januari 2008 Tentang Pembentukan Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) & Self Supporting Group (SSG-KMK), Komite Manajemen Kepegawaian lahir.

Susunan pengurus dari Komite Kepegawaian terdiri atas:

1. Ketua : Direktur Utama
2. Sekretaris : Pemimpin Group SDM
3. Sekretaris Pengganti : Pemimpin Group Audit Intern
4. Anggota : Direksi Bank Sulselbar

Sementara untuk pengurus Self Supporting Group (SSG-KMK) terdiri atas :

- Ketua merangkap anggota : Pemimpin Group SDM
- Ketua pengganti merangkap anggota : Pemimpin Group Audit Intern
- Sekretaris : Pemimpin Departemen SDM
- Anggota : Seluruh Pemimpin Group

Tugas dan Tanggungjawab

Komite Kepegawaian mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Bahwa fungsi, tugas dan wewenang dan tanggungjawab dari Komite Kepegawaian diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja Bank Sulselbar;

2. Dalam melaksanakan tugasnya Komite Kepegawaian berhak untuk mengundang/menghadirkan pihak yang terkait sebagai nara sumber dengan masalah yang dibahas pada Komite Kepegawaian maupun pada SSG KMK.

3. Hal-hal yang telah diputuskan oleh SSG-KMK selanjutnya diusulkan ke Komite Manajemen Kepegawaian untuk mendapatkan persetujuan atas proses selanjutnya.

7) Pelatihan

Direksi Bank Sulselbar senantiasa meningkatkan kompetensinya khususnya terkait pengetahuan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Adapun pelatihan yang diikuti Direksi Bank Sulselbar selama tahun 2012, antara lain :

No	Nama	Jabatan	Pelatihan
1	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Arah sistem penjaminan Kredit Daerah di Indonesia
2	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	*Workshop* manajemen Risiko perbankan syariah
3	H. YanuarFachrudin	Direktur Umum	Pemahaman dan mekanisme penerapan strategi *Anti Fraud* pada Bank Umum
4	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Seminar Persiapan Perbankan Indonesia dalam menghadapi tantangan perbankan global
5	H. A.M. Rahmat Alimuddin	Direktur Pemasaran	Gadai Emas Bank Syariah antara Investasi dan Spekulasi
6	H. YanuarFachrudin	Direktur Umum	Pengukuran kerja berbasis kompetensi
7	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Kesiapan perbankan Indonesia menghadapi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN
8	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Seminar peluang dan tantangan memasuki pasal modal, guna memperkuat BPD *Regional Champion*
9	H. Harris Saleng	Direktur Kepatuhan	Strategi & Antisipasi terhadap pembatasan kepemilikan saham Bank Konvensional dan Syariah
10	Ellong Tjandra	Direktur Utama	Implementasi BRC Pasca terbentuknya OJK dan Seminar masa depan kepemilikan BPD.

1.3 PELAKSANAAN 7 (TUJUH) ASPEK *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

1.3.2 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas-tugas dari Dewan Komisaris, Direksi Bank Sulselbar telah membentuk 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun tugas-tugas dari Komite-komite tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komite Audit

Tugas utama dari Dewan Komisaris berdasarkan kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha perseroaan dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan berpedoman kepada maksud dan tujuan Perseroan.

1. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite

Anggota Komite Audit terdiri dari 3 (tiga) Orang yaitu, 1 (satu) orang dari pihak Komisaris Independen sebagai Ketua Komite merangkap sebagai anggota Komite, 2 (dua) orang anggota Komite Audit merupakan individu yang ahli dibidang keuangan/akutansi dan hukum/perbankan.

Adapun struktur dari Komite Audit tahun 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/057/DIR/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, adalah sebagai berikut :

- **Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang, M.Si Plts**
  Ketua

- **Drs. As'ad Makarau**
  Anggota

- **Dra.Hj. Sulaeha Achmad**
  Anggota

Keanggotaan Komite Audit atas nama Drs. As'ad Makarau dan Dra. Hj. Sulaeha Achmad per tanggal 30 Juni 2012 telah berakhir namun berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi SK/084/DIR/VII/2012 Tanggal 31 Juli 2012 keanggotaannya diperpanjang untuk masa 6 (enam) bulan atau sampai tanggal 31 Desember 2012.

Adanya Plts Ketua, disebabkan karena Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang M.Si juga merangkap jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang diakibatkan karena 1 (satu) calon Komisaris Independen yang terpilih belum menjalankan tugasnya disebabkan belum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Untuk Drs. As'ad Makarau merupakan anggota Komite Audit yang ahli pada bidang hukum khususnya hukum perbankan, sementara Dra. Hj. Sulaeha Achmad adalah anggota Komite Audit yang ahli pada bidang Akutansi atau keuangan.

Kesemua anggota Komite Audit merupakan Pihak Independen baik itu pada Bank yang sama dan atau perusahaan lain dan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit adalah :

1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit Bank Sulselbar paling tidak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap :
   a. Pelaksanaan tugas Group Audit Intern (GAI) Bank Sulselbar;
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akutansi yang berlaku;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia.

3) Komite Audit Bank Sulselbar wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sesuai dengan hal-hal diatas maka tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Komite Audit adalah :

a. Melakukan evaluasi program kerja Audit Tahunan (PKAT) GAI tahun 2012.

b. Melakukan evaluasi kesesuaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) GAI dengan standar penyusunan laporan audit menurut SPFAIB dan Audit Charter yang meliputi :
   - Evaluasi kesesuaian LHP GAI dengan SPFAIB dan Audit Charter;
   - Kesesuaian realisasi Audit dengan PKAT;
   - Evaluasi temuan tahun lalu yang belum ditindak lanjuti;
   - Evaluasi temuan saat ini dan
   - Evaluasi pelaksanaan *Risk Based Audit*
   - Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan, tahun buku 2012.
   - Melakukan evaluasi atas LHP Auditor Ekstern (BPK-RI dan BI) dan tindak lanjutnya.
   - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dewan Komisaris.

   Rekomendasi Komite Audit kepada Direksi melalui Komisaris Utama antara lain adalah :

   1) Group Audit Intern (GAI) dalam melakukan audit pada cabang-cabang atau Kantor Pusat agar dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan rencana audit yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) baik obriknya maupun jadwalnya.

   2) Mendorong terus-menerus kepada GAI agar dalam membuat/menyusun laporan hasil audit supaya berpedoman sepenuhnya pada SPFAIB dan Audit Charter sebagai sebuah pedoman yang masih berlaku sampai saat ini.

   3) Terhadap temuan GAI tahun lalu yang belum ditindak lanjuti oleh auditee sesuai dengan SPFAIB harusnya GAI melaporkan secara tertulis hal tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut

   4) Temuan GAI yang dijumpai dalam pemeriksaan yang disebabkan karena unsur kesengajaan/ melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku (SOP) agar diberikan sanksi yang tegas, sehingga dapat memberikan efek jera untuk tidak lagi mengulang hal yang sama dikemudian hari.

   5) Temuan terbanyak dan terjadi pada semua cabang yang diaudit GAI adalah temuan/ permasalahan dalam pemberian kredit. untuk itu, diharapkan agar Direksi dan Group Pemasaran melakukan kajian secara komprehensif untuk mengetahui penyebabnya. Dan selanjutnya dilakukan tindak lanjut untuk memperbaiki permasalahan tersebut, sehingga temuan yang sama tidak terjadi lagi di tahun berikutnya.

   6) Dalam LHP khusus agar GAI mengungkapkan penyebab dan modus operandi dari setiap kasus yang ditemukan, sehingga dapat dilakukan langkah-langkah perbaikan pada sistem untuk menangkal terjadinya lagi kasus yang sama dengan modus operandi yang sama pula

3. Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2012 frekuensi rapat Komite Audit adalah :

1. Rapat Intern : 17 (tujuh belas) kali;
2. Rapat dengan KPR (Komite Pemantau Risiko) sebanyak 4 (empat) kali;
3. Rapat dengan KPR dan Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sebanyak 5 (lima) kali;

4. Rapat dengan Dekom (Dewan Komisaris), KPR dan KRN sebanyak 1 (satu) kali;
5. Rapat dengan Dekom, KPR, Group Sekretariat dan Umum, Group SDM dan Group Audit Intern (GAI) sebanyak 1 (satu) kali;
6. Rapat dengan Dekom, KPR dan Group Perencanaan dan Pengembangan sebanyak 1 (satu) kali;
7. Rapat dengan KPR dan Group SDM sebanyak 1 (satu) kali;
8. Rapat dengan GAI dan Unit Usaha Syariah sebanyak 1 (satu) kali.

4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

1) Telah menyusun laporan tahunan pelaksanaan tugas komite audit tahun 2012.

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

3) Melakukan pemantauan dan evaluasi diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
   a. Pelaksanaan tugas Group Audit Intern (GAI);
   b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
   c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar Akutansi yang berlaku;
   d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan GAI, Akuntan Publik, hasil pengawasan Bank Indonesia guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

4) Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akutan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2013.

Selain melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bank Indonesia, Komite Audit melaksanakan juga tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

2) Komite Pemantau Risiko

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko tahun 2012 adalah :

1) Drs. Natali Ikawidjaja, MM sebagai Ketua yang juga merupakan Komisaris Independen.
2) Drs. H. Muslimin Abbas, Msi sebagai anggota, ahli dibidang Manajemen Risiko.
3) Drs. H. Silahuddin, sebagai anggota, ahli dibidang Akutansi dan keuangan.

Kesemua anggota Pemantau Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik serta merupakan Pihak Independen.

2. Tugas dan Tanggungjawab Komite

Secara garis besar tugas dan Tanggungjawab dari Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar adalah :

a. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugasnya selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko menyimpulkan :

a) Kejadian *Fraud* memiliki intensitas tinggi, hal ini sebagaian besar terjadi karena SOP yang tidak dilaksanakan sepenuhnya, disamping itu para pelaku *fraud* belum sepenuhnya diproses melalui jalur hukum tetapi sebagian besar masih diselesaikan secara internal, hal ini tentu saja tidak menimbulkan efek jera dan bisa jadi akan menjadi referensi bagi karyawan untuk melakukan lagi *fraud*.

b) Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan saham sebesar 20 % (dua puluh persen) diserahkan kepada pengurus dan pegawai bank, dan belum diimplementasikan.

c) Ekstrakomtabel menunjukkan *trend* yang semakin meningkat, hal ini membutuhkan penanganan yang lebih baik, sehingga bukan saja penarikan ekstrakomtabel tetapi juga diperlukan usaha pencegahannya. Beberapa hal yang perlu dievaluasi secara mendalam adalah pengelolaan Apprisal (penilaian agunan) dan kebijakan Manajemen atas minimum jumlah agunan sebesar 50 % (lima puluh persen) dapat ditinjau kembali.

d) Upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (Karyawan) perlu lebih ditingkatkan dan diintensifkan sehingga kegagalan operasional akibat dari kurangnya pengetahuan tehnis pegawai dapat dieleminir.

e) Sistem pelaporan yang masih lemah sehingga masih terdapat denda akibat dari kesalahan pelaporan, baik muatannya maupun ketepatan waktu pengiriman.

3. Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2012 Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Adapun tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebanyak 100 % (Seratus persen).

4. Program Kerja Komite dan Realisasinya

Program rencana kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 adalah :

a) Evaluasi secara reguler terhadap hasil kerja Komite Manajemen Risiko dan Komisi Manajemen Risiko, yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Dewan Komisaris;

b) Seminar dan Pelatihan yang berkaitan dengan Manajemen Risiko;

c) Benchmark tentang pengelolaan Tehnologi Informasi ke Bank Pembangunan Daerah yang telah maju dalam hal pengelolaan IT.

Adapun realisasi dari rencana kerja tersebut adalah :

a) Rapat/Pertemuan Kajian

Rapat-rapat yang dilaksanakan meliputi rapat intern Komite Pemantau Risiko untuk membahas dan mengevaluasi permasalahan tertentu yang berhubungan dengan tugas-tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko, selain rapat intern, Komite Pemantau Risiko juga melaksanakan pertemuan dengan unit-unit kerja Bank Sulselbar yang ada hubungan kerjanya dengan Komite Pemantau Risiko seperti Group Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, Group Treasury, Group SDM, Group IT, Group Pemasaran dan Group Unit Usaha Syariah.

Semua hasil/kesimpulan rapat, baik rapat intern maupun pertemuan dengan unit kerja mitra Komite Pemantau Risiko yang strategis telah dibuatkan rekomendasi dalam bentuk surat/memorandum kepada Dewan Komisaris.

b) Pendidikan dan Pelatihan

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang atau berhubungan dengan tugas Komite Pemantau Risiko atau aspek risiko pada Industri perbankan, Komite Pemantau Risiko telah mengikuti *workshop* yang dilaksanakan oleh konsultan dan nara sumber dari Bank Indonesia

Workshop yang diikuti anggota Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

- Otoritas Jasa Keuangan;
- *Fraud and Investigative Auditing, Prevention, Detection and Investigation;*
- Penyusunan *Action Plan* dan Kebijakan *Anti Fraud* dalam mengantisipasi penerapan strategi *anti fraud* bagi Bank Umum;
- Seminar *Anti Fraud*.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi anggota Komite.

Keanggotaan, struktur dan keahlian dari Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2012 dari bulan Juni 2011 hingga April 2012 terdiri atas :

1) Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai Plts Ketua (Anggota Dewan Komisaris).
2) Pimpinan Group SDM Bank Sulselbar sebagai Anggota.

Berdasarkan SK/058/DIR/IV/2012 Tanggal 30 April 2012, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi dari bulan April hingga Desember Tahun 2012, terdiri atas :

1) Drs. N. Ikawidjaja, MM sebagai Plts Ketua (Komisaris Independen).
2) Drs. H.A. Tjoneng Mallombasang sebagai anggota.
3) Pemimpin Group SDM Bank Sulselbar sebagai Anggota.

2. Tugas dan Tanggung jawab Komite

a. Terkait dengan kebijakan remunerasi:
   1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi.
   2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
      a) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
      b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

b. Terkait dengan kebijakan nominasi :
   1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   2) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   3) Memberikan rekomendasi mengenai pihak-pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

c. Wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi paling kurang sesuai dengan :
   1) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   2) Prestasi kerja individual;
   3) Kewajaran dengan peer group;
   4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank;

Adapun tugas-tugas yang telah dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 antara lain adalah :

a. Merevisi pedoman tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sulselbar.
b. Membuat persyaratan calon Komisaris Bank Sulselbar.
c. Meminta kelengkapan berkas calon anggota/Komisaris Independen.
d. Membahas penyesuaian struktur gaji (Konversi gaji).
e. Persetujuan pengangkatan kembali Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi , serta saran penambahan satu orang anggota tiap Komite.
f. Kelengkapan berkas calon Komisaris Independen telah terpenuhi.
g. Pembahasan sisdur SDM dan Group SDM (tidak tuntas).
h. Saran kepada Direksi untuk penyempurnaan SOP *anti Fraud* dan SOP SDM.
i. Pembahasan rencana bisnis Bank Sulselbar tahun 2013-2015.
j. Melakukan/membuat pengumuman secara internal untuk mengisi keanggotaan Komite-Komite yang akan berakhir masa tugasnya.
k. Membuat persyaratan penerimaan anggota Komite.
l. Membuat kajian anggaran dasar untuk persyaratan pengurus bank.
m. Pembahasan skala kenaikan tunjangan non PHDP

Kesemua hasil rapat/kajian/pembahasan tersebut di atas telah disampaikan/dilaporkan kepada Komisaris Utama melalui memorandum dari Komite Remunerasi dan Nominasi

3. Frekuensi Rapat Komite

Untuk tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat sebanyak 8 (delapan) kali dengan hasil/kesimpulan rapat tersebut berupa notulen rapat disampaikan kepada Komisaris Utama.

4. Program Kerja Komite dan realisasinya

Komite Remunerasi dan Nominasi selama Tahun 2012 telah melaksanakan program kerjanya antara lain yaitu :

- Menyusun persyaratan bagi calon Komisaris Bank Sulselbar;
- Menyusun dan mempertegas kembali syarat-syarat rekrutmen calon Direksi.

1.3.3 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penanganan benturan kepentingan pada Bank Sulselbar diatur dalam kode etik Bank Sulselbar, dimana dalam kode etik tersebut mengikat keseluruhan pengawas, pengurus dan pegawai Bank Sulselbar baik itu tenaga kerja tetap, Kontrak maupun outsourcing dan dituangkan dalam bentuk pernyataan sikap secara tertulis.

Setiap keputusan yang mengandung benturan kepentingan baik pada tingkat pengawas, pengurus dalam rapatnya dan operasional cabang wajib dibuatkan laporan tertulis dan didokumentasikan secara tertib administrasi serta diaudit oleh pemeriksa intern bank.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak ditemukan pada Bank Sulselbar, hal ini disebabkan karena Pengawas (Dewan Komisaris), Direksi dan pegawai menghindari peristiwa benturan kepentingan dan merupakan salah satu bentuk budaya kepatuhan Bank Sulselbar.

1.3.4 Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

Pada bagian ini akan diungkapkan mengenai kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern, antara lain :

1. Fungsi Kepatuhan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa fungsi kepatuhan itu adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi kepatuhan tidak hanya diserahkan kepada Direktur Kepatuhan serta Group Kepatuhan saja, namun pelaksanaan fungsi kepatuhan tersebut dilaksanakan oleh seluruh Komisaris, Direksi Bank dan seluruh unit kerja yang ada. Hal ini telah dilakukan oleh Bank Sulselbar agar dapat menjadi budaya kepatuhan serta memperoleh kepercayaan dari *stake holder* Bank Sulselbar.

Sistem Operasional Prosedur mengenai Kepatuhan lama pada Bank Sulselbar telah dinyatakan tidak berlaku, hal ini disebabkan telah adanya Peraturan Bank Indonesia baru yang mengatur Fungsi Kepatuhan yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan Penggantian Sistem Operasional Prosedur baru (SOP) tersebut telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan.

Sepanjang tahun 2012, jumlah denda akibat keterlambatan dan tidak mengirim laporan atau dengan alasan lain sebanyak Rp. 194.202.525,- (Seratus sembilan puluh empat juta dua ratus dua ribu lima ratus dua lima rupiah) turun dari jumlah tahun 2011 sebesar Rp. 276.561.219,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan belas rupiah). hal ini menunjukkan bahwa budaya kepatuhan dapat diterapkan pada Bank Sulselbar.

1) Wewenang Direktur Kepatuhan

Kewenangan dari Direktur Kepatuhan adalah :

A. Memberikan opini (*comply or not comply*) terhadap kelonggaran/penyimpangan dari pedoman pelaksanaan kerja yang berlaku;
B. Menetapkan langkah-langkah yang harus diambil terkait pelanggaran kepatuhan;
C. Melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terdapat pelanggaran kepatuhan;
D. Menyetujui penyusunan rencana kegiatan (*action plan*) Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan dan Laporan realisasinya;
E. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian pegawai pada Group Kepatuhan serta kebijakan SDM lainnya bersama Direktur Terkait.

F. Kewengan Direktur Kepatuhan terhadap Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan pendanaan Terorisme adalah :
   - Bersama-sama Direksi lainnya menetapkan Pemimpin Group yang melaksanakan kegiatan operasional Bank atau Operasional Syariah dan Pemimpin Cabang/Pemimpin Cabang Syariah selaku penanggungjawan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme termasuk penanganan nasabah berisiko tinggi dan transaksi-transaksi keuangan mencurigakan serta transaksi keuangan tunai diwilayah kerja masing-masing.

2) Tugas Direktur Kepatuhan

Adapun Tugas dari Direktur Kepatuhan yang telah dilaksanakan adalah :

A. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
B. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
C. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;
D. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
E. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;
F. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
G. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

3) Detail Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direktur Kepatuhan

a) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan aktivitas Group Kepatuhan, dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
b) Melaksanakan koordinasi dengan anggota Direksi lainnya dalam rangka memastikan kelancaran tugas dan tanggungjawab;
c) Mengidentifikasi, mengukur dan mengevaluasi semua risiko kepatuhan Bank, sesuai Pedoman Manajemen Risiko yang telah dimiliki oleh Bank;
d) Mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian;
e) Menyetujui pengembangan rancangan dan perubahan kebijakan, sistem dan prosedur di Group Kepatuhan dan Group lain yang dibawah struktur organisasinya;
f) Melakukan uji kepatuhan atas rancangan dan perubahan pedoman kerja pada Group lain untuk memastikan kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan;
g) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan seluruh aktivitas Bank terhadap ketentuan dan komitmen dengan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan serta seluruh perjanjian dengan pihak lainnya;
h) Menyampaikan laporan semesteran kepada Bank Indonesia tentang pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris;
i) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (selanjutnya disingkat APU & PPT) seluruh operasional Bank dengan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-undangan;

Dengan rincian sebagai berikut :

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa Bank & Unit Usaha Syariah telah memenuhi peraturan Bank Indonesia yang menyangkut penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui penyiapan Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme;
2. Melaporkan Transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai yang telah disusun oleh Group Kepatuhan kepada Pusat Pelaporan dan analisa Transaksi Keuangan (PPATK);
3. Merencanakan dan *monitoring* program pengkinian data nasabah berdasarkan risiko/*Risk Based Approach.*

j) Berkoordinasi dan memberi opini Kepatuhan kepada Direktur Utama untuk memastikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* dari sisi hukum dan kepatuhan;
k) Bertanggungjawab atas penerapan prinsip kehati-hatian seluruh aktivitas operasional Bank dengan penerapan manajemen risiko;
l) Memberikan persetujuan rencana kerja dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian risiko kepatuhan;
m) Mengevaluasi dan menyetujui laporan yang menjadi tanggung jawab Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan;
n) Menetapkan dan memberi persetujuan pelaksanaan aktivitas kepegawaian lingkup Group Kepatuhan bersama dengan Direktur terkait;
o) Me *review* kebijakan dan prosedur yang terkait dengan ketentuan BI dan Peraturan Perundangan lainnya;
p) Melakukan koordinasi dengan group lain untuk mengoptimalkan aktivitas Bank yang sejalan dengan budaya kepatuhan;
q) Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris
r) Mengevaluasi fungsi Kepatuhan di kegiatan bisnis Bank dan Kinerja Group dibawah koordinasinya
s) Menjalankan tanggungjawabnya sebagai anggota Direksi;

4) Group Kepatuhan

Group Kepatuhan adalah Group di lingkungan Kantor Pusat Bank yang mempunyai fungsi pokok memberikan rekomendasi langkah-langkah Direktur Kepatuhan atas pelanggaran kepatuhan dan rekomendasi dari sisi kepatuhan dan hukum atas rancangan keputusan operasional dan non operasional kepada Direksi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi.

Membantu pelaksanaan tugas-tugas Direktur Kepatuhan (*Compliance Director)* dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank dan sebagai Group dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Group Kepatuhan dipimpin oleh seorang Pemimpin Group yang secara hierarkis organisatoris berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Pemimpin Group Kepatuhan membawahi Departement Pengenalan Nasabah dan Departemen Hukum dan Kepatuhan yang dalam pelaksanaan tugasnnya kedua Departemen bersifat Independen.

A. Independensi dan Kriteria Group Kepatuhan

Independensi dan kriteria group kepatuhan adalah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Group Kepatuhan harus independen

2) Pejabat dan staf di Group Kepatuhan dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi *Conflict Of Interest* dalam melaksanakan tanggungjawab Fungsi Kepatuhan;

3) Group Kepatuhan pada Bank Sulselbar yang juga memiliki Unit Usaha Syariah didukung oleh Personil yang mempunyai pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

B. Tugas dan Tanggungjawab Group Kepatuhan

1) Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha bank pada setiap jenjang organisasi;

2) Melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring* dan pengendalian terhadap risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum;

3) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4) Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah.

5) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; .

6) Melakukan *review* dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh grup-grup lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;

7) Melakukan *review* dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.

8) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

C. Sumber Daya Manusia

Bank Sulselbar telah memiliki sumber daya manusia pada Group Kepatuhan yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan cara mengirim sumber daya manusia pada Group Kepatuhan untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan secara intern Bank maupun pada lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

5) Tugas-Tugas Departement dibawah Group Kepatuhan

Group Kepatuhan memiliki 2 (dua) Departemen, yaitu Departemen Hukum dan Kepatuhan dan Departement Pengenalan Nasabah.

Adapun tugas yang telah dilakukan oleh kedua departement dibawah Group Kepatuhan adalah :

A. Departemen Hukum dan Kepatuhan

a) Mengkoordinasi pelaksanaan verifikasi/evaluasi penyusunan dan pengembangan pedoman intern bank terkait perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.

b) Berkoordinasi dengan pemimpin dan staf group terkait dalam rangka memastikan kepatuhan di setiap group dan menjaga tingkat kesehatan bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian bank berdasarkan *benchmark* ratio perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c) Memverifikasi rekomendasi yang dibuat oleh Departement Hukum dan Kepatuhan yang diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dibawah lingkup jabatannya terkait langkah-langkah yang harus diambil Direktur Kepatuhan dan pelaporan terkait pelanggaran prosedur kepatuhan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

d) Memberikan *review* kepatuhan (*comply/not comply*) atas rancangan keputusan operasional & non operasional Bank dari sisi kepatuhan berdasarkan identifikasi risiko-risiko kepatuhan yang mungkin terjadi kepada pemimpin group kepatuhan.

e) Memverifikasi laporan bulanan Direktur Kepatuhan yang disusun oleh Departement Hukum dan Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran Direktur Kepatuhan untuk keperluan pelaporan kepada Bank Indonesia dengan tembusan Dewan kepada Dewan Komisaris, serta laporan khusus apabila ditemukan kebijakan/keputusan manajemen Bank yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan, termasuk pula laporan hasil pemeriksaan baik khusus maupun umum yang dilakukan oleh Group Audit Intern.

f) Memverifikasi rancangan sistem prosedur dan pedoman kerja unit organisasi produk Bank untuk memastikan keselarasan pengembangan sistem prosedur dan pedoman kerja tiap unit organisasi Bank serta memastikan kepatuhan pengembangan sistem prosedur terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kebijakan internal Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

g) Memverifikasi usulan perubahan dan perbaikan standar/kebijakan/prosedur hukum yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi perbankan, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.

h) Memverifikasi sesuai dengan uji kepatuhan pada usulan risiko hukum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian kredit dan dokumentasi untuk semua jenis kredit yang diberikan oleh Bank yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.

i) Memverifikasi rancangan penyusunan standar perjanjian dan dokumen legal bank dan memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) untuk perbaikan.

j) Memverifikasi usulan permintaan/memberiakan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) untuk perbaikan.

k) Memverifikasi usulan permintaan/memberikan opini kepatuhan (*comply/not comply*) berdasarkan kewenangan untuk mengadakan kelonggaran/penyimpangan terhadap pola standar dokumentasi atau prosedur yang berlaku.

l) Memberikan uji kepatuhan (*comply/not comply)* pada langkah-langkah hukum yang akan diambil oleh unit organisasi terkait untuk memitigasi risiko hukum yang terkandung dalam dokumen hukum, kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.

m) Memberikan opini kepatuhan (*Comply/not comply*) pada langkah-langkah hukum yang harus diambil dan menjabarkan dampak hukum dari peraturan-peraturan baru, gugatan hukum dan kemungkinan sanksi hukum yang harus dipikul Bank, kepada unit organisasi terkait dan pemimpin group kepatuhan dalam rangka melindungi kepentingan Bank.

n) Memverifikasi hasil evaluasi laporan tahunan berkaitan dengan pendapat hukum mengenai implementasi GCG pada unit organisasi bank, yang kemudian diajukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan.

o) Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

p) Melakukan *review* dan mengevaluasi serta memastikan terhadap laporan-laporan yang dilakukan oleh group-group lainnya atau cabang bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya;

q) Melakukan *review* dan mengevaluasi serta memberikan masukan kepada Pemimpin Group Kepatuhan dan Direktur Kepatuhan sehubungan hasil pemeriksaan Group Audit Intern.

r) Melakukan pemantauan terhadap hasil kajian group Kepatuhan.

s) Memperingati setiap group terkait laporan sebelum jatuh tempo.

t) Pemantauan terhadap hasil/komitmen bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan lainnya.

u) Mengawasi dan mengendalikan utilisasi anggaran yang berada dibawah cakupan wewenangnya.

v) Memantau pengembangan sistem dan prosedur terkait proses yang berada di bawah cakupan wewenangnya.

B. Departement Pengenalan Nasabah

Salah satu fungsi yang melekat pada Group Kepatuhan adalah pelaksanaan Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang diwajibkan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2012 Bank Sulselbar telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman atau SOP Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Adapun sosiliasasi terkait APU & PPT kepada karyawan yang berada pada bagian operasional bank yang terdiri atas :

a) Pelatihan dasar baik kepada karyawan lama, kontrak dan outsourcing maupun unit bisnis serta kepada Pimpinan Cabang.
b) Pelatihan teknikal, diberikan kepada tim KYC local dan *Frontliners.*

Adapun aktivitas pelaporan dan tindak lanjut permintaan otoritas baik itu PPATK, KPK adalah :

No	Aktivitas	Tahun 2012 (Laporan)
1	Melaporkan Transaksi Keuangan Tunai (CTR) ≥ Rp. 500 Juta	191
2	Transaksi Keuangan Mencurigakan (STR)	90
3	Menindaklanjuti permintaan data dan informasi rekening/keuangan dari :	
	• PPATK	2
	• KPK	12

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan Fungsi Audit Intern dilakukan oleh Group Audit Intern (GAI) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama. Group Audit Intern merupakan suatu unit kerja yang independen dan hasil pemeriksaannya langsung dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Direktur Kepatuhan.

Pada tahun 2012, telah dilakukan pemeriksaan umum sebanyak 22 (Dua puluh dua) Kantor Cabang, pemeriksaan khusus sebanyak 3 (tiga) cabang dengan 5 (lima) kasus serta 6 (enam) unit kerja pada Kantor Pusat.

Bank Sulselbar melalui GAI telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan bank dan masyarakat. Dalam pelaksanaan audit tersebut, GAI Bank Sulselbar berpedoman pada aturan internal yang disebut Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dan *Internal Audit Charter*.

Bank Sulselbar selalu berusaha untuk menyediakan SDM yang berkualitas untuk meningkatkan hasil pemeriksaannya/audit, dimana pelaksanaannya adalah melakukan perencanaan dan realiasi peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan dengan mengirim Auditor GAI untuk mengikuti pelatihan-pelatihan.

Selama tahun 2012, GAI Bank Sulselbar telah melakukan pemeriksaan baik yang bersifat khusus maupun umum dengan total sebanyak 28 (dua puluh delapan) baik pada Kantor Pusat maupun pada Kantor Cabang.

No	Jenis Pemeriksaan	Jumlah Pemeriksaan
1	Pemeriksaan Umum	23 (Dua puluh tiga)
2	Pemeriksaan Khusus	5 (lima)

Dalam tahun 2012, Group Audit Intern berdasar hasil auditnya terdapat 664 (enam ratus enam puluh empat) temuan dan temuan tahun 2011 yang belum ditindak lanjuti adalah sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) temuan. Kesemua temuan tersebut telah dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.

Namun hal tersebut di atas, belum dapat dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena kualitas SDM Grup Audit Intern (GAI) dinilai masih perlu ditingkatkan dan kuantitasnya masih kurang. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan tugasnya SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan. Selain itu, masih terdapat temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2011 atas hasil kerja Grup Audit Intern (GAI) Bank Periode tahun 2008, 2009 dan 2010, antara lain perencanaan audit GAI yang tercantum dalam RKAT belum sepenuhnya berorientasi kepada rencana dan anggaran operasional bank, realisasi hari produktif tiap auditor intern masih rendah (dibawah hari produktif yang tersedia), evaluasi GAI belum pernah melaksanakan audit intern terhadap teknologi informasi, hasil evaluasi tingkat kepuasan pemakai jasa GAI atas kualitas jasa dan keribadian auditor seperti kapabilitas personil GAI belum sepenuhnya memadai melaksanakan tugasnya sebagai auditor, khususnya di bidang perpajakan, standar akutansi keuangan dan pengelolahan data elektronik.

3. Fungsi Audit Ekstern

Tahun 2012 melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk Kantor Akuntan Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2012. Penunjukan tersebut merupakan untuk kedua kalinya dan hal tersebut tidak melanggar dikarenakan pada SEBI mengenai Pelaksaan GCG mensyaratkan hanya 5 (lima) kali berturut-turut dan telah memperoleh persetujuan dari Komite Audit Bank Sulselbar.

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Kantor Akuntan Publik (KAP) selalu bertindak Independen, memenuhi standar profesional yang ditetapkan oleh Asosiasi Akuntan Indonesia serta Strandar Akuntan Publik serta Perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar.

A. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Bank Indonesia bagi Bank Konvensional

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang dipilih/ditunjuk Bank Sulselbar merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar pada BAPEPAM-LK dan BANK INDONESIA serta memiliki ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut merupakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2012, dimana RUPS tersebut menyerahkan kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik dan Direksi telah menunjuk Kantor Akuntan DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI & DADANG.

Penunjukkan tersebut di atas telah memperoleh rekomendasi dari KOMITE AUDIT BANK SULSELBAR. Penunjukkan itu, tidak melanggar SEBI mengenai Pelaksanaan GCG. Hal ini disebabkan penunjukkan tersebut merupakan untuk kedua kalinya secara berturut-turut dari yang ditetapkan oleh SEBI tersebut yaitu 5 (lima) kali berturut-turut.

Dalam penugasan audit kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut telah memenuhi aspek-aspek seperti Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan bersedia melakukan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait hasil auditnya.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, sesuai dengan *standard* akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan. Walaupun hasil kerjanya terdapat hal-hal yang bersifat materiil yang dapat mengganggu laporan keuangan menurut Komite Audit Bank Sulselbar.

B. Hubungan antara Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, Kantor Akuntan Publik, Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tahun 2008 Bank Sulselbar mendirikan Unit Usaha Syariah dengan total cabang yang dimiliki adalah sebanyak 3 (tiga) Kantor Cabang yaitu Makassar, Maros dan Sengkang.

Laporan Keuangan Bank Sulselbar Syariah semenjak tahun 2012 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan Publik Akuntan DOLI, BAMBANG, SUDARMADJI dan DADANG serta terdaftar di BANK INDONESIA, BAPEPAM-LK dan telah memperoleh ijin dari DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dimana hal ini merupakan pelaksanaan dari perjanjian kerja dengan Bank Sulselbar disamping mengaudit Bank Sulselbar Konvensional juga mengaudit Bank Sulselbar Syariah sebagaimana diatur juga dalam ruang lingkup dalam perjanjian kerja itu sendiri. Laporan keuangan hasil audit tahun 2012 telah dilaporkan kepada Bank Indonesia beserta management letter-nya.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH Bank Sulselbar Syariah telah memberikan pendapatnya terkait dengan ketaatan Bank Sulselbar Syariah terhadap Pelaksanaan prinsip Syariah sebelum menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah kepada Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik. Disamping itu, Laporan Keuangan hasil Audit Tahun 2012 Juga telah ditandatangani oleh DEWAN PENGAWAS SYARIAH sebagaimana diumumkan dalam media cetak.

1.3.5 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap setiap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko Bank.

Adapun peran aktif dari Dewan Komisaris merekomendasi kepada Direksi untuk menindak lanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, yaitu:

- Menyetujui dan evaluasi kebijakan manajemen risiko melalui pengesahan buku-buku pedoman;
- Mengevaluasi tugas dan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui evaluasi terhadap laporan Group Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
- Mengevaluasi dan memberikan keputusan terhadap proposal Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

Sementara, Direksi wajib untuk :

- Melakukan pengawasan terhadap target pemenuhan Rencana Bisnis / Rencana Kerja Bank.
- Mengkaji ulang terhadap penilaian risiko, ketepatan kebijakan manajemen risiko kecukupan implementasi MIS.
- Menyediakan sumber daya yang berkualitas.
- Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan dan berbagai kegiatan training termasuk proses sertifikasi manajemen risiko.

Pengawasan aktif Direksi tersebut dilakukan melalui unit kerja masing-masing Direktur bidang.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Bank Sulselbar telah mempunyai kebijakan manajemen risiko yang telah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas serta risiko usaha. Prosedur berbasiskan risiko tersebut telah mencakup segala produk dan aktivitas yang mengandung risiko. Direktur masing-masing bidang telah menetapkan limit risiko dan dievaluasi sesuai kebutuhan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

Bank melakukan identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank terhadap aktivitas dan produk baru yang akan diluncurkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan regulator lainnya.

4. Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian intern yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar adalah :

- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
- Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- *Review* yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Pengujian dan *review* yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
- Verifikasi dan *review* secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
- Sosialisasi terhadap Peraturan intern maupun eksteren melalui in house training maupun penyampaian secara langsung melalui memorandum.

5. Profil Risiko Bank Sulselbar

Group Manajemen Risiko Bank Sulselbar yang dibawahi oleh Direktur Kepatuhan telah membuat profil risiko Bank Sulselbar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 5/8/PBI/2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Penilaian profil risiko tersebut dilakukan secara *self-assessment* sebagaimana ditetapkan dalam PBI manajemen risiko, namun Bank Indonesia dapat mengubah penilaian profil risiko tersebut.

Berdasarkan laporan profil risiko selama tahun 2012, risiko utama yang dihadapi oleh bank adalah risiko operasional, dikarenakan penerapan kebijakan SDM yang membutuhkan perbaikan signifikan, *history* kerugian akibat *human error* yang moderat, teknologi informasi cukup kompleks dan menuju proses *mature,* historis dan *trend* kejadian dan kerugian akibat *fraud* internal dan eksternal moderat dibandingkan dengan volume transaksi/pendapatan bank dan ancaman *business disruption* dari *external event* yang moderat. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan maka peringkat komposit profil risiko adalah moderat.

Adapun gambaran profil risiko Bank Sulselbar selama tahun 2012 adalah :

Jenis Risiko	Q1/2012	Q2/2012	Q3/2012	Q4/2012
Kredit	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Pasar	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Likuiditas	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Operasional	*Moderate to High*	*Moderate to High*	*Moderate to High*	*Moderate to High*
Kepatuhan	*Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*	*Low to Moderate*
Hukum	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Reputasi	*Moderate to High*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Strategik	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*
Peringkat Risiko Komposit	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*	*Moderate*

1.3.6 Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Pada dasarnya Bank Sulselbar, dalam menyediakan Dana tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia khususnya terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Pada Tahun 2012 tidak terdapat pelanggaran BMPK atas penyedian dana baik kepada Pihak terkait maupun Pihak Tidak Terkait dan memperhatikan kemampuan modal dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

Terkait dengan kebijakan, sistem dan prosedur, Bank Sulselbar telah memiliki Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat secara tertulis untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut *monitoring* dan penyelesaian masalahnya. Namun, SOP tersebut hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi dan pengkinian. Hal ini disebabkan karena SOP tersebut masih sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melakukan pemberian kredit tersebut, pihak manajemen tidak pernah memperoleh intervensi baik itu dari pihak terkait maupun pihak lainnya sehingga dapatlah dikatakan bahwa manajemen Bank Sulselbar memutuskan secara independen. Terkait dengan pelaporan, Bank Sulselbar telah mengirim laporan tersebut kepada Bank Indonesia sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang mengatur hal tersebut.

Adapun rincian penyedian dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyedian dana besar (*large exposure*) selama tahun 2012 adalah :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (dalam rupiah)
1	Kepada Pihak terkait		
2	Kepada Debitur Inti : a. Individu b. Group	25	31.863.422.103,-

1.3.7 Rencana Strategis Bank

Rencana bisnis Bank Sulselbar baik itu Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dan Rencana Bisnis (*Business Plan*) disesuaikan dengan visi dan misi bank, yaitu :

1. Visi dari Bank Sulselbar adalah Menjadi Bank yang terbaik di Kawasan Indonesia Timur dengan dukungan Sumber daya Manusia yang profesional serta memberikan nilai tambah kepada Pemda dan Masyarakat.

2. Sedangkan Misi Bank Sulselbar adalah :
   - Penggerak dan Pendorong laju pembangunan Ekonomi Daerah;
   - Pemegang Kas Daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah;
   - Salah satu sumber pendapatan asli daerah

Semua rencana Strategis baik itu Rencana Korporasi untuk 5 (lima) tahunan dan rencana jangka menengah untuk 3 (tiga) tahunan serta rencana jangka pendek yaitu 1 (satu) tahunan disusun oleh Direksi dengan dibantu Grup Perencanaan dan Pengembangan. Kesemua rencana strategis tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Direksi juga telah melakukan komunikasi kepada seluruh pemegang saham mengenai rencana stategis tersebut melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Disamping itu, Direksi telah melakukan sosialisasi terhadap rencana strategis tersebut kepada setiap grup dan cabang Bank Sulselbar melalu rapat tahunan antara Direksi dengan para pemimpin cabang.

Adapun rencana strategis yang tercantum dalam rencana stategis Tahun 2012 yang telah dilaksanakan antara lain, yaitu :

1. Pembukaan kantor baik itu Cabang, Cabang Pembantu dan Kas;

2. Kartu Pegawai Elektronik untuk Pegawai Negeri Sipil se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;

3. *Hospital Billing* , sistem pembayaran rumah sakit yang menangani proses pelayanan, mulai pasien datangn sampai pasien pulang yang menghitung biaya yang harus dibayar pasien secara otomatis yaitu tarif layanan, tagihan layanan, cetak *invoice*, cetak kuitansi dan cetak pendapatan harian, mingguan dan bulanan.

4. Kenaikan gaji Karyawan Bank Sulselbar.

Pelaksaan dari rencana bisnis stategis tahun 2012 oleh Bank Sulselbar tersebut telah diawasi oleh Dewan Komisaris setiap saat melalui surat-surat yang ditujukan kepada Direktur Utama atau Direksi lainnya.

1.2.8 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum diuangkap dalam Laporan Lainnya

Bank Sulselbar memberikan kemudahan bagi *stakeholder*s untuk mengakses informasi mengenai informasi finansial perusahaan, publikasi (*press release*), produk dan aksi korporasi melalui *website* www.banksulselbar.co.id. Sepanjang tahun 2012, halaman *web* yang dimiliki oleh Bank Sulselbar telah dilihat sebanyak 13.634,- orang perbulannya.

Perusahaan juga senantiasa melakukan pelaporan informasi, fakta material serta kinerja bank melalui siaran pers, surat kepada BAPEPAM-LK dan Bursa Efek Indonesia.

Adapun bentuk transparansi keuangan dan non keuangan Bank Sulselbar yang telah disampaikan melalui media cetak, internet melalui laporan adalah :

A. Laporan keuangan dipublikasi melalui media surat kabar dan *website* Bank Sulsel secara triwulanan;
B. Laporan keuangan dan non keuangan diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Bank Indonesia;
C. Laporan keuangan yang sudah diaudit dilaporkan secara transparan kepada publik dalam bentuk laporan tahunan.

1.4 *GROUP CORPORATE SECRETARY*

Bank Sulselbar telah memiliki *Group Corporate Secretary* pada tanggal 22 November 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/144/DIR/XI/2012 Tanggal 22 November 2012 Tentang Pengembangan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pembentukan *Group Corporate Secretary* ini sebelumnya telah memperoleh izin dari Bank Indonesia Makassar sebagaimana disebutkan dalam Suratnya Nomor 14/64/APBU/Mks tanggal 6 November 2012 Perihal Penjelasan Tambahan Mengenai Pembentukan *Group Corporate Secretary*.

Pembentukan *Group Corporate Secretary* ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang pembentukan Sekretaris Perusahaan terutama Peraturan Nomor IX.I.4 tanggal 17 Januari 1996

Uraian Tugas *Group Corporate Secretary*

Direktur Utama Bank membawahi *Group Corporate Secretary*, dimana Group ini memiliki 2 (dua) departemen yaitu Departemen Komunikasi dan Humas dan Departemen Legal dan Kesekretariatan serta 1 (satu) bagian yang langsung bertanggungjawab langsung kepada Pemimpin *Group Corporate Secretary* yaitu Asisten Operasional. Pada Departemen Komunikasi dan Humas terdapat 1 (satu) sub Departemen yaitu Sub Departemen Protokol.

Secara garis besar tugas dari *Group Corporate Secretary* adalah :

1. Pengelolaan *corporate image* secara tepat baik melalui media cetak, media elektronik, media siaran, media display dan lainnya termasuk pengelolaan *website* milik bank yang berfungsi sebagai portal layanan.
2. Pengelolan dan pengembangan majalah/bulletin internal dalam rangka edukasi dan informasi kepada karyawan bank.
3. Formulasi langkah strategis atas *corporate action* dalam merespon berbagai informasi pemegang obligasi/investor dan hal-hal yang terkait dengan pasar modal.
4. Penyelenggaraan *shareholder relation* yang mencakup tugas-tugas merespon permintaan informasi dari *shareholder* termasuk mengkoordinir penyampaian laporan ke BAPEPAM-LK, bursa efek Indonesia, lembaga penunjang pasal modal & kewajiban penyampaian laporan lainnya sehubungan dengan aktivitas obligasi/aksi korporasi lainnya secara tepat waktu.

5. Penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham maupun luar biasa termasuk menyediakan materi LPJ Direksi beserta penyusunan laporan tahunan, *company profile, event internal* (Raker, *Family gathering*, ultah bank) dan lain sebagainya.

6. Menjadi *counterpart* dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan termasuk melakukan penyusunan program/rencana kerja pelaksanaan CSR/program kemitraan dan Bina lingkungan dan memastikan bahwa pelaksanaannya telah selaras dengan *corporate objective* yang dilaksanakan secara terarah, terstruktur serta melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan CSR termasuk mengusulkan konsep strategi CSR serta langkah perbaikan yang diperlukan.

7. Mengkoordinir dilakukannya edukasi masyarakat dibidang perbankan termasuk melakukan fungsi pengelolaan *customer care* melalui penyelesaian pengaduan nasabah secara responsive dan terintegrasi dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

8. Pembinaan hubungan dengan investor/pemegang obligasi/*stakeholder* yang mencakup tugas identifikasi target interaksi dan kegiatan lain yang terkait dengan pembinaan intensitas ketertarikan investor/*prime customer* yang merupakan nasabah target antara lain melalui penyelenggaraan *customer gathering* atau even sejenis.

9. Penyelesaian proses litigasi berdasarkan skala perkara yang dihadapi, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan pihak luar termasuk penugasan/mewakili Bank dalam melakukan penyelesaian perkara hukum.

Sehubungan dengan baru dibentuknya *Group Corporate Secretary* maka untuk sementara waktu belum ada yang menjabat *Group Corporate Secretary* tersebut hingga saat ini sambil menunggu hasil *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Direksi Bank Sulselbar untuk menduduki jabatan pemimpin *Group Corporate Secretary.*

1.5 KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MENCAPAI 5 % (LIMA PERSEN) ATAU LEBIH DARI MODAL DISETOR PADA BANK, BANK LAIN, LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK DAN PERUSAHAAN LAINNYA BAIK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI MAUPUN DI DALAM NEGERI

Semua Direktur dan Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada yang memiliki saham baik itu pada Bank Sulselbar sendiri, Bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di luar negeri maupun di Indonesia.

1.6 HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKTUR DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKTUR LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK.

Diantara Direksi dan Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak ada hubungan keuangan dan hubungan keluarga begitu pula dengan pemegang saham pengendali Bank Sulselbar.

1.7 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sulselbar yang diterima selama tahun 2012 adalah:

JENIS REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN			
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
	ORANG	RUPIAH	ORANG	RUPIAH
1. Remunerasi gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilits lainnya dalam bentuk non natura	4	5.041.230.502	4	8.807.332.003
2. Fasilitas lainnya dalam bentuk natura (Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dsb yang:				
• Dapat dimiliki	-	-	-	-
• Tidak dimiliki	4	161.730.000	4	5.356.204.000

(satuan orang)

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 (satu) tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp. 2 Milyar	4 orang	
Di atas Rp 1 Milyar s/d Rp 2 Milyar		3 orang
Di atas Rp. 500 juta s/d Rp 1 Milyar		
Rp. 500 Juta ke bawah		

* Yang diterima secara tunai

1.8 *SHARES OPTION*

Bank Sulselbar tidak mempunyai kebijakan untuk melakukan *Shares Option* baik untuk Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif maupun karyawan

1.9 RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Adapun Rasio Gaji tertinggi dan terendah untuk Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai pada tahun 2012, adalah :

No	Keterangan	Tertinggi	Terendah	Rasio
1	Pegawai	28.521.093	2.634.985	10.82
2	Direksi	75.203.812	67.683.431	1.11
3	Dewan Komisaris	52.642.668	50.010.535	1.05

Adapun Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai Tertinggi adalah :

NO	Keterangan	Direksi	Pegawai	Rasio
1	GAJI	75.203.812	28.521.093	2.63

1.10 JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL *(INTERNAL FRAUD)*

Selama tahun 2012 terjadi 5 (lima) kasus *fraud* yang dilakukan oleh Karyawan tetap dan tidak tetap Bank Sulselbar, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Adapun rincian tindak *fraud* tersebut adalah :

Internal *Fraud* dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus Yang Dilakukan					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2011	Tahun 2012
Total *Fraud* telah diselesaikan	0	0	7	5	2	0
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total	**0**	**0**	**7**	**5**	**2**	**0**

Fraud dengan jumlah kerugian diatas Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dilaporkan kepada Bank Indonesia oleh Direktur Kepatuhan.

Penjelasan Internal *Fraud* Tahun 2012

Fraud	Jumlah (Rp)	Keterangan
Pencurian uang milik nasabah dengan cara pemindah bukuan ke rekening miliknya	457.337.760,-	*Teller* senior pada kantor Kas Gubernuran Sulawesi Selatan mencuri uang milik nasabah dengan cara memalsukan tandatangan pada slip pemindahbukuan ke rekening miliknya.
Pemberian kredit yang dipecah-pecah.	1.319.200.657,-	Pejabat pada Cabang Pembantu Siwa memberikan kredit yang secara terpisah agar menghindari *limit* cabang, dimana kredit tersebut hanya dinikmati oleh 1 (satu) debitur saja.
Kredit fiktif	709.496.041,-	Pemberian fasilitas kredit Konstruksi pada kantor Cabang Utama Bone dimana Surat Perintah Kerja dari pemerintah setempat diduga palsu yang melibatkan pejabat Kantor Cabang Utama Bone.
Penyalahgunaan Kewenangan dalam Proses Pemberian kredit dan pengambilan hak-hak ahli waris terhadap asuransi jiwa debitur		Pemimpin Bank Sulselbar Cabang Bone periode sebelumnya telah memberikan kredit dengan obyek pembiayaan tidak jelas, melakukan pemecahan kredit guna menghindari plafon/batas *limit* cabang serta hanya dinikmati 1 (satu) debitur saja dan melakukan mengambil sisa klaim setelah diperhitungkan sisa pinjaman debitur untuk kepentingan pribadi.
Pencurian uang milik nasabah	37.500.000,-	*Teller* Junior pada kantor Kas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan mencuri uang milik nasabah dengan cara memalsukan tandatangan pada slip penarikan pemindahbukuan ke rekening miliknya
Jumlah	**2.523.534.458,-**	**(Dua milyar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah**

1.11 PERMASALAHAN HUKUM

Selama tahun 2012 jumlah permasalahan terkait hukum perdata dan pidana yang melibatkan Bank Sulselbar adalah sebanyak 3 (tiga) kasus dengan rincian sebagai berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	2
Total	**1**	**2**

Untuk permasalahan perdata terkait gugatan karyawan bank yang disebabkan karena karir yang bersangkutan sementara untuk kasus pidana sehubungan dengan permasalahan kasus kredit fiktif pada Bank Sulselbar Cabang Pasangkayu yang merugikan Bank sebesar kurang lebih Rp. 42.000.000.000,- (empat puluh dua milyar rupiah).

1.12 *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi Bank

Di tahun 2011, Bank Sulselbar telah menerbitkan Obligasi sebesar Rp. 500.000.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) dengan pembagian Rp. 400.000.000.000.000,- (Empat ratus milyar rupiah) untuk Konvensional dan Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) untuk Unit Usaha Syariah.

Sepanjang tahun 2012, Bank Sulselbar tidak pernah melakukan *Buy Back Shares* dan *Buy Back* obligasi Bank.

1.13 Kode Etik

Bank Sulselbar telah memiliki dan menerapkan pedoman standar mengenai tatacara perilaku yaitu kode etik. Kode etik ini merupakan implentasi dari nilai perusahaan yaitu integritas.

Keberadaan kode etik ini diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/55/DIR/IV/2012 Tanggal 20 April 2012 Tentang Pedoman Fungsi Kepatuhan. Kode etik ini berisikan mengenai, yaitu:

1. **Lima Pilar Budaya Kerja PT. Bank Sulselbar**

2. **Perilaku Pegawai**
   1) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban secara tulus ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan YME.
   2) Pegawai selalu menjungjung tinggi dan mentaati kode etik bankir Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
   3) Pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasikan pada pembangunan nasional.
   4) Pegawai selaku berupaya memberikan layanan unggul dengan pendekatan yang bersahabat kepada mitra usahanya.
   5) Pegawai selalu bekerja atas dasar prioritas dan rencana dengan standar mutu kerja yang mungkin namun realitstis.
   6) Pegawai selalu peduli terhadap semua permasalahan di unit kerjanya.
   7) Pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindaklanjuti hasilnya.
   8) Pegawai selalu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh inisiatif serta bertanggungjawab atas mutu hasil kerjanya dengan selalu meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakannya tugas dan kewajibannya.

9) Pegawai selalu melaksanakan komunikasi terbuka dengan saling mengingatkan (asah) , saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).
10) Pegawai melaksanakan tugas dan kewajiban selalu dilandasi semangat kebersamaan.

3. Etika Kerja

1) Patuh dan taat pada ketentuan perundang dan peraturan yang berlaku.
2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan bank.
3) Menghindari diri dari persaingan tidak sehat.
4) Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi.
5) Menghindari diri dari keterlibatan pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan.
6) Menjaga kerahasiaan bank dan nasabah.
7) Memperhitungkan dampak merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8) Tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya diri dan keluarga.
9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

4. Etika Jabatan Direksi

1) Etika Keteladanan.
2) Etika Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
4) Etika berkaitan dengan peluang perseroan.
5) Etika berkaitan dengan keuntungan pribadi.
6) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
7) Etika berkaitan dengan penyuapan.
8) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian

5. Etika Jabatan Dewan Komisaris

1) Etika berkaitan dengan keteladanan.
2) Etika berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3) Etika berkaitan dengan keterbukaan dan kerahasiaan informasi.
4) Etika berkaitan dengan peluan perseroan.
5) Etika berkaitan dengan benturan kepentingan.
6) Etika berkaitan dengan penyuapan.
7) Etika berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, kode etik ini berlaku untuk semua tenaga kerja Bank Sulselbar baik *outsourcing*, kontrak maupun pegawai tetap dan Direksi serta Dewan Komisaris. Agar kode etik ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh maka telah dibuatkan Pernyataan tahunan yang diperbaruhi setiap tahunnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Perseroaan melalui Group Kepatuhan untuk menerapkan dan menegakkan kode etik ini adalah :

- Sosialisasi kepada seluruh tenaga kerja Bank Sulselbar
- Membuat kotak pengaduan kode etik dimana setiap karyawan atau unsur-unsur bank yang menemukan pelanggaran kode etik untuk segera melaporkan Group SDM dengan melampirkan bukti-bukti agar dapat ditindaklanjuti oleh Manajemen Bank Sulselbar.

1.14 *Whistleblowing System*

Penerapan *Whistleblowing system* diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/134/DIR/X/2012 Tanggal 17 Oktober 2012 mengenai Tata Kerja Organisasi Unit *Anti Fraud* PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan bahwa Pemimpin Unit *Anti Fraud* berkewajiban untuk menyusun kebijakan dan mekanisme *whistleblowing system*/ pelaporan pelanggaran yang efektif, namun hingga saat ini mekanisme *whistleblowing system* belum dimiliki oleh Bank Sulselbar.

1.15 Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Bank Sulselbar mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan dana untuk kegiatan politik. Oleh karena itu, selama tahun 2012 Bank Sulselbar tidak pernah mengeluarkan dana untuk kegiatan atau bantuan yang berkaitan dengan politik.

Untuk membiayai kegiatan *Corporate Social Responbilty (CSR)*, Bank Sulselbar memiliki dana CSR sebesar 2.5 % (Dua Koma Lima Persen) dari keuntungan. Penetapan dana CSR tersebut merupakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Selama bulan Januari hingga Desember 2012, Bank Sulselbar telah mengeluarkan dana CSR sebesar Rp3.147.870.500 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah).

CSR Bidang Lingkungan Hidup

Adapun kegiatan CSR pada bidang lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh Bank Sulselbar adalah kampanye "Bank Sulselbar peduli lingkungan". Pada kegiatan Bank Sulselbar peduli lingkungan, Bank Sulselbar telah banyak melakukan kegiatan penghijauan pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti penghijauan taman Kota Luwu, pemberian gerobak dan sepeda motor roda tiga untuk mengangkut sampah, Tempat Sampah.

CSR Bidang Kesehatan

Untuk kegiatan CSR dibidang Kesehatan, Bank Sulselbar mengadakan kegiatan pembangunan Kamar Mandi dan Kakus umum pada daerah kumuh dan desa-desa tertinggal, pemberian ambulans kepada Rumah Sakit Daerah di Kabupaten, Kotamadya dan Provinsi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

CSR Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyaratan

Kegiatan CSR pada pengembangan sosial dan kemasyaratan, CSR yang dilakukan oleh Bank Sulselbar antara lain dengan memberikan bantuan kebutuhan sembilan bahan pokok untuk korban kebakaran pada wilayah kotamadya Makassar dan korban bencana alam yaitu banjir di Kabupaten Maros, Pangkep, Jeneponto dan Kelurahan Antang di Makassar.

CSR Bidang Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja

Khusus kegiatan CSR yang menyangkut ketenagakerjaan dan keselamatan kerja dilingkungan Bank Sulselbar sendiri, kegiatan tersebut sama sekali tidak ada. Walaupun kegiatan CSR pada bidang ini tidak ada, namun keseluruh Pegawai Bank Sulselbar baik tetap, kontrak dan *Outsourcing* telah dilindungi oleh Asuransi Tenaga Kerja dari JAMSOSTEK.

II. LAPORAN GCG BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH

GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. BANK SULSELBAR UNIT USAHA SYARIAH

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Unit Usaha Syariah dan PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan SE No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka dengan ini kami sampaikan, yaitu :

A. *Good Corporate Governance (GCG)* adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), professional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah senantiasa berupaya untuk melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* yang meliputi 5 (lima) prinsip utama tersebut dengan baik dan menjadi pedoman bagi setiap karyawan dan senantiasa melakukan penyempurnaan dalam pelaksanaannya.

   Penerapan kelima prinsip dasar tersebut diatas, secara umum Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*. Bank wajib melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau organisasi.

   PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjalankan seluruh aktifitas perusahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta melaksanakan operasional perbankan yang sehat. Penerapan *Good Corporate Governance*, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan maupun penerapan tata kelola perusahaan.

   Diharapkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban perusahaan untuk memenuhi peraturan, tetapi juga menjadi budaya perusahaan, sehingga dapat membangun PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah menjadi organisasi yang kompetitif yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, memiliki integritas dan terbuka terhadap berbagai perubahan yang mengarah kepada perbaikan perusahaan yang akan lebih baik lagi.

   Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Unit Usaha Syariah (UUS) paling kurang harus diwujudkan dalam :

   1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Pemasaran selaku Supervisi Grup UUS.
   2. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
   3. Penyaluran dana kepada Nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposan inti.
   4. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Unit Usaha Syariah (UUS)

B. Laporan *Good Corporate Governance* Unit Usaha Syariah PT. Bank Sulselbar tahun 2012

1. Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit bagi Unit Usaha Syariah

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank Sulselbar	2	35.00%	0.70
2.	Pelaksanaan tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	2	20.00%	0.40
3.	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	3	10.00%	0.30
4.	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti	2	10.00%	0.20
5.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.	2	25.00%	0.50
	Nilai Komposit		**100.00%**	**2.1**
Predikat : ~~Sangat baik~~/Baik/~~Cukup baik/Kurang baik/Tidak baik~~ *)				

*) coret yang tidak perlu

2. Hasil *Assesment* atas Pelaksanaan GCG
   a. Hingga saat ini Direktur UUS telah melakukan fungsinya dengan baik, walaupun pemahaman Direktur UUS masih perlu ditingkatkan mengingat lini bisnis syariah yang semakin luas dan cepat perkembangannya.
   b. *Update* keilmuan dan kompetensi sanagat diperlukan untuk mempertahankan konsistensi pengawasan sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab DPS
   c. Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sementara melakukan uji petik atas materi produk penyaluran dana dan penghimpunan dana.
   d. Hingga saat ini pemantauan untuk debitur dan kreditur inti dipantau secara regular oleh Grup UUS, namun masih membutuhkan SOP yang lebih tegas dalam hal pemantauan risiko likuiditas
   e. Transparansi laporan UUS telah dilakukan dengan baik dan telah mentaati prinsip-prinsip GCG.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS)
   Secara umum tugas Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah meliputi :
   a. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
   b. Menilai dan Memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
   c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.
   d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
   e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
   f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek Syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

4. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi (Direktur Pemasaran) sebagai Supervisi UUS serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.
   a. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/ RUPS.
   b. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Indonesia.
   c. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.

5. Rapat Dewan Pengawas Syariah
   a. Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga DPS melakukan rapat minimal sekali dalam sebulan yaitu minggu kedua setiap bulannya yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik. Selain Ketua DPS yang hadir setiap hari, kehadiran rutin anggota DPS di Kantor PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah antara 2 (dua) sampai 3(tiga) kali dalam seminggu dan tetap menyediakan waktu yang cukup untuk tugas dan tanggungjawabnya.
   b. Dewan Pengawas Syariah melakukan rapat 12 kali dalam tahun 2012

Nama	Jumlah Kehadiran (rapat)	Prosentase
Prof. DR. H. Halide	12	100 %
DR. (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	6	50%
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	11	92%

6. Susunan Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar per 31 Desember 2012 :

Nama	Jabatan
Prof. H. Halide	Ketua
DR, (Hc) K.H. Sanusi Baco, Lc	Anggota
DR. Mukhlis Sufri, M.Si	Anggota

7. Rangkap Jabatan sebagai DPS pada Lembaga Keuangan Syariah.
   a. Prof. H. Halide

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Ketua Dewan Pengawas Syariah	PT. Amanah Finance	2010- Sekarang
2	Ketua Dewan Pengawas Syariah	BPRS Niaga Madani	2007- Sekarang

   b. Ag. H. Sanusi Baco, Lc

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Anggota Dewan Pengawas Syariah	PT. Amanah Finance	2010- Sekarang
2	Ketua MUI Makassar	Pemprov Sulsel	1996- Sekarang

   c. DR. Mukhlis Sufri, M.Si

No	Jabatan	Instansi	Periode
1	Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)	MES Sulsel	2010-2013
2	Koordinator Ikatan Ahli Ekonomi Islam	Pemprov Sulsel	2009-2012

8. Seminar dan Pelatihan yang telah diikuti oleh Dewan Pengawas Syariah

Pelatihan/Seminar	Tempat/ Lokasi	Pelaksanaan
Prof. H. Halide		
1. Pertemuan BI & Asbisindo	Baruga Ogi BI Makassar	14 Februari 2012
2. *Workshop* 2nd Bank Indonesia International Seminar *On Islamic Finance*	Hotel Hilton Bandung	7-8 Mei 2012
3. *Workshop* Bandung *Islamic Finance & Investment Summit* 2012	Hotel Panghegar Bandung	29-31 Mei 2012
4. *Workshop* Perbankan Syariah dan Raker UUS BPD-SI	Asbanda/ Jakarta	2-3 Agustus 2012
5. Menerima *Award* Tokoh Akademis Syariah Sulsel 2012 Oleh Majalah Investor	Hotel Aryaduta Jakarta	07 Agustus 2012
6. *Ijtima' Sanawi* DPS VIII 2012 (DSN-MUI	Jakarta	2 - 5 Desember 2012
7. Seminar Haji di UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	22 Desember 2012
DR. (Hc.) KH. Sanusi Baco, Lc		
1. Ijtima' Sanawi DPS VIII 2012 (DSN-MUI)	Jakarta	2 - 5 Desember 2012
DR. Mukhlis Sufri, M.Si		
1. *Workshop On Islamic Good Corporate Governance*	Jakarta	30 Mei 2012
2. Ijtima' Sanawi DPS VIII 2012 (DSN-MUI)	Jakarta	2 - 5 Desember 2012

9. Kebijakan Remunerasi PT. Bank Sulselbar UUS

a. Honor Dewan Pengawas Syariah Tahun 2012

No	Nama	Jabatan	Gaji
1	Prof. H.Halide	Ketua	Rp. 7.000.000,-
2	DR (Hc.) K.H. Sanusi Baco.LC	Anggota	Rp. 5.000.000,-
3	DR. Mukhlis Sufri, SE.M.Si	Anggota	Rp. 5.000.000,-

b. Fasilitas-fasilitas Dewan Pengawas Syariah

- Ketua Dewan Pengawas Syariah mendapatkan fasilitas kendaraan dinas kantor (berupa mobil Camry SXV 20 R tahun 2002) dari PT. Bank Sulselbar.
- Ketiga Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar mendapatkan fasilitas Asuransi Kesehatan dan Asuransi Jiwa.

c. Anggota DPS yang menerima remunerasi dalam satahun

Jumlah Remunerasi (non natura) Per orang dlm setahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
di atas Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2 Milyar	-
di atas Rp. 500 jt s/d Rp. 1 Milyar	-
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)
Rp. 500 jt ke bawah	3 (tiga)

10. Kepemilikan saham, hubungan keuangan dan hubungan keluarga

    Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki :

    a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris.

    b. Hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya utntuk bertindak independen.

11. *Buy Back Shares* dan *Buy Back* Obligasi

    PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan, karena seluruh saham PT. Bank Sulselbar dimiliki oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

    Pada tahun 2011 PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah telah menerbitkan obligasi SUKUK (Sukuk *Mudharabah*) dengan pemberian modal sebesar 100 Milyar Rupiah dan tidak pernah melakukan buy back obligasi.

12. *Shares Option*

    PT Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah tidak memberikan *Shares Option* sebagai kompensasi kepada pengurus dan pejabat Bank.

13. Daftar Konsultan, Penasehat atau yang dipersamakan dengan yang digunakan oleh UUS.

No.	Nama Consultan	Kegiatan
1.	PT. Mantra Global Consultan	*Core Banking System* & Pelaporan ke BI
2.	Arta Jasa	Koneksi ATM

14. Transparansi Keuangan Bank

    Kondisi keuangan secara komprehensif telah disampaikan dalam Laporan Keuangan Konsolidasi UUS maupun Laporan Publikasi, untuk menginformasikan produk-produknya kepada masyarakat PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah melakukan promosi melalui media cetak lokal/daerah, pengumuman pada kantor cabang, brosur dan sebagainya.

15. Target Jangka Pendek dan Menengah

    a. Jangka Pendek

    Fokus kegiatan yang merupakan target jangka pendek Unit Usaha Syariah yaitu mendorong fungsi Intermediasi Kantor Cabang Syariah untuk meningkatkan penghimpunan dana seperti giro, tabungan dan deposito, serta meningkatkan volume, kualitas, dan standar operasional pembiayaan Qard/ Rahn Emas dan pembiayaan lainnya yang potensial. Kegiatan usaha Bank Sulselbar dalam meliputi pengembangan produk dan aktivitas baru yang rencana akan diluncurkan pada tahun 2013 antara lain :

    - Kartu Debet (trw II/ Juni 2013)
    - Simpanan Giro *Mudharabah* (trw III/ September 2013)
    - Pembiayaan Rekening Koran Syariah (trw III/ September 2013)
    - Pembiayaan Sewa/ Ijarah (trw III/ September 2013)

    Untuk rencana pengembangan jaringan kantor tahun 2013 yaitu pembukaan Kantor Cabang Syariah Mamuju.

b. Jangka Menengah

Memaksimalkan fungsi Kantor Layanan Syariah yang ada sesuai dengan ketentuan regulator dimana KLS dapat berjalan baik kegiatan funding maupun lending. Oleh karena itu akan dilakukan uji petik secara bertahap dengan prioritas kepada KLS yang memiliki potensi daerah dan data potensi pencapaian Dana Pihak Ketiga eksisting yang besar untuk kedepan diubah menjadi kantor Cabang penuh. Agar fungsi KLS berjalan maksimal, maka pemenuhan SDM wajib dilakukan dengan fungsi yang terintegrasi, formasi yang ideal serta didukung dengan IT dan ketentuan internal yang lebih lengkap.

16. Sasaran Strategis

Dalam mencapai visi dan misi sesuai dengan arah kebijakan, maka langkah strategis yang dilakukan sama dengan induknya yaitu :

a. Pelayanan Prima yaitu pelayanan dengan sepenuh hati, menjiwai dengan berprilaku 5S (senyum, salam, sapa, sopan, dan santun) setiap saat, memberikan nilai tambah kepada nasabah, memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat, menjalankan standar layanan dengan konsisten serta memahami kebutuhan dan keinginan nasabah.

b. Mendukung upaya untuk memperbesar porsi pembiayaan produktif, dimana komposisinya diharapkan sebesar 60% dengan dukungan produk pembiayaan syariah yang variatif.

c. Mendukung upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga masyarakat dengan dukungan produk simpanan syariah.

17. Rencana Pengembangan Organisasi

Terkait dengan pengembangan model bisnis UUS untuk menjadi lebih inklusif dengan memanfaatkan jaringan dan infrastruktur yang dimiliki, maka diperlukan pengembangan struktur organisasi kantor cabang syariah yang dahulunya dibawa koordinasi dan supervise Grup Syariah untuk sejajar dengan kantor cabang konvensional langsung dibawa supervisi Direksi. Fungsi grup syariah menjadi grup supporting sebagaimana layaknya fungsi grup lainnya yang berfokus yaitu, kepada pengawasan shariah compliance serta pengembangan bisnis dan produk. Untuk itu di Grup Syariah perlu dibentuk satu Departemen baru yaitu Departemen Riset dan Pengembangan atau pengalihan fungsi departemen pemasaran dan treasury.

18. Benturan Kepentingan

Dalam hal benturan kepentingan PT. Bank Sulselbar UUS berpedoman pada SK Direksi Nomor 117/DIR/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan PBI No: 11/33/PBI/2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

19. Risiko Likuiditas

Dengan pertumbuhan asset pembiayaan, diperlukan pengelolaan sumber pendanaan yang cukup yang senantiasa dikelola. Dalam mengelola risiko likuiditas Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar berupaya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang jatuh tempo, menjaga tingkat likuiditas yang optimal, memperbaiki struktur pendanaan dan pembiayaan dengan mengurangi tingkat konsentrasi terhadap nasabah maupun produk tertentu.

20. Jumlah Penyimpangan *(Internal Fraud)* yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh UUS Bank Sulselbar. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi penyimpangan *(Internal Fraud).*

21. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana yang dihadapi PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah selama periode laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Untuk periode Januari – Desember 2012, tidak terdapat permasalahan hukum di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

22. Sebagai wujud kepedulian sosial yang diselenggarakan oleh PT. Bank Sulselbar adalah merupakan peran aktif Bank untuk selalu senantiasa berkontribusi pada lingkungan sekitarnya, sehingga untuk jumlah penyaluran dana Kegiatan Sosial telah disampaikan oleh Bank Sulselbar Konvensional.

23. Pendapatan Non halal dan Penggunaannya, dalam pelaksanaannya tahun 2012 tidak ditemukan hal-hal mengenai pendapatan non halal.

24. Penerapan Fungsi Kepatuhan dan Audit Intern
    a. Fungsi Kepatuhan
       PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki 1 (satu) orang Direktur Kepatuhan yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang merupakan satu-kesatuan dengan PT. Bank Sulselbar.

       Sampai saat ini fungsi kepatuhan masih bergabung dengan personil dari PT. Bank Sulselbar (Konvensional).

    b. Audit Intern
       Pelaksanaan pengendalian intern pada PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah disesuaikan dengan Pedoman Sistem Pengendalian Intern Bagi Bank Umum sebagaimana diatur dalam SE Nomor : 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003.

       Saat ini Audit Intern PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS) masih merupakan satu kesatuan dengan Audit Intern PT. Bank Sulselbar yaitu Grup Audit Internal (GAI), yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan secara independen terhadap audit yang dilakukan di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS), GAI bekerja berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang sebelumnya telah disetujui Direktur Utama.

       Hasil temuan GAI dilaporkan langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) memantau apakah telah dilakukan langkah-langkah terkait temuan audit tersebut.

       Pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan Bank untuk tahun 2012 telah mencakup audit atas Laporan Keuangan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang ada di PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah (UUS).

       Sejak semester II setiap pertemuan dengan DPS mengikut sertakan Grup UUS, Grup Kepatuhan, Grup IT, Notaris, dan Grup-grup yang terlibat.

       Demikian penyampaian ini dan terlampir pula Self Assement syarian PT. Bank Sulselbar dan atas penerimaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

III. PENILAIAN KOMPOSIT PELAKSANAAN GCG (*SELF ASSESMENT* GCG)

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN
1	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak berjalan baik diakibatkan jumlah Komisaris Independen kurang dari 50 % dari jumlah Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan dalam PBI GCG.
2	Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	3	0.600	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar mematuhi prinsip GCG tersebut, namun masih perlu ditingkatkan lagi seiring dengan perkembangan bank.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	3	0.300	Pelaksanaan tugas-tugas dari Komite yang ada pada Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik yang disebabkan karena kurangnya pihak independen khususnya dari Komisaris Independen dan adanya rangkap jabatan.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200	Tidak terjadi benturan kepentingan pada tahun 2012, walaupun Bank Sulselbar belum memiliki Standar Operasional Prosedur terkait dengan benturan kepentingan, namun hal tersebut telah diatur dalam kode etik.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	2	0.100	Bank senantiasa berusaha agar kepatuhan terhadap Peraturan-peraturan intern dan ektern menjadi budaya pada Bank Sulselbar.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3	0.150	SDM GAI kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektifitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	1	0.050	Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar dan efektif .

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)	CATATAN
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	3	0.225	Peran serta Group Manajemen Risiko dalam memantau timbulnya risiko pada seluruh aspek Bank masih bersifat pasif.
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Debitur Besar (*Large Exposures*)	7.50%	1	0.075	Bank Sulselbar hingga saat ini tidak pernah menyediakan dana kepada pihak terkait dan debitur besar.
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan GCG dan laporan Internal	15.00%	2	0.300	Bank telah membuat laporan berdasarkan kepada Peraturan Bank Indonesia dan otoritas keuangan lainnya serta telah dipublikasikan sesuai dengan aturan.
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	3	0.150	
	Dalam membuat rencana stategis bank, cukup sesuai dengan misi dan visinya.				
	Nilai Komposit	**100.00%**		**2.450**	

Nilai Komposit = NK

- < 1.5 = Sangat Baik
- 1,5 ≤ NK < 2,5 = Baik
- 2,5 ≤ NK < 3,5 = Cukup Baik
- 3,5 ≤ NK < 4,5 = Kurang Baik
- 4,5 ≤ NK < 5 = Tidak Baik

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Self-assessment* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa nilai komposit atas pelaksaan prinsip *Good Corporate Governance* atau disingkat GCG PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat atau disingkat Bank Sulselbar untuk periode Tahun 2012 adalah "BAIK".

Demikian laporan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Pembangunan Daerah
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

Dewan Komisaris	**Direksi**	
H. Andi Muallim	Ellong Tjandra	H. Harris Saleng
Komisaris Utama	**Direktur Utama**	**Direktur Kepatuhan**

KERTAS KERJA 2012

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

TUJUAN

Untuk menilai:

- kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum dan tingkat independensi anggota Dewan Komisaris;
- efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- efektivitas penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris;
- kecukupan aspek pengungkapan kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- kepatuhan anggota Dewan Komisaris terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
SUB FAKTOR **A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris**				
1. Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.	0.3 %	3	0.009	1. Jumlah anggota Komisaris PT. Bank Sulselbar sebanyak 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang sebagaimana yang ditentukan oleh anggaran dasar dimana 1 (satu) orang anggota Komisaris sementara mengikuti *Fit and Proper Test*.
2. Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.	0.3 %	1	0.003	2. Seluruh anggota Komisaris berdomisili di Indonesia dan beralamat di Kota Makassar.
3. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	0.3 %	4	0.012	3. Jumlah anggota Komisaris Independent saat ini hanya 1 (satu) orang dari yang disyaratkan 2 (dua) orang. Anggota Komisaris Independent ini sementara mengikuti *Fit and Proper Test*. Namun pada Akhir tahun 2012 jumlah Komisaris Independent menjadi 2 (dua) orang dan komisaris utusan menjadi 1 (satu) orang.
4. Penggantian dan atau pengangkatan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari RUPS.	0.3 %	4	0.012	4. 3 (tiga) orang Anggota Komisaris pengangkatannya telah memperoleh Persetujuan dari RUPS dan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
5. Komisaris Independen tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, yakni hanya merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif: • pada 1 (satu) lembaga/ perusahaan bukan lembaga keuangan; atau • yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; dan rangkap jabatan Komisaris Independen sebagai Ketua Komite paling banyak pada 2 (dua) Ketua Komite pada Bank yang sama.	0.3 %	1	0.003	5. Selama tahun 2012 tidak ada Komisaris Independen Bank Sulselbar yang merangkap jabatan pada perusahaan non keuangan atau jasa keuangan Bank. Adapun perangkapan jabatan pada Komite yang dilakukan oleh Komisaris sesuai dengan PBI GCG
6. Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.	0.3 %	1	0.003	6. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, dan apabila ada bertentangan dengan Anggaran Dasar serta dalam kesempatan pertama wajib dilakukan penggantian dengan mekanisme RUPS LB
B. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris				
1. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	0.2 %	3	0.006	1. Sehubungan dengan tidak lengkapnya anggota Dewan Komisaris khususnya Komisaris Independent selama Tahun 2012 maka pelaksanaan pengawasan Dewan Komisaris tidak berjalan dengan lancar.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi.	0.2 %	2	0.004	2. Keputusan yang dibuat oleh Direksi senantiasa diawasi baik berkala atau setiap saat oleh Dewan Komisaris agar sesuai dengan GCG dan apabila melanggar maka Dewan Komisaris akan memberikan teguran secara tertulis walau hanya 3 (tiga) orang Dewan Komisaris.
3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.	0.2 %	2	0.004	3. Dewan Komisaris telah melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi terhadap Keputusan kebijakan strategis Bank dengan melalui mekanisme rapat dengan Direksi untuk membahas rencana bisnis bank.
4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal: penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	0.2 %	1	0.002	4. Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak pernah melakukan pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank. Walaupun ada, keputusan tersebut telah sesuai dengan anggaran dasar bank dan Undang-undang Perseroan terbatas. Misalnya Persetujuan Komisaris untuk pemberian kredit dan pemberian ambulance.
5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.	0.2 %	1	0.002	5. Hal ini telah dilaksanakan, dimana Dewan Komisaris senantiasa melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap jawaban Direksi terhadap hasil audit baik yang dilakukan oleh auditor intern maupun auditor ekstern. disamping itu, ada anggota Dewan Komisaris yang juga menjadi anggota komite audit.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.	0.2 %	1	0.002	6. Selama Tahun 2012, hal ini tidak pernah terjadi.
7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.	0.2 %	2	0.004	7. Selama melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris selalu Independen dari pihak manapun.
8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.	0.2 %	1	0.002	8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite-komite dan meneruskan kepada Direksi untuk mengangkatnya melalui Surat Keputusan Direksi.
9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.	0.2 %	1	0.002	9. Berhubung anggota Dewan Komisaris kurang dari 1 (satu) orang yaitu Komisaris Independent maka keanggotaan Komite di dirangkap.
10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif.	0.2 %	3	0.006	10. Akibat kurangnya anggota Dewan Komisaris maka tugas dari Komite tersebut tidak dapat berjalan secara efektif dan independent. Hal ini disebabkan karena adanya rangkap jabatan.
11. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	0.2 %	2	0.004	11. Dewan Komisaris Bank Sulselbar telah memiliki pedoman dan tata tertib mengenai etika kerja, waktu kerja dan rapat walaupun pedoman dan tata tertib tersebut tidak pernah dilakukan pengkinian semenjak dibuat.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.	0.2 %	1	0.002	12. Terpenuhi, hal ini dibuktikan dengan kehadiran Dewan Komisaris setiap harinya
C. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris				
1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik atau melalui teknologi telekonferensi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali setahun.	0.4 %	1	0.004	1. Selama tahun 2012 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 15 (lima belas) kali.
2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	0.4 %	1	0.004	2. Selama tahun 2012 keputusan Dewan Komisaris yang diambil tidak pernah melalui mekanisme pemungutan suara selalu secara musyawarah mufakat.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk dissenting opinions yang terjadi secara jelas.	0.4 %	1	0.004	3. Terpenuhi, dimana hasil rapat tersebut termasuk *dissenting opinions* (apabila ada) disimpan oleh Sekretaris Komisaris.
4. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.	0.4 %	1	0.004	4. Hal ini telah dilaksanakan.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau Direksi.	0.4 %	2	0.008	5. Tidak semua rekomendasi Dewan Komisaris diimplementasikan oleh RUPS

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
D. Transparansi , Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Dewan Komisaris				
1. Anggota Dewan Komisaris telah mengungkap: • Kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri). • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain. pada laporan pelaksanaan GCG.	0.7 %	1	0.007	1. Dewan Komisaris Bank Sulselbar pada tahun 2012 tidak memiliki saham baik pada Bank maupun diperusahaan lainnya. Disamping itu, Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Bank tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan. Untuk daftar remunerasi dan fasilitas lainnya silahkan lihat laporan GCG.
2. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	0.7 %	1	0.007	2. Dalam tata tertib Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar Anggota Dewan Komisaris dilarang untuk memanfaatkan Bank untuk keperluan pribadi, keluarga maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	0.7 %	1	0.007	3. Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar tidak mengambil keuntungan pribadi selain yang telah ditentukan dalam remunerasi dan fasilitas lainnya
E. Informasi *Fit and Proper Test (F&P Test)*				
1. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	0.5 %	1	0.005	1. Tidak ada Dewan Komisaris PT. Bank Sulselbar yang memiliki Kredit/ pembiayaan dalam kondisi macet, karena apabila hal tersebut terjadi maka Anggota Dewan Komisaris ini tidak akan lolos test *Fit and Proper Test* yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris yang berasal dari mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank sendiri, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) paling kurang selama 1 (satu) tahun.	0.5 %	1	0.005	2. Sehubungan Komisaris Independent PT. Bank Sulselbar bukan berasal dari Direksi atau Pejabat Eksekutif PT. Bank Sulselbar maka Komisaris Independent tersebut tidak perlu melakukan *cooling off*. Untuk pengangkatan H. Andi Tjoneng Mallombasang sebagai Komisaris Independent dari Komisaris Utusan telah lulus *Fit and Proper Test* Bank Indonesia.
3. Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	0.5 %	1	**0.005**	3. Semua Komisaris Independent tidak memiliki hubunngan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kemilikan dengan pemegang saham pengendali, Direksi dan anggota Komisaris lainnya.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	0.5 %	1	**0.005**	4. 3 (tiga) anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan 1 (satu) orang sementara mengikuti *Fit and Proper Test*.

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 1	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku.
Peringkat 2	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG dan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan peringkat. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara secara cukup efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Komisaris kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG, kurang efisien dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat aspek dan peringkat komposit GCG. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.

[1] Termasuk dalam kriteria perigkat ini adalah pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku

I. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	
Peringkat 5	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. • Anggota Dewan Komisaris bertindak dan mengambil keputusan tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG, tidak efisien dan terdapat kelemahan yang signifikan yang akan mengakibatkan penurunan aspek dan peringkat komposit GCG Bank. • Rapat Dewan Komisaris terselenggara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Dewan Komisaris tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketentuan/perundangan yang berlaku.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIANNYA[2]

Peringkat 3 (tiga)
Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik, dimana hal ini disebabkan berkurangnya anggota komisaris khususnya Komisaris Indenpendent. Pemilihan Anggota Komisaris pada Tahun 2012 ini, dilakukan dengan terlebih dahulu melalui mekanisme *Fit And Proper Test* sebelum dipilih dalam RUPS-LB.

[2] Kolom ini merupakan gabungan hasil analisis dari self assessment pada setiap sub Faktor/Faktor dengan membandingkannya dengan kriteria peringkatnya, penetapan Peringkat Faktor serta menjelaskan kelemahan atau permasalahan yang bersifat signifikan dalam penerapan *Good Corporate Governance*. Penjelasan hasil identifikasi masalah/kelemahan diperlukan untuk menetapkan rencana tindak (action plan), yang meliputi tindakan korektif (corrective action) dan waktu penyelesaiannya guna peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

TUJUAN

Untuk menilai:

- kecukupan jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank, kriteria minimum, dan tingkat independensi anggota Direksi;
- efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- efektivitas penyelenggaraan rapat Direksi;
- kecukupan aspek pengungkapan mengenai kepemilikan saham dan berbagai hubungan anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
- kepatuhan Direksi terhadap larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
SUB FAKTOR **A. Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi**				
1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.	0.4 %	1	0.004	1. Jumlah anggota Direksi terdiri atas 4 (empat) orang yang disesuaikan dengan tingkat kompleksitas operasional Bank.
2. Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.	0.4 %	1	0.004	2. Semua Direksi berdomisili di Indonesia, Kota Makassar.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi atau Komite Remunerasi dan Nominasi.	0.4 %	1	0.004	3. Semua penggantian Direksi merupakan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi dan hal ini juga terjadi pada saat penggantian Direktur Pemasaran yang dilakukan pada Desember 2012.
4. Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 tahun).	0.4 %	1	0.004	4. Semua Direksi mempunyai pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun pada bidang perbankan baik itu dari Intern bank maupun bukan.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
5. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah ditetapkan dalam PBI tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank yakni menjadi Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank.	0.4 %	1	0.004	5. Tidak ada anggota Direksi yang merangkap sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lainnya.
6. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	0.4 %	1	0.004	6. Seluruh Direksi tidak memiliki saham melebih dari 25 % (dua puluh lima persen) pada perusahaan lainnya
7. Direksi telah mengangkat anggota Komite, didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris.	0.4 %	1	0.004	7. Berdasarkan permintaan Dewan Komisaris dan PBI tentang GCG, hal ini telah dilaksanakan.
8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.	0.4 %	1	0.004	8. Semua anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua diantara mereka.
9. Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.	0.4 %	1	0.004	9. Surat Kuasa yang dibuat oleh Direksi bukan merupakan surat kuasa umum.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
B. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi				
1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.	0.4 %	1	0.004	1. Direksi Bank Sulselbar bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Bank sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
2. Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	0.4 %	2	0.008	2. Direksi dalam mengelolah Bank Sulselbar senantiasa melakukan tindakan berdasarkan kepada kewenangan dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh Anggaran dasar maupun Peraturan Intern Bank Sulselbar
3. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.	0.4 %	3	0.012	3. Direksi PT. Bank Sulselbar senantiasa berusaha untuk selalu memenuhi unsur-unsur GCG dalam setiap keputusannya walaupun terkadang hal tersebut sulit dilakukan.
4. Direksi telah membentuk SKAI, SKMR dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan.	0.4 %	1	0.004	4. Terpenuhi
5. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	0.4 %	3	0.012	5. Masih banyak hasil temuan-temuan terdahulu yang belum dilaksanakan oleh Direksi dan ini menjadi temuan kembali oleh Pemeriksa baik itu dari Bank Indonesia, SKAI, Auditor Eksternal maupun pengawas otoritas lainnya
6. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	0.4 %	1	0.004	6. Laporan Pertanggungjawaban Direksi untuk Tahun 2012 telah diterima/disetujui oleh para pemegang saham melalui mekanisme RUPS.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
7. Direksi telah mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai dengan media yang mudah diakses pegawai.	0.4 %	3	0.012	7. Kebijakan yang dibuat oleh Direksi telah disampaikan kepada pegawai melalui media milik Bank Sulselbar atau surat ke seluruh cabang, walaupun hal tersebut masih kurang efektif.
8. Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/ atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta konsultan merupakan Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.	0.4 %	3	0.012	8. Direksi Bank Sulselbar hanya mempergunakan Konsultan terkait dengan permasalahan IT khususnya infrastuktur/jaringan Teknologi Informasi dan bidang SDM serta Penanganan Kasus hukum dan semua konsultan tersebut merupakan pihak independen serta tidak mempunyai kepentingan dengan PT. Bank Sulselbar.
9. Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan tepat waktu kepada Komisaris.	0.4 %	2	0.008	9. Direksi telah menyerahkan data dan informasi secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu, namun Dewan Komisaris tetap merasa kurang.
10. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	0.4 %	1	0.004	10. Terpenuhi.
C. Efektivitas Rapat Direksi				
1. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi	1 %	1	0.01	1. Terpenuhi. Selama tahun 2012 Direksi telah melakukan rapat sebanyak 25 (dua puluh lima) kali rapat Direksi.
2. Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	1 %	1	0.01	2. Setiap keputusan Direksi terlebih dahulu dilakukan rapat antar Direksi.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
3. Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.	1 %	2	0.02	3. Terpenuhi, semua hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat secara tertulis termasuk keputusannya dan dissenting opinions (apabila ada) yang disimpan oleh Group SDM.
4. Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.	1 %	3	0.03	4. Tidak semua keputusan rapat Direksi dapat dilaksanakan.
D. Transparansi, Hubungan Keuangan, Kepengurusan dan Keluarga serta Larangan Direksi				
1 Seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan: • Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) • Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham Pengendali Bank. • Remunerasi dan fasilitas lain pada Laporan Pelaksanaan GCG.	1 %	1	0.01	1. Berdasarkan keterangannya, semua Direksi PT. Bank Sulselbar tidak memiliki perusahaan baik dibidang keuangan maupun lainnya dan antara anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun keuangan. Untuk remunerasi dan fasilititas lainnya Direksi PT. Bank Sulselbar hanya mempergunakan apa yang telah ditentukan oleh Bank.
2. Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	1 %	3	0.03	2. Direksi PT. Bank Sulselbar berusaha untuk tidak menggunakan fasilitas Bank untuk kepentingan pribadinya. Disamping itu Direksi Bank Sulselbar telah menandatangani Kode etik.
3. Direksi tidak mengambil dan/ atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain Remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1 %	3	0.03	3. Direksi Bank Sulselbar hanya menerima fasilitas dan remunerasi sesuai dengan yang ditetapkan

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS SELF ASSESMENT
4. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.	1 %	1	0.01	4. Direksi Bank Sulselbar hingga saat ini tidak memiliki saham pada Perusahaan lainnya.
E. Informasi *Fit and Proper Test* (F&P Test)				
1. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.	1.3 %	1	0.013	1. Direksi Bank Sulselbar memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sesuai dengan yang ditetapkan
2. Presiden Direktur atau Direktur Utama, berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga.	1.3 %	1	0.013	2. Direktur Utama Bank Sulselbar tidak memiliki hubungan keuangan, pengurusan, pemilikan saham dan hubungan keluarga dengan PSP.
3. Seluruh anggota Direksi telah lulus F&P Test dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia.	1.3 %	1	0.013	3. Terpenuhi

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 1	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara sangat efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi sangat baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 2	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rapat Direksi terselenggara secara efektif dan efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.
Peringkat 3	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi cukup sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta memenuhi ketentuan yang berlaku. • Seluruh anggota Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi cukup memenuhi prinsip-prinsip GCG, berjalan cukup efektif dan terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rapat Direksi terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi cukup baik dan tidak pernah melanggar ketentuan/perundangan yang berlaku.
Peringkat 4	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta kurang memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara kurang independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kurang memenuhi prinsip-prinsip GCG dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rapat Direksi terselenggara secara kurang efektif dan kurang efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi kurang baik dan pernah melanggar ketentuan/ perundangan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	
Peringkat 5	• Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. • Direksi bertindak dan mengambil keputusan secara tidak independen. • Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tidak memenuhi prinsip-prinsip GCG yang dapat berakibat pada penurunan kualitas GCG atau penurunan Peringkat Komposit GCG Bank, aspek Manajemen dalam CAMELS, serta Peringkat Komposit CAMELS. • Rapat Direksi terselenggara secara tidak efektif dan tidak efisien. • Aspek transparansi anggota Direksi tidak baik dan sering melakukan pelanggaran terhadap ketenuan/perundangan yang berlaku.

II. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAKDAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 3 (tiga)
Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi Bank Sulselbar memenuhi prinsip GCG tersebut seperti jumlah komposisi, integritas dan kompetensi Direksi sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha bank dan memenuhi ketentuan yang berlaku walaupun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak ditindak lanjuti dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT* GOOD CORPORATE COVERNANCE

FAKTOR PENILAIAN:

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

TUJUAN

Untuk menilai:

- kecukupan struktur, kualifikasi, independensi dan kompetensi Komite;
- efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Komite;
- efektivitas dan efisiensi pelaksanaan rapat Komite.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
SUB FAKTOR **A. Struktur, Komposisi, Rangkap Jabatan dan Independensi Anggota Komite**				
1. **Komite Audit** • Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan. • Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. • Paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. • Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	0.7 %	2	0.014	1. Terpenuhi, walaupun Ketua dari Komite Audit adalah Pelaksana Tugas Sementara akan tetapi berasal dari Komisaris Indenpendent. Hal ini disebabkan dikarenakan 1 (satu) orang Komisaris Independent masih dalam proses untuk mengikuti *fit and proper test* di Bank Indonesia, sehingga Ketua Komite ini merangkap jabatan juga sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko.
2. **Komite Pemantau Risiko** • Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang manajemen risiko. • Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. • Paling kurang 51% (lima puluh perseratus) anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen. • Anggota Komite Pemantauan Risiko memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.	0.7 %	1	0.007	2. Terpenuhi, semua yang disyaratkan telah dipenuhi.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3. **Komite Remunerasi dan Nominasi** • Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. • Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. • Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen • Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang. • Apabila Bank membentuk Komite tersebut, secara terpisah maka: o Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank; dan o Pejabat Eksekutif anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan *succession plan* Bank.	0.7 %	3	0.021	3. Terpenuhi dengan pengecualian. Hal ini disebabkan karena Ketua Komite ini bukan berasal dari Komisaris Independent dan jumlah anggota Komite ini kurang dari pada yang ditetapkan. Komite Remunerasi dan Nominasi pada Bank Sulselbar tidak dipisah.
4. Rangkap Jabatan Anggota Komite • Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko, tidak berasal dari Direksi dari Bank yang sama maupun Bank lain. • Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank yang sama, Bank lain dan/atau perusahaan lain telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	0.7 %	1	0.007	4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau risiko bukan merupakan Direksi pada Bank lain dan tidak sedang merangkap jabatan.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
5. Independensi Anggota Komite • Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. • Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan Anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama dan tidak melakukan fungsi pengawas atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan.	0.7 %	3	0.007	5. Secara keseluruhan, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga. 1 (satu) orang anggota Komisaris Independent belum bisa menjabat sebagai Komisaris Independent dengan alasan bahwa belum mengikuti *fit and proper test* dan belum sepenuhnya menjalani masa *cooling off*.
B. Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Komite				
1. Komite Audit Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: • Komite Audit telah pemantauan dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. • Komite Audit telah me*review*: o pelaksanaan tugas SKAI; o kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku; o kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan o pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia. • Komite Audit telah memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.	1.1 %	2	0.022	1. Kesemua yang ditentukan telah dilaksanakan oleh Komite Audit, walaupun hasil kerja Komite Audit belum maksimal. Untuk tahun 2012 ini, Ketua Komite Audit dirangkap juga oleh Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
2. Komite Pemantau Risiko Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Pemantau Risiko: • mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko; • memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.	1.1 %	2	0.022	2. Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugasnya cukup baik walaupun masih ditemukan kelemahan dalam hasil kerjanya.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris: • Komite Remunerasi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi: o Dewan Komisaris dan Direksi dan telah disampaikan kepada RUPS; dan o Pejabat Eksekutif dan pegawai dan telah disampaikan kepada Direksi. • Terkait dengan kebijakan remunerasi, Komite telah mempertimbangkan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, dan sasaran dan strategi jangka panjang Bank. • Terkait dengan kebijakan nominasi, Komite telah menyusun sistem, serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS. • Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; • Komite Nominasi, telah memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.	1.1 %	3	0.033	3. Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi tidak berjalan dengan baik. Hal ini didasari oleh terkait dengan remunerasi Dewan Komisaris tidak memperoleh persetujuan RUPS. Disamping itu, untuk pemilihan Komisaris Independent tidak terdapat rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
C. Efektivitas Rapat Komite				
1. Rapat Komite diselenggarakan sesuai kebutuhan Bank.	0.6 %	1	0.006	1. Terpenuhi
2. Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen	0.6 %	1	0.006	2. Terpenuhi
3. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai.	0.6 %	3	0.018	3. Dalam Komite ini tidak ada perwakilan dari Komisaris Independent dan jumlah komite ini berkurang 1 (satu) orang, akan tetapi hal tersebut tetap korum.
4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.	0.6 %	1	0.006	4. Terpenuhi
5. Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan perbedaaan pendapat (*dissenting opinions*) secara jelas dan wajib didokumentasikan dengan baik.	0.6 %	1	0.006	5. Hasil rapat berikut *dissenting opinions* di dokumentasikan dan disimpan oleh masing-masing komite.
6. Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.	0.6 %	1	0.006	6. Kesemua rekomendasi dari seluruh Komite disampaikan kepada Dewan Komisaris.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 1	• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sangat sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan sangat efektif dan tidak ada kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, sangat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara sangat efektif dan efisien.

III. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR EFEKTIVITAS DAN KELENGKAPAN KOMITE	
Peringkat 2	• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan efektif namun masih terdapat kelemahan minor. • Rekomendasi Komite-Komite, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara efektif dan efisien.
Peringkat 3	• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite cukup sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite telah berjalan cukup efektif namun terdapat kelemahan-kelemahan yang apabila tidak segera diperbaiki dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor. • Rekomendasi Komite-Komite, cukup bermanfaat dan cukup dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara cukup efektif dan cukup efisien.
Peringkat 4	• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite kurang sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan kurang efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang cukup signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan Peringkat Faktor dan Komposit GCG. • Rekomendasi Komite-Komite, kurang bermanfaat dan kurang dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan kurang sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara kurang efektif dan efisien.
Peringkat 5	• Komposisi dan kompetensi anggota Komite-Komite tidak sesuai dibandingkan dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank. • Pelaksanaan tugas Komite-Komite berjalan tidak efektif dan terdapat kelemahan penerapan yang signifikan yang dapat mengakibatkan penurunan peringkat faktor dan peringkat komposit GCG. • Rekomendasi Komite-Komite, tidak bermanfaat dan tidak dapat dipergunakan sebagai bahan acuan keputusan Dewan Komisaris. • Penyelenggaraan rapat Komite-Komite berjalan tidak sesuai dengan pedoman intern dan terselenggara secara tidak efektif dan efisien.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 3 (tiga)
Pelaksanaan tugas-tugas dari Komite yang ada pada Bank Sulselbar tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena persyaratan minimal masih ada yang tidak dilaksanakan.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

TUJUAN

Untuk menilai efektifitas pengelolaan benturan kepentingan serta kecukupan aspek pengungkapan (*disclosure*)-nya serta dampak benturan kepentingan tersebut terhadap profitabilitas Bank.

Penanganan Benturan Kepentingan

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1. Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai : • benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank; • administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3.3 %	2	0.066	1. Pengaturan mengenai benturan kepentingan telah diatur dalam Kode etik dan berlaku untuk seluruh stake holder Bank Sulselbar. Namun untuk kedepannya perlu dibuatkan SOP tersendiri.
2. Benturan kepentingan telah diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3.3 %	2	0.033	2. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi benturan kepentingan.
3. Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.	3.3 %	2	0.033	3. Selama tahun 2012 tidak pernah terjadi benturan kepentingan.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KRITERIA PERINGKAT[1]– PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Peringkat 1	• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang sangat lengkap dan efektif. • Seluruh benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan sangat baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 2	• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah diungkap dalam setiap keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KRITERIA PERINGKAT[1]– PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	
Peringkat 3	• Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan yang cukup lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan telah cukup diungkap dalam keputusan, telah dilengkapi dengan risalah rapat, telah diadministrasikan dan terdokumentasi dengan baik. • Benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 4	• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan Bank kurang lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan kurang diungkap dalam keputusan, sebagian telah dilengkapi dengan risalah rapat, belum diadminsitrasikan secara lengkap dan didokumentasikan secara kurang baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
Peringkat 5	• Kebijakan, sistem dan prosedur benturan kepentingan tidak lengkap dan efektif. • Benturan kepentingan tidak diungkap dalam keputusan, tidak dilengkapi dengan risalah rapat, tidak diadministrasikan dan didokumentasikan dengan baik. • Benturan kepentingan telah merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

IV. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 2 (dua)
Peraturan yang mengatur mengenai Benturan Kepentingan diatur dalam Kode etik, dimana kode etik ini berlaku untuk semua *stake holder* Bank Sulselbar termasuk didalamnya Dewan Komisaris, Direksi dan anggota Komite-komite Bank Sulselbar.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

TUJUAN

Untuk menilai:

- tingkat kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemenuhan komitmen dengan lembaga otoritas yang berwenang;
- efektivitas pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan;
- menjamin ketersediaan pedoman kerja, sistem dan prosedur kerja yang kini di seluruh bidang/jenjang organisasi;
- tersedianya MIS yang memadai agar Satuan Kerja Kepatuhan dapat menjalankan tugasnya secara efektif.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1. Direktur Kepatuhan bertugas: a. Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melalui: • menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian; • memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan; • memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang.	1.3 %	2	0.026	1. Direktur Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku melalui Memorandum-memorandum yang ditujukan kepada Direksi yang terkait, namun kegiatan pemantauan tersebut bersifat pasif tidak aktif, serta perlu ditingkatkan. Setiap Pedoman, perjanjian, kredit/ pembiayaan limit Direksi atau sesuatu yang bersifat materil selalu dimintakan kajian/pertimbangan kepada Direktur Kepatuhan. Bahkan apabila ditemukan Keputusan Direksi yang bertentangan maka Direktur Kepatuhan menyampaikan bahwa keputusan tersebut melanggar aturan baik itu Peraturan/ Surat Edaran Bank Indonesia maupun peraturan dari otoritas lainnya maupun Undang-Undang itu sendiri.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
b. Mencegah Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang Bank Asing agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris atau pihak-pihak yang berwenang sesuai struktur organisasi Bank. d. Penunjukan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				Direktur Kepatuhan setiap bulannya mengirim laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris terhadap kinerjanya. Pengangkatan Direktur Kepatuhan dilakukan sesuai dengan aturan Bank Indonesia dan Anggaran Dasar Bank Sulselbar. Disamping itu, melalui Group Kepatuhan, Memorandum Direktur Kepatuhan telah dilakukan pemantauannya dan apabila tidak ditinjaklanjuti maka Group Kepatuhan akan memberikan masukan kepada Direktur Kepatuhan.
2. Direksi telah: a. Menyetujui kebijakan kepatuhan Bank dalam bentuk dokumen formal tentang fungsi kepatuhan yang efektif. b. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. c. Bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi kepatuhan yang efektif dan permanen sebagai bagian dari kebijakan kepatuhan Bank secara keseluruhan.	1.3 %	2	0.026	2. Kesemua kebijakan Kepatuhan Bank telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya. Disamping itu, kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi. Namun terkadang hal tersebut tidak berjalan dengan lancar.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3. Satuan Kerja Kepatuhan telah: a. Independen terhadap satuan kerja operasional; b. Bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kesesuaian pedoman, sistem dan prosedur seluruh Satuan Kerja dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kini di seluruh jenjang organisasi.	1.3 %	2	0.026	3. Pada prinsipnya Group Kepatuhan memiliki independen dari group Operasional lainnya. Terkait dengan hal point 3.B. telah terlaksana walaupun masih dirasa kurang.
4. Bank telah: a. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif; b. Menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan dan laporan khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait.	1.3 %	1	0.013	4. Sumber Daya pada Group Kepatuhan telah mencukupi.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 1	• Kepatuhan Bank tergolong sangat baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan sangat efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan seluruh satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur kerja seluruh jenjang organisasi tersedia secara sangat lengkap, kini dan sangat sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 2	• Kepatuhan Bank tergolong baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan telah diselesaikan pada masa triwulan penilaian CAMELS Rating. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayorita satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	
Peringkat 3	• Kepatuhan Bank cukup baik namun pernah melakukan pelanggaran yang tidak material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada masa triwulanan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan cukup efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia cukup lengkap, kini dan sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 4	• Kepatuhan Bank kurang baik dan pernah melakukan pelanggaran yang cukup material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan akan diselesaikan pada 2 (dua) masa triwulan berikutnya. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan kurang efektif . • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan melakukan *review* namun dalam frekuensi yang tidak teratur terhadap kepatuhan sebagian satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia kurang lengkap, kini dan kurang sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
Peringkat 5	• Kepatuhan Bank tidak baik dan sering melakukan pelanggaran yang material terhadap ketentuan dan komitmen yang telah dibuat, dan kemungkinan penyelesaiannya akan memakan waktu lebih dari 2 (dua) masa triwulanan. • Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan berjalan tidak efektif. • Direktur Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan tidak pernah melakukan *review* terhadap kepatuhan satuan kerja operasional. • Pedoman, sistem dan prosedur seluruh jenjang organisasi tersedia tidak lengkap, kini dan tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

V. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN [2]

Peringkat 2

Tingkat Kepatuhan Bank Sulselbar terhadap setiap aturan dapat digolongkan baik walaupun masih ditemukan kekurangan disana-sini. Pelaksanaan tugas dan independensi Direktur Kepatuhan dan Group Kepatuhan berjalan efektif dan senantiasa melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas satuan kerja operasional. Semua SOP ada pada group Kepatuhan walaupun tidak lengkap, dan terdapat SOP yang telah dikinikan baik dilakukan oleh group kepatuhan maupun atas rekomendasi dari Group Kepatuhan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Group Kepatuhan juga melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dari Memorandum Group Kepatuhan sehingga dapat dikatakan telah aktif melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan guna terwujudnya budaya kepatuhan.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

TUJUAN

Untuk menilai:

- kecukupan fungsi audit intern Bank, untuk menilai seluruh aspek kegiatan sesuai peraturan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku;
- efektivitas pelaksanaan tugas audit intern Bank dalam menciptakan Bank yang sehat dan mampu berkembang secara wajar.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern

	KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai		ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1.	Direksi bertanggung jawab atas: • Tenciptanya struktur pengendalian intern, dan menjamin terselenggaranya fungsi audit intern Bank dalam setiap tingkatan manajemen. • Tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. • Tersedianya laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank kepada RUPS.	1.7 %	2	0.034	1.	Terpenuhi namun untuk laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank belum diserahkan kepada RUPS.
2.	Bank: • Menerapkan fungsi audit intern secara efektif pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat. • Memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan: o Menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter); o Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI); o Menyusun panduan audit intern. • Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja operasional. • Melakukan kaji ulang secara berkala atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak eksternal setiap tiga tahun. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	1.7 %	3	0.051	2.	Bank telah memiliki Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) Internal Audit Charter dan Panduan Audit Intern namun tidak pernah dilakukan pengkinian. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya Audit Intern Bank kurang melakukan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian intern bank maupun efektivitas sistem pengendalian intern maupun kualitas kinerja bank, pemantauan yang kurang komprehensif dalam penyelesaian hasil temuan hingga ke akar permasalahan.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Intern				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3. SKAI telah: • Melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. • Melaksanakan tugas sekurang-kurangnya meliputi penilaian: o kecukupan Sistem Pengendalian Intern Bank; o efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; o kualitas kinerja. • Melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. • Memantau, menganalisis dan melaporkan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan auditee. • Menyusun, dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.	1.7 %	3	0.051	3. Terpenuhi, walaupun masih terdapat hal-hal tertentu yang belum dilaksanakan.

VI. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	
Peringkat 1	• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan sangat efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan tidak ada kelemahan minor. • SKAI telah menjalankan fungsinya secara sangat independen dan obyektif.
Peringkat 2	• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank telah berjalan efektif, pedoman intern sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang telah/dapat diatasi dengan tindakan rutin. • SKAI menjalankan fungsinya secara independen dan obyektif.
Peringkat 3	• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. • SKAI menjalankan fungsinya secara cukup independen dan obyektif.
Peringkat 4	• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan kurang efektif, pedoman intern kurang sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang cukup signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara kurang independen dan obyektif.
Peringkat 5	• Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan tidak efektif, pedoman intern tidak sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB dan terdapat kelemahan yang signifikan. • SKAI menjalankan fungsinya secara tidak independen dan obyektif.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN [2]

Peringkat 3 (tiga)

GAI Bank telah menjalankan fungsinya Pelaksanaan fungsi audit intern Bank berjalan cukup efektif, pedoman intern cukup sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan dalam SPFAIB namun terdapat kelemahan minor yang apabila tidak segera diatasi dapat menurunkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:
FUNGSI AUDIT EKSTERN

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

TUJUAN

Untuk menilai:
- efektivitas pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik;
- kualitas hasil audit Akuntan Publik;
- kesesuaian penunjukkan Akuntan Publik dan KAP dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia.	1 %	1	0.01	1. Terpenuhi
2. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang sama oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.	1 %	1	0.01	2. Terpenuhi, dimana penunjukan Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sumarmadji & Dadang merupakan kedua kalinya.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan KAP terlebih dulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.	1 %	1	0.01	3. Pada RUPS Tahun 2012 RUPS memberi kuasa kepada Direksi untuk menentukan Kantor Akuntan Publik dan Direksi menunjuk Kantor Akutansi Publik Doli, Bambang, Sumarmadji & Dadang dan sebelum penunjukan tersebut, Komite Audit telah memberikan rekomendasi.
4. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sekurang-kurangnya memenuhi aspek-aspek: • Kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk; • Legalitas perjanjian kerja; • Ruang lingkup audit; • Standar profesional akuntan publik, dan • Komunikasi Bank Indonesia dengan Kantor Akuntan Publik dimaksud.	1 %	1	0.01	4. Isi perjanjian dengan KAP memenuhi standar akutansi pada umumnya sebagaimana diatur dalam SEBI mengenai GCG.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Audit Ekstern					
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*	
5. Akuntan Publlik dan KAP yang ditunjuk, telah: • Menyampaikan hasil audit dan management letter kepada bank tepat waktu; • Mampu bekerja secara independen, memenuhi *standard* profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	1 %	2	0.02	5.	Kantor Akuntan dan KAP yang dipilih oleh Bank telah menyampaikan laporan hasil audit dan management letter secara tepat waktu dan telah bekerja dengan independen sesuai dengan *standard* akuntan publik dan perjanjian yang ditetapkan.

VII. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	
Peringkat 1	• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik sangat efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan[3]. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik sangat baik. • Pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik/KAP sangat independen dan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 2	• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan[3] namun terdapat kekurangan minor. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP telah independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 3	• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik cukup efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan[3] namun terdapat kekurangan. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik cukup baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP cukup independen dan cukup memenuhi kriteria yang ditetapkan.
Peringkat 4	• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik kurang efektif dan sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan[3] dan terdapat kekurangan yang cukup material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik kurang baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP kurang independen.
Peringkat 5	• Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik tidak efektif dan tidak sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan[3] dan terdapat kekurangan yang material. • Kualitas dan cakupan hasil audit Akuntan Publik tidak baik. • Pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik/KAP tidak independen.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 2 (dua)
Pelaksanaan audit oleh KAP yang terdaftar dan efektif, namun masih terdapat temuan dari Komite Audit bersifat materiil yang dapat mengganggu laporan keuangan.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENERAPAN MANAJEMEN Risiko TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TUJUAN

Untuk menilai :

- efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta risiko yang dihadapinya;
- memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen) telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tangung jawab yang jelas, diantaranya: • Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko. • Mengevaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen riisko. • Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang terkait dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2.5%	2	0.050	1. Terpenuhi, dimana setiap saat Bank melalui Group Manajemen Risiko bersama-sama dengan Komite Pemantau risiko senantiasa melakukan pertemuan setiap saatnya terkait dengan risiko-risiko yang timbul/ada pada baak saat ini terhadap setiap kebijakan Direksi.
2. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya: • Melakukan kaji ulang terhadap metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. • Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas pengelolaan risiko yang efektif. • Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia pengelola risiko secara berkala dan berkelanjutan.	2.5%	2	0.050	2. Terpenuhi, dimana Direksi bersama-sama dengan Group Manjemen Risiko telah melakukan kaji ulang setiap saat pada tahun berjalan maupun dalam perencanaan melakukan penilaian risiko, implementasi SIM dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Setiap tahunnya baik karyawan pada Group Manajemen Risiko maupun Group lainnya pada Bank senantiasa diikut sertakan dalam pelatihan Manajemen Risiko. Akan tetapi masih ditemukan kelemahan yang bersifat materiil yang apabila dibiarkan dapat mengganggu penerapan Manajemen Risiko dalam sistem pengendalian intern. Kajian – kajian yang dilakukan oleh Group Manajemen Risiko masih bersifat pasif, dalam artian hanya apabila ada permintaan baru dilakukan pengkajian.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern				
KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3. Bank telah: • Memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. • Secara efektif mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Bank serta memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai. • Menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.	2.5%	2	0.050	3. Terlaksana, namun kebijakan, prosedur dan lainnya masih bersifat standar serta tidak pernah dilakukan pengkinian.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 1	• Manajemen sangat efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen sangat aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan sangat efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank sangat komprehensif dan sangat sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen sangat efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sangat sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern, tidak menunjukkan adanya kelemahan.
Peringkat 2	• Manajemen efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank komprehensif dan sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan, namun telah dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 3	• Manajemen cukup efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen cukup aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan cukup efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank cukup komprehensif dan cukup sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen cukup efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat, ketentuan yang berlaku serta cukup sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan yang tidak material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.

VIII. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN	
Peringkat 4	• Manajemen kurang efektif mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen kurang aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan kurang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank kurang komprehensif dan kurang sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen kurang efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta kurang sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya kelemahan material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi bank.
Peringkat 5	• Manajemen tidak efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko Bank. • Manajemen tidak aktif pemantauan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sistem informasi manajemen yang komprehensif dan tidak efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. • Prosedur dan penerapan pengendalian intern Bank tidak komprehensif dan tidak sesuai dengan tujuan, ukuran dan kompleksitas usaha dan risiko yang dihadapi Bank. • Manajemen tidak efektif dalam memantau kesesuaian kondisi Bank dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat dan ketentuan yang berlaku serta tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank. • Penerapan pengendalian intern menunjukkan adanya beberapa kelemahan dan pelanggaran material, yang apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang menyeluruh akan menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank atau hampir dipastikan akan menimbulkan kerugian yang material.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 3 (tiga)

Manajemen cukup efektif dalam mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko, namun sifat kerja dari Group Manajemen Risiko masih bersifat pasif dalam artian menunggu. Selain itu, standar operasional mitigasi risiko Bank belum pernah dilakukan pengkinian sehingga perlu dilakukan pengkinian terhadap SOP tersebut terutama risiko operasional, kredit, dan pasar.

KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT *GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURES*)

TUJUAN

Untuk menilai:

- penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
- penerapan manajemen risiko terkait dengan konsentrasi penyediaan dana;
- independensi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyediaan dana khususnya kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
1. Bank telah : • Memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar berikut, *monitoring* dan penyelesaian masalahnya. • Secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.	1.9 %	1	0.019	1. Terpenuhi, walaupun Bank tidak melakukan secara berkala melakukan kebijakan, sistem dan prosedur penyediaan dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar.
2. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah : • Memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. • Memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/ diversifikasi portofolio penyediaan dana.	1.9 %	1	0.019	2. Terpenuhi, bank dalam melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait senantiasa berusaha mematuhi mengenai BMPK dan menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kemampuan modal dari Bank itu sendiri.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (related party) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)					
KRITERIA/INDIKATOR		Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3.	Diputuskan manajemen, secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya.	1.9 %	1	0.019	3. Terpenuhi
4.	Bank telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.	1.9 %	1	0.019	4. Terpenuhi walaupun ternyata masih terdapat perbedaan pengertian Pihak terkait tersebut.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	
Peringkat 1	• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan sangat lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar . • Tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian. • Diversifikasi penyediaan dana sangat merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan sangat independen
Peringkat 2	• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang up to date dan lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun pernah ada pelampauan BMPK, namun telah diselesaikan. • Diversifikasi penyediaan dana merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana tidak signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan secara independen.
Peringkat 3	• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup up to date, dan cukup lengkap untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, karena masih dalam jangka waktu penyelesaian sesuai action plan. • Diversifikasi penyediaan dana cukup merata. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan cukup independen.

IX. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURES)

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	
Peringkat 4	• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang kurang up to date, kurang lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku muntuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.. • Tidak ada pelanggaran BMPK dan maupun prinsip kehati-hatian, namun ada pelampauan BMPK yang belum diselesaikan, tetapi telah melampaui jangka waktu penyelesaian action plan • Diversifikasi penyediaan dana kurang merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan kurang independen.
Peringkat 5	• Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis namun tidak up to date, tidak lengkap dan belum sesuai ketentuan yang berlaku untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. • Ada pelanggaran BMPK dan prinsip kehati-hatian maupun ada pelampuan BMPK yang penyelesaiannya telah melampaui masa 2 (dua) jangka waktu penyelesaian action plan. • Diversifikasi penyediaan dana tidak merata atau jumlah penyediaan dana besar/debitur inti dibandingkan dengan total penyediaan dana sangat signifikan. • Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar dilakukan dengan tidak independen.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 1 (satu)
Bank Sulselbar telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang cukup baik untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan. Dalam penyediaan dana besar kepada Debitur maupun pihak terkait tidak pernah ada pelanggaran dan pelampauan BMPK maupun prinsip kehati-hatian serta penyediaan dana besar tersebut tidak terfokus hanya pada suatu kelompok saja akan tetapi merata walaupun ada kecenderungan hanya fokus pada Pegawai Negeri Sipil.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* SERTA PELAPORAN INTERNAL

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

TUJUAN

Untuk menilai:

- ketepatan waktu, keakurasian dan cakupan transparansi informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan kepada *stakeholder*s (public);
- efektifitas pengelolaan informasi produk dan jasa Bank, pengelolaan pengaduan nasabah serta pengelolaan data pribadi nasabah;
- cakupan laporan pelaksanaan GCG yang disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh dan tepat waktu;
- cakupan pihak pihak yang menerima laporan pelaksanaan GCG;
- keandalan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Bank, khususnya Sistem Pelaporan Internal mampu menyajikan data dan informasi secara tepat waktu, lengkap, akurat, serta kemanfaatannya dalam pengambilan keputusan (bisnis).

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
SUB FAKTOR **A. Penerapan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan**				
1. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder*s termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah melaporkannya kepada Bank Indonesia atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.	1.7 %	1	0.017	1. Terpenuhi, setiap laporan keuangan Bank telah dipublikasikan pada harian nasional dan lokal serta *website* milik Bank.
2 Bank wajib dan telah: • Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. • Mentransparansikan informasi produk Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.	1.7 %	1	0.017	2. Terpenuhi, laporan yang disajikan secara benar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Hal ini termasuk memberikan informasi terhadap setiap produk bank dimana Bank menjelaskan produk bank tersebut dan apabila ada pengaduan nasabah melalui media massa maka bank senantiasa menjawab pengaduan nasabah tersebut juga melalui media massa.

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
. • Mentransparansikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. • Menyampaikan Laporan Tahunan paling tidak kepada: o Bank Indonesia; o YLKI; o Lembaga Pemeringkat di Indonesia; o Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; o LPPI; o 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; o 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan.				Terkait pelaporan tersebut selain dikirim kepada Bank Indonesia juga dikirim kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI tentang GCG. Walaupun pada akhirnya masih ditemukan pula kekurangan substansi dalam laporan tersebut.
3. Bank telah mentransparansikan laporan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage Bank, meliputi: • Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan)-nya; • Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank.	1.7 %	1	0.017	3. Terpenuhi namun nama *website*/ homepage masih menggunakan nama lama yaitu www.banksulselbar.co.id.
B. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*				
1. Bank telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan isi dan cakupan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	1 %	2	0.020	1. Terpenuhi
2. Laporan pelaksanaan GCG telah: • mencerminkan kondisi Bank yang sebenarnya atau sesuai hasil self assessment Bank. • dilampiri hasil self assessment Bank.	1 %	2	0.020	2. Terpenuhi

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
3. Dalam hal terdapat perbedaan Predikat dalam penilaian hasil self assessment dengan hasil pengawasan/pemeriksaan Bank Indonesia,Bank: • merevisi Nilai Komposit dan Predikat hasil *self assessment* dimaksud kepada publik melalui Laporan Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat. • menyampaikan revisi hasil self assessment GCG Bank secara lengkap kepada Bank Indonesia.	1 %	1	0.010	3. Pada tahun 2012, laporan GCG Tahun 2011 dirubah penilaiannya dari Baik menjadi Cukup Baik. Dan bank telah melakukan revisi tersebut serta melaporkannya pada Laporan Keuangan Tahun 2012.
4. Bank telah menyampaikan laporan pelaksanaan GCG sekurang-kurangnya kepada pihak-pihak: • Bank Indonesia; • YLKI; • Lembaga Pemeringkat di Indonesia; • Asosiasi Bank-Bank di Indonesia; • LPPI; • 2 (dua) Lembaga Penelitian bidang Ekonomi dan Keuangan; • 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan secara lengkap dan tepat waktu.	1 %	1	0.010	4. Laporan GCG tersebut telah dikirim kepada pihak-pihak yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI dan SEBI tentang GCG.
5. Bank telah menyajikan laporan pelaksanaan GCG dalam homepage secara tepat waktu	1 %	1	0.010	5. Terpenuhi
C. Kecukupan Pelaporan Internal				
1. Tersediaanya pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh SIM yang handal.	1.3%	1	0.013	1. Terpenuhi
2. Tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu.	1.3 %	1	0.013	2. Terpenuhi
3. Terdapat sistem informasi yang memadai yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.	1.3 %	1	0.013	3. Terpenuhi walaupun perlu ditingkatkan.
4. Terdapat *IT security system* yang memadai.	1.3 %	1	0.013	4. Terpenuhi walaupun perlu ditingkatkan.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	
Peringkat 1	• Bank sangat transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage Bank dan media yang sangat mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia sangat tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank sangat transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan sangat efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah dengan sangat memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG sangat lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara sangat tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan sangat tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 2	• Bank transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang memadai. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tepat waktu, lengkap, akurat, kini dan utuh. • Bank transparan menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 3	• Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik melalui homepage dan media yang cukup mudah diakses. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara cukup tepat waktu, lengkap, akurat dan kini. • Bank cukup transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan cukup efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara cukup memadai. • Cakupan laporan Pelaksanaan GCG cukup lengkap, akurat, kini dan utuh, telah disampaikan secara cukup tepat waktu kepada *shareholder* sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank cukup mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta cukup handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN, LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN PELAPORAN INTERNAL

KRITERIA PERINGKAT[1]– FAKTOR PENYEDIAAN KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	
Peringkat 4	• Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia kurang lengkap dan kurang akurat. • Bank kurang transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah dengan kurang efektif serta memelihara data dan informasi pribadi nasabah secara kurang memadai. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG kurang lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada *shareholder* kurang sesuai ketentuan yang berlaku/terlambat. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank kurang mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta kurang handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.
Peringkat 5	• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada *shareholder* tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN[2]

Peringkat 2 (dua)
Kesemua laporan telah disampaikan kepada Bank Indonesia dan pihak-pihak lainnya yang berkompeten terhadap laporan tersebut. Perbaikan laporan GCG tahun 2011 telah diperbaiki dan penilaiannya mengikuti nilai yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Terkait perbaikan laporan tersebut akan dikirimkan bersamaan dengan laporan keuangan tahun 2012.

KERTAS KERJA *SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE COVERNANCE*

FAKTOR PENILAIAN:

RENCANA STRATEGIS BANK

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

TUJUAN

Untuk menilai :

- kecukupan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) dikaitkan dengan visi dan misi Bank, sasaran strategis serta nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) –nya;
- kematangan penyusunan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
Penyusunan dan Komunikasi Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*)				
1. Rencana strategis Bank telah disusun dalam bentuk Rencana Korporasi (corporate plan) dan Rencana Bisnis (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank.	0.8 %	3	0.024	1. Terpenuhi
2. Rencana Bisnis Bank (*business plan*) telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achieable*), memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif terhadap perubahan internal dan eksternal.	0.8 %	3	0.024	2. Terpenuhi
3. Rencana Korporasi dan Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.	0,8 %	1	0.008	3. Rencana bisnis yang disusun oleh Direksi telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan telah disampaikan kepada BI setempat
4. Direksi telah : • Mengkomunikasikan Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (business plan) kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank; • Melaksanakan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*) secara efektif;	0.8 %	3	0.024	4. Terpenuhi, walaupun tidak semua rencana bisnis tersebut dapat dilaksanakan oleh Bank.

KRITERIA/INDIKATOR	Bobot	Peringkat	Nilai	ANALISIS *SELF ASSESMENT*
5. Penyusunan dan penyampaian Rencana Bisnis (*corporate plan*) Bank: • Berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank (*corporate plan)*; • Memperhatikan tingkat risiko komposit *Risk Control System* (RCS) – *strategic Risk*; • Memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank; • Memperhatikan prinsip kehati-hatian serta prinsip perbankan yang sehat;	0.8 %	4	0.032	5. Terpenuhi
6. Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (*corporate plan*).	0.8 %	3	0.025	6. Terpenuhi, walaupun perlu ditingkatkan

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 1	• Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sangat sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. • Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun sangat realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi Rencana Bisnis sangat sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*). • *Low Strategic Risk Rating.*
Peringkat 2	• Rencana Bisnis Bank (*business plan*) sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (*corporate plan*) Bank. • Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*). • *Low Strategic Risk Rating* atau *Moderate to Low Strategic Risk Rating.*
Peringkat 3	• Rencana Bisnis Bank (*business plan*) cukup sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi (corporate plan) Bank. • Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*). • *Moderate Strategic Risk Rating.*

XI. RENCANA STRATEGIS BANK

KRITERIA PERINGKAT[1] – FAKTOR RENCANA BISNIS BANK UMUM	
Peringkat 4	• Rencana Bisnis Bank (*business plan*) kurang sesuai dengan visi dan misi Bank serta Rencana Korporasi *(corporate plan)* Bank. • Rencana Korporasi (*corporate plan*) dan Rencana Bisnis Bank (*business plan*) disusun kurang realistis dan kurang memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. • Realisasi rencana bisnis kurang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*). • *High Strategic Risk Rating* atau *Moderate to high Strategic Risk Rating.*
Peringkat 5	• Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi keuangan dan non-keuangan kepada publik. • Cakupan informasi keuangan dan non-keuangan tersedia secara tidak lengkap dan kurang akurat. • Bank tidak transparan dalam menyampaikan informasi produk dan jasa, tidak menerapkan pengelolaan pengaduan nasabah serta tidak memelihara data dan informasi pribadi nasabah. • Cakupan laporan pelaksanaan GCG tidak lengkap, akurat, kini dan utuh, disampaikan kepada *shareholder* tidak sesuai ketentuan yang berlaku. • Sistem Informasi Manajemen Bank khususnya terkait Sistem Pelaporan Internal Bank tidak mampu menyediakan data dan informasi secara tepat waktu, akurat, lengkap serta tidak handal dan efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

KESIMPULAN : IDENTIFIKASI MASALAH, RENCANA TINDAK DAN WAKTU PENYELESAIAN2

Peringkat 3

- Dalam membuat rencana stategis Bank Sulselbar cukup sesuai dengan misi dan visinya serta rencana korporasi. Dalam penyusunannya, rencanan bisnis dan Rencana Korporasi disusun cukup realistis dan telah memperhatikan seluruh faktor eksternal dan faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Realisasi rencana bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (*business plan*).

BAB 8

DATA PERUSAHAAN

Untuk memberikan jasa layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor, dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/ instansi lainnya

kSulselbar
RPORATE
DATA

STRUKTUR ORGANISASI

Keterangan :

Unit Kerja Baru

Garis Komando

Garis Koordinasi

RUPS
DEWAN KOMISARIS
KOMITE
1. Audit
2. Remunerasi & Nominasi
3. Pemantau Risiko
DIREKTUR UTAMA (Ellong Tjandra)
STAF AHLI
DIREKTUR UMUM (YanuarFachrudin)
DIREKTUR PEMASARAN (H. A. Muh. Rahmat)
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
GRUP PENGENDALIAN KEUANGAN (Abd. Rahman Gau)
Dept. Akuntansi (H. Syaiful Rachman)
Seksi Pelaporan Pajak (Gunawan Tasmin)
Dept. MIS & Pelaporan (Finni Arfianas Azwar)
GRUP IT (Muh. Iqbal)
Dept. Pengembangan IT
Dept. Operasional IT (Anton Bahrun Sangka)
Dept. Pengendalian IT (Asfan Masrich)
Dept. Librarian & Adminstrasi (Fadly Fachruddin)
GRUP UMUM (Rosmala Arifin)
Dept. Logistik (Ali Wairooy)
Dept. Rumah Tangga (Rakhmat Nur Kadir)
GRUP *TREASURY* (Margaretha)
Dept. Pengelolaan Dana & Likuiditas (Sutrisno)
Dept. ALMA (Irfan WR)
Dept. *Settlement* (Franky Sapan)
GRUP PEMASARAN (H. Sukiman)
Dept. Dana Pihak Ketiga (Hj. Nurlina Massuanna)
Dept. Kredit (Basri Tappa)
Sub. Dept. Kredit Program (H. Syafruddin Rahman)
Sub. Dept. Kredit Konsumer (Rahmat Mustamin)
Sub. Dept. Kredit Komersil (A. Fatma)
Dept. Supervisi Kredit (H. A. Patau Sudewi)
Dept. Kredit Khusus (H. Makkaratte Syam)
Sub .Dept. Penyelamatan & Penyelesaian Kredit (Syaifuddin Adam)
Dept. Adminstrasi Pelaporan (M. Asraruddin Hamdy)
GRUP UNIT USAHA Syariah (Iswadi Ayub)
Dept. Akuntansi & Pelaporan (Faisal Riza Basamalah)
Dept. Treasury & Pemasaran (Kamal Ikbal)
CABANG KONVENSIONAL
CABANG SYARIAH

BIOGRAFI DEWAN KOMISARIS

H. A. Muallim, SH., M.Si
Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 59 tahun, lahir di Bone pada tanggal 23 Desember 1953. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan gelar Master di bidang Administrasi Publik dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2001. Menjabat sebagai Komisaris Utama Bank Sulselbar sejak tahun 2006. Sejak tahun 2006 sampai sekarang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Prov. Sulawesi Selatan. Jabatan yang pernah dipegang dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan antara lain Kepala Bagian Perundang-Undangan & Penataan Hukum Pemprov. Sulsel (1987 – 1989), PYMT Sekretaris Wilayah/Daerah Tk.II Sidrap (1989 – 1993), PYMT Sekretaris Wilayah/ Daerah Tk.II Gowa (1993 – 1994), Pj. Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Gowa (1994 – 1996), Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Sinjai (1996 – 1998), Wakil Ketua BKPMD Tk. I Sulsel (1998 – 1999), Kepala Kantor PMD (1999 – 2001), Kepala Bawasda Prov. Sulsel (2001 – 2002), dan Pejabat Bupati Luwu Utara (2004 – 2006).

Sejumlah pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti sebagai Komisaris Utama antara lain Seminar Peran FKDK/P BPD-SI dalam Mendorong BPD sebagai *Agent of Regional Champion* di daerah melalui Pencapaian target BRC – 2014 di Kendari dan Seminar Nasional Strategi Penguatan BPD Ke Depan untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Ekonomi Global di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, lahir di Gowa pada tanggal 17 Februari 1946. Mendapatkan gelar Sarjana Administrasi dari STIA LAN-RI dan gelar Master bidang Ekonomi Pembangunan dari Senior University International Jakarta. Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar sejak Desember 2012, yang sebelumnya menjabat sebagai Komisaris sejak tahun 2007 dan Komisaris Utama Bank Sulselbar tahun 2000 – 2006. Jabatan yang pernah dipegang dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan antara lain Sekwilda Tk. II Takalar (1987 – 1992), Kepala Biro Organisasi Setwilda Tk. I Sulsel (1992 – 1996), Kepala Dinas P&K Propensi Dati I Sulsel (1996 – 1997), Ass. Kessos Sekwilda Tk. I Sulsel (1997 – 1999), Kepala BKPMD Sulsel (1999 – 2000), Plts. Ass. Kessos Sekda Sulsel (2000 – 2001) dan Sekretaris Daerah Sulsel (2000 – 2006).

Sejumlah pelatihan / seminar / *workshop* yang diikuti sebagai Komisaris Independen antara lain Seminar Penerapan Manajemen Risiko Operasional yang Efektif di Jakarta, Seminar Peran FKDK/P BPD-SI dalam Mendorong BPD sebagai *Agent of Regional Champion* di daerah melalui Pencapaian target BRC – 2014 di Kendari dan Seminar Nasional Strategi Penguatan BPD Ke Depan untuk Meningkatkan Daya Saing dalam Ekonomi Global di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 25 Desember 1963. Menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar sejak tahun 2008. Mendapatkan gelar Sarjana MIPA dari Universitas Pakuan Bogor Jawa Barat, gelar Master di bidang ekonomi/ manajemen pemasaran dari Universitas Hasanuddin dan sementara mengenyam pendidikan S3/Doktor bidang ekonomi pada Universitas Hasanuddin.

Sebelum menjabat Komisaris Independen pada Bank Sulselbar, berkarir sebagai akademisi/dosen pengajar pada beberapa universitas negeri dan swasta di Makassar, pernah menjadi Konsultan PUMK Bank Indonesia Makassar (1995), *Research and Evalution Coordinator* pada Plan International Makassar (1992 – 1995), dan Senior Program *Manager Project Concern International* Kendari Sulawesi Tenggara (1990 – 1992).

Sejumlah pelatihan/seminar/*workshop* yang diikuti sebagai Komisaris Independen antara lain *Workshop Enterprise Risk Management for Banking* di Jakarta, Seminar Kesiapan Perbankan Menghadapi Pembatasan Kepemilikan Saham Bank Umum di Jakarta, dan *Workshop* Penyusunan Laporan Pengawasan Komisaris Yang Informatif dan Bersinergi Positif di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

BIOGRAFI DEWAN DIREKSI

Ellong Tjandra
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 60 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 April 1952. Menjabat sebagai Direktur Utama Bank Sulselbar sejak tahun 2009. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin dan gelar Master di Bidang Sumber Daya Manusia dari Sekolah Tinggi Manajemen Jakarta pada tahun 2000.

Sejumlah pelatihan / seminar / *workshop* yang pernah diikuti antara lain *Laferty Retail Banking Asia 2008 Conference* di Thailand dan OECD *Regional Asian Seminar on Financial Literacy : Toward a National Strategy on Financial Education* di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ASBANDA (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah).

Prestasi yang pernah diraih yakni pegawai teladan Bank Mandiri tahun 2003, mewakili Kepala Cabang (Hub Manager) se – Indonesia dan *People Of The Year 2011*, kategori *Inspiring CEO* 2011, Harian Seputar Indonesia, Jakarta 08 Februari Tahun 2012.

Menjadi pembicara pada Seminar Nasional Direksi BPD seluruh Indonesia dengan tema "Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kiprah BPD" dalam rangkaian kegiatan Panen rejeki BPD (Penarikan Undian Nasional Tabungan Simpeda) Periode 2 tahun XXII-2012 yang dilaksanakan pada 1 April 2012 di Sulawesi Tengah.

Memulai karir di Bank Dagang Negara Indonesia/ Bank Mandiri sejak tahun 1983 sebagai staf/analis ekonomi daerah dan sejumlah jabatan penting selama 24 tahun berkarir di Bank Dagang Negara Indonesia antara lain Kepala Cabang Jakarta Gedung PELNI, Kepala Cabang Jakarta Gedung Jaya (Bank Mandiri), Kepala Cabang Jakarta Area Casablanca (Bank Mandiri), Kepala Bank Mandiri Wilayah X Makassar, Group Head Small Business Sales Group, dan Kepala Bank Mandiri Wilayah IV Bandung.

H. YanuarFachrudin
Direktur Umum

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 26 Januari 1962. Menjabat sebagai Direktur Umum Bank Sulselbar sejak tahun 2009. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Hasanuddin dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000.

Sejumlah pelatihan / seminar / *workshop* yang pernah diikuti antara lain *Workshop* Pemahaman dan Mekanisme Penerapan Strategi *Anti Fraud* pada Bank Umum di Jakarta, Training KPI *Development* – Pengukuran Kinerja Berbasisi Kompetensi di Bandung, Seminar dan Dialog Ketenagakerjaan : Strategi Penanganan Mogok Kerja & Ketentuan Pengupahan serta Perlindungan Tenaga Kerja di Jakarta, Sosialisasi Integrasi Sistem Pelaporan Bank dan Non Bank ke Bank Indonesia di Jakarta serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1987 sebagai staf Biro Supervisi Kredit Cabang dan sejumlah jabatan penting selama 25 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang Sinjai tahun 1993 – 1997, Pemimpin Cabang Sidrap tahun 1997 – 1999 dan terakhir menjabat sebagai Pemimpin Cabang Utama Makassar tahun 1999 – 2009.

H. A. M. Rahmat Alimuddin
Direktur Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Makassar pada tanggal 6 Januari 1963. Menjabat sebagai Direktur Pemasaran Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Mendapatkan gelar Sarjana Sospol Administrasi Keuangan Negara dari Universitas Hasanuddin tahun 1988 dan Teknik Sipil Universitas Hasanuddin tahun 1991. Gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000 dan Magister Science/Sosial Program Penyelarasan Universitas Hasanuddin tahun 2001.

Sejumlah pelatihan / seminar / *workshop* yang pernah diikuti antara lain *Workshop* Arah Sistem Penjaminan Kredit Daerah di Indonesia di Jakarta, Seminar Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kiprah BPD di Palu, Seminar Penerapan Sistem Elektronik Daftar Pembayaran Pensiun (e-Dapem) di Jakarta, serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1989 dan sejumlah jabatan penting selama 23 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang Pangkep tahun 1996 – 2003, Pemimpin Cabang Gowa tahun 2003 – 2005 dan terakhir menjabat sebagai Wakil Pemimpin Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi tahun 2006 – 2007.

H. Harris Saleng
Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Sidenreng Rappang pada tanggal 8 September 1956. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Bank Sulselbar sejak tahun 2002. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin.

Sejumlah pelatihan/seminar/*workshop* yang pernah diikuti antara lain *Improving Compliance Strategy* di Jakarta, Seminar Kesiapan Perbankan Indonesia Menghadapi Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Jakarta, Seminar Otorisasi Jasa Keuangan, BRC sebagai Strategi Mewujudkan BPD yang efesien Menuju Pertumbuhan yang Berkesinambungan di Jakarta, *Workshop* Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Jakarta, dan Seminar Konsorsium Data Kerugian Eksternal Indonesia di Jakarta serta sejumlah pelatihan mengenai manajemen perbankan, kredit, manajemen risiko dan lain sebagainya di Indonesia.

Memulai karir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan sejak tahun 1984 sebagai *Account Officer* Biro Kredit dan sejumlah jabatan penting selama 28 tahun berkarir di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan antara lain Pemimpin Cabang CabangMaros tahun 1990 – 1991, Pjs. Kabag. Riset Biro Perencanaan tahun 1991 – 1993, Pemimpin Cabang Cabang Parepare tahun 1993 – 1998, dan terakhir menjabat sebagai Kepala Biro Kredit tahun 1998 – 2002.

BIOGRAFI PEMIMPIN GRUP

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Dasar/Ketetapan Pengangkatan
1.	H. Beddu Side	Pemimpin Grup SDM	Surat Keputusan Direksi No. SK/083/DIR/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
2.	Margaretha Rante Mangayun	Pemimpin Grup Treasury	Surat Keputusan Direksi No. SK/096/DIR/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009
3.	H. Zainal Abdi	Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan	Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012
4.	H. Ambo Samsuddin	Pemimpin Grup Audit Intern	Surat Keputusan Direksi No. SK/083/DIR/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012
5.	Hasanuddin Usman	Pemimpin Grup Kepatuhan	Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012
6.	H. Sukiman	Pemimpin Grup Pemasaran	Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Dasar/Ketetapan Pengangkatan
7.	Abdul Rahman Gau	Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan	Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012
8.	Rosmala Arifin	Pemimpin Grup Umum	Surat Keputusan Direksi No. SK/073/DIR/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010
9.	Muhammad Iqbal	Pjs. Pemimpin Grup Teknologi Informasi	Surat Direksi No. SR/743/B/GSM//VII/2012 tanggal 03 Juli 2012
10.	Amri Mauraga	Pjs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko	Surat Direksi No. SR/743/B/GSM//VII/2012 tanggal 03 Juli 2012
11.	Iswadi Ayub	Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah	Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012

H. Beddu Side
Pemimpin Grup SDM

Warga Negara Indonesia, 53 tahun (lahir pada tahun 1959). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1986. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1987. Menjabat sebagai Pemimpin Grup SDM sejak tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/083/DIR/VII/2012.

Margaretha Rante Mangayun
Pemimpin Grup *Treasury*

Warga Negara Indonesia, 53 tahun (lahir pada tahun 1959). Meraih gelar Diploma Ekonomi dari UKI Paulus Makassar pada tahun 1983 Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1983. Menjabat sebagai Pemimpin *Treasury* sejak tanggal 24 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/096/DIR/VI/2009.

H. Zainal Abdi
Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan

Warga Negara Indonesia, 51 tahun (lahir pada tahun 1961). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Muslim Indonesia. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Perencanaan & Pengembangan sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

H. Ambo Samsuddin
Pemimpin Grup Audit Intern

Warga Negara Indonesia, 50 tahun (lahir pada tahun 1962). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2002. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1987. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Audit Intern sejak tanggal 30 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/083/DIR/VII/2012.

Hasanuddin Usman
Pemimpin Grup Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun (lahir pada tahun 1963). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1986. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1989. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Kepatuhan sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

H. Sukiman
Pemimpin Grup Pemasaran

Warga Negara Indonesia, 48 tahun (lahir pada tahun 1964). Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 1987. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1988. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Pemasaran sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

Abdul Rahman Gau
Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan

Warga Negara Indonesia, 47 tahun (lahir pada tahun 1965). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1989. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1991. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Pengendalian Keuangan sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

Rosmala Arifin
Pemimpin Grup Umum

Warga Negara Indonesia, 45 tahun (lahir pada tahun 1967). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjajaran bandung pada tahun 2004. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Sekretariat & Umum sejak tanggal 07 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/073/DIR/VII/2010.

Muhammad Iqbal
Pjs. Pemimpin Grup Teknologi Informasi

Warga Negara Indonesia, 38 tahun (lahir pada tahun 1974). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE AMKOP Makassar pada tahun 2003 Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2000. Menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Grup Teknologi Informasi sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Direksi No. SR/743/B/GSM//VII/2012.

Amri Mauraga
Pjs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 38 tahun (lahir pada tahun 1974). Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2004. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Pjs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Direksi No. SR/743/B/GSM//VII/2012.

Iswadi Ayub
Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah

Warga Negara Indonesia, 36 tahun (lahir pada tahun 1976). Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari YPUP Makassar pada tahun 1997. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Menjabat sebagai Pemimpin Grup Unit Usaha Syariah sejak tanggal 03 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK/080/DIR/VII/2012.

BIOGRAFI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Ag. KH. Sanusi Baco, LC
Anggota

Prof. DR. H. Halide
Ketua

DR. Mukhlis Sufri, SE, MSi
Anggota

Prof. DR. H. Halide
Ketua

Warga Negara Indonesia, 76 tahun, lahir di Makassar tanggal 29 September 1936. Menjadi Ketua Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar doktor bidang ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar pernah menjadi pengajar pada Universitas Hasanuddin di Makassar, menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas Hasanuddin, menjadi atase Pendidikan & Kebudayaan Kedubes RI Kerajaan Arab Saudi di Riyadh dan Ketua Dewan Pendidikan Sulsel.

Sampai dengan 31 Desember 2012, memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yakni pada BPRS Niaga Madani dan PT. Amanah Finance.

DR. Mukhlis Sufri, SE, MSi
Anggota

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Palopo tahun 1962. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar doktor bidang ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah pengajar pada Universitas Muslim Indonesia di Makassar, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FE-UMI, Ketua Kajian & Da'wah Pascasarjana, Tenaga Ahli DPRD Prov. Sulsel, Ketua Komisi Dewan Riset Daerah Prov. Sulsel, Tenaga Ahli Bidang Ekonomi & Perencanaan Kota Makassar, Konsultan Perencanaan Pembangunan & Ekonomi Lokal SulSel, Koordinator Ikatan Ahli Ekonomi Islam dan Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

Sampai dengan 31 Desember 2012, tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah selain di Bank Sulselbar Syariah.

Ag. KH. Sanusi Baco, LC
Anggota

Warga Negara Indonesia, 75 tahun, lahir di Maros pada tanggal 3 April 1937. Menjadi Anggota Dewan Pengawas Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Meraih gelar S2 Lc dari Fakultas Syariah Al-Azhar Mesir. Sebelum menjadi Anggota Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar adalah pengajar pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin di Makassar dan menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulsel.

Sampai dengan 31 Desember 2012, memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah yakni pada PT. Amanah Finance.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Ketua

Menjadi Ketua Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2010. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar dan Plts. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.

Drs. H. Muslimin Abbas, MSi
Anggota

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lahir di Barru pada tanggal 20 September 1949. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin dan gelar Master di bidang administrasi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2000. Jabatan penting yang pernah dipegang dalam lingkup Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan antara lain Kepala Biro Keuangan (1998), Sekretaris Daerah Kab. Sidrap (2000), dan Sekretaris Daerah Kab. Maros (2002). Menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas BPD Sulsel (1999) dan anggota Dewan Komisaris Bank Sulsel (2005).

H. Silahuddin
Anggota

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, lahir di Gowa pada tanggal 1 Maret 1956. Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko Bank Sulselbar sejak tahun 2011. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari STIE-YPUP di Makassar. Sejumlah jabatan penting selama 31 tahun berkarir di Bank Sulselbar adalah Wakil Kepala Cabang Maros (1986 – 1987), Kepala Bagian Logistik (1987 – 1988), Kepala Bagian Penagihan pada Biro Kredit Khusus (1987 – 1988), Kepala Cabang Sidrap (1989 – 1994), Kepala Cabang Sengkang (1994 – 1998), Kepala Cabang Parepare (1998 – 2003), Wakil Pemimpin Cabang Satuan Kerja Audit Intern (2003 – 2007), dan Wakil Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan (2007 – 2008). Jabatan terakhir adalah Pemimpin Satuan Kerja Kepatuhan (2008 – 2011). Mengakhiri masa bakti pada tanggal 1 Maret 2011 dan diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko per 1 April 2011. Pengangkatan sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 jo PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Penerapan GCG pada Bank Umum yang mengatur bahwa pejabat eksekutif yang tugasnya melakukan fungsi pengawasan tidak tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan masa tunggu (*cooling off*).

BIOGRAFI KOMITE AUDIT

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Komisaris Independen

Menjadi Plts. Ketua Komite Audit sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

Drs. As'ad Makarau
Anggota

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Batui (Sulteng) pada tanggal 13 Juli 1951. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Mendapatkan gelar Ajun Akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1979 dan Sarjana Ekonomi dari STIE-YPUP di Makassar. Berkarir sebagai Auditor pada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan RI (1980 – 1983) dan Auditor Ahli Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan (1983 – 2007).

Dra. Hj. Sulaeha Achmad
Anggota

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Desember 1951. Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Bank Sulselbar sejak tahun 2007. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin. Sejumlah jabatan penting selama 25 tahun berkarir di Bank Sulselbar adalah Wakil Kepala Biro Keuangan & Akuntansi (1983), Wakil Kepala Cabang Makassar (1990), Wakil Kepala Biro Pengawasan (1992), Wakil Kepala Biro Umum (1993), Kepala Biro Perencanaan & Pengembangan (1995), dan Kepala Biro SDM (1998). Jabatan terakhir adalah Pemimpin Divisi Akuntansi dan Teknologi Informasi (2002). Mengakhiri masa bakti pada tanggal 1 Januari 2007 dan diangkat menjadi Komite Audit per 27 Juni 2007. Pengangkatan sebagai anggota Komite Audit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2010 jo PBI No.8/14/PBI/2006 tentang Penerapan GCG pada Bank Umum dan telah memenuhi ketentuan *cooling off* selama minimal 6 (enam) bulan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Drs. Natali Ikawidjaja, MM
Plts. Ketua

Menjadi Plts. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar dan Ketua Komite Pemantau Risiko.

Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Anggota

Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2012. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Sulselbar dan Plts. Ketua Komite Audit.

H. Beddu Side
Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 tahun (lahir pada tahun 1959). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 1986. Berkarir di Bank Sulselbar sejak tahun 1987. Saat ini menjabat sebagai Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia. Menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak November 2012. Sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Grup Audit Intern, Plts. Pemimpin Grup Manajemen Risiko dan Pemimpin Grup *Treasury.*

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Irmayanti Sulthan
Corporate Secretary

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan investor, Bank Sulselbar sebagai perusahaan publik membentuk Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat yang dijabat oleh Irmayanti Sulthan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan dibentuk mengacu pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.4 dengan tugas antara lain adalah :

1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2) Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi Bank Sulselbar.
3) Memberikan masukan kepada Direksi guna mematuhi peraturan ketentuan Undang – Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
4) Sebagai penghubung/*contact person* antara Bank Sulselbar dengan Bapepam-LK dan masyarakat.

Aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh Sekretaris Perusahaan selama tahun 2012, antara lain :

1) Mengikuti dan atau meng-*update* perkembangan pasar modal termasuk setiap peraturan pasar modal yang baru diterbitkan selama tahun 2012 serta memberikan masukan kepada manajemen dan unit kerja terkait dengan adanya peraturan baru tersebut.
2) Menyampaikan laporan berkala dan laporan insidentil kepada Bapepam-LK dan Bursa Efek Indonesia.
3) Menyampaikan/menyiapkan bahan *press release* mengenai keterbukaan informasi kepada publik melalui Bursa atas setiap informasi berkaitan dengan aktivitas/kegiatan Bank Sulselbar yang disampaikan kepada media massa.
4) Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dilaksanakan pada 22 Mei 2012 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada 15 Desember 2012.

BIOGRAFI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Irmayanti Sulthan. Warga Negara Indonesia, 43 tahun, lahir di Bulukumba tanggal 04 Juli 1969. Bergabung dengan Bank Sulselbar sejak tahun 1995. Menjabat sebagai Kepala Bagian Penelitian & Pengembangan/Pemimpin Departemen Bisnis dan Jaringan sejak tahun 2006 dan pada bulan Agustus 2010 merangkap jabatan sebagai Sekretaris Perusahaan. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Hasanuddin Tahun 1994 dan Magister Manajemen (MM) dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2008. Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko I – III, SESPI Bank Angkatan 55 tahun 2011 di Jakarta dan Rusia, *Investor Relations Workshop* di Lombok, dan *Banking Service Excellence Seminar* di Jakarta serta sejumlah pelatihan lainnya mengenai manajemen perbankan, *risk management*, dan lain sebagainya di Indonesia.

RIWAYAT JABATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN

Riwayat jabatan singkat Irmayanti Sulthan di Bank Sulselbar, sebagai berikut:

Jabatan/Posisi	Unit Kerja/Cabang	Tahun
Staf	Cabang Utama Ujung Pandang	1995
Pembantu Penanggung Jawab Simpeda	Cabang Utama Ujung Pandang	1996
Analis	Biro Kredit Khusus	2002
Analis	Divisi Kredit	2003
Analis Kredit	Cabang Utama Makassar	2004
Analis	Divisi Kredit	2005
Kabag. Penelitian & Pengembangan	Divisi Perencanaan & Pengembangan	2006 – 2008
Pemimpin Departemen Pengembangan Bisnis & Jaringan	Grup Perencanaan & Pengembangan	2008 – Sekarang
Corporate Secretary	Grup Perencanaan & Pengembangan	Agustus 2010 - November 2012
Corporate Secretary	Grup *Corporate Secretary*	Desember 2012 - Sekarang

Sedangkan, penugasan di luar Bank Sulselbar, sebagai berikut:

Jabatan/Posisi	Lembaga/Instansi	Tahun
Konsultan *Marketing*	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Sulsel	2010 – Sekarang

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

PRODUK DAN LAYANAN

PRODUK PENDANAAN

Produk pendanaan Bank Sulselbar diperuntukkan bagi dana-dana ritel/perorangan maupun korporasi dan atau instansi/lembaga pemerintah/swasta. Produk pendanaan Bank Sulselbar sebagai berikut :

1. **GIRO**
   Simpanan dalam rupiah pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan (misalnya bilyet giro, warkat, dll).

2. **DEPOSITO**
   Simpanan dalam rupiah pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai perjanjian antara Bank dengan nasabah dan atas simpanan itu Bank memberi bunga sesuai suku bunga yang ditetapkan pada waktu perjanjian atau persetujuan dibuat.

3. **TABUNGAN**
   - Tabungan Simpeda
     Simpeda adalah tabungan produk simpanan BPD seluruh Indonesia yang memberikan banyak keuntungan dan kemudahan bagi nasabah. Manfaat Simpeda antara lain *Real Time On-Line System* sehingga dapat dibuka dan bertransaksi di seluruh kantor operasional Bank Sulselbar. Nasabah Simpeda berkesempatan memperoleh undian berhadiah untuk memotivasi masyarakat untuk menabung pada Bank Sulselbar.

     Tabungan Simpeda diperuntukkan bagi perseorangan, yayasan, badan hukum, dan lembaga lainnya.

- Tabungan Tapemda
  Tabungan Tapemda Bank Sulselbar diperuntukkan bagi nasabah kredit atau debitur kredit produktif Bank Sulselbar. Tabungan Tapemda setoran awal pembukaan rekeningnya relatif terjangkau.

- Tabungan Tapemda Sayang Petani
  Simpanan yang diperuntukkan bagi para petani dan nelayan untuk menanamkan kebiasaan positif menabung dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk disimpan pada bank dibandingkan dibelanjakan untuk kebutuhan yang lebih bersifat konsumtif. Tabungan Tapemda Sayang Petani tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

- Tabungan Tapemda Pelajar & Mahasiswa
  Simpanan yang diperuntukkan bagi pelajar dan mahasiswa untuk menanamkan kebiasaan menabung. Tapemda Pelajar & Mahasiswa tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

- Tapemda Pensiunan
  Simpanan yang diperuntukkan bagi pensiunan PNS yang penerimaan gaji pensiunannya melalui Bank Sulselbar. Tapemda Pensiunan tidak dikenakan biaya administrasi bulanan dan setoran awal pembukaan rekening yang relatif terjangkau.

- Tabungan Haji
  Tabungan yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji.
- Tabungan Masa Depan (Tampan)
  Tabungan berjangka dalam rupiah untuk mewujudkan rencana masa depan nasabah penabung dengan sistem setoran rutin bulanan tetap setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan penabung. Tabungan Tampan dicairkan pada saat jatuh tempo dan pencairan sebelum jatuh tempo akan dikenakan *pinalty break* sesuai ketentuan bank.

- TabunganKU
  Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan Warga Negara Indonesia dengan persyaratan mudah dan ringan yang diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

PRODUK KREDIT

Produk kredit/pembiayaan Bank Sulselbar lebih diarahkan untuk penyaluran ke sektor UKM dan debitur binaan yang prospektif dengan rasio kredit produktif lebih besar dari kredit konsumtif. Adapun untuk dana-dana yang belum tersalurkan dalam bentuk kredit dioptimalkan dalam bentuk penempatan dana dan pembelian surat berharga dengan memperhatikan faktor likuiditas, rentabilitas dan risiko.

Produk kredit/pembiayaan Bank Sulselbar sebagai berikut :

- **Kredit Yang Diberikan**
  a) KI (Kredit Investasi)
  Kredit investasi Bank Sulselbar bertujuan untuk memberi dukungan permodalan kepada pelaku usaha dalam bentuk pembiayaan dengan berbagai sektor ekonomi serta peningkatan peranan Bank Sulselbar menuju *regional champion*.

  b) KMK (Kredit Modal Kerja)
  Kredit Modal Kerja Bank Sulselbar bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana sehingga debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Selain itu, juga untuk membantu Pemerintah dalam hal pengembangan usaha produktif berdasarkan potensi daerah yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan Pemerintah dan sektor pajak. KMK Bank Sulselbar diperuntukkan pengembangan UKM dengan penyediaan fasilitas Kredit Modal Kerja yang dibutuhkan demi percepatan pertumbuhan ekonomi.

c) KUL (Kredit Usaha Lainnya)

Kredit Usaha Lainnya adalah kredit konsumtif yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar. KUL Bank Sulselbar bertujuan untuk membantu PNS yang berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

- **Skim Kredit Yang Diberikan**

Kredit Konsumtif

a) Kredit Pegawai (KUL)

Kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar dalam rangka peningkatan kesejahteraan kepada para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tujuan penggunaannya bersifat konsumtif.

b) Kredit Multiguna

Kredit Multiguna diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan untuk memenuhi kebutuhan pegawai/pensiunan yang sifatnya mendesak seperti pembayaran biaya anak sekolah.

Penerima fasilitas Kredit Multiguna adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pensiunan yang gajinya dibayarkan melalui Bank Sulselbar.

c) Kredit DPRD

Skim Kredit DPRD bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penerima fasilitas kredit adalah Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang penghasilannya dibayar melalui Bank Sulselbar.

d) Kredit Pensiunan

Kredit Pensiunan adalah kredit yang diberikan kepada pensiun pegawai /janda/duda dan yatim piatu yang gajinya ditatausahakan atau dibayarkan melalui Bank Sulselbar. Kredit Pensiunan sebagai upaya membantu pensiunan pegawai negeri/janda/duda dan yatim piatu yang berpenghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif.

e) Kredit Pemilikan Motor

Kredit Pemilikan Motor bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan jenis kendaraan baru maupun kendaraan bekas. Kredit Pemilikan Motor diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Karyawan atau Pegawai BUMD (termasuk Pegawai Bank Sulselbar) / BUMN / Perusahaan Swasta Nasional / lainnya, Profesional, Wiraswasta (Pengusaha) yang memenuhi persyaratan.

f) Kredit Pemilikan Rumah

Kredit Pemilikan Rumah KPR bertujuan untuk pembelian dan pembiayaan unit hunian baru maupun hunian lama/bekas berupa rumah tinggal, rumah susun, apartemen, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), toko, kios, kantor. Kredit Pemilikan Rumah diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI/POLRI, Anggota DPRD, Karyawan atau Pegawai BUMD (termasuk Pegawai PT. Bank Sulselbar) / BUMN / Perusahaan Swasta Nasional / lainnya yang direkomendasi dan disetujui oleh Kantor Pusat, Profesional, Wiraswasta (Pengusaha).

Skim kredit produktif yang sumber dana pembiayaannya berasal dari internal Bank Sulselbar sebagai berikut :

a) Kredit Pundi Usaha Rakyat (PUR)
Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat serta menggali potensi usaha berbasis kerakyatan yang untuk meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar melalui pendekatan pendanaan Bank. Fasilitas kredit diperuntukkan bagi pengusaha mikro baik perorangan maupun kelompok usaha produktif yang dibentuk atas dasar kebutuhan bersama yang bertujuan dalam memperkuat dalam berproduksi, akses permodalan dan pemasaran bersama, jenis usaha yang dapat dibiayai adalah perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa.

b) Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Bertujuan untuk memberikan kemudahan memperoleh fasilitas kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bergerak di bidang perdagangan, industri kecil, pertanian, peternakan, perkebunan, agrobisnis, periklanan dan jasa dengan bunga yang kompetitif. KUR diperuntukkan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang bertujuan untuk pengembangan usaha dalam meningkatkan produksi, permodalan dan pemasaran

c) Kredit Usaha Mandiri (KUM)
Bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit produktif khususnya yang dikelola oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik oleh suami maupun istri yang memiliki usaha dan atau mengelola usaha produktif. Target pasar KUM yaitu diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki usaha ataupun akan melakukan usaha. Jenis kredit yang disalurkan untuk skim KUM terdiri dari Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi/modernisasi yang dapat menunjang kegiatan usaha dan Kredit Modal kerja yaitu kredit untuk kebutuhan modal kerja dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan. Tingkat suku bunga KUM diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Direksi.

d) Kredit PEMDA
Untuk mengoptimalisasikan peranan Bank Sulselbar dalam memberikan kontribusi yang bersifat pembiayaan terhadap program – program Pemerintah Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran. Penyaluran Kredit PEMDA sebagai alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota serta dapat juga digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e) Kredit Konstruksi
Kredit Konstruksi bertujuan untuk mengoptimalisasikan peranan Bank Sulselbar dalam memberikan konstribusi yang sifatnya pembiayaan terhadap program-program Pemerintah Daerah pada semua sektor yang telah dianggarkan setiap tahun anggaran dan untuk menggerakkan sektor riil dan sebagai Agen of Develoment. Kredit Konstruksi akan menjalin hubungan antara perusahaan penyedia jasa konstruksi yang membutuhkan modal

kerja untuk pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBD kabupaten/kota dan provinsi serta APBN yang dananya ditatausahakan pada Bank Sulselbar maupun di luar Bank Sulselbar.

Skim kredit produktif yang merupakan Kredit Program yaitu yang sumber pembiayaannya berasal dari subsidi atau bantuan dana dari pihak eksternal, terutama pemerintah, sebagai berikut :

a) Kredit Program PUNDI (Pusaka Mandiri)

Kredit PUNDI bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan keluarga prasejahtera, sejahtera I dan miskin yang telah mempunyai usaha kecil, serta membantu pengembangan manajemen produksi, pemasaran dan permodalan usaha keluarga-keluarga yang mulai mandiri tersebut menjadi pengusaha kecil atau pengusaha menengah yang profesional.

Kredit PUNDI adalah kerjasama antara Yayasan Damandiri dengan Bank Sulselbar sejak tahun 2001 dalam penyaluran kredit produktif dengan pola *executing* untuk sektor usaha kecil (Perdagangan, Jasa, Pertanian dan Industri).

b) Kredit Program SUP 005

Kredit SUP 005 bertujuan untuk memberikan nilai tambah/meningkatkan pendapatan bagi para pengusaha mikro kecil dan membantu pengembangan sektor usaha mikro kecil dan koperasi yang layak dan belum mendapat bantuan pembiayaan.

Kredit SUP 005 merupakan Program Pemerintah dalam rangka meningkatkan perkuatan akses permodalan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) termasuk Koperasi yang disalurkan Bank Sulselbar sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) melalui kerjasama dengan Kementerian Keuangan RI dalam hal Pendanaan terhadap usaha Mikro dan Kecil.

c) Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi bertujuan untuk membiayai proyek – proyek pembangunan yang belum mampu dilakukan oleh Bank Sulselbar dengan menggunakan dana maupun *resource* sendiri akibat keterbatasan yang dimiliki, serta sebagai wujud peran serta Bank Sulselbar dalam pembangunan nasional secara umum maupun pembangunan daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

JENIS LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Untuk memberikan jasa layanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nasabah melalui upaya peningkatan teknologi, perluasan jaringan kantor, dan kemitraan dengan lembaga/badan usaha/instansi lainnya sehingga diharapkan akan memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap kinerja Bank Sulselbar yang berkaitan dengan *fee based income*, Bank Sulselbar memiliki jasa-jasa perbankan lainnya sebagai berikut:

- ATM Bank Sulselbar

  Kartu ATM Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama yang dapat diakses pada puluhan ribu terminal ATM berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia. Fitur – fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (*top up*) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

- Kartu PNS Elektronik (KPE)

  Kartu PNS Elektronik (KPE) merupakan kartu identitas PNS dan penerimaan pensiun PNS serta untuk pelayanan di bidang kepegawaian, pengendalian data kepegawaian serta perbankan yang telah mendapatkan legitimasi berdasarkan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu PNS Elektronik. Dalam rangka memfasilitasi fungsi perbankan pada kartu KPE, Bank Sulselbar bekerjasama dengan BKN untuk mengoptimalkan KPE agar dapat digunakan melakukan aktivitas perbankan yaitu berfungsi pula sebagai Kartu ATM dengan layanan yang sama dengan layanan Kartu ATM nasabah Bank Sulselbar seperti informasi saldo; penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (*top up*) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

- Kiriman Uang

  Perintah nasabah kepada bank yang untuk mengirim/membayar dengan menyetorkan uang tunai atau atas beban rekening nasabah non tunai kepada seseorang/perusahaan/nasabah di tempat lain. Pelayanan jasa kiriman uang Bank Sulselbar terdiri dari kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

- Inkasso
  Jasa penagihan atas warkat dari bank lain yang telah diterbitkan oleh nasabahnya yang berada pada lokasi yang berbeda. Dalam jasa Inkasso, bank melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk pemberi amanat.

- Transfer BI-RTGS
  Layanan jasa sistem transfer dana elektronik antar bank peserta BI RTGS dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.

- Bank Garansi (Jaminan Bank)
  Semua bentuk garansi atau jaminan yang diterima atau diberikan oleh bank yang mengakibatkan pembayaran kepada pihak ketiga yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin bank wanprestasi atau cidera janji. Garansi bank yang diberikan kepada nasabah dimaksudkan untuk memberikan bantuan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan agar dapat memperlancar transaksi yang sedang dijalankannya.

- Surat Keterangan Bank (Referensi Bank)
  Surat yang dikeluarkan bank yang dapat digunakan oleh nasabah sebagai sumber acuan untuk melakukan kegiatan tertentu dan memenuhi persyaratan.

- Penerimaan Pembayaran Tagihan Billing Provider
  Bank Sulselbar memberikan layanan penerimaan pembayaran tagihan billing provider yang selain dapat dilakukan melalui ATM, juga dapat dilakukan melalui counter pembayaran yang disiapkan bank. Pembayaran tagihan yang dilayani pada counter bank antara lain fix phone/telepon rumah (Telkom); pembayaran listrik (PLN); telepon seluler, pra dan pasca bayar; dan pajak.

- SMS *Banking*
  Bank Sulselbar menyediakan layanan transaksi perbankan *mobile* dengan menggunakan telepon seluler. SMS *Banking* Bank Sulselbar menyediakan fasilitas layanan perbankan yang memudahkan nasabah untuk melakukan informasi saldo dan isi ulang pulsa. SMS *Banking* Bank Sulselbar dapat diakses dengan menggunakan perintah SMS biasa.

PRODUK DAN JASA UUS BANK SULSELBAR

- **Produk Penghimpunan Dana**
  - Giro Wadiah iB
    Simpanan pihak ketiga pada bank (perorangan atau badan hukum, dalam mata uang rupiah) yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu – waktu dengan menggunakan cek, bilyet giro atau pemindah-bukuan lainnya. Akad yang digunakan adalah Wadi'ah Yad ad Dhamanah dimana titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank dengan seizin nasabah di mana bank menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

  - Tabungan Syariah
    Simpanan pada Bank Sulselbar Syariah bagi perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat – syarat tertentu. Tabungan ini merupakan simpanan yang berprinsip *Mudharabah* (bagi hasil) yang dapat dipergunakan oleh bank (mudharib) dengan imbalan berupa bagi hasil kepada nasabah (Shahibul Maal).

  - Haji dan Umroh Tabungan Masa Depan (HATAM iB)
    Tabungan Haji iB merupakan simpanan pada Bank Sulselbar Syariah dengan prinsip *Mudharabah* bagi perorangan yang diperuntukkan bagi calon jamaah haji dalam rangka persiapan biaya perjalanan ibadah haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

  - Tabungan Kemitraan
    Simpanan dengan pola *co branding* dengan akad *Mudharabah* pada Bank Sulselbar Syariah yang didisain khusus bagi seluruh anggota instansi / kelompok dengan syarat – syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerjasama (MoU) antara instansi tersebut dengan Bank Sulselbar Syariah.

- Deposito *Mudharabah*
  Simpanan pada Bank Sulselbar Syariah dalam mata uang rupiah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito ini menggunakan prinsip *mudharabah* yakni suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana, dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan dana.

- **Produk Penyaluran Dana/Pembiayaan**
  - Piutang *Murabahah* Investasi
    Fasilitas pembiayaan investasi berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Piutang *Murabahah* Modal Kerja
    Fasilitas pembiayaan modal kerja berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Piutang *Murabahah* Lainnya
    Fasilitas pembiayaan lainnya berdasarkan akad *murabahah* (jual beli) antara bank dan nasabah sebesar harga perolehan (harga barang yang diperjualbelikan) ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati bersama. Pembayaran nasabah dilakukan secara tangguh dengan dibayar secara sekaligus atau dicicil/angsuran.

  - Pembiayaan *Mudharabah*
    Fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* (bagi hasil) yang seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

- **Skim Produk Pembiayaan Syariah**
  - Pembiayaan Oto Berkah iB
    Fasilitas pembiayaan konsumtif dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian kendaraan bermotor jenis mobil, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing–masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

  - Pembiayaan Graha Berkah iB
    Fasilitas pembiayaan dengan pola syariah yang diberikan kepada perorangan untuk membeli rumah atau keperluan renovasi/membangun rumah tinggal, yang disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan masing – masing pemohon menggunakan akad *murabahah* (jual beli).

  - Modal Kerja Mitra iB
    Fasilitas pembiayaan dengan akad al *mudharabah* (bagi hasil) yang diberikan kepada nasabah/mitra Bank Sulselbar Syariah untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya, yang disesuikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan nasabah/mitra untuk mengelola pembiayaan.

  - Gadai Emas Berkah iB
    Fasilitas pinjaman (*qard*) yang harus dikembalikan tetap senilai pinjaman dengan jaminan berupa emas dan disimpan pada bank. Atas penyimpanan tersebut nasabah harus membayar biaya pemeliharaan yang ditetapkan oleh bank.

Jasa – Jasa UUS Bank Sulselbar

- ATM UUS Bank Sulselbar
  Kartu ATM UUS Bank Sulselbar tergabung dalam jaringan ATM Bersama yang dapat diakses pada puluhan ribu terminal ATM berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia. Fitur – fitur layanan ATM Bank Sulselbar antara lain informasi saldo, penarikan tunai, transfer antar bank, fasilitas *payment* pembayaran tagihan (listrik, telepon seluler pasca bayar), dan pembelian pulsa (*top up*) telepon seluler pra bayar, yang dilakukan dengan mendebet secara otomatis dari rekening nasabah.

- Kiriman Uang (*Wakalah*)
  Kiriman Uang yang diberikan dengan akad wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakkil*) kepada pihak lain (wakil) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.

- Jaminan Bank (*Kafalah*)
  Jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu nasabah bank selaku pihak yang dijamin kepada pihak ketiga dimaksud.

  Jaminan bank diberikan dengan akad kafalah yaitu Transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*Makful 'anhu/ashil*).

JARINGAN OPERASIONAL

No.	Nama Pemimpin Cabang	Cabang
1	Hj. Muchdaria S. Kosman	Cabang Utama Makassar
2	H. Idrus A. Dadi	Cabang Utama Bone
3	Bambang Utoyo	Cabang Utama Mamuju
4	Asril Azis	Cabang Maros
5	H. Syarifuddin Masjud	Cabang Parepare
6	Syarifuddin Haruna	Cabang Sidrap
7	H. Andi Dhamis Hamid	Cabang Pinrang
8	Anwar Sulaiman	Cabang Polman
9	Recky Wilson	Cabang Makale

No.	Nama Pemimpin Cabang	Cabang
10	Ahmad Firdaus	Cabang Palopo
11	Chaerun Maseali	Cabang Sengkang
12	Vinka Nandakasih	Cabang Bulukumba
13	Aras Tusdin	Cabang Sinjai
14	Risnandar	Cabang Jeneponto
15	Arman Damang	Cabang Selayar
16	H. Nawir Mallaweang	Cabang Bantaeng
17	Subagio	Cabang Majene
18	H. Abidin Abdul Kadir	Cabang Enrekang
19	H. Umar	Cabang Pangkep
20	Dian A. Utina	Cabang Takalar
21	Abidin Panne	Cabang Barru
22	Hasanuddin Kimon	Cabang Gowa
23	Muhammad Rakib	Cabang Soppeng
24	Yulis Suandi	Cabang Masamba
25	H. Fatahuddin Tahang	Cabang Belopa
26	H. M. Darsan Hamzah	Cabang Pasangkayu
27	Muh. Hatta Sese	Cabang Malili
28	Lili Handayani	Cabang Jakarta
29	Arman Gultom	Cabang Mamasa
30	Nixoni Anau	Cabang Rantepao
31	Imran Razak	Cabang Pembantu Siwa
32	A. Rini Takaryani	Cabang Pembantu Daya
33	Amri Mahmud	Cabang Syariah Sengkang
34	Romy Thaha	Cabang Syariah Maros
35	Hartani Djurnie	Cabang Syariah Makassar

Bank Sulselbar

Sulsel

Bank Sulsel

No.	Nama Kantor	Alamat	Telp./Fax
		KANTOR CABANG UTAMA	
1	Cabang Utama Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar	Telp. (0411) 859171 Fax. (0411) 854611
2	Cabang Utama Bone	Jl. Ahmad Yani No. 15 Watampone	Telp. (0481) 21027 Fax. (0481) 23535
3	Cabang Utama Mamuju	Jl. Ahmad Yani No. 3 Mamuju	Telp. (0426) 21125 Fax. (0426) 2326142
		KANTOR CABANG	
1	Cabang Maros	Jl. Jend. Sudirman No. 3 Maros	Telp. (0411) 3882426 Fax. (0411) 3882428
2	Cabang Parepare	Jl. Bau Massepe No. 468 Parepare	Telp. (0421) 21364, 27751 Fax. (0421) 23947
3	Cabang Sidrap	Jl. Jend. Sudirman No. 119 Pengkajene	Telp. (0421) 91055, 91054 Fax. (0421) 90187
4	Cabang Pinrang	Jl. Jend. Sudirman No. 257 Pinrang	Telp. (0421) 921416, 922955, 921571 Fax. (0421) 922628
5	Cabang Polman	Jl. Andi Depu No. 102 Polewali	Telp. (0428) 21666, 21987 Fax. (0428) 21022
6	Cabang Makale	Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale	Telp. (0423) 22703 Fax. (0423) 22034
7	Cabang Palopo	Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo	Telp. (0471) 21468, 21102 Fax. (0471) 24513
8	Cabang Sengkang	Jl. R. A. Kartini No. 1 Wajo	Telp. (0485) 324480, 324481 Fax. (0485) 324482
9	Cabang Bulukumba	Jl. Jend. Sudirman No. 48 Bulukumba	Telp. (0413) 81051 Fax. (0413) 81329
10	Cabang Sinjai	Jl. Persatuan Raya No. 58 Sinjai	Telp. (0482) 21013, 23171 Fax. (0482) 21040
11	Cabang Jeneponto	Jl. Pahlawan No. 5 Jeneponto	Telp. (0419) 21038, 21608 Fax. (0419) 21437, 23084
12	Cabang Selayar	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3 Benteng, Selayar	Telp. (0414) 21780 Fax. (0414) 21051
13	Cabang Bantaeng	Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng	Telp. (0413) 22156 Fax. (0413) 21009
14	Cabang Majene	Jl. Gatot Subroto No. 59 Majene	Telp. (0422) 21099 Fax. (0422) 21754
15	Cabang Enrekang	Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Enrekang	Telp. (0420) 21180 Fax. (0420) 21071

No.	Nama Kantor	Alamat	Telp./Fax
16	Cabang Pangkep	Jl. Sultan Hasanuddin No. 7 Pangkajene	Telp. (0410) 21300, 21510 Fax. (0410) 21824
17	Cabang Takalar	Jl. Jend. Sudirman No. 1 Takalar	Telp. (0418) 21421 Fax. (0418) 21770
18	Cabang Barru	Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Barru	Telp. (0427) 21703 Fax. (0427) 21188
19	Cabang Gowa	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa	Telp. (0411) 8220423, 8220424 Fax. (0411) 8220425
20	Cabang Soppeng	Jl. Kemakmuran No. 125 Watansoppeng	Telp. (0484) 23498 Fax. (0484) 21156
21	Cabang Masamba	Jl. Suhada No. 1 Masamba	Telp. (0473) 21845 Fax. (0473) 21865
22	Cabang Belopa	Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Luwu	Telp. (0471) 3314433 Fax. (0471) 3316008
23	Cabang Pasangkayu	Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu	Telp. (0411) 402212 Fax. (0411) 402213
24	Cabang Malili	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Malili	Telp. (0474) 321494, 321801 Fax. (0474) 321492, 321849
25	Cabang Jakarta	Jl. Gatot Subroto Menara Bidakara 2 Kav. 73 – 74 Jakarta	Telp. (021) 83708750, 83708751, 83708752 Fax. (021) 83708757
26	Cabang Mamasa	Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar	Telp. (0428) 2841033, 2841031 Fax. (0428) 2841032
27	Cabang Rantepao	Jl. Pongtiku No. 32 Rantepao	Telp. (0423) 24640, 25278 Fax. (0423) -
		KANTOR CABANG PEMBANTU	
1	Cabang Pembantu Siwa	Jl. Andi Jaya No. 50 Siwa	Telp. (0472) 321463, 321081 Fax. (0472) 321042
2	Cabang Pembantu Daya	Jl. Perintis Kemerdekaan Komp. Ruko Bukit Khatulistiwa, Makassar	Telp. (0411) 4772404 Fax. (0411) 4772406
		KANTOR CABANG SYARIAH	
1	Cabang Syariah Sengkang	Jl. Veteran No. 50 Wajo	Telp. (0485) 21385 Fax. (0411) 21085
2	Cabang Syariah Maros	Ruko Butta Toa Jl. Jend. Sudirman (Samping Masjid Al Markaz Maros)	Telp. (0411) 3881221, 3881226 Fax. (0411) 3881230
3	Cabang Syariah Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi Ruko No. 7 Blok C1 – C2 Makassar	Telp. (0411) 833063, 833019, 833062 Fax. (0411) 833064

KANTOR KAS

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
1	Kantor Kas SAMSAT Prov. Sulsel Jl. A. Mappanyukki Makassar Telp. (0411) 9264417
2	Kantor Kas Gubernur Prov. Sulsel Jl. Urip Sumihardjo No. 269 Makassar Telp. (0411) 453306
3	Kantor Kas Gabungan Dinas Kota Makassar Jl. Urip Sumihardjo No. 8 Makassar Telp. (0411) 449458
4	Kantor Kas Dinas PU Prov. SUlsel Jl. A.P.Pettarani Makassar Telp. (0411) 450728
5	Kantor Kas Labuang Baji Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 18 Makassar Telp. (0411) 873275
6	Kantor Kas RSU Dadi Jl. Lanto Dg.Pasewang Telp. (0411) 2998572
7	Kantor Kas Diknas Prov. Sulsel, Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar Telp. (0411) 590173
8	Kantor Kas Antang, Makassar Jl. Antang Raya No. 76 C-D, Makassar Telp. (0411) 2436852
9	Kantor Kas Talasapang Jl. Poros Talasalapang No. 32 D, Makassar Telp. (0411) 2436862
10	Kantor Kas IPDN Jl. Cendrawasih No. 259, Makassar Telp. (0411) 859193
11	Kantor Kas RSU Haji Jl. Dg. Ngeppe, Makassar Telp. (0411) 855192
12	Kantor Kas DPRD Prov. Sulsel Jl. Urip Sumohardjo Makassar Telp. (0411) 421550
13	Kantor Kas Mare, Bone Jl. Poros Bone – Sinjai
14	Kantor Kas Uloe, Kec. Dua Boccoe, Bone Jl. Poros Sengkang – Bone
15	Kantor Kas Bantimurung, Maros Jl. Poros Maros – Bantimurung - Bone
16	Kantor Kas Segeri, Pangkep Jl. Poros Segeri – Barru Telp. (0410) 2317357
17	Kantor Kas Pekkae, Barru Jl. Sultan Hasanuddin, Barru Telp. (0427) 2323400
18	Kantor Kas Mangkoso, Kec. Soppeng Riaja, Barru Jl. Poros Parepare - Makassar
19	Kantor Kas RSU A. Makkasau, Parepare Jl. Nurussamawati No. 3 Parepare Telp. (0421) 22845
20	Kantor Kas Tanru Tedong, Sidrap Jl. Poros Sidrap – Wajo Telp. (0421) 721006
21	Kantor Kas Rappang, Sidrap Jl. Poros Parepare - Enrekang Telp. (0421) 93118
22	Kantor Kas Terminal Lama, Pinrang Jl. Baronang No. 1, Pinrang Telp. (0421) 921650
23	Kantor Kas Alla, Enrekang Jl. Poros Enrekang – Tana Toraja Telp. (0420) 2312578
24	Kantor Kas Rantepao, Toraja Utara Jl. Pongtiku No. 32 Rantepao Telp. (0423) 24640
25	Kantor Kas Lamasi, Belopa Jl. RM. Darso Sugondo, Lamasi, Belopa
26	Kantor Kas Walenrang, Belopa Jl. Poros Palopo – Masamba Telp. (0471) 3315221
27	Kantor Kas RSU Sawerigading, Palopo Jl. Samiun No. 2, Palopo Telp. (0471) 23172

KANTOR KAS

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
28	Kantor Kas KPTSP, Palopo Jl. KH. Muh. Hasyim, Palopo
29	Kantor Kas RSU Andi Djemma, Masamba Jl. Sultan Hasanuddin, Masamba Telp. (0473) 21185
30	Kantor Kas Tomoni, Malili Jl. Poros Mangkutana Telp. (0473) 25120
31	Kantor Kas Kec. Galesong Selatan, Takalar Jl. Karaeng Bonto Marannu No. 22 A, Desa Galesong Baru, Kec. Galesong
32	Kantor Kas Banyorang, Bantaeng Jl. Poros Bantaeng – Banyorang Telp. (0413) 2425133
33	Kantor Kas Lanto Dg. Pasewang(Caile) Jl. Lanto Dg. Pasewang Bulukumba

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
34	Kantor Kas Kantor Bupati Selayar Jl. Pemuda, Benteng, Selayar Telp. (0414) 22601
35	Kantor Kas Bikeru, Sinjai Jl. Poros Sinjai – Bulukumba Telp. (0482) 2424533
36	Kantor Kas Cabbenge, Kec. Lilirilau, Soppeng Jl. Pahlawan No. 17, Kel. Pajalesang, Kec. Lilirilau, Soppeng Telp. (0484) 90871,Fax. (0484) 421354
37	Kantor Kas Kantor Bupati Watansoppeng Jl. Salotungo, Kel. Lalabata Rilau, Kec. Lalabata, Soppeng Telp. (0484) 21538
38	Kantor Kas Wonomulyo, Polewali Jl. Jend. Sudirman No. 130 (Komp. Andita Permai) Polewali Telp. (0428) 52112

ATM

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
1	Kantor Cabang Utama Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
2	Kantor Cabang Utama Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
3	Kantor Cabang Utama Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
4	Kantor Walikota Makassar Jl. Jend.Ahmad Yani, Makassar
5	Kantor Gubernur Prov. Sulsel Jl. Urip Sumihardjo, Makassar
6	Carrefour Tamalanrea, Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar
7	RSU Haji, Makassar Jl. Dg. Ngeppe, Makassar
8	Mall Panakukkang, Makassar Jl. Boulevard Makassar
9	Mall Ratu Indah, Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi, Makassar
10	Makassar Trade Center (MTC), Makassar Jl. Jend. Ahmad Yani, Makassar
11	Kantor Kas Labuang Baji, Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 18, Makassar
12	Kantor Kas RSU Dadi, Makassar Jl. Lanto Dg. Pasewang, Makassar
13	Kantor Kas Antang, Makassar Jl. Antang Raya No. 76 C-D, Makassar
14	Kantor Kas Talasalapang, Makassar Jl. Poros Talasalapang No. 32 D, Makassar
15	Kantor Dinas Kesehatan Prov. Sulsel Jl. Perintis Kemerdekaan, Makassar
16	Kantor Kas SAMSAT Prov. Sulsel Jl. A. Mappanyukki Makassar
17	Makassar Golden Hotel (MGH) Jl.Pasar Ikan, Makassar
18	Kantor Kas DPRD Prov. Sulsel Jl. Urip Sumohardjo, Makassar
19	Kantor Kas Diknas Prov. Sulsel, Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar
20	Kantor Kas Gabungan Dinas Kota Makassar Jl. Urip Sumihardjo No. 8 Makassar
21	Kas Keliling Cabang Utama Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar
22	Cabang Utama Mamuju Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3, Mamuju
23	Cabang Utama Mamuju Jl. Jend. Ahmad Yani No. 3, Mamuju
24	Cabang Utama Bone Jl. Ahmad Yani No. 15, Bone
25	Kantor Bupati Bone
26	Cabang Maros Jl. Jend. Sudirman No. 3 Maros
27	Bandar Udara Sultan Hasanuddin Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar
28	Kantor Bupati Maros
29	Cabang Pangkep Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Pangkajene
30	Kantor Bupati Pangkep Jl. S.T. Hasanuddin Pangkep
31	Cabang Barru Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Barru
32	Cabang Parepare Jl. Bau Massepe Ruko No. 7 - 8 Parepare
33	Kantor Walikota Parepare Jl. Jend. Sudirman, Parepare
34	Cabang Sidrap Jl. Jend. Sudirman No. 119 Sidrap
35	Cabang Pinrang Jl. Jend. Sudirman No. 257 Pinrang
36	Cabang Enrekang Jl. Sultan Hasanuddin No. 4, Enrekang
37	Kantor Kas Alla, Enrekang Jl. Poros Enrekang – Tana Toraja

ATM

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
38	Cabang Makale Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale
39	Cabang Belopa Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Luwu
40	Kantor Kas Walenrang Jl. Poros Palopo – Masamba
41	Cabang Palopo Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo
42	Cabang Palopo Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Flamboyan) No. 1 Palopo
43	Kantor Kas RSU Sawerigading Palopo Jl. Samiun No. 2 Palopo
44	Kantor Kas RSU Andi Djemma, Masamba Jl. Sultan Hasanuddin Masamba
45	Kantor Kas Tomoni, Malili
46	Kantor Bupati Luwu Utara
47	Cabang Gowa Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2, Sungguminasa
48	Kantor Bupati Takalar Jl. Jend. Sudirman No. 26, Takalar
49	Kantor Cabang Takalar Jl. Jend. Sudirman No. 1, Takalar
50	Cabang Jeneponto Jl. Pahlawan No. 5, Jeneponto
51	Cabang Bantaeng Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 40, Bantaeng
52	Kantor Bupati Bantaeng Jl. A. Mannapiang, Pasorongi, Bantaeng
53	Cabang Bulukumba Jl. Jend. Sudirman No. 48, Bulukumba
54	Kantor Kas Lanto Dg. Pasewang (Caile) Jl. Lanto Dg. Pasewang Bulukumba
55	Kantor Bupati Bulukumba
56	Cabang Selayar Jl. Jend. Ahmad Yani, Benteng, Selayar

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
57	Cabang Sinjai Jl. Persatuan Raya No. 48, Sinjai
58	Kantor Kas Bikeru Jl. Poros Sinjai – Bulukumba
59	Cabang Soppeng Jl. Kemakmuran No. 125, Soppeng
60	Cabang Sengkang Jl. R.A.Kartini No. 1, Sengkang
61	Cabang Polmas Jl. Andi Depu No. 172 Polewali
62	Kantor Kas Wonomulyo, Polewali Jl. Jend. Sudirman No. 130 (Komp. Andita Permai) Polewali
63	Kantor Bupati Polman Kompleks Kantor Bupati Polewali Mandar
64	Cabang Mamasa Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar
65	Cabang Majene Jl. Gatot Subroto No. 59, Majene
66	Cabang Pasangkayu Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu
67	Cabang Jakarta Jl. Gatot Subroto, Menara Bidakara 2, Jakarta
68	Kantor Perwakilan Prov. Sulsel Jl. Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta
69	Cabang Syariah Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi Ruko No. 7 Blok C1 – C2 Makassar
70	Cabang Syariah Maros Jl. Jend. Sudirman (Samping Masjid Al Markaz Maros)
71	Cabang Pembantu Siwa Jl. Andi Jaya No. 50, Siwa
72	Cabang Pembantu Daya Jl. Perintis Kemerdekaan, Kompleks Ruko Bukit Khatulistiwa

PAYMENT POINT

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
1	*Payment Point* Kantor Bupati Gowa Jl. Masjid Raya No. 13, Sungguminasa
2	*Payment Point* Kantor Kec. Bajeng, Kab. Gowa Jl. Poros Gowa – Takalar
3	*Payment Point* Samsat Sayang Makassar Town Square Jl. Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea, Makassar
4	*Payment Point* SINTAP Parepare Jl. Veteran, Parepare
5	*Payment Point* Pasar Sentral Enrekang Pasar Sentral Enrekang
6	*Payment Point* Kantor Dinas Pendapatan Daerah Prov. Sulsel Jl. A.P. Pettarani

OFFICE CHANNELLING

No	Nama Kantor / Alamat / Telp
1	*Office Channelling* Cabang Utama Bone Jl. Ahmad Yani No. 15, Watampone
2	*Office Channelling* Cabang Palopo Jl. Andi Baso Rahim (ex. Jl. Falmboyan) No. 1, Palopo
3	*Office Channelling* Cabang Bulukumba Jl. Jend. Sudirman No. 48, Bulukumba
4	*Office Channelling* Cabang Utama Mamuju Jl. Ahmad Yani No. 3, Mamuju
5	*Office Channelling* Cabang Pangkep Jl. Sultan Hasanuddin No. 7, Pangkajene
6	*Office Channelling* Cabang Barru Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Barru
7	*Office Channelling* Cabang Pinrang Jl. Jend. Sudirman No. 257, Pinrang
8	*Office Channelling* Cabang Sidrap Jl. Jend. Sudirman No. 119, Sidrap
9	*Office Channelling* Cabang Soppeng Jl. Kemakmuran No. 125, Watansoppeng
10	*Office Channelling* Cabang Sinjai Jl. Persatuan raya No. 58, Sinjai
11	*Office Channelling* Cabang Enrekang Jl. Sultan Hasanuddin No. 5 Enrekang
12	*Office Channelling* Cabang Belopa Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Luwu
13	*Office Channelling* Cabang Gowa Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa
14	*Office Channelling* Cabang Takalar Jl. Fitrah No. 22 Takalar
15	*Office Channelling* Cabang Polman Jl. Andi Depu No. 102 Polewali
16	*Office Channelling* Cabang Jeneponto Jl. Pahlawan No. 5 Jeneponto
17	*Office Channelling* Cabang Parepare Jl. Bau Massepe No. 468 Parepare
18	*Office Channelling* Cabang Bantaeng Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng
19	*Office Channelling* Cabang Masamba Jl. Suhada No. 1 Masamba
20	*Office Channelling* Cabang Majene Jl. Gatot Subroto No. 59 Majene
21	*Office Channelling* Cabang Makale Jl. Pongtiku, Kel. Pantan, Kec. Makale
22	*Office Channelling* Cabang Selayar Jl. Jend. Ahmad Yani Benteng, Selayar
23	*Office Channelling* Cabang Malili Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 1 Malili
24	*Office Channelling* Cabang Pasangkayu Jl. Andi Bandaco, Pasangkayu
25	*Office Channelling* Cabang Mamasa Jl. Poros Mamasa Km. 2, Desa Osango, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa, Sulbar

MOBIL KAS KELILING			
No	**Nama Kantor / Alamat / Telp**	**No**	**Nama Kantor / Alamat / Telp**
1	Cabang Utama Makassar Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 16 Makassar	3	Cabang Gowa Jl. HOS. Cokroaminoto No. 2 Sungguminasa
2	Cabang Bantaeng Jl. Andi Mannapiang No. 1 Pasorongi Bantaeng		

PEMASARAN DAN PROMOSI

PEMASARAN

Kinerja keuangan Bank Sulselbar yang memuaskan sepanjang tahun 2012 menunjukkan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan kegiatan pemasaran dan promosi yang aktif untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas sesuai segmen dan target pasar yang dituju. Strategi penetrasi pasar merupakan cara efektif untuk masuk dan menguasai pasar yang dituju dalam rangka memperluas *customer base,* baik konsumer maupun retail, dan meningkatkan daya saing bank dengan layanan produk dan jasa yang kompetitif. Sedangkan *existing* dan *captive market* yang telah dikuasai juga tetap harus menjadi perhatian untuk dikelola lebih baik lagi demi menjaga dan memelihara loyalitas nasabah yang merupakan salah satu sumber untuk membangun keunggulan kompetitif bank. Dalam menjalankan strategi pemasaran, Bank Sulselbar senantiasa memperhatikan etika bisnis yang bertujuan untuk memenuhi komitmen yang telah diinformasikan bank kepada nasabah dan masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan untuk menciptakan dan memelihara kepercayaan nasabah dan masyarakat untuk menggunakan layanan produk dan jasa Bank Sulselbar secara terus – menerus.

Strategi Penetrasi Pasar

Strategi pemasaran yang cermat dan tepat sangat berperan dalam perluasan penguasaan pangsa pasar. Strategi pemasaran Bank Sulselbar yaitu melalui strategi penetrasi pasar yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar Bank Sulselbar melalui aktivitas pemasaran yang aktif. Strategi penetrasi pasar yang efektif dilakukan dengan cara antara lain :

a. **Perluasan jaringan distribusi**
   Perluasan jaringan distribusi bertujuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan mengembangkan jaringan pemasaran, baik melalui jaringan kantor maupun saluran pemasaran lainnya seperti channeling untuk menyalurkan kredit dan pembiayaan sektor mikro dan kecil.

b. **Meningkatkan kegiatan promosi dan publisitas**
   Kegiatan promosi untuk menciptakan *brand awareness* dan memperkuat *brand image* Bank Sulselbar.

c. **Meningkatkan serta memperbaiki kualitas layanan**
   Kualitas layanan yang baik akan memberikan *service experience* bagi nasabah dan masyarakat dalam bertransaksi di Bank Sulselbar. Kualitas pelayanan tidak hanya terbatas pada layanan kepada nasabah pada counter layanan yang ada, melainkan juga pada produk – produk, baik pendanaan maupun kredit & pembiayaan serta jasa perbankan lainnya. Penyediaan produk dengan fitur yang menarik dan pricing yang kompetitif serta didukung oleh teknologi informasi terkini merupakan bentuk layanan produk untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memanfaatkan produk dan jasa Bank Sulselbar.

Di samping itu, upaya pengembangan fitur produk dan layanan perbankan juga dilakukan untuk memberikan nilai tambah produk Bank Sulselbar dan memberikan kemudahan transaksi bagi nasabah, antara lain dilakukan dengan *rebranding* dan *repackaging* produk yang disesuaikan dengan segmen dan target pasar, mendesain dan melahirkan produk baru, serta pengembangan fitur produk dan layanan ATM.
Strategi pemasaran untuk meningkatkan penyaluran kredit dan pembiayaan sejalankan pula dengan upaya untuk memacu perolehan dana pihak ketiga melalui beragam yang ada. Produk pendanaan Bank Sulselbar yaitu giro, tabungan dan deposito.

Produk penghimpunan dana atau simpanan Bank Sulselbar terdiri dari simpanan konvensional dan syariah. Produk simpanan konvensional yaitu Giro, Tabungan Simpeda, Tapemda, Tapemda Sayang Petani, Tapemda Pelajar, Tapemda Pensiunan, Tampan (Tabungan Masa Depan), Tabungan Haji dan Deposito. Produk simpanan syariah antara lain Giro Wadiah, Deposito *Mudharabah*, Tabungan Syariah, Tabungan Hatam (Tabungan Haji dan Umrah) dan Tabungan Kemitraan. Penghimpunan dana melalui Deposito dilaksanakan dengan penetapan bunga kompetitif dan pemberlakuan *special rate* untuk nominal simpanan tertentu. Nasabah dapat memilih produk pendanaan tersebut sesuai dengan kebutuhannya masing – masing.

Produk jasa layanan meliputi kiriman uang, inkasso, transfer BI-RTGS, bank garansi (jaminan bank) , surat keterangan bank (referensi bank), penerimaan pembayaran telepon (Telkom), Listrik, air minum (PAM), telepon seluler (Telkomsel dan Indosat), pajak, pembayaran gaji/pensiunan, bank penerima setoran biaya penyelengaraan ibadah haji (BPIH) dan *electronic banking* (ATM dan SMS *Banking*).

Untuk produk kredit, Bank Sulselbar tetap fokus pada penyaluran pinjaman untuk sektor produktif, khususnya UMKM. Perluasan segmen pasar juga dilakukan Bank Sulselbar seiring dengan pengembangan produk kredit yang dilakukan melalui penambahan target pasar, yang mana target pasar selama ini adalah debitur UMKM, ke depannya akan diperluas pula untuk debitur corporate namun tetap difokuskan untuk pembiayaan sektor produktif.

Dalam penyaluran kredit, Bank Sulselbar senantiasa mengedepankan prinsip kehati – hatian untuk menjaga kualitas kredit yang sehat. Untuk itu, Bank Sulselbar melakukan pembinaan kepada debitur baik debitur lancar maupun debitur bermasalah, untuk memastikan pemberian kredit berlangsung aman dan lancar.

PROMOSI

Bank Sulselbar secara aktif mempromosikan produk yang dimilikinya yaitu produk simpanan, kredit dan pembiayaan dan jasa layanan perbankan lainnya. Kegiatan promosi dimaksudkan untuk mengkomunikasikan keberadaan Bank Sulselbar dan produk – produknya kepada masyarakat. Kegiatan promosi tersebut dilakukan antara lain :

Above The Line Promotion

Promosi *above the line* ditujukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas sebagai upaya membentuk *brand image*

dengan menggunakan instrumen promosi media massa. *Above the line promotion* dilakukan antara lain :

- Media Cetak
  Promosi dengan pemasangan iklan Bank Sulselbar dan produk Bank Sulselbar pada media cetak, terutama media cetak lokal.

- Media Elektronik
  Promosi dengan pemasangan iklan Bank Sulselbar dan produk Bank Sulselbar pada media elektronik, terutama media cetak lokal.

- Web Site
  Website atau situs Bank Sulselbar dengan alamat domain www.banksulselbar.co.id menayangkan berbagai informasi mengenai Bank Sulselbar antara lain produk – produk Bank Sulselbar, tingkat suku bunga, dan simulasi perhitungan bunga serta informasi lainnya yang relevan. Informasi pada situs Bank Sulselbar secara rutin dilakukan pengkinian untuk menyajikan data terbaru yang cepat dan akurat untuk diakses publik.

- Media Promosi Outdoor
  Promosi dengan pemasangan iklan Bank Sulselbar dan produk Bank Sulselbar pada media promosi di luar ruangan, seperti pemasangan billboard pada titik – titik strategis dan pemasangan iklan produk Bank Sulselbar di setiap garbarata pada Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin dan papan penunjuk arah bank pada jalan – jalan utama di Kota Makassar dan daerah yang terdapat jaringan operasional Bank Sulselbar.

Below The Line Promotion

Kegiatan promosi *below the line* dilakukan antara lain melalui kegiatan *sponsorship*, program bonus/gimmick yang menarik bagi nasabah, ikut serta dalam *event* pameran/eksibisi perbankan dan penyelenggaraan program undian lokal berhadiah.

PEMASARAN UNIT USAHA SYARIAH

Kegiatan pemasaran Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar selain terintegrasi dengan pemasaran Bank Sulselbar secara keseluruhan, juga secara spesifik melakukan pemasaran untuk mempromosikan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar beserta produk dan jasa UUS Bank Sulselbar kepada publik. Strategi pemasaran UUS Bank Sulselbar diupayakan agar senantiasa berpegang pada prinsip syariah yakni mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam menyampaikan informasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat terhadap UUS Bank Sulselbar serta produk dan jasanya. Materi promosi yang dipublikasikan UUS Bank Sulselbar disajikan secara transparan dan jujur dengan tidak mengabaikan unsur informatif dari materi promosi itu sendiri.

Aktivitas pemasaran UUS Bank Sulselbar sebagai berikut :

- Publisitas
  Kegiatan publisitas UUS Bank Sulselbar antara lain dengan program *sponsorship,* solicit dan presentasi produk ke calon nasabah potensial, menjalin hubungan baik dengan berbagai instansi dan universitas serta melakukan kegiatan *social marketing.*

- Promosi Penjualan
  Aktivitas promosi penjualan dilakukan antara lain dengan pemberian gimmick/merchandise kepada nasabah, terutama nasabah pendanaan apabila melakukan pembukaan rekening baru pada UUS Bank Sulselbar; pemberian hadiah kepada prime dan loyal customer; dan pemasangan iklan pada media cetak dan media elektronik.

- *Personal Selling*
  Kegiatan *personal selling* dilakukan dengan menugaskan tenaga *marketing* untuk mengkomunikasikan secara informatif, tepat dan amanah tentang produk dan jasa UUS Bank Sulselbar kepada nasabah dan masyarakat.

- *Direct Selling*
  Direct selling UUS Bank Sulselbar dilakukan antara lain dengan mengikuti eksibisi atau pameran perbankan, khususnya perbankan syariah, dan kegiatan *cross selling* dengan menawarkan produk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik nasabah UUS Bank Sulselbar.

Selain itu, UUS Bank Sulselbar juga menjalin kerjasama *co-branding* dengan BKMT (Badan Kontak Majelis Taklim) Prov. Sulsel dalam hal pengelolaan dana BKMT dan iuran keanggotaan. Dalam kerjasama *co-brand* tersebut, setiap anggota BKMT Prov. Sulsel secara langsung menjadi nasabah UUS Bank Sulselbar dan mendapatkan fasilitas berupa buku tabungan syariah UUS Bank Sulselbar.

UUS Bank Sulselbar bekerjasama pula dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makassar dalam hal pengelolaan penerimaan pembayaran uang kuliah, khususnya bagi mahasiswa strata 1 untuk semua fakultas. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) didesain *co-branding* antara Bank Sulselbar dan UMI yang selain berfungsi sebagai tanda pengenal mahasiswa, juga sebagai Kartu ATM.

Dengan berbagai strategi pemasaran yang telah ditempuh UUS Bank Sulselbar, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UUS Bank Sulselbar di masa mendatang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh *stakeholder*.

REFERENSI BAPEPAM-LK

Kriteria	Pejelasan	Halaman
I. UMUM		
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris.		
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca.		
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas	Nama Perusahaan dan Tahun Annual Report ditampilkan di: 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman	
4. Laporan tahunan ditampilkan di *website* Perusahaan		
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting		
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun	Informasi memuat antara lain: 1. Penjualan/pendapatan usaha 2. Laba (rugi) 3. Total laba (rugi) komprehensif 4. Laba (rugi) per saham	
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama	Informasi memuat antara lain: 1. Modal kerja bersih 2. Jumlah investasi pada entitas lain 3. Jumlah aset 4. Jumlah liabilitas 5. Jumlah ekuitas	
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 5 (lima) tahun	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik.	Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat: 1. Harga saham tertinggi, 2. Harga saham terendah, 3. Harga saham penutupan, 4. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada).	
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konvertibel yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (*outstanding*) 2. Tingkat bunga/imbalan 3. Tanggal jatuh tempo 4. Peringkat obligasi/sukuk	
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi		
1. Laporan Dewan Komisaris	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi. 3. Komite-komite yang berada dibawah pengawasan Dewan Komisaris. 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada)	
2. Laporan Direksi	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Analisis atas kinerja perusahaan misalnya kebijakan strategis, perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan. 2. Prospek usaha 3. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang telah dilaksanakan oleh perusahaan 4. Perubahan komposisi dewan Direksi (jika ada).	
3. Tanda tangan anggota	Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri 2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan. 3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya 4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau: penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan	
IV. Profil Perusahaan		
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan	Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan *website*	
2. Riwayat singkat perusahaan	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada).	

Kriteria		Pejelasan	Halaman
3.	Bidang usaha	Uraian mengenai antara lain: 1. bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan; dan 2. penjelasan mengenai produk dan atau jasa yang dihasilkan	
4.	Struktur organisasi	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan	
5.	Visi dan misi perusahaan	Mencakup: 1. Visi dan misi perusahaan; dan 2. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris	
6.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris	
7.	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi	Informasi memuat antara lain: 1. Nama 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain) 3. Umur 4. Pendidikan 5. Pengalaman kerja 6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi	
8.	Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan)	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan 3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan kesempatan kepada seluruh karyawan 4. Biaya yang telah dikeluarkan	
9.	Komposisi pemegang saham	Mencakup antara lain: 1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham 2. Nama direktur dan komisaris yang memiliki saham 3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya	
10.	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	Informasi memuat antara lain : 1. Nama entitas anak/asosiasi 2. Persentase kepemilikan saham 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak atau entitas asosiasi 4. Keterangan status operasi entitas anak atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi)	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
11. Kronologis pencatatan saham	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan saham 2. Jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah saham 3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan	
12. Kronologis pencatatan Efek lainnya	Mencakup antara lain: 1. Kronologis pencatatan Efek lainnya 2. Jenis tindakan korporasi (*corporate action*) yang menyebabkan perubahan jumlah Efek lainnya 3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku 4. Nama Bursa dimana Efek lainnya perusahaan dicatatkan 5. Peringkat Efek	
13. Nama dan alamat lembaga dan/ atau profesi penunjang pasar modal	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik 3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek	
14. Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima perusahaan baik yang berskala nasional maupun internasional	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan atau sertifikat 2. Tahun perolehan 3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi)	
15. Nama dan alamat entitas anak dan atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)		
V. Analisa dan Pembahasan Manajamen atas Kinerja Perusahaan		
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	Memuat uraian mengenai: 1. Produksi/kegiatan usaha; 2. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; 3. Penjualan/pendapatan usaha; 4. Profitabilitas untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan (jika ada)	
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai: 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan jumlah aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi); 4. Pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif 5. Arus kas	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan	Penjelasan tentang : 1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang 2. Tingkat kolektibilitas piutang	
4. Bahasan tentang struktur modal *(capital structure)*, dan kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policy)*	Penjelasan atas: 1. Struktur modal *(capital structure),* 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal *(capital structure policy),*	
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal	Penjelasan tentang: 1. Tujuan dari ikatan tersebut 2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut 3. Mata uang yang menjadi denominasi 4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait **Catatan**: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, agar diungkapkan	
6. Jika laporan keuangan mengungkapkan peningkatan atau penurunan yang material dari penjualan/pendapatan bersih, maka berikan bahasan tentang sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produk atau jasa baru	Penjelasan mengenai: 1. Besaran peningkatan/penurunan penjualan atau pendapatan bersih 2. Faktor penyebab peningkatan/penurunan material dari penjualan atau pendapatan bersih yang dikaitkan dengan jumlah barang atau jasa yang dijual, dan atau adanya produksi atau jasa baru	
7. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan/ pendapatan bersih perusahaan serta laba perusahaan selama 2 (dua) tahun atau sejak perusahaan memulai usahanya, jika baru memulai usahanya kurang dari 2 (dua) tahun	Ada atau tidak ada pengungkapan	
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan	Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. **Catatan**: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan	
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya	
10. Uraian tentang aspek pemasaran	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah dividen 2. Jumlah dividen per saham 3. Payout ratio untuk masing-masing tahun Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya	
12. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai: 1. Total perolehan dana, 2. Rencana penggunaan dana, 3. Rincian penggunaan dana, 4. Saldo dana, dan 5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada)	
13. Informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, akuisisi atau restrukturisasi utang/ modal.	Memuat uraian mengenai: 1. Tujuan dilakukannya transaksi; 2. Nilai transaksi atau jumlah yg direstrukturisasi; 3. Sumber dana. Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi.	Memuat uraian mengenai: 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode berjalan; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme *review* atas transaksi; 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan	
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap perusahaan	Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan dampaknya terhadap perusahaan Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan	
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi	Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
VI. *Good Corporate Governance*		
1. Uraian Dewan Komisaris	Uraian memuat antara lain: 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris 2. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris 4. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam pertemuan 5. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris	
2. Uraian Direksi	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. 2. Frekuensi pertemuan 3. Tingkat kehadiran anggota Direksi dalam pertemuan 4. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi	
3. Assessment terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi	Uraian mengenai: 1. Proses pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 2. Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan assessment atas kinerja anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi 3. Pihak yang melakukan assessment	
4. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Direksi	Mencakup antara lain: 1. Pengungkapan prosedur penetapan remunerasi 2. Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan jumlah imbalan jangka pendek dan jangka panjang/pasca kerja untuk setiap anggota Direksi 3. Indikator kinerja untuk mengukur *performance* Direksi	
5. Komite Audit	Mencakup antara lain: 1. Nama dan jabatan anggota komite audit 2. Kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja anggota komite audit 3. Independensi anggota komite audit 4. Uraian tugas dan tanggung jawab 5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan komite audit 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit	
6. Komite Nominasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi 2. Independensi anggota komite nominasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
7. Komite Remunerasi	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite remunerasi 2. Independensi anggota komite remunerasi 3. Uraian tugas dan tanggung jawab 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite remunerasi 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite remunerasi	
8. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain 2. Independensi anggota komite lain 3. Uraian tugas dan tanggung jawab. 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain	
9. Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan 2. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan	
10. Uraian mengenai unit audit internal	Mencakup antara lain: 1. Nama ketua unit audit internal 2. Jumlah pegawai pada unit audit internal 3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal 4. Struktur atau kedudukan unit audit internal 5. Uraian pelaksanaan tugas 6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua unit audit internal	
11. Akuntan Perseroan	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah periode akuntan telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 2. Jumlah periode Kantor Akuntan Publik telah melakukan audit laporan keuangan tahunan perusahaan 3. Besarnya fee audit dan jasa atestasi lainnya (dalam hal akuntan memberikan jasa atestasi lainnya bersamaan dengan audit) 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa financial audit	
12. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	
13. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	Mencakup antara lain: 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
14. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan lingkungan hidup	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait program lingkungan hidup, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, dan lain-lain 4. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki	
15. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, dan lain-lain	
16. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan lain-lain	
17. Uraian mengenai *corporate social responsibility* yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	Mencakup antara lain informasi tentang: 1. Kebijakan, 2. Kegiatan yang dilakukan, dan 3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain	
18. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada periode laporan tahunan	Mencakup antara lain: 1. Pokok perkara/gugatan 2. Status penyelesaian perkara/gugatan 3. Pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan	
19. Akses informasi dan data perusahaan	Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui *website*, media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
20. Bahasan mengenai kode etik	Memuat uraian antara lain: 1. Keberadaan kode etik 2. Isi kode etik 3. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi 4. Upaya dalam penerapan dan penegakannya 5. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (*corporate culture*) yang dimiliki perusahaan	
21. Pengungkapan mengenai whistleblowing system	Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain: 1. Penyampaian laporan pelanggaran 2. Perlindungan bagi *whistleblower* 3. Penanganan pengaduan 4. Pihak yang mengelola pengaduan.	
VII. Informasi Keuangan		
1. Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan	Kesesuaian dengan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan	
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan		
3. Deskripsi auditor independen di opini	Deskripsi memuat tentang: 1. Nama & tanda tangan 2. Tanggal Laporan Audit 3. No. ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik	
4. Laporan keuangan yang lengkap	Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 1. Laporan posisi keuangan (neraca) 2. Laporan laba rugi komprehensif 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Laporan arus kas 5. Catatan atas laporan keuangan 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan)	
5. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya	Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK	
6. Perbandingan tingkat profitabilitas	Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
7. Laporan arus kas	Memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan 4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan atas laporan keuangan	
8. Ikhtisar kebijakan akuntansi	Meliputi sekurang-kurangnya: 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan 3. Pengakuan pendapatan dan beban 4. Aset Tetap 5. Instrumen Keuangan	
9. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi 2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait 3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas 4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi	
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan Perpajakan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi 2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini 3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan. 4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan. 5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak	
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan Aset Tetap	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Metode penyusutan yang digunakan 2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model biaya 3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya) 4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	

Kriteria	Pejelasan	Halaman
12. Perkembangan Terakhir Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan Lainnya	Uraian mengenai SAK/peraturan yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif, yang belum diterapkan oleh perusahaan, dengan mengungkapkan: 1. Jenis dan tanggal efektif SAK/peraturan baru tersebut; 2. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru tersebut atas laporan keuangan.	
13. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	Hal-hal yang harus diungkapkan: 1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen keuangan 2. Klasifikasi instrumen keuangan 3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas 5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya	
14. Penerbitan laporan keuangan	Hal-hal yang diungkapkan antara lain: 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan	

PT. BANK SULSELBAR

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2012 dan 2011
Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - ii
LAPORAN KEUANGAN	
Laporan Posisi Keuangan	1 - 2
Laporan Laba Rugi Komprehensif	3
Laporan Perubahan Ekuitas	4
Laporan Arus Kas	5 - 6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7 - 64

BankSulselbar

Nomor : SR /030 / R / GPK / III / 2013

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PT BANK SULSELBAR
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2012 DAN 2011

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Ellong Tjandra
   Alamat kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 16 Makassar 90125
   Alamat domisili : Komp. Azalea Blok. A No. 43 Makassar
   Nomor telepon : (0411) 859171
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Drs. H. YanuarFachrudin, MM
   Alamat kantor : Jl. DR. Sam Ratulangi No. 16 Makassar 90125
   Alamat domisili : Jl. Hati Murah No. 18 Makassar
   Nomor telepon : (0411) 859171
   Jabatan : Direktur Umum

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perseroan;
2. Laporan keuangan Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum;
3. a. Semua Informasi dalam laporan keuangan Perseroan telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Perseroan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 20 Maret 2013
PT. BANK SULSELBAR
Direksi,

METERAI TEMPEL 71286ABF410698317 6000

Ellong Tjandra
Direktur Utama

anuarFachrudin
Direktur Umum

Tembusan :

- Grup Audit Intern PT.Bank Sulselbar
- Arsip

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : KEP – 42/KM.1/2013

Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsda@kapdbsda.co.id

Nomor : R.1.14/001/03/13

Laporan Auditor Independen

Kepada Yth,
Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT. Bank Sulselbar

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan PT. Bank Sulselbar ("Bank") tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen Bank. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan secara keseluruhan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 serta hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Drs. Rupmatuk Sibarani, Ak, CPA.
NRAP.0208
No. Izin KAP No. : KEP-42/KM.1/2013

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
ASET			
Kas	*2a,2b,2d,3*	323.019.469.200	300.870.476.163
Giro pada Bank Indonesia	*2a,2b,2e,4*	546.679.352.659	469.197.511.881
Giro pada Bank lain-Setelah dikurangi *cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nihil dan Rp. 2.040.857*	*2a,2b,2e,5*	405.096.997	880.673.289
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain- *cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 500.000.000 dan Rp. 550.000.000*	*2b,2f,6*	681.498.112.160	884.447.500.937
Surat-surat berharga	*2b,2g,7*	202.093.624.115	169.232.098.280
Kredit yang diberikan			
Pihak berelasi-*Setelah dikurangi* *cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 2.663.355.393*	*2b,2c,2h,2i,* 8,29,30,33 36,38,40	174.069.628	174.069.628
Pihak ketiga-*Setelah dikurangi* *cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 78.280.328.525 dan Rp. 115.747.664.302*	*2h,2i,8,29 30,33,36,40*	5.663.378.192.794	5.014.550.151.726
Pembiayaan syariah			
Pihak ketiga-*Setelah dikurangi* *cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 6.927.972.647 dan Rp. 4.521.917.739*	*2b,2c,2h,2i, 2j,8,29,30,* 33,36,40	363.628.554.453	255.437.425.680
Penyertaan	*2b,2k,9*	81.584.000	74.399.000
Aset tetap-*Setelah dikurangi akumulasi penyusutan* *pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 127.626.710.921 dan Rp. 114.390.563.025*	*2l,10*	112.344.706.376	117.255.411.285
Aset pajak tangguhan	*2t,17d*	9.715.932.787	3.790.672.376
Aset lain-lain	*2m,2w,11*	111.139.402.939	74.561.025.632
JUMLAH ASET		**8.014.158.098.108**	**7.290.471.415.877**

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN - *LANJUTAN*
Per 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	*2b,2n,12*	103.583.588.636	121.743.494.845
Simpanan nasabah	*2b,2c,2o,13,28*		
Pihak-pihak berelasi			
Konvensional		648.617.981.941	367.983.014.186
Syariah		1.617.659.132	174.768.076
Pihak ketiga			
Konvensional		4.513.785.670.723	4.785.618.490.275
Syariah		237.553.999.310	137.308.256.019
Simpanan dari bank lain	*2b,2p,14*	497.172.374.794	55.488.365.285
Surat berharga yang diterbitkan	*2b,2w,2z,15*	496.506.216.163	494.560.640.529
Pinjaman yang diterima	*2b,2q,16*	150.631.727.539	151.971.137.671
Utang pajak	*2t,17a*	14.814.495.118	30.171.964.748
Imbalan pasca kerja	*2v,19*	37.088.928.404	11.470.542.621
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	*2i,35*	-	-
Liabilitas lainnya	*18*	90.335.541.373	56.679.150.859
JUMLAH LIABILITAS		**6.791.708.183.133**	**6.213.169.825.114**
EKUITAS			
Modal saham	*20*		
Modal dasar :			
Per 31 Desember 2012 dan 2011			
Modal ditempatkan dan disetor penuh :			
Saham jumlah 528.739 lembar, nominal Rp. 1.000.000		528.739.000.000	-
Saham jumlah 487.477 lembar, nominal Rp. 1.000.000		-	487.477.000.000
Modal disetor lainnya	*21*	1.942.699	14.150.906.863
Modal sumbangan	*22*	243.905.400	243.905.400
Saldo laba	*23*		
Yang belum ditentukan penggunaannya		276.465.706.397	260.956.588.768
Yang telah ditentukan penggunaannya		416.999.360.479	314.473.189.732
JUMLAH EKUITAS		**1.222.449.914.975**	**1.077.301.590.763**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**8.014.158.098.108**	**7.290.471.415.877**

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI			
Pendapatan Bunga dan Syariah	*2r,24*		
Bunga		1.096.743.459.929	962.591.509.056
Jumlah		**1.096.743.459.929**	**962.591.509.056**
Beban Bunga dan bagi Hasil Syariah	*2r,25*		
Bunga		358.470.838.478	323.453.796.985
Jumlah		**358.470.838.478**	**323.453.796.985**
Jumlah pendapatan bunga - bersih		**738.272.621.451**	**639.137.712.071**
PENDAPATAN (BEBAN) OPERASI LAINNYA	*26,27*		
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	*26*	25.389.784.180	31.728.318.752
Administrasi	*26*	36.765.761.743	32.428.578.850
Lain-lain	*26*	9.931.543.068	24.211.424.024
Beban personalia	*27*	(275.278.664.211)	(207.785.303.133)
Beban umum dan administrasi	*28*	(141.149.783.528)	(124.853.329.933)
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai		(198.262.633.261)	(173.636.927.670)
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai	*29*	188.838.962.341	152.858.751.967
Jumlah		**(353.765.029.669)**	**(265.048.487.143)**
Laba operasional		**384.507.591.783**	**374.089.224.929**
PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASI			
Pendapatan non operasi	*30*	4.960.663.225	428.714.446
Beban non operasi	*30*	(12.837.497.272)	(11.369.967.331)
JUMLAH		**(7.876.834.047)**	**(10.941.252.885)**
LABA SEBELUM TAKSIRAN MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		**376.630.757.736**	**363.147.972.044**
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN			
Pajak kini	*2t,17*	106.090.311.750	103.112.082.000
Pajak tangguhan	*2t,17*	(5.925.260.411)	6.547.221.210
JUMLAH		**100.165.051.339**	**109.659.303.210**
LABA BERSIH		**276.465.706.397**	**253.488.668.834**
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**276.465.706.397**	**253.488.668.834**
Laba operasional bersih per saham	*2x,31*	717.952	744.954
Laba bersih per saham	*2x,31*	527.012	520.001

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Modal sumbangan	Modal disetor lainnya	Saldo laba: Yang telah ditentukan penggunaannya: Cadangan umum	Saldo laba: Yang telah ditentukan penggunaannya: Cadangan tujuan	Saldo laba: Yang belum ditentukan penggunaannya	Jumlah ekuitas
Saldo 1 Januari 2011		**468.061.000.000**	**243.905.400**	**1.310.945**	**109.644.438.255**	**105.089.029.246**	**257.157.002.034**	**940.196.685.881**
Penyesuaian penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)		-	-	-	-	-	7.467.919.934	7.467.919.934
Setelah penyesuaian penerapan awal PSAK 50 (Revisi 2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006)		**468.061.000.000**	**243.905.400**	**1.310.945**	**109.644.438.255**	**105.089.029.246**	**264.624.921.968**	**947.664.605.815**
Dividen		-	-	-	-	-	(145.858.149.487)	(145.858.149.487)
Cadangan umum dan tujuan		-	-	-	48.619.383.163	32.824.383.354	(81.443.766.517)	-
Koreksi saldo laba tahun lalu		-	-	-	29.072.798.389	(15.012.712.359)	(14.060.086.030)	-
Tambahan pembayaran jasprod dan tantiem		-	-	-	-	-	(15.795.000.000)	(15.795.000.000)
Pembayaran pajak		-	-	-	-	(3.747.827.194)	-	(3.747.827.194)
Koreksi pembayaran dana pensiun		-	-	-	-	7.983.696.878	-	7.983.696.878
Setoran modal selama tahun 2011	20	-	-	33.565.595.918	-	-	-	33.565.595.918
Konversi ke modal ditempatkan dan disetor penuh		19.416.000.000	-	(19.416.000.000)	-	-	-	-
Laba bersih untuk tahun berjalan		-	-	-	-	-	253.488.668.834	253.488.668.834
Saldo 31 Desember 2011		**487.477.000.000**	**243.905.400**	**14.150.906.863**	**187.336.619.807**	**127.136.569.925**	**260.956.588.768**	**1.069.833.670.830**
Saldo 1 Januari 2012		**487.477.000.000**	**243.905.400**	**14.150.906.863**	**187.336.619.807**	**127.136.569.925**	**260.956.588.768**	**1.069.833.670.830**
Dividen		-	-	-	-	-	(152.093.201.300)	(152.093.201.300)
Cadangan umum dan tujuan		-	-	-	50.697.733.767	44.360.517.046	(95.058.250.813)	-
Corporate Social Responsibility							(6.337.216.721)	(6.337.216.721)
Koreksi saldo laba tahun lalu		-	-	-	7.467.919.934		(7.467.919.934)	-
Setoran modal selama tahun 2012	20	-	-	27.113.035.836	-	-	-	27.113.035.836
Konversi ke modal ditempatkan dan disetor penuh		41.262.000.000	-	(41.262.000.000)	-	-	-	-
Laba bersih untuk tahun berjalan		-	-	-	-	-	276.465.706.397	276.465.706.397
Saldo 31 Desember 2012		**528.739.000.000**	**243.905.400**	**1.942.699**	**245.502.273.508**	**171.497.086.971**	**276.465.706.397**	**1.214.981.995.041**

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari bunga	*11,24*	1.091.042.006.912	961.217.614.611
Pembayaran beban bunga	*12,25*	(360.205.581.807)	(323.453.796.985)
Pembayaran beban karyawan dan pembelian barang dan jasa	*12,19,27*	(368.500.149.978)	(331.085.722.702)
Penerimaan pendapatan operasional lainnya		31.906.408.546	64.559.399.668
Pembayaran pajak		(125.116.926.621)	(98.163.849.826)
Arus kas sebelum perubahan pada aset dan liabilitas operasi		269.125.757.052	273.073.644.768
Kenaikan dalam aset operasi			
Surat-surat berharga	*7*	(77.470.448.300)	(40.000.000.000)
Kredit yang diberikan	*8*	(731.381.559.895)	(884.228.292.981)
Aset lain-lain	*11*	(21.282.518.636)	(18.693.396.942)
Penurunan(kenaikan) dalam liabilitas operasi			
Liabilitas segera	*12*	(19.182.597.349)	(16.942.129.522)
Simpanan nasabah	*13*	110.490.782.550	1.230.520.343.613
Simpanan dari bank lain	*14*	441.684.009.509	(748.053.598.856)
Kewajiban lainnya	*18*	14.265.724.934	(28.326.763.791)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		**(13.750.850.134)**	**(232.650.193.711)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pembelian aset tetap	*10*	(8.325.442.987)	(24.038.266.331)
Penyertaan	*9*	(7.185.000)	(4.271.000)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		**(8.332.627.987)**	**(24.042.537.331)**
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan penerbitan surat berharga		-	493.163.809.398
Pembayaran deviden		(152.093.201.300)	(145.858.149.487)
Tambahan setoran modal		27.113.035.836	33.565.595.918
Penerimaan (pelunasan) pinjaman - bersih	*16*	(1.339.410.132)	(7.036.070.726)
Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		**(126.319.575.596)**	**373.835.185.102**
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(148.403.053.718)	117.142.454.060
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL PERIODE		1.737.628.260.550	1.620.485.806.490
SALDO KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR PERIODE		**1.589.225.206.832**	**1.737.628.260.550**

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT. BANK SULSELBAR
LAPORAN ARUS KAS - *LANJUTAN*
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kas dan setara kas terdiri dari			
Kas	3	323.019.469.200	300.870.476.163
Giro pada Bank Indonesia	4	546.679.352.659	469.197.511.881
Giro pada bank lain	5	405.096.997	880.673.289
Penempatan pada bank Indonesia dan bank lain-jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang	6	681.498.112.160	884.447.500.937
Sertifikat Bank Indonesia-jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang	7	37.623.175.816	82.232.098.280
Jumlah kas dan setara kas		**1.589.225.206.832**	**1.737.628.260.550**
Informasi Tambahan Arus Kas:			
Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas			
Akrual Pendapatan Bunga yang Masih harus diterima	11	45.568.301.054	43.634.992.435

Lihat catatan atas laporan keuangan terlampir yang merupakan bagian tidak teripsahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT. Bank Sulselbar ("Bank") dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan pada mulanya didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan berdasarkan Akta No.95 tanggal 23 Januari 1961 oleh Notaris Raden Kadiman, notaris di Jakarta, dengan nama PT. Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara, berkedudukan di Makassar. Berdasarkan Akta No.67 tanggal 13 Juli 1961 oleh Notaris Raden Kadiman, dilakukan perubahan nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara. Pada tahun 1961, Bank mulai kegiatan komersilnya yang berdasar pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1961.

Berdasakan Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 Tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara, yang statusnya sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 1976, Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, karena adanya pemisahan Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 13 Tahun 2003 tanggal 20 Agustus 2003 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 7/25/ KEP.GBI/2005 tanggal 10 Mei 2005 telah ditetapkan perubahan bentuk Badan Hukum dari semula berbentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Bank disingkat PT. Bank Sulsel sesuai Akta Pendirian No. 19 tanggal 27 Mei 2004 yang dibuat oleh Notaris Mestariany Habie, S.H. di Makassar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan SK No. C-31541 HT.01.01 TH 2004 tanggal 29 Desember 2004. Bank telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Makassar dengan No. TDP.503/0590/DP-0480/KPP tanggal 3 Januari 2005.

Pada Tahun 2007, Bank telah membentuk Unit Usaha Syariah yang menjalankan kegiatan usaha perbankan dengan prinsip-prinsip Syariah. Pelaksanaannya dimulai sejak 28 April 2007 dengan Surat Izin Prinsip dari Bank Indonesia No. 9/20/DPbS/Mks tanggal 20 April 2007 perihal Persetujuan Prinsip Pembukaan Kantor Cabang Syariah. Dilanjutkan dengan meresmikan pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang pada tanggal 28 April 2007. Disusul dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Maros pada tanggal 28 November 2007 dan Kantor Cabang Syariah Makassar pada tanggal 30 Desember 2008.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diaktakan No. 02 tanggal 1 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar Bank yaitu dengan meningkatkan besarnya modal dasar menjadi sebesar Rp. 1.600.000.000.000, perubahan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No: AHU–46963.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 30 September 2009.

Berdasarkan akta persetujuan bersama seluruh pemegang saham Bank No. 16 tanggal 10 Februari 2011 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., Notaris di Makassar dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-11765.AH.01.02.TAHUN 2011 tanggal 8 Maret 2011 para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui pergantian nama PT. Bank Sulsel menjadi PT. Bank SulselBar.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah melakukan kegiatan usaha di bidang bank umum termasuk kegiatan perbankan yang melaksanakan usaha syariah sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

b. Susunan Pengurus

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank yang diaktakan dengan akta No. 02 tanggal 1 Mei 2009, akta No. 03 tanggal 6 Oktober 2009, akta No. 61 tanggal 30 April 2010, akta No. 29 tanggal 30 Mei 2011 serta akta No. 4 tanggal 2 Desember 2011 seluruhnya oleh Rakhmawati Laica Marzuki, S.H., notaris di Makassar, susunan pengurus Bank pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: H. Andi Mualim, SH, MS
Komisaris	: Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Komisaris Independen	: Drs. Natali Ikawidjaja, MM

Direksi

Direktur Utama	: Drs. Ellong Tjandra
Direktur Umum	: H. YanuarFachrudin, SE, MM
Direktur Pemasaran	: Ir. Drs. Andi Muhammad Rahmat, MM
Direktur Kepatuhan	: Drs. H. Harris Saleng

1. UMUM-*LANJUTAN*

b. Susunan Pengurus-*lanjutan*

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK/088/DIR/VII/2011 tanggal 8 Agustus 2011, SK/088/DIR/VI/2011 tanggal 25 April 2011, dan SK/058/DIR/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, Bank telah menetapkan Komite Audit, Komite Pemantau Resiko dan Komite Renumerasi dan Nominasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Komite Audit

Ketua	: Drs. Natali Ikawidjaja, MM.
Anggota	: Drs. As'ad Makarau
Anggota	: Dra Hj. Sulaeha Achmad

Komite Pemantau Resiko

Ketua	: Drs. Natali Ikawidjaja, MM.
Anggota	: Drs. H. Muslimin Abbas
Anggota	: H. Silahuddin

Komite Renumerasi dan Nominasi

Ketua Pelaksana Tugas	: Drs. H. A. Tjoneng Mallombasang
Anggota	: Pemimpin Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2007, Bank telah membentuk Unit Usaha Syariah. Berkaitan dengan hal tersebut telah dibentuk Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. SK/029/DIR tanggal 26 April 2007 tentang pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Bank dan Surat Keputusan Direksi No. SK/034/DIR tanggal 11 Mei 2007 tentang Personalia Dewan Pengawas Syariah Bank, telah ditunjuk personalia untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

Ketua	: Prof. DR. H. Halide
Anggota	: KH. M. Sanusi Baco, Lc
Anggota	: DR. Mukhlis Sufri, SE, Msi

Gaji yang dibayarkan kepada Direksi Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 2.896.622.868 dan Rp. 1.933.410.912. Gaji yang dibayarkan kepada Komisaris Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 1.303.763.550 dan Rp. 858.059.942. Jumlah karyawan Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar 1074 dan 1039 (*tidak diaudit*).

c. Jaringan Kantor

	Jumlah	
	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
Kantor pusat	1	1
Kantor cabang utama	3	3
Kantor cabang konvensional	27	26
Kantor cabang syariah	3	3
Kantor cabang pembantu	2	2
Kantor kas	37	39
Payment point	6	5
Kantor kas mobil	3	3

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. *Dasar Penyusunan Laporan Keuangan*

Laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008 termasuk Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan" yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Sejak tahun 2007, perusahaan menerapkan unit usaha berprinsip Syariah. Laporan Keuangan unit usaha syariah tersebut disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101-106 menggantikan No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan pedoman akuntansi dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Standar Akuntansi Syariah yang digunakan mengikuti Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2003 berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/26/BPS tanggal 27 Oktober 2003.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

b. *Perubahan Kebijakan Akuntansi*

Sejak 1 Januari 2011, Bank telah mengadopsi kebijakan akuntansi baru di bawah ini sehubungan dengan implementasi PSAK 50 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran. PSAK ini diterapkan secara prospektif.

i. Aset dan Liabilitas

Aset Keuangan

a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit-taking*) yang terkini. Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan terdiri dari surat-surat berharga.

Instrumen keuangan yang dikelompokan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dicatat masing masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan" dan "Keuntungan/(kerugian) dari penjualan instrumen keuangan". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diperdagangkan dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

b. *Perubahan Kebijakan Akuntansi-lanjutan*

i. Aset dan Liabilitas-*lanjutan*

Aset Keuangan-*lanjutan*

b) Pinjaman yang diberikan dan piutang-*lanjutan*

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya administrasi serta dikurangi pendapatan provisi komisi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi komprehensif dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga". Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Pembetukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

c) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif;
- investasi yang ditetapkan oleh Bank dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif dan diakui sebagai "Pendapatan bunga". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui di dalam laporan keuangan sebagai "Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai".

d) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Investasi dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian diakui pada laporan perubahan ekuitas kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di laporan perubahan ekuitas, diakui pada laporan laba rugi komprehensif. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Bank tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual.

Liabilitas Keuangan

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif

Liabilitas keuangan ini merupakan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portfolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

b. *Perubahan Kebijakan Akuntansi-lanjutan*

i. Aset dan Liabilitas-*lanjutan*

Liabilitas Keuangan-*lanjutan*

a) Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif-*lanjutan*

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan". Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam "beban bunga".

Bank tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif.

b) Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komprehensif dikategorikan dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, Bank mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Pengakuan Dan Pengukuran

Bank menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim *(regular)*.

Semua aset dan liabilitas keuangan lainnya pada awalnya diakui pada tanggal perdagangan dimana bank menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dan liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan liabilitas keuangan.

Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut beakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Bank melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Bank menghapuskan saldo kredit dan surat-surat berharga dan cadangan kerugian nilai terkait, pada saat bank menentukan bahwa kredit atau surat-surat berharga tersebut tidak dapat ditagih. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan informasi seperti telah terjadinya perubahan signifikan pada posisi keuangan debitur/penerbit sehingga debitur/penerbit tidak lagi dapat melunasi kewajibannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

ii. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

iii. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
- pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi.

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset yang mengalami penurunan nilai dihitung secara individual dengan menggunakan metode *discounted cash flows*.

Untuk aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara kolektif berdasarkan data kerugian historis.

Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau investasi dimiliki hingga jatutempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak.

Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek serta Obligasi Pemerintah (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

iii. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan-*lanjutan*

a) Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi-*lanjutan*

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan dengan menyesuaikan cadangan kerugian penurunan nilai.

Sebagaimana dimungkinkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009, untuk penerapan pertama kali PSAK 50 dan 55, Bank akan menerapkan ketentuan transisi penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara kolektif dengan menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku umum mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum. Sesuai dengan SE-BI tersebut ketentuan transisi penurunan nilai atas pinjaman yang diberikan secara kolektif dapat diterapkan paling lambat sampai dengan 31 Desember 2011.

b) Aset yang tersedia untuk dijual

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi komprehensif, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi komprehensif.

Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi kompehensif, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi komprehensif.

c. *Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi*

Dalam usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) mengenai "Pengungkapan pihak-pihak berelasi", pihak-pihak berelasi diartikan sebagai berikut :

1) Orang atau keluarga terdekat yang mempunyai relasi dengan sentitas pelapor jika orang tersebut :

i. Pengendalian atau pengendali bersama atas entitas pelapor;

ii. Memiliki pengaruh signifikan atas pelapor atau entitas pelapor; atau

iii. Personil manajamen kunci entitas atau entitas indu dari entitas pelapor.

2) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lainnya.

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor.

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam poin (1).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam poin 1 (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (suatu entitas induk dari entitas).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

d. *Kas Dan Setara Kas*

Komponen Kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang.

e. *Giro Pada Bank Indonesia dan Pada Bank Lain*

Giro pada Bank Indonesia dan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Pada tanggal 23 Oktober 2008, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan No. 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas PBI No. 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. Peraturan ini berlaku efektif tanggal 24 Oktober 2008. Berdasarkan peraturan tersebut, GWM ditetapkan sebesar 7,5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama dan GWM Sekunder, dan GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 1% dari dana pihak ketiga valuta asing. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2008 dan GWM Sekunder dalam rupiah ditetapkan sebesar 2,5% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang mulai berlaku tanggal 24 Oktober 2009. Terakhir diubah dengan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010, berdasarkan peraturan tersebut, GWM ditetapkan sebesar 8% dari dana pihak ketiga dalam rupiah yang terdiri dari GWM Utama.

f. *Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain*

Penempatan pada Bank Indonesia dan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambahkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset tersebut, dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode bunga efektif, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (jika ada).

g. *Surat Berharga*

Surat berharga dikelompokkan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo pada mulanya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan setelah pengakuan awal dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai, jika ada.

Surat berharga yang dimiliki terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara dan obligasi yang diperdagangkan di bursa efek.

h. *Kredit Yang Diberikan*

Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi hutang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Kredit pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Kredit yang diberikan dalam rangka pembiayaan bersama (kredit sindikasi) dicatat sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh Bank dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Kredit dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan antara bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Pelunasan kemudian atau penggantian asuransi atas kredit yang telah dihapusbukukan dikreditkan kedalam cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang direstrukturisasi dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah diantara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit dan penghasilan bunga secara proporsional. Setelah tanggal 1 Januari 2010 saat persyaratan kredit telah dinegosiasi ulang, penurunan nilai yang ada diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang digunakan sebelum persyaratan diubah dan kredit tidak lagi diperhitungkan sebagai menunggak. Manajemen secara berkelanjutan mereview kredit yang restrukturisasi untuk meyakinkan terpenuhinya seluruh kriteria dan pebayaran dimasa depan. Kredit akan terus menjadi subyek penilaian penurunan nilai individual atau kolektif, dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

i. *Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Non Produktif dan Rekening Administratif*

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian atas penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk telah dibebankan oleh Bank dalam laporan laba rugi komprehensif.

Untuk laporan posisi keuangan 31 Desember 20112, cadangan kerugian penurunan nilai atas aset non produktif (anggunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan *suspense accounts*) dan komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif tetap dihitung dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Klasifikasi aset non produktif menjadi lima kategori dengan minimum persentase penyisihan kerugian sebagai berikut:

Klasifikasi	Batas Waktu	Persentase Minimum	Persentase Minimum
Lancar	Sampai dengan 1 tahun	0%	0%
Kurang lancar	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun	15%	15%
Diragukan	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun	50%	50%
Macet	Lebih dari 5 tahun	100%	100%

Cadangan kerugian atas komitmen dan kontinjensi atas fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan dan garansi yang diterbitkan pada transaksi rekening administratif disajikan sebagai liabilitas di laporan posisi keuangan.

j. *Pembiayaan Syariah*

Pembiayaan syariah terdiri dari piutang murabahah dan pembiayaan mudharabah.

Pembiayaan mudharabah disajikan dalam neraca sebesar nilai wajar dan jika nilai wajar lebih besar daripada nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan yang ditangguhkan dan diamortisasi selama masa akad atau diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat.

Piutang murabahah disajikan dalam neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi marjin murabahah ditangguhkan dan penyisihan kerugian piutang.

Rahn adalah fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban peminjam mengembalian pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu, jaminan emas yang diberikan disimpan dan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.

Bank membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai aset produktif serta estimasi kerugian atas rekening administratif berdasarkan hasil penelaahan terhadap kolektibilitas dari masing-masing aset produktif dan transaksi rekening yang mempunyai risiko kredit sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum" yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006, Peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret 2007 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009.

Klasifikasi	Persentase minimum penyisihan
Lancar	1%
Dalam perhatian khusus	5%
Kurang lancar	15%
Diragukan	50%
Macet	100%

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

k. *Penyertaan*

Penyertaan dalam bentuk saham yang nilainya di bawah 20 % dari total nilai saham perusahaan yang bersangkutan dicatat berdasarkan harga perolehannya dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Pendapatan dividen diakui pada saat keputusan pembagian dividen diumumkan.

l. *Aset tetap*

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan kecuali aset tetap tertentu yang dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah dan aset tetap tanah tidak disusutkan. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double declining method*), kecuali bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan persentase sebagai berikut :

	Persentase
Bangunan kantor	5%-10%
Bangunan rumah dinas	5%-10%
Kendaraan	25%-50%
Perabot kantor	25%-50%
Perabot rumah dinas	25%-50%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif pada saat terjadinya; pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi. Nilai buku aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual, dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif pada tahun yang bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Perubahan kebijakan akuntansi PSAK No.16 (Revisi 2011) "Aset Tetap" tidak memberikan dampak yang besar terhadap laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. ISAK 25 menetapkam bahwa biaya penguirusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak aGuna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap"dan tidak diamortisasi.

Sesuai dengan PSAK No. 47 "Akuntansi Tanah" semua biaya dan beban yang terjadi sehubungan dengan perolehan hak atas tanah antara lain biaya perijinan, biaya survey dan pengukuran lokasi, biaya notaris dan pajak yang berhubungan dengan hal tersebut, ditangguhkan dan disajikan secara terpisah dari biaya perolehan hak atas tanah. Selain itu hak atas tanah tidak diamortisasi kecuali memenuhi kondisi-kondisi tertentu yang telah ditentukan.

m. *Aset lain-lain*

Aset lain-lain terdiri dari bunga yang masih harus diterima, uang muka dan biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, persediaan barang cetakan dan beban ditangguhkan emisi obligasi. Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan sisa pokok pinjaman yang diberikan, jika ada, dibebankan di laporan laba rugi tahun berjalan. Selisih nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat agunan tersebut dijual.

n. *Liabilitas Segera*

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas atau diterima perintah dari pemberi amanat, baik dari masyarakat maupun dari bank

Liabilitas pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, liabilitas segera dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

o. *Simpanan nasabah*

Simpanan nasabah pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, simpanan nasabah dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

o. *Simpanan nasabah-lanjutan*

Produk simpanan dinilai sebagai berikut:

- Giro dan tabungan dinilai sebesar kewajiban Bank kepada nasabah
- Deposito dinilai sebesar jumlah pokok deposito yang tercantum dalam perjanjian antara bank dan nasabah
- Giro wadiah yaitu titipan dana dalam bentuk giro dan tabungan pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan pendapatan bonus
- Tabungan dan deposito mudharabah merupakan simpanan dana pihak lain yang memberikan pemilik dana imbalan bagi hasil
- Pendapatan unit syariah atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

p. *Simpanan Dari Bank Lain*

Simpanan pada Bank lain pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh liabilitas keuangan tersebut, dan setelah pengakuan awal, simpanan nasabah dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

Simpanan dari Bank lain terdiri dari liabilitas terhadap Bank lain di dalam negeri dalam bentuk giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka. Simpanan dari Bank lain dinyatakan sesuai jumlah kewajiban terhadap Bank lain.

q. *Pinjaman yang diterima*

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia dan pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima pada awalnya diukur pada nilai wajar dan ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh pinjaman yang diterima tersebut, dan setelah pengakuan awal, pinjaman yang diterima dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

r. *Pendapatan Dan Beban Bunga*

Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing dicatat dalam pendapatan bunga dan beban bunga di dalam laporan laba rugi komprehensif menggunakan suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat , digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, bank mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi.

Penerimaan tunai atas kredit yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet digunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi komprehensif.

Bagi hasil dari pembiayaan mudharabah diakui pada saat angsuran diterima secara tunai *(cash basis)*. Keuntungan murabahah diakui selama periode akad berdasarkan konsep akrual. Pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain diakui pada saat diterima.

s. *Pendapatan Provisi Dan Komisi*

Provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit diakui sebagai bagian/(pengurang) dari biaya perolehan kredit dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

t. *Perpajakan*

- Bank menghitung pajak penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang (Revisi 2010) " Pajak Penghasilan" . Penerapannya tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

- Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

- Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

- Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal neraca. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

- Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di neraca atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

u. *Beban Yang Ditangguhkan*

Pengeluaran tertentu yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan taksiran masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

v. *Imbalan Pasca Kerja*

- Imbalan kerja jangka pendek

  Imbalan kerja jangka pendek diakui selama periode jasa diberikan dan dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan

- Program pensiun iuran pasti dan Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Sehubungan dengan imbalan pensiun, bank memiliki program pensiun manfaat pasti.

Bank memiliki program pensiun manfaat pasti untuk karyawan tetap yang memenuhi syarat. Dalam program ini, manfaat pensiun dibayarkan berdasarkan penghasilan dasar pensiun tertinggi karyawan dan masa kerja karyawan.

Program pensiun manfaat pasti didanai melalui pembayaran kepada Dana Pensiun Bank, yang ditentukan dengan perhitungan aktuaris secara berkala. Program manfaat pasti merupakan program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja, dan jumlah kompensasi.

Mulai tamggal 1 Januari 2012, Bank menerapkan PSAK No 24 (revisi 2010), "Imbalan Kerja". Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan perubahan yang besar terhadap laporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti penghargaan tanda jasa dan cuti besar dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode Projected Unit Credit.

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial yang jumlahnya melebihi jumlah yang lebih besar antara 10% dari nilai wajar aset program atau 10% dari nilai kini imbalan pasti, kelebihannya dibebankan atau dikreditkan ke laporan laba rugi komprehensif selama rata-rata sisa masa kerja yang diharapkan dari karyawan tersebut.

Biaya jasa lalu diakui secara langsung di laporan laba rugi komprehensif, kecuali pembayaran imbalan tersebut tergantung pada apakah karyawan tetap bekerja selama periode waktu tertentu (*period vesting*). Dalam hal ini, biaya jasa lalu diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode *vesting*.

Bank harus menyediakan program pensiun dengan imbalan minimal tertentu sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003. Karena UU Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti. Perhitungan imbalan pensiun yang dilakukan oleh aktuaris menunjukan bahwa perkiraan imbalan yang disediakan oleh dana pensiun Bank akan melebihi imbalan pensiun minimal yang ditentukan oleh UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu Bank tidak perlu melakukan penyesuaian atas imbalan pensiun yang disediakan.

Imbalan pasca kerja tersebut telah dihitung sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2004).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

w. *Biaya Emisi Obligasi*

Biaya emisi obligasi merupakan biaya yang terjadi sehubungan dengan penawaran emisi atau obligasi Bank dengan tingkat bunga tetap kepada masyarakat yang harus dikurangkan langsung dari hasil emisi dalam rangka menentukan hasil emisi neto obligasi Bank yang diterima. Selisih antara hasil emisi neto dengan nilai nominal obligasi Bank diakui sebagai diskonto atau premium dan diamortisasi selama jangka waktu obligasi Bank tersebut dengan menggunakan metode bunga efektif.

x. *Laba Per Saham*

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 56 tentang "Laba Per Saham". Laba operasional dan laba bersih per saham di hitung dengan membagi laba usaha dan laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang dari jumlah saham Bank yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

y. *Informasi Segmen Usaha*

Sebuah segmen usaha adalah sekelompok aset dan operasi yang menyediakan barang atau jasa yang memiliki risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dengan segmen usaha lainnya. Informasi keuangan disajikan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja dari setiap segmen usaha.

Segmen usaha terbagi dalam kelompok berdasarkan geografis menurut lokasi cabang.

z. *Surat Berharga Yang Diterbitkan*

Surat berharga yang diterbitkan merupakan obligasi yang diterbitkan oleh Bank yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan obligasi dikurangkan dari jumlah obligasi yang diterbitkan.

Setelah pengukuran awal surat berharga yang diterbitkan selanjutnya dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengukuran awal dan biaya-biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

aa. *Perubahan kebijakan akuntansi*

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI), yang berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012, yaitu:

- PSAK No. 10 (revisi 2010) - Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (revisi 2011) - Properti investasi.
- PSAK No. 16 (revisi 2011) - Aset Tetap
- PSAK No. 24 (revisi 2010) - Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (revisi 2011) - Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (revisi 2011) - Sewa
- PSAK No. 36 (revisi 2010) - Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 46 (revisi 2010) - Pajak Penghasilan
- PSAK No. 53 (revisi 2010) - Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 56 (revisi 2010) - Laba per Saham
- PSAK No. 60 (revisi 2010) - Instrumen keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 62 - Kontrak Asuransi
- ISAK No. 15, PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 24 - Evaluasi Substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa
- ISAK No. 25 - Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 Penilaian Uang Derivatif Melekat

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI-*LANJUTAN*

aa. *Perubahan kebijakan akuntansi-lanjutan*

Bank dalam proses melakukan evaluasi terhadap dampak yang akan timbul dari penerapan revisi standar ini terhadap Laporan Keuangan.

Berikut ini adalah standar, perubahan dan interprestasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan relevan dengan Bank:

- PSAK No. 1 (revisi 2009) - Penyajian Laporan Keuangan; Standar ini akan menggantikan PSAK No. 1 (revisi 1998) Penyajian Laporan Keuangan.
- PSAK No. 2 (revisi 2009) - Laporan Arus Kas; Standar ini akan menggantikan PSAK No. 2 (revisi 1994) Laporan Arus Kas.
- PSAK No. 4 (revisi 2009) - Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri; Standar ini akan menggantikan PSAK No. 4 Laporan Konsolidasi.
- PSAK No. 5 (revisi 2009) - Segmen Operasi; Standar ini akan menggantikan PSAK No. 5 (revisi 2000) Pelaporan Segmen.
- PSAK No. 7 (revisi 2010) - Pihak-pihak Berelasi; Standar ini akan menggantikan PSAK No. 7 (revisi 1994) Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- PSAK No. 12 (revisi 2009) - Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama.
- PSAK No. 15 (revisi 2009) - Investasi pada Entitas Asosiasi; Standar ini menggantikan PSAK 15 (1994) Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi.

Standar, perubahan dan interprestasi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan relevan dengan Bank-lanjutan:

- PSAK No. 19 (revisi 2010) - Aset Tidak Berwujud; Standar ini menggantikan PSAK 19 (2000) Aktiva Tidak Berwujud.
- PSAK No. 23 (revisi 2010) - Pendapatan; Standar ini menggantikan PSAK 23 (1994) Pendapatan.
- PSAK No. 25 (revisi 2009) - Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan; Standar ini menggantikan PSAK 25 (1994) Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar, dan Perubahan Kebijakan Akuntansi.
- PSAK No. 48 (revisi 2009) - Penurunan Nilai Aset; Standar ini menggantikan PSAK 48 (1998) Penurunan Nilai Aktiva.
- PSAK No. 50 (revisi 2010) - Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 55 (revisi 2011) - Instrumen keuangan: Pengakuan Dan Pengukuran
- PSAK No. 57 (revisi 2009) - Provisi, Liabilitas, Kontijensi dan Aset Kontijensi; Standar ini menggantikan PSAK 57 (2000) Kewajiban Di estimasi, Kewajiban Kontijensi dan Aktiva Kontijensi.
- PSAK No. 58 (revisi 2009) - Aset tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan Operasi yang dihentikan; Standar ini menggantikan PSAK 58 (2003) Operasi Dalam Penghentian.
- ISAK No. 7 (revisi 2009) - Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus.
- ISAK No. 9 - Perubahan atas Liabilitas Aktivitas Purna Operasi, Restorasi dan Liabilitas Serupa.
- ISAK No. 10 - Progam Loyalitas Pelanggan; Standar ini akan diadopsi sebagai pelengkap PSAK No. 23 (revisi 2010) Pendapatan.
- ISAK No. 11 - Distribusi Aset Non Kas kepada Pemilik.
- ISAK No. 12 - Pengendalian Bersama Entitas: Kontribusi Non Moneter Oleh Venturer.
- ISAK No. 14 (revisi 2010) - Aset Tidak Berwujud - Biaya Situs Web; Standar ini akan diadopsi sebagai pelengkap PSAK No. 19 (revisi 2010) Aset Tidak Berwujud .

Dampak dari perubahan kebijakan akuntansi Bank sehubungan dengan implementasi dari standar akuntansi baru dalam adalah sebagai

Perubahan atas implementasi PSAK No. 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 adalah laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, cacatan atas laporan keuangan dan penambahan laporan posisi keuangan yang menunjukkan saldo awal (dalam hal terjadi reklasifikasi dan penyajian kembali). Sedangkan sebelumnya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan cacatan atas laporan keuangan.

3. KAS

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kas	308.121.669.200	287.367.621.163
Kas pada ATM	14.897.800.000	13.502.855.000
Jumlah	**323.019.469.200**	**300.870.476.163**

4. GIRO PADA BANK INDONESIA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Giro pada Bank Indonesia	546.679.352.659	469.197.511.881
Jumlah	**546.679.352.659**	**469.197.511.881**
GWM Utama	9,41%	8,24%
GWM Sekunder	2,95%	2,76%

Giro Wajib Minimum Bank telah sesuai dengan PBI No. 7/29/PBI/2005 tanggal 6 September 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008, selanjutnya diubah dengan PBI No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 dan terakhir diubah dengan PBI No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010.

5. GIRO PADA BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pihak ketiga		
Bank Umum		
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	336.912.161	562.002.721
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	11.551.461	58.864.566
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	204.085.654
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	51.307.598	51.592.290
PT. Bank Central Asia Tbk	560.000	970.000
Jumlah	400.331.220	877.515.231
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	-	(2.040.857)
Jumlah bersih	400.331.220	875.474.374
BPD Sulawesi Tengah	4.582.469	4.775.607
PT. Bank DKI	183.308	423.308
Jumlah bersih	4.765.777	5.198.915
Jumlah giro pada bank lain bersih	**405.096.997**	**880.673.289**

5. GIRO PADA BANK LAIN-*LANJUTAN*

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	2.040.857	-
Pembentukan selama periode bejalan	-	2.040.857
Pemulihan selama periode berjalan	(2.040.857)	-
Saldo akhir periode	**-**	**2.040.857**

Suku bunga giro rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing berkisar 2,5% - 3%.
Giro pada bank lain Unit Usaha Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 digolongkan sebagai lancar.

Seluruh giro pada bank lain konvensional untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai .
Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain telah memadai.

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a. Klasifikasi penempatan pada bank lain berdasarkan jenis penempatan		
Pihak ketiga		
Bank Indonesia Intervensi-*setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp. 1.887.840 dan Rp. 2.499.062*	16.998.112.160	19.997.500.937
Deposito berjangka	50.000.000.000	55.000.000.000
Deposito on call	615.000.000.000	810.000.000.000
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(500.000.000)	(550.000.000)
Jumlah	664.500.000.000	864.450.000.000
Jumlah penempatan pada bank lain bersih	**681.498.112.160**	**884.447.500.937**
b. Klasifikasi penempatan pada bank lain berdasarkan bank		
Bank Indonesia Intervensi-*setelah dikurangi bunga yang belum diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 sebesar Rp. 1.887.840 dan Rp. 2.499.062*	16.998.112.160	19.997.500.937
Deposito		
Bank Umum		
PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	-	30.000.000.000
PT. Bank Muamalat	-	25.000.000.000
PT. Bank Negara Indonesia Syariah	50.000.000.000	-
Deposito on call		
Bank Pembangunan Daerah		
BPD Maluku	50.000.000.000	50.000.000.000
BPD Sulawesi Tenggara	25.000.000.000	-
Bank Umum		
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	540.000.000.000	760.000.000.000
Jumlah	665.000.000.000	810.000.000.000
Jumlah	681.998.112.160	884.997.500.937
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(500.000.000)	(550.000.000)
Jumlah penempatan pada bank lain bersih	**681.498.112.160**	**884.447.500.937**

6. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN-LANJUTAN

c. Klasifikasi penempatan pada Bank lain berdasarkan kolektibilitas

Seluruh penempatan pada bank lain konvensional untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai .

Penempatan pada bank lain Unit Usaha Syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 digolongkan sebagai lancar.

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	550.000.000	-
Pembentukan selama periode bejalan	700.000.000	550.000.000
Pemulihan selama periode berjalan	(750.000.000)	-
Saldo akhir periode	**500.000.000**	**550.000.000**

Nisbah bagi hasil deposito per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing berkisar 47,00% - 50,00% .

Suku bunga rata-rata deposito on call untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 berkisar 5,25%-5,50% dan 4,70%-4,80% .

Manajemen berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai atas giro pada bank lain telah memadai.

7. SURAT-SURAT BERHARGA

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a. Klasifikasi surat-surat berharga berdasarkan jenis penerbit:		
Pihak ketiga:		
Sertifikat Bank Indonesia	180.890.000.000	155.000.000.000
RR-SUN-21 HR	11.833.720.000	5.030.295.000
Bunga yang belum diamortisasi	(2.630.095.885)	(2.798.196.720)
Jumlah	190.093.624.115	157.232.098.280
Obligasi:		
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	2.000.000.000
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	5.000.000.000
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah	12.000.000.000	12.000.000.000
Jumlah	**202.093.624.115**	**169.232.098.280**

b. Klasifikasi surat-surat berharga berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga:

Penerbit	Nilai	Tanggal Jatuh Tempo	Suku Bunga Per Tahun	Lembaga Pemeringkat dan Peringkat
Dimiliki hingga jatuh tempo				
31 Desember 2012				
Bank Indonesia (SBI)	5.890.000.000	10 Januari 2013	4,00%	-
Bank Indonesia (SBI)	20.000.000.000	14 Februari 2013	4,00%	-
Bank Indonesia (SBI)	55.000.000.000	11 April 2013	4,50%	-
Bank Indonesia (SBI)	50.000.000.000	09 Mei 2013	4,50%	-
Bank Indonesia (SBI)	20.000.000.000	09 Mei 2013	4,55%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	13 Juni 2013	4,68%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	13 Juni 2013	4,70%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	11 Juli 2013	4,78%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	11 Juli 2013	4,80%	-
Bank Indonesia (SBI)	10.000.000.000	12 September 2013	4,82%	-

7. SURAT-SURAT BERHARGA-LANJUTAN

b. Klasifikasi surat-surat berharga berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga-*lanjutan*:

RR SUN 61/FR0053	11.833.720.000	12 Februari 2013	4,50%	-
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	09 April 2015	12,00%	PEFINDO/ idA-
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	05 Juli 2016	10,80%	PEFINDO/ idA-
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	08 Juli 2016	10,13%	PEFINDO/ idA+
Dimiliki hingga jatuh tempo				
31 Desember 2011				
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	12 Januari 2012	7,10%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	12 Januari 2012	7,25%	-
Bank Indonesia (SBI)	30.000.000.000	09 Februari 2012	7,20%	-
Bank Indonesia (SBI)	30.000.000.000	09 Februari 2012	7,25%	-
Bank Indonesia (SBI)	10.000.000.000	08 Maret 2012	7,35%	-
Bank Indonesia (SBI)	10.000.000.000	07 Juni 2012	6,35%	-
Bank Indonesia (SBI)	50.000.000.000	12 Juli 2012	5,70%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	12 Juli 2012	5,75%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	09 Agustus 2012	5,35%	-
Bank Indonesia (SBI)	5.000.000.000	6 September 2012	5,00%	-
RR-SUN-21 HR	5.030.295.000	05 Januari 2012	4,56%	-
Obligasi PT. Bank Sulut	2.000.000.000	09 April 2015	12,00%	PEFINDO/ idBBB+
Obligasi PT. Bank NTT	5.000.000.000	05 Juli 2016	10,80%	PEFINDO/ idA+
Obligasi PT. Bank Sumut	5.000.000.000	08 Juli 2016	10,13%	PEFINDO/

c. Klasifikasi surat berharga berdasarkan kolektibilitas

Seluruh surat berharga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 tidak mengalami penurunan nilai .

d. Klasifikasi surat berharga berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kurang dari 1 tahun	190.093.624.115	157.232.098.280
1 - 5 tahun	12.000.000.000	12.000.000.000
	202.093.624.115	**169.232.098.280**

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH

a. Menurut jenis kredit

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a.1. Pihak-pihak berelasi		
Kredit investasi	2.837.425.021	2.837.425.021
Jumlah	2.837.425.021	2.837.425.021
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai-Pihak-pihak berelasi	(2.663.355.393)	(2.663.355.393)
Jumlah kredit yang diberikan pihak-pihak berelasi - bersih	174.069.628	174.069.628

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

a. Menurut jenis kredit-*lanjutan*

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a.2. Pihak ketiga		
Kredit investasi	754.569.638.208	904.404.493.898
Kredit modal kerja	645.541.163.421	745.067.279.958
Kredit Perumahan Rakyat (KPR)	14.877.542.706	26.144.652.998
Kredit umum lainnya	4.326.670.176.984	3.454.681.389.172
Piutang murabahah investasi	61.191.678.584	48.931.583.164
Piutang murabahah modal kerja	8.372.292.988	8.033.212.769
Piutang murabahah lainnya	278.270.587.377	178.745.129.031
Pembiayaan mudharabah	17.507.943.972	24.249.418.456
Rahn	5.214.024.179	-
Jumlah	6.112.215.048.419	5.390.257.159.446
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai- Pihak ketiga	(78.280.328.525)	(115.747.664.302)
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai syariah - Pihak ketiga	(6.927.972.647)	(4.521.917.739)
Jumlah kredit yang diberikan pihak ketiga - bersih	6.027.006.747.247	5.269.987.577.405
Jumlah kredit yang diberikan/pembiayaan syariah - bersih	**6.027.180.816.875**	**5.270.161.647.033**

Jumlah pihak-pihak berelasi dicatat kembali pada catatan No.38

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

b. Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas

31 Desember 2012

	Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumtif	4.354.086.056.288	10.191.320.502	2.753.509.476	3.468.747.703	18.609.817.824	4.389.109.451.793
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.812.683.756)	(4.843.628.425)	(870.266.821)	(1.298.117.798)	(13.909.391.610)	(29.734.088.410)
Jumlah	4.345.273.372.532	5.347.692.077	1.883.242.655	2.170.629.905	4.700.426.214	4.359.375.363.383
Pertanian	135.365.551.491	2.036.391.794	152.489.212	825.425.847	4.449.071.695	142.828.930.039
Cadangan kerugian penurunan nilai	(974.939.057)	(702.441.133)	(41.381.104)	(303.232.128)	(3.062.415.187)	(5.084.408.609)
Jumlah	134.390.612.434	1.333.950.661	111.108.108	522.193.719	1.386.656.508	137.744.521.430
Industri	69.794.759.500	739.435.172	102.894.120	314.588.509	2.308.351.730	73.260.029.031
Cadangan kerugian penurunan nilai	(465.966.716)	(197.457.943)	(8.267.814)	(74.058.955)	(1.900.861.561)	(2.646.612.989)
Jumlah	69.328.792.784	541.977.229	94.626.306	240.529.554	407.490.169	70.613.416.042
Listrik / Air	18.772.109.115	-	-	-	498.750.000	19.270.859.115
Cadangan kerugian penurunan nilai	(58.958.308)	-	-	-	(467.291.473)	(526.249.781)
Jumlah	18.713.150.807	-	-	-	31.458.527	18.744.609.334
Pertambangan	2.384.065.037	30.257.665	-	-	190.041.717	2.604.364.419
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.767.856)	(18.768.827)	-	-	-	(27.536.683)
Jumlah	2.375.297.181	11.488.838	-	-	190.041.717	2.576.827.736
Konstruksi	5.001.333.344	499.111.775	-	-	1.778.749.622	7.279.194.741
Cadangan kerugian penurunan nilai	(318.729.588)	(26.721.739)	-	-	(1.314.746.250)	(1.660.197.577)
Jumlah	4.682.603.756	472.390.036	-	-	464.003.372	5.618.997.164
Perumahan	9.904.482.468	-	102.569.576	226.115.466	286.375.491	10.519.543.001
Cadangan kerugian penurunan nilai	(112.243.858)	-	(2.745.715)	(6.052.951)	(229.977.819)	(351.020.343)
Jumlah	9.792.238.610	-	99.823.861	220.062.515	56.397.672	10.168.522.658
Perdagangan	862.038.002.592	10.685.052.276	1.917.131.099	3.299.755.484	27.579.571.762	905.519.513.213
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.977.385.866)	(3.464.806.930)	(318.394.518)	(1.157.092.027)	(21.183.218.818)	(31.100.898.159)
Jumlah	857.060.616.726	7.220.245.346	1.598.736.581	2.142.663.457	6.396.352.944	874.418.615.054
Pengangkutan dan Distribusi	16.778.288.941	183.080.492	-	80.203.583	128.685.568	17.170.258.584
Cadangan kerugian penurunan nilai	(74.607.003)	(85.003.814)	-	(12.779.096)	(120.568.758)	(292.958.671)
Jumlah	16.703.681.938	98.076.678	-	67.424.487	8.116.810	16.877.299.913
Jasa-jasa Dunia usaha	13.357.540.632	690.827.802	376.007.407	175.848.893	1.124.549.162	15.724.773.896
Cadangan kerugian penurunan nilai	(209.309.280)	(398.301.671)	(48.631.154)	(23.548.450)	(991.824.993)	(1.671.615.548)
Jumlah	13.148.231.352	292.526.131	327.376.253	152.300.443	132.724.169	14.053.158.348
Jasa-jasa sosial masyarakat	147.244.253.200	4.969.663.805	263.639.324	1.264.710.433	7.466.761.746	161.209.028.508
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.044.969.080)	(1.368.334.987)	(61.748.063)	(219.878.121)	(5.153.166.897)	(7.848.097.148)
Jumlah	146.199.284.120	3.601.328.818	201.891.261	1.044.832.312	2.313.594.849	153.360.931.360
Jumlah kredit yang diberikan	5.634.726.442.608	30.025.141.283	5.668.240.214	9.655.395.918	64.420.726.317	5.744.495.946.340
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(17.058.560.368)	(11.105.465.469)	(1.351.435.189)	(3.094.759.526)	(48.333.463.366)	(80.943.683.918)
Jumlah kredit yang diberikan **- Bersih**	5.617.667.882.240	18.919.675.814	4.316.805.025	6.560.636.392	16.087.262.951	5.663.552.262.422

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

b. Pembiayaan Syariah

31 Desember 2012

	Lancar 1%	Dalam Perhatian khusus 5%	Kurang lancar 15%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
Konsumtif	107.198.141.648	-	121.212.166	-	516.599.811	107.835.953.625
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.071.981.416)	-	(18.181.825)	-	(516.599.811)	(1.606.763.052)
Jumlah	106.126.160.232	-	103.030.341	-	-	106.229.190.573
Pertanian	4.574.741.688	-	-	-	32.326.597	4.607.068.285
Cadangan kerugian penurunan nilai	(45.747.417)	-	-	-	(32.326.597)	(78.074.014)
Jumlah	4.528.994.271	-	-	-	-	4.528.994.271
Industri	813.000.298	467.515.326	-	-	175.417.747	1.455.933.371
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.130.003)	(23.375.766)	-	-	(175.417.747)	(206.923.516)
Jumlah	804.870.295	444.139.560	-	-	-	1.249.009.855
Konstruksi	1.755.482.624	-	-	-	241.595.001	1.997.077.625
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.554.826)	-	-	-	(241.595.001)	(259.149.827)
Jumlah	1.737.927.798	-	-	-	-	1.737.927.798
Perumahan	226.409.458.438	1.198.270.651	50.519.738	82.843.143	682.619.081	228.423.711.051
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.264.094.584)	(59.913.533)	(7.577.961)	(41.421.571)	(682.619.081)	(3.055.626.731)
Jumlah	224.145.363.853	1.138.357.119	42.941.778	41.421.571	-	225.368.084.321
Perdagangan	6.644.010.022	1.397.324.912	853.911.430	661.030.796	-	9.556.277.160
Cadangan kerugian penurunan nilai	(66.440.100)	(69.866.246)	(128.086.714)	(330.515.398)	-	(594.908.458)
Jumlah	6.577.569.922	1.327.458.666	725.824.715	330.515.398	-	8.961.368.701
Pengangkutan dan Distribusi	83.820.003	-	-	248.767.674	148.479.327	481.067.003
Cadangan kerugian penurunan nilai	(838.200)	-	-	(124.383.837)	(148.479.327)	(273.701.364)
Jumlah	82.981.803	-	-	124.383.837	-	207.365.640
Jasa-jasa Dunia usaha	13.966.574.712	843.898.122	695.645.255	253.405.293	439.915.598	16.199.438.980
Cadangan kerugian penurunan nilai	(139.665.747)	(42.194.906)	(104.346.788)	(126.702.647)	(439.915.598)	(852.825.686)
Jumlah	13.826.908.965	801.703.216	591.298.467	126.702.647	-	15.346.613.294
Jumlah kredit yang diberikan	361.445.229.433	3.907.009.011	1.721.288.589	1.246.046.905	2.236.953.161	370.556.527.100
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(3.614.452.294)	(195.350.451)	(258.193.288)	(623.023.453)	(2.236.953.161)	(6.927.972.647)
Jumlah kredit yang diberikan **- Bersih**	357.830.777.139	3.711.658.560	1.463.095.301	623.023.453	-	363.628.554.453

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

b. Kredit yang diberikan berdasarkan sektor ekonomi dan kolektabilitas

	31 Desember 2011					
	Lancar	Dalam Perhatian khusus	Kurang lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Konsumtif	3.405.137.976.966	20.452.755.106	3.053.999.185	2.342.412.117	8.860.276.069	3.439.847.419.443
Cadangan kerugian penurunan nilai	(81.402.440.904)	(2.013.168.346)	(159.220.986)	(169.170.551)	(3.621.273.837)	(87.365.274.624)
Jumlah	3.323.735.536.063	18.439.586.760	2.894.778.199	2.173.241.566	5.239.002.232	3.352.482.144.820
Pertanian	151.424.671.452	2.646.586.868	126.898.924	628.415.514	3.032.227.767	157.858.800.525
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.378.298.876)	(229.661.000)	(872.322)	(987.199)	(275.410.657)	(2.885.230.054)
Jumlah	149.046.372.576	2.416.925.868	126.026.602	627.428.315	2.756.817.110	154.973.570.471
Industri	65.705.176.746	985.840.360	49.072.063	187.863.878	2.707.886.614	69.635.839.661
Cadangan kerugian penurunan nilai	(953.488.837)	(79.927.743)	(5.883.037)	(186.801)	(355.826.997)	(1.395.313.415)
Jumlah	64.751.687.909	905.912.617	43.189.026	187.677.077	2.352.059.617	68.240.526.246
Listrik / Air	20.424.918.698					20.424.918.698
Cadangan kerugian penurunan nilai	(921.774.169)	-	-	-	-	(921.774.169)
Jumlah	19.503.144.529	-	-	-	-	19.503.144.529
Pertambangan	2.610.022.130	145.374.440				2.755.396.570
Cadangan kerugian penurunan nilai	(9.102.981)	(35.933)	-	-	-	(9.138.914)
Jumlah	2.600.919.149	(35.933)	-	-	-	2.746.257.656
Konstruksi	13.952.778.013	538.234.589	35.635.204		39.885.773.516	54.412.421.322
Cadangan kerugian penurunan nilai	(247.445.629)	(552.450)	(29.147)	-	(296.996.177)	(545.023.403)
Jumlah	13.705.332.384	537.682.139	35.606.057	-	39.588.777.339	53.867.397.919
Perumahan	7.676.802.021	435.247.429		18.280.354	460.542.280	8.590.872.084
Cadangan kerugian penurunan nilai	(105.588.699)	(1.993.425)	-	(5.073.595)	(10.004.464)	(122.660.183)
Jumlah	7.571.213.322	433.254.004	-	13.206.759	450.537.816	8.468.211.901
Perdagangan	923.988.284.346	12.779.899.882	2.475.684.163	2.465.930.078	18.424.030.061	960.133.828.530
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.942.906.939)	(455.398.308)	(56.773.211)	(24.099.114)	(4.308.426.427)	(16.787.603.999)
Jumlah	912.045.377.407	12.324.501.574	2.418.910.952	2.441.830.964	14.115.603.634	943.346.224.531
Pengangkutan dan Distribusi	23.830.308.923	819.483.948	102.259.324	52.267.008	466.744.971	25.271.064.174
Cadangan kerugian penurunan nilai	(311.315.151)	(1.135.135)	(10.006.327)	(64.134)	(103.578.635)	(426.099.382)
Jumlah	23.518.993.772	818.348.813	92.252.997	52.202.874	363.166.336	24.844.964.792
Jasa-jasa Dunia usaha	207.839.204.736	8.272.164.725	937.927.401	1.770.052.884	12.064.680.100	230.884.029.846
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.851.492.444)	(306.988.968)	(81.404.469)	(8.485.296)	(184.612.144)	(4.432.983.321)
Jumlah	203.987.712.292	7.965.175.757	856.522.932	1.761.567.588	11.880.067.956	226.451.046.525
Jasa-jasa sosial masyarakat	154.634.762.057	3.532.774.657	159.999.996	668.593.653	4.324.519.831	163.320.650.194
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.060.845.343)	(425.122.532)	(21.440.995)	(13.648.144)	(998.861.217)	(3.519.918.231)
Jumlah	152.573.916.714	3.107.652.125	138.559.001	654.945.509	3.325.658.614	159.800.731.963
Jumlah kredit yang diberikan	4.977.224.906.088	50.608.362.004	6.941.476.260	8.133.815.486	90.226.681.209	5.133.135.241.047
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(104.184.699.972)	(3.513.983.840)	(335.630.494)	(221.714.834)	(10.154.990.555)	(118.411.019.695)
Jumlah kredit yang diberikan **- Bersih**	4.873.040.206.117	47.094.378.164	6.605.845.766	7.912.100.652	80.071.690.654	5.014.724.221.352

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

b. Pembiayaan Syariah

	31 Desember 2011					
	Lancar 1%	Dalam Perhatian khusus 5%	Kurang lancar 15%	Diragukan 50%	Macet 100%	Jumlah
Pihak ketiga:						
Konsumtif	137.386.149.699	43.452.672			449.398.916	137.879.001.287
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.373.861.497)	(2.172.634)	-	-	(449.398.916)	(1.825.433.047)
Jumlah	136.012.288.202	41.280.038	-	-	-	136.053.568.241
Pertanian	6.197.794.525	123.684.038			38.827.969	6.360.306.532
Cadangan kerugian penurunan nilai	(61.977.945)	(6.184.202)	-	-	(38.827.969)	(106.990.116)
Jumlah	6.135.816.580	117.499.836	-	-	-	6.253.316.416
Industri	1.103.692.678				117.236.991	1.220.929.669
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.036.927)	-	-	-	(117.236.991)	(128.273.918)
Jumlah	1.092.655.751	-	-	-	-	1.092.655.751
Air	-	-	48.238.959	-	-	48.238.959
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	(7.235.844)	-	-	(7.235.844)
Jumlah	-	-	41.003.115	-	-	41.003.115
Konstruksi	507.131.870				241.625.710	748.757.580
Cadangan kerugian penurunan nilai	(5.071.319)	-	-	-	(241.625.710)	(246.697.029)
Jumlah	502.060.551	-	-	-	-	502.060.551
Perumahan	85.359.777.360	660.167.375	122.995.441	471.671.586	301.221.763	86.915.833.526
Cadangan kerugian penurunan nilai	(853.597.774)	(33.008.369)	(18.449.316)	(235.835.793)	(301.221.763)	(1.442.113.015)
Jumlah	84.506.179.587	627.159.006	104.546.125	235.835.793	-	85.473.720.511
Perdagangan	6.265.554.145	170.331.545	877.069.784		-	7.312.955.474
Cadangan kerugian penurunan nilai	(62.655.541)	(8.516.577)	(131.560.468)	-	-	(202.732.586)
Jumlah	6.202.898.604	161.814.968	745.509.316	-	-	7.110.222.888
Pengangkutan dan Distribusi	246.834.943		280.576.135			527.411.078
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.468.349)	-	(42.086.420)	-	-	(44.554.770)
Jumlah	244.366.594	-	238.489.715	-	-	482.856.308
Jasa-jasa Dunia usaha	18.507.970.168	-	123.684.038		314.255.108	18.945.909.314
Cadangan kerugian penurunan nilai	(185.079.702)	-	(18.552.606)	-	(314.255.108)	(517.887.415)
Jumlah	18.322.890.466	-	105.131.432	-	-	18.428.021.898
Jumlah kredit yang diberikan	255.574.905.388	997.635.630	1.452.564.357	471.671.586	1.462.566.457	259.959.343.419
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	(2.555.749.054)	(49.881.782)	(217.884.654)	(235.835.793)	(1.462.566.457)	(4.521.917.739)
Jumlah kredit yang diberikan **- Bersih**	253.019.156.334	947.753.849	1.234.679.704	235.835.793	-	255.437.425.680

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

c. Menurut jangka waktu
- Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Telah jatuh tempo	33.603.028.448	60.469.792.740
Kurang dari 1 tahun	224.241.984.987	97.004.830.302
1 tahun hingga 2 tahun	610.999.562.666	144.669.880.132
2 tahun hingga 5 tahun	3.361.109.577.327	1.108.609.833.911
Lebih dari 5 tahun	1.885.098.320.012	3.982.340.247.382
	6.115.052.473.440	5.393.094.584.467
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(87.871.656.565)	(122.932.937.434)
Jumlah bersih	**6.027.180.816.875**	**5.270.161.647.033**

- Berdasarkan perjanjian

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kurang dari 1 tahun	60.289.493.057	67.129.075.020
1 tahun hingga 2 tahun	26.178.065.889	50.188.745.851
2 tahun hingga 5 tahun	329.366.028.345	385.560.739.928
Lebih dari 5 tahun	5.699.218.886.149	4.890.216.023.668
	6.115.052.473.440	5.393.094.584.467
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(87.871.656.565)	(122.932.937.434)
Jumlah bersih	**6.027.180.816.875**	**5.270.161.647.033**

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan :

a. Suku bunga rata-rata per tahun untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 15% dan 17% .

b. Kredit yang diberikan pada pihak-pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti yang diberikan kepada pihak

c. Kredit umum lainnya merupakan kredit yang diberikan untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Propinsi Sulawesi selatan dan Barat. Semua kredit tersebut dijamin oleh Perum Jamkrindo, PT Askrindo, PT Jasa Rahardja Putera, PT ASEI, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Sarana Lindung Upaya, PT Asuransi Bumi Putera Muda 1967, PT Asuransi Jiwa Nusantar dan PT Asuransi Jiwa Recapital. adapun tabel suku bunga atas kredit lainya yang diberikan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Bentuk Kredit		
Umum lainnya	4.604.940.764.361	3.633.426.518.203
Porsi kredit usaha lainnya terhadap total kredit yang diberikan	75,31%	67,37%

d. Tabel jumlah kredit non-performing terdiri dari kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah dengan kolektibilitas (kurang lancar, diragukan dan macet) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
NPL-Gross		
Jumlah	84.948.651.105	108.688.775.356
Persentase	1,39%	2,02%
NPL-Netto		
Jumlah	29.050.823.121	96.060.152.569
Persentase	0,48%	1,82%

Berdasarkan pada peraturan Bank Indonesia No. 3/PBI/2001 tanggal 26 Desember 2001, rasio kredit non-performing adalah setinggi-tingginya 5% dari jumlah yang diberikan oleh bank. Bank telah membentuk tim khusus untuk menangani kredit bermasalah melalui SK Direksi.

8. KREDIT YANG DIBERIKAN/PEMBIAYAAN SYARIAH-*LANJUTAN*

e. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan/pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:
Kredit yang diberikan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	118.411.019.695	125.888.599.486
Penyesuaian sehubungan penerapan PSAK 50 (revisi 2006) PSAK 55 (revisi 2006)	-	(7.467.919.934)
Pembentukan selama periode bejalan	194.789.875.831	171.213.638.060
Pemulihan selama periode berjalan	(187.720.218.962)	(152.149.484.976)
Penerimaan kembali kredit yang dihapuskan dalam periode berjalan	8.609.539.503	14.266.647.029
Pinjaman yang dihapusbukukan	(53.146.532.149)	(33.340.459.971)
Saldo akhir periode	**80.943.683.918**	**118.411.019.695**

Pembiayaan Syariah

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	4.521.917.739	3.381.102.612
Pembentukan selama periode bejalan	2.772.757.430	1.871.248.754
Pemulihan selama periode berjalan	(366.702.522)	(709.266.991)
Pembiayaan yang dihapusbukukan	-	(21.166.636)
Saldo akhir periode	**6.927.972.647**	**4.521.917.739**

f. Ikhtisar kredit yang dihapusbuku adalah sebagai berikut

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	42.550.492.781	23.455.513.204
Penghapusbukuan selama periode berjalan	53.146.532.149	33.361.626.607
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(8.609.539.503)	(14.266.647.029)
Saldo akhir periode	**87.087.485.427**	**42.550.492.781**

Penerimaan kembali atas kredit yang dihapuskan selama periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 8.609.539.503 dan Rp. 14.266.647.029.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, seluruh kredit yang diberikan dievaluasi secara kolektif.

Rincian kredit yang mengalami penurunan nilai dan yang tidak mengalami penurunan nilai per 31 Desember 2012 dan 2011:

	31 Desember 2012		31 Desember 2011	
	Kolektif		Kolektif	
	kredit yang mengalami penurunan nilai	kredit yang tidak mengalami penurunan nilai	kredit yang mengalami penurunan nilai	kredit yang tidak mengalami penurunan nilai
Kredit yang diberikan	84.948.651.105	6.030.103.822.335	108.688.775.356	5.284.405.809.111
dikurangi CKPN	(55.897.827.983)	(31.973.828.582)	(12.628.622.787)	(110.304.314.647)
Bersih	**29.050.823.122**	**5.998.129.993.753**	**96.060.152.569**	**5.174.101.494.464**

g. Dalam upaya penanganan kredit bermasalah Bank senantiasa menjaga dan memelihara kualitas kredit serta meminimalisir resiko kredit. Untuk itu Bank melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian terhadap kredit-kredit bermasalah yang mencakup penagihan debitur atau kompensasi, pengajuan klaim kepada perusahaan asuransi kredit, hapusbuku kredit dan atau cara-cara lain yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

h. Manajemen berpendapat tidak terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang ditetapkan Bank Indonesia.

i. Keikutsertaan Bank dalam pinjaman sindikasi dengan Bank lain pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar 17.968.122.455 dan Rp. 18.977.581.609 untuk PT. Perusahaan Listrik Negara dan Rp. 10.297.434.451 dan Rp. 7.020.016.916 untuk PT. Semen Tonasa. Partisipasi Bank dalam pinjaman sindikasi tersebut masing-masing sebesar 1,83% dan 0,42% .

j. Berdasarkan surat nomor SR/002/B/DPS-BSS/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 dan surat nomor SR/002/B/DPS-BSS/I/2012 tanggal 10 Januari 2012, Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar memberikan pandangan bahwa laporan Keuangan Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar masing-masing 31 Desember 2012 dan 2011 telah memenuhi kaidah-kaidah syariah.

9. PENYERTAAN

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Penyertaan saham terdiri dari:		
PT. Sarana Ventura Sulsel		
Harga perolehan	81.584.000	74.399.000
Jumlah	**81.584.000**	**74.399.000**

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan adalah sebagai berikut:

Bank mempunyai persentase kepemilikan sebesar 1,06% terhadap PT. Sarana Ventura Sulsel masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Manajemen berkeyakinan bahwa saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang telah disediakan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya penyertaan.

10. ASET TETAP

	31 Desember 2012				
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Harga perolehan					
Tanah	25.088.681.615	-	-	-	25.088.681.615
Bangunan kantor	70.619.459.284	1.087.502.614	-	18.774.705.679	90.481.667.577
Bangunan rumah dinas	5.016.738.080	23.000.000	-	-	5.039.738.080
Kendaraan	15.271.430.475	-	-	-	15.271.430.475
Perabot kantor	95.907.999.062	1.332.706.698	-	4.284.501.100	101.525.206.860
Perabot rumah dinas	1.788.776.590	144.996.600	-	-	1.933.773.190
Aset dalam penyelesaian	17.952.889.204	5.737.237.075	-	(23.059.206.779)	630.919.500
Jumlah	**231.645.974.310**	**8.325.442.987**	**-**	**-**	**239.971.417.297**
Akumulasi penyusutan					
Bangunan kantor	19.845.654.089	3.857.025.226	-	-	23.702.679.315
Bangunan rumah dinas	1.282.528.697	290.996.400	-	-	1.573.525.096
Kendaraan	13.173.551.140	640.202.367	-	-	13.813.753.507
Perabot kantor	78.844.217.578	8.201.111.188	-	-	87.045.328.767
Perabot rumah dinas	1.244.611.520	246.812.715	-	-	1.491.424.236
Jumlah	**114.390.563.025**	**13.236.147.896**	**-**	**-**	**127.626.710.921**
Nilai buku	**117.255.411.285**				**112.344.706.376**

	31 Desember 2011				
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Harga perolehan					
Tanah	23.648.731.614	1.439.950.001	-	-	25.088.681.615
Bangunan kantor	64.199.243.065	5.888.479.219	-	531.737.000	70.619.459.284
Bangunan rumah dinas	4.957.294.080	59.444.000	-	-	5.016.738.080
Kendaraan	15.217.430.475	54.000.000	-	-	15.271.430.475
Perabot kantor	85.284.194.128	9.482.199.934	-	1.141.605.000	95.907.999.062
Perabot rumah dinas	1.452.792.584	335.984.006	-	-	1.788.776.590
Aset dalam penyelesaian	12.848.022.032	6.778.209.172	-	(1.673.342.000)	17.952.889.204
Jumlah	**207.607.707.978**	**24.038.266.332**	**-**	**-**	**231.645.974.310**
Akumulasi penyusutan					
Bangunan kantor	16.417.085.209	3.428.568.880	-	-	19.845.654.089
Bangunan rumah dinas	992.689.281	289.839.417	-	-	1.282.528.697
Kendaraan	12.257.302.187	916.248.952	-	-	13.173.551.140
Perabot kantor	68.532.054.181	10.312.163.397	-	-	78.844.217.578
Perabot rumah dinas	890.950.249	353.661.271	-	-	1.244.611.520
Jumlah	**99.090.081.107**	**15.300.481.917**	**-**	**-**	**114.390.563.025**
Nilai buku	**108.517.626.872**				**117.255.411.285**

10. ASET TETAP-*LANJUTAN*

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. 13.236.147.896 dan Rp.15.300.481.917.

Bangunan kantor, bangunan rumah dinas, kendaraan, perabot kantor dan perabot rumah dinas pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan resiko lainnya pada PT. Asuransi Bangun Askrida dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp. 237.214.777.216 dan Rp. 109.553.403.248 yang akan jatuh tempo dalam berbagai tanggal. Menurut pihak manajemen bahwa total nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungkan.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan oleh Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.

Rincian aset dalam penyelesaian untuk tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

	Nilai	Prosentase Penyelesaian	Estimasi Penyelesaian
Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor cabang:			
- Malili	160.000.000	10%	Triwulan IV 2013
- Lainnya	470.919.500	75%	Triwulan I1 2013
Pengadaan peralatan dan perabot kantor:			
Total	630.919.500		

11. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Bunga yang masih harus diterima:		
Bunga kredit	46.063.854.782	40.223.470.263
Bunga penempatan pada bank lain	320.932.285	274.887.951
Bunga surat berharga	2.951.658.385	3.136.634.220
Uang muka dan biaya dibayar di muka		
Uang muka	9.969.047.273	567.959.183
Sewa	39.393.239.090	22.552.495.838
Lain-lain	-	-
Lain-lain		
Agunan yang diambil alih - *setelah dikurangi penyisihan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar nihil dan*	616.041.231	616.041.231
Persediaan barang cetakan	7.202.981.902	5.292.807.869
Lain-lain	4.621.647.991	1.896.729.076
Jumlah	**111.139.402.939**	**74.561.025.632**

Uang muka terdiri dari pembelian aset tetap, seragam dan uang muka pajak. Jumlah uang muka pajak dicatat kembali pada catatan 17.

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Saldo awal periode	-	616.041.231
Penyesuaian	-	(616.041.231)
Saldo akhir periode	**-**	**-**

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2012 dan 2011. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku.

12. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kiriman uang	12.313.342.145	12.255.219.744
Rekening titipan	1.632.146.332	3.033.984.812
Liabilitas pajak lainnya	-	9.617.780.409
Bunga yang masih harus dibayar	13.280.673.457	15.015.416.785
Liabilitas karena jatuh tempo	1.214.749.372	189.786.142
Liabilitas Corporate Social Responsibility	3.977.160.721	-
Lain-lain	71.165.516.609	81.631.306.953
Jumlah	**103.583.588.636**	**121.743.494.845**

Liabilitas pajak lainnya merupakan hasil penerimaan pajak dari para wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan yang diterima Bank sebagai bank persepsi.

Periode laporan keuangan 31 Desember 2012 dana CSR diambil dari 2,5% dari laba bersih pada 31 Desember 2011 Bank membebankan dana CSR ke dalam laporan laba rugi komprehensif.

Liabilitas segera lain-lain sebagian besar terdiri dari titipan kas daerah, titipan PT. Taspen dan liabilitas kepada rekanan.

13. SIMPANAN NASABAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pihak-pihak berelasi		
Giro Konvensional	584.403.879.521	351.299.005.739
Tabungan		
Simpeda	4.558.480.081	4.335.158.251
Tampan	428.248.473	226.072.153
Tapemda	15.751.522	26.451.473
Tabungan-ku	36.507.960	16.326.570
Tabungan Haji	10.114.384	678.974
Tabungan Syariah	156.508.925	128.578.953
Tabungan Haji Syariah	32.150.207	45.510.149
Jumlah tabungan	5.237.761.552	4.778.776.523
Deposito berjangka		
Deposito berjangka	59.165.000.000	12.080.000.000
Deposito mudharabah	1.429.000.000	-
Jumlah deposito	60.594.000.000	12.080.000.000
Jumlah	650.235.641.073	368.157.782.262

Jumlah pihak-pihak berelasi dicatat kembali pada catatan No.38

13. SIMPANAN NASABAH-*LANJUTAN*

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pihak Ketiga		
Giro		
Giro konvensional	1.355.899.851.820	1.689.248.000.547
Giro wadiah	9.426.723.836	10.850.162.528
Jumlah giro	1.365.326.575.656	1.700.098.163.075
Tabungan		
Simpeda	991.521.467.353	839.098.433.468
Tampan	68.736.205.705	21.858.707.986
Tapemda	202.506.132.439	182.182.950.599
Tapemda pelajar dan mahasiswa	78.188.559	86.710.408
Tapemda sayang petani	36.304.601.485	46.566.523.674
Tapemda pensiunan	42.726.858.426	422.311.731
Tabungan-ku	25.337.436.565	12.632.531.775
Tabungan haji	23.619.895.411	20.920.768.337
Tabungan syariah	42.386.872.553	28.853.531.897
Tabungan haji syariah	1.548.565.516	1.805.434.828
Tabungan BKMT syariah	8.883.739	7.711.312
Tabungan kemitraan syariah	343.638.462	189.705.455
Jumlah tabungan	1.435.118.746.213	1.154.625.321.469
Deposito berjangka		
Deposito berjangka	1.767.055.032.960	1.972.601.551.750
Deposito mudharabah	183.839.315.204	95.601.710.000
Jumlah deposito	1.950.894.348.164	2.068.203.261.750
Jumlah	4.751.339.670.033	4.922.926.746.294
Jumlah	**5.401.575.311.106**	**5.291.084.528.556**

Rincian tabungan masa depan berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1 tahun	2.068.938.692	266.092.555
2 tahun	41.936.152.193	13.559.191.979
3 tahun	9.637.478.903	3.203.093.702
4 tahun	2.263.347.367	674.066.645
5 tahun	13.258.537.023	4.382.335.258
	69.164.454.178	22.084.780.139

Rincian Deposito berjangka berdasarkan jangka waktu adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
1 bulan	301.944.218.778	495.886.182.208
3 bulan	146.409.462.500	149.367.788.250
6 bulan	178.325.902.203	1.371.048.920.000
12 bulan	1.384.808.764.683	63.980.371.292
Jumlah	**2.011.488.348.164**	**2.080.283.261.750**

13. SIMPANAN NASABAH-*LANJUTAN*

Tabungan Masa Depan menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kurang dari 3 bulan	14.213.385.783	75.531.430
Lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	17.261.082.362	94.849.838
Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	19.294.293.130	93.611.717
Lebih dari 12 bulan hingga 24 bulan	14.944.858.505	13.567.029.380
Lebih dari 24 bulan hingga 60 bulan	3.450.834.398	8.253.757.774
	69.164.454.178	22.084.780.139

Deposito menurut periode yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kurang dari 3 bulan	1.427.814.098.634	1.218.307.713.021
Lebih dari 3 bulan hingga 6 bulan	571.474.899.530	681.889.510.179
Lebih dari 6 bulan hingga 12 bulan	12.199.350.000	180.086.038.550
Jumlah	**2.011.488.348.164**	**2.080.283.261.750**

Tingkat suku bunga rata-rata simpanan nasabah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Giro	3,0%	2,5%
Tabungan	0,25% - 4,5%	3%
Deposito berjangka	5,25% - 5,5%	6,25%

14. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Seluruh simpanan dari bank lain berasal dari pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:		
Giro	5.108.334.846	1.988.365.285
Tabungan	64.039.948	-
Deposito		
Deposito berjangka	2.000.000.000	53.500.000.000
Deposito on call	490.000.000.000	-
Jumlah deposito	492.000.000.000	53.500.000.000
Jumlah	**497.172.374.794**	**55.488.365.285**

Tingkat suku bunga rata-rata simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Giro	3%	2,5%
Tabungan	0,25% - 4,5%	3%
Deposito		
Deposito berjangka	5,25% - 5,5%	6,25%
Deposito on call	5,50%	-

15. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011	400.000.000.000	400.000.000.000
Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011	100.000.000.000	100.000.000.000
Biaya emisi obligasi	(6.836.190.602)	(6.836.190.602)
Penerimaan penerbitan obligasi bersih	493.163.809.398	493.163.809.398
Amortisasi biaya obligasi	3.342.406.765	1.396.831.131
	496.506.216.163	**494.560.640.529**

Pada tanggal 29 April 2011, Bank telah mendapat pernyataan efektif dari Bapepam-LK berdasarkan surat No. S-4750/BL/2011atas penerbitan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011.

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 (obligasi) ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap yang terdiri dari dua seri:

Seri A sebesar Rp. 50.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% per tahun berjangka waktu tiga tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Seri B sebesar Rp. 350.000.000.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% per tahun berjangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Bunga obligasi ini akan dibayarkan setiap tiga bulan sekali, terhitung sejak tanggal emisi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2014 untuk Seri A dan 12 Mei 2016 untuk Seri B.

Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I Tahun 2011 (sukuk) ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah dana sukuk sebesar Rp. 100.000.000.000 dengan jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal emisi. Sukuk ini diterbitkan dengan nisbah pemegang sukuk sebesar 72,5%. Pendapatan bagi hasil sukuk ini akan dibayarkan setiap tiga bulan terhitung sejak tanggal emisi yang untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Agustus 2011 dan terakhir pada tanggal jatuh tempo pada tanggal 12 Mei 2016.

Perdagangan Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011 dilakukan secara imobilisasi (tanpa warkat) dengan memindahbukukan secara elektronik dan diadministrasikan dalam penitipan kolektif di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2012 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2012 telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Peringkat Efek Indonesia (PEFINDO) masing-masing dengan peringkat id A dan id A (sy).

Dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011 ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan bank untuk ekspansi kredit dan pembiayaan syariah.

Atas dana yang diperoleh dari penawaran umum Obligasi Bank Sulselbar I Tahun 2011 dan Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar I tahun 2011, Bank akan melaporkan secara periodik realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ini kepada Bapepam-LK serta para pemegang obligasi dan sukuk melalui Wali amanat sampai seluruh dana hasil penawaran umum ini habis digunakan sesuai dengan peraturan Bapepam-LK No. X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Bank bermaksud untuk merubah penggunaan dana hasil penawaran umum ini, sebagaimana dimaksud di atas, maka Bank harus melaporkan perubahan penggunaan dana tersebut terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan menggunakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Obligasi.

16. PINJAMAN YANG DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Bank Indonesia		
Kredit Likuiditas Bank Indonesia	343.159.800	961.502.839
Dana Kelolaan	-	51.014.626
Pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)	130.304.340	651.521.736
Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)	158.263.399	307.098.469
Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan)	150.000.000.000	150.000.000.000
Jumlah	**150.631.727.539**	**151.971.137.671**

Pinjaman dari Bank Indonesia merupakan pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia untuk dipinjamkan kembali kepada pengusaha kecil dan mikro, kredit mikro investasi dan kredit rumah sederhana. Pinjaman ini jatuh tempo tahun 2014 dengan suku bunga 3%-6% per tahun.

Pinjaman dari PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan fasilitas kredit investasi dan kredit modal kerja yang diperoleh Bank kemudian akan disalurkan kepada pengusaha kecil dan pengusaha mikro melalui Bank Umum. Total fasilitas pinjaman ini sebesar Rp. 8.000.000.000, jangka waktu pinjaman dari tanggal 15 Maret 2010 sampai dengan 15 Maret 2013 dengan tingkat bunga 7% per tahun.

Pinjaman dari Pemerintah (PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) merupakan pinjaman yang sifatnya penerusan pinjaman Pemerintah melalui Bank Sulsel dalam rangka pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/ Rumah Sangat Sederhana (KPR-RS/RSS). Dalam perjanjian penerusan ini pemerintah telah menunjuk PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai Bank Koordinator. Berdasarkan perjanjian penerusan No. 35/PKS/DIR/1997 tanggal 29 April 1997 dan perubahan perjanjian yang terakhir No. 11/PKS/DIR/1999 tanggal 30 April 1999 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan dua puluh empat angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 12 September 2002 dan berakhir 12 maret 2014 dengan dikenakan biaya administrasi sebesar 3% per tahun atas jumlah dana pinjaman yang telah ditarik dan masihterutang dari waktu ke waktu.

Pinjaman dari Pemerintah (Kementrian Keuangan) merupakan fasilitas pinjaman yang diperuntukkan bagi kredit usaha mikro dan kecil yang diterima oleh Bank dan dipinjamkan kepada nasabah-nasabah yang mempunyai persyaratan program fasilitas yang bersangkutan. Sifat pinjaman tersebut di atas adalah penerusan, dimana resiko kredit ditanggung oleh Bank. Berdasarkan perubahan perjanjian No. AMA-44/KP-040/DSMI/2009 tanggal 27 Januari 2009 Bank wajib membayar pokok pinjaman dengan lima kali angsuran per setengah tahunan secara prorata dimulai 10 Desember 2017, dan berakhir 10 Desember 2019.

17. PERPAJAKAN

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a. Utang pajak		
PPh Pasal 21	2.736.916.776	4.093.017.742
PPh Pasal 4 ayat 2	1.263.319.760	1.348.268.579
PPh Pasal 25	8.272.857.000	-
PPh Pasal 29 tahun 2012	2.541.401.582	-
PPh Pasal 29 tahun 2011	-	24.730.678.427
Jumlah	**14.814.495.118**	**30.171.964.748**

b. Rekonsiliasi fiskal

Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak (rugi pajak) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Laba sebelum manfaat (beban) pajak	376.630.757.736	363.147.972.044
Perbedaan temporer :		
Imbalan pasca kerja	15.552.611.421	2.200.768.304
Pembayaran imbalan pasca kerja	(7.069.809.573)	-
Beban CSR	-	(4.941.694.000)
Beban bonus	-	(24.000.000.000)
Beban penghargaan direksi dan komisaris	15.270.280.650	-
Penyisihan aset produktif dan aset non produktif selain kredit dan pembiayaan syariah	(52.040.857)	552.040.857
Jumlah perbedaan temporer :	**23.701.041.641**	**(26.188.884.839)**

17. PERPAJAKAN-*LANJUTAN*

b. Rekonsiliasi fiskal-*lanjutan*

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Perbedaan permanen		
Gaji, tunjangan, upah dan honorarium	-	19.936.340.873
Tantiem dan jasa produksi	5.185.200.161	22.170.625.000
Perawatan kesehatan	266.198.375	207.370.625
Tenaga kerja lainnya	-	2.021.459.424
Sewa rumah dinas	133.430.481	177.401.028
Pajak-pajak	62.051.536	35.828.569
Pemeliharaan dan perbaikan rumah dinas	94.592.245	180.593.134
Pemeliharaan dan perbaikan perabot dan perlegkapan rumah dinas	92.779.479	84.639.250
Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan kantor	115.753.025	233.769.431
Promosi	5.006.184.220	12.736.967.143
Penyusutan rumah dinas	290.996.400	289.839.412
Penyusutan kendaraan dinas	192.010.031	554.790.946
Penyusutan perabot dan perlegkapan rumah dinas	246.812.715	353.661.283
Listrik dan air rumah dinas	401.581.556	258.315.724
Komunikasi kantor	178.123.857	257.628.106
Komunikasi rumah dinas	82.365.086	210.617.374
Perjalanan dinas	487.235.754	129.207.398
Olah raga dan seni	648.841.912	2.412.887.573
Iuran asosiasi dan media massa	59.258.630	1.196.534.337
Bahan bakar	157.911.650	637.306.922
Perlengkapan rumah dinas	33.912.625	49.802.303
Alat-alat kebutuhan rumah dinas	16.154.808	13.738.660
Denda dan sanksi	562.465.812	279.561.219
Representasi direksi	-	360.000.000
Sumbangan	1.749.184.029	3.295.726.702
Biaya non operasi	7.966.403.801	7.434.679.410
Pendapatan dividen	-	(10.050.485)
Pendapatan sewa	-	(20.000.000)
Jumlah perbedaan permanen	**24.029.448.188**	**75.489.241.360**
Jumlah koreksi fiskal	47.730.489.829	49.300.356.521
Taksiran penghasilan kena pajak	**424.361.247.565**	**412.448.328.565**
Taksiran penghasilan kena pajak (pembulatan)	**424.361.247.000**	**412.448.328.000**
Taksiran penghasilan kena pajak		
25% x 424.361.247.000	106.090.311.750	-
25% x 412.448.328.000	-	103.112.082.000
Jumlah taksiran pajak penghasilan	**106.090.311.750**	**103.112.082.000**
Pajak dibayar di muka		
PPh pasal 25	103.548.910.168	78.381.403.573
Jumlah	**103.548.910.168**	**78.381.403.573**
Jumlah taksiran PPh badan kurang bayar	**2.541.401.582**	**24.730.678.427**

Perhitungan perpajakan untuk tahun 2011 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan ke kantor pajak, sedangkan untuk pengisian SPT tahun 2012 Bank akan menggunakan hasil laporan audit sebagai dasar perhitungan perpajakan.

17. PERPAJAKAN-*LANJUTAN*

c. Beban pajak

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Penghasilan (beban) pajak terdiri dari:		
Pajak kini	(106.090.311.750)	(103.112.082.000)
Pajak tangguhan	5.925.260.411	(6.547.221.210)
Jumlah	**(100.165.051.339)**	**(109.659.303.210)**

d. Aset pajak tangguhan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Aset pajak tangguhan:		
Saldo awal	3.790.672.376	10.337.893.586
Imbalan pasca kerja	3.888.152.855	550.192.076
Pembayaran atas imbalan pasca kerja	(1.767.452.393)	-
Beban CSR	-	(1.235.423.500)
Beban bonus	-	(6.000.000.000)
Beban penghargaan direksi dan komisaris	3.817.570.163	-
Penyisihan aset produktif dan aset non produktif selain kredit dan pembiayaan syariah	(13.010.214)	138.010.214
Saldo aset pajak tangguhan	**9.715.932.787**	**3.790.672.376**

Pemeriksaan tahun pajak 2007

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Derektorat Jenderal Pajak No. 00012/206/07/812/12 tanggal 2 Agustus 2012, menetapkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 31.660.998.124. Pada tanggal 3 September 2012 dan 6 Desember 2012 bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk pajak penghasilan badan tahun 2007 masing-masing sebesar Rp 2.745.665.987 dan Rp 3.000.000.000. Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan oleh bank sampai dengan keputusan final dicatat dalam uang muka dalam aset lain-lain.

Derektorat Jenderal Pajak berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00085/207/07/812/12 tanggal 2 Agustus 2012, menetapkan kekurangan pembayaran pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 3.500.962.434. Pada tanggal 3 September 2012 Bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk setoran pajak pertambahan nilai barang dan jasa untuk tahun pajak 2007 sebesar Rp 2.083.006.211. Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselenggarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan oleh bank sampai dengan keputusan final dicatat dalam uang muka dalam aset lain-lain.

Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dari Derektorat Jenderal Pajak yang dikirim ke masing-masing cabang Bank, menetapkan kekurangan pembayaran pajak penghasilan pasal 21, pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 untuk tahun pajak 2007 masing-masing sebesar Rp 873.223.818, Rp 4.806.689.140 dan Rp 338.914.895. Pada tanggal 3 September 2012 bank telah melakukan setoran pajak atas SKPKB untuk setoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dan pasal 23 untuk tahun pajak 2007 masing-masing sebesar Rp 1.670.969.822 dan 94.763.631. Bank berpendapat bahwa perlakuan administrasi perpajakan yang diselengarakan sudah sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, sehingga saat ini Bank melakukan proses pengajuan keberatan atas SKPKB tersebut. Pembayaran yang telah dilakukan oleh bank sampai dengan keputusan final dicatat dalam uang muka dalam aset lain-lain.

18. LIABILITAS LAINNYA

Akun ini terdii dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Setoran jaminan	9.825.800.058	3.572.035.605
Pendapatan yang ditangguhkan	3.033.392.084	3.109.029.083
Tantiem dan jasa produksi	49.175.181.274	45.054.796.344
Lain-lain	28.301.167.957	4.943.289.827
Jumlah	**90.335.541.373**	**56.679.150.859**

19. IMBALAN PASCA KERJA

Bank membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti dengan mengacu pada PSAK 24 dan Keputusan Direksi Bank. Penilaian aktuaria atas liabilitas imbalan pasti dan imbalan pensiun pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dihitung masing-masing oleh aktuaria independen yaitu PT. Dian Artha Tama dengan laporannya tanggal 4 Maret 2013 dan PT. Bumi Dharma Aktuaria dengan laporannya tanggal 6 Maret 2012. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah masing-masing 872 orang dan 856 orang.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi komprehensif per 31 Desember 2012 dan 2011 adalah:

	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
Biaya jasa kini	5.245.204.695	1.400.518.775
Biaya bunga	1.399.860.604	800.249.529
Keuntungan aktuaria	8.907.546.122	-
	15.552.611.421	**2.200.768.304**

Imbalan pasca kerja yang termasuk dalam laporan posisi keuangan berdasarkan laporan aktuaria pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
Nilai kini liabilitas	46.975.656.502	12.847.837.318
Kerugian aktuaria yang belum diakui	(9.886.728.098)	(1.377.294.697)
Liabilitas besih	**37.088.928.404**	**11.470.542.621**

Mutasi liabilitas bersih di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
Saldo awal tahun	11.470.542.621	9.269.774.317
Penyesuaian saldo awal	17.135.583.935	-
Pembayaran manfaat	(7.069.809.573)	-
Beban tahun berjalan	15.552.611.421	2.200.768.304
Saldo liabilitas bersih	**37.088.928.404**	**11.470.542.621**

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan biaya dan imbalan pasca kerja oleh PT. Dian Artha Tama dan PT. Bumi Dharma Aktuaria, aktuaris independen pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
a. Mortalita	GAM-1971	TMI-II
b. Tingkat cacat	0,01 per tahun	0,01 per tahun
c. Tingkat pensiun dipercepat	0,1% per tahun	0,1% per tahun
d. Tingkat pengunduran diri	0,75% per tahun	5% per tahun
e. Tingkat proyeksi kenaikan gaji	7% per tahun	7% per tahun
f. Bunga teknis	6% per tahun	7% per tahun
g. Metode	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit

20. MODAL SAHAM

Rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar yang diaktakan melalui akta No. 16 tanggal 15 Desember 2012 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH., Notaris di Makassar, kepengurusan masih dalam proses dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Kepemilikan	Jumlah
Propinsi Sulawesi Selatan	216.000	40,85%	216.000.000.000
Kabupaten Pangkep	23.524	4,45%	23.524.000.000
Kabupaten Selayar	21.830	4,13%	21.830.000.000
Kabupaten Pinrang	19.500	3,69%	19.500.000.000
Kabupaten Wajo	18.265	3,45%	18.265.000.000
Kota Makassar	17.000	3,22%	17.000.000.000
Kabupaten Takalar	17.440	3,30%	17.440.000.000
Kabupaten Barru	15.110	2,86%	15.110.000.000
Kabupaten Janeponto	12.501	2,36%	12.501.000.000
Kabupaten Bantaeng	13.017	2,46%	13.017.000.000
Kabupaten Sidrap	11.571	2,19%	11.571.000.000
Kabupaten Luwu Timur	21.000	3,97%	21.000.000.000
Kota Parepare	8.647	1,64%	8.647.000.000
Kabupaten Enrekang	8.510	1,61%	8.510.000.000
Kabupaten Luwu	9.172	1,73%	9.172.000.000
Kabupaten Soppeng	13.280	2,51%	13.280.000.000
Kabupaten Sinjai	8.745	1,65%	8.745.000.000
Kabupaten Bone	6.106	1,15%	6.106.000.000
Kabupaten Maros	8.000	1,51%	8.000.000.000
Kota Palopo	8.000	1,51%	8.000.000.000
Kabupaten Luwu Utara	3.354	0,63%	3.354.000.000
Kabupaten Tana Toraja	5.586	1,06%	5.586.000.000
Kabupaten Gowa	3.081	0,58%	3.081.000.000
Kabupaten Bulukumba	3.214	0,61%	3.214.000.000
Kabupaten Toraja Utara	4.500	0,85%	4.500.000.000
Propinsi Sulawesi Barat	2.000	0,38%	2.000.000.000
Kabupaten Mamuju	8.540	1,62%	8.540.000.000
Kabupaten Polman	7.399	1,40%	7.399.000.000
Kabupaten Majene	6.300	1,19%	6.300.000.000
Kabupaten Mamasa	5.000	0,95%	5.000.000.000
Kabupaten Mamuju Utara	2.547	0,48%	2.547.000.000
	528.739	100%	528.739.000.000

20. MODAL SAHAM-*LANJUTAN*

Rincian para pemegang saham, jumlah saham dan nilai masing-masing saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Sulselbar yang diaktakan melalui akta No. 04 tanggal 2 Desember 2011 oleh Rakhmawati Laica Marzuki, SH., Notaris di Makassar, telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-04621 tanggal 9 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah saham	Kepemilikan	Jumlah
Propinsi Sulawesi Selatan	205.000	42,05%	205.000.000.000
Kabupaten Pangkep	23.523	4,83%	23.523.000.000
Kabupaten Selayar	20.330	4,17%	20.330.000.000
Kabupaten Pinrang	19.500	4,00%	19.500.000.000
Kabupaten Wajo	18.265	3,75%	18.265.000.000
Kota Makassar	17.000	3,49%	17.000.000.000
Kabupaten Takalar	15.440	3,17%	15.440.000.000
Kabupaten Barru	14.110	2,89%	14.110.000.000
Kabupaten Janeponto	12.501	2,56%	12.501.000.000
Kabupaten Bantaeng	12.017	2,47%	12.017.000.000
Kabupaten Sidrap	11.571	2,37%	11.571.000.000
Kabupaten Luwu Timur	20.000	4,10%	20.000.000.000
Kota Parepare	8.647	1,77%	8.647.000.000
Kabupaten Enrekang	8.510	1,75%	8.510.000.000
Kabupaten Luwu	9.172	1,88%	9.172.000.000
Kabupaten Soppeng	8.960	1,84%	8.960.000.000
Kabupaten Sinjai	7.595	1,56%	7.595.000.000
Kabupaten Bone	5.606	1,15%	5.606.000.000
Kabupaten Maros	6.000	1,23%	6.000.000.000
Kota Palopo	6.500	1,33%	6.500.000.000
Kabupaten Luwu Utara	3.354	0,69%	3.354.000.000
Kabupaten Tana Toraja	3.586	0,74%	3.586.000.000
Kabupaten Gowa	3.081	0,63%	3.081.000.000
Kabupaten Bulukumba	1.970	0,40%	1.970.000.000
Kabupaten Toraja Utara	2.000	0,41%	2.000.000.000
Kabupaten Mamuju	6.790	1,39%	6.790.000.000
Kabupaten Polman	5.899	1,21%	5.899.000.000
Kabupaten Majene	4.850	0,99%	4.850.000.000
Kabupaten Mamasa	3.700	0,76%	3.700.000.000
Kabupaten Mamuju Utara	2.000	0,41%	2.000.000.000
	487.477	100%	487.477.000.000

21. MODAL DISETOR LAINNYA

Pada tahun 2012 Pemegang saham menyetujui setoran modal tahun 2011 sebesar Rp 14.150.000.000 menjadi modal disetor sedangkan sisanya tahun 2012 dari masing masing sebesar Rp. 1.942.699 belum disetujui.

22. MODAL SUMBANGAN

Akun ini merupakan modal sumbangan yang diterima oleh Bank dalam bentuk peralatan kantor yang disumbangkan oleh Bank Indonesia sebesar Rp. 243.905.400.

23. SALDO LABA

Rincian saldo laba yang ditahan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Yang belum ditentukan penggunaannya		
Laba bersih tahun berjalan	276.465.706.397	260.956.588.768
Jumlah	276.465.706.397	260.956.588.768
Yang telah ditentukan penggunaannya		
Cadangan tujuan	171.497.086.971	127.136.569.925
Cadangan umum	245.502.273.508	187.336.619.807
Jumlah	**693.465.066.876**	**575.429.778.501**

24. PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kredit yang diberikan	964.918.493.588	863.367.870.155
Penempatan pada Bank Indonesia	6.386.270.127	7.930.966.066
Penempatan pada bank lain	69.467.418.973	48.803.952.057
Surat berharga	7.836.020.450	10.132.189.848
Syariah:		
Margin murabahah dan mudharabah	45.672.951.000	28.677.938.294
Bonus giro wadiah	1.016.782	8.838.388
Bagi hasil Deposito	2.303.519.287	3.669.754.248
Qardh gadai	157.769.722	-
Jumlah	**1.096.743.459.929**	**962.591.509.056**

Total pendapatan bunga kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan No. 38.

Total jumlah amortisasi pendapatan dan biaya transaksi yang diakui sebagai penambah/pengurang pendapatan bunga untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp. (10.900.265.435) dan Rp. 16.504.472.247.

25. BEBAN BUNGA DAN BAGI HASIL SYARIAH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pinjaman yang diterima	8.914.988.725	10.311.459.986
Giro	86.427.669.288	75.953.256.181
Deposito	172.177.373.993	172.618.152.219
Tabungan	27.416.477.190	24.634.707.816
Bagi hasil syariah	12.204.408.532	7.206.827.509
Surat berharga yang diterbitkan	51.329.920.750	32.729.393.274
Jumlah	**358.470.838.478**	**323.453.796.985**

Total pendapatan bunga kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan No. 38.

26. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Provisi dan komisi selain dari kredit yang diberikan	25.389.784.180	31.728.318.752
Administrasi	36.765.761.743	32.428.578.850
Lain-lain	9.931.543.068	24.211.424.024
Jumlah	**72.087.088.991**	**88.368.321.626**

Total pendapatan operasional lainnya kepada pihak-pihak berelasi dirinci kembali pada catatan No. 38.

Pendapatan administrasi merupakan pendapatan yang diterima oleh Bank atas administrasi rekening untunk tabungan, giro dan deposito

27. BEBAN PERSONALIA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Gaji dan upah	103.387.080.409	81.435.359.064
Tunjangan	90.463.641.199	60.965.864.717
Imbalan pasca kerja	15.552.611.421	2.200.768.304
Tantiem dan jasa produksi	46.992.434.512	45.355.214.590
Honorarium	11.691.242.967	9.276.040.398
Pendidikan dan latihan	7.191.653.703	8.552.056.060
Jumlah	**275.278.664.211**	**207.785.303.133**

28. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Beban barang dan jasa	5.512.054.937	3.817.508.599
Beban penyusutan dan amortisasi obligasi	15.181.723.530	16.697.313.048
Beban perjalanan dinas	10.229.330.708	12.568.135.284
Beban pemeliharaan dan perbaikan	7.604.878.193	6.410.700.553
Beban listrik, air dan telekomunikasi	16.131.980.130	15.290.102.436
Beban bank	5.702.100.315	4.019.543.810
Beban sewa	19.126.717.554	16.354.885.417
Beban promosi	9.935.687.873	16.828.983.260
Beban perlengkapan	2.204.532.251	1.193.702.402
Beban pajak lain	952.894.300	862.187.579
Beban penagihan	766.558.249	1.187.952.153
Beban asuransi	33.617.046.142	17.652.111.438
Beban lain-lain	14.184.279.346	11.970.203.954
Jumlah	**141.149.783.528**	**124.853.329.933**

29. PENYISIHAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ATAS ASET KEUANGAN DAN NON KEUANGAN-BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pemulihan cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kredit yang diberikan	(187.720.218.962)	(152.149.484.976)
Pembiayaan syariah	(366.702.522)	(709.266.991)
Penempatan pada bank lain	(752.040.857)	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai:		
Kredit yang diberikan	194.789.875.831	171.213.638.060
Pembiayaan syariah	2.772.757.430	1.871.248.753
Penempatan pada bank lain	700.000.000	552.040.857
Jumlah	**9.423.670.920**	**20.778.175.703**

30. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pendapatan non operasional		
Sewa ruangan kantor	60.000.000	20.000.000
Pendapatan deviden	16.907.784	10.050.485
Lain-lain	4.883.755.441	398.663.961
Jumlah	**4.960.663.225**	**428.714.446**

30. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL-*LANJUTAN*

Beban non operasional		
Denda	562.465.812	279.561.219
Beban representasi	-	360.000.000
Sumbangan	4.229.078.629	3.295.726.702
Lain-lain	8.045.952.831	7.434.679.410
Jumlah	**12.837.497.272**	**11.369.967.331**

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan diterima Bank, diantaranya dari denda atas pencairan deposito yang belum jatuh tempo dan selisih lebih kas *teller*.

31. LABA PER SAHAM DASAR

Laba operasional dan laba bersih

Laba operasional dan laba bersih untuk tujuan penghitungan laba per saham (pembilang) adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Laba operasional	376.630.757.736	363.147.972.044
Laba bersih	276.465.706.397	253.488.668.834

Jumlah saham

Perubahan nilai saham bonus dan deviden saham merupakan penambahan jumlah saham tanpa disertai perubahan sumber daya. Oleh karena itu, untuk tujuan penghitungan jumlah rata-rata tertimbang saham beredar, perubahan nilai nominal saham bonus dan deviden saham dianggap sudah terjadi pada awal periode laporan keuangan terawal disajikan.

Jumlah saham berdasarkan rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebesar 524.590 dan 495.397.

Laba per saham dasar

Laba per saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Laba operasional per saham	717.952	744.954
Laba bersih per saham	527.012	520.001

32. DANA PENSIUN

Penyelenggaraan dana pensiun Bank berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/PD-BPDSS/2001 tanggal 30 November 2001 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-172/KM.6/2002 tanggal 29 Juli 2002. Jenis program adalah program pensiun manfaat pasti pesertanya seluruh karyawan Bank yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi dengan status pegawai tetap, dengan metode penghitungan "*Attained Age Normal Cost Method*" yang dtentukan berdasarkan Valuasi Aktuaria pada tanggal 30 Juni 2012 dan 31 Desember 2011 yang dilakukan PT. Dian Artha Tama No. 637-D/PSAK/DAT/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan PT. Bumi Dharma Aktuaria No. 505/UUK-13/BDA/III/2012 tanggal 6 Maret 2012, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

		31 Desember 2012	31 Desember 2011
a.	Mortalita	GAM 1971	GAT 1983
b.	Tingkat cacat	0,01% per tahun	0,01% per tahun
c.	Tingkat pensiun dipercepat	0,75% per tahun	0,1% per tahun
d.	Tingkat pengunduran diri	5% per tahun	5% per tahun
e.	Kenaikan penghasilan dasar pensiun	7% per tahun	7% per tahun
f.	Bunga teknis	6,5% per tahun	8,5% per tahun

32. DANA PENSIUN-*LANJUTAN*

		31 Desember 2012	31 Desember 2011
1.	Jumlah peserta aktif	878	856
2.	Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP)/bulan	3.113.900.565	3.024.036.600
3.	Jumlah peserta pasif		
	- Penerima pensiun/bulan	142	134
	Jumlah Rupiah	435.283.596	400.003.952
	- Pensiun ditunda/bulan	15	12
	Jumlah Rupiah	30.387.129	20.180.282
4.	Kekayaan dana pensiun	167.505.463.517	161.442.925.982
5.	Kewajiban aktuaria	(5.299.600.619)	(157.740.481.401)
	Selisih lebih (kurang) kekayaan dana pensiun atas kewajiban aktuaria	**162.205.862.898**	**3.702.444.581**

33. ASET DAN LIABILITAS MENURUT KELOMPOK JATUH TEMPONYA BERDASARKAN SISA PERIODE

	31 Desember 2012								
	Sampai dengan 1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	1-2 tahun	2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tidak memiliki jatuh tempo	Jumlah
Aset									
Kas	323.019.469.200	-	-	-	-	-	-	-	323.019.469.200
Giro pada Bank Indonesia	546.679.352.659	-	-	-	-	-	-	-	546.679.352.659
Giro pada bank lain	405.096.997	-	-	-	-	-	-	-	405.096.997
Penempatan pada bank lain	681.498.112.160	-	-	-	-	-	-	-	681.498.112.160
Surat-surat berharga	-	37.623.175.817	133.043.762.355	19.426.685.943	-	12.000.000.000	-	-	202.093.624.115
Kredit yang diberikan	29.438.634.151	21.085.207.830	48.434.287.905	158.886.883.549	610.999.562.666	3.361.109.577.327	1.885.098.320.011	-	6.115.052.473.440
Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	81.584.000	81.584.000
Aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	112.344.706.376	112.344.706.376
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	9.715.932.787	9.715.932.787
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	111.139.402.939	111.139.402.939
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	(87.871.656.565)	(87.871.656.565)
Jumlah aset	**1.581.040.665.167**	**58.708.383.647**	**181.478.050.260**	**178.313.569.493**	**610.999.562.666**	**3.373.109.577.327**	**1.885.098.320.011**	**145.409.969.536**	**8.014.158.098.107**
Liabilitas									
Liabilitas segera	103.583.588.636	-	-	-	-	-	-	-	103.583.588.636
Simpanan nasabah	3.775.158.505.016	987.791.488.166	588.735.981.892	31.493.643.130	14.944.858.505	3.450.834.398	-	-	5.401.575.311.107
Simpanan dari bank lain	497.172.374.794	-	-	-	-	-	-	-	497.172.374.794
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	496.506.216.163	-	-	496.506.216.163
Pinjaman yang diterima	124.089.353	86.869.566	25.926.771	25.926.771	368.915.078	-	150.000.000.000	-	150.631.727.539
Utang pajak	14.689.853.617	124.641.501	-	-	-	-	-	-	14.814.495.118
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	-	37.088.928.404	37.088.928.404
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	90.335.541.373	-	-	-	-	-	-	-	90.335.541.373
Jumlah Liabilitas	**567.957.009.610**	**988.002.999.233**	**588.761.908.663**	**31.519.569.901**	**15.313.773.583**	**499.957.050.561**	**150.000.000.000**	**37.088.928.404**	**6.791.708.183.134**
	(2.799.211.331.814)	(245.215.581.265)	(27.112.502.848)	(324.708.746.146)	124.298.070.274	982.189.706.709	3.356.647.057.504	213.949.783.791	8.058.134.980.155

33. ASET DAN LIABILITAS MENURUT KELOMPOK JATUH TEMPONYA BERDASARKAN SISA PERIODE

	31 Desember 2011								
	Sampai dengan 1 bulan	1-3 bulan	3-6 bulan	6-12 bulan	1-2 tahun	2-5 tahun	Lebih dari 5 tahun	Tidak memiliki jatuh tempo	Jumlah
Aset									
Kas	300.870.476.163	-	-	-	-	-	-	-	300.870.476.163
Giro pada Bank Indonesia	469.197.511.881	-	-	-	-	-	-	-	469.197.511.881
Giro pada bank lain	880.673.289	-	-	-	-	-	-	-	880.673.289
Penempatan pada bank lain	884.447.500.937	-	-	-	-	-	-	-	884.447.500.937
Surat-surat berharga	-	79.404.407.328	77.827.690.951	-	-	12.000.000.000	-	-	169.232.098.280
Kredit yang diberikan	65.133.718.460	17.398.766.244	20.578.412.542	54.363.725.796	144.669.880.131	1.108.609.833.911	3.982.340.247.384	-	5.393.094.584.468
Penyertaan	-	-	-	-	-	-	-	74.399.000	74.399.000
Aset tetap	-	-	-	-	-	-	-	117.255.411.285	117.255.411.285
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	-	-	-	3.790.672.376	3.790.672.376
Aset lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	74.561.025.632	74.561.025.632
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	(122.932.937.434)	(122.932.937.434)
Jumlah aset	**1.715.137.033.650**	**19.974.676.051**	**73.076.568.306**	**69.342.447.291**	**124.298.070.274**	**982.189.706.709**	**3.356.647.057.504**	**72.748.570.860**	**7.290.471.415.877**
Liabilitas									
Liabilitas segera	121.743.494.845	-	-	-	-	-	-	-	121.743.494.845
Simpanan nasabah	3.981.914.256.702	411.618.445.036	681.984.360.017	180.179.650.267	13.567.029.380	21.819.684.888	1.102.268	-	5.291.084.528.558
Simpanan dari bank lain	55.488.365.285	-	-	-	-	-	-	-	55.488.365.285
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	494.560.640.529	-	-	494.560.640.529
Pinjaman yang diterima	124.089.353	156.231.120	146.594.089	383.479.778	1.160.743.331	-	150.000.000.000	-	151.971.137.671
Hutang pajak	2.276.145.962	1.816.871.780	-	-	-	-	-	26.078.947.006	30.171.964.748
Imbalan pasca kerja	-	-	-	-	-	-	-	11.470.542.621	11.470.542.621
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lain-lain	56.679.150.859	-	-	-	-	-	-	-	56.679.150.859
Jumlah Liabilitas	**4.218.225.503.005**	**413.591.547.936**	**682.130.954.106**	**180.563.130.045**	**14.727.772.711**	**516.380.325.417**	**150.001.102.268**	**37.549.489.627**	**6.213.169.825.113**
	(2.799.211.331.814)	(245.215.581.265)	(27.112.502.848)	(324.708.746.146)	124.298.070.274	982.189.706.709	3.356.647.057.504	35.199.081.233	1.077.301.590.764

34. IKATAN

1. Berdasarkan perjanjian kerjasama No. 007/PKS-BSS/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama sewa milik UPS 10 KVA dengan CV. Bayu Adhi dengan syarat yang telah ditentukan dan jangka waktu sewa selama 3 (tiga) tahun.
2. Berdasarkan perjanjian kerjasama No.038/MP-UP/FIX-T/V/12, Bank sepakat untuk menggunakan sebagian tanah dan bangunan untuk pengadaan ATM dengan Mall Panakkukang-Makassar. Perjanjian tersebut berlangsung selama 1 (satu) tahun dengan syarat yang telah ditentukan.
3. Berdasarkan perjanjian kerjasama No.012/PKS.BSSB/II/12, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 tentang program asuransi jiwa kredit kumpulan. Berlakunya asuransi bagi masing-masing Peserta dimulai sejak ditandatamganinya Perjanjian Kredit dan akan berakhir sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelunasan kredit masing-masing Peserta.
4. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.003/PKS-BSSB/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia dalam bentuk pemberian penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dengan penetapan jangka waktu yang sama dengan waktu KUR.
5. Berdasarkan perjanjian kerja sama PKS-KUR/ASK/01/III/2012 dan No.002/PKS-BSSB/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT (PERSERO) Asuransi Kredit Indonesia dalam bentuk pemberian penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dengan penetapan jangka waktu yang sama dengan waktu KUR.
6. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.008/PKS-BSS/I/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan CV. Cahaya Surya Komputer atas perpanjangan sewa menyewa notebook PC/Laptop sebanyak 17 (tujuh belas) unit selama 1 (satu) tahun.
7. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.196/PKS-BSS/X/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Praweda Ciptakarsa Informatika atas pengadaan hardware, software dan aplikasi Interface BI-RTGS, Generasi II dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Desember 2012.
8. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.162/PKS-BSS/XI/2012, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama dengan PT. Srikandi Multi Guna Sejahtera atas pengerjaan reinstalasi jaringan PLN Kantor Pusat.
9. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.181/PKS-BSS/IX/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Veda Praxis atas pekerjaan Jasa TI Assessment berdasarkan PBI No.9/15/PBI/2007 dalam rangka audit TSI yang dilakukan per 3 (tiga) tahun untuk memastikan kecukupan pengendalian yang diterapkan TI, masih sesuai dan sejalan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam PBI tersebut.
10. Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 153/PKS-BSS/IV/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Mantra Global Konsultan sebagai konsultan pendamping dalam peroses evaluasi dan implementasi disaster recovery dan bussines contunity plan.
11. Berdasarkan perjanjian kerja sama No.09/PPJP/PRF-DIR/II/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Pemeringkat Efek Indonesia atas pekerjaan jasa pemeringkat perusahaan dan obligasi 1 tahun 2011 dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
12. Berdasarkan perjanjian kerja sama No, 112/PKS-BSS/V/2011, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. NCR Indonesia atas jasa pemeliharaan Automated Teller Machine (ATM) dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
13. Berdasarkan perjanjian kerja sama No. 086/PKS/VII/2010, Bank sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan PT. Titan Sarana Niaga atas sewa mesin ATM merk NCR untuk memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bertransaksi Bank. Jangka waktu sewa mesin ATM selama satu tahun dan akan diperpanjang setiap tahun selama lima tahun.

35. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Estimasi kerugian atas transaksi komitmen dan kontinjensi berasal dari:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	9.055.871.601	22.397.623.181
Garansi yang diterbitkan	413.357.164.694	3.572.035.605

b. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Saldo awal tahun	-	3.459.460.701
Penyesuaian	-	(3.459.460.701)
Saldo akhir periode	**-**	**-**

Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/30/DPNP perihal Perubahan Ketiga atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 perihal Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Bulanan Bank Umum serta Laporan Tertentu yang disampaikan kepada Bank Indonesia yang terbit tanggal 16 Desember 2011, maka Bank tidak diwajibkan lagi membentuk penyisihan penghapusan aset non produktif dan transaksi rekening administratif yang diperhitungkan dalam laporan keuangan per 31 Desember 2011. Namun Bank tetap harus menghitung cadangan kerugian penurunan nilai mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Penyesuaian atas penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif yang telah dibentuk telah dibebankan dalam laporan laba rugi sebesar Rp. 3.459.460.701.

36. RASIO ASET PRODUKTIF TERHADAP JUMLAH ASET

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
a. Berikut rasio aset produktif terhadap total aset produktif:		
Giro pada bank lain	0,006%	0,026%
Penempatan pada bank lain	9,902%	13,205%
Surat-surat berharga	2,936%	2,527%
Kredit yang diberikan, tidak termasuk penempatan non performing	87,154%	84,249%
Penyertaan	0,001%	0,001%
Jumlah	**100%**	**100%**
b. Berikut rasio aset non produktif terhadap total aset produktif:		
Kredit non performing	0,42%	1,43%

37. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dilakukan dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/23/DPNP/Tanggal 29 September 2003.

Peraturan Bank Indonesia No. 3/21/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 mewajibkan bank-bank untuk menuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum sebesar 8%. Peraturan Bank Indonesia No. 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 mewajibkan bank-bank di Indonesia dengan kualifikasi tertentu untuk memperhitungkan resiko pasar dalam perhitungan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan wajib memenuhi resiko kewajiban penyediaan modal minimum sebasar 8%.

Rasio kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Komponen modal		
a. Modal inti		
Modal disetor	528.799.000.000	487.477.000.000
Cadangan tambahan modal	497.130.717.957	459.346.296.380
b. Modal pelengkap		
Cadangan umum 1,25% dari ATMR	62.056.362.831	43.133.866.263
Jumlah	**1.087.986.080.788**	**989.957.162.643**
Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Kredit	3.760.748.306.885	3.450.709.301.001
Aset Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) Operasional	1.203.704.719.590	740.656.711.945
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk resiko kredit	28,93%	28,69%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia untuk resiko kredit dan resiko operasional	21,92%	23,62%
Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan Bank Indonesia	8%	8%

38. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut dilaksanakan dengan persyaratan dan kondisi yang normal dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kredit yang diberikan :		
Pemegang saham	2.837.425.021	2.837.425.021
Dikurangi penyisihan penghapusan	(2.663.355.393)	(2.663.355.393)
Jumlah	**174.069.628**	**174.069.628**
Persentase terhadap jumlah aset	0,002%	0,002%

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Giro		
Giro pemegang saham	584.402.496.798	351.297.420.226
Karyawan kunci	1.382.723	1.585.513
Jumlah	**584.403.879.521**	**351.299.005.739**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	8,60%	5,65%
Tabungan		
Karyawan kunci	5.237.761.552	4.778.776.523
Jumlah	**5.237.761.552**	**4.778.776.523**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,08%	0,08%
Deposito		
Pemegang saham	59.000.000.000	59.600.000.000
Karyawan kunci	1.594.000.000	3.055.000.000
Jumlah	**60.594.000.000**	**62.655.000.000**
Persentase terhadap jumlah liabilitas	0,89%	1,01%

Pihak-pihak berelasi yang mempunyai saldo transaksi lebih dari Rp. 1.000.000.000 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Kredit yang diberikan		
Pemkab Gowa	2.837.425.021	2.837.425.021
Jumlah	**2.837.425.021**	**2.837.425.021**

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Giro		
Kas Umum Daerah Kota Makassar	219.100.043.303	161.072.164.375
Kas Umum Daerah Mamuju	41.987.008.605	325.249.564
Kas Umum Daerah Pasangkayu	67.705.761.717	46.112.940.828
Kas Umum Daerah Belopa	8.845.000.612	4.253.316.424
Kas Umum Daerah Sinjai	28.925.735.078	2.850.545.886
Kas Umum Daerah Pangkep	12.754.495.948	9.449.626.081
Kas Umum Daerah Takalar	24.499.215.655	17.829.702.608
Kas Umum Daerah Jeneponto	6.157.877.833	4.517.811.831
Kas Umum Daerah Soppeng	4.452.306.204	3.387.101.297
Kas Umum Daerah Selayar	10.741.421.047	685.942.909
Jumlah yang dipindahkan	**425.168.866.002**	**253.836.794.716**

38. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI-*LANJUTAN*

Giro-lanjutan

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Pindahan	425.168.866.002	253.836.794.716
Kas Umum Daerah Malili	8.708.200.791	16.046.241.316
Kas Umum Daerah Barru	28.457.426.654	6.823.841.025
Kas Umum Daerah Bone	11.639.878.853	728.606.746
Kota Pare-pare	1.351.143.831	92.520.680
Kas Umum Daerah Maros	8.175.209.438	-
Kas Umum Daerah Bantaeng	9.717.353.265	-
Kas Umum Daerah Pinrang	18.509.550.039	-
Kas Umum Daerah Palopo	2.943.654.894	-
Kas Umum Daerah Sengkang	58.828.875.368	-
Kas Umum Daerah Rantepao	7.723.438.577	-
Jumlah	**581.223.597.712**	**277.528.004.483**
Deposito		
Pemerintah Daerah Selayar	20.000.000.000	-
Pemerintah Daerah Soppeng	18.000.000.000	10.000.000.000
Pemerintah Daerah Wajo	-	16.000.000.000
Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba	-	10.000.000.000
Pemerintah Daerah Bantaeng	5.000.000.000	21.600.000.000
Pemerintah Daerah Sengkang	16.000.000.000	
Jumlah	**59.000.000.000**	**57.600.000.000**
Tabungan		
Karyawan Kunci	2.575.099.084	2.445.262.891
Jumlah	**2.575.099.084**	**2.445.262.891**

	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Beban bunga		
Giro	54.745.463.772	40.926.197.930
Tabungan	166.208.011	126.208.516
Deposito	3.717.881.005	2.390.391.650
Jumlah	**58.629.552.788**	**43.442.798.096**
Persentase terhadap beban bunga	16,36%	13,43%

38. SIFAT TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI-*Lanjutan*

No.	Pihak-pihak berelasi	Hubungan	Sifat saldo atau akun transaksi
1.	Karyawan kunci	Komisaris, Direksi, Pemimpin Cabang dan Pemimpin Divisi	Rekening giro, tabungan dan deposito
2.	Propinsi Sulawesi Selatan	Pemegang saham	Rekening giro dan tabungan
3.	Kabupaten Pangkep	Pemegang saham	Rekening giro
4.	Kabupaten Selayar	Pemegang saham	Rekening giro dan deposito
5.	Kabupaten Pinrang	Pemegang saham	Rekening giro
6.	Kabupaten Wajo	Pemegang saham	Rekening giro dan deposito
7.	Kota Makassar	Pemegang saham	Rekening giro
8.	Kabupaten Takalar	Pemegang saham	Rekening giro
9.	Kabupaten Barru	Pemegang saham	Rekening giro
10.	Kabupaten Janeponto	Pemegang saham	Rekening giro
11.	Kabupaten Bantaeng	Pemegang saham	Rekening giro dan deposito
12.	Kabupaten Sidrap	Pemegang saham	Rekening giro
13.	Kabupaten Luwu Timur	Pemegang saham	Rekening giro
14.	Kabupaten Parepare	Pemegang saham	Rekening giro
15.	Kabupaten Enrekang	Pemegang saham	Rekening giro
16.	Kabupaten Luwu	Pemegang saham	Rekening giro
17.	Kabupaten Soppeng	Pemegang saham	Rekening giro dan deposito
18.	Kabupaten Sinjai	Pemegang saham	Rekening giro
19.	Kabupaten Bone	Pemegang saham	Rekening giro
20.	Kabupaten Maros	Pemegang saham	Rekening giro
21.	Kota Palopo	Pemegang saham	Rekening giro
22.	Kabupaten Luwu Utara	Pemegang saham	Rekening giro
23.	Kabupaten Tana Toraja	Pemegang saham	Rekening giro
24.	Kabupaten Gowa	Pemegang saham	Rekening giro dan kredit
25.	Kabupaten Bulukumba	Pemegang saham	Rekening giro
26.	Kabupaten Toraja Utara	Pemegang saham	Rekening giro
27.	Propinsi Sulawesi Barat	Pemegang saham	Rekening giro
28.	Kabupaten Mamuju	Pemegang saham	Rekening giro
29.	Kabupaten Polman	Pemegang saham	Rekening giro
30.	Kabupaten Majene	Pemegang saham	Rekening giro
31.	Kabupaten Mamasa	Pemegang saham	Rekening giro
32.	Kabupaten Mamuju Utara	Pemegang saham	Rekening giro

39. MANAJEMEN RESIKO

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank senantiasa berhadapan dengan resiko yang merupakan resiko bawaan dalam setiap kegiatannya antara lain dalam bentuk resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar dan resiko operasional sehingga diperlukan pengelolaan Bank yang baik dan pengelolaan resiko yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Sistem pengendalian resiko di Bank mulai disesuaikan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan intern Bank, antara lain menyusun Pedoman Sistem Operasional Prosedur Manajemen resiko dan melakukan secara berkesinambungan sosialisasi kepada seluruh jajaran Bank agar manajemen resiko dapat terimplementasi secara terintegrasi ke dalam suatu sistem pengelolaan resiko yang akurat dan komprehensif serta mampu menganalisa dan mengelola seluruh resiko yang terkait.

Resiko Kepatuhan dan Hukum

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar atas nilai tukar valuta asing dan tingkat suku bunga, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Untuk itu, Bank telah mengimplementasikan suatu Kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) terpadu, yang merupakan sarana untuk penentuan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur untuk memastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Bank dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Dari sisi organisasi, bank telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite Pemantau Risiko, Komite TSI dan Komite Kredit untuk mengoptimalkan fungsi manajemen risiko bank. Selain hal tersebut, struktur organisasi perseroan didesign berlandaskan *prinsip four eyes principles*.

39. MANAJEMEN RESIKO-*LANJUTAN*

Resiko Kedit

Dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/ PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum sebagaimana telah diubah sesuai PBI No. 11/25/PBI/2009, maka program kerja bank dalam manajemen risiko diarahkan dan dikembangkan sesuai dengan pedoman Bank Indonesia tersebut.

Dengan tetap mengacu kepada *Risk Management Framework*, Manajemen Risiko Kredit diuraikan sebagai berikut :

- Penyusunan / penyempurnaan Kebijakan dan SOP perkreditan yang terdokumentasi dengan baik yang disoalisasikan kepada seluruh unit kerja (termasuk penetapan rasio agunan dan penetapan standar proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko kredit.
- Penetapan *Credit risk tolerance* berdasarkan *risk appetite* yang dituangkan dalam Rencana bisnis bank yang dievaluasi secara periodik, antara lain penetapan target Non Performing Loan (NPL) di atas standar Bank Indonesia, target kredit per segment kredit, target *credit recovery*
- Penetapan struktur organisasi mengacu kepada *four eyes principles* yang secara jelas memisahkan antara fungsi pemutus, monitoring risiko kredit serta kejelasan tanggungjawab masing masing unit / pegawai.
- Penetapan standar kualifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam keputusan kredit dan monitoring kredit.
- Penggunaan Teknologi Informasi yang memudahkan proses reporting guna monitoring risiko kredit dan *early warning system*.
- Penerapan *risk based* audit untuk pengujian model manajemen risiko kredit oleh *Audit Intern* yang secara berkelanjutan dievaluasi oleh Komite Audit di level Dewan Komisaris.
- Rekomendasi penyempurnaan model Manajemen Risiko kredit oleh Komite Manajemen Risiko yang secara berkelanjutan dipantau oleh Komite Pemantau Risiko di level Dewan Komisaris.

Konsentrasi kredit Bank berdasarkan sektor ekonomi lihat catatan 8b.

Ekposur maksimum resiko kredit tanpa memperhitungkan agunan dan kredit lainnya. Exsposur risiko kredit terhadap aset laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2012	**31 Desember 2011**
Keterangan		
Aset		
Kas	323.019.469.200	300.870.476.163
Giro pada Bank Indonesia	546.679.352.659	469.197.511.881
Gio pada bank lain	405.096.997	882.714.146
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	681.998.112.160	884.997.500.937
Surat-surat berharga	202.093.624.115	169.232.098.280
Kredit yang diberikan/pembiyaan syariah	6.115.052.473.440	5.393.094.584.467
Penyertaan	81.584.000	74.399.000
Jumlah-kotor	7.869.329.712.571	7.218.349.284.874
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	87.871.656.565	122.932.937.434
Jumlah-bersih	**7.781.458.056.005**	**7.095.416.347.441**

Bank juga telah mengembangkan sistem pemeringkatan risiko debitur yang lebih dikenal dengan Internal *Credit Risk Rating System*. Ke depan diharapkan agar pemberian peringkat kepada setiap debitur menjadi suatu masukan / landasan dalam membantu pejabat yang berwenang untuk memutuskan kelayakan kredit dengan lebih baik.

Dalam konteks manajemen risiko yang lebih luas, pengembangan Internal *Credit Risk Rating System* merupakan salah satu komponen utama dalam pengukuran risiko yang dikaitkan dengan ketentuan permodalan seperti yang disebutkan oleh *Basel II Accord*. Selain itu, hasil pengukuran risiko yang berbasis rating ini juga dapat menjadi sarana penetapan "*pricing*" yang lebih sesuai dengan tingkat risiko debitur (*risk-based pricing*) dan pengembangan portofolio perkreditan.

39. MANAJEMEN RESIKO-*LANJUTAN*

Resiko Likuiditas

Bank sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional.

Bank menjaga likuiditas dengan mempertahankan jumlah aset likuid yang cukup untuk membayar simpanan para nasabah, dan menjaga agar jumlah aset yang jatuh tempo pada setiap periode dapat menutupi jumlah liabilitas yang jatuh tempo.

Aset likuid bank terutama terdiri dari penempatan pada bank-bank lain dan lembaga keuangan lainnya, giro pada Bank Indonesia dan kas. Apabila Bank memerlukan likuiditas, dengan segera Bank dapat menarik cadangan dana dalam giro pada Bank Indonesia atau mencari pinjaman di pasar uang antar bank di Indonesia. Cadangan utama Bank terdiri dari cadangan Giro Wajib Minimum dan kas di kantor-kantor cabang.

Saat ini Peraturan Bank Indonesia mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menjaga Giro Wajib Minimum secara harian, dalam bentuk simpanan tanpa bunga pada Bank Indonesia sekurang-kurangnya sebesar 8% dari liabilitas pihak ketiga bukan bank dalam Rupiah.

Pengendalian likuiditas senantiasa dilakukan dengan cara melakukan keseimbangan antara sumber-sumber dana dan pemanfaatannya, sehingga benar-benar masih dalam limit risiko yang dapat diterima dan memberikan kontribusi berupa profit yang wajar, yang pengelolaannya oleh Divisi Treasury dan tim Alco (*Asset Liability Comitee*).

Langkah-langkah yang diambil oleh Bank sehubungan menjaga likuiditas yaitu meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan, mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang dimiliki pasar sehingga dapat dicairkan setiap saat apabila bank membutuhkan.

Tabel analisis likuiditas (sisa jangka waktu jatuh tempo) dari aset dan liabilitas Bank. (*lihat catatan 33*)

Resiko Tingkat Bunga/Resiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan faktor pasar dari portfolio yang dimiliki bank, yang dapat merugikan bank (*adverse movement*). Yang dimaksud dengan faktor pasar adalah suku bunga.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas funsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang.
Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi bank yang mengandung risko suku bunga. Tingkat sensitivitas pendapatan bank terhadap perubahan suku bunga sangat bergantung kepada karakteristik instrumen keuangan yang membentuk portfolio bank, antara lain :
i). maturity - semakin panjang jangka waktu maturitas semakin sensitif terhadap perubahan suku bunga
ii). *repricing scedule* - instrumen keuangan dengan tingkat bunga *floating*/mengambang lebih sensitif dibanding instrumen keuangan dengan tingkat bunga *fixed*/tetap.

Tabel dibawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya yang dikelompokkan menurut mana yang lebih awal antara tanggal *repricing* atau tanggal jatuh tempo kontraktual.

	Nilai tercatat	Kurang dari 3 bulan	3-12 bulan	12-24 bulan	Lebih dari 24 bulan
Aset					
Giro pada Bank Indonesia	546.679.352.659	546.679.352.659	-	-	-
Giro pada bank lain	405.096.997	405.096.997	-	-	-
Penempatan pada bank lain	681.498.112.160	681.498.112.160	-	-	-
Surat-surat berharga	202.093.624.115	152.470.448.298	37.623.175.817	-	12.000.000.000
Kredit yang diberikan	6.115.052.473.440	50.523.841.981	207.321.171.455	610.999.562.666	5.246.207.897.338
	7.545.728.659.371	1.431.576.852.095	244.944.347.272	610.999.562.666	5.258.207.897.338

39. MANAJEMEN RESIKO-*LANJUTAN*

Analisis Sensitivitas

	Nilai tercatat	Kurang dari 3 bulan	3-12 bulan	12-24 bulan	Lebih dari 24 bulan
Liabilitas					
Simpanan nasabah	5.401.575.311.107	4.762.949.993.182	620.229.625.022	14.944.858.505	3.450.834.398
Simpanan dari bank lain	497.172.374.794	497.172.374.794	-	-	-
Pinjaman yang diterima	150.631.727.539	124.089.353	86.869.566	25.926.771	150.000.000.000
	6.049.379.413.440	5.260.246.457.329	620.316.494.588	14.970.785.276	153.450.834.398
	1.496.349.245.931	(3.828.669.605.234)	(375.372.147.316)	596.028.777.390	5.104.757.062.940

Pengelolaan risiko suku bunga dilengkapi dengan analisa sensitivitas secara periodik untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga yang signifikan. Analisis sensitivitas terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga pasar, dengan asumsi perubahan suku bunga pasar, dengan asumsi perubahan yang simetris pada kurva imbal hasil, posisi laporan posisi keuangan yang konstan menggunakan asumsi perilaku, dengan dampak terhadap aset bersih yang mengandung komponen bunga sebagai berikut :

Sensitivitas terhadap risiko suku bunga	**Kenaikan Bunga**	**Penurunan Bunga**	**Penurunan Bunga**
Fluktuasi suku bunga 1%	(14.963.492.459)	-	14.963.492.459
Fluktuasi suku bunga 2%	(29.926.984.919)	-	29.926.984.919
Fluktuasi suku bunga 3%	(44.890.477.378)	-	44.890.477.378
Fluktuasi suku bunga 4%	(59.853.969.837)	-	59.853.969.837
Fluktuasi suku bunga 5%	(74.817.462.297)	-	74.817.462.297

Resiko Operasional

Sebagai antisipasi terhadap risiko operasional, sejak tahun 2010 bank telah melakukan ujicoba untuk menghitung *Capital Charger* untuk risiko operasional berdasarkan metode *Basic Indicator Approach* (BIA) sebesar prosentase tertentu dari *Gross Income* perseroan. *Capital Charger* untuk risiko operasional ini akan berlaku efektif tahun 2011.Selain struktur organisisasi yang didesign berlandaskan prinsip *four eyes principles* guna memastikan adanya dual control, bank juga melakukan pemetaan terhadap event risiko operasional untuk kemudian melakukan penyempurnaan terhadap metode pengelolaan untuk mencegah berulangnya / memitigasi kejadian risiko operasional tersebut. Untuk meningkatkan *risk awareness*, perseroan mewajibkan seluruh pejabat bank memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko yang lebih tinggi dari ketentuan standar yang diwajibkan oleh Bank Indonesia.

Resiko Hukum

Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, perseroan telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan di Kantor Pusat yang memiliki 2 bagian yaitu Bagian Hukum & Kepatuhan dan Bagian Pengenalan Nasabah.

- Menginventarisir dan memastikan seluruh aktivitas Bank didukung oleh sistem dan prosedur pelaksanaan.
- Mengawasi, mengarahkan dan memastikan kebijakan, sistem dan prosedur bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik intern maupun ekstern.
- Mengevaluasi dan mengkaji perjanjian/kontrak antara bank dengan pihak lainnya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapi bank.
- Melakukan pembahasan, penilaian dan memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Direksi serta unit kerja lain mengenai masalah hukum yang dihadapi oleh bank.
- Memantau pelaksanaan komitmen bank dengan Bank Indonesia guna memastikan komitmen tersebut telah dijalankan oleh bank.
- Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) pada Kantor Cabang.
- Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja kantor pusat dan kantor cabang terhadap ketentuan, peraturan dan perundang - undangan.

40. SEGMENTASI USAHA

Segmentasi usaha menurut geografis
31 Desember 2012

Keterangan	Kodya Makassar	Mamuju, Majene Polman dan Pasangkayu	Kab. Bone	Kab. Bulukumba	Kab. Sengkang	Kab. Pangkep	Jakarta	Lain-lain	Jumlah
Kas	179.261.199.700	27.556.993.350	2.993.380.000	6.183.968.650	6.921.288.400	5.163.348.000	558.078.000	94.381.213.100	323.019.469.200
Giro pada Bank Indonesia	546.679.352.659	-	-	-	-	-	-	-	546.679.352.659
Giro pada bank lain	336.220.505	9.684.246	-	50.603.935	3.635.885	-	1.592.000	3.360.427	405.096.997
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	681.498.112.160	-	-	-	-	-	-	-	681.498.112.160
Surat berharga	202.093.624.115	-	-	-	-	-	-	-	202.093.624.115
Kredit yang diberikan	594.444.455.422	896.061.144.176	334.160.948.823	325.151.089.063	359.312.457.781	166.036.739.848	972.510.080	3.351.041.471.682	6.027.180.816.875
Penyertaan	81.584.000	-	-	-	-	-	-	-	81.584.000
Aset tetap	26.202.302.004	10.131.886.999	3.614.930.125	1.767.288.094	4.330.195.703	1.169.580.789	294.476.547	64.834.046.115	112.344.706.376
Aset pajak tangguhan	9.715.932.788	-	-	-	-	-	-	-	9.715.932.788
Aset lain-lain	61.144.933.708	10.152.612.593	2.717.133.252	2.768.843.203	2.277.454.731	1.332.746.464	461.245.421	30.284.433.566	111.139.402.939
Jumlah Aset	2.301.457.717.061	943.912.321.364	343.486.392.200	335.921.792.945	372.845.032.500	173.702.415.101	2.287.902.048	3.540.544.524.889	8.014.158.098.108
Liabilitas segera	75.868.487.563	12.658.302.024	290.988.457	1.610.464.675	2.995.568.738	270.102.195	1.407.511.181	8.482.163.802	103.583.588.636
Simpanan nasabah	2.318.827.993.336	596.228.304.957	126.149.289.152	85.750.260.893	183.070.424.112	108.656.548.911	381.252.771.454	1.601.639.718.292	5.401.575.311.107
Surat berharga yang diterbitkan	496.506.216.163	-	-	-	-	-	-	-	496.506.216.163
Simpanan dari bank lain	494.876.781.638	110.359.806	-	-	1.651.172	-	-	2.183.582.178	497.172.374.794
Pinjaman yang diterima	150.631.727.539	-	-	-	-	-	-	-	150.631.727.539
Utang pajak	12.201.683.620	386.952.443	119.605.469	119.523.185	119.990.160	177.596.010	117.079.598	1.572.064.633	14.814.495.118
Imbalan pasca kerja	37.088.928.404	-	-	-	-	-	-	-	37.088.928.404
Estimasi komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	88.708.316.738	378.084.421	-	217.572.100	7.746.070	-	-	1.023.822.043	90.335.541.373
Jumlah Liabilitas	3.674.710.135.001	609.762.003.651	126.559.883.078	87.697.820.853	186.195.380.252	109.104.247.116	382.777.362.233	1.614.901.350.948	6.791.708.183.133

40. SEGMENTASI USAHA-*LANJUTAN*

Segmentasi usaha menurut geografis
31 Desember 2012

Keterangan	Kodya Makasar	Mamuju, Majene Polman dan Pasangkayu	Kab. Bone	Kab. Bulukumba	Kab. Sengkang	Kab. Pangkep	Jakarta	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan									
Pendapatan bunga	176.054.282.907	149.338.364.352	61.129.019.292	55.518.847.824	57.962.164.957	30.351.496.955	116.556.305	566.272.727.338	1.096.743.459.929
Jumlah	176.054.282.907	149.338.364.352	61.129.019.292	55.518.847.824	57.962.164.957	30.351.496.955	116.556.305	566.272.727.338	1.096.743.459.929
Beban bunga	198.344.918.807	20.293.182.715	4.554.524.285	3.864.219.509	7.061.294.268	5.809.895.783	47.118.538.869	71.424.264.242	358.470.838.478
Pendapatan (beban) bunga bersih	(22.290.635.900)	129.045.181.637	56.574.495.007	51.654.628.315	50.900.870.688	24.541.601.172	(47.001.982.564)	494.848.463.096	738.272.621.451
Pendapatan operasional lainnya	14.434.363.341	9.510.912.669	2.508.317.519	3.448.116.027	3.357.087.715	1.493.914.258	1.975.632.148	35.358.745.315	72.087.088.992
Beban operasional lainnya	(252.201.265.531)	(20.978.985.274)	(8.048.952.609)	(6.162.176.784)	(8.297.420.420)	(13.585.300.938)	(5.974.295.367)	(110.603.721.737)	(425.852.118.660)
Pendapatan (beban) operasional lainnya bersih	(237.766.902.190)	(11.468.072.605)	(5.540.635.091)	(2.714.060.757)	(4.940.332.705)	(12.091.386.680)	(3.998.663.219)	(75.244.976.422)	(353.765.029.668)
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(26.282.501.921)	(1.885.346.780)	(7.357.551.311)	(13.343.571.135)	(6.060.755.604)	3.224.140.655	72.850.051.494	(29.021.299.445)	(7.876.834.047)
Laba (rugi) sebelum pajak	(286.340.040.010)	115.691.762.252	43.676.308.605	35.596.996.423	39.899.782.378	15.674.355.146	21.849.405.711	390.582.187.230	376.630.757.736
Beban pajak	100.165.051.339	-	-	-	-	-	-	-	100.165.051.339
Laba (rugi) bersih	**(386.505.091.349)**	**115.691.762.252**	**43.676.308.605**	**35.596.996.423**	**39.899.782.378**	**15.674.355.146**	**21.849.405.711**	**390.582.187.230**	**276.465.706.397**

40. SEGMENTASI USAHA-*LANJUTAN*

Segmentasi usaha menurut geografis
31 Desember 2011

Keterangan	Kodya Makassar	Mamuju, Majene Polman dan Pasangkayu	Kab. Bone	Kab. Bulukumba	Kab. Sengkang	Kab. Pangkep	Jakarta	Lain-lain	Jumlah
Kas	144.793.129.288	15.102.750.500	1.417.967.000	2.181.856.950	4.444.055.500	5.584.678.000	433.982.000	126.912.056.925	300.870.476.163
Giro pada Bank Indonesia	469.197.511.881	-	-	-	-	-	-	-	469.197.511.881
Giro pada bank lain	765.015.719	9.575.271	-	50.652.403	4.273.054	-	2.964.000	48.192.842	880.673.289
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	884.445.460.081	-	-	-	-	-	-	2.040.857	884.447.500.937
Surat berharga	169.232.098.280	-	-	-	-	-	-	-	169.232.098.280
Kredit yang diberikan	498.834.620.235	746.210.247.254	362.280.081.714	294.383.718.512	301.465.757.091	177.234.431.351	378.696.033	2.889.374.094.845	5.270.161.647.034
Penyertaan	74.399.000	-	-	-	-	-	-	-	74.399.000
Aset tetap	29.261.437.236	10.062.886.515	3.898.710.498	1.795.733.907	4.758.599.115	935.053.770	306.249.594	66.236.740.650	117.255.411.285
Aset pajak tangguhan	3.790.672.376	-	-	-	-	-	-	-	3.790.672.376
Aset lain-lain	30.505.124.932	8.527.907.508	2.936.255.583	2.523.171.108	2.041.841.608	1.588.775.224	540.716.432	25.897.233.236	74.561.025.632
Jumlah Aset	2.230.899.469.028	779.913.367.048	370.533.014.795	300.935.132.879	312.714.526.369	185.342.938.345	1.662.608.059	3.108.470.359.355	7.290.471.415.877
Liabilitas segera	69.263.727.829	12.245.960.723	921.125.368	6.946.916.895	731.272.335	758.885.890	-	30.875.605.806	121.743.494.846
Simpanan nasabah	2.577.399.252.650	288.256.820.790	123.260.326.449	70.076.526.513	165.158.148.408	124.511.748.405	375.528.033.972	1.566.893.671.369	5.291.084.528.556
Surat berharga yang diterbitkan	494.560.640.529	-	-	-	-	-	-	-	494.560.640.529
Simpanan dari bank lain	2.189.824.412	54.669.289	-	-	471.688.507	-	50.000.000.000	2.772.183.077	55.488.365.285
Pinjaman yang diterima	151.971.137.671	-	-	-	-	-	-	-	151.971.137.671
Hutang pajak	26.623.960.174	456.884.758	157.147.839	219.067.706	261.962.526	74.397.366	166.018.501	2.212.525.878	30.171.964.748
Imbalan pasca kerja	11.470.542.621	-	-	-	-	-	-	-	11.470.542.621
Estimasi komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Liabilitas lainnya	47.542.518.457	1.721.917.472	23.456.230	81.637.247	96.635.364	86.364.465	864.353.257	6.262.268.366	56.679.150.859
Jumlah Liabilitas	3.381.021.604.342	302.736.253.033	124.362.055.886	77.324.148.361	166.719.707.140	125.431.396.126	426.558.405.730	1.609.016.254.496	6.213.169.825.114

40. SEGMENTASI USAHA-*LANJUTAN*

Segmentasi usaha menurut geografis
31 Desember 2011

Keterangan	Kodya Makasar	Mamuju, Majene Polman dan Pasangkayu	Kab. Bone	Kab. Bulukumba	Kab. Sengkang	Kab. Pangkep	Jakarta	Lain-lain	Jumlah
Pendapatan									
Pendapatan bunga	138.061.741.140	124.305.369.518	63.325.275.206	51.736.557.907	41.073.375.866	32.378.598.268	41.196.524	511.669.394.627	962.591.509.056
Jumlah	138.061.741.140	124.305.369.518	63.325.275.206	51.736.557.907	41.073.375.866	32.378.598.268	41.196.524	511.669.394.627	962.591.509.056
Beban bunga	186.566.626.007	12.777.420.634	2.810.358.852	3.373.699.909	5.147.731.756	5.260.235.617	32.689.090.415	74.828.633.795	323.453.796.985
Pendapatan (beban) bunga bersih	(48.504.884.866)	111.527.948.884	60.514.916.354	48.362.857.998	35.925.644.110	27.118.362.651	(32.647.893.891)	436.840.760.832	639.137.712.071
Pendapatan operasional lainnya	47.490.358.051	64.458.149.857	13.895.864.038	6.728.986.491	15.954.939.986	5.522.595.701	5.079.873.307	82.096.306.161	241.227.073.594
Beban operasional lainnya	203.831.531.379	75.120.664.827	17.802.177.336	9.095.851.705	18.781.822.679	8.802.309.674	4.803.234.868	168.037.968.267	506.275.560.736
	(156.341.173.328)	(10.662.514.970)	(3.906.313.298)	(2.366.865.213)	(2.826.882.693)	(3.279.713.973)	276.638.439	(85.941.662.106)	(265.048.487.142)
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	(7.289.855.344)	(509.667.143)	(150.853.302)	(216.594.657)	(190.324.387)	(124.690.467)	(170.830.558)	(2.288.437.026)	(10.941.252.885)
Laba (rugi) sebelum pajak	(212.135.913.538)	100.355.766.770	56.457.749.754	45.779.398.128	32.908.437.030	23.713.958.211	(32.542.086.010)	348.610.661.699	363.147.972.044
Beban pajak	109.659.303.210	-	-	-	-	-	-	-	109.659.303.210
Laba (rugi) bersih	**(321.795.216.748)**	**100.355.766.770**	**56.457.749.754**	**45.779.398.128**	**32.908.437.030**	**23.713.958.211**	**(32.542.086.010)**	**348.610.661.699**	**253.488.668.834**

41. PENERAPAN AWAL PSAK 50 (REVISI 2006) DAN PSAK 55 (REVISI 2006)

Penyesuaian penerapan PSAK 50 (revisi 2006) dan PSAK 55 (revisi 2006) sebagai berikut:

	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian Sehubungan dengan Penerapan PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006)	Setelah Penyesuaian
Kredit	4.385.933.354.053	7.467.919.934	4.393.401.273.987

42. ASET KEUANGAN DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut ini merupakan tabel nilai tercatat dan nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan Bank pada tanggal 31 Desember 2012.

Metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar adalah sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan kecuali surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo, Kredit yang diberikan yang mempunyai resiko nilai wajar, mendekati nilai tercatatnya karena mendekati jengka waktu tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut dan/atau suku bunganya sering ditinjau ulang.

Nilai wajar surat berharga dimiliki hingga jatuh tempo ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2012.

Nilai wajar kredit yang diberikan yang mempunyai resiko nilai wajar dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2012.

	Nilai tercatat				**Nilai wajar**
	Dimiliki hingga jatuh tempo	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Biaya perolehan diamortisasi	Jumlah nilai tercatat	Jumlah nilai wajar
Aset Keuangan					
Kas	-		-	-	-
Giro pada Bank Indonesia		546.679.352.659	-	546.679.352.659	546.679.352.659
Giro pada Bank lain	-	405.096.997	-	405.096.997	405.096.997
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	-	681.498.112.160	-	681.498.112.160	681.498.112.160
Surat berharga	202.093.624.115	-	-	202.093.624.115	202.093.624.115
Kredit yang diberikan	-	6.027.180.816.875	-	6.027.180.816.875	6.027.180.816.875
Liabilitas keuangan					
Simpanan nasabah	-	-	5.401.575.311.107	5.401.575.311.107	5.401.575.311.107
Simpanan dari Bank lain	-	-	497.172.374.794	497.172.374.794	497.172.374.794
Pinjaman yang diterima		-	150.631.727.539	150.631.727.539	150.631.727.539

43. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggungjawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2013

PT BANK SULSELBAR
Jl. DR. Sam Ratulangi No. 16 Makassar 90125
Tel. 0411 - 859171 (*Hunting*)
Fax. 0411 - 859178
www.banksulselbar.co.id